



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, Program Strategis Nasional dan memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.

### Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD terdiri dari:
  - a. bab kesatu, pendahuluan;
  - b. bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab keempat, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. bab kelima, arah kebijakan Pembangunan kabupaten/kota; dan
  - f. bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - g. bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - h. bab kedelapan, penutup.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

RKPD menjadi pedoman untuk:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah;
- b. penyesuaian prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten;
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara provinsi.

## Pasal 6

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Juni 2024  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

NURYANI, SH, MH  
Pangkat : Pembina/IV.a



# GUBERNUR SULAWESI BARAT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, yang memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025. Penetapan RKPD Tahun 2025 ini sebagai komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini adalah wujud dari komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat Sulawesi Barat. Namun demikian, kerja keras harus tetap dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2025 ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Sulawesi Barat ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT.

Mamuju, Juni 2024

Pj. Gubernur Sulawesi Barat



Bahtiar Baharuddin

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GRAFIK .....	xii
DAFTAR DIAGRAM .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II-1
2.1. Informasi Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-208
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	II-356
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-10
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 .....	IV-8
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....	V-1
5.1. Indikator Makro kabupaten/Kota .....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan kabupaten/Kota .....	V-8
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..	VII-1
7.1. Indikator Kinerja Utama.....	VII-1
7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	VII-2
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
2.1.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-2
2.2.	Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-5
2.3.	Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-9
2.4.	Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat .....	II-10
2.5.	Kondisi Kekritisitas DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-10
2.6.	Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-12
2.7.	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (hektar) .....	II-13
2.8.	Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-16
2.9.	Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat .....	II-18
2.10.	Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-21
2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-22
2.12.	Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-26
2.13.	Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (hektar) .....	II-26
2.14.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-27
2.15.	Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-27
2.16.	Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (ekor) .....	II-28
2.17.	Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi) Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-29
2.18.	Data potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-35
2.19.	Data potensi pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-36
2.20.	Data potensi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-36
2.21.	Data Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat ...	II-39
2.22.	Data Potensi Bahan Mineral Provinsi Sulawesi Barat .....	II-41

2.23.	Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-45
2.24.	Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 .....	II-46
2.25.	Destinasi Pariwisata Unggulan Di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-49
2.26.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II-50
2.27.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (persen).....	II-52
2.28.	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Ribu) .....	II-58
2.29.	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (persen).....	II-59
2.30.	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah).....	II-59
2.31.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-61
2.32.	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-62
2.33.	Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Tahun).....	II-63
2.34.	Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Tahun) .....	II-64
2.35.	Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Tahun) .....	II-65
2.36.	Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0-59 Bulan Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020 .....	II-66
2.37.	Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, SKI 2023.....	II-66
2.38.	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-67
2.39.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-68
2.40.	Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2019-2023.....	II-69
2.41.	Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018-2022 .....	II-70
2.42.	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun 2018-2022 .....	II-70
2.43.	Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) .....	II-71
2.44.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 .....	II-72
2.45.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2019-2023 ..	II-72

2.46.	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 (Rupiah).....	II–73
2.47.	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023 .....	II–73
2.48.	Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023.....	II–73
2.49.	Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–74
2.50.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 (rupiah) .....	II–75
2.51.	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2021–2023 (rupiah).....	II–75
2.52.	Aktivitas Bandara Tampa Padang Mamuju Tahun 2019–2023 .....	II–76
2.53.	Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2023.....	II–76
2.54.	Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–77
2.55.	Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023.....	II–78
2.56.	Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II–78
2.57.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–79
2.58.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–79
2.59.	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2021 .....	II–80
2.60.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .....	II–80
2.61.	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .....	II–81
2.62.	Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat.....	II–81
2.63.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019–2023 .....	II–82
2.64.	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–84
2.65.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–85
2.66.	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–86

2.67.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023) .....	II-87
2.68.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023).....	II-87
2.69.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023).....	II-88
2.70.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023) .....	II-88
2.71.	Indikator Kinerja Bidang Pendidikan.....	II-90
2.72.	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2023 .....	II-94
2.73.	Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Tahun 2018-2020 .....	II-96
2.74.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020 .....	II-97
2.75.	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat .....	II-98
2.76.	Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-99
2.77.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II-99
2.78.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-100
2.79.	Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (km) .....	II-101
2.80.	Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-101
2.81.	Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2016-2023 .....	II-102
2.82.	Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2022 .....	II-102
2.83.	Panjang Penanganan Jalan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2012-2022 ....	II-104
2.84.	Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2019-2023.....	II-106
2.85.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-106
2.86.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-107
2.87.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-107
2.88.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	II-108
2.89.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	II-108

2.90.	Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-108
2.91.	Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .....	II-109
2.92.	Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2021-2022 .....	II-110
2.93.	Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 ...	II-110
2.94.	Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP .....	II-110
2.95.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat.....	II-110
2.96.	Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 .....	II-110
2.97.	Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-111
2.98.	Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-112
2.99.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-113
2.100.	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-114
2.101.	Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II-116
2.102.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2019–2023.....	II-117
2.103.	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II-117
2.104.	Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2023.....	II-118
2.105.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-122
2.106.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-123
2.107.	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-124
2.108.	Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton) .....	II-124
2.109.	Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 .....	II-125
2.110.	Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II-125
2.111.	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022.....	II-125
2.112.	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II-126
2.113.	Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018.....	II-126
2.114.	Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .....	II-126
2.115.	Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021 .....	II-127

2.116.	Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021 .....	II-127
2.117.	Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisian Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (Hektar) .....	II-128
2.118.	Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-129
2.119.	Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-129
2.120.	Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-129
2.121.	Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 .....	II-129
2.122.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 ...	II-130
2.123.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023 .....	II-131
2.124.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018-2022.....	II-134
2.125.	Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.....	II-136
2.126.	Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-137
2.127.	Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	II-137
2.128.	Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2019-2023 .....	II-138
2.129.	Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023.....	II-138
2.130.	Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-138
2.131.	Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-139
2.132.	Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2023 .....	II-139
2.133.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2019-2023 .....	II-139
2.134.	Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat .....	II-140
2.135.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022 .....	II-140
2.136.	Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .....	II-141
2.137.	WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 .....	II-141
2.138.	Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-141
2.139.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 .....	II-141
2.140.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022.....	II-142
2.141.	Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-142
2.142.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023.....	II-143

2.143. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–143
2.144. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	II–144
2.145. Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–145
2.146. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Tahun 2019–2023 .....	II–146
2.147. Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–147
2.148. Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2023.....	II–147
2.149. Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–147
2.150. Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2019–2023.....	II–149
2.151. Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2019–2023 .....	II–149
2.152. Jumlah Tabel Data Statistik Sektorial Yang Dipublikasikan Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2022 .....	II–149
2.153. Pengelolaan Data Statistik Sektorial Provinsi Sulawesi Barat .....	II–150
2.154. Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018.....	II–151
2.155. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat.....	II–152
2.156. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .....	II–153
2.157. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021.....	II–154
2.158. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .....	II–154
2.159. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	II–155
2.160. Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021 .....	II–157
2.161. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–157
2.162. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .....	II–158
2.163. Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2018–2022.....	II–159
2.164. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2019–2023.....	II–159

2.165. Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–161
2.166. Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–163
2.167. Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Ton) .....	II–163
2.168. Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (ton/ha) .....	II–163
2.169. Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Ha).....	II–164
2.170. Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2020–2023 .....	II–164
2.171. Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–167
2.172. Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat .....	II–170
2.173. Daftar Kelompok Tani Hutan Teregister pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.....	II–172
2.174. Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional .....	II–183
2.175. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat .....	II–184
2.176. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023.....	II–186
2.177. Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–187
2.178. Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–187
2.179. Ratio Eletrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–188
2.180. Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dan 2023 .....	II–188
2.181. Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM .....	II–188
2.182. Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II–189
2.183. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–189
2.184. Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023 .....	II–190
2.185. Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal .....	II–191
2.186. Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat Tahun 2014-2018.....	II–191
2.187. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian .....	II–192
2.188. Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun 2016 – 2021 .....	II–196
2.189. Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2023 .....	II–196

2.190.	Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	II-197
2.191.	Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018–2022 .....	II-199
2.192.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan.....	II-200
2.193.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan .....	II-200
2.194.	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2023.....	II-201
2.195.	Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .....	II-201
2.196.	Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .....	II-202
2.197.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 .....	II-203
2.198.	Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2019–2023.....	II-204
2.199.	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019–2023 .....	II-204
2.200.	Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	II-206
2.201.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2018–2021 .....	II-207
2.202.	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat.....	II-209
3.1.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026.....	III-14
3.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026.....	III-16
3.3.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026.....	III-18
4.1.	Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026.....	IV-3
4.2.	Agenda Pembangunan Nasional di Sulawesi Barat.....	IV-6
5.1.	Highlight Kebijakan Kabupaten Majene Tahun 2025 .....	V-18
5.2.	Highlight Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.....	V-21
5.3.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamasa Tahun 2025 .....	V-23
5.4.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 .....	V-26
5.5.	Highlight Kebijakan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 .....	V-29
5.6.	Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 .....	V-31
5.7.	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2022-2023.....	V-34
5.8.	Kategori Capaian IPM Kabupaten .....	V-34
5.9.	Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2025.....	V-35
5.10.	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2022-2023 .....	V-36
5.11.	Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2025 .....	V-36
5.12.	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten.....	V-37

5.13.	Kategori Capaian TPT Kabupaten.....	V-37
5.14.	Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten .....	V-38
5.15.	Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten .....	V-39
5.16.	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten.....	V-39
5.17.	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten .....	V-40
5.18.	Capaian Indeks Gini Rasio Kabupaten .....	V-41
5.19.	Penetapan Indeks Gini Rasio Kabupaten .....	V-41
5.20.	Target Indikator Utama Pembangunan.....	V-42
	Kategori Capaian TPT Kabupaten.....	V-6
6.1.	Daftar Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	VI-2
7.1.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat.....	VII-1
7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VII-3

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (ribu) .....	II-20
2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023 .....	II-20
2.3. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-21
2.4. Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-50
2.5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (persen) .....	II-51
2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen) .....	II-51
2.7. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2019–2023 .....	II-53
2.8. Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen) .....	II-54
2.9. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah) .....	II-54
2.10. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2021–2023 (Juta Rupiah) .....	II-55
2.11. Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-55
2.12. Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2022 .....	II-56
2.13. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019–2023 (Persen) .....	II-57
2.14. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 (Persen) .....	II-58
2.15. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-52
2.16. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-60
2.17. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 .....	II-61
2.18. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen) .....	II-62
2.19. Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (Tahun) .....	II-63
2.20. Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun) .....	II-64
2.21. Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun) .....	II-65
2.22. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II-68
2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023 .....	II-68

2.24. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022.....	II–70
2.25. Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah).....	II–71
2.26. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2017–2021 .....	II–76
2.27. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023 .....	II–82
2.28. Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II–83
2.29. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 ....	II–86
2.30. Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2022–2023 .....	II–88
2.31. Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 .....	II–90
2.32. Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2019–2023 .....	II–91
2.33. Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023 .....	II–92
2.34. Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II–93
2.35. Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II–93
2.36. Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II–94
2.37. Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2019–2023.....	II–95
2.38. Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2019–2023 .....	II–95
2.39. Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2019–2023 .....	II–96
2.40. Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat .....	II–107
2.41. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2019–2023 .....	II–114
2.42. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023....	II–115
2.43. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	II–115
2.44. Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–118
2.45. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 – 2023.....	II–119
2.46. Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–121
2.47. Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–121
2.48. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2019–2023.....	II–122
2.49. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–130
2.50. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–130

2.51. Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–131
2.52. Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–132
2.53. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–132
2.54. Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–133
2.55. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–135
2.56. Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–144
2.57. Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 .....	II–144
2.58. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–145
2.59. Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .....	II–148
2.60. Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 .....	II–152
2.61. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	II–158
2.62. Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022.....	II–160
2.63. Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2019–2023 .....	II–161
2.64. Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2019–2023 .....	II–162
2.65. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) .....	II–167
2.66. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2019–2023.....	II–168
2.67. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2019–2023 (Persen) .....	II–168
2.68. Produksi Kayu Hutan di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 (m <sup>3</sup> ) .....	II–169
2.69. Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen) .....	II–198
2.70. Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan .....	II–198
2.71. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) .....	II–198
2.72. Nilai Reformasi Birokrasi .....	II–361
2.73. Nilai SAKIP.....	II–362
3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global .....	III–2
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	III–4
3.3. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen) .....	III–7
3.4. Pertumbuhan Beberapa Kategori PDRB Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) (persen), 2021–2023.....	III–8
3.5. Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023.....	III–9
3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 .....	III–10

5.1.	Perbandingan Angka Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 .....	V-7
5.2.	Perbandingan Angka Prevalensi Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023.....	V-7
5.3.	Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional 2020-2023 .....	V-9
5.4.	Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 .....	V-10
5.5.	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten Tahun 2023 (Ribu Jiwa) .....	V-10
5.6.	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten Tahun 2023 (%) .....	V-11
5.7.	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tahun 2022-2023 .....	V-35
5.8.	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Pertumbuhan TPT Kabupaten Tahun 2022-2023 .....	V-38
5.9.	Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2021-2022 .....	V-40

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.....	II-22
2.2. Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 .....	II-58
2.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023...	II-74
2.4. Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2023 .....	II-120

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat .....	II-3
2.2. Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat.....	II-4
2.3. Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat .....	II-7
2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat .....	II-10
2.5. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.....	II-14
2.6. Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat .....	II-19
2.7. Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat .....	II-24
2.8. Peta Lokasi Potensial PLTB Wilayah Sulawesi Barat .....	II-37
2.9. Rincian Potensi Panas Bumi Provinsi Sulawesi Barat .....	II-38
2.10. Data Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Provinsi Sulawesi Barat .....	II-41
2.11. Peta Potensi Zona Mineralisasi Mineral Logam dan Batu bara Provinsi Sulawesi Barat .....	II-43
2.12. Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat .....	II-182
5.1. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tahun 2021-2022 .....	V-2
5.2. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Pertumbuhan TPT Kabupaten Tahun 2021-2022 .....	V-5
5.3. Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2021-2022 .....	V-6
5.4. Kerangka Kerja Gerakan Mari Tangani Stunting (MATANNING) .....	V-15
5.5. Akar Permasalahan Tingginya Angka Stunting.....	V-16

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penyusunan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan RKPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan Program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan, disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir dan penetapan.

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023–2026. Selain memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, juga memuat program prioritas pembangunan daerah dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi, sehingga RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi sangat strategis dalam pembangunan daerah kedepannya.

Penyusunan RKPD Tahun 2025, dilakukan dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengenai beberapa pendekatan dalam rangkaian tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, *bottom up dan top down*.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor.....);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 106);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 19);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPD Tahun 2023–2026 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026.

Keterkaitannya dengan RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan antar provinsi yang berbatasan serta prioritas pembangunan nasional.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika Dokumen RKPD.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, memuat (1) Kondisi Umum Daerah menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, hal ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari renja, renstra dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), serta kebijakan bidang ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat; (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 yang mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Barat 2023–2026 yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (2) Prioritas Pembangunan Tahun 2025, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah tahun rencana.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**, mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Tahun 2023–2026, serta rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII PENUTUP**, memuat kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Dalam bab ini, diberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi suatu daerah, mencakup informasi terkait geografi, demografi, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis kinerja tersebut memfokuskan pada tiga aspek utama, yakni kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum. Bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pencapaian pembangunan daerah yang telah dilakukan sejauh ini, bab ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek yang memerlukan peningkatan guna meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum ini dijadikan dasar atau landasan dalam perencanaan pembangunan, mencakup aspek geografi, demografi, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

### **2.1 Informasi Kondisi Umum Daerah**

#### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah**

###### **a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0°12'–3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15"–119°54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka) Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Barat terbentuk dari semangat "*Allamungan Batu di Luyo*" yang menyatukan Mandar dalam perserikatan "*Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" melalui sebuah muktamar yang menghasilkan konsep "*Sipamandar*" (saling memperkuat). Melalui perjuangan panjang dari seluruh lapisan masyarakat Mandar, beserta dukungan pemerintah, akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004. Undang-Undang ini menandai awal dari sejarah pembentukan Provinsi ke-33 di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki ibu kota di Mamuju.

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam sektor pemerintahan. Pada fase awal pembentukannya, provinsi ini terdiri dari 5 (lima) kabupaten. Namun, pada tahun 2013, terjadi pemekaran dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah yang secara terpisah dari Kabupaten Mamuju. Akibatnya, jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat bertambah menjadi 6 (enam) kabupaten, meliputi:

1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2°8'7"-2°57'50" LS dan 117°3'57"-119°51'17" BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2°38'45"-3°38'15" LS dan 118°45'00"-119°4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 99 Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3°4'10"-3°32'00" LS dan 118°40'27"-119°29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 98 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2°39'216"-3°0'19'288" LS dan 119°0'216"-119°38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 65 km.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 0°40'10"-1°50'12" LS dan 119°25'26"-119°50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 175 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1°43'33"-2°18'54" LS dan 119°7'35"-119°52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 82 km.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

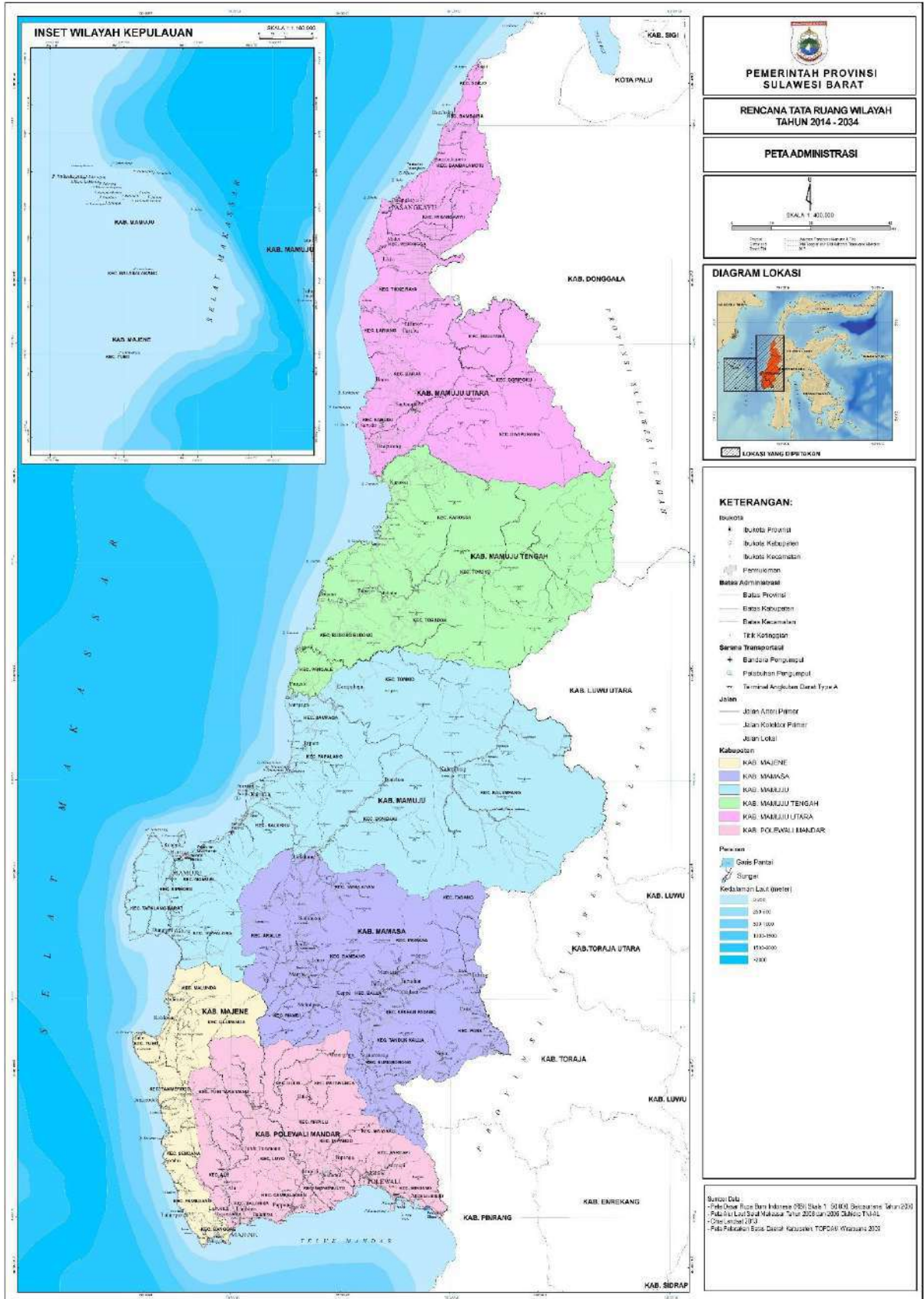
NO	KABUPATEN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	900,92	5,43
2.	Polewali Mandar	2.074,12	12,50
3.	Mamasa	3.015,95	18,17
4.	Mamuju	4.942,25	29,78
5.	Pasangkayu	2.903,18	17,49
6.	Mamuju Tengah	2.758,34	16,62
<b>TOTAL (SULAWESI BARAT)</b>		<b>16.594,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Tahun 2016, BPS Provinsi Sulawesi Barat merilis data luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat mencapai 37.129,18 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 54,79 persen wilayah laut (20.342 km<sup>2</sup>) dan 45,21 persen (16.787,18 km<sup>2</sup>) daratan. Namun, angka tersebut berubah di tahun 2022 berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat berkurang menjadi 16.594,74 km<sup>2</sup>.

Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbagi ke dalam 6 kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 73 kelurahan. Kabupaten terluas adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4.942,25 (29,78 terhadap luas wilayah provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas wilayah sebesar 900,92 dengan luas wilayah provinsi Sulawesi Barat sebesar 5,43. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

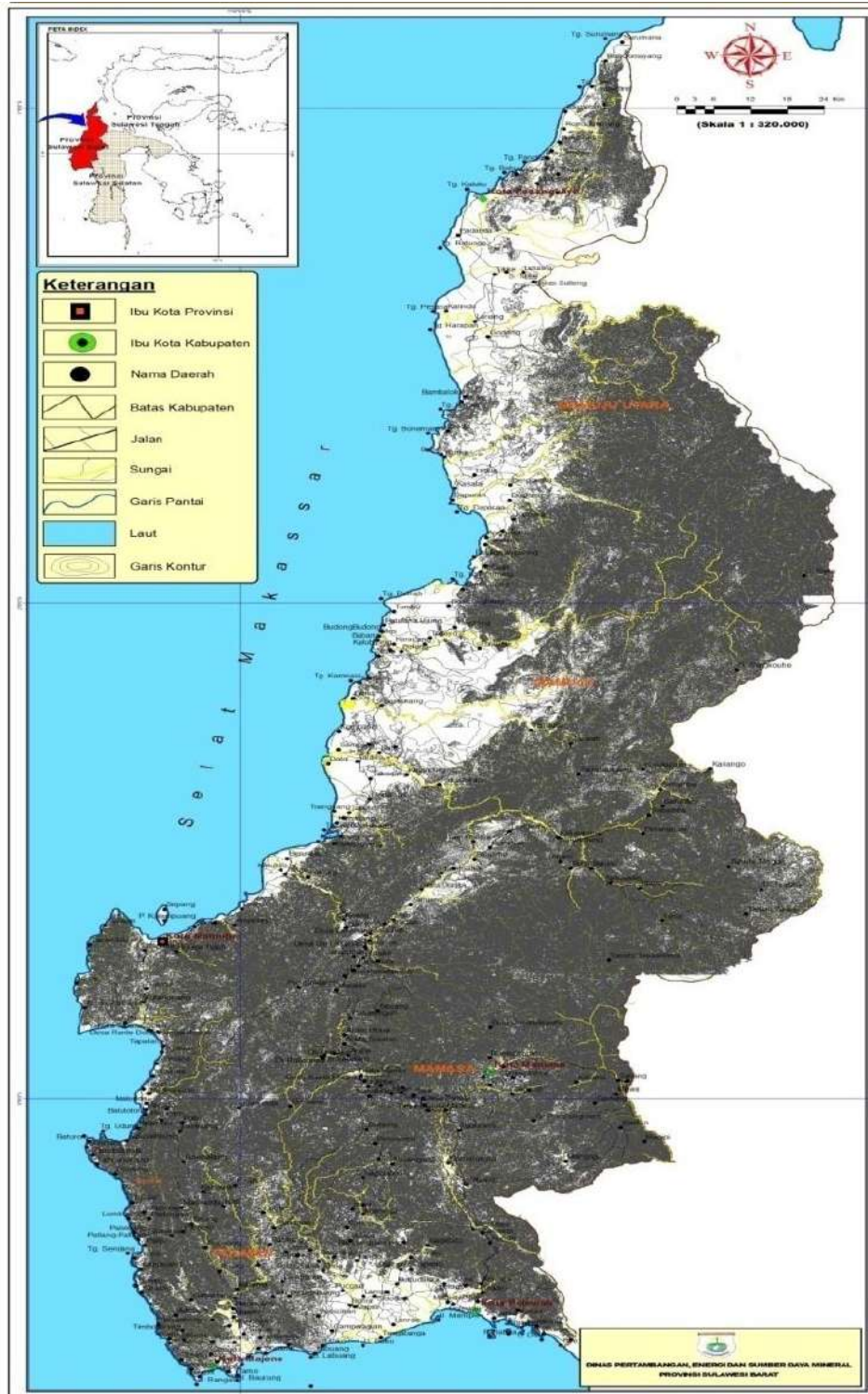


Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

**b. Topografi**

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

**Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

**Tabel 2.2 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (meter)
Majene	11	Seteng	1.001
Polewali Mandar	28	Tetuho	1.448
Mamasa	31	Mambulilling	2.873
Mamuju	109	Gandang Dewata	3.037
Pasangkayu	14	Pandabatu	284

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2024

### c. Geologi

Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah–Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen–Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal–Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit–basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah–Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunung api Talaya. Batuan Gunung api Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit–basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan

menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit–basal.

Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batu pasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah–Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, tempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosen dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

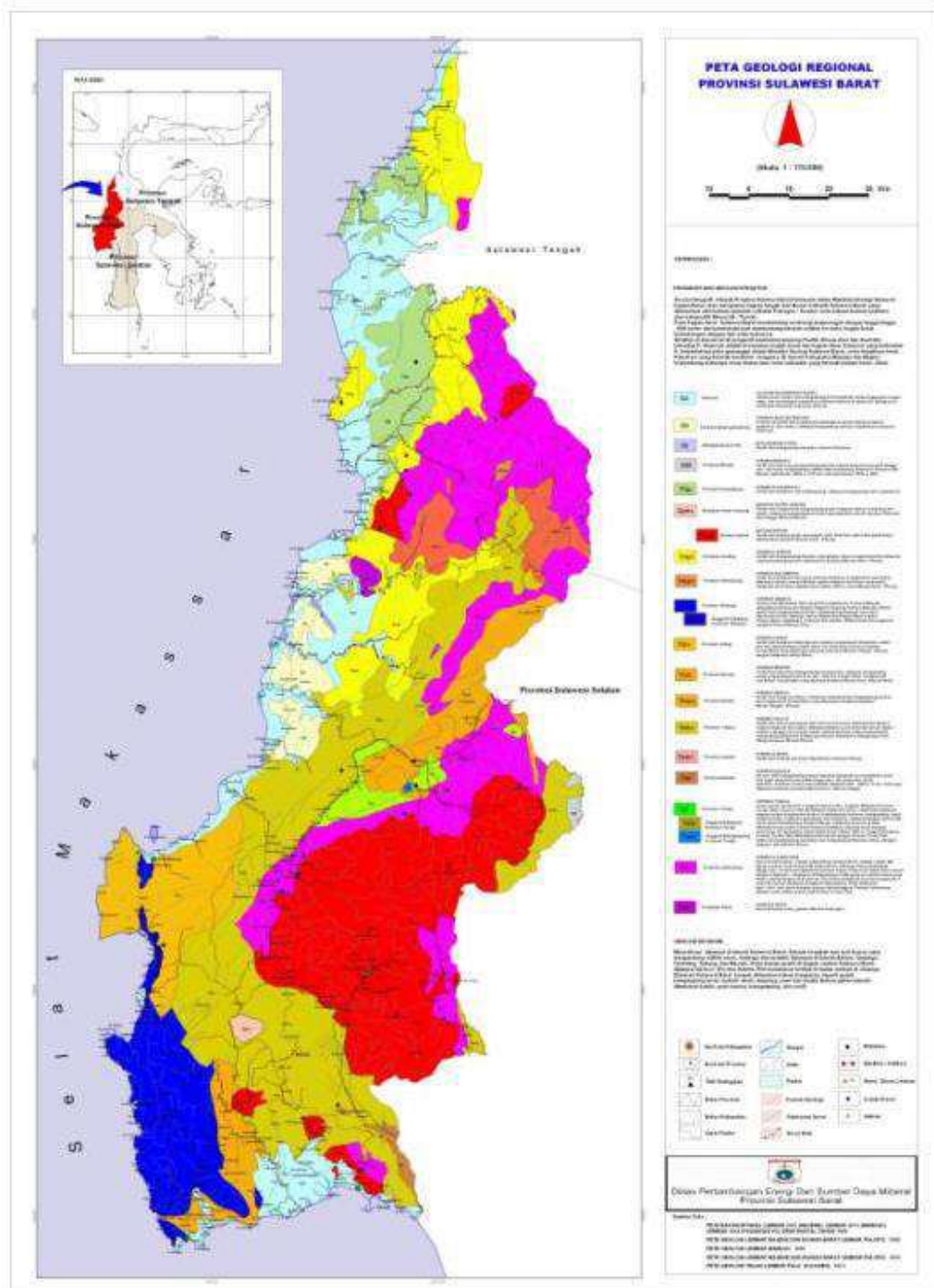
Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir gampingan, napal tuffan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batu gamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batu pasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.

Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuan ini didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batu pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah–Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi Barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter di mana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budong-budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batu pasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah–Pliosen.

Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan lipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

**Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan flysch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

- a. Fold belt aktif di mana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
- b. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basement, paparan karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
- c. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur–Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut di mana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistosen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

#### **d. Hidrologi**

Sejumlah sungai yang tergolong besar mengalir wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing–masing sekitar 150 km.

**Tabel 2.3 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat Tahun 2023**

<b>Nama Sungai</b>	<b>Panjang (km)</b>	<b>Lokasi</b>
Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
Matakali	28	Polewali Mandar
Mambi	95	Polewali Mandar
Mandar	90	Polewali Mandar
Manyamba	28	Majene
Malunda	38	Majene
Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
Karama	150	Mamuju

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan

Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

**Tabel 2.4 Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat**

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas DAS (ha)	Areal kritis (ha)	Ekstensi kekritisian (% areal)	Frekuensi banjir di hilir	Fungsi dan peran DAS								Arahan kebijakan		
					PLTA (MW)	Irigasi	Air baku	Pert. & perkeb.	Wallacea Ecoregion	Ecotourism	Keragaman ekosistem	Stabilisasi ekosistem	Konser-vasi	Preser-vasi	Urutan prioritas
Budong-Budong/Topoyo	326.579	65.756	20,1	Tinggi, pengaruhi jalan negara	124	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karama	344.899	84.659	24,5	Tinggi	115++	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karossa/Benggaulu	151.395	10.024	6,6	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Lariang/Pasang Kayu	167.587	11.688	7,0	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Malunda	67.767	1.549	2,3	Sedang	✗	✗	Kecil	Sedang	Penting	Potensial	Sedang	Penting		✓	III
Mamasa	89.106	13.872	15,6	Wil.hulu DAS	✓	✗	Besar	Sedang	Penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		II
Mamuju	149.487	67.067	44,9	Sedang	✗	✗	Besar	Sedang	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Mandar	93.462	36.656	39,2	Sedang	✗	✗	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Sedang	Penting	✓		III
Mapilli	229.644	77.983	34,0	Tinggi	174	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	27,1	Wil.hulu DAS	✗	✓	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		III
<b>Total</b>	<b>1.691.780</b>	<b>388.702</b>	<b>23,0</b>												

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha, juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisian Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Kondisi Kekritisian DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat**

DAS	Tdk Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS (ha)	Persen (%)
DAS Budong-Budong	260.823	80	65.756	20	326.579	19,3
DAS Karama	260.240	75	84.659	25	344.899	20,4
DAS Karossa	141.362	93	10.024	7	151.386	8,9
DAS Lariang	155.897	93	11.688	7	167.585	9,9
DAS Malunda	66.218	98	1.549	2	67.767	4,0
DAS Mamasa	75.234	84	13.872	16	89.106	5,3
DAS Mamuju	82.415	55	67.066	45	149.481	8,8
DAS Mandar	56.772	61	36.656	39	93.428	5,5
DAS Mapilli	151.659	66	77.983	34	229.643	13,6
DAS Saddang	52.401	73	19.448	27	71.850	4,2
<b>Grand Total</b>	<b>1.303.022</b>	<b>77</b>	<b>388.701</b>	<b>23</b>	<b>1.691.723</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014–2034

Pengembangan DAS ke depan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktivitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas

penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisian yang besar.

**e. Klimatologi**

Iklm memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan, terutama pada siklus hidrologi, sumber daya tanah, air, dan tanaman. Secara umum, ketersediaan air untuk kehidupan di permukaan tanah sangat dipengaruhi oleh iklim dan ekosistemnya. Provinsi ini berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Hal ini sering kali menyebabkan pencucian hara dan pergerakan partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran air, maupun secara vertikal di dalam tanah dari lapisan atas ke lapisan tanah di bawahnya.

Iklm di wilayah Sulawesi Barat umumnya bersifat tropis karena wilayah tersebut dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang berada di tepi pantai dan berhadapan langsung dengan Selat Makassar, Sulawesi Barat mengalami pola suhu udara yang dipengaruhi oleh musim angin laut. Pada tahun 2023 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 21,00°C hingga 35,20°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,12°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 39,00 persen sampai dengan 100,00 persen dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 81,29 persen. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

**Tabel 2.6 Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Bulan	Suhu Udara (°c)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)		
	Rata-rata	Minimal	Rata-Rata	Maksimal
Januari	28,20	51,00	73,30	97,00
Februari	28,00	59,00	74,70	96,00
Maret	29,00	59,00	73,10	98,00
April	30,50	56,00	70,60	99,00
Mei	31,30	55,00	69,20	98,00
Juni	30,00	55,00	72,50	99,00
Juli	29,00	58,00	72,70	94,00
Agustus	29,70	50,00	69,20	81,00
September	29,70	61,00	71,20	94,00
Oktober	30,30	58,00	69,40	90,00
November	29,70	61,00	73,60	91,00
29,10	29,10	66,00	78,50	99,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**f. Penggunaan Lahan**

Dalam rentang waktu perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, mengalami sejumlah perubahan yang memerlukan pemutakhiran data spasial. Proses ini mencakup pengukuhan kawasan hutan dengan mempertimbangkan aspek tata batas, perubahan fungsi, dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Pada tahun 2023, luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1.068.233,99 hektar. Rincian luas

kawasan hutan untuk setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (hektar)**

Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Perairan		
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas
Majene	44.405,18	-	7.590,28
Polewali Mandar	70.217,27	778,98	23.030,94
Mamasa	86.308,93	68.047,54	49.359,56
Mamuju	140.509,00	74.646,67	101.749,70
Pasangkayu	98.283,37	195,43	55.463,11
Mamuju Tengah	16.583,79	44.449,35	94.432,83
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>456.307,54</b>	<b>188.117,97</b>	<b>331.626,42</b>

*Lanjutan Tabel*

Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan		
	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Majene	6,33	-	52.001,79
Polewali Mandar	-	-	94.027,19
Mamasa	-	417,12	204.133,15
Mamuju	44.282,62	10.801,76	371.989,75
Pasangkayu	2.335,02	8.795,10	165.072,03
Mamuju Tengah	24.319,73	1.224,38	181.010,08
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>70.943,70</b>	<b>21.238,36</b>	<b>1.069.233,99</b>

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2024*

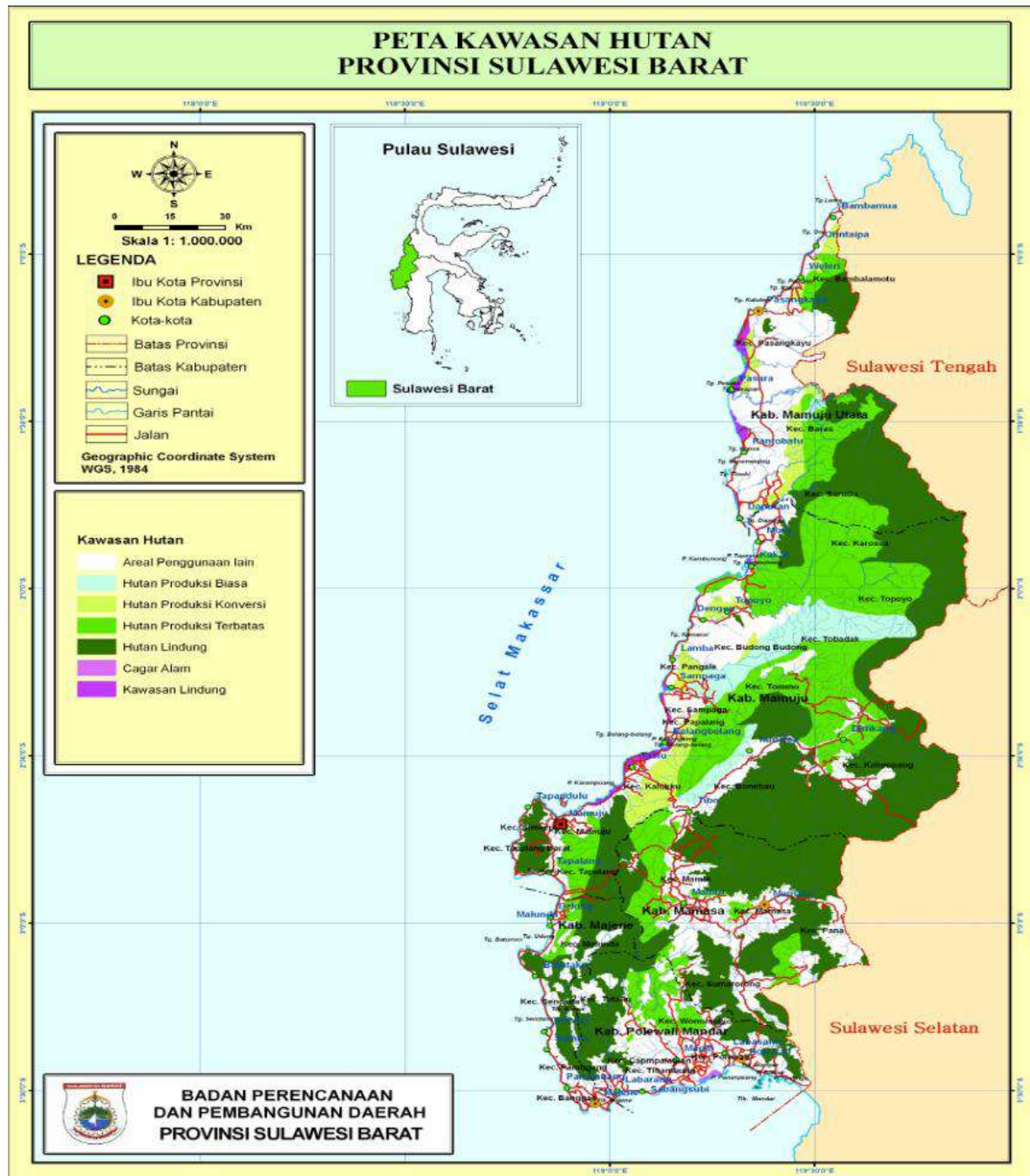
a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (2014-2034) seluas 665.763,85 Ha, meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas Kawasan Hutan Lindung di Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 (RTRW Prov. Sulbar 2014-2034) yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutan Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.

2. Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya.

Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Gandang Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Bala balakang, Taman wisata Goa alam.

3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a) Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- b) Tsunami di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- c) Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Tengah;
- d) Rawan Banjir di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- e) Rawan Abrasi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- f) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat;
- g) Potensi banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- h) Potensi likuifaksi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- i) Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
- j) Potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Di mana kawasan budidaya Provinsi meliputi : Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

### **2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana**

Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu

daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2023 relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

**Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Tanah Longsor	Banjir	Kekerin gan	Cuaca Ekstrim	Kebakaran Hutan dan Lahan	Gelombang Pasang/Abrasi
Majene	-	1	-	2	-	-
Polewali Mandar	1	4	-	12	-	-
Mamasa	16	1	-	1	-	-
Mamuju	-	2	-	-	-	-
Pasangkayu	-	1	-	3	-	-
Mamuju Tengah	-	5	1	2	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
- b. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
- c. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).
- d. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).

- e. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, BAMBALOKA, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
- f. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene.

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh tahun (Tahun 2014–2024) atau dua puluh tahun mendatang (Tahun 2014–2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa :

- 1) Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
- 2) Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
- 3) Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Simboro, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang.

Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumber daya lahan yang ada, kawasan tertentu di Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap longsor. potensi kekritisannya, erosi dan longsor di Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor.

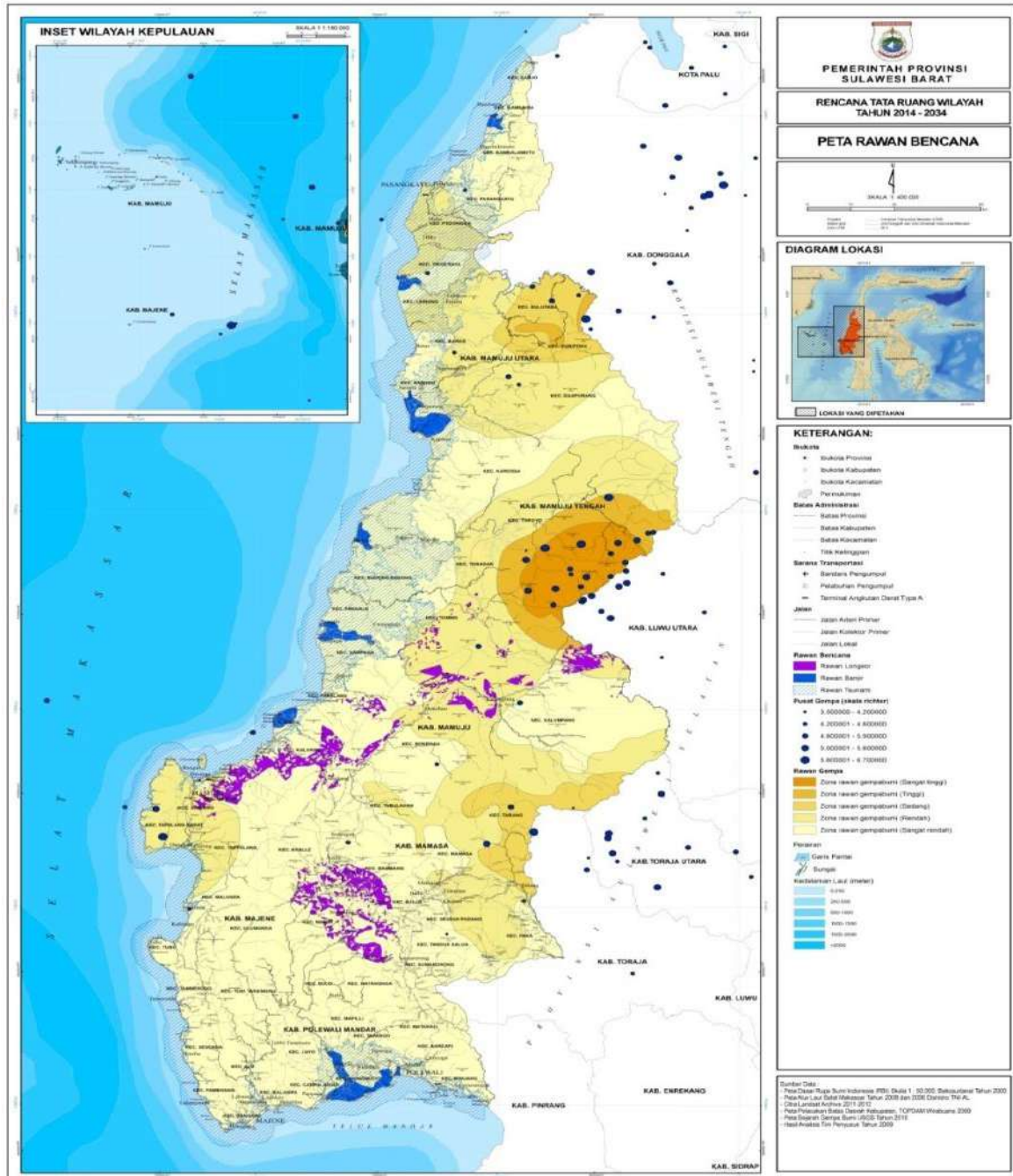
**Tabel 2.9 Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat**

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas (ha)	Areal kritis (ha)	Potensi kekritisian			Potensi Erosi			Potensi longsor			Arahan kebijakan		
			Kriteria	%	Rank	Kriteria	%	Rank	Kategori	%	Rank	Konse rvasi	Preser vasi	Urutan prioritas
Budong-Budong	326.579	65.756	Kritis	20,1	6	Tinggi-Sgt tinggi	0,2	7	Cukup tinggi-Tinggi	6,8	9	✓	✓	I
Karama	344.899	84.659	Kritis	24,5	5	Tinggi-Sgt tinggi	4,4	2	Cukup tinggi-Tinggi	17,8	7	✓	✓	I
Karossa/Benggoulu	151.395	10.024	Kritis	6,6	9	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	4,9	10	✓	✓	II
Lariang/Pasangkayu	167.587	11.688	Kritis	7,0	8	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	6,9	8	✓	✓	II
Malunda	67.767	1.549	Kritis	2,3	10	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	49,7	3		✓	III
Mamasa	89.106	13.872	Kritis	15,6	7	Tinggi-Sgt tinggi	3,2	4	Cukup tinggi-Tinggi	56,9	2	✓		II
Mamuju	149.487	67.067	Kritis	44,9	1	Tinggi-Sgt tinggi	5,9	1	Cukup tinggi-Tinggi	32,2	6	✓	✓	I
Mandar	93.462	36.656	Kritis	39,2	2	Tinggi-Sgt tinggi	1,8	5	Cukup tinggi-Tinggi	65,5	1	✓		III
Mapilli	229.644	77.983	Kritis	34,0	3	Tinggi-Sgt tinggi	3,5	3	Cukup tinggi-Tinggi	43,0	5	✓	✓	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	Kritis	27,1	4	Tinggi-Sgt tinggi	0,3	6	Cukup tinggi-Tinggi	46,8	4	✓		III
<b>Total</b>	<b>1.691.780</b>	<b>388.702</b>		<b>23,0</b>										

*Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034*

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat



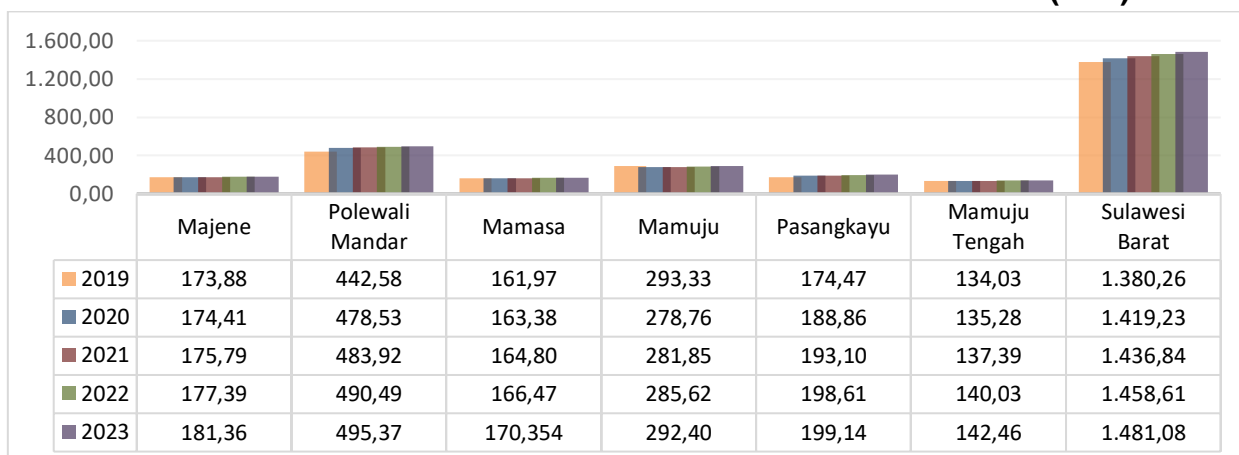
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

## 2.1.2 Demografi

### 2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.481.077 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 750.773 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 730.304 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya terdapat 103 laki laki untuk setiap 100 perempuan.

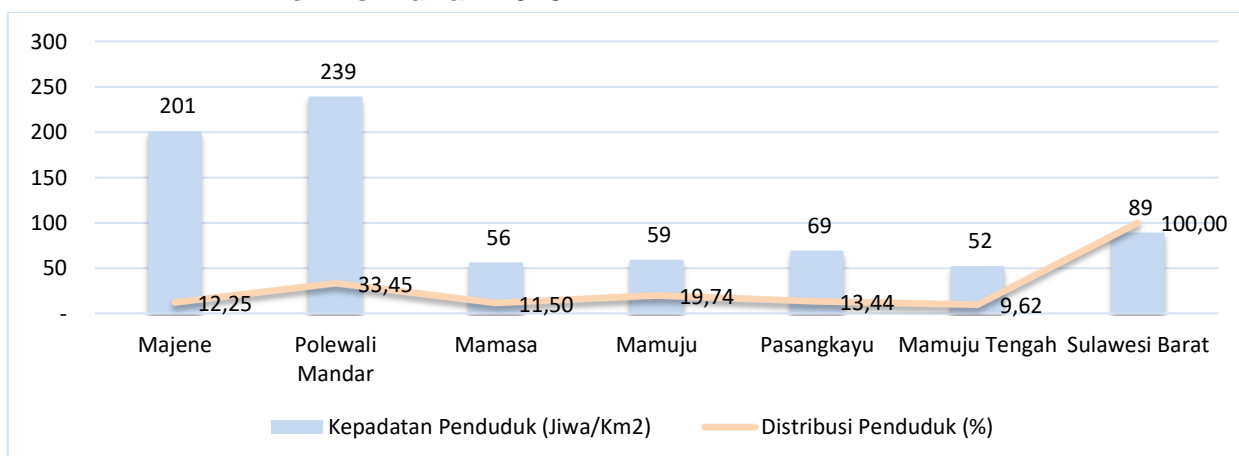
**Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (ribu)**



Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2020–2024

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,45 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,62 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 239 jiwa/km<sup>2</sup>, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 201 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Pasangkayu 69 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Mamuju 59 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan sebesar 56 jiwa/km<sup>2</sup>, serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 52 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2023.

**Grafik 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023**



Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 83,85 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 13,32 persen serta agama yang minoritas yaitu Katolik, Budha dan Hindu dengan jumlahnya di bawah rata-rata tiga persen. Adapun gambaran persentase penduduk menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10 Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

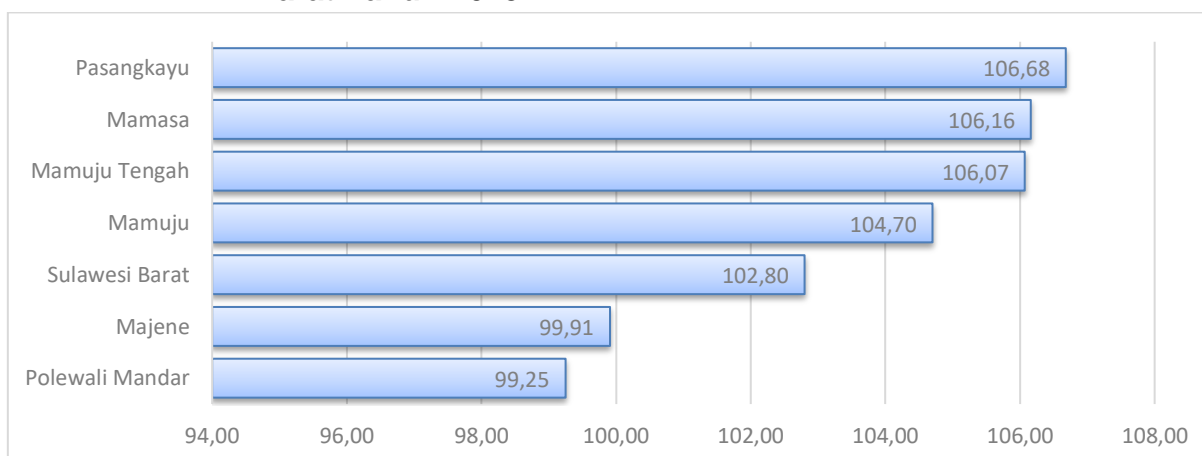
Kabupaten	Persentase Penduduk					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Majene	99,85	0,09	0,04	0,00	0,01	0
Polewali Mandar	98,48	1,16	0,32	0,02	0,02	0
Mamasa	17,17	75,09	3,07	1,46	0,00	3,22
Mamuju	85,19	13,10	0,68	0,98	0,04	0,01
Pasangkayu	86,44	7,14	2,02	4,37	0,01	0,03
Mamuju Tengah	84,07	9,26	2,39	4,15	0,12	0,01
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>83,85</b>	<b>13,32</b>	<b>1,09</b>	<b>1,34</b>	<b>0,03</b>	<b>0,37</b>

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

### 2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh laki-laki di mana perbandingan rasionya sebesar 102,80. Rasio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda di mana untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Majene mempunyai rasio jenis kelamin di bawah dari nilai 100 (seratus) sebesar 99 untuk Kabupaten Polewali Mandar artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 106,68 sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai rasio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

**Grafik 2.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



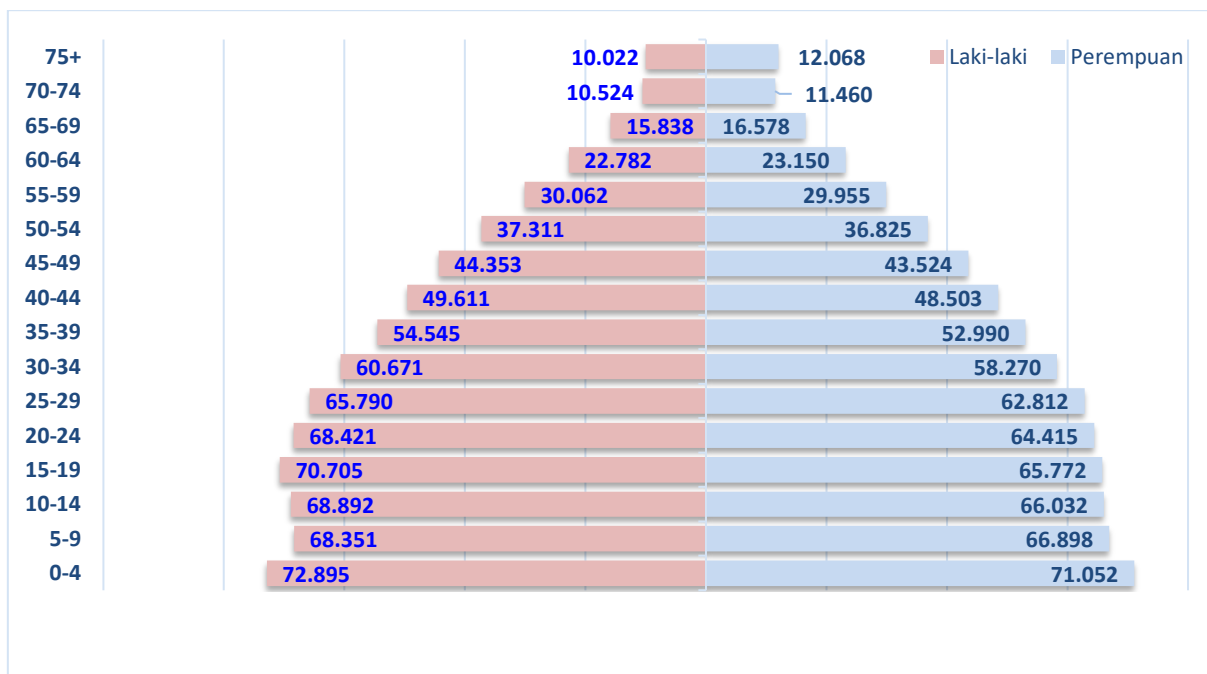
Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

### 2.1.2.3 Struktur Usia Penduduk

Struktur Usia penduduk di Sulawesi Barat di mana angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 409.475 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 975.630 jiwa serta jumlah penduduk usia tidak produktif  $\geq$  65 tahun sebanyak 73.501 jiwa. Disamping itu Struktur Usia

penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada struktur umur muda di mana persentase penduduk umur muda jauh lebih tinggi dibanding yang berumur tua. Dari piramida penduduk di bawah ini terlihat bahwa bagian dasar dari piramida yang cukup lebar dan bagian puncak yang sempit mencerminkan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif masih tinggi.

**Diagram 2.1 Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	72.895	71.052	143.947
5 – 9	68.351	66.898	135.249
10 – 14	68.892	66.032	134.924
15 – 19	70.705	65.772	136.477
20 – 24	68.421	64.415	132. 836
25 – 29	65.790	62.812	128.602
30 – 34	60.671	58.270	118.941
35 – 39	54.545	52.990	107.535
40 – 44	49.611	48.503	98.114
45 – 49	44.353	43.524	87.877
50 – 54	37.311	36.825	74.136
55 – 59	30.062	29.955	60.017
60 – 64	22.782	23.150	45.932
65 – 69	15.838	16.578	32.416
70 – 74	10.524	11.460	21.984
75+	10.022	12.068	22.090
<b>Jumlah</b>	<b>750.773</b>	<b>730.304</b>	<b>1.481.077</b>

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Apabila dilihat dari struktur usia penduduk menurut kelompok umur tahun 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 990.467 lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun) sebesar 490.610 jiwa. Proporsi penduduk usia 0–14 Tahun turun dari 28,90 persen pada tahun 2020 menjadi 27,98 persen pada tahun 2023. Dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15–64 tahun meningkat dari 66,32 persen menjadi 66,87 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 4,78 persen menjadi 5,16 persen.

### **2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah**

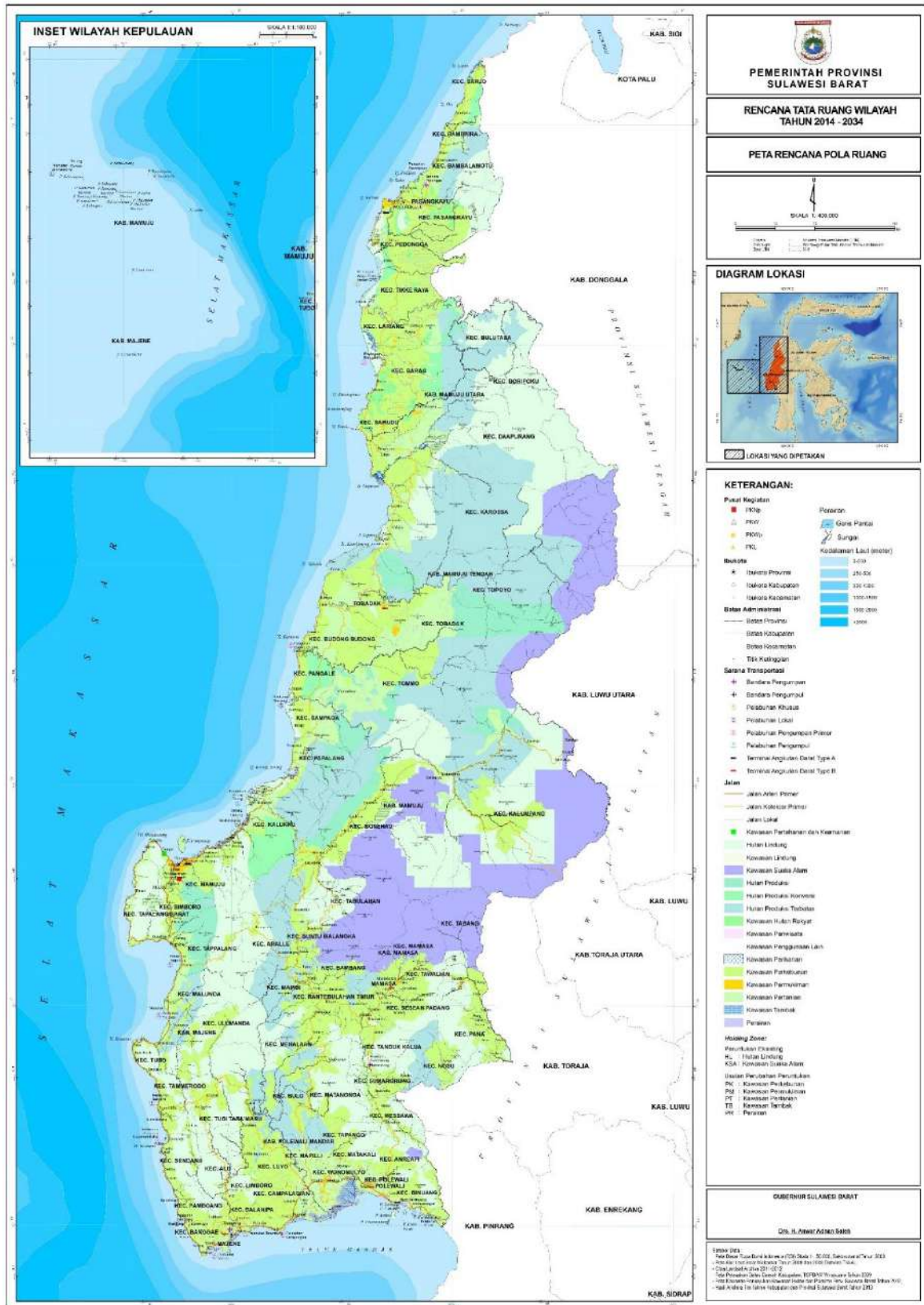
Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar 10.168,88 Ha.

Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampa Padang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
- b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
- c. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

### **2.1.3.1 Kawasan Hutan Produksi**

Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 423.424 hektar, terdiri dari hutan produksi terbatas 331.249 hektar, hutan produksi tetap 70.930 hektar dan hutan produksi dapat dikonversi 21.063 hektar. Kawasan hutan produksi ini selain pernah dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu). Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu,
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
- c. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

### **2.1.3.2 Kawasan Pertanian**

Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km<sup>2</sup> dan lahan perkebunan seluas 3.969,32 km<sup>2</sup> yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Hortikultura di Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
- e. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
- f. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- g. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;

- h. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- i. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

**Tabel 2.12 Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	Luas Lahan Tahun (Ha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00
Polewali Mandar	16.599,79	16.599,79	16.599,79	16.599,79	16.599,79
Mamasa	10.197,42	10.197,42	10.197,42	10.197,42	10.197,42
Mamuju	7.398,30	7.398,30	7.398,30	7.398,30	7.398,30
Pasangkayu	811,96	811,96	811,96	811,96	811,96
Mamuju Tengah	3.738,52	3.738,52	3.738,52	3.738,52	3.738,52
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>39.484,98</b>	<b>39.484,98</b>	<b>39.484,98</b>	<b>39.484,98</b>	<b>39.484,98</b>

*Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.13 Luas Lahan Tegall/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (hektar)**

Kabupaten	Tegall/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan
Majene	12.015	7.145	3.462
Polewali Mandar	20.145	17.257	6.693
Mamasa	17.159	16.107	12.436
Mamuju	19.325	8.024	17.795
Pasangkayu	48.368	43.405	11.504
Mamuju Tengah	17.317	3.777	9.752
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>134.329</b>	<b>96.715</b>	<b>60.642</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

### 2.1.3.3 Kawasan perikanan

Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 (sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan perikanan terbagi atas:

- a. Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar,

- Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu;
  - d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.

**Tabel 2.14 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

Kabupaten	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Majene	0	624	376	0	0	0	1.000
Polewali Mandar	840	3.014	860	0	10	53	4.777
Mamasa	0	0	3.975	0	0	23.467	27.442
Mamuju	645	528	1.024	0	0	0	2.197
Pasangkayu	0	932	116	0	0	0	1.048
Mamuju Tengah	188	1.884	1.260	0	0	0	3.332
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1.673</b>	<b>6.982</b>	<b>7.611</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>23.520</b>	<b>39.796</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.15 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

Kabupaten	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
Majene	410	1.231	1.152
Polewali Mandar	830	1.924	1.620
Mamasa	-	-	-
Mamuju	160	2.250	410
Pasangkayu	60	1.115	65
Mamuju Tengah	150	734	18
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1.610</b>	<b>7.394</b>	<b>3.265</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

#### 2.1.3.4 Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- a. Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

**Tabel 2.16 Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (ekor)**

Kabupaten	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Majene	-	19.296	192	205	75.570	-	-
Polewali Mandar	-	35.882	839	355	95.004	-	1.010
Mamasa	-	9.540	7.472	521	205	-	107.770
Mamuju	-	19.652	787	119	15.611	-	28.086
Pasangkayu	-	14.324	37	11	5.236	-	4.434
Mamuju Tengah	-	15.557	179	107	9.245	-	28.791
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>-</b>	<b>114.251</b>	<b>9.506</b>	<b>1.358</b>	<b>200.871</b>	<b>-</b>	<b>170.091</b>

**Lanjutan Tabel di atas**

Kabupaten	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
Majene	202.799	-	-	18.306
Polewali Mandar	1.603.118	-	-	69.168
Mamasa	91.260	-	-	44.974
Mamuju	1.260.366	-	-	39.847
Pasangkayu	320.572	-	-	17.281
Mamuju Tengah	1.209.930	-	-	40.802
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>4.688.045</b>	<b>65.067</b>	<b>3.789.466</b>	<b>230.378</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

### 2.1.3.5 Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi adalah untuk menjalankan agenda pembangunan, khususnya dalam konteks mengembangkan wilayah secara makro guna mengurangi kesenjangan. Meskipun demikian, dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan tetap diarahkan pada pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Penting untuk dicatat bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian Indonesia, perdesaan menjadi sumber pertumbuhan dan motor penggerak yang krusial.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Kawasan perdesaan dan transmigrasi yaitu:

- 1) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu Kabupaten Mamuju sebagai Kawasan Perdesaan Agrominapolitas Klaster Manakarra Berdaya;
- 2) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yaitu Kabupaten Mamuju Tengah (Tobadak) dan Kabupaten Pasangkayu (Sarudu Baras);
- 3) Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian Desa PDTT yaitu Kabupaten Majene (Ulumanda), Kabupaten Mamasa (Mambi Mehalaan) dan Kabupaten Polewali Mandar (Tubbi Taramanu).

### 2.1.3.6 Kawasan Pertambangan dan Energi

Provinsi Sulawesi Barat yang kaya akan sumber daya alam, termasuk galian logam seperti emas, bijih besi, perak, dan potensi minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Keberadaan sumber daya alam ini menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi daerah, namun perlu dikelola dengan bijak agar memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat serta pelestarian lingkungan. Upaya pengelolaan yang berkelanjutan melalui perencanaan tata ruang dan kebijakan yang tepat dapat mendukung pemanfaatan

sumber daya alam tersebut secara berimbang dan bertanggung jawab. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan diantaranya yaitu :

- a. Kawasan potensial tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa); tambang bijih besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).
- b. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
- c. Kawasan potensial tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kab. Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu).

**Tabel 2.17 Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi) Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
<b>Majene</b>				
Kec Ulumanda, Desa Sambabo	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Data KP. Distamben Kab. Majene
Kec Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-	Data KP. Bina Alam Sukses
Kec Sendana, Desa Limboro Rambu	Panas Bumi	38,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Ulumanda, Sungai Urekang	Panas Bumi	42,3° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, Desa Siang Adholang Dhua	Panas Bumi	37,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, S. Loppa Adholang Dhua	Panas Bumi	52° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
<b>Polewali Mandar</b>				
Tapango, Desa Tapango	Logam Bijih Besi (Fe)	163823,83	5,2979	Wilayah IUP PT. Isco Iron, Tahap Operasi Produksi/Survei Logam oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Tapango, Desa Tapango	Logam Bijih Besi (Fe)	500000,00	943	PT. ISCO IRON
Kec Tapango, Desa Lapejang	Logam Bijih Besi (Fe)	-	787	

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kec Tapango, Desa Simbalutung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	300	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman,
Kec Tapango, Desa Bussu	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	
Kec Tapango, Desa Takaturung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	1500	
Kec Anreapi, Desa Ulugalung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	1750	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Binuang, Desa Mammi	Logam Bijih Besi (Fe)	6044,04	2445	Survei Logam Oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Matakali, Desa Barumbung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	912	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Campalagian, Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	-	Penyelidikan Umum/ Lap. Penelitian Umum Oleh PT. Manggis Mitra Minerals 2007
Kec Binuang, Desa Kurma	Logam Emas (Au)	-	3000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Mapilli, Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Logam Emas (Au)	-	5000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	150000 0 (Terukur )	199	Wilayah KP. Eksploitasi PT. Isco Polman. ReSource dan PT. Inti Karya Polman/ Data KP Distamben Kab.Polman Thn 2009. Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	357040 5 MTon	776	PT. Inti Karya P.
Kec Binuang, Desa Batetangga	Logam Galena (Pb)	-	2000	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Bulu, Desa Sapporakki	Panas Bumi	95-97°C	4700	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lilli Kab. Polman Prov. SulBar Tahun 2010. Laporan Akhir Penyelidikan Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman SulBar 2011. Laporan Akhir Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Matangnga, Desa Matangnga	Panas Bumi	60,9- 84°C	Kec Matangnga, Desa Matangnga	

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kec Tapango, Desa Riso/Kalimbua	Panas Bumi	47-54°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Geofisika Terpadu Panas Bumi Daerah Riso Kab. Polman, Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Balanipa, Desa Bala	Panas Bumi	38-40°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009
Kec Mapilli, Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	46-48°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kec Mapilli, Desa Andau	Panas Bumi	47-49°C	-	
Kec Alu, Desa Pao - Pao	Panas Bumi	45-47°C	-	
<b>Mamasa</b>				
Kec Messawa, Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007
Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Tabulahan, Desa Talopak	Logam Bijih Besi (Fe)	-	Hipotesa	Wilayah KP. PT. Antam/Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007
Kec Sumarorong, Desa Ratte Bo'te	Logam Bijih Besi (Fe)	-	Hipotesa	Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007. Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	-	Hipotesa	Kawasan Pertanian/Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Mangan (Mn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	-	900	Belum Pernah dikelola/ Inventarisasi Bahan Galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Mamasa, Desa Usango, Desa Rambusaratu, Desa Makau, Desa Salu Mokanan Utara, Desa Lindu Hahangan, Desa Uhaulano, Desa	Panas Bumi	51,14°C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Mamasa, 2015

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Rantetangga, Desa Salu Kanan, Desa Mungin, Rantekatoang, Desa Indobanua, Desa Rantekamiri, Desa Tamalatik, Desa Timbu Kanan, Desa Malimbong.				
<b>Mamuju</b>				
Kec Bonehau, Desa ButtuAda S. Malotong	Logam Emas (Au)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Bonehau, Desa Buttu Ada S. Malotong	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Sungai Karataun)	Logam Emas Placer (Au)	-	-	Tambang Rakyat/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Batuisi)	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT.PT Mandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kec Kalumpang, Desa Bulo'	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang,	Nikel (Ni)	47353	604	Survey dan Inventarisasi Potensi Nikel Kecamatan Kalumpang, Kab.mamuju
Kec Bonehau, Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT. PTMandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kecamatan Bonehau	Batu Bara	190000 0	96	PT. Bonehau Prima Coal
Kecamatan Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-	Wilayah Perkebunan Masyarakat/ Informasi Distamben Mamuju
Kec Tapalang Barat, Desa Tappalang	Panas Bumi	53,5° C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Simboro, Desa Karema	Panas Bumi	47,7°C	-	-
Kec Kalukku, Kelurahan Bebanga, dusun Ampallas	Panas Bumi	66-71°C	-	-
Kec Kalukku, Desa Pontanakayyang	Panas Bumi	42°C	-	-
<b>Pasangkayu</b>				
Kec Tikke, Desa S. Lariang	Logam Emas Placer (Au)	103		Kec Tikke, Desa S. Lariang DAS Lariang. Bekas Penambangan Rakyat/ Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007. Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
				Kab Pasangkayu, Kerjasama Distamben Prov. Sulbar & CV Armedia Consultant, 2009.
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Baras dan Kec Sarudu	Batubara	-	-	Wilayah Ekplorasi PT. Tambang sekarsa Adaya/Data Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Dinas PESDM Prov. Sulbar, 2009
Kec Sarudu, Desa Doda	Panas Bumi	37,2°C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kab Mamuju dan Pasangkayu Prov. SulBar, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
<b>Mamuju Tengah</b>				
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Tobadak, Desa Panasuan	Panas Bumi	-	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Wilayah Eksplorasi/ Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam di Kab. Mamuju, Kerjasama Distamben Prov. SULBAR & CV. CITRA MULTICON, 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Wilayah Penyelidikan Umum/Data Pengelolaan Mineral dan Batubara, Provinsi Sulawesi Barat, 2009
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Galena (PbS)	-	-	Wilayah Eksplorasi/Data Pengelolaan Pertambangan dan Mineral, Oleh Dinas PSDM. Prov. Sulawesi Barat, 2009
Kec Tobadak, Desa Sungai Andeang	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013.

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat 2023*

Pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat berperan sebagai penggerak utama perekonomian dan ketahanan energi. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini perlu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, optimal, dan terpadu, guna mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Sulawesi Barat. Energi menjadi unsur kunci dalam pembangunan, dan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar, kebutuhan akan energi juga meningkat, menyebabkan munculnya berbagai tantangan. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, terutama minyak bumi, rendahnya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, dan keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor energi di provinsi ini. Selain itu, implementasi peraturan yang tepat dan strategis yang mendukung penggunaan energi bersih dan berwawasan lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam pengembangan energi di Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengelola energi tingkat daerah yang memaparkan penjabaran dan rencana pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Dari segi potensi Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang cukup besar dan beragam seperti dengan adanya 11 Alur Sungai Besar Dan Anak Sungai. Debit Sungai sangat potensial dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Besar Kecil (PLTA, PLTM dan PLTMH). Posisi Sulawesi Barat yang berada di sekitar garis khatulistiwa yang mendapat sinar matahari antara 8-10 jam/hari juga merupakan salah satu potensi energi, rata-rata Penyinaran Matahari Kawasan Timur Indonesia dapat menghasilkan daya Sebesar 5,86 Kw/M<sup>2</sup>, hal ini membuat Provinsi Sulawesi Barat kaya akan energi matahari yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kecepatan Angin hampir di Wilayah Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu berkisar 3 hingga 8 km/jam sangat potensial untuk pembangunan PLTB dengan daya 0,5 MW sampai dengan 1 MW. Potensi Panas Bumi memiliki total energi sebesar 531 MWe yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik diperkirakan sekitar 10 MW yang berada di Lili-Seporaki Kabupaten Polewali Mandar, dan sebagian besar dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sebagai pemandian air panas. Potensi mineral radioaktif ini tersebar

antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dimana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi off shore maupun on shore yang masing berpeluang untuk dikelola kembali oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama baik Nasional maupun International, hingga tahun 2022 terdapat 2 Wilayah Kerja Migas yang telah berproduksi yakni WK Sebuku dan WK East Sepinggang. Potensi mineral logam Batubara, bijih Besi, emas, tembaga, galena, dan mangan di Provinsi Sulawesi Barat cukup beragam dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbukti PT. ANTAM dan beberapa perusahaan telah melaksanakan survei mendalam guna mencari potensi mineral logam tersebut. Terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur mendorong produksi bahan galian non logam/batuan di Provinsi Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2021. Bahan galian logam dan non logam tersebar diseluruh Provinsi Sulawesi Barat, disamping itu hasil perkebunan sawit dapat diarahkan untuk Energi Baru Terbarukan seperti cangkang/cofiring menghasilkan energi biomassa, biogas dan CPO sawit menghasilkan Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biofeul (BioEtanol dan BioDisel) guna mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Energi Panas Bumi banyak tersebar di 4 Kabupaten yakni Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Mamuju.

Pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 pada tahun mencapai 46% dari total bauran energi primer dan 65% dari total bauran energi primer pada tahun 2050.

**Tabel 2.18 Data potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi Sulawesi Barat**

No	POTENSI PLTA & PLTM	Koordinat		Kap. (MW)
		BT	LS	
1	S. Tumbuan/Kalumpang/Mamuju			150
2	S. Tumbuan 2/Kalumpang/Mamuju			300
3	Sungai Mapilli/Polman	119,117	-3,2956	174
4	S. Tetean			2
5	Sungai Sadang/Tabang/Mamasa			35
6	Sungai Tabulahan/Mamasa			18
7	S. Budong-Budong/ Mateng	119,508	-2,03586	125
8	Sungai Aralle/Mamasa	119,0674	-2,98656	7.1
9	Sungai Bambang/Mamasa	119,2128	-2,93572	5.2
10	Sungai Bulu/Polman	119,1569	-3,19436	2
11	S. Buntu Malaka/Mamasa	119,1867	-2,82481	3.4
12	Sungai Mabu/ Mamasa	119,2204	-2,7373	7.76
13	Sungai Mahalaan/Mamasa	119,0896	-3,03886	5.25
14	Sungai Paku/Polman	119,2469	-2,77092	4.3
15	Sungai Pamoseng/Polman	119,0955	-3,00594	8.33
16	Sungai Ulu Mambi/Mamasa	119,2336	-2,93378	3.75
17	Sungai Salu Le'bo/Mateng	119,6229	-1,95975	10
18	Sungai Karama/Mamuju	119,6822	-2,33758	90
19	Sungai Karama/Mamuju	119,6905	-2,34744	50
20	Sungai Karama/Mamuju	119,569	-2,56778	50
	<b>Total</b>			1.051,09

*Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.19 Data potensi pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Bulan	Rata-rata Penyinaran Matahari	Bulan	Rata-rata Penyinaran Matahari
Januari	6,6	Juli	7,1
Februari	4,5	Agustus	5,9
Maret	4,3	September	7,3
April	3,6	Oktober	8,8
Mei	5,7	November	7,7
Juni	6,9	Desember	8,7

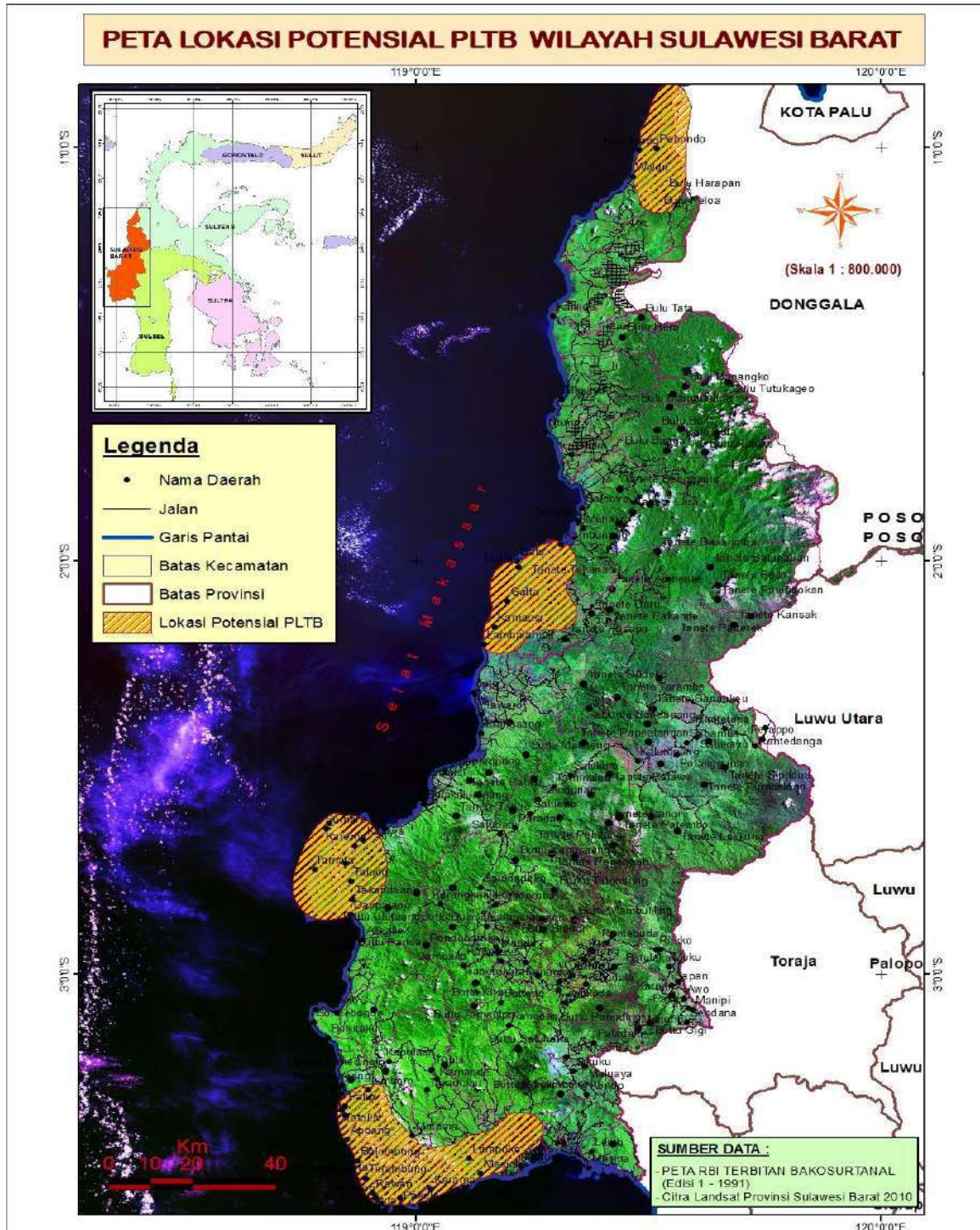
*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.20 Data potensi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Provinsi Sulawesi Barat**

Lokasi Desa/Kec/Kab	Koordinat	Rata-Rata Km/Jam
Karema/Simboro/Mamuju	2° 40'54,3" & 118° 52'17,7"	10.53
Sumare/Simboro/Mamuju	2° 40'2,4" & 118° 51'1,9"	19.89
Tarailu/Sampaga/Mamuju	2° 8'10,4" & 119° 10'6,9"	11.95
Tabolang/Topoyo/Mateng	2° 18,5" & 119° 19'41,7"	13.96
Karossa/Mamuju Tengah	1° 50'39,4" & 119° 24'3,6"	9.42
Salukali/Baras/Pasangkayu	1° 34'12,8" & 119° 19'33,9"	9.98
Pasangkayu/Pasangkayu	1° 21'30,0" & 119° 10'30,0"	8.47
Tubo/Majene	3° 5'27,5" & 118° 49'41,8"	13.29
Banggae/Majene	3° 32'43,0" & 118° 59'52,3"	15.39
Tinambung/Polman	3° 30'51,5" & 119° 1'49,7"	13.54
Polewali/Polewali Mandar	3° 26'19,9" & 119° 20'57,9"	10.97

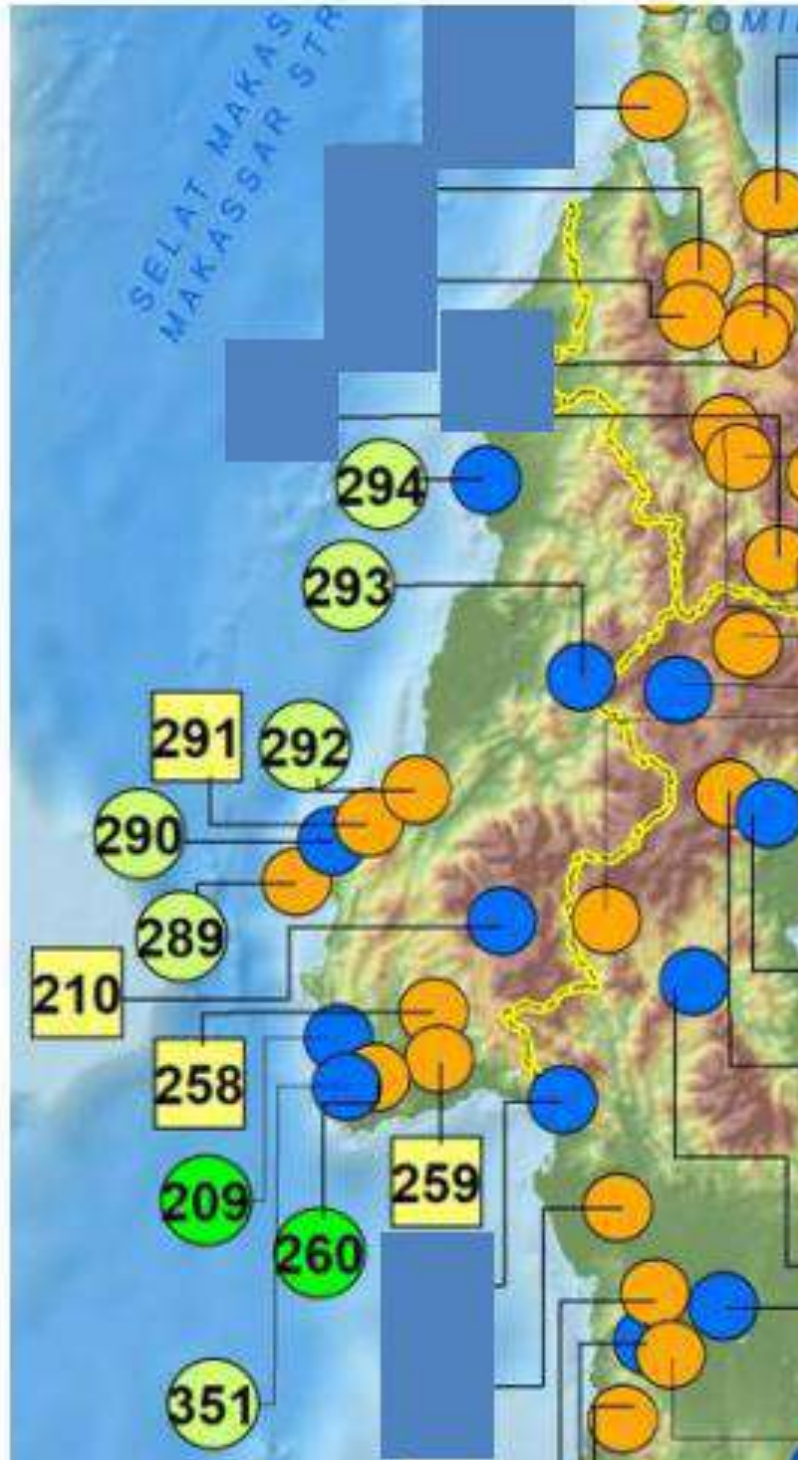
*Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Gambar 2.8 Peta Lokasi Potensial PLTB Wilayah Sulawesi Barat



Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Gambar 2.9 Rincian dan Tabel Potensi Panas Bumi Provinsi Sulawesi Barat



- |  |   |
|--|---|
|  Titik dan Nomor Lokasi/<br>Point and Location Number |  Terpasang /<br>Installed                                    |
|  Survey Pendahuluan Awal/<br>Early Preliminary Survey |  Temperatur Rendah /<br>Low Temperature (less than 125 degC) |
|  Survei Pendahuluan /<br>Preliminary Survey           |  Temperatur Sedang /<br>Medium Temperature (125-225 degC)    |
|  Survey Rinci /<br>Detailed Survey                    |  Temperatur Tinggi /<br>High Temperature (>225 degC)         |
|  Siap Untuk Dikembangkan<br>Ready To Develop          |   |

No.	No. Titik	Area	Kota/ Kabupaten	Sumber Daya (MWe)					Status Wilayah	
				Spekulatif	Hipotesis	Cadangan				Total
						Mungkin	Terduga	Terbukti		
1	209	Somba - Limboro	Majene	25	-	-	-	-	25	Wilayah Terbuka
2	210	Mamasa	Mamasa	-	-	2	-	-	2	Wilayah Terbuka
3	258	Lilli - Sepporaki	Polewali Mandar	133	-	30	-	-	163	Wilayah Terbuka
4	259	Riso - Kalimblia	Polewali Mandar	20	41	-	-	-	61	Wilayah Terbuka
5	260	Alu	Polewali Mandar	25	-	-	-	-	25	Wilayah Terbuka
6	289	Tapalang	Mamuju	30	-	-	-	-	30	Wilayah Terbuka
7	290	Karema	Mamuju	10	-	-	-	-	10	Wilayah Terbuka
8	291	Ampalas	Mamuju	28	12	-	-	-	40	Wilayah Terbuka
9	292	Kona - Kaiyangan	Mamuju	10	-	-	-	-	10	Wilayah Terbuka
10	293	Panusuan	Mamuju Tengah	5	-	-	-	-	5	Wilayah Terbuka
11	294	Doda	Mamuju Utara	5	-	-	-	-	5	Wilayah Terbuka
12	351	Adolang	Majene	5	-	-	-	-	5	Wilayah Terbuka
<b>TOTAL</b>				<b>296</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	

*Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.21 Data Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat**

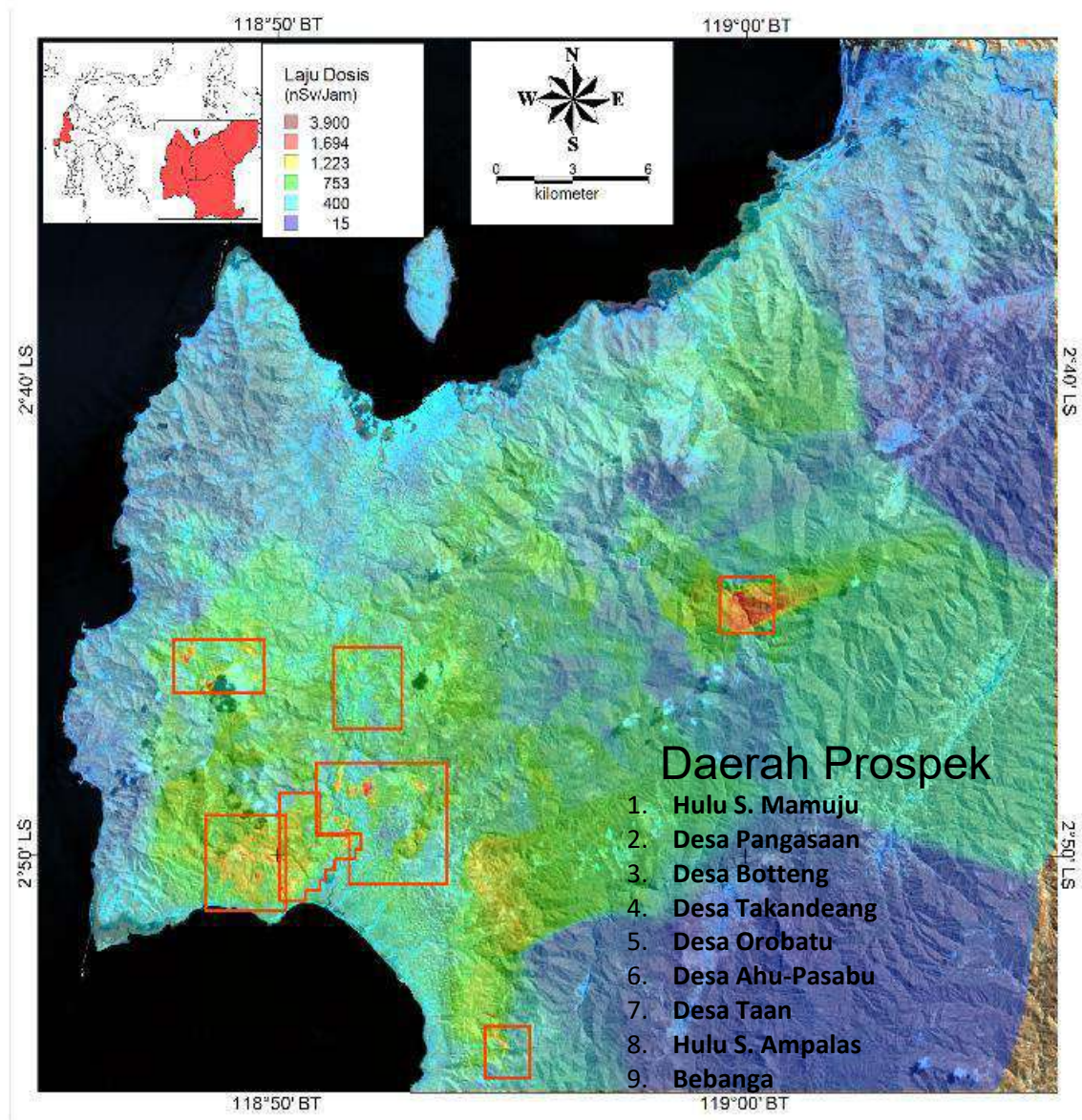
No	Lokasi			Status Panas Bumi	Nama Air Panas
	Kabupaten	Kecamatan	Desa		
1	Mamasa	Mamasa	Rambu Saratu	Wisata	Air Panas Kole
2	Mamasa	Mamasa	Rambu Saratu	Wisata	Air Panas Kanan Rirang
3	Mamasa	Mamasa	Osango	Hotel/Penginapan	Air Panas Nusantara
4	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata Dikelola Pemerintah	Air Panas Rante-rante
5	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Rante Katoan
6	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Mongin
7	Mamasa	Tawalian	Rante Tangnga	Wisata	Air Panas Rante Tangnga
8	Mamasa	Tawalian	Tawalian	Wisata	Air Panas Tambun
9	Mamasa	Aralle	Ralleanak	Wisata	Air Panas Uhailanu
10	Mamasa	Tanduk Kalua'	Tamalantik	Wisata	Air Panas Kanan Rokak
11	Mamasa	Messawa	Malimbong	Wisata Dikelola Pemerintah	Air Panas Malimbong
12	Mamasa	Tabulahan	Pangandaran	Wisata	Air Panas Kanan Salu Kalukku
13	Mamasa	Mamasa	Taupe	Wisata	Air Panas Dusun Kanan
14	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Osango
15	Mamasa	Mamasa	Messawa	Wisata	Air Panas Messawa
16	Majene	Sendana	Limboro	Wisata	Air Panas Limboro 1
17	Majene	Sendana	Limboro	Wisata	Air Panas Limboro 2
18	Majene	Sendana	Limboro	Wisata	Air Panas Limboro 3
19	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 1
20	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 2
21	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 3
22	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Arundung
23	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 4

No	Lokasi			Status Panas Bumi	Nama Air Panas
	Kabupaten	Kecamatan	Desa		
24	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 5
25	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 6
26	Majene	Pamboang	Adolang	Wisata	Air Panas Sungai Biloppa 7
27	Mamuju	Bonehau	Bonehau	Wisata	Air Panas Maiso
28	Polewali Mandar	Tapango	Tapango	Wisata	Air Panas
29	Polewali Mandar	Luyo	Luyo	Wisata	Air Panas
30	Polewali Mandar	Alu	Alu	Wisata	Air Panas
31	Polewali Mandar	Limboro	Limboro	Wisata	Air Panas
32	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Buntu Kasisi
33	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Tatoa
34	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Osango
35	Mamasa	Mamasa	Osango	Wisata	Air Panas Osango
36	Mamasa	Tanduk Kalua	Kanan	Wisata	Air Panas Tamalantik
37	Mamasa	Tawalian	Rantetanga	Wisata	Air Panas Rantekamairi

*Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pemerintah Kabupaten*

Potensi mineral radioaktif menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radio aktif uranium dan thorium berskala besar di atas rata-rata dunia. Hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada tahun 2013–2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kalukku dan Mamuju.

Gambar 2.10 Data Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi  
Provinsi Sulawesi Barat



Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

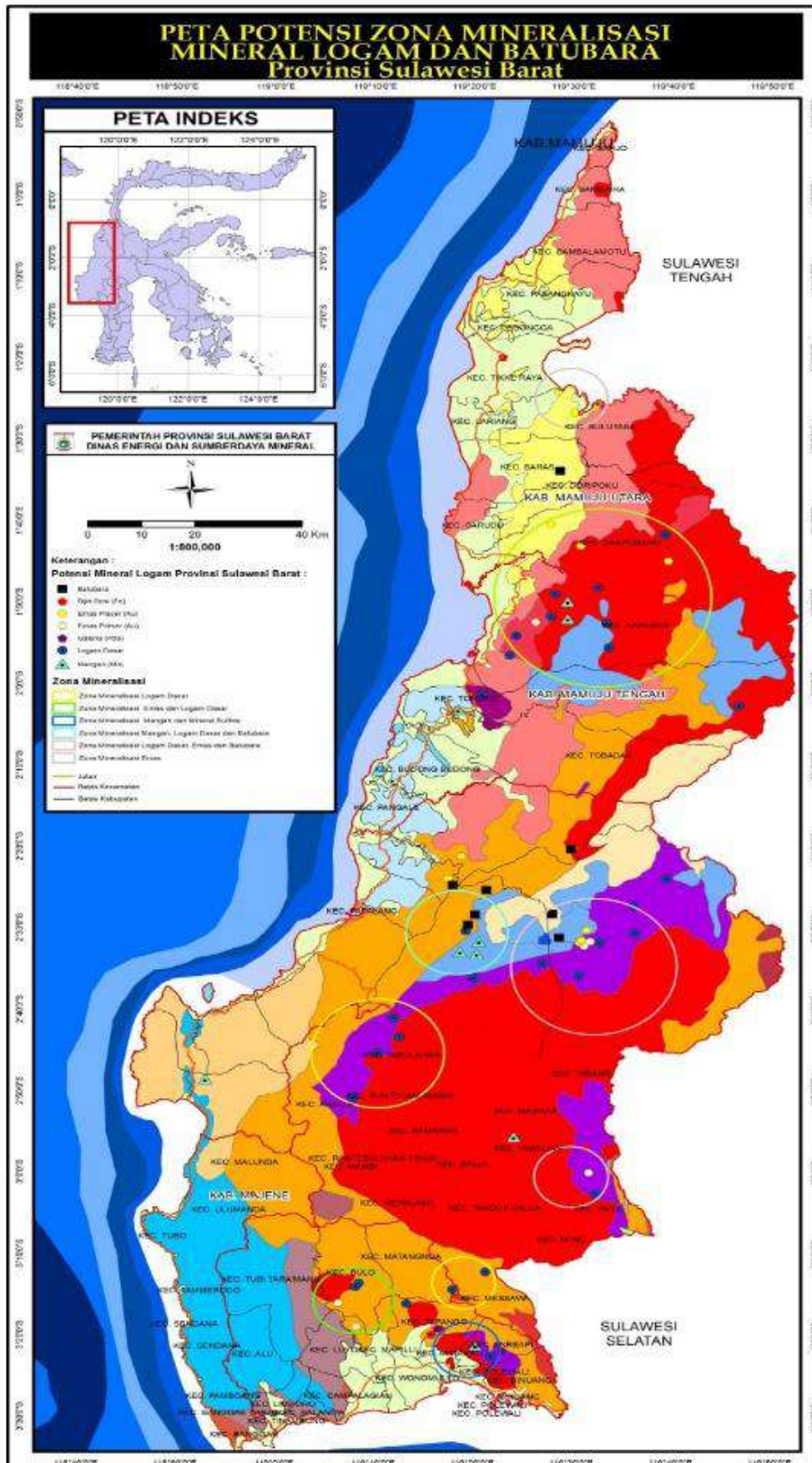
Tabel 2.22 Data Potensi Bahan Mineral Provinsi Sulawesi Barat

GALIAN	KADAR	LOKASI DESA/KECAMATAN/KABUPATEN
<b>Emas (Au)</b>	2.28 ppm	Sumarrang/Campalagian, Kurma/Binuang, Taalangga, Beroangin, Pulliwa/Mapilli/Polman
	11,60-56,61 ppm	Buttuada` S. Malotong, Tamalea/Bonehau, Batuisi/ Karataun/Kalumpang/Mamuju
	7 ppm	Sanjango/Karossa/Mateng, Tarinding, Talopak/ Tabulahan, Baka Disura'/Tabang/
	0,178-5.23 ppm	S. Lariang/Tikke, Masabo /Dapurang /Pasangkayu, Salulebo/Tobadak/Mateng, Botteng/Pamboang/Majene
<b>Bijih Besi (Fe)</b>	49,6-65 %	Tapango, Lapejang, Simbalutun, Takaturung, Bussu, Papandangan/Anreapi, Ulugalung/Binuang, Mammi/ Matakali, arumbung/Polman
	7 ppm	Karossa/Mateng, Sambabo/Ulumanda/Majene & Talopak /Tabulahan/Mamasa
<b>Pasir Besi</b>	40-60 %	Sipai Pebassian/Mamasa/Mamasa

GALIAN	KADAR	LOKASI DESA/KECAMATAN/KABUPATEN
<b>Galena (Pb)</b>	23-70%	Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan/Polman
	20-25 %	Batetangga/Binuang/Polman Karossa/Mateng
<b>Tembaga (Cu)</b>	42,10 ppm	Bulo/Kondobulo/Kalumpang/Mamuju
	60,06 ppm	Sanjango/Karossa/Mateng
	30,54 ppm	B. Tarakedo/Dapurang/Pasangkayu
	3.03-111.8 ppm	BatuBusa/Messawa, Karaka, Ulsalu, Sapan, Saloan, Paken/Pana/Mamasa
<b>Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)</b>	Cu 26.1-127,7, Pb 94.89, Zn 29.84-157,3	Sungai Andeang, Salulekbo/Tobadak/Mamuju Tengah
<b>Seng (Zn)</b>	153,92-158.87 ppm	Tabolang/Topoyo, Sanjango/Karossa
	44.73-156.74 ppm	Karaka, Ulsalu, Sapan, Saloan, Paken/Pana/Mamasa
	2.79-29.09 %	Ratte Bo'te'/Sumarorong, Salu Kaiyang, Sgai Aralle Mamasa
<b>Batubara</b>	Kalori: 5.860-7.140 Kal/gr Abu: 2-21,8 % Sulfur :1,39-7,02% Volatile Matter: 34,5-41,4% Inhereat Moisture: 3,2-6,7%	Tamalea/Bonehau, Tapalang/Mamuju, Ulidang/Sendana /Majene, Baras dan Sarudu/Baras & Sarudu/Pasangkayu

*Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Gambar 2.11 Peta Potensi Zona Mineralisasi Mineral Logam dan Batu bara Provinsi Sulawesi Barat



Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

### **2.1.3.7 Kawasan Industri**

Pertumbuhan ekonomi yang baru saat ini dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah. Dalam konteks ini, pengembangan industri menjadi kunci utama. Salah satu indikator kemajuan suatu daerah terletak pada dominansi kontribusi nilai tambah pada sektor industri dibandingkan sektor lainnya. Di Sulawesi Barat, potensi pengolahan hasil komoditas seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta sektor pertambangan dan gas dapat memberikan dukungan signifikan bagi pengembangan industri. Pengembangan industri ini tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, memajukan sektor industri menjadi strategi yang relevan dan berdampak positif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Barat. Rencana pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014–2034. Arah pengembangan industri tersebut antara lain :

- a. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong.
- b. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
- d. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014–2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belang belang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah *Eco-Industrial-Park* (EIP) dan *Special Economic Zone* (SEZ/KEK) Belang-Belang.

Pada tahun 2020, terdapat 23 perusahaan industri besar dan sedang di Sulawesi Barat. Kabupaten yang mempunyai perusahaan terbanyak yaitu Polewali Mandar dengan jumlah perusahaan sebesar 10 perusahaan. Dari sisi Klasifikasi Industri, Industri Makanan adalah industri besar sedang yang paling banyak di Provinsi Sulawesi Barat dengan banyaknya industri sebesar 14 industri, disusul oleh Industri Tekstil sebanyak 5 industri.

**Tabel 2.23 Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

Industrial	Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Industri Makanan	14	1.459
Industri Tekstil	5	201
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2	47
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	46
Industri Barang Galian Bukan Logam	1	20
<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>1.773</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2024

#### 2.1.3.8 Kawasan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang berperan penting sebagai penyumbang pendapatan bagi suatu daerah. Selain memberikan kontribusi finansial, pengembangan sektor pariwisata juga dianggap krusial dalam konteks penyerapan tenaga kerja. Salah satu aspek yang memegang peran sentral dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan termasuk dalam kategori penyediaan akomodasi dan layanan makan minum. Selain data pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting untuk menilai peningkatan kegiatan perhotelan di suatu wilayah adalah tingkat penghunian hotel. Tingkat penghunian ini mencerminkan sejauh mana kapasitas hotel-hotel di daerah tersebut dimanfaatkan oleh wisatawan atau pengunjung. Peningkatan tingkat penghunian dapat diartikan sebagai pertumbuhan sektor pariwisata yang positif, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan *landscape* alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 ditetapkan Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman potensi wisata dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan-perayaan tradisional dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Disamping pengembangan wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai seperti Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau-pulau kecil dan terumbu karang di Pulau pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu dikembangkan. Pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota Palopo di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan kota Mamasa dan kota Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak pada peningkatan akses jalan ke obyek-obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.24 Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034**

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
Wisata Alam	Mamuju	Mamuju	Gunung Paken	Pemandangan laut dan kepulauan	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Mamuju	Air terjun Tamasapi	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Kalukku	Taman Wisata Gentungan	Panorama Alam	Peningkatan jalan akses
		Mamuju	Pulau Karampuang	Wisata Bahari / pasir putih	Penataan obyek dan akses dari kota Mamuju
		Simboro kepulauan	Pantai Toangsang	Pasir Putih	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
		Simboro kepulauan	Wisata Pulau	Wisata Pulau	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
	Majene	Tammeroddo	Permandian Air panas Limbroo	Air Panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Banggae	Pembuatan Perahu Sandeq	Perahu layar	Peningkatan Promosi dan Pelestarian
		Banggae	Pantai Rangas	Pasir Putih	Penataan kawasan dan jalan akses
		Banggae Timur	Pantai Dato'	Pantai dan Tebing	Penataan kawasan dan jalan akses
		Banggae Timur	Pantai Barane	Pantai	Penataan kawasan dan jalan akses
	Polewali Mandar	Anreapi	Air terjun Indo Rannoang	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Binuang	Kanang	Wisata Agro	Penataan kawasan dan jalan akses
		Anreapi	Bendungan Sekka-sekka	Wisata air	Pengelolaan obyek dan fasilitas jalan
		Tinambung	Pantai Palippis	Wisata Bahari / Panorama	Penataan wilayah
		Binuang	P. Gusung Toraya	Panorama pantai	Penataan wilayah dan sistem transportasi
		Wonomulyo	Pantai Mampie	Pantai, Bahari dan Ekowisata	Penataan kawasan dan jalan akses
	Mamasa	Sumarorong	Air Terjun Liawan	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Messawa	Air Terjun Sallokan	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Messawa	Air Panas Malimbong	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Air Panas Kole	Permandian air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Gunung Mambulilling	Hiking, Trecking	Penataan <i>tracking paths</i>
		Balla	Puncak Mussa' & Perkampungan Tradisional Balla Peu'	Panorama dan perkampungan adat	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
		Sesena Padang	Perkampungan Tradisional Sesena Padang	Wisata Alam dan perkampungan tradisional	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
Pasangkayu	Bambaira	Goa Ape	Wisata Goa	Perbaikan jalan akses	
	Pasangkayu	Pantai Tanjung Batu Oge'	Wisata Pantai / Terumbu karang	Perbaikan jalan akses dan promosi wisata	
	Pasangkayu	Pantai Tanjung Babia	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas	
	Baras	Pantai Salukaili	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas	

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
	Mamuju Tengah	Topoyo	Air Terjun Kalando	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Pantai Kambunong	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Kec. Pangale	Pantai Karama	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Budong-Budong	Pantai Babana	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Air Terjun Lembah Hopo	Wisata Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
Wisata Budaya	Mamuju		Pure	Kegiatan keagamaan Hindu	Promosi event wisata
		Mamuju	Monumen Ahmad Kirang	Tugu/Patung	Promosi wisata
		Mamuju	Banoa Sibatang	Rumah Tradisional Kalumpang	Promosi wisata
		Mamuju	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Massossor Manurung	Pesta Rakyat dan HUT Manakarra	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Festival Pulau Karangpuang	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Pesta Nelayan	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Rumah Adat Mamuju	Rumah Adat Tradisional	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Majene	Majene	Museum Mandar	Museum	Promosi wisata
		Malunda, Sendana dan Banggae	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Banggae	Makam Raja Raja	Makam	Promosi wisata
		Malunda	Pa'bandangan Manu' manu'	Upacara syukuran panen	Promosi wisata
			Makam Syech Abdul Mannan	Makam	Promosi wisata
		Banggae	Maulidan Salabose	Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Polewali Mandar	Limboro	Makam Todilaling	Makam Raja I Balanipa	Promosi wisata
		Binuang	Makam Sysch Al-Ma'ruf	Makam	Promosi wisata
		Campalagian	Makam Imam Lapeo	Makam	Promosi Wisata
		Campalagian	Makam Raja Tie Tie	Makam	Promosi Wisata
		Polewali	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Polewali	Polewali Mandar Internasional Folk & Art Festival (PIFAF)	Festival Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Internasional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
	Mamasa		Prosesi Mangngasa'	Adat / kegiatan pertukangan	Promosi wisata
		Balla	Makam Tua Tedong-tedong	Kuburan adat	Promosi wisata
			Rambu Solo'	Pesta pemakaman	Promosi wisata
		Nosu	Ritual Mangaro'	Prosesi adat Kematian	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan	
		Mamasa	Perayaan HUT Kab. Mamasa	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Ritual Adu Kerbau	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata	
		Mamasa	Monumen To'Pao	Sejarah Perjanjian Kerajaan Pitu Ulunna Salu	Dukungan Pelestarian Sejarah dan Promosi Pariwisata	
		Mamasa	Rumah Adat Ra147mbusaratu	Rumat Tradisional Mamasa	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata	
	Pasangkayu	Bamallamotu	Suku Bunggi	Adat tradisional	Promosi wisata	
		Pasangkayu	Sumur tua Parappe'	Sumur tua	Promosi wisata	
		Pasangkayu	Monumen Sejarah Vovasanggayu	Monumen Sejarah	Promosi wisata	
	Mamuju Tengah	Tobadak	Festival Bumi Lalla Tassisara	Peringatan Hari Bakti Transmigrasi dan Hari Jadi Kab Mamuju Tengah	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata	
			Festival Nusantara Tassisara	Festival Seni, Budaya, Pariwisata dan Etnis	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata	
	Wisata Minat Khusus (Belanja, Pertunjukan dan Pendidikan)	Mamuju	Kalumpang	Tenun Sekomandi	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertununan
				Tari Bambamanurung	Tarian adat	Promosi wisata
Tari Ma'bundu'				Tarian adat	Promosi wisata	
Mamuju			Daiving	Menyelam dan Pemotretan di bawah laut	Promosi wisata	
Majene		Banggae	Tenun Sutra Mandar	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertununan	
			Tari Pa'jinang	Tarian adat	Promosi wisata	
			Tari Pa'dego	Tarian adat	Promosi wisata	
		Banggae Timur	Wisata Pendidikan	Universitas Sulawesi Barat	Pengembangan dan promosi	
Banggae		Mancing Mania	Mancing di laut dalam	Promosi wisata		
Polewali Mandar		Tinambung Dan Balanipa	Tenun Sutra Mandar	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertununan	
			Sayyang Pattu'du	Tarian adat	Promosi wisata	
		Binuang	Desa Wisata Batetangnga	Perkampungan Tradisional	Pembangunan daya tarik, pemberdayaan masyarakat dan Promosi wisata	
		Binuang	Kampung Bahasa Inggris	Sekolah Tradisional Bahasa Inggris	Pengembangan dan promosi	
Mamasa		Mamasa	industri souvenir	Souvenir	Promosi wisata dan penataan lokasi kerajinan dan lokasi pemasaran	
			Tari Bulu Londong	Tarian adat	Promosi wisata	
			Musik Iyo iyo	Musik tradisional	Promosi wisata	
			Tari Luya	Tarian adat	Promosi wisata	
			Tari Pararuk	Tarian adat	Promosi wisata	
			Tari Burake	Tarian adat	Promosi wisata	
			Tari Bisu	Tarian adat	Promosi wisata	
	Tari Simbong		Tarian adat	Promosi wisata		
	Gunung Mambulilling Lintas		Petualangan dan Pendaki gunung	Penyediaan akses dan promosi		
Sungai Mamasa	Arung Jerang	Pengembangan dan promosi				
Pasangkayu		Tari Mataro	Tarian adat	Promosi wisata		

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Destinasi Unggulan tersebar di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene mempunyai 6 destinasi Unggulan, menyusul Kabupaten Mamasa dan Mamuju dengan 5 destinasi unggulan, kemudian disusul Kabupaten majene dengan 4 destinasi unggulan dan yang terakhir Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah masing-masing 3 destinasi Unggulan. Pada umumnya daerah Pantai merupakan destinasi unggulan di tiap daerah kecuali Kabupaten mamasa karena tidak mempunyai Laut.

**Tabel 2.25 Destinasi Pariwisata Unggulan Di Provinsi Sulawesi Barat**

No	Kabupaten	Destinasi	Jumlah
1	Majene	- Pantai Dato/Dato Beach - Pantai Barane/Barane Beach - Kolam Renang Tirta Majene - Museum Mandar - Makam Raja - Raja dan Adat Banggae - Makan Mara'dia Parappe	6
2	Polewali Mandar	- Pulau Gusung Toraya/Gusung Toraya Island - Pantai Mampie - Pantai Sampoang	3
3	Mamasa	- Air Terjun Liawan/Liawan Waterfall - Kawasan Anggrek Tondok Bakarlu - Desa Tradisional Ballapeu - Rumah Adat Rambusaratu - Rumah Adat Orobia - Buntu Liarra'/Negeri di atas Awan	7
4	Mamuju	- Kawasan Kerajinan Tenun Khas Mamasa - Pantai Anjungan Manakarra - Pulau Karampuang/Karampuang Island - Air Terjung Tammasapi - Permandian So'do - Rumah Adat Mamuju	6
5	Pasangkayu	- Eko Wisata Berkah Pantai - Pantai Tanjung Batu Oge/Tanjung Batu Oge Beach - Pantai Koa - Koa - Pantai Cinoki - Pantai Babia	4
6	Mamuju Tengah	- Pantai dan Pulau Kabunong/Kabunong Beach and Islands - Pantai Batu Rede/Batu Rede Beach - Air Terjun Kalando/Kalando Waterfall - Mangrove Wae Tumbur Salubiri	4
<b>Sulawesi Barat</b>		<b>Total</b>	<b>26</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2024*

### 2.1.3.9 Kawasan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

#### 1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

- a. Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa;
- b. Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa

lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

2. Kawasan Permukiman Perdesaan
  - a. Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
  - b. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

**Tabel 2.26 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah
Majene	93,79	0,30	5,91	100,00
Polewali Mandar	95,98	0,77	3,25	100,00
Mamasa	94,60	0,13	5,27	100,00
Mamuju	94,60	1,60	3,86	100,00
Pasangkayu	84,22	2,19	13,59	100,00
Mamuju Tengah	92,99	0,15	6,86	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>93,35</b>	<b>0,95</b>	<b>5,70</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

## 2.1.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

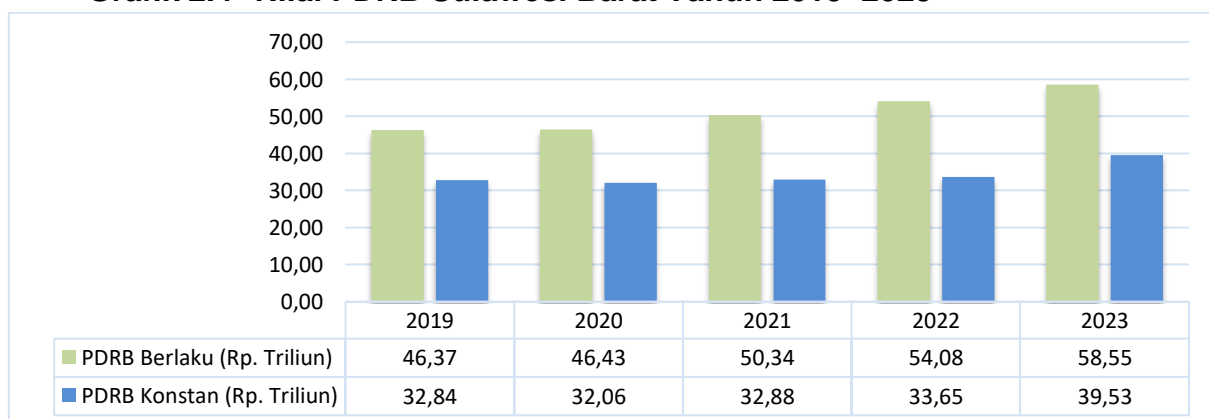
### 2.1.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.4.1.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2023, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 54,07 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 33,65 triliun rupiah. Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023 meningkat hingga 2,30 persen.

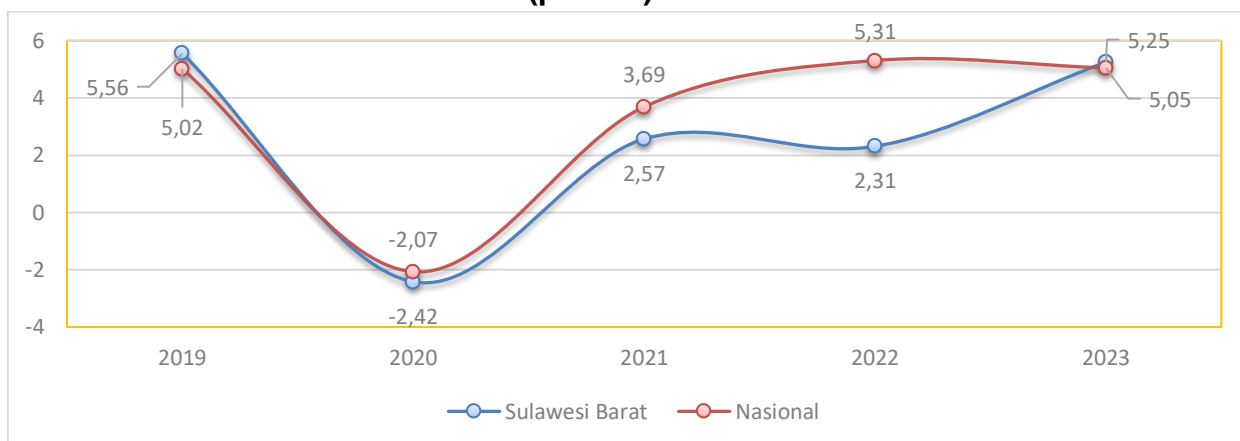
**Grafik 2.4 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

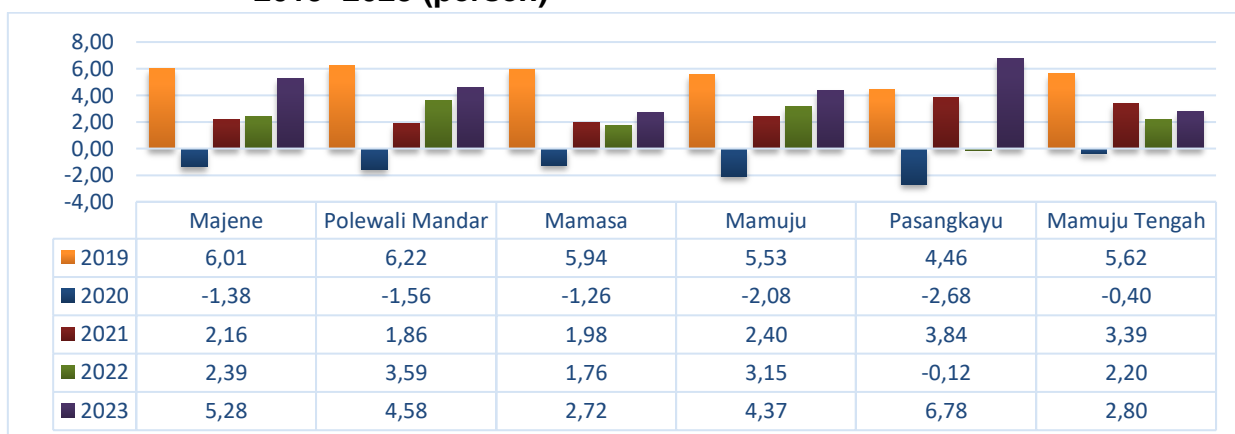
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023 berada di 5,25 persen, capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 2,31 persen.

**Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (persen)**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) 2024

**Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen)**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) 2024

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi hingga tahun 2023, meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang paling meningkat dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 6,78 persen tahun 2023. Diikuti oleh kabupaten lainnya yang mengalami perbaikan ekonomi dengan peningkatan yang positif. Pertumbuhan terendah berada pada Kabupaten Mamasa dimana hanya tumbuh sebesar 2,72 persen.

**Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen)**

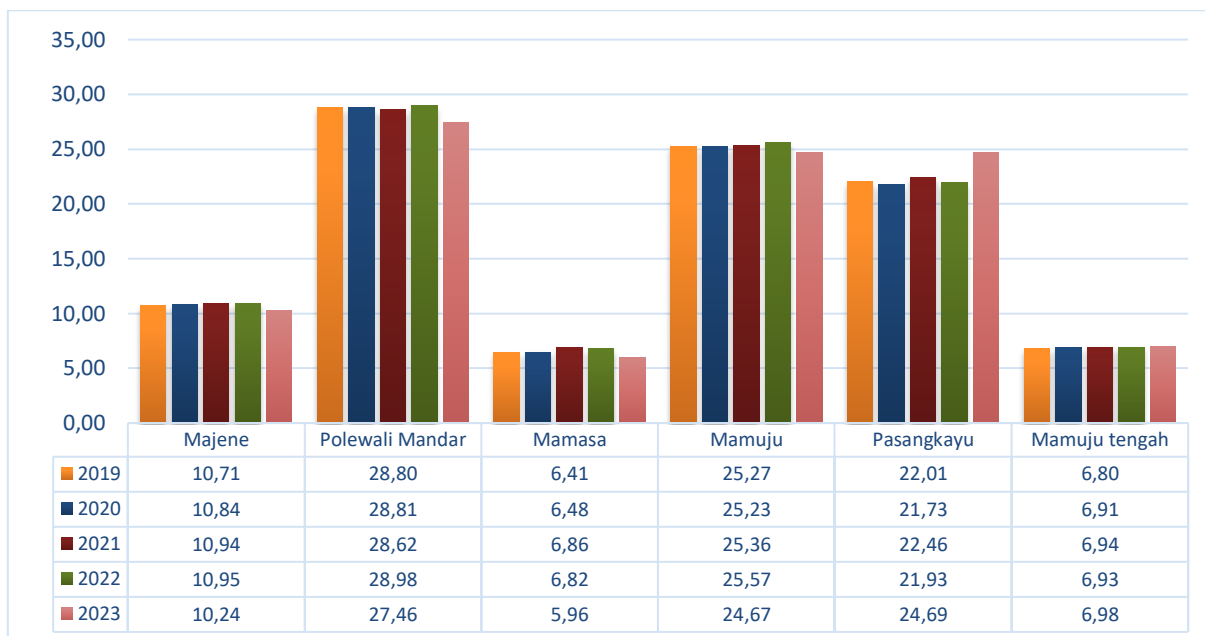
<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,62	0.54	1.16	3.40	4.24
Pertambangan dan Penggalian	5,28	-4.90	9.08	0.58	3.03
Industri Pengolahan	5,13	-3.51	5.89	-0.64	14.46
Pengadaan Listrik dan Gas	8,29	6.85	2.20	7.13	10.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	9,61	1.63	-0.31	-0.25	4.95
Konstruksi	6,65	-13.31	11.63	-1.60	3.75
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,07	-2.66	3.57	1.68	5.50
Transportasi dan Pergudangan	4,23	-7.00	1.69	8.36	10.30
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	9,69	-7.19	4.45	11.89	10.47
Informasi dan Komunikasi	12,54	5.73	-0.39	2.37	9.48
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,37	6.76	6.01	-1.26	-4.13
Real Estate	7,28	1.90	-1.27	5.24	5.00
Jasa Perusahaan	7,49	-5.42	1.47	4.11	7.81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,91	-7.68	0.13	1.68	1.57
Jasa Pendidikan	8,17	-6.65	-1.80	3.47	2.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,23	2.36	-0.28	8.26	0.31
Jasa Lainnya	10,53	-5.08	3.58	5.04	4.80
<b>PERTUMBUHAN PDRB</b>	<b>5,67</b>	<b>-2.34</b>	<b>2.57</b>	<b>2.31</b>	<b>5.25</b>

Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 4,24 persen pada tahun 2023, mengalami peningkatan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh berputarnya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 14,46 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,47 persen dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,30 persen. Sementara Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dalam pertumbuhannya sampai 10,08 persen.

Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 27,46 persen dan Mamasa dengan kontribusi terendah sebesar 5,96 persen pada tahun 2023. Persentase kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.7 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

#### 2.1.4.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, di mana Cenderung menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh : 1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen. 2) Inflasi Non Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor fundamental di antaranya : 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik, Tarif Angkutan, dll).

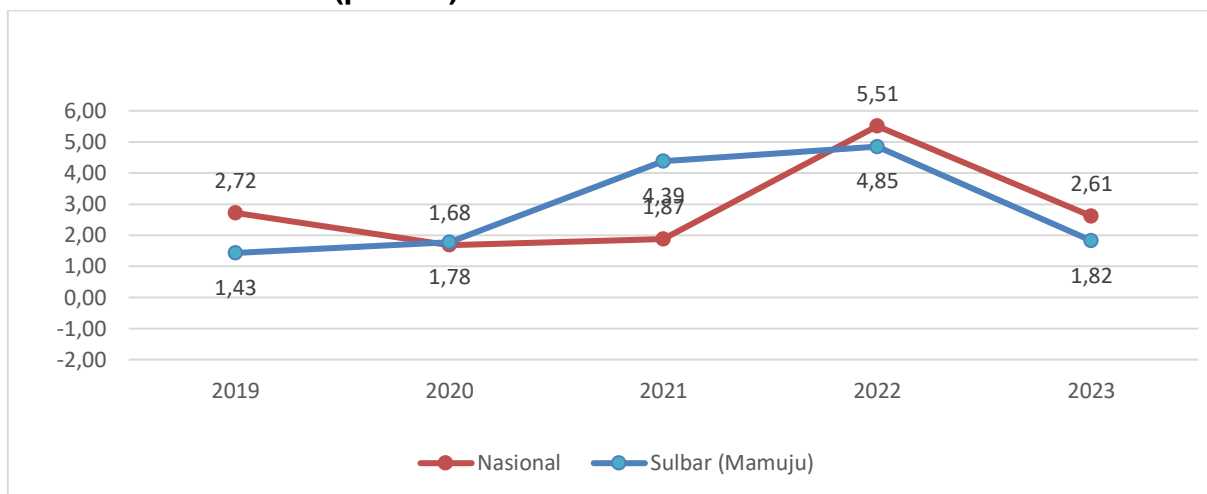
Laju inflasi secara umum di Kota Mamuju pada tahun 2023 adalah 1,82 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,31 persen dan disusul oleh, laju inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar mencapai 3,21 persen.

Dari seluruh kelompok pengeluaran, Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2022. Tercatat, pada tahun 2023 laju deflasi kelompok pengeluaran Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,09 persen.

Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2019 inflasi Sulawesi Barat sebesar 1,43 persen berada di bawah rata-rata nasional sebesar 2,72 persen.

Inflasi mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 yang sebesar 4,85 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,82 persen berada di bawah angka nasional sebesar 2,61 persen.

**Grafik 2.8 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen)**

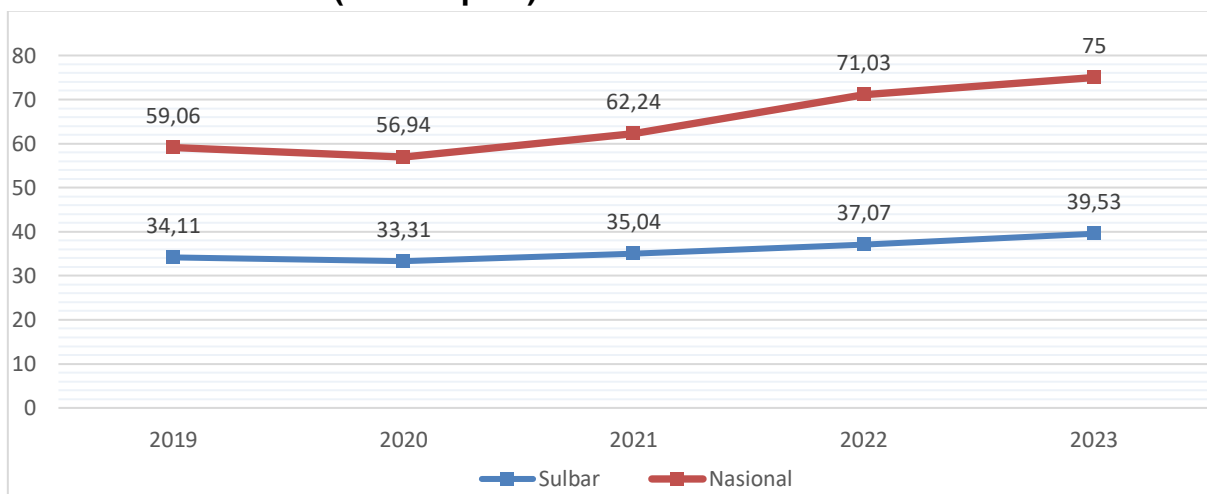


Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

#### 2.1.4.1.3 Pendapatan Per Kapita

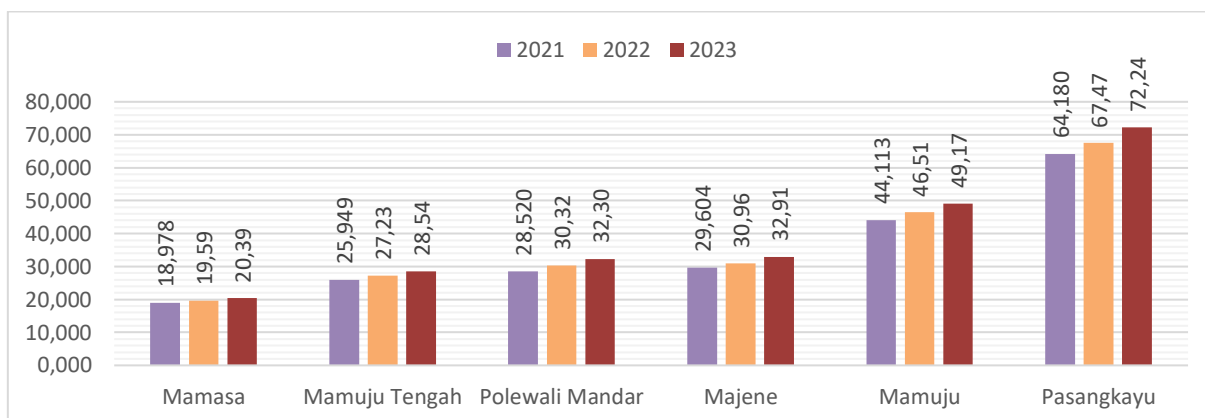
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

**Grafik 2.9 Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023*

**Grafik 2.10 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2021–2023 (Juta Rupiah)**



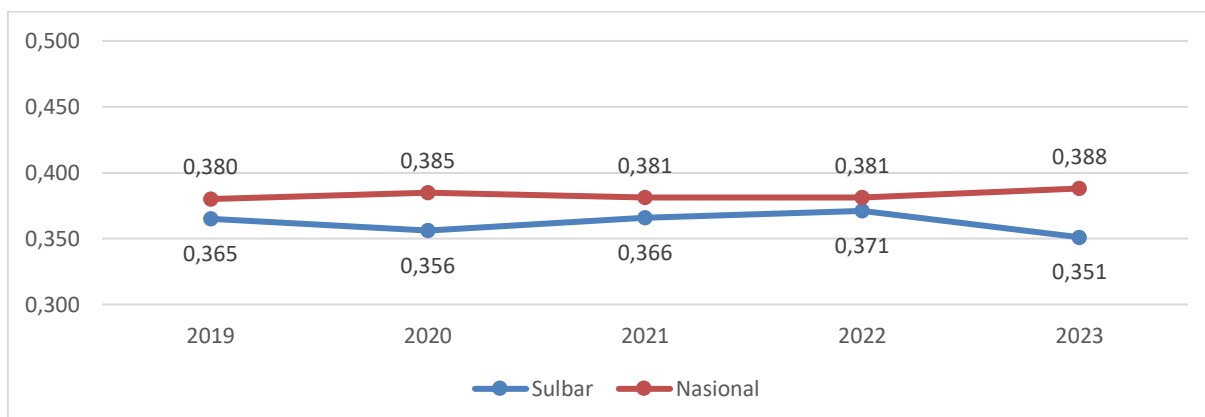
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 34,11 juta meningkat sebesar 39,53 juta pada tahun 2023 masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 75,00 juta. Rasio Pendapatan Per Kapita antara Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2018 sebesar 57,92 persen meningkat tahun 2023 sebesar 52,71 persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten di mana Pasangkayu sebesar 72,24 juta dan Mamasa hanya sebesar 20,39 juta rupiah. Tingginya pendapatan per kapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### 2.1.4.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

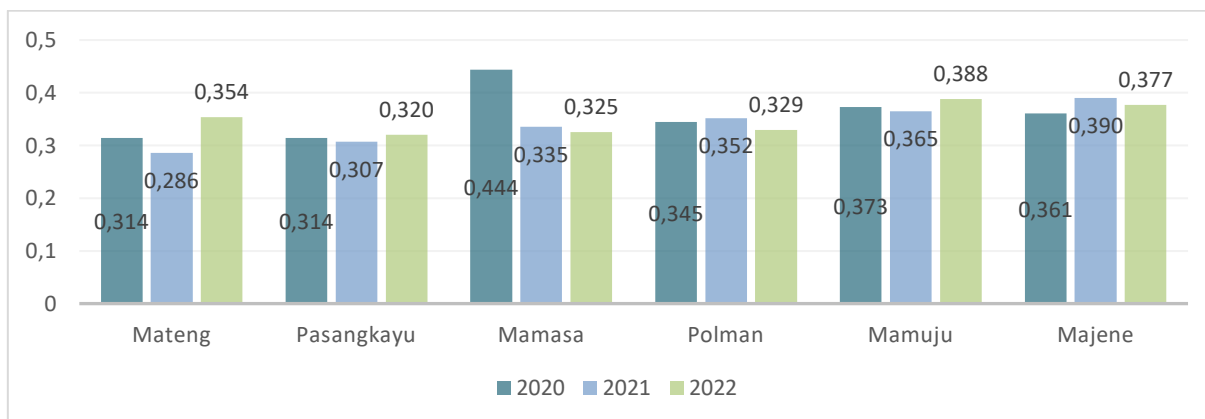
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,351 angka ini naik sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,371, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

**Grafik 2.11 Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Grafik 2.12 Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020–2022**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

#### 2.1.4.1.5 Kondisi Kemiskinan

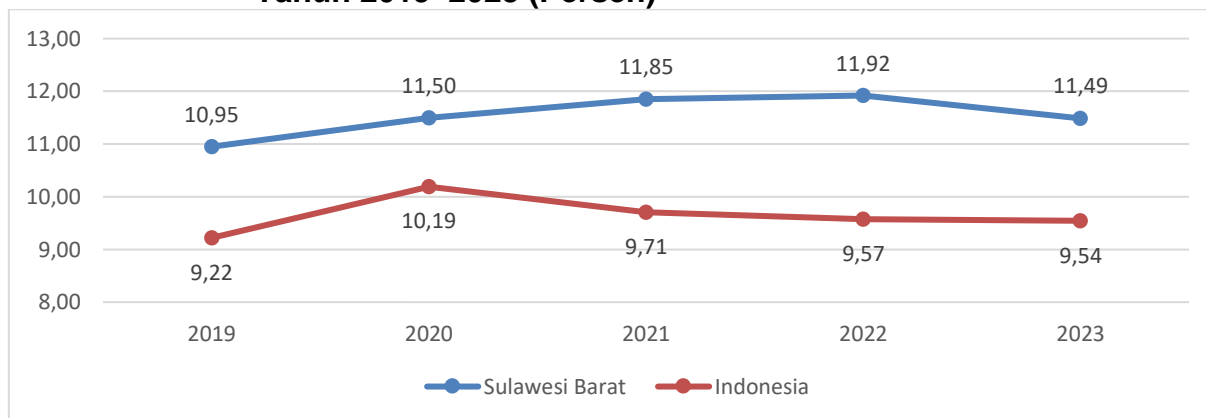
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di antara berbagai sektor. Kemajuan pembangunan suatu daerah sangat terkait dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi kunci utama. Namun, pertumbuhan tersebut perlu disertai dengan upaya pemerataan pendapatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan faktor-faktor seperti pendidikan rendah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang kurang memadai. Upaya pengentasan kemiskinan yang berhasil harus melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Hanya dengan keterpaduan di antara mereka, dapat dihasilkan solusi yang efektif. Keseluruhan, penanganan kemiskinan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitasnya, bersama dengan komitmen untuk menciptakan perubahan positif melalui upaya bersama yang holistik.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu 10,95 persen pada (September) tahun 2019 menjadi 11,92 persen pada tahun 2022 (Maret) dan pada tahun 2023 (Maret) kembali mengalami penurunan menjadi 11,49 persen atau menurun 0,43 persen poin. Pencapaian persentase penduduk miskin

Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,54 persen pada tahun 2023 (Maret). Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,13 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,03 poin persentase per tahun.

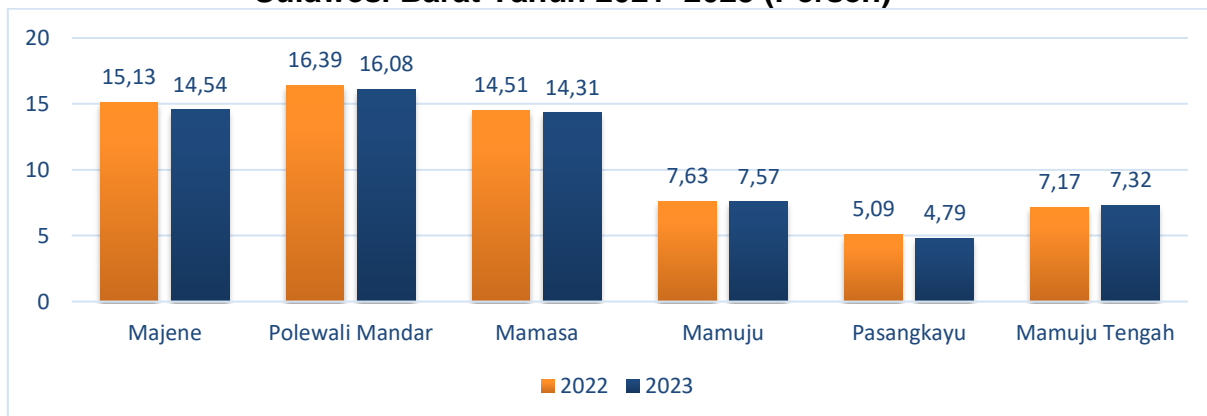
**Grafik 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2019–2023 (Persen)**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

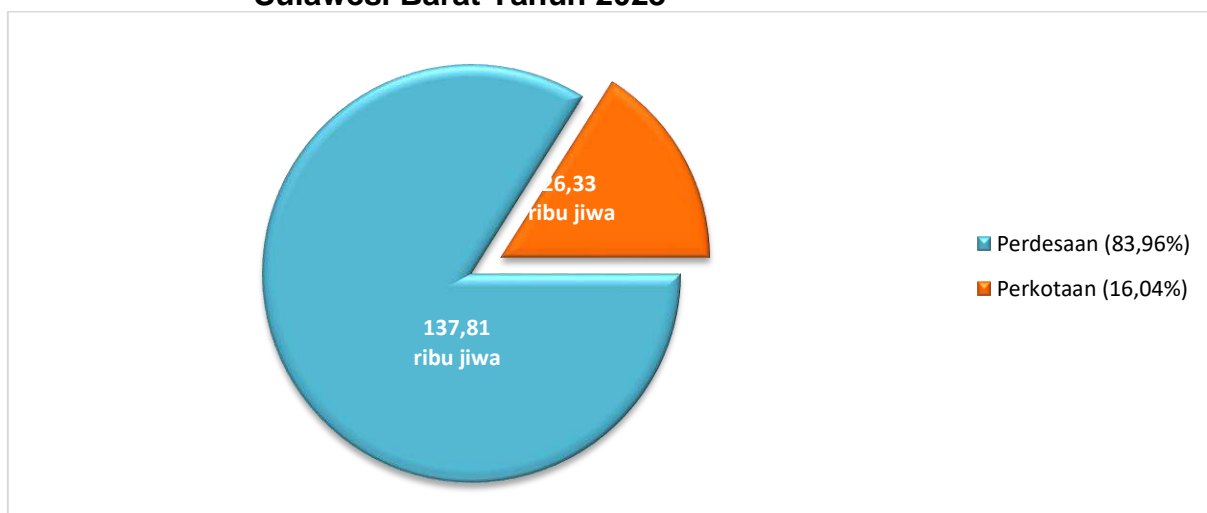
Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat sudah mengarah ke perbaikan tingkat kesejahteraan, data Tahun 2023 menunjukkan ada 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum optimal dan belum terintegrasi sehingga perlu membangun model pembangunan kemiskinan secara bottom up sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Sulawesi Barat dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar dilakukan secara nyata lintas sektor dan terintegrasi. Pembangunan Kemiskinan diharapkan fokus kepada wilayah perdesaan tanpa mengabaikan kemiskinan pada wilayah perkotaan karena 18 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat berada pada wilayah perkotaan.

**Grafik 2.14 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023 (Persen)**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) 2024

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat (Maret 2023) didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 137,81 ribu jiwa atau sekitar 83,96 persen dan penduduk miskin perkotaan sebesar 26,33 ribu jiwa atau sekitar 16,04 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

**Tabel 2.28 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Ribu)**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	23,76	24,12	25,01	26,62	25,80
Polewali Mandar	68,86	68,18	69,32	72,87	71,92
Mamasa	21,64	21,86	22,29	23,70	23,58
Mamuju	20,57	20,65	22,30	23,26	23,50
Pasangkayu	7,42	7,95	8,53	9,30	8,94
Mamuju Tengah	9,16	9,25	9,74	9,98	10,39
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>151,40</b>	<b>152,02</b>	<b>157,19</b>	<b>165,72</b>	<b>164,14</b>

Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

**Tabel 2.29 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (persen)**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	13,72	13,73	14,34	15,13	14,54
Polewali Mandar	15,60	15,26	15,68	16,39	16,08
Mamasa	13,42	13,38	13,77	14,51	14,31
Mamuju	7,06	6,92	7,46	7,63	7,57
Pasangkayu	4,28	4,48	4,77	5,09	4,79
Mamuju Tengah	6,87	6,79	7,13	7,17	7,32
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>11,02</b>	<b>10,87</b>	<b>11,29</b>	<b>11,75</b>	<b>11,49</b>

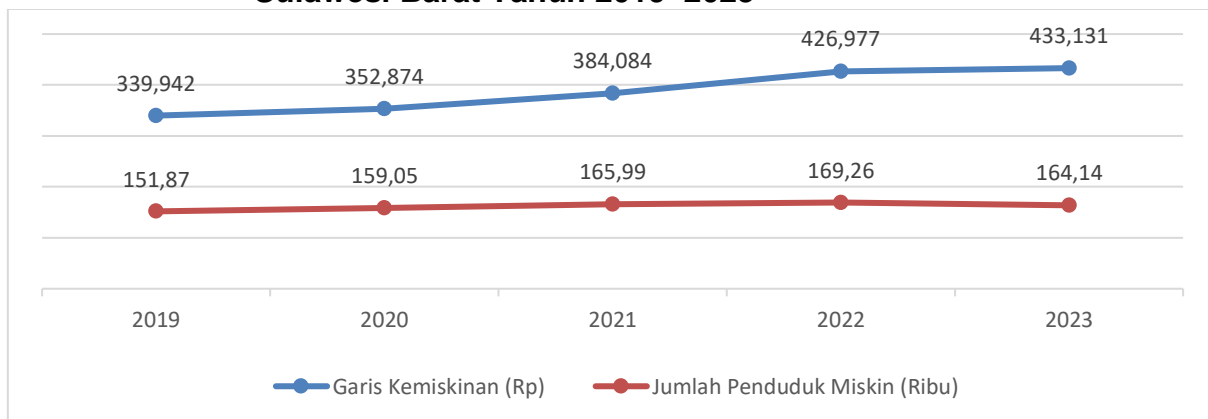
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Tabel 2.30 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Rupiah)**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	332.145	384.344	399.350	433.111	461.255
Polewali Mandar	259.969	401.057	416.443	452.836	482.658
Mamasa	256.544	273.513	283.758	312.206	329.768
Mamuju	376.827	277.078	287.896	319.586	340.795
Pasangkayu	360.362	354.115	367.941	404.318	432.269
Mamuju Tengah	239.592	255.440	265.413	290.030	309.227
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>339.942</b>	<b>352.874</b>	<b>364.251</b>	<b>405.187</b>	<b>433.131</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

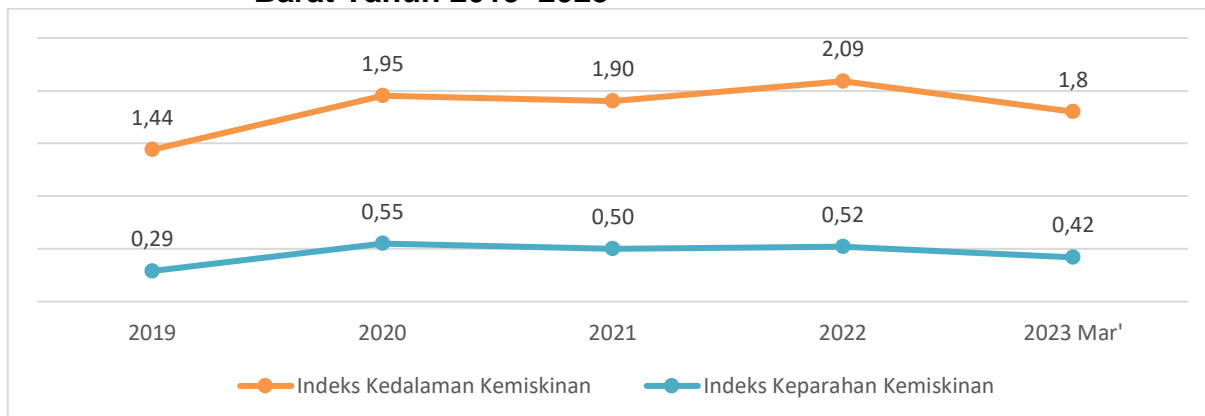
**Grafik 2.15 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 garis kemiskinan sebesar 339.942 rupiah per kapita perbulan, naik pada tahun 2023 sebesar 433.131 rupiah per kapita perbulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 151,87 ribu jiwa menjadi 164,14 ribu jiwa pada tahun 2023. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum membaik selama masa endemi covid-19.

**Grafik 2.16 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

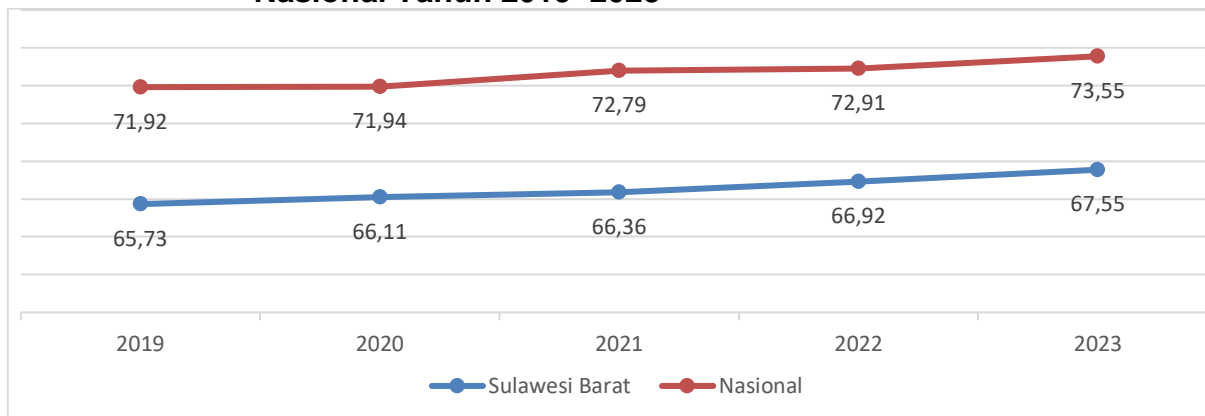
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar 1,80 atau naik 0,29 poin dibandingkan Tahun 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,22 naik 0,10 poin dibandingkan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 2023 dengan turunnya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan, dan juga dengan turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin besar.

#### 2.1.4.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2019 adalah sebesar 65,73 dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 67,55 atau naik sebesar 1,82 poin.

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat ke tiga belas secara nasional dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 0,94 persen sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,88 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2023, kecuali komponen pengeluaran per kapita.

**Grafik 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2023 sebesar 73,55. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 69,61 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 69,11 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 65,59.

**Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

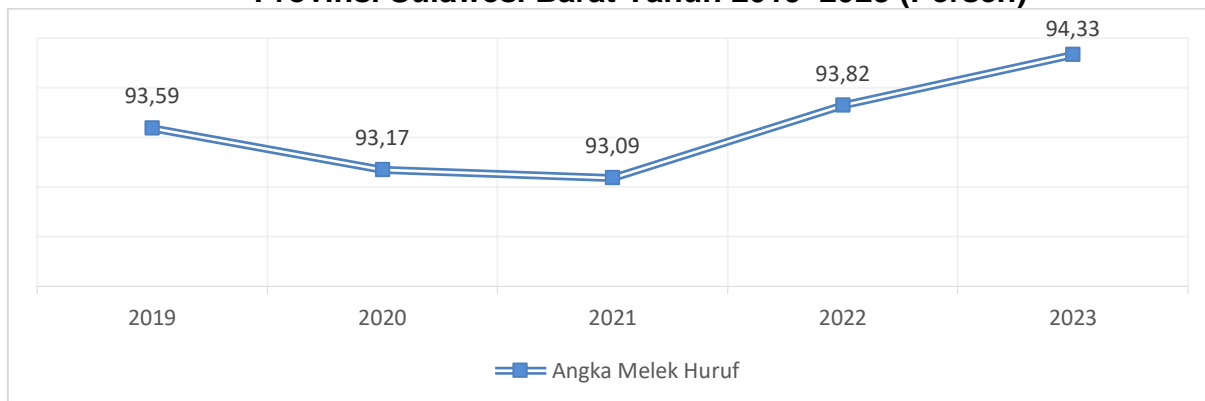
Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	66,59	66,91	67,29	67,84	68,62
Polewali Mandar	63,74	63,84	64,23	64,79	65,59
Mamasa	65,32	66,02	66,63	67,21	67,83
Mamuju	67,72	68,15	68,32	68,88	69,61
Pasangkayu	67,27	67,79	68,03	68,61	69,11
Mamuju Tengah	65,10	65,71	66,18	66,89	67,45
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>65,73</b>	<b>66,11</b>	<b>66,36</b>	<b>66,92</b>	<b>67,55</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

#### 2.1.4.1.7 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.

**Grafik 2.18 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 angka melek huruf sebesar 93,59 persen mengalami penurunan sebesar 93,17 persen di tahun 2020, turun kembali sebesar 93,09 persen di tahun 2021 dan naik sebesar 93,82 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 94,33 di tahun 2023.

**Tabel 2.32 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)**

Kabupaten	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	95,20	95,85	94,19	97,35	97,21
Polewali Mandar	90,98	91,16	91,38	91,28	91,79
Mamasa	94,21	92,66	92,97	91,90	92,65
Mamuju	94,65	93,13	93,29	94,37	94,75
Pasangkayu	96,46	95,13	95,89	96,72	97,21
Mamuju Tengah	93,84	94,68	93,42	94,93	96,39

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

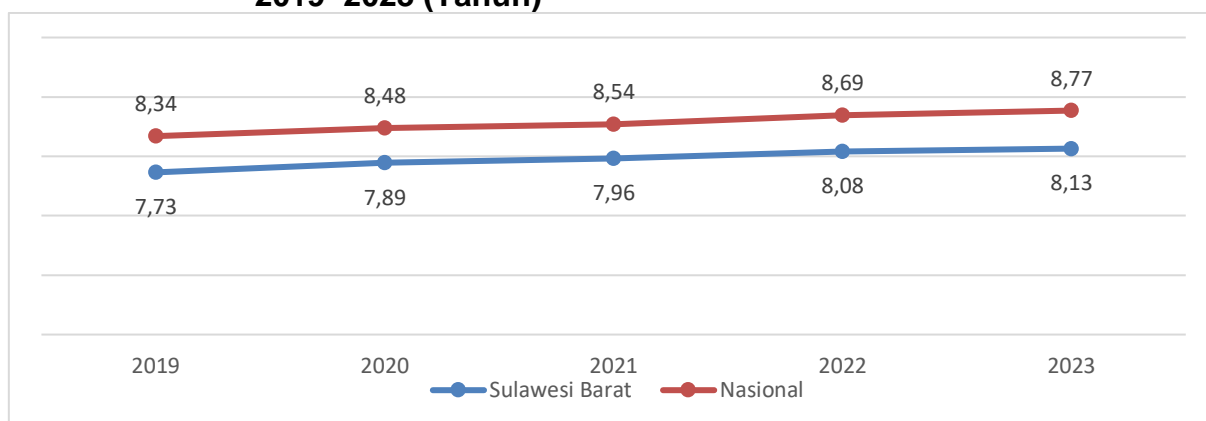
Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah dari 94,93 tahun 2022 menjadi 96,37 di tahun 2023, Kabupaten Mamasa dari 91,90 tahun 2022 menjadi 92,65 di tahun 2023, serta Kabupaten Polewali Mandar dari 91,28 tahun 2022 menjadi 91,79 di tahun 2023. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Majene yang justru mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 97,35 menjadi 97,21. Dengan demikian, pada skala provinsi mengalami peningkatan terjadi pada 2022 sebesar 93,82 menjadi 94,33 di tahun 2023 atau naik 0,51 poin.

#### 2.1.4.1.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat pada tahun 2023 sebesar 8,13 tahun, ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk di Sulawesi Barat hanya setara SLTP kelas 2 dan berada di bawah rata-rata nasional

sebesar 8,77 tahun. Dalam kurun tahun 2019-2023 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat hanya tumbuh 1,63 persen per tahun sementara nasional tumbuh 1.43 persen per tahun. Kabupaten Majene adalah kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 9,29 pada tahun 2023. Sedangkan kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang terendah dengan capaian hanya sebesar 7,71.

**Grafik 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (Tahun)**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Tahun)**

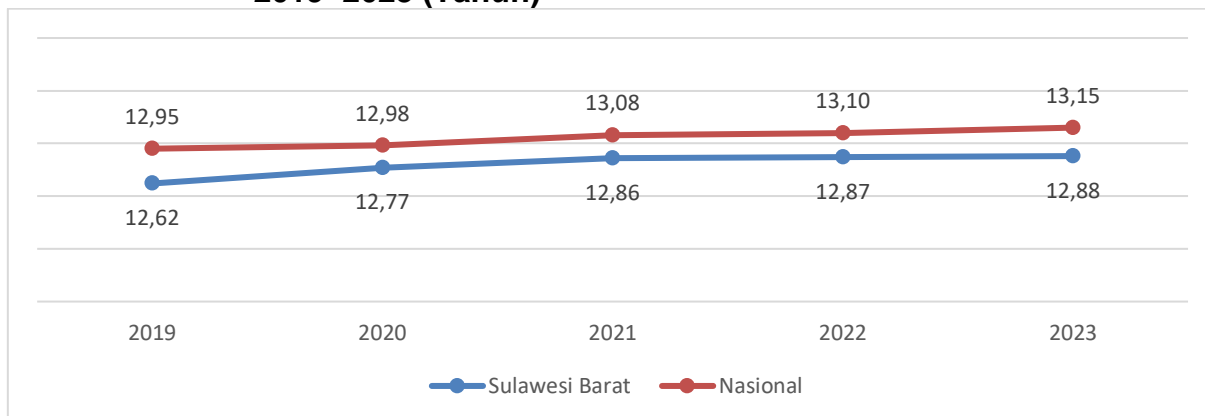
Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	8,52	8,65	8,91	9,10	9,29
Polewali Mandar	7,40	7,41	7,44	7,60	7,71
Mamasa	7,37	7,65	7,88	8,00	8,11
Mamuju	7,69	7,95	7,96	8,09	8,16
Pasangkayu	7,92	7,98	8,09	8,11	8,11
Mamuju Tengah	7,24	7,46	7,51	7,61	7,73
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>7,73</b>	<b>7,89</b>	<b>7,96</b>	<b>8,08</b>	<b>8,13</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

#### 2.1.4.1.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,88 tahun berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 13,15 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat tahun 2023 tumbuh 0,01 poin dari tahun 2022, sementara Indonesia tumbuh 0,05 poin. Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan angka sebesar 13,71 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene yang juga tinggi.

**Grafik 2.20 Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (Tahun)**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Tahun)**

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	13,60	13,61	13,62	13,63	13,71
Polewali Mandar	13,05	13,06	13,38	13,39	13,48
Mamasa	11,74	12,05	12,36	12,53	12,54
Mamuju	13,18	13,19	13,24	13,25	13,26
Pasangkayu	11,66	11,93	11,95	12,06	12,07
Mamuju Tengah	11,92	12,23	12,53	12,65	12,66
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>12,66</b>	<b>12,77</b>	<b>12,86</b>	<b>12,87</b>	<b>12,88</b>

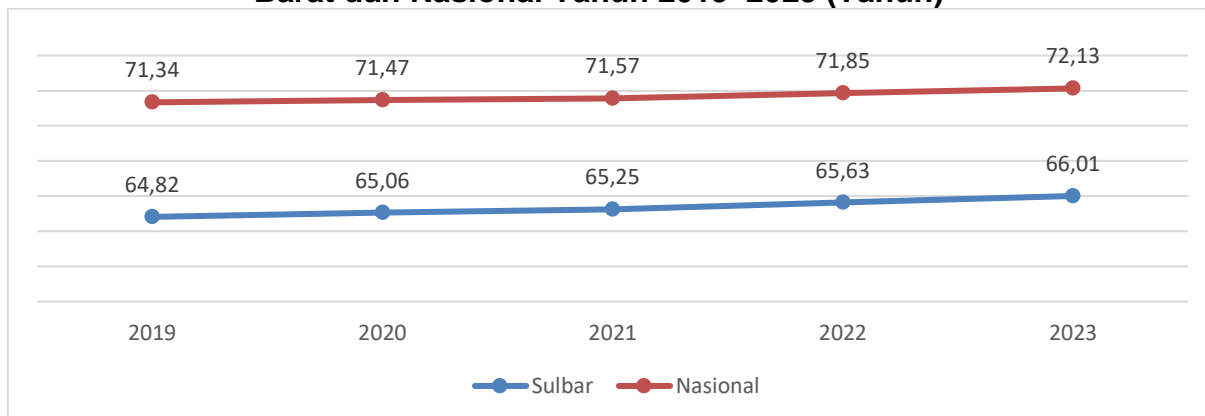
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

#### 2.1.4.1.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur harapan hidup saat lahir merupakan wujud dari indikator kesehatan penduduk. Umur harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir sampai waktu tertentu. Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya umur harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat dan lain sebagainya.

Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan tergolong masih rendah, di mana umur harapan hidup tahun pada 2023 sebesar 66,01 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 72,13 tahun. Akan tetapi tren pertumbuhan umur harapan hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,44 persen per tahun jauh di atas rata-rata capaian nasional yang hanya tumbuh 0,26 persen per tahun. Perlahan namun pasti pergerakan umur harapan hidup Sulawesi Barat semakin mendekati umur harapan hidup Nasional.

**Grafik 2.21 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019–2023 (Tahun)**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

**Tabel 2.35 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Tahun)**

Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	61,30	61,56	61,77	62,16	62,56
Polewali Mandar	62,18	62,38	62,53	62,86	63,20
Mamasa	70,75	70,87	70,94	71,20	71,45
Mamuju	67,23	67,52	67,77	68,21	68,66
Pasangkayu	65,91	66,20	66,45	66,90	67,33
Mamuju Tengah	68,06	68,30	68,55	68,97	69,37
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>64,82</b>	<b>65,06</b>	<b>65,25</b>	<b>65,63</b>	<b>66,01</b>

Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

Berdasarkan data BPS tahun 2023 kabupaten Mamasa merupakan kabupaten dengan umur harapan hidup paling tinggi sebesar 71,45 tahun sedangkan kabupaten dengan umur harapan hidup terendah adalah kabupaten Majene dengan umur harapan hidup hanya sebesar 62,56 tahun.

#### 2.1.4.1.11 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Balita Gizi Kurang adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. persentase balita gizi kurang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, pada tabel di bawah ini digambarkan bahwa persentase balita gizi kurang paling rendah adalah Kabupaten Polewali Mandar 3,5 persen, Mamasa 3,8 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki persentase lebih tinggi daripada Kabupaten lainnya yaitu 9,1 persen.

**Tabel 2.36 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0–59 Bulan Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020**

KABUPATEN	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)	
		JUMLAH	PERSENTASE
Majene	12.675	810	6,4
Polewali Mandar	32.393	1.118	3,5
Mamasa	7.540	288	3,8
Mamuju	13.211	1.200	9,1
Pasangkayu	11.409	1.021	8,9
Mamuju Tengah	8.846	551	6,2
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>86.074</b>	<b>4.988</b>	<b>5,8</b>

Sumber: Buku Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat 2021

#### 2.1.4.1.12 Stunting

Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu karena kurangnya asupan gizi secara kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan tinggi badan atau panjang tubuh anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan kesehatan pemerintahan. Sedangkan gizi buruk adalah kondisi kekurangan energi dan protein yang parah karena kurangnya konsumsi makanan bergizi atau penyakit yang berlangsung dalam waktu lama. Gizi buruk biasanya ditandai dengan berat badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Pengukuran stunting dan gizi buruk memiliki indikator yang berbeda, dimana stunting umumnya diukur melalui tinggi badan menurut usia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 diangka 35,0 persen, menurun 4,7 persen menjadi 30,3 persen pada Tahun 2023.

Sedangkan pada tingkat kabupaten, sesuai hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, untuk Kabupaten Mamasa angka prevalensi stunting sebesar 37,6 persen merupakan nilai tertinggi diantara kabupaten lain di Sulawesi Barat, kemudian Kabupaten Mamuju dimana angka prevalensi stunting sebesar 32,8 persen, Kabupaten Majene sebesar 30,5 persen, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 28,1 persen, dan Kabupaten Pasangkayu serta Kabupaten Mamuju Tengah dengan angka prevalensi stunting terendah pada tahun 2023 masing masing sebesar 27,9 persen.

**Tabel 2.37 Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, SKI 2023**

Kabupaten/Kota	Status Gizi Balita								N tertimbang
	Stunting		Wasting		Underweight		Overweight		
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	
Majene	30,5	26,9 - 34,3	9,1	7,2 - 11,5	23,8	20,1 - 28,0	1,1**	0,5 - 2,3	261
Polewali Mandar	28,1	23,0 - 33,8	8,3	6,3 - 10,9	23,8	20,1 - 27,9	1,5**	0,6 - 3,8	625
Mamasa	37,6	33,0 - 42,4	6,5	4,3 - 9,8	19,2	15,9 - 23,0	3,1**	1,7 - 5,5	211
Mamuju	32,8	27,7 - 38,3	9,9	7,4 - 13,1	23,3	19,7 - 27,5	2,4**	1,4 - 3,8	399
Pasangkayu	27,9	23,6 - 32,6	10,1	7,8 - 13,0	19,0	14,7 - 24,1	4,3	2,7 - 6,7	263
Mamuju Tengah	27,9	23,6 - 32,6	15,6	12,2 - 19,7	28,8	24,5 - 33,5	4,0	2,5 - 6,3	202
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>30,3</b>	<b>28,1 - 32,6</b>	<b>9,5</b>	<b>8,4 - 10,8</b>	<b>23,1</b>	<b>21,3 - 24,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9 - 3,2</b>	<b>1.960</b>

\*\*Relative Standard Error (RSE) > 25% merupakan estimasi akurasi yang kurang baik untuk menggambarkan populasi balita di kab/kota

Sumber: SKI 2023 Dalam Angka, BKPK Kemenkes RI

Tren Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat, namun meskipun secara statistik terjadi penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih tinggi jika mengacu kepada standar WHO yakni di bawah 20 persen. Tingginya angka pernikahan dini kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta perilaku masyarakat yang belum secara maksimal menerapkan hidup sehat menjadi beberapa faktor penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 2.38 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang Kesehatan Tahun 2019–2023 (Persen)**

URAIAN KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	40.38	N/A	33.8	35	30.3
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prevalensi anemia pada ibu hamil	N/A	19.2	13.7	N/A	N/A
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	76.5	76.4	27.8	30.9	27.5
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	91.81	91.3	91.28	N/A	N/A
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	72.66	86.09	86.86	88.3	81.8
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	79.5	69.7	77.6	50	50
Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0,55	0,24	0,26	0,12	0,08
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	588,198	666,348	680,873	N/A	N/A
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100	100	100
Unmet need pelayanan kesehatan	6.36	6.84	22.41	N/A	N/A

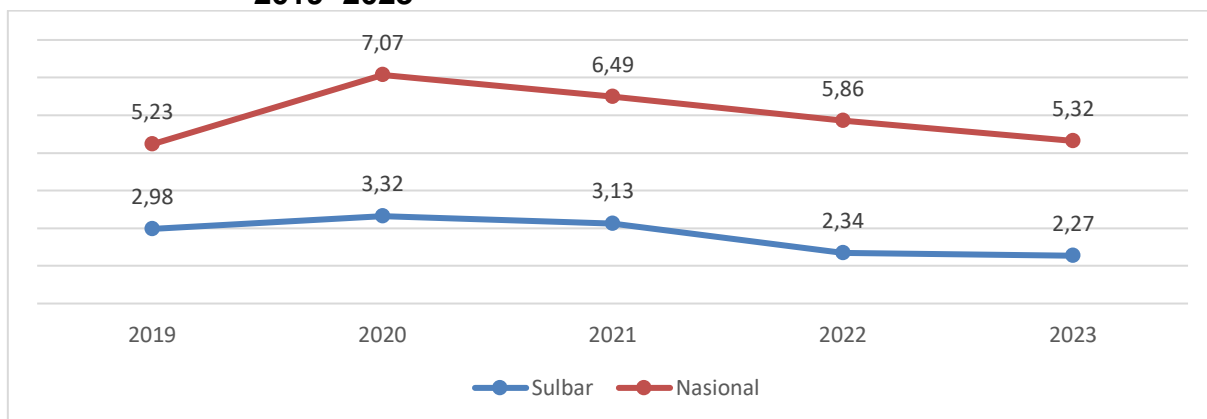
*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024*

#### **2.1.4.1.13 Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 2,98 dan tertinggi berada pada tahun 2020. Pada tahun 2019 TPT Sulawesi Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan TPT sebesar 2,98 Namun sejak pandemi yang terjadi di tahun 2020 angka TPT naik sebesar 3,32 persen meski kembali membaik di tahun 2022 sebesar 2,34 persen. Meskipun demikian Tingkat

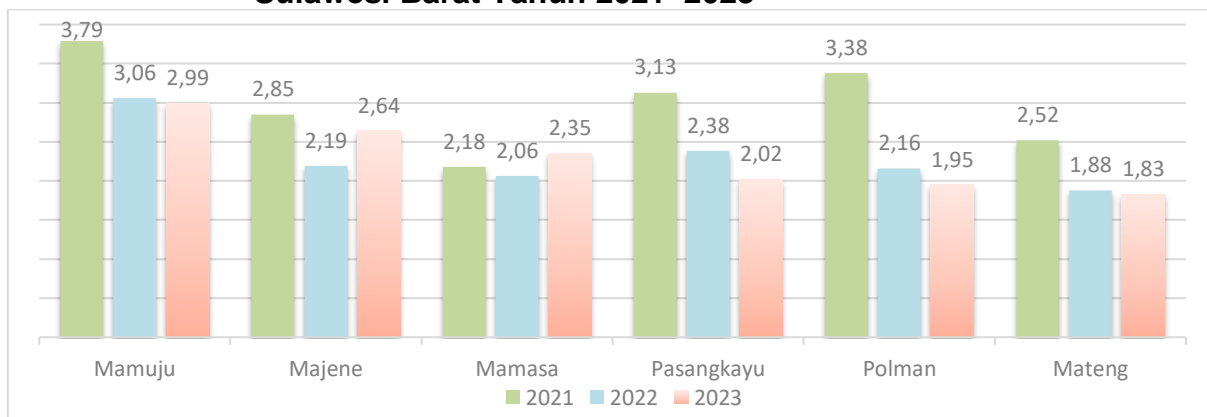
Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 5,32 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional.

**Grafik 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Grafik 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023**



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

**Tabel 2.39 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	956.647	991.723	1.008.650	1.026.627	1.070.098
Bekerja	641.613	672.986	686.540	731.902	743.007
Pengangguran	21.054	23.132	22.210	17.545	17.273
Angkatan Kerja	662.667	692.118	708.750	749.447	760.280
Bukan Angkatan Kerja	293.980	295.605	299.900	277.180	309.818
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>3,18</b>	<b>3,34</b>	<b>3,13</b>	<b>2,34</b>	<b>2,27</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>69,27</b>	<b>70,19</b>	<b>70,27</b>	<b>73,00</b>	<b>71,05</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020–2024

Rendahnya angka TPT di Sulawesi barat menunjukkan rendahnya angka pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,92 persen di Tahun 2022 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka

kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di pekerjaan informal yang diberi upah rendah.

#### **2.1.4.1.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja**

Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 adalah 96,82 persen turun di tahun 2020 sebesar 96,68 dan naik pada tahun 2021 menjadi 96,87 persen kemudian naik kembali pada tahun 2022 menjadi 97,66 dan naik kembali di tahun 2023 sebesar 97,73. Dari angka tersebut, terdapat 97,73 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 2,27 persen adalah pengangguran. Mereka yang berstatus pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja.

**Tabel 2.40 Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2019–2023**

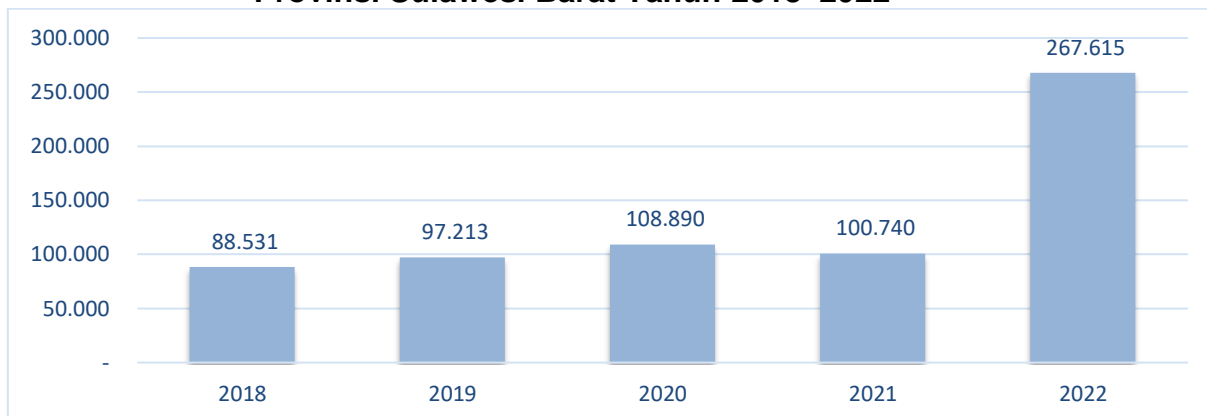
Keterangan	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk yang bekerja	Jiwa	641.613	672.986	686.544	731.902	743.007
Angkatan Kerja	Jiwa	662.667	696.118	708.752	749.447	760.280
Rasio Penduduk yang bekerja	%	96,82	96,68	96,87	97,66	97,73

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020–2024*

#### **2.1.4.1.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2022 yang sebesar 267.615 jiwa, dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 hingga menjadi 108.890 jiwa. Angka pada Tahun 2020 yang terdiri dari 71.591 jiwa untuk keluarga pra sejahtera sedangkan keluarga sejahtera I sebesar 37.299 jiwa. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

**Grafik 2.24 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018–2022**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase PAD terhadap pendapatan	%		18,87			
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	75,00	78,80	74,60	76,02	
Penguatan Cadangan Pangan	%			23,83	158,56	
Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	10	5	26,09	46,38	

Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

**Tabel 2.42 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	(%)	3,62	0,26	32,46	32,32	
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(%)	0,34	0,33	0,34	0,36	0,36
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	(%)	2,24	2,19	2,20	2,15	
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	(%)	0,25	0,24	0,22	0,23	
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	(%)	5,00	5,00	11,03	11,51	
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	(%)	10,21	10,19	9,89	9,91	
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	(%)	10,74	10,62	10,67	10,92	
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	
Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	(%)	0,13	0,14	N/A	N/A	

Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

### 2.1.4.2 Aspek Daya Saing

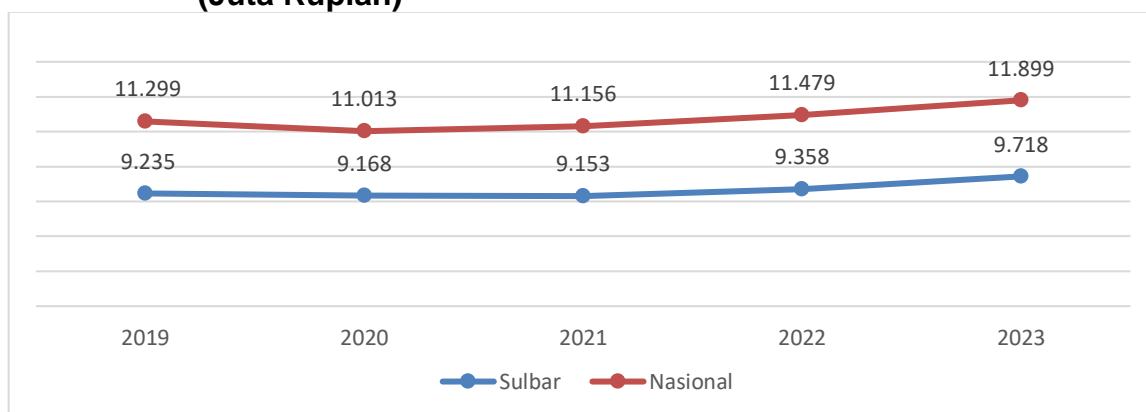
Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional Sulawesi maupun nasional.

#### 2.1.4.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

##### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita

Pengeluaran per kapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat sebesar 9,235 juta per kapita per tahun di tahun 2019 naik menjadi 9,718 juta per kapita per tahun pada tahun 2023 dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 11,899 juta per kapita per tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita Sulawesi Barat tumbuh 1,45 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 1,50 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat.

**Grafik 2.25 Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

**Tabel 2.43 Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, Tahun 2019–2023 (Ribuan Rupiah)**

Kabupaten	Pengeluaran Per kapita				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	10.029	10.056	10.028	10.152	10.462
Polewali Mandar	8.598	8.580	8.548	8.726	9.096
Mamasa	7.769	7.747	7.736	7.837	8.108
Mamuju	9.535	9.500	9.494	9.668	10.075
Pasangkayu	11.094	11.111	11.072	11.330	11.649
Mamuju Tengah	8.501	8.414	8.408	8.633	8.821
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>9.235</b>	<b>9.168</b>	<b>9.153</b>	<b>9.358</b>	<b>9.718</b>

Sumber: BPS, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023 hingga 5,25 persen. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 58,55 triliun rupiah pada tahun 2023 sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 20,78 triliun rupiah meningkat menjadi Rp.35,43 triliun rupiah. Pada tahun 2023, PDRB per kapita ADHB telah mencapai 35,04 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 22,88 juta rupiah.

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2023, menurut golongan pengeluaran tertinggi, terdapat 28,45 persen penduduk dengan antara Rp.500.000,- hingga Rp.749.999,- per kapita sebulan. Sedangkan persentase terendah pada golongan pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- sebesar 1,16 persen. Pengeluaran per kapita sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023**

Golongan Pengeluaran per Kapita	2021	2022	2023
<150.000	-	-	-
150.000-199.999	0,21	0,13	-
200.000-299.999	5,81	3,26	1,16
300.000-499.999	24,55	24,86	16,77
500.000-749.999	25,20	30,12	28,45
750.000-999.999	15,74	14,59	17,65
1.000.000-1.499.999	44,61	17,20	21,10
1.500.000+	11,48	9,84	14,88
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2019–2023**

Provinsi	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Barat	16.027,99	16.104,41	16.412,46	17.002,57	17.491,99

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi berada di Kabupaten Pasangkayu. Dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mamasa. Berikut tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan menurut Kabupaten.

**Tabel 2.46 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 (Rupiah)**

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Majene	430.083	476.689	429.330	443.342	859.413	920.030
Polewali Mandar	497.167	525.462	386.703	478.588	883.870	1.004.050
Mamasa	384.227	426.527	305.643	380.855	689.870	807.382
Mamuju	468.113	541.678	525.768	552.398	993.881	1.094.076
Pasangkayu	641.401	663.224	627.631	590.837	1.269.032	1.254.062
Mamuju Tengah	535.143	531.319	590.870	607.105	1.126.013	1.138.424
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>491.876</b>	<b>530.104</b>	<b>464.029</b>	<b>506.416</b>	<b>955.905</b>	<b>1.036.520</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**b. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

**Tabel 2.47 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Harga yang diterima petani (It)	142,70	122,58	132,28	134,15	143,73
Indeks Harga yang dibayar petani (Ib)	127,58	106,32	108,39	113,95	118,33
<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	<b>111,85</b>	<b>115,30</b>	<b>122,04</b>	<b>117,72</b>	<b>121,47</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2023 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.48 Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023**

Bulan	Nilai Tukar Petani				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	110,60	109,55	116,92	127,16	116,44
Februari	109,15	111,80	116,67	128,18	117,25
Maret	109,56	110,42	117,03	129,93	121,27
April	111,09	108,91	118,86	127,24	119,63
Mei	112,01	106,41	120,07	114,00	116,39
Juni	113,01	104,34	120,06	108,92	115,96
Juli	113,25	104,76	119,93	100,36	118,59
Agustus	112,29	107,25	121,94	107,38	121,52
September	112,19	109,78	124,79	114,04	126,59
Oktober	112,23	111,80	127,86	116,66	126,36
November	112,68	113,08	130,33	121,55	128,03
Desember	114,04	115,30	129,66	118,55	129,60

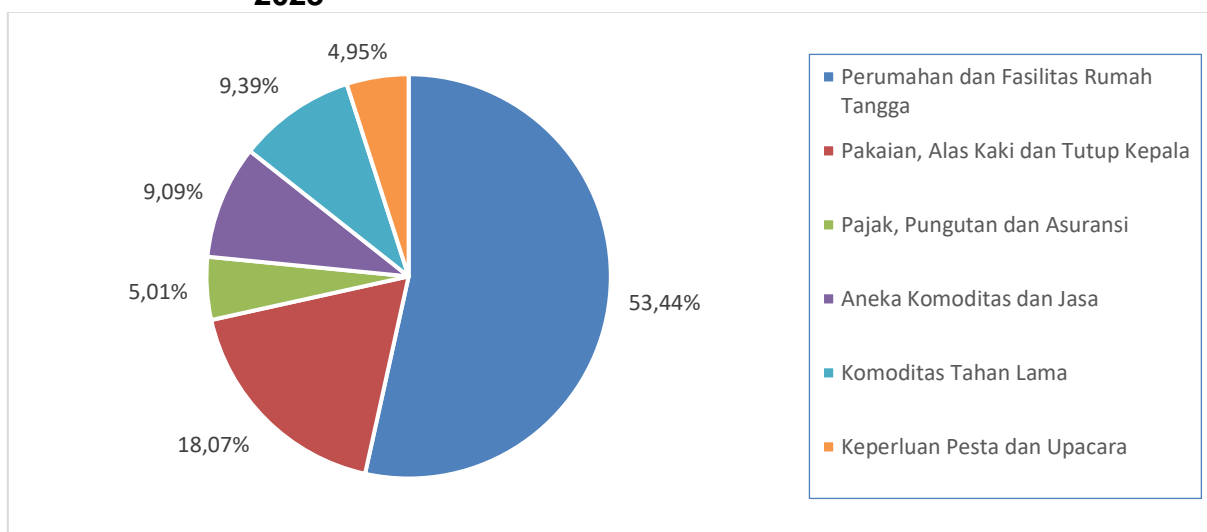
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Selama Tahun 2019 NTP Sulawesi Barat terlihat berfluktuatif nilai NTP paling tinggi sebesar 114,04 pada Desember 2019 dan 129,60 pada Desember 2023, dan sepanjang tahun 2019 dan 2023 nilai NTP Sulawesi Barat selalu berada di atas 100 baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik dan tetap harus terus dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan tingkat serapan Tenaga Kerja paling tinggi.

### c. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan yang paling tinggi adalah pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, sekitar 25,65 persen dan paling rendah adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara sekitar 1,43 persen.

**Diagram 2.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.49 Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kelompok Komoditas Non Pangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perumahan, dan fasilitas rumah tangga	158.994	48,37	197.395	51,18	218.220	49,66	245.147	52,84	270.637	53,44
Aneka komoditas dan jasa	70.500	21,45	75.310	19,52	78.020	17,76	86.322	18,60	91.575	9,09
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	22.175	6,75	24.926	6,46	28.061	6,39	25.888	5,58	25.446	18,07
Komoditas tahan lama	40.674	12,37	49.722	12,89	63.392	14,43	46.131	9,95	46.073	9,39
Pajak, pungutan, dan asuransi	26.724	8,13	26.118	6,77	38.482	8,76	46.843	10,09	47.595	5,01
Keperluan pesta dan upacara	9.616	2,93	12.247	3,18	13.175	3,00	13.698	2,95	25.090	4,95
<b>Total</b>	<b>328.683</b>	<b>100</b>	<b>385.717</b>	<b>100</b>	<b>439.349</b>	<b>100</b>	<b>464.029</b>	<b>100</b>	<b>506.416</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020-2024

Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran Bukan Makanan. Pengeluaran non-pangan per kapita di tahun 2019, sebesar Rp. 464.029,- meningkat sebesar Rp. 506.416,- pada tahun 2023.

**Tabel 2.50 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2023 (rupiah)**

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Majene	430.083	476.689	430.083	443.342	859.413	920.030
Polewali Mandar	497.167	525.462	497.167	478.588	883.870	1.004.050
Mamasa	384.227	426.527	384.227	380.855	698.870	807.382
Mamuju	468.113	541.678	468.113	552.398	993.881	1.094.076
Pasangkayu	641.402	663.224	641.402	590.837	1.269.032	1.254.062
Mamuju Tengah	535.142	531.319	535.142	607.105	1.126.013	1.138.424
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>491.876</b>	<b>530.104</b>	<b>491.876</b>	<b>506.416</b>	<b>955.905</b>	<b>1.036.520</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.51 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2021–2023 (persen)**

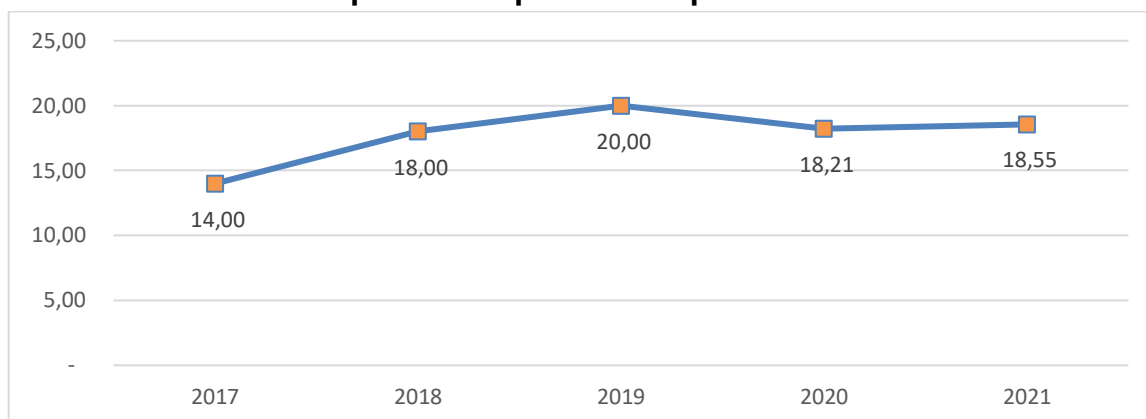
Kabupaten	Makanan			Bukan Makanan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Majene	49,03	50,04	51,81	50,97	49,96	48,19
Polewali Mandar	52,46	56,25	52,33	47,54	43,75	47,67
Mamasa	55,41	55,70	52,83	44,59	44,30	47,17
Mamuju	46,71	47,10	49,51	53,29	52,90	50,49
Pasangkayu	51,42	50,54	52,89	48,58	49,46	47,11
Mamuju Tengah	51,55	47,53	46,67	48,45	52,47	53,33
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>51,10</b>	<b>51,46</b>	<b>46,67</b>	<b>48,90</b>	<b>48,54</b>	<b>53,55</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

#### **d. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB**

Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukkan keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2017-2021, keterbukaan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah tetapi memiliki kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan oleh rasio ekspor+impor Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB, tahun 2017 sebesar 14 persen meningkat menjadi 18,55 persen di tahun 2021.

**Grafik 2.26 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2017–2021**



Sumber: BPS, PDRB Sulawesi Barat menurut Pengeluaran 2017-2021

#### 2.1.4.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur di berbagai wilayah di Sulawesi Barat terus menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan konektivitas yang baik antara berbagai wilayah.

##### a. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal

Mobilitas penduduk melalui bandara Tamba Padang selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar-Sumarorong tiga kali seminggu.

**Tabel 2.52 Aktivitas Bandara Tamba Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2019–2023**

Tahun	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2019	1.300	1.300	67.432	61.488	307.736	208.239
2020	669	669	26.976	26.641	85.730	133.301
2021	836	836	21.104	21.668	270.124	85.059
2022	658	656	26.163	25.520	164.491	113.543
2023	593	592	27.835	27.164	155.076	126.150

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.53 Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar Udara Tamba Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2023**

Bulan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
Januari	44	44	1.815	1.719	11.180	8.332
Februari	55	56	2.115	1.966	13.211	9.030
Maret	51	50	2.241	2.220	12.584	9.420
April	42	42	1.719	1.651	11.229	8.087
Mei	55	55	2.466	2.424	13.671	10.878

Bulan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
Juni	55	55	2.239	2.416	13.313	9.958
Juli	47	47	2.505	2.429	13.424	14.592
Agustus	40	40	2.505	2.429	13.424	14.592
September	52	52	2.318	2.142	11.661	10.684
Oktober	57	57	2.699	2.748	14.144	11.642
November	52	52	2.580	2.504	11.358	10.255
Desember	43	42	2.952	2.975	18.600	13.583
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>593</b>	<b>592</b>	<b>27.835</b>	<b>27.164</b>	<b>155.076</b>	<b>126.150</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, arus penerbangan di Bandara Tumpa Padang dan Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat 592 penerbangan dan berangkat 593 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 27.835 orang yang berangkat dan penumpang datang 27.164 orang.

Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya adalah pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar negeri. Pada periode 2019–2023, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar negeri memiliki jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri yang ada di Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO.

**Tabel 2.54 Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Olahan Sawit	ton	582.155,42	1.080.937,05	946.147,25	941.188,08	1.162.887,30
Hasil Tambang	ton	87.253,48	34.398,05	90.987,50	164.130,49	435.788,00
Hewan (Sapi, Kambing, Ikan)	Ton	9.519,00	4.329,73	954,25	742,93	1.152,53
Buah-buahan (Pisang, Kelapa, Durian, dll)	ton	18.603,00	10.838,00	21.364,50	11.863,00	12.570,70
Jagung/Dedak/Pipilan	ton	30.873,00	10.671,60	12.293,83	13.825,10	9.682,00
Barang Campuran	ton	28.284,00	33.414,01	6.912,75	5.184,25	5.946,50
Kendaraan (Mobil, Motor)	ton	24.640,33	3.229,46	105,14	9,65	12,70
Lainnya	ton	-	7.917,91	15.902,00	5.195,14	5.085,00
<b>Total</b>	<b>Ton</b>	<b>781.328,23</b>	<b>1.185.736</b>	<b>1.094.667</b>	<b>1.142.139</b>	<b>1.633.124,73</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2023

Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk atau hasil olahan sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 aktivitas bongkar muat untuk hasil olahan sawit mengalami angka yang fluktuatif. Berbeda dengan hewan dan kendaraan yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak biji sawit yang telah dilakukan pengolahan pada beberapa turunan sawit kemudian dilakukan pengiriman. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu

Buah-buahan yang biasanya banyak dikirim ke beberapa daerah seperti Kalimantan untuk keperluan hari-hari besar.

**Tabel 2.55 Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023**

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Olahan Sawit	ton	-	503.784,72	351.922,13	314.257,64	426.819,49
Hasil Tambang	ton	-	277.339,36	269.480,02	416.241,70	383.631,35
Semen	ton	543.618,00	148.817,49	152.094,76	112.350,25	120.716,57
Barang Campuran	ton	11.133,00	3.120,03	1.663,05	1.539,30	34,00
Kendaraan (Mobil, Motor)	ton	2.402,00	1.044,53	62,26	8,50	7,80
Pupuk	ton	23.155,80	22.026,50	17.336,95	16.887,00	19.992,00
Lainnya	ton	675,76	3.229,59	6.062,42	29.495,14	6.623,30
<b>Total</b>	<b>ton</b>	<b>580.984,56</b>	<b>959.362,21</b>	<b>798.621,59</b>	<b>890.779,53</b>	<b>957.824,50</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan semen, meski terus mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi geliat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan dari daerah lainnya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Barat.

**Tabel 2.56 Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Bulan	Pelayaran	Penumpang (Orang)	
		Berangkat	Datang
Januari	154	1.156	638
Februari	141	1.261	949
Maret	170	1.363	1.026
April	132	1.485	1.810
Mei	195	2.933	2.495
Juni	203	1.223	1.438
Juli	235	1.322	743
Agustus	191	866	592
September	196	993	827
Oktober	257	1.424	1.285
November	222	2.001	1.514
Desember	255	1.858	1.567
<b>Jumlah</b>	<b>2.351</b>	<b>17.885</b>	<b>14.884</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**b. Rasio ketersediaan daya listrik**

Rasio ketersediaan listrik di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 mencapai 70,22 dimana daya listrik yang terpasang sebesar 278,1 MW dari jumlah kebutuhan listrik sebesar 396,06 MW.

**Tabel 2.57 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

No	Tahun	Daya listrik terpasang (MW)	Jumlah kebutuhan (MW)	Rasio
1	2018	192	210	91,43
2	2019	248,1	230	107,87
3	2020	280,1	368	76,11
4	2021	278,1	396,06	70,22
5	2022	488,59	338,373	144,39

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Daya Terpasang PLN di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 278,1 MW, dan pemakaian daya mencapai 70 MW, dengan RE berkisar 96,95 (2020) dan Ratio Desa Berlistrik sebesar 93,8 dari total 650 desa/kelurahan atau sebanyak 40 Desa yang belum berlistrik. hal ini disebabkan banyaknya daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dan wilayah kepulauan, sehingga menyulitkan dalam pengembangan dan pembangunan jaringan listrik (JTM dan JTR) oleh PT. PLN (Persero). Sementara Alokasi Dana APBD untuk pengembangan Potensi EBT terbatas dlm memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan/terpencil & kepulauan.

#### c. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga memerlukan penanganan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian ketersediaan terhadap pasokan energi listrik harus tercukupi. Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 98,67 persen, yang mana jumlah rumah tangga pengguna listrik 330.609 rumah tangga dari 335.061 jumlah seluruh rumah tangga. Data jumlah rumah tangga bersumber dari data PLN.

**Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
1	2018	257.310	306.734	83,86
2	2019	287.466	320.351	89,73
3	2020	309.802	320.476	96,67
4	2021	314.416	320.497	98,10
5	2022	330.609	335.061	98,67

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2023

#### 2.1.4.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi

##### a. Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat

memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah.

**Tabel 2.59 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2021**

Kepolisian Resort	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	289	262	262	257	186
Polewali Mandar	714	794	794	504	364
Mamasa	104	137	137	90	101
Mamuju	390	774	490	378	363
Pasangkayu	386	447	415	433	267
Mamuju Tengah	-	-	-	59	112
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>2.286</b>	<b>2.139</b>	<b>3.841</b>	<b>3.729</b>	<b>1.393</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

Selama tahun 2017–2021 jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada Kepolisian Resort di provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun tindak pidana terbanyak adalah pada kasus penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi meningkatnya jumlah kasus pidana yang terproses menunjukkan kemampuan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus dan membuktikan komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi warganya.

**Tabel 2.60 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021**

Kepolisian Resort	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	71	62	70	67	71
Polewali Mandar	56	52	63	62	62
Mamasa	69	71	82	82	84
Mamuju	78	53	47	62	57
Pasangkayu	64	51	94	83	103
Mamuju Tengah	-	-	-	49	100
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>74</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.61 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021**

Kepolisian Resort	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	171	194	151	147	106
Polewali Mandar	165	99	179	105	75
Mamasa	66	79	85	55	61
Mamuju	140	270	167	136	129
Pasangkayu	234	263	238	229	138
Mamuju Tengah	-	-	-	44	82
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>172</b>	<b>158</b>	<b>278</b>	<b>263</b>	<b>97</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

Semakin tahun angka kriminalitas semakin meningkat kondisi ini memberikan resiko lebih besar bagi masyarakat untuk terpapar oleh Tindakan kriminalitas. Dalam kurun beberapa tahun resiko tindak pidana meningkat dari 172 di tahun 2017 menurun menjadi 97 di tahun 2021. Peluang terjadinya tindak kriminalitas tidak lepas dari semakin permisifnya nilai masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan semakin tingginya angka pengangguran.

**b. Jumlah demonstrasi**

**Tabel 2.62 Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Demo Bidang Politik	9	1	2	2	6
Jumlah Demo Ekonomi	2	2	3	0	11
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah Demo Unjuk Rasa	6	3	4	23	30
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>47</b>

*Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023*

**c. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha**

Pada tahun 2022, di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat sebuah Peraturan Daerah yang diberlakukan untuk mendukung izin usaha. Peraturan Daerah ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam upaya untuk mendorong investasi dan pengembangan sektor usaha di Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah yang memberikan dukungan dalam pemberian izin usaha. Peraturan ini dirancang dengan tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan mempercepat penyelesaian perizinan bagi para pengusaha.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan para pelaku usaha di Sulawesi Barat dapat lebih mudah memperoleh izin yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini berdampak positif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan sektor usaha di wilayah tersebut.

#### 2.1.4.2.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

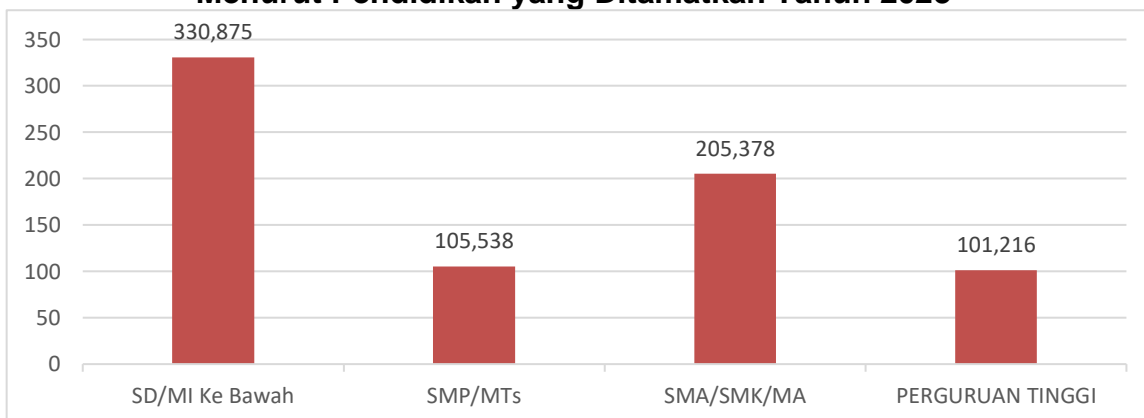
Pada Tahun 2023, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 436,41 ribu orang atau sebesar 58,74 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 330,88 ribu orang dan pekerja berpendidikan SLTP sebanyak 105,54 ribu orang.

**Tabel 2.63 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019–2023**

Pendidikan	Angkatan Kerja yang Bekerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI ke bawah	317.862	329.641	331.378	360.095	330.875
SMP/MTs	88.641	103.976	94.432	113.478	105.538
SMA/SMK/MA	156.914	158.334	172.715	172.011	205.378
Perguruan Tinggi	78.196	81.035	88.019	86.318	101.216
<b>Total</b>	<b>641.613</b>	<b>672.986</b>	<b>686.544</b>	<b>731.902</b>	<b>743.007</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Grafik 2.27 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

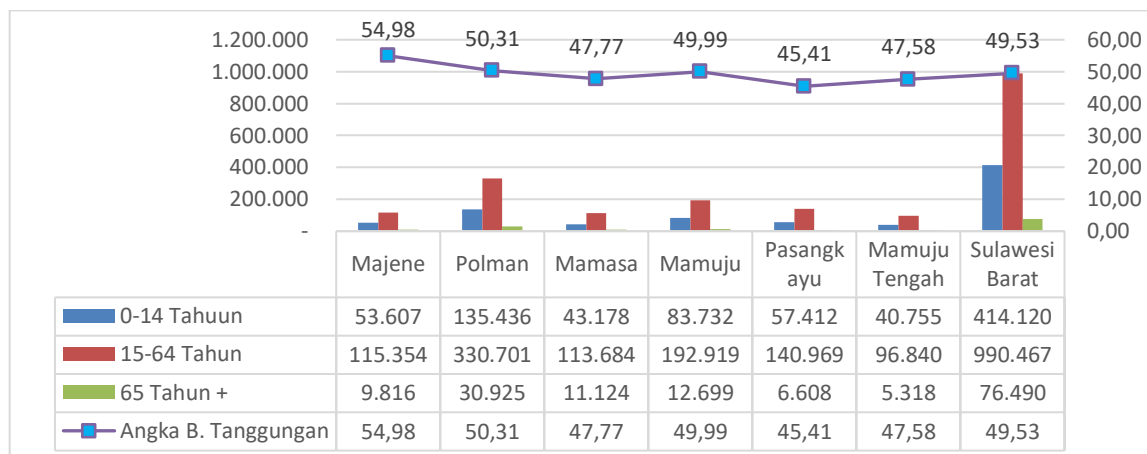
##### b. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Melalui pengelompokan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 49,53 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum/tidak produktif (0–14

tahun dan >65 tahun) Tahun 2023. Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten Majene sebesar 54,98 dan terendah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 45,41 di Tahun 2023. Adapun grafik beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di bawah ini.

**Grafik 2.28 Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

### 2.1.4.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.3.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

**a. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2018 s.d. 2022 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.64 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
2023	104,23	84,95	89,18
2022	106,08	84,58	87,86
2021	105,09	85,27	87,81
2020	106,05	84,67	84,36
2019	107,32	82,71	84,10

*Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id*

Pada tahun 2019–2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat mengalami penurunan di setiap jenjang Pendidikan. Terjadinya penurunan APK pada setiap jenjang tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah karena APM setiap jenjang pun mengalami peningkatan.

**b. Angka Partisipasi Murni (APM)**

APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan Data BPS tahun 2023 APM SD mencapai 95,92, untuk SMP/ sederajat mencapai 72,39 sedangkan untuk jenjang sekolah menengah mencapai 61,17

Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2019–2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.65 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMU
2023	95,92	72,39	61,17
2022	95,81	70,34	60,24
2021	95,68	70,03	59,77
2020	95,80	69,98	58,05
2019	95,86	69,36	57,64

Sumber: BPS, bps.go.id

Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang masing-masing. Meskipun APM masih di bawah seratus persen, mengindikasikan adanya anak-anak usia sekolah yang kesulitan bersekolah tepat waktu, perkembangan APM pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan, terutama di Sekolah Dasar. Data juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam APM SMP dan SMU dari tahun 2019 hingga 2023, hasil dari intervensi pendidikan, termasuk program kembali bersekolah yang diinisiasi oleh Pemerintah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, memberikan harapan bahwa lebih banyak anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara optimal di Sulawesi Barat.

### c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

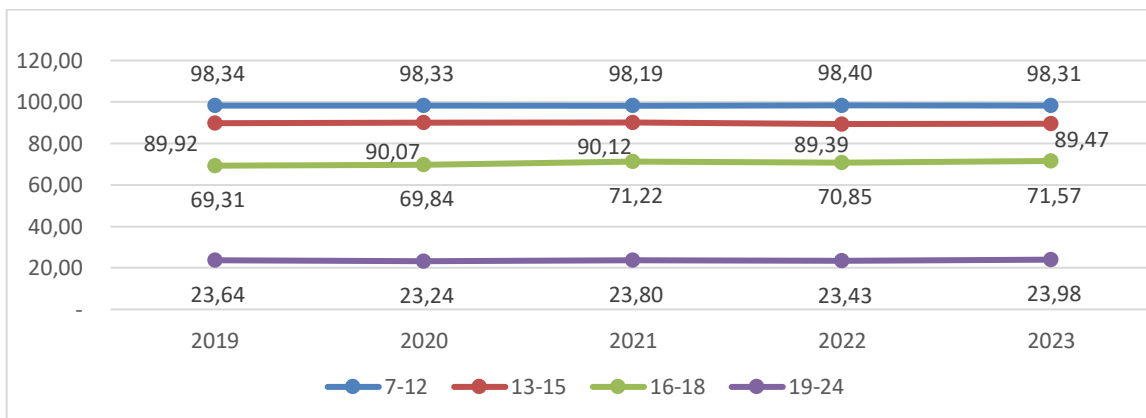
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang usia sekolah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada jenjang SD (7-12 tahun) dengan angka sebesar 98,31 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah dasar atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada jenjang usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi. Ini mengindikasikan semakin tinggi jenjang Pendidikan maka Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang, ini terlihat dari selisih APS jenjang Pendidikan SD berbanding jenjang Perguruan tinggi yang selisih hingga 71,57 persen, berarti peluang anak usia 7–12 tahun untuk melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 29 persen. Data dari tabel di bawah juga menunjukkan terjadi selisih yang cukup besar antara jenjang SMP dan SMA yang berarti menunjukkan tingginya anak putus sekolah di jenjang tersebut. Adapun faktor penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak sekolah yang jauh, kemiskinan dan pernikahan dini.

**Tabel 2.66 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

TAHUN	7-12	13-15	16-18	19-24
2023	98,31	89,47	71,57	23,98
2022	98,40	89,39	70,85	23,43
2021	98,19	90,12	71,22	23,80
2020	98,33	90,07	69,84	23,24
2019	98,34	89,92	69,31	23,64

Sumber: BPS, bps.go.id

**Grafik 2.29 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, bps.go.id

#### d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan dasar dan menengah.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Berdasarkan Neraca pendidikan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2020 ketersediaan satuan Pendidikan di jenjang pendidikan dasar semakin tahun semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari jumlah satuan Pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA.

**Tabel 2.67 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	172	19.653	1.956	7,88	214,00
Polewali Mandar	332	43.591	3.333	8,22	194,97
Mamasa	261	16.292	3.064	14,28	88,17
Mamuju	310	31.811	2.822	7,99	169,48
Pasangkayu	135	18.715	1.414	8,55	148,24
Mamuju Tengah	116	13.931	1.166	13,65	117,42
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1.326</b>	<b>143.993</b>	<b>13.755</b>	<b>9,56</b>	<b>149,87</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Tabel di atas menggambarkan rasio murid dengan ketersediaan sekolah SD pada lima kabupaten masih cukup tersedia kecuali di Kabupaten Mamasa. Kondisi ini disebabkan jumlah sekolah yang tersedia di jenjang SD berada hampir di setiap desa, ketersediaan sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor tingginya angka Angka Partisipasi Sekolah di jenjang sekolah Dasar.

**Tabel 2.68 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	37	7.063	697	9,87	190,89
Polewali Mandar	86	15.415	1.402	9,10	179,24
Mamasa	103	8.654	1.359	15,70	84,02
Mamuju	65	10.503	948	9,03	161,58
Pasangkayu	50	6.910	624	9,03	138,20
Mamuju Tengah	38	4.363	590	13,52	114,82
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>379</b>	<b>52.908</b>	<b>5.620</b>	<b>10,62</b>	<b>139,60</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Pada jenjang sekolah menengah pertama rasio murid dan sekolah menunjukkan rasio yang cukup tinggi yaitu sebesar 149,87 untuk tahun 2021 ini berarti jumlah sekolah berbanding murid belum mencukupi. Rendahnya APS SMP di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sekolah, sehingga dari jumlah murid SD sebanyak 142.640 yang melanjutkan ditingkat SMP hanya sebanyak 7.759. Olehnya itu pemerintah berupaya menaikkan akses masyarakat terhadap Pendidikan menengah pertama dengan membangun satuan Pendidikan dan penambahan ruang kelas baru. Dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah satuan pendidikan maupun ruang kelas baru pada jenjang SMP. Pada tahun 2016 jumlah SMP hanya sebanyak 369 Di tahun 2021 jumlahnya meningkat sebanyak 377, sedangkan untuk ruang kelas di tahun 2018 hanya sebanyak 4.673 tetapi pada tahun 2020 meningkat sebanyak 5021. Penambahan tersebut tentu saja berkontribusi pada peningkatan APS SMP di Sulawesi Barat.

**Tabel 2.69 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	16	5.042	477	9,46	315,13
Polewali Mandar	28	8.449	731	8,65	301,75
Mamasa	38	4.304	541	12,57	113,26
Mamuju	23	4.663	440	9,44	202,74
Pasangkayu	14	2.169	229	10,56	154,93
Mamuju Tengah	12	1.396	167	11,96	116,33
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>131</b>	<b>26.023</b>	<b>2.585</b>	<b>9,93</b>	<b>198,65</b>

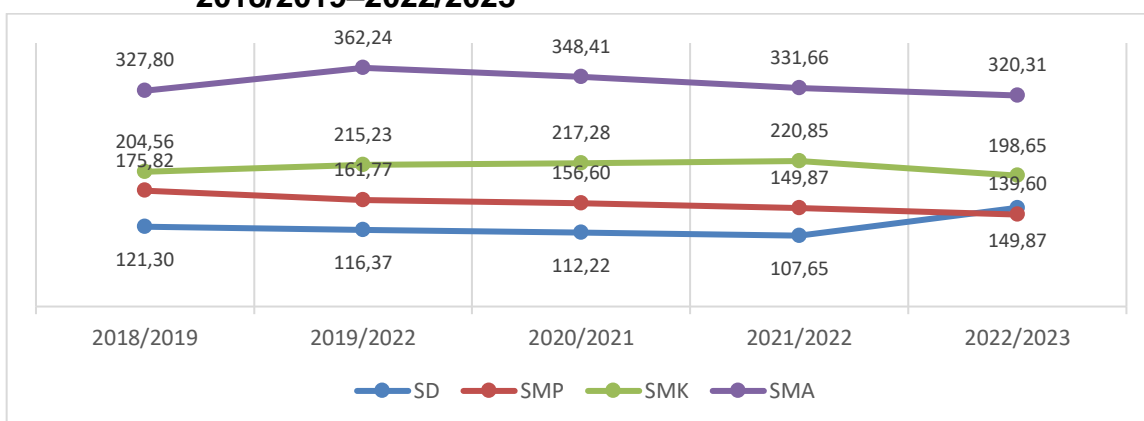
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.70 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	7	3.747	293	7,82	535,29
Polewali Mandar	17	7.902	618	7,82	464,82
Mamasa	22	4.055	403	9,94	184,32
Mamuju	23	6.319	491	7,77	274,74
Pasangkayu	12	4.060	337	8,30	338,33
Mamuju Tengah	10	3.065	249	8,12	306,50
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>91</b>	<b>29.148</b>	<b>2.391</b>	<b>8,20</b>	<b>320,31</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Grafik 2.30 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2018/2019–2022/2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan grafik di atas Rasio kebutuhan sekolah berbanding murid di jenjang SMA/SMK masih perlu ditingkatkan, terutama di level SMA di mana rasio murid berbanding sekolah di atas 320,31 persen. Tingginya minat siswa bersekolah di SMA tidak berbanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Sebaliknya SMK dengan jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu sebesar 131 mampu menampung sebanyak 26.023 siswa.

Selain SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Barat di sektor pendidikan, SLB juga merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020 jumlah SLB sebanyak 25

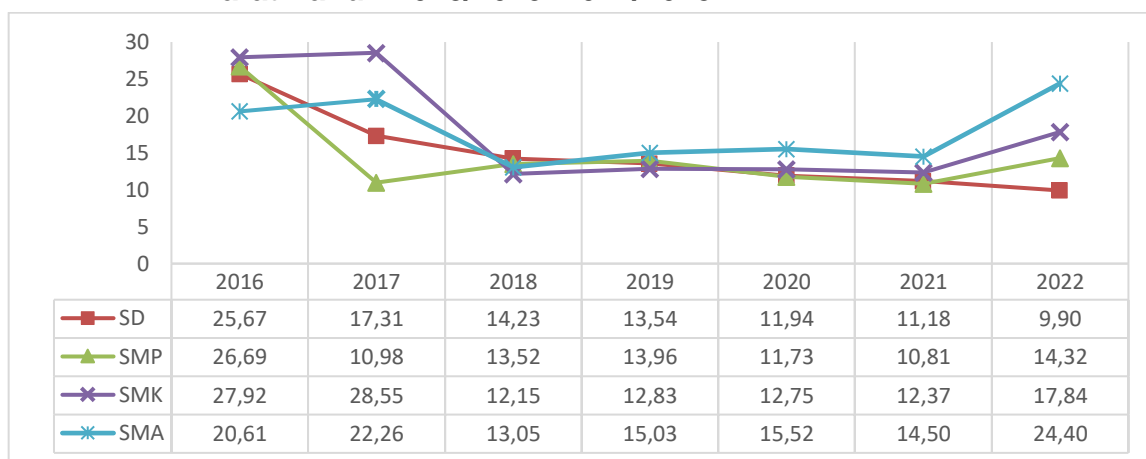
sekolah menampung 1,308 peserta didik. Tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat bukan hanya disebabkan oleh pernikahan dini tetapi juga banyak disumbang oleh anak disabilitas. Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak disabilitas karena malu dan keterbatasan sarana dan prasarana SLB menjadi salah satu penyebab banyak anak disabilitas tidak mendapatkan hak Pendidikan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut dinas Pendidikan provinsi melalui bantuan dana DAK menambah akses berupa penambahan ruang kelas baru sebanyak 36 RKB sehingga jumlah Ruang Kelas Baru di SLB menjadi 189 sementara rombel SLB yang di tahun 2018 hanya sebanyak 261 meningkat menjadi 278.

#### **e. Rasio Murid Per Guru**

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang Pendidikan dasar dan menengah cukup berimbang . Untuk jenjang Pendidikan SD rasio guru dan murid berbanding 1 : 13, SMP 1 : 13 , SMA 1 : 30 , SMK 1 : 13 dan SLB 1 : 5. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio ketersediaan guru di Sulawesi Barat cukup baik . Akan tetapi Sebagian besar guru terutama di jenjang menengah lebih banyak diajar oleh tenaga GTT. Sulawesi Barat kekurangan guru PNS terutama di jenjang menengah dengan rasio 1 : 58. Artinya dalam 1 guru PNS mengajar 58 siswa, padahal berdasarkan PP N0 74 tahun 2008 perbandingan guru yang mengajar di jenjang SMA adalah 1 : 20 dan SMK adalah 1 : 15. Untuk menutupi kekurangan guru maka Sebagian sekolah merekrut tenaga GTT. Dalam lima tahun ke depan Sulawesi Barat akan mengalami kekurangan guru di setiap jenjang disebabkan Sebagian guru yang berstatus PNS akan pensiun. Sebagai gambaran kekurangan guru di jenjang SD sebanyak 170 guru, SMP sebanyak 1867, SMA sebanyak 368 guru dan SMK sebanyak 1377 sedangkan yang akan pensiun dalam lima tahun diantaranya SD sebanyak 873, SMP sebanyak 246, SMA sebanyak 81 dan SMK sebanyak 41. Olehnya itu kebijakan pemerintah dengan merekrut tenaga PPPK akan sangat membantu menutupi kekurangan guru di Sulawesi Barat dan melalui pelatihan dan Pendidikan yang intens yang dilakukan akan membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

**Grafik 2.31 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2018/2019–2022/2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.71 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan**

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		Keterangan / *) Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Angka pendidikan yang ditamatkan	274,283	82.59	279,754	85.19		20,19		23,66	Jenjang SD, SMP, SM
Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	92,79	N/A	92,85		93,59		93,17	Sulbar.bps.go.id
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		80,09		80,25		75,91		78,64	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		91,31		92,02		89,72		92,65	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	886	47.23	1,000	48.22					Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SLB kondisi bangunan baik	19	16.67	25	27.72	25		25		Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22,602	19.72	22,615	19.46					Jumlah Sekolah PAUD/TK
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	451	1,04	19.215	7,93	26.095	2,92	21.421	6,17	*) Buku Data Sektoral 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	328	4,41	17.618	3,49	58.458	0,79	17.865	2,52	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	508	4,19	25.952	1,99	51.508	0,95	16.651	2,82	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	28,971	90,29	27,230	92,60		91,54		94,70	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	19,066	78,46	20,277	78,83		77,68		68,08	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	14,329	56,17	15,488	37,65		48,20		56,60	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Melanjutkan (AM dari SD/MI ke SMP/MTs)		86,92		93,24		97,30		80,52	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA)		81,27		90,85		91,46		89,79	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	15,971	75.63	14.821	59,93	16.705	46,68	16.706	41,37	*) PDSPK Kemdikbud (Jenjang SLB, SD, SMP, SM)

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		Keterangan / *) Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Guru yang bersertifikasi	7,381	33.09	6,126	29.05					*) PDSPK Kemdikbud

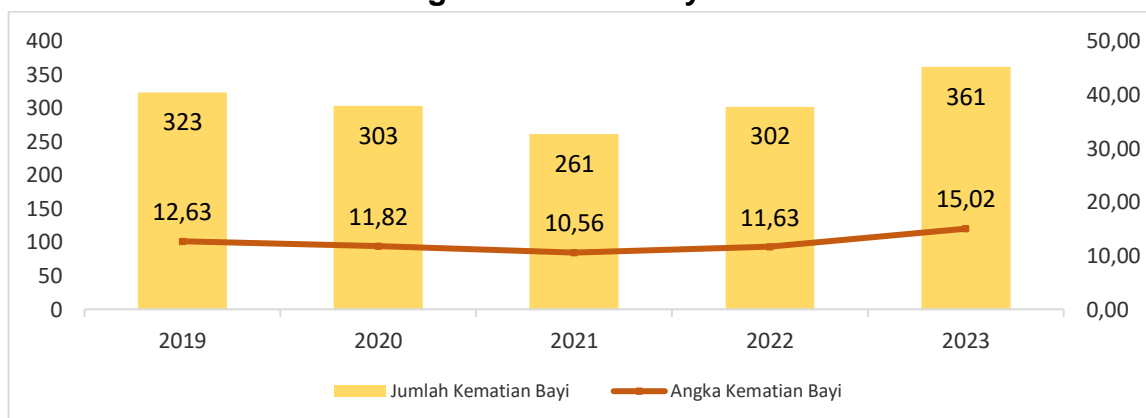
*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021*

### 2.1.4.3.2 Urusan Kesehatan

#### a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Indikator angka kematian bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam melihat kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian. Gambaran perkembangan angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Grafik 2.32 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2019–2023**



*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 13/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 15/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 323 bayi mati menjadi 361 bayi mati pada tahun 2023.

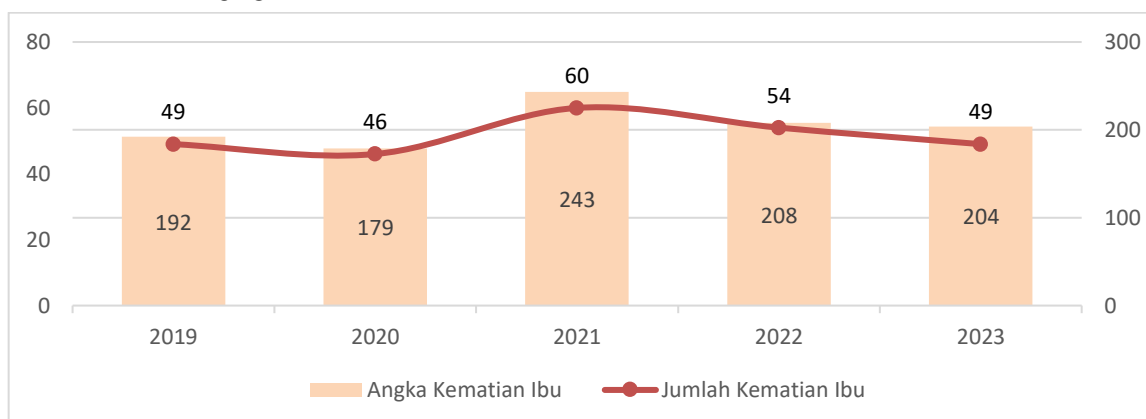
#### b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang

dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

**Grafik 2.33 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

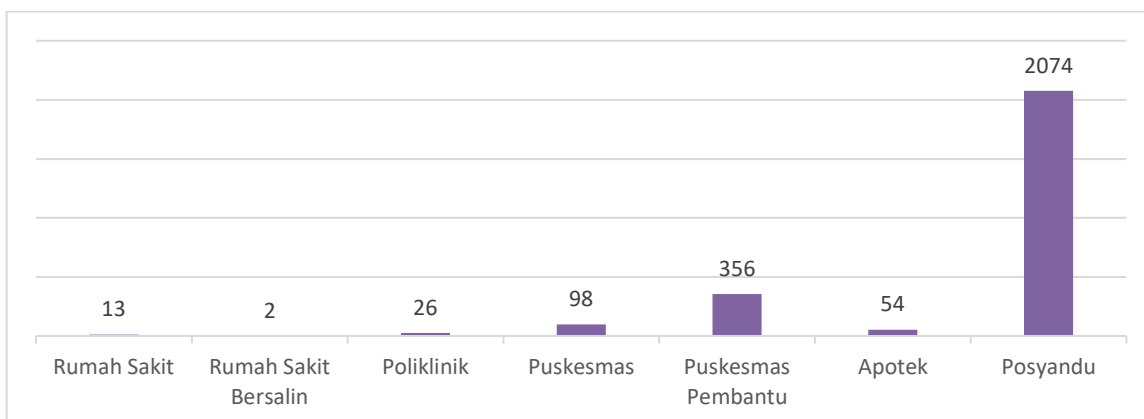
Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.

Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2019 sebesar 49 kasus, turun menjadi 46 kasus di tahun 2020 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 60 kasus, kembali turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 54 kasus dan kemudian turun menjadi 49 kasus di tahun 2023.

### c. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

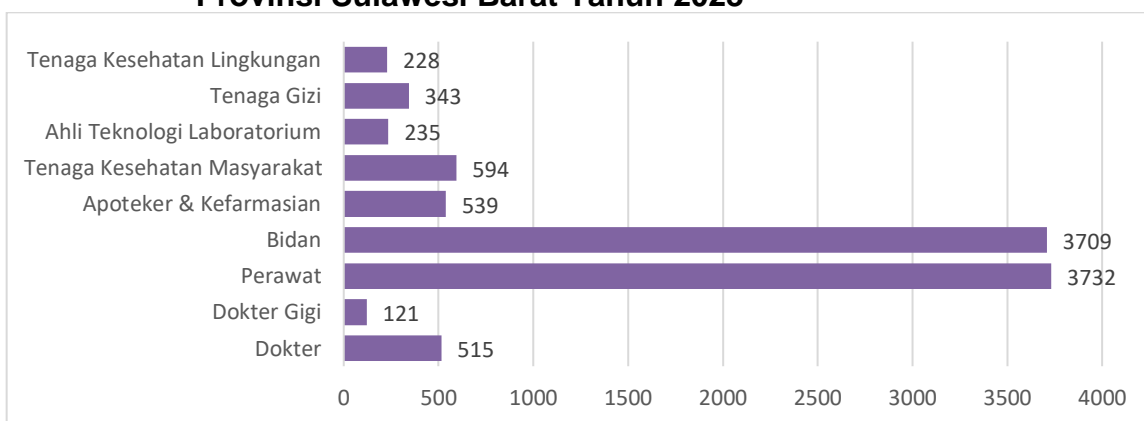
**Grafik 2.34 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 15 Rumah Sakit yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Rumah Sakit Pemerintah dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 98, Posyandu sebanyak 2.074. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe C dengan Akreditasi Paripurna yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

**Grafik 2.35 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 636 orang, yang terdiri dari 515 dokter termasuk dokter spesialis dan 121 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 3.709 orang, perawat sebanyak 3.732 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 539 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.72 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2023**

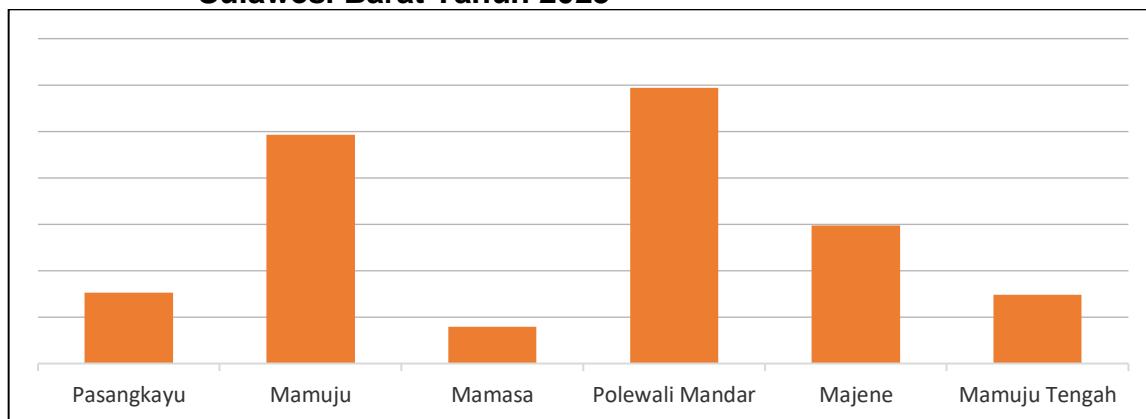
Jumlah Fasyankes	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kes-Mas	Kes-Ling	Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
469	13,1	22	7,2	245,5	252,9	36,8	-	15,5	23,4	16

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**d. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama dalam DOTS yaitu: komitmen, diagnosa yang benar dan baik. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort.

**Grafik 2.36 Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



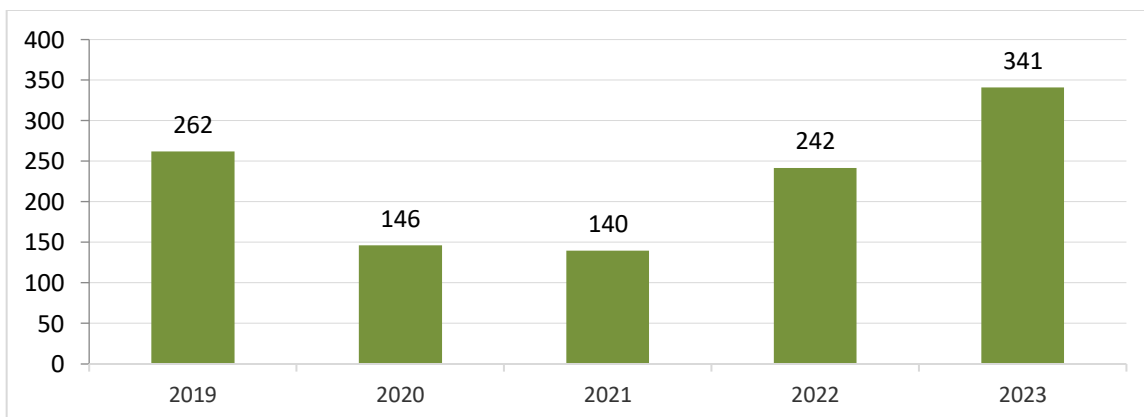
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023

**e. Angka Kejadian Malaria**

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria yang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus

positif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2019 hingga pada tahun 2023 jumlah kasus positif malaria mengalami peningkatan yang signifikan hingga sebesar 79 kasus. Hal ini tentunya sebuah penurunan yang negatif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang ada.

**Grafik 2.37 Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2019–2023**

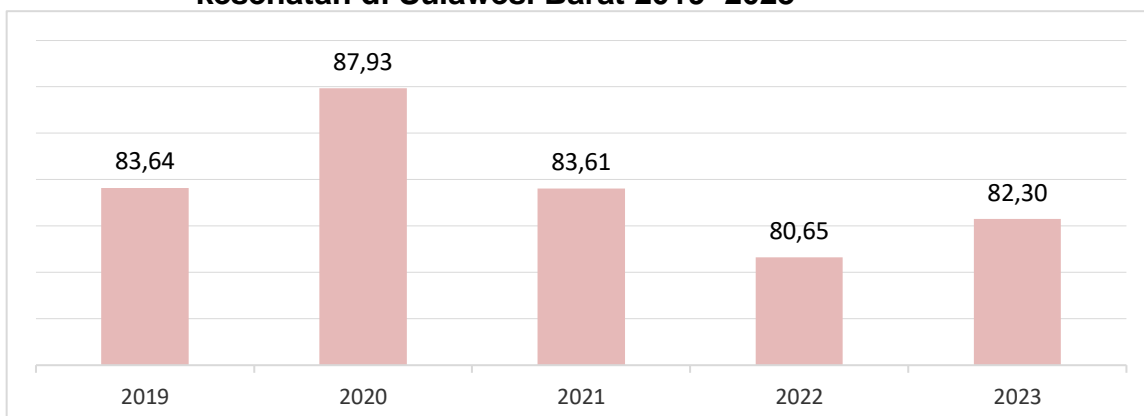


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### f. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2019 mencapai 83,64 persen mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 sebesar 82,30 persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai dengan tahun 2024 sebesar 98 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional.

**Grafik 2.38 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2019–2023**



Ket: Target UHC Nasional Pada Tahun 2023 = 97%

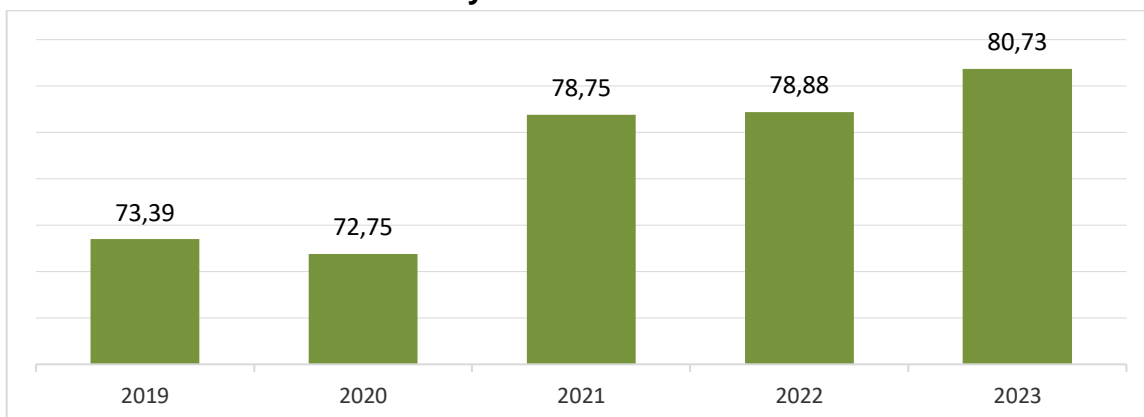
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### g. Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 73,39 persen

mengalami penurunan menjadi 72,75 persen di Thun 2020 kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,75 persen dan di tahun 2023 berada pada angka 80,73 persen. Meskipun demikian, pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat yaitu sebesar 100 persen.

**Grafik 2.39 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2019–2023**



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.73 Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Tahun 2018–2020**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus per Penyakit		
		2018	2019	2020
1	TBC	2.154	2.769	2.034
2	HIV	27	74	28
3	Kusta	216	201	158
4	DBD	532	818	630
5	Malaria	162	211	144
6	Diabetes Melitus	5.205	1.326	1.328
7	Hipertensi	29.169	10.580	8.734
<b>Total Jumlah Kasus</b>		<b>37.645</b>	<b>15.979</b>	<b>13.056</b>
<b>Total Jumlah Penduduk</b>		<b>1.355.354</b>	<b>1.380.256</b>	<b>1.433.512</b>
<b>Angka Kesakitan per 1000 Penduduk</b>		<b>27,54</b>	<b>11,58</b>	<b>9,11</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Provinsi Sulawesi Barat saat ini masih dihadapkan pada masih tingginya kasus penyakit baik penyakit menular dan tidak menular. Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Kusta serta Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB). Sedangkan untuk penyakit tidak menular prioritas ditujukan kepada penyakit diabetes militus dan hipertensi.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan Angka Kesakitan per 1000 Penduduk yaitu pada tahun 2018 angka kesakitan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 27,54 poin menjadi 9,11 poin pada tahun 2020. Penurunan angka kesakitan penduduk ini menunjukkan akses pelayanan Kesehatan semakin dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Barat baik sarana prasarana serta SDM Kesehatan semakin membaik. Selain itu penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya juga berdampak pada penurunan Angka Kesakitan Provinsi Sulawesi Barat.

Namun jika dilihat dari jumlah angka absolut kasus per penyakit menunjukkan data yang fluktuatif seperti jumlah kasus TBC dan HIV dimana pada tahun 2018 diketahui jumlah kasus TBC yang ada sebesar 2.154 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2.769 kasus dan mengalami penurunan kasus pada tahun 2020 sebesar 2.034 kasus. Hal tersebut juga terjadi pada kasus penyakit HIV dimana pada tahun 2018 jumlah kasus yaitu 27 kasus kemudian mengalami peningkatan menjadi 74 kasus pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 28 Kasus. Untuk kasus DBD dan Malaria yang penularannya melalui perantara binatang juga mengalami trend yang fluktuatif.

Sehingga walaupun terjadi trend penurunan angka kesakitan di provinsi Sulawesi Barat namun pengendalian terhadap jumlah angka kesakitan baik penyakit menular dan tidak menular perlu untuk ditingkatkan. Untuk penyakit menular kenaikan dan penurunan jumlah kasusnya sangat tergantung pada perubahan iklim, kondisi kesehatan lingkungan serta bagaimana upaya tracing yang dilakukan dalam melakukan penemuan kasus penyakit. Sedangkan untuk penyakit tidak menular, perlu tetap menjadi fokus pemerintah daerah karena peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular akan berdampak pada tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit.

**Tabel 2.74 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016–2020**

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelangsungan Hidup bayi	985,07	990,54	990,7	987,40	988,2
Persentase balita gizi Buruk (%)	24,7	19,00	18,10		
Rasio Posyandu Per Satuan balita (balita/posyandu)	16,36	16,36	13	13	13
Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, persatuan penduduk (penduduk/puskesmas/poliklinik)	0,31	0,60	0,60	0,60	0,60
Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan Penduduk (Penduduk/dokter)	0,23	0,31	0,16	0,16	0,16
Rasio tenaga Medis per satuan Penduduk (Penduduk/tenaga medis)	0,23	0,31	0,16	0,16	0,16
cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	71,83	72	69,9	77,5	66,9
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	80,44	81,44	78,98	81,4	76,8
Cakupan Desa/Kelurahan universal Child Immunization (UCI)	78,43	78,57	78,98	81,4	76,8
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	76	76	89,17	N/A	N/A
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25	30	27,32	N/A	N/A
Cakupan Kunjungan bayi	86,98	88	88,31	N/A	N/A
Cakupan Puskesmas	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	37
Angka Kematian Bayi (%)	14,93	12,4	9,3	12,6	11,8

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

### 2.1.4.3.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

#### a. Sub Urusan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:

- a. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- b. Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
- c. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

**Tabel 2.75 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat**

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
<b>Kabupaten Mamasa</b>	
DI. Aralle	2.330
DI. Mambi	2.728
DI. Messawa	1.562
DI. Pana	1.334
DI. Rantebulahan Timur	1.400
DI. Tandukkalua	2.170
<b>Kabupaten Mamuju</b>	

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
DI. Papalang - Sampaga	2.245
<b>Kabupaten Mamuju Tengah</b>	
DI. Tobadak	1.880
<b>Kabupaten Pasangkayu</b>	
DI. Bantalaka	1.200
<b>Kabupaten Polewali Mandar</b>	
DI. Lakejo	1.265
DI. Tandung	1.000
<b>Sulawesi Barat 2020</b>	<b>19.114</b>

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2023

Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015

**Tabel 2.76 Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Jenis Lahan Sawah					Tadah Hujan	Jumlah
	Irigasi				Jumlah		
	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Jumlah			
Majene	-	133	220	353	3.467	4.119	
Polewali Mandar	12.396	1.255	880	14.531	5.813	20.972	
Mamasa	-	1.300	12.717	14.017	2.711	14.947	
Mamuju	-	659	7.095	7.754	8.596	17.338	
Pasangkayu	-	900	775	1.675	4.383	6.219	
Mamuju Tengah	-	0	500	500	12.990	14.929	
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>12.396</b>	<b>4.247</b>	<b>22.187</b>	<b>38.830</b>	<b>37.960</b>	<b>78.524</b>	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2023

Ket: Data 2023 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa.

**b. Sub Urusan Keciptakarya**

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2023 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.77 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	5,77	10,41	47,29	6,81	0,77
Polewali Mandar	7,83	23,53	19,13	23,56	3,32
Mamasa	6,79	4,03	0,22	1,42	6,25
Mamuju	8,27	11,46	31,36	19,30	5,11
Pasangkayu	0,00	11,49	53,71	23,94	1,23
Mamuju Tengah	9,81	20,55	31,90	17,64	8,41
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>6,68</b>	<b>15,34</b>	<b>28,56</b>	<b>17,68</b>	<b>3,97</b>

**Lanjutan Tabel di atas**

Kabupaten	Mata Air Terlindung	Mata Air tak Terlindung	Lainnya	Jumlah
Majene	27,99	0,85	0,10	100,00
Polewali Mandar	11,38	1,03	10,23	100,00
Mamasa	19,23	31,78	30,27	100,00
Mamuju	17,34	5,63	1,53	100,00
Pasangkayu	4,17	1,64	3,82	100,00
Mamuju Tengah	3,45	4,33	3,91	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>13,57</b>	<b>6,01</b>	<b>8,20</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.78 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Jumlah
Majene	83,66	7,35	2,70	0,04	6,25	100,00
Polewali Mandar	87,19	5,69	0,80	0,08	6,25	100,00
Mamasa	77,17	6,88	8,31	0	7,64	100,00
Mamuju	80,83	5,42	0,90	0,21	12,65	100,00
Pasangkayu	78,06	8,69	0,37	0,48	12,39	100,00
Mamuju Tengah	86,15	5,67	0,22	0,29	7,68	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>82,94</b>	<b>6,37</b>	<b>1,81</b>	<b>0,17</b>	<b>8,71</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024*

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2023, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 82,94 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.

**c. Sub Urusan Jalan**

Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2023 dengan panjang 349,67 km, di mana terdapat 45,90 persen dalam kondisi mantap, dan 54,10 persen dalam kondisi tidak mantap.

Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Sulawesi Barat, terutama infrastruktur Jalan dan konektivitas karena suatu infrastruktur diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing dalam upaya meningkatkan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

**Tabel 2.79 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (km)**

Kabupaten	Panjang Jalan/Kewangan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Majene	104,39	60,46	625,21	788,97
Polewali Mandar	90,67	114,61	922,26	1.126,65
Mamasa	126,25	94,79	425,90	696,29
Mamuju	194,83	211,22	526,17	886,76
Pasangkayu	155,13	22,05	1.410,11	1.577,40
Mamuju Tengah	96,90	25,20	442,18	572,09
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>768,17</b>	<b>528,33</b>	<b>4.351,83</b>	<b>5.648,16</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.80 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2023**

NOMOR RUAS	N A M A R U A S		PANJANG	JAP	JKP-1	
			(KM)	(KM)	(KM)	
001			SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) - PASANGKAYU	51.19		51.19
002			PASANGKAYU - BARAS	54.62		54.62
003			BARAS - KAROSSA	48.23		48.23
004			KAROSSA - TOPOYO	54.67		54.67
005			TOPOYO - TARAILU	41.27		41.27
006			TARAILU - KALUKU	43.84		43.84
007			KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU	28.53		28.53
007	11	K	JLN. POROS KALUKU (MAMUJU)	1.25		1.25
007	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAMUJU)	1.31		1.31
008			BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU	37.03	37.03	
008	11	K	JLN. AHMAD YANI (MAMUJU)	0.41	0.41	
008	12	K	JLN. KS. TUBUN (MAMUJU)	0.72	0.72	
008	13	K	JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU)	0.69	0.69	
008	14	K	JLN. SUDIRMAN (MAMUJU)	1.24	1.24	
008	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU)	1.28	1.28	
009			TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU	50.89	50.89	
010			BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO	42.79	42.79	
010	11	K	JLN. A. YANI (MAJENE)	3.82	3.82	
010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE)	1.35	1.35	
011			BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE	42.78	42.78	
011	11	K	JLN. SUDIRMAN (MAJENE)	2.32	2.32	
011	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAJENE)	2.13	2.13	
011	13	K	JLN. M. YAMIN (POLEWALI)	2.80	2.80	
012			BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI	14.07	14.07	
012	11	K	JLN. ANDI DEPU (POLEWALI)	3.38	3.38	
012	12	K	JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI)	3.70	3.70	
012	13	K	JLN. A. YANI (POLEWALI)	1.76	1.76	
013			SALUBATU - KALUKU	28.11		28.11
014			SALUBATU - MAMBI	45.63		45.63
015			MAMBI – MALABO	27.09		27.09
016			MALABO – MAMASA	13.50		13.50
017			MAMASA - BTS. SULSEL	37.95		37.95
018			MALABO – TABONE	27.09		27.09
019			TABONE – POLEWALI	45.73		45.73
			<b>TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL</b>	<b>763.17</b>	<b>213.17</b>	<b>550.00</b>

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Ket: Sesuai dengan SK. NO. 290/KPTS/M/2015

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satu fokusnya adalah jalan dan konektivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/688/Sulbar/X/2015 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 349,67 km, selain jalan provinsi, di Sulawesi Barat juga terdapat jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut tabel panjang jalan dan nama ruas jalan berdasarkan tingkat kewenangan pada setiap kabupaten di Sulawesi Barat:

Ketersediaan infrastruktur tentu saja harus didukung dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik atau mantap karena dengan demikian akan memaksimalkan fungsi dan daya ungkit terhadap pertumbuhan yang inklusif. Gambaran kondisi infrastruktur di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.81 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2016-2023**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
Kondisi Mantap	661.95	669.57	696.30	667.82	675.03	1.387,41	707,14
Kondisi Tidak Mantap	101.22	93.60	66.87	95.35	88.14	148,81	61,04
<b>Jumlah</b>	<b>763.17</b>	<b>763.17</b>	<b>763.17</b>	<b>763.17</b>	<b>763.17</b>	<b>1.536,22</b>	<b>768,18</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat tahun 2016 sekitar 763,17 km, dengan kondisi mantap 661,95 km, dan kondisi tidak mantap 101,22 km. Kondisi mantap jalan nasional di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, dengan total pertumbuhan mantap jalan sebesar 707,14 km dimana peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan panjang jalan yang disebabkan pengalihan kewenangan.

**Tabel 2.82 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2022**

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kondisi Jalan Tahun 2021				Kondisi Jalan Tahun 2022			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruas Jalan Provinsi										
1	Batuisi – Bts Toraja	44,64	0,000	1,400	7,000	36,240	0,000	1,400	7,000	36,240
2	Lampa (Mapilli) - Matangnga	45,68	43,657	0,200	1,623	0,200	44,447	0,200	0,833	0,200
3	Matangnga – Keppe	31,10	9,815	8,850	10,760	1,675	11,522	7,843	10,460	1,275
4	Salutambung – Urekang	36,46	8,648	6,928	9,150	11,735	12,792	6,928	7,150	9,591
5	Urekang - Mambi	18,58	1,380	2,200	12,200	2,800	1,380	2,200	12,200	2,800
6	Tikke – Bts. Sulteng	9,50	8,682	0,768	0,050	0,000	8,682	0,768	0,050	0,000

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kondisi Jalan Tahun 2021				Kondisi Jalan Tahun 2022			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruas Jalan Strategis Nasional										
1	Salubatu – Bonehau	28,70	9,199	0,451	19,050	0,000	9,199	0,451	19,050	0,000
2	Bonehau – Kalumpang	21,97	3,400	13,524	5,046	0,000	3,400	13,524	5,046	0,000
3	Kalumpang – Batuisi	15,74	7,650	0,000	5,400	2,690	8,130	0,000	4,920	2,690
4	Batuisi – Bts. Luwu Utara	42,30	0,000	0,000	0,000	42,300	0,000	0,000	2,000	40,300
5	Jl. Marthadinata - Sumare	55,00	18,801	1,954	29,035	5,210	27,636	0,000	25,143	2,221
Total Panjang Ruas Jalan Provinsi + Jalan Strategis Nasional		349,67	111,23	36,28	99,31	102,85	127,19	33,31	93,85	95,32
		%	31,81	10,37	28,40	29,41	36,37	9,53	26,84	27,26

Lanjutan Tabel diatas

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kondisi Jalan Tahun 2023			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruas Jalan Provinsi						
1	Batuisi – Bts Toraja	47,53	0.000	0.000	6.400	40.950
2	Lampa (Mapilli) - Matangnga	45,68	41.390	3.000	1.290	0.000
3	Matangnga – Keppe	31,58	6.900	1.600	16.420	6.660
4	Salutambung – Urekang	36,46	17.359	0.000	9.841	9.260
5	Urekang - Mambi	16,00	0.255	0.000	6.745	9.000
6	Tikke – Bts. Sulteng	8,75	8.135	0.200	0.415	0.000
Ruas Jalan Strategis Nasional						
1	Salubatu – Bonehau	28,48	17.410	0.000	9.270	1.800
2	Bonehau – Kalumpang	22,20	3.540	0.000	17.460	1.200
3	Kalumpang – Batuisi	17,00	3.510	1.680	10.120	1.690
4	Batuisi – Bts. Luwu Utara	39,23	0.000	0.000	11.800	27.430
5	Jl. Marthadinata - Sumare	20,60	16.540	0.000	3.460	0.600
Total Panjang Ruas Jalan Provinsi + Jalan Strategis Nasional		313,51	111,23	115.039	6.480	93.221
		%	31,81	36.69	2.07	29.73

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Kondisi jalan provinsi tahun 2022 dengan kondisi Mantap sebesar 45,90 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi menurun jika dilihat dari persentasenya sebesar 45,84 persen pada akhir tahun 2023 . Hal itu disebabkan bertambahnya panjang jalan kewenangan provinsi. Pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana panjang jalan dengan kondisi mantap sejauh 242,179 Km, sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penanganan terhadap infrastruktur jalan. Penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.83 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2022**

NO	TAHUN	PANJANG (KM)
1	2012	3,600
2	2013	13,425
3	2014	12,400
4	2015	53,480
5	2016	14,740
6	2017	18,263
7	2018	13,965
8	2019	11,190
9	2020	9,700
10	2021	16,20
11	2022	17,20
<b>TOTAL</b>		<b>184,163</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan jalan provinsi terus dilakukan setiap tahunnya, meskipun besarnya fluktuatif namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun terberat bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, hal ini disebabkan dengan adanya wabah global yaitu pandemik corona virus yang melanda dunia. Hal tersebut mengakibatkan beban anggaran terfokuskan pada penanganan pandemik dan memaksa pembangunan sektoral dalam hal infrastruktur jalan juga terdampak sangat berat. Tabel berikut kita dapat melihat capaian kinerja pembangunan daerah sub bidang jalan:

#### **d. Sub Urusan Penataan Ruang**

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang mana setiap pemerintah kabupaten harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun RDTR nya. Adapun Progres revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait Penataan Ruang Kabupaten sebagai berikut:

- 1) RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak, telah dilakukan penyusunan dokumen KLHS dan telah divalidasi;
- 2) RDTR Kawasan BWP Polewali, penyusunan dokumen harus kembali dilakukan setelah adanya bantuan teknis;
- 3) RDTR Kawasan Perkotaan Tinambung, kelengkapan dokumen telah tersedia untuk ke tahapan selanjutnya;

- 4) RDTR KSP Pendidikan Majene, kelengkapan dokumen telah tersedia namun belum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
- 5) RDTR KSP Matabe, kelengkapan dokumen telah tersedia namun belum dilanjutkan ke tahapan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
- 6) RDTR Kawasan Perkotaan Wonomulyo, kelengkapan dokumen telah tersedia namun belum dilanjutkan ketahapan selanjutnya;
- 7) RDTR Kawasan Perkotaan Campalagian, belum berproses;
- 8) RDTR Kawasan Perkotaan Mamasa, dalam tahap penyusunan materi teknis dan draf Rancangan Peraturan Daerah;
- 9) RDTR Kawasan Perkotaan Pasangkayu, kelengkapan dokumen telah tersedia namun proses pengesahan akan dilanjutkan setelah Penetapan Revisi RTRW Kabupaten Pasangkayu); dan
- 10) RDTR Kawasan Perkotaan Tikke, kelengkapan dokumen telah tersedia namun proses penyusunan dihentikan.

#### **2.1.4.3.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni "Rumah yang Layak", terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya.

Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah, menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya. Rumah atau tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program

Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal . sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan Backlog rumah.

**Tabel 2.84 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Milik	Jumlah Rumah Tangga Milik	Backlog Kepemilikan Rumah
	(Jiwa)	(unit)	(%)	(unit)	(unit)
2019	1.380.256	310.473	86,80	269.491	40.982
2020	1.419.229	315.443	87,56	276.202	39.241
2021	1.436.842	349.375	89,72	313.459	35.916
2022	1.458.606	333.038	92,51	308.093	24.945
2023	1.481.077	345.369	93,35	322.427	22.969

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.85 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit Rumah)	Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	Persentase Rumah Layak Huni (%)
2019	1,380,256	310.473	146.636	163.837	47,23
2020	1,419,229	315.443	159.772	155.671	50,65
2021	1,369,842	349.375	200.052	149.323	57,26
2022	1,458,606	333.038	184.403	148.635	55,37
2023	1.481.077	345.396	204.750	140.645	59,28

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di tahun 2023 mencapai 59,28 persen Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat tercapai. Rumah Layak huni mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta pasca gempa bumi di Sulawesi Barat maka di tahun 2022 mengalami lonjakan penurunan yang sangat signifikan.

**Tabel 2.86 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	90,97	77,78	94,96	94,59	96,50
Polewali Mandar	81,02	87,64	83,47	86,18	84,67
Mamasa	22,91	58,74	32,42	35,07	31,47
Mamuju	71,34	72,66	81,06	82,14	85,87
Pasangkayu	79,16	78,29	88,56	86,81	89,19
Mamuju Tengah	68,78	72,64	77,42	78,23	77,88
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>71,50</b>	<b>77,07</b>	<b>76,67</b>	<b>78,98</b>	<b>79,86</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

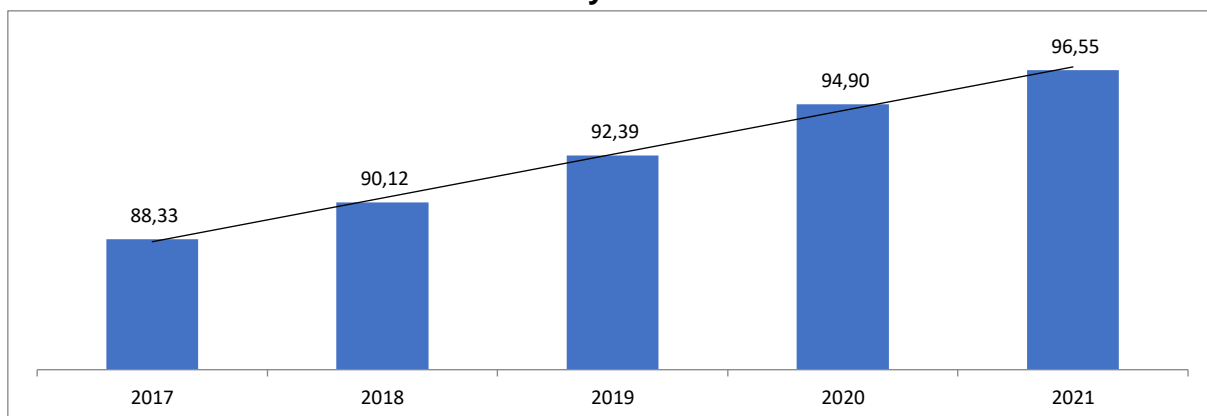
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 mencapai 71,50 persen menjadi 79,86 persen di tahun 2023.

**Tabel 2.87 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	72,09	86,66	79,48	83,26	83,45
Polewali Mandar	82,44	79,63	85,73	83,61	85,87
Mamasa	51,24	26,00	64,30	64,73	66,11
Mamuju	68,39	80,70	80,43	74,58	78,51
Pasangkayu	75,92	75,93	79,15	81,17	80,63
Mamuju Tengah	79,95	72,05	81,21	83,63	82,84
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>73,39</b>	<b>72,75</b>	<b>78,75</b>	<b>78,88</b>	<b>80,73</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Grafik 2.40 Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Berdasarkan data Surat Keputusan Bupati dari 6 (enam) Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, status per 31 Desember 2022, Luas Kawasan kumuh di Sulawesi Barat adalah seluas 935,21 Hektar, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.88 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

No.	Kabupaten	Jumlah Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Majene	15	176.59
2	Polewali Mandar	19	280.24
3	Mamasa	17	246.8
4	Mamuju	4	71.52
5	Mamuju Tengah	5	75.17
6	Pasangkayu	13	84.89
<b>Total Sulbar</b>		<b>73</b>	<b>935.21</b>

*Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

Dari 73 Lokasi Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud di atas, kawasan kumuh yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (luas diatas 10 – dibawah 15 Ha) adalah sebanyak 15 Kawasan, dengan total luas 178,04 Ha, dengan sebaran sebagai berikut:

**Tabel 2.89 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

No.	Uraian	<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	Total
1	Luas (Ha)	148.41	178.04	608.76	<b>935.21</b>
2	Jumlah Kawasan	33	15	25	<b>73</b>

*Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

**Tabel 2.90 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

No.	Kabupaten	Kawasan 10 -15 Ha	
		Jumlah	Luas (Ha)
1	Majene	4	50.9
2	Polewali Mandar	1	14.96
3	Mamasa	4	43.45
4	Mamuju	1	12.14
5	Mamuju Tengah	1	10.04
6	Pasangkayu	4	46.55
<b>Total Sulbar</b>		<b>15</b>	<b>178.04</b>

*Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat telah dan sedang dilaksanakan, baik melalui pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun Loan melalui Program-program Nasional, seperti Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kementerian PUPR. Namun demikian, dari 6 (enam) Kabupaten tersebut, baru terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang secara rutin melakukan evaluasi perhitungan capaian penanganan permukiman kumuh setiap tahun. Kabupaten tersebut adalah Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa.

Dari Total 703,63 Ha Luas Kawasan kumuh di 3 Kabupaten tersebut pada Akhir tahun 2021, berdasarkan Perhitungan Pengurangan Kumuh yang menerapkan instrument yang sama (Permen PUPR No. 14/PRT/M/ 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan hasil pengurangan sebanyak 109,51 Ha. Dengan demikian capaian pengurangan kumuh di 3 Kabupaten dimaksud baru mencapai 16 persen, yang jika digabung menjadi capaian Pengurangan Kawasan kumuh Provinsi Sulawesi Barat, baru mencapai 12 persen. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, ditengah pertumbuhan permukiman yang semakin tinggi, terutama di Kawasan Permukiman Perkotaan.

**Tabel 2.91 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

Uraian	<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	Total
Luas Kumuh Awal (Ha)	148.41	178.04	608.76	<b>935.21</b>
Luas Kumuh Akhir (Ha)	<b>142.73</b>	<b>168.89</b>	<b>514.08</b>	<b>825.70</b>
<b>Capaian Pengurangan Kumuh SULBAR</b>	<b>5.68</b>	<b>9.15</b>	<b>94.68</b>	<b>109.51</b>

*Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024*

Selain capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah, dari kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah berjalan, dari 7 (tujuh) Aspek kekumuhan, kegiatan masih dominan pada penanganan aspek Jalan lingkungan dan Drainase Lingkungan, sedangkan 5 (lima) lainnya, seperti Kondisi Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Bangunan Gedung dan Proteksi Kebakaran masih belum tertangani dengan maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh kurang terlihat merubah wajah kawasan permukiman, karena kegiatan tidak dilaksanakan secara tuntas pada suatu kawasan tertentu pada semua aspek kekumuhan.

#### **2.1.4.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

**Tabel 2.92 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2021–2022**

Kabupaten	2021			2022		
	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	%	Petugas Linmas di Kabupaten	Wilayah kerja Kabupaten (Kecamatan)	%
Majene	1094	8	114	1300	8	96
Polewali Mandar	2454	16	25	3000	16	21
Mamasa	1123	17	52	1400	17	42
Mamuju	1514	11	60	2248	11	40
Pasangkayu	437	12	191	1240	12	67
Mamuju Tengah	714	5	280	1000	5	200
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>7336</b>	<b>69</b>	<b>106</b>	<b>10188</b>	<b>69</b>	<b>148</b>

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.93 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Polisi Pamong Praja	137	140	129	127	127
Jumlah Penduduk	1.355.554	1.380.260	1.419.229	1.506.307	1.540.772
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :8.000	1 :8.000

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.94 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Diklat Satpol PP	30	0	50	59	64

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2019 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP.

**Tabel 2.95 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	323	171	81	62	53
Jumlah Pelanggaran K3	323	171	81	62	53
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.96 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018**

Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
Satpol PP	4
Dinas Perhubungan	3
Dinas Perindagkop & UKM	3
Dinas Tenaga Kerja	1

Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
Dinas Kelautan dan Perikanan	4
Dinas Sosial	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	1
Bappeda	1
Dinas Kehutanan	3
<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>

*Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021*

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat.

Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2018 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 2.97 Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penegakan PERDA	10	11	13	17	23
- Jumlah penyelesaian penegakan perda	10	11	13	17	23
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0	50	88	45	66
- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5	0,88	0,45	0,66
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jumlah mobil pemadam kebakaran	0	0	0	0	0
- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229	1.506.307
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0,00	50,00	88,00	45,00	66,00
- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5	0,88	0,45	0,66
- Jumlah kejadian kebakaran (kali)	87	135	194	77	66
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	0	0	0	0	0

*Sumber : SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023*

### 2.1.4.3.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

**Tabel 2.98 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat**

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar (jiwa)	1.900	56	56	40	N/A	N/A
2	Anak Terlantar (jiwa)	8.803	1.390	1.390	320	234	1.676
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum (jiwa)	153	N/A	120	50	72	65
4	Anak Jalanan (jiwa)	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitas (jiwa)	2.667	N/A	N/A	145	N/A	269
6	Anak Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	138	N/A	120	50	72	65
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (jiwa)	10.846	104	120	50	72	65

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Lanjut Usia Terlantar (jiwa)	7.986	500	1.015	595	600	6
9	Penyandang Disabilitas (jiwa)	2.152	160	198	3.519	325	30
10	Tuna Susila (jiwa)	2.100	N/A	N/A	N/A	45	1
11	Gelandangan (jiwa)	33	N/A	N/A	N/A	5	11
12	Pengemis (jiwa)	559	N/A	N/A	N/A	5	11
13	Pemulung (jiwa)	283	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kelompok Minoritas (jiwa)	77.927	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) (jiwa)	18.903	N/A	15	5	N/A	N/A
16	Orang Dengan HIV/AIDS (jiwa)	4.280	N/A	80	N/A	N/A	N/A
17	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa)	7.214	N/A	30	40	N/A	N/A
18	Korban Trafikiing (jiwa)	217	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa)	2.020	N/A	10	10	N/A	5
21	Korban Bencana Alam (jiwa)	29.000	13.000	15.000	410	92.776	9.238
22	Korban Bencana Sosial (jiwa)	1.537	700	300	5.662	N/A	N/A
23	Perempuan Rawan Sosial (jiwa)	6.880	N/A	60	40	N/A	N/A
24	Fakir Miskin (KK)	140.761	1.860	1.500	71.591	97.628	97.856
25	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	12.628	66	50	50	N/A	N/A
26	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	755	N/A	60	30	N/A	N/A

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023

Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format di atas tidak ada anggaran.

#### 2.1.4.3.7 Urusan Ketenagakerjaan

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada keadaan tahun 2023 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 358,51 ribu orang atau 48,25 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 139,63 ribu orang atau sekitar 18,79 persen, kemudian diikuti sektor jasa yang menyerap tenaga kerja sebanyak 112,49 ribu orang atau sekitar 15,14 persen.

**Tabel 2.99 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama					Jumlah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
Majene	27.155	5.533	18.033	16.396	12.218	79.335
Polewali Mandar	112.232	20.084	62.007	33.177	32.619	260.119
Mamasa	68.062	2.121	6.235	13.495	7.172	97.085
Mamuju	67.277	8.137	18.976	25.114	18.690	138.194
Pasangkayu	47.484	6.998	23.612	15.130	9.046	102.270
Mamuju Tengah	36.298	2.934	10.764	9.146	6.962	66.004
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>358.508</b>	<b>45.807</b>	<b>139.627</b>	<b>112.458</b>	<b>86.607</b>	<b>743.007</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

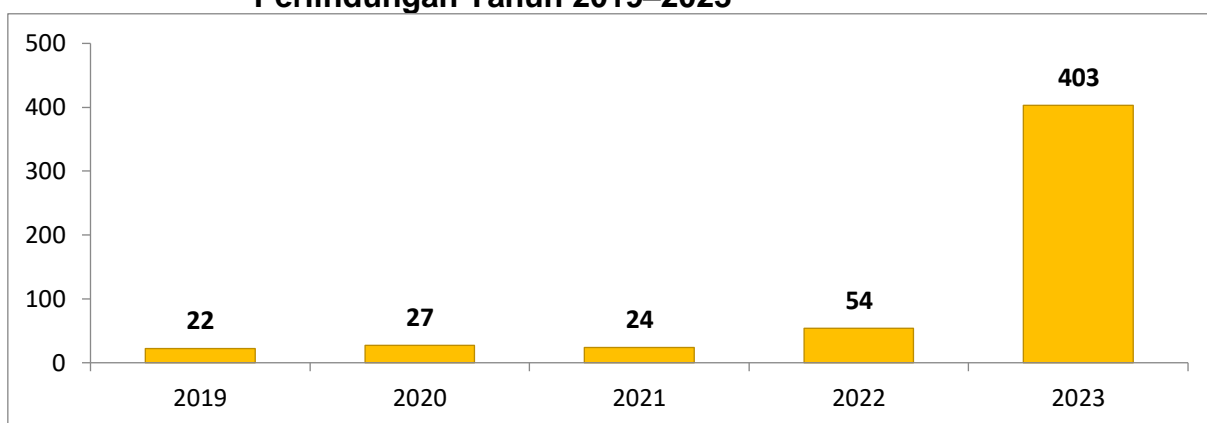
**Tabel 2.100 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	476.557	478.595	505.226	439.773	456.771
Perempuan	480.090	462.682	503.425	292.129	286.236
<b>Jumlah</b>	<b>956.647</b>	<b>941.277</b>	<b>1.008.651</b>	<b>731.902</b>	<b>743.007</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019 didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Sementara di tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 62,67 persen dibandingkan jenis kelamin perempuan sebesar 37,33 persen.

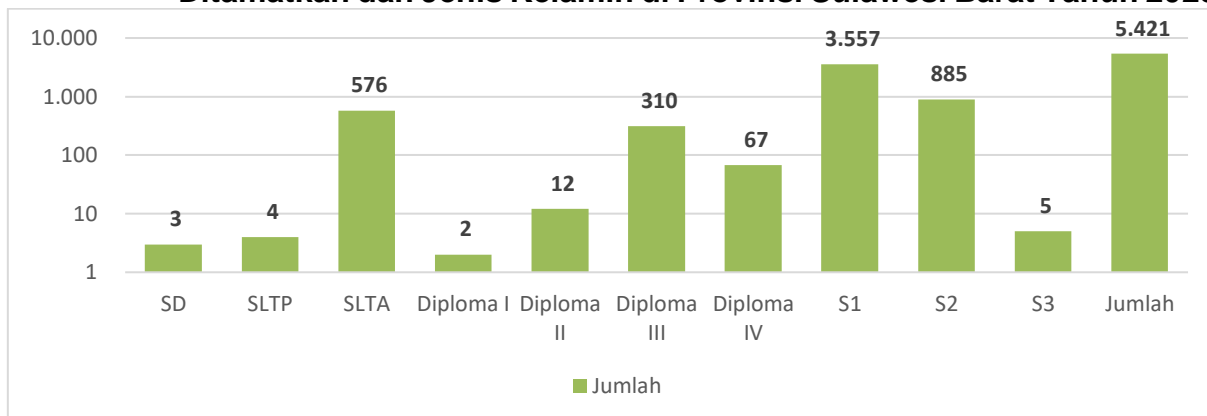
**Grafik 2.41 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2024

Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan dari tahun 2019 sebanyak 22 Perusahaan meningkat menjadi 403 perusahaan pada tahun 2023. Tidak terdapat Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan Pemda pada tahun N dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

**Grafik 2.42 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



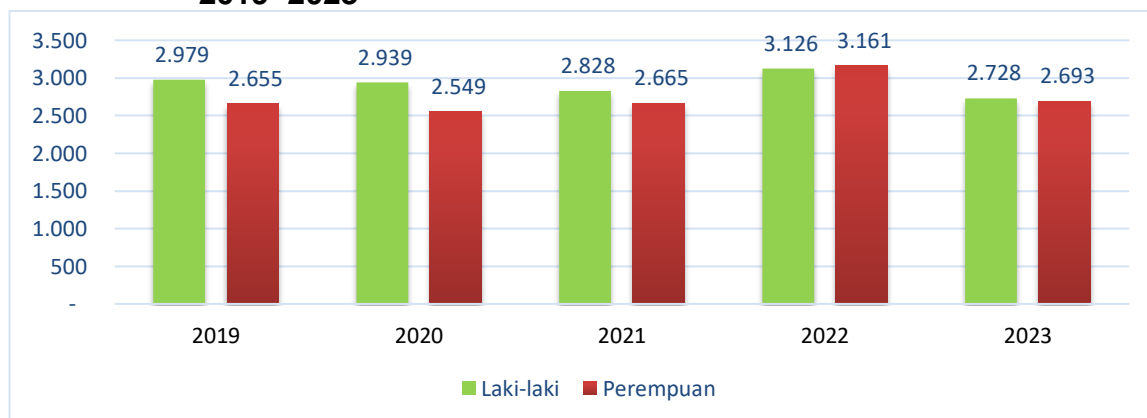
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

Jumlah total Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 5.421. Mayoritas PNS di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 merupakan lulusan universitas sebanyak 89,25 persen dari jumlah keseluruhan PNS.

#### 2.1.4.3.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan Perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Untuk Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya perbedaan jumlah 0,04 persen pada Tahun 2019 dan 2020. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

**Grafik 2.43 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Jumlah Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sebesar 5.421 orang dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.728 dan Perempuan sebanyak 2.693. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 6.287 dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 3.126 dan Perempuan sebanyak 3.161 orang pada Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Jika melihat tren perkembangannya bahwa partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan terjadi peningkatan yang signifikan. Tren Perkembangan dimaksud adalah masyarakat pada umumnya sudah melihat partisipasi perempuan di kancah publik sudah mayoritas ada dan mampu melakukan perubahan yang memadai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan khususnya peningkatan peranan perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan melibatkan secara penuh baik holistic dan integrative dan dalam kesetaraan pembangunan.

#### **b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

Terlepas dari Peranan Perempuan dalam Penataan kesejahteraan sosial merupakan cara sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yaitu pemenuhan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Perempuan dan Laki-laki dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun Progres terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengukur IPG dan IDG adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.101 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup		Pengeluaran per Kapita		IPM	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Majene	9,58	9,04	13,54	13,91	63,53	64,48	12.770	9.509	71,07	67,29
Polewali Mandar	8,05	7,40	13,22	13,88	61,35	65,13	12.525	7.741	69,12	63,69
Mamasa	8,36	8,09	12,10	13,15	69,52	73,49	8.867	7.809	68,89	67,80
Mamuju	8,72	7,88	12,62	13,75	66,73	70,70	13.163	7.011	72,52	65,68
Pasangkayu	8,37	8,12	12,07	12,26	65,40	69,36	17.826	6.462	73,52	63,02
Mamuju Tengah	7,97	7,59	12,63	13,19	67,44	71,40	13.381	549	72,07	62,27
<b>Sulbar</b>	<b>8,36</b>	<b>7,92</b>	<b>12,76</b>	<b>13,28</b>	<b>64,11</b>	<b>68,00</b>	<b>13.867</b>	<b>7.256</b>	<b>71,38</b>	<b>64,42</b>

*Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id*

Berdasarkan Data BPS Tahun 2023 bahwa Pencapaian Komponen IPM Tahun 2023 tercatat mengalami Peningkatan kecuali Komponen Pengeluaran per Kapita hanya disesuaikan. Untuk Angka Harapan Hidup yakni yang baru lahir di

Tahun 2023 tercatat memiliki peluang Hidup hingga 66,01 Tahun lebih lama 0,38 Tahun dibandingkan Tahun 2022. Sementara Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Anak-anak yang pada Tahun 2023 berusia 7 Tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,88 Tahun lebih lama 0,01 Tahun dibandingkan Tahun 2022. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah yaitu Penduduk yang berusia 25 Tahun keatas pada Tahun 2023 secara rata-rata telah manempuh pendidikan selama 8,13 tahun lebih lama 0,05 tahun dibandingkan tahun 2022. Untuk tahun 2023 masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 9,72 juta rupiah per tahun, naik 360 ribu dibandingkan tahun 2022.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Perkembangan IDG di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dan masih mengalami perkembangan yang memadai antara Tahun 2021-2023 dimana di tahun 2021 capaiannya adalah 65,93 persen menjadi 66,93 persen di tahun 2023. Pencapaian IDG ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1). Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2). Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan 3). Sumbangan Pendapatan Perempuan. Di tahun 2023, keterlibatan perempuan di parlemen/Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebesar 11,11 persen yang tidak sesuai target sebesar 30 persen. Perempuan sebagai tenaga profesional di Tahun 2021 sebesar 53,65 persen sedangkan sumbangan pendapatan perempuan di tahun 2021 sebesar 36,59 persen. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.102 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2019–2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Polewali Mandar	17,78	17,78	17,78	17,78	20,00
Mamasa	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33
Mamuju	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Pasangkayu	10,00	13,33	16,67	16,67	16,67
Mamuju Tengah	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>	<b>11,36</b>	<b>11,11</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, 2024

**Tabel 2.103 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	53,41	53,55	52,42	54,80	55,40
Polewali Mandar	50,93	57,01	60,35	59,36	47,49
Mamasa	50,88	47,60	47,63	54,43	50,53
Mamuju	52,97	56,42	51,04	51,80	49,29
Pasangkayu	47,20	46,54	55,42	53,48	56,38
Mamuju Tengah	54,81	52,05	49,45	51,64	51,31
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>51,67</b>	<b>53,26</b>	<b>53,65</b>	<b>54,82</b>	<b>50,90</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2024

**Tabel 2.104 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2023**

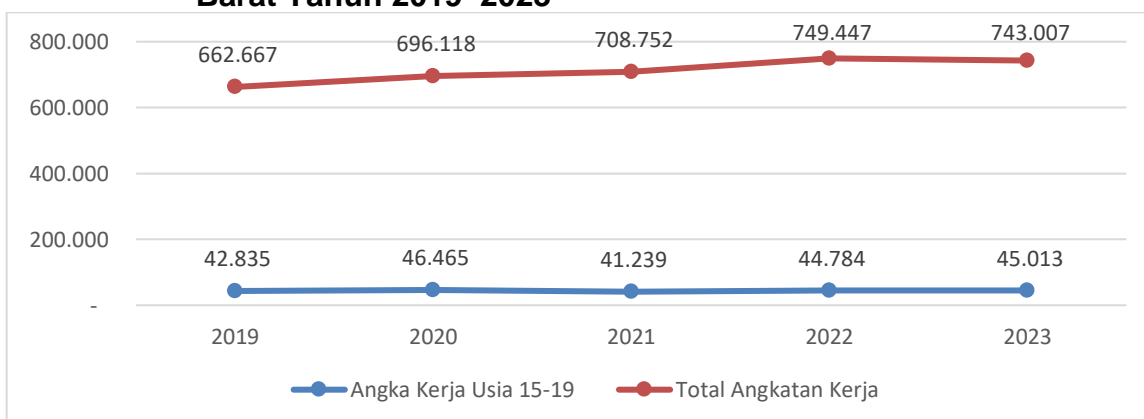
Kabupaten	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	39,18	39,47	39,50	38,84	41,15
Polewali Mandar	37,31	37,63	37,64	37,34	38,12
Mamasa	25,87	26,15	26,21	25,48	26,67
Mamuju	28,40	28,59	28,61	29,42	30,17
Pasang Kayu	19,26	19,42	19,42	19,58	19,41
Mamuju Tengah	22,24	22,72	22,68	22,70	22,98
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>36,32</b>	<b>36,57</b>	<b>36,59</b>	<b>36,51</b>	<b>37,30</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id, 2024

### c. Angkatan Kerja Di bawah Umur

Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar 42.835 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 45.013 jiwa dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur yang bekerja.

**Grafik 2.44 Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



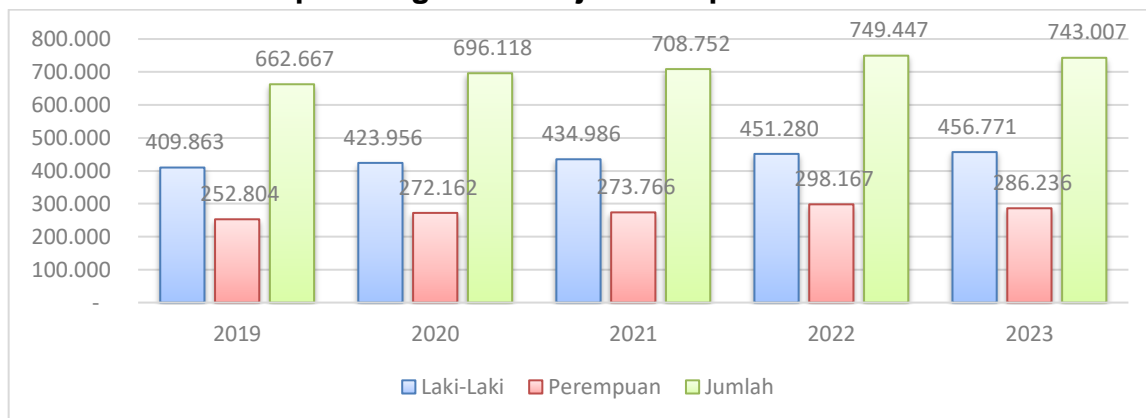
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

### d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengetahui gambaran penduduk secara ekonomi, maka digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPak merupakan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif baik yang bekerja, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan usaha. Sedangkan gambaran TPak Perempuan merupakan ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan dan bertujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data Tahun 2021 dan 2021 dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan seperti pada Tabel berikut ini.

**Grafik 2.45 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan data yang ada jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, di Tahun 2019 berjumlah 252.804 orang sedangkan di Tahun 2020 berjumlah 272.162 orang, di tahun 2021 sebanyak 273.766 orang dan di tahun 2022 sebanyak 298.167 orang dan di tahun 2023 sebanyak 286.236 orang, ada selisih pengurangan Angkatan Kerja Perempuan dari tahun 2022 ke 2023 sejumlah 11.931 orang. Hal ini disebabkan menurunnya angkatan kerja dari tahun sebelumnya meskipun di Sulawesi Barat pengelolaan UMKM Mandiri berbasis Rumah Tangga cukup tinggi oleh perempuan. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga oleh Perempuan yang merupakan faktor tingginya Angkatan Kerja Perempuan.

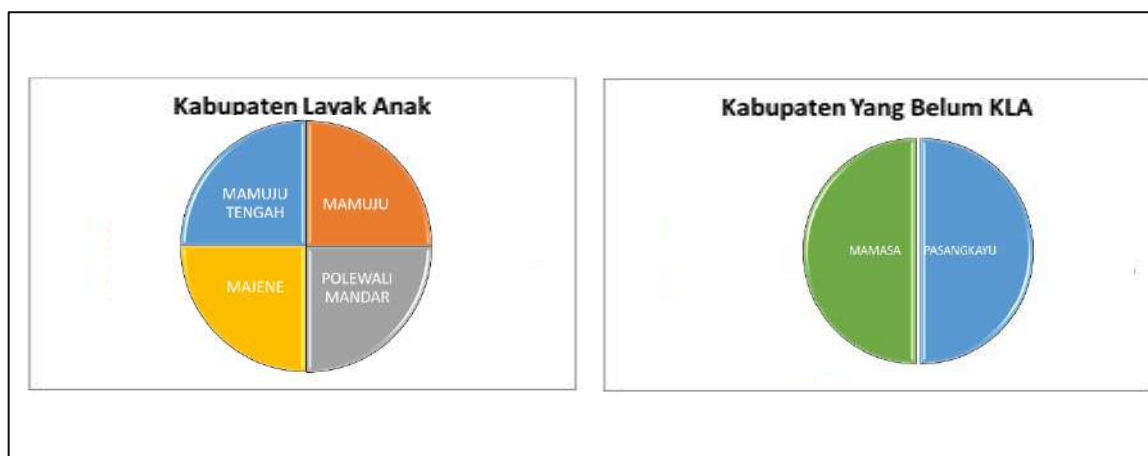
#### e. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Adapun beberapa tahap percepatan KLA telah dilakukan diantaranya mulai dari Deklarasi (komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk percepatan KLA di 6 Kabupaten), Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Percepatan KLA. Pencapaian Untuk Kabupaten yang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak di Tahun 2022 ada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan progres sebesar 33,3 persen dengan Predikat Pratama dan

diharapkan sesuai Janji Kerja Gubernur agar 4 Kabupaten lainnya melakukan percepatan Penyusunan KLA seperti Tabel di bawah ini.

**Diagram 2.4 Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2023**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2024

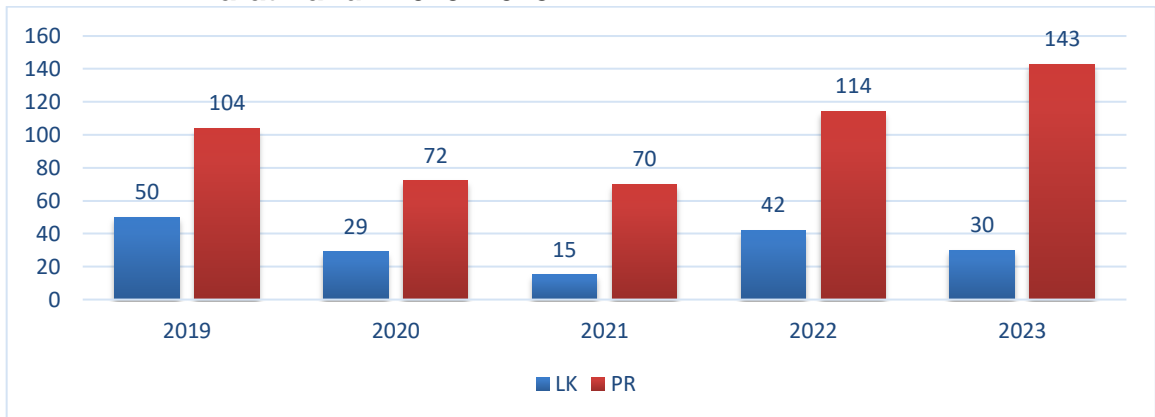
#### f. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan.

Pada aspek penanganan terhadap Kekerasan terhadap perempuan, anak serta perdagangan manusia, hal-hal yang memerlukan perbaikan antara lain melakukan perbaikan layanan dengan meningkatkan efektivitas, prosedur yang jelas dalam menangani kasus sehingga korban tidak merasa didiskriminasi. Adapun Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 berdasarkan Data Simfoni PPA seperti Tabel di bawah ini.

**Grafik 2.46 Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



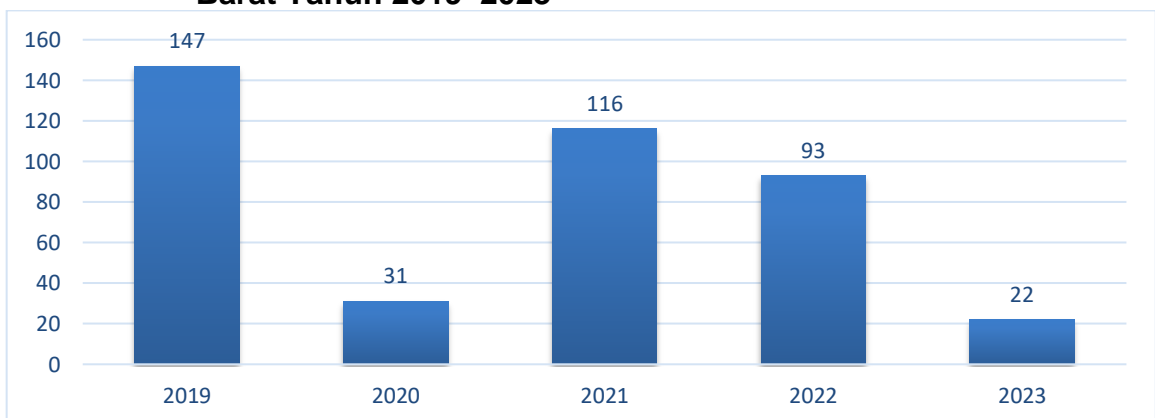
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2024

Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah kekerasan yang terdapat di data simfoni adalah sebanyak 119 kasus namun pada tahun 2022 jumlah kekerasan menurun sebanyak 114 kasus.

**g. Jumlah Penanganan Laporan KDRT**

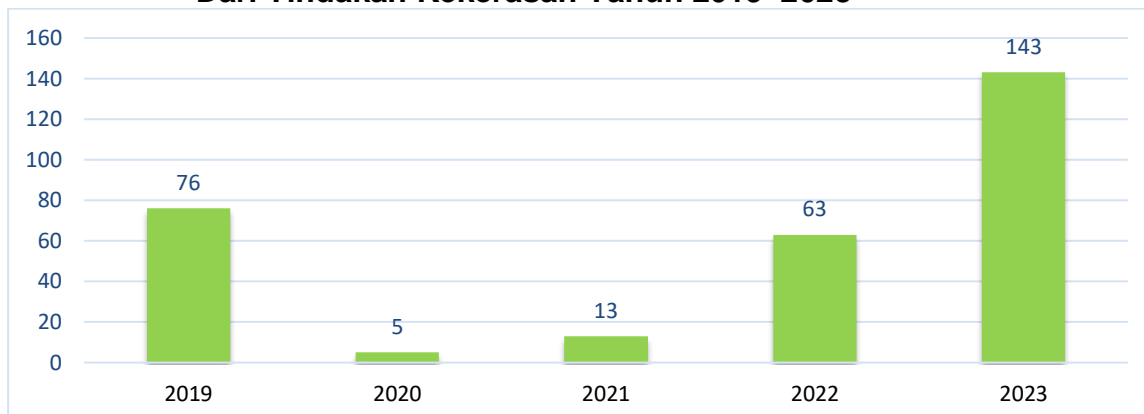
Kasus kekerasan dalam rumah tinggi di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan hal ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak.

**Grafik 2.47 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Grafik 2.48 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### h. Indeks Pembangunan Gender

Isu-isu tentang penyeteraan gender memang akan selalu menjadi perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

**Tabel 2.105 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	94.42	94,09	94,17	94,19	94,68
Polewali Mandar	91.57	91,56	91,63	91,92	92,14
Mamasa	97.75	97,79	98,23	98,23	98,42
Mamuju	90.64	90,57	90,62	90,46	90,57
Pasangkayu	84.42	84,92	85,25	85,43	85,72
Mamuju Tengah	86.70	86,34	86,10	86,16	86,40
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>89.76</b>	<b>89,43</b>	<b>89,57</b>	<b>89,79</b>	<b>90,25</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2024

**Tabel 2.106 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	75,30	75,56	75,46	75,76	76,28
Polewali Mandar	72,21	71,94	71,13	71,81	74,87
Mamasa	60,28	60,40	60,49	60,39	60,95
Mamuju	58,96	58,58	59,38	60,59	60,96
Pasangkayu	50,46	54,13	56,97	57,52	57,17
Mamuju Tengah	65,86	66,56	67,11	67,01	57,26
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>65,92</b>	<b>65,92</b>	<b>65,93</b>	<b>66,55</b>	<b>66,93</b>

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2024

Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai IPG sebesar 89,76 persen, menurun hingga tahun 2020 sebesar 89,43 persen hingga kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 90,25 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG Sulawesi Barat tahun 2023 sebesar 66,93 persen, salah satu komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Sulawesi Barat.

#### 2.1.4.3.9 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat subsistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat;
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2018–2022 mengalami peningkatan seperti pada Tabel di bawah. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

**Tabel 2.107 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Padi (Ton GKG)	300.142,22	345.050,37	323.426,53	364.683,16	294.026,68
Produksi Beras (Kg)	171.491.240	197.150,28	184.795,11	209.446,73	168.866,86
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.380.256	1.419.229	1.436.842	1.458.606	1.481.077
Konsumsi Per kapita (Kg/Thn)	174,18	174,18	174,18	174,18	102.708
Kebutuhan Beras (Kg)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Surplus Beras (Kg)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.108 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton)**

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kedelai	3,008	-	4,943	4.216	4.356
Kacang Hijau	0.455	0	4,243	4.360	4.524
Kacang Tanah	0,406	0	0,287	0,329	0,442
Ubi Jalar	8,177	6,005	4,547	8.749	9.987
Gula	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Ket: \*) Angka Sementara, \*\*) Angka Prognosa

Data produksi palawija (termasuk jagung dan kedelai) terakhir dirilis pada tahun 2015. Sejak tahun 2016, BPS sudah tidak merilis lagi data produksi palawija karena metode pengumpulan luas panen metode palawija masih menggunakan metode lama, yaitu eye estimate, yang diduga sudah tidak akurat untuk pengumpulan data luas panen

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.983 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,45 gram/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.109 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018**

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Daging	1.378	7.529	10.260	11.025	11.254
Susu	-	-	-	-	-
Telur	-	-	-	-	-
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014 – 2018 (k.kal/kap/hr)	2.388	3.447	4.447	4.740	4.983
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014– 2018 (gram/kap/hari)	87	97	122,47	113,70	113,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: \*) Angka Sementara, \*\*) Angka Prognosa

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2014–2018 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 2.110 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

Kelompok Pangan	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	25,00	25,0	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian	1,00	0,9	0,9	1,2	1,0
Pangan Hewani	14,00	14,5	15,1	15,9	16,7
Minyak & lemak	5,00	4,8	4,7	5,0	4,8
Buah/biji berminyak	0,70	0,7	0,6	0,7	0,6
Kacang-kacangan	3,00	3,4	2,6	2,9	3,5
Gula	2,00	2,1	2,0	2,1	1,9
Sayur & buah	22,00	27,4	27,1	21,7	22,6
Lain-lain	-	-	-	-	-
<b>Skor PPH Sulbar</b>	<b>72,70</b>	<b>78,79753</b>	<b>77,97521</b>	<b>74,56026</b>	<b>76,02211</b>
<b>Skor PPH Nasional</b>					

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2023

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 2.111 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beras (Kg/Kap/Th)	1.133,6	115,2	111,9	112,1	112,2
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	42,4	9,9	9,7	13,7	10,8
Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	135,7	39,9	40,2	41,5	43,1
Minyak dan Lemak (Kg/Kap/Th)	194,8	8,3	8,0	8,9	8,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.112 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	1.133,6	1.427,7	1.393,0	1.384,3	1.384,3
Umbi-umbian	42,4	37,2	37,1	51,3	45,0
Pangan Hewani	135,7	152,6	158,2	167,4	173,9
Minyak & lemak	194,8	202,6	196,5	218,9	197,3
Buah/biji berminyak	27,1	28,4	26,5	29,0	26,4
Kacang-kacangan	32,6	35,5	27,7	30,9	37,5
Gula	88,9	86,8	84,4	87,3	80,4
Sayur & buah	88,4	115,2	113,7	91,1	94,2
Lain-lain	37,4	39,0	37,8	38,3	44,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2023

#### 2.1.4.3.10 Urusan Pertanahan

Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk. Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.113 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018**

Indikator	Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan	78,65 %
Persentase luas lahan bersertifikat	64,54 % dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara	3 Kasus

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 2.114 Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021**

URAIAN	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	2.856.945	5.345.913	11.009.810	4.571.316	4.896.269
Polewali Mandar	11.026.804	21.906.890	135.072.234	14.523.620	13.727.031
Mamasa	8.937.469	11.381.662	30.297.679	8.117.147	6.332.578
Mamuju	12.613.207	23.214.211	33.531.476	4.721.064	15.451.546
Pasangkayu	31.457.503	36.712.008	39.061.146	6.745.017	7.645.617
Mamuju Tengah	13.058.521	28.404.141	45.310.765	14.524.788	7.799.551
<b>Total</b>	<b>79.950.449</b>	<b>126.964.825</b>	<b>294.283.110</b>	<b>53.202.952</b>	<b>55.852.592</b>

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022

#### 2.1.4.3.11 Urusan Lingkungan Hidup

##### a. Mangrove

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan

lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

**Tabel 2.115 Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021**

Kabupaten	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			
	Jarang	Lebat	Sedang	Total
Majene	45,98	87,31	10,51	143,80
Polewali Mandar	95,99	181,25	2,65	279,88
Mamuju	130,36	778,14	16,02	924,52
Pasangkayu	33,78	564,51	4,41	602,70
Mamuju Tengah	107,15	649,58	24,32	781,04
<b>Jumlah</b>	<b>412,25</b>	<b>2.260,79</b>	<b>57,91</b>	<b>2.731,95</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

**b. Terumbu Karang**

**Tabel 2.116 Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021**

Kabupaten	Kondisi Terumbu Karang (Ha)				Luas Total
	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	
Mamuju	600,00	1.066,00	1.934,00	3.600,00	7.735,00
Majene	0	0	120,58	287,95	408,53
Polewali Mandar	0	477,48	0	371,75	849,23
Pasangkayu	200,07	346,23	250,48	287,95	1.084,73
Mamuju Tengah	0	0	36,00	15,00	51,00
<b>Jumlah</b>	<b>800,07</b>	<b>1.889,71</b>	<b>2.220,48</b>	<b>4.274,70</b>	<b>9.719,96</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 persen, dalam kondisi baik sebesar 19,44 persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi kurang sebesar 43,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir sebanding dengan kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu dan yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.

### c. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan serta penanaman tanaman semusim.

Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air.

**Tabel 2.117 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (Hektar)**

Daerah	Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	848,04	3.515,79	41.438,86	5.873,80	0,00
Polewali Mandar	2.895,52	7.459,89	66.974,18	16.914,34	144,38
Mamasa	11.781,11	40.570,77	135.615,07	5.102,30	7.399,22
Mamuju	21.819,37	103.639,93	200.924,90	9.266,29	642,55
Pasangkayu	10.125,55	73.183,77	72.324,18	5.571,59	742,64
Mamuju Tengah	26.390,41	101.576,22	83.686,86	544,17	57,94
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>73.860,00</b>	<b>329.946,37</b>	<b>600.964,05</b>	<b>43.272,49</b>	<b>8.986,73</b>

#### Lanjutan Tabel di atas

Daerah	Bukan Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	3.976,90	6.287,85	25.721,20	1.912,38	30,68
Polewali Mandar	33.659,93	17.255,18	54.354,78	7.897,74	264,46
Mamasa	9.294,99	7.404,28	66.480,91	10.281,38	3.808,74
Mamuju	25.693,50	18.352,14	66.814,94	8.269,24	63,49
Pasangkayu	36.756,90	63.034,45	24.943,75	536,62	538,36
Mamuju Tengah	34.772,37	21.364,34	40.589,34	1.107,95	119,87
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>144.154,59</b>	<b>133.698,24</b>	<b>278.904,92</b>	<b>30.005,31</b>	<b>4.825,60</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

### d. Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, adanya perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan kualitas udara. Terkait dengan indikator IKLH mulai tahun 2021 sudah menggunakan 4 indikator/sector sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan, bahwa untuk indikator IKLH terdiri dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL yakni: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 4) Indeks Kualitas Air Laut.

**Tabel 2.118 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Provinsi/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Majene	N/A	N/A	61,43	61,11	66,00
Kab. Polewali Mandar	46,67	50,00	52,35	50,80	61,35
Kab. Mamasa	47,14	51,82	54,76	55,71	58,57
Kab. Mamuju	50,00	N/A	63,33	60,00	55,67
Kab. Pasangkayu	47,50	N/A	55,33	61,52	60,27
Kab. Mamuju Tengah	50,00	N/A	67,50	63,33	54,44
<b>Prov. Sulawesi Barat</b>	<b>53,20</b>	<b>53,00</b>	<b>56,04</b>	<b>56,41</b>	<b>58,82</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.119 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Provinsi/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Majene	84,14	86,87	88,16	86,90	88,95
Kab. Polewali Mandar	87,68	85,51	88,56	90,76	92,87
Kab. Mamasa	92,63	91,48	92,80	92,53	94,71
Kab. Mamuju	92,11	92,88	92,96	94,19	94,89
Kab. Pasangkayu	94,96	92,94	94,24	95,16	96,51
Kab. Mamuju Tengah	88,48	88,62	89,13	91,73	92,08
<b>Prov. Sulawesi Barat</b>	<b>90,00</b>	<b>89,72</b>	<b>90,97</b>	<b>91,88</b>	<b>93,33</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.120 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Provinsi/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	51,52	58,90	64,04	64,00	64,00
Polewali Mandar	37,25	40,77	44,41	44,40	44,40
Mamasa	68,20	70,50	74,32	74,10	74,10
Mamuju	73,62	82,61	83,25	83,20	83,20
Pasangkayu	62,53	63,17	65,39	65,40	65,40
Mamuju Tengah	79,38	80,13	81,05	81,00	81,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>62,08</b>	<b>70,52</b>	<b>72,66</b>	<b>71,88</b>	<b>71,88</b>

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.121 Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021–2023**

Tahun	Nilai IKAL	Predikat Kriteria
2021	81,52	Baik
2022	87,92	Baik
2023	83,88	Baik

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.

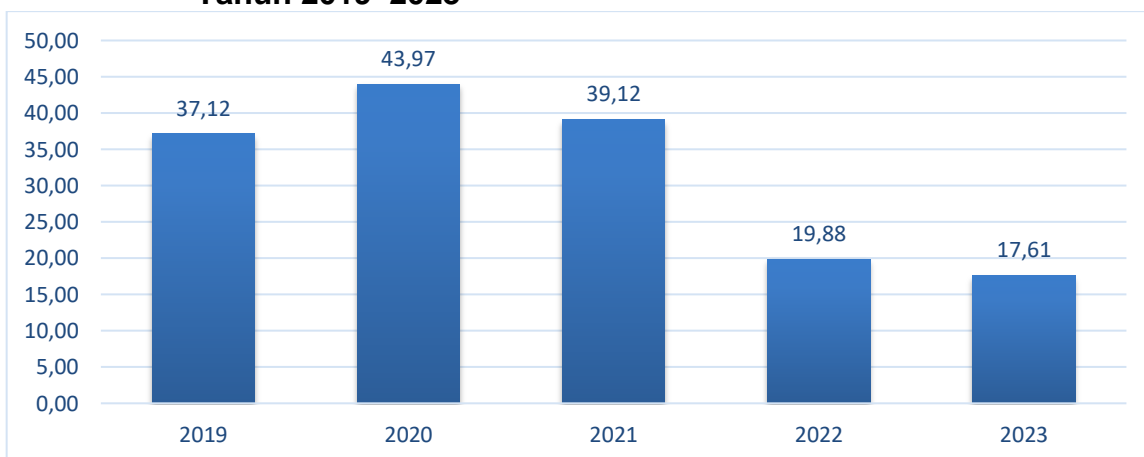
**Tabel 2.122 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Nilai IKAL	Predikat Kriteria
2019	67,79	Cukup Baik
2020	74,91	Baik
2021	75,72	Baik
2022	76,77	Baik
2023	78,05	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024

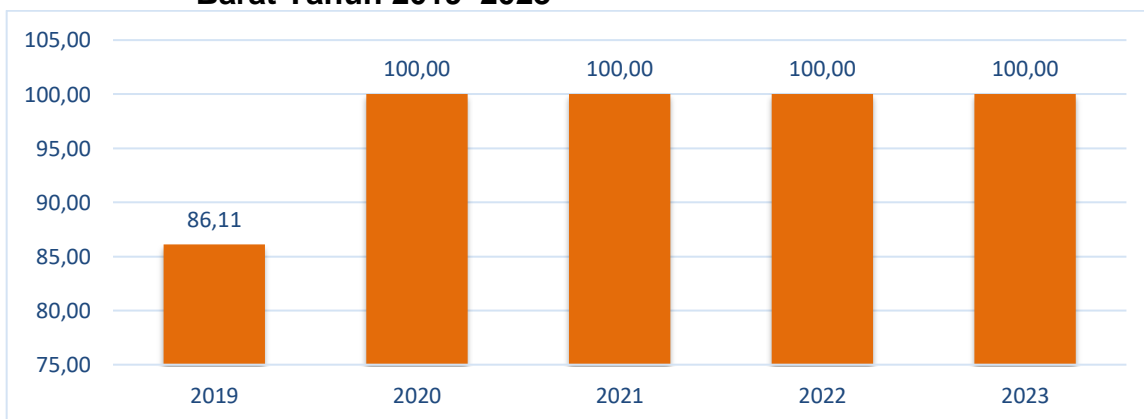
Indikator kinerja penanganan sampah atau sampah yang terkelola di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019–2023 menunjukkan capaian yang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2019 persentase penanganan sampah tercatat 37,12 persen, akan tetapi hingga tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 17,61 persen. Persentase penanganan sampah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 2.49 Persentase Sampah yang Terkelola di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Grafik 2.50 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2024

### 2.1.4.3.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk, Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, dan Kepemilikan KTP. Adapun capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

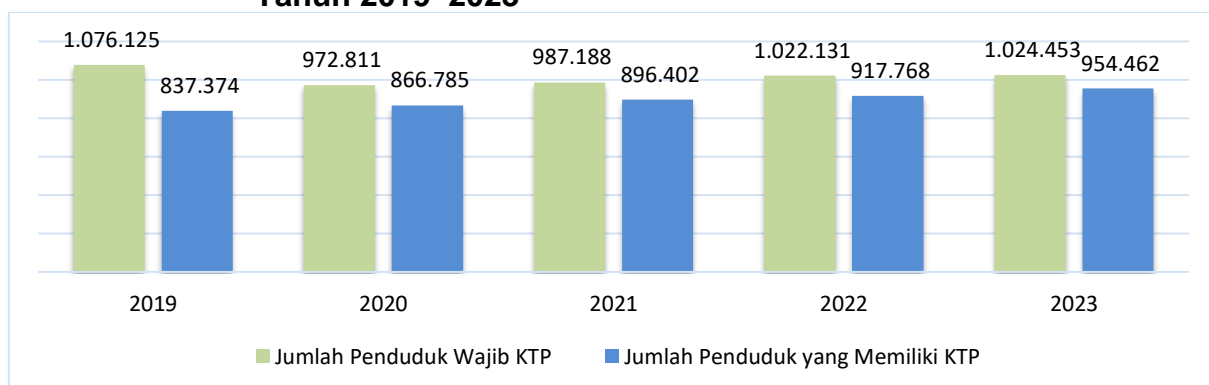
**Tabel 2.123 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019–2023**

INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk	837.374	78	866.785	89	896.402	69	917.768	68	954.462	65
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	9.109	92	10.322	93	11.578	96	15.845	97	143.003	96
Rasio Pasangan Berakte Nikah	117.036	21	172.776	28	206.700	33	206.700	33	258.599	42
Kepemilikan KTP	1.076.125	78	972.811	89	896.402	91	917.768	90	954.462	93
Kepemilikan Akte Kelahiran/1000 Penduduk	594.954	38,14	626.493	43,55	594.954	38	626.493	43	776.537	53
Kependudukan Skala Provinsi	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2024

Tertibnya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah salah satunya dalam bentuk kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada grafik berikut.

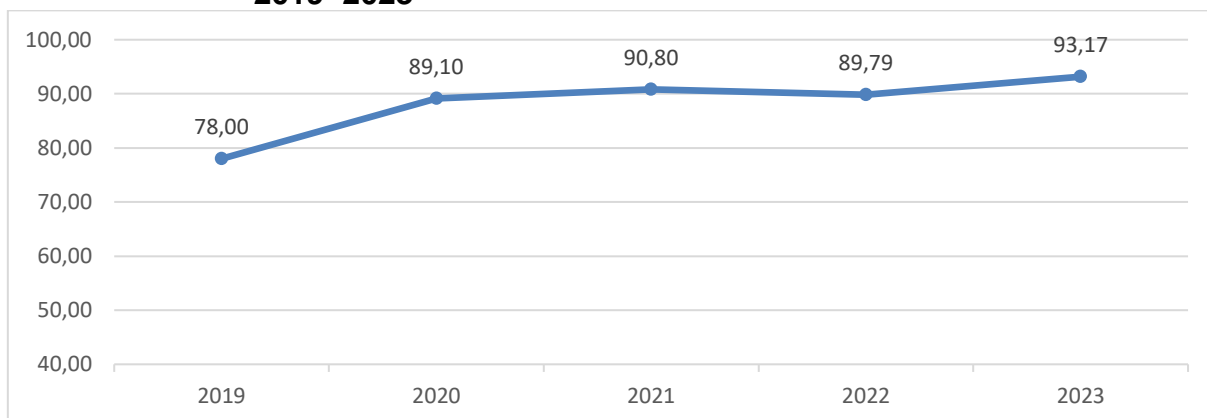
**Grafik 2.51 Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2024

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 77,81 persen pada tahun 2019 menjadi 93,17 persen pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 15,36 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif.

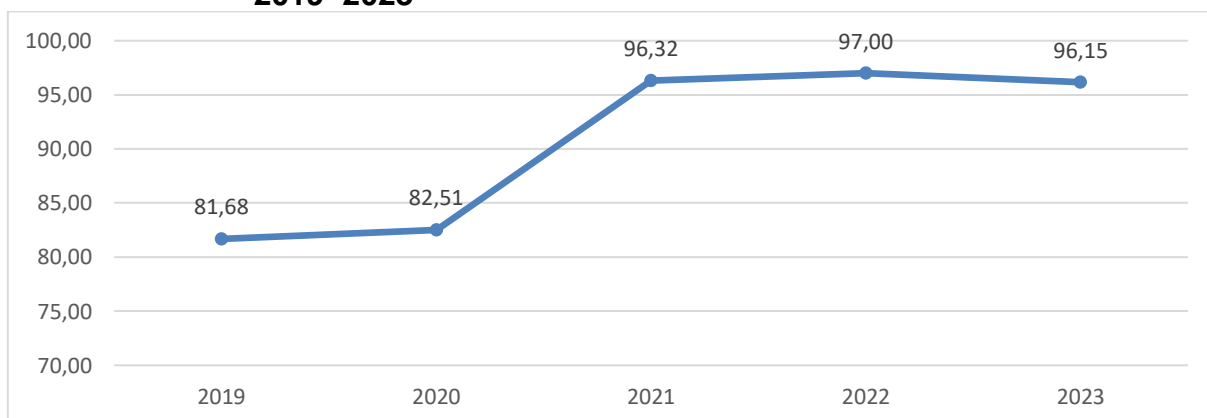
**Grafik 2.52 Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2023

Selain KTP, kepemilikan akta kelahiran juga sangat penting. Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

**Grafik 2.53 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

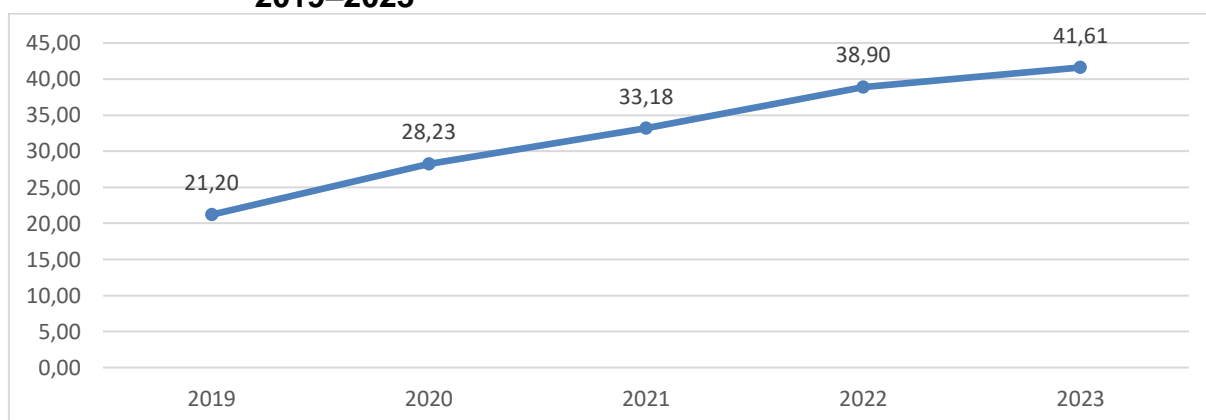


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2024

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 81,68 persen menjadi 96,15 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan lainnya).

Indikator lain yang capaiannya masih sangat rendah pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu rendahnya rasio Pasangan Berakte Nikah. Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

**Grafik 2.54 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa di Sulawesi Barat kepemilikan akte perkawinan masih sangat rendah. Walaupun mengalami tren peningkatan yang cukup baik namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk non muslim.

### 2.1.4.3.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, dapat diharapkan terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya.

Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018 tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

**Tabel 2.124 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018–2022**

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	61,57	61,57	67,83	81,04	81,39
- Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	354	354	390	466	468
- Jumlah seluruh kantor pemerintahan desa	575	575	575	575	575
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	87		87	N/A	
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	7,21		7,21	7,21	
-Jumlah kelompok binaan PKK	9.993		9.993	9.993	
-Jumlah PKK	138.556		138.556	138.556	
LPM berprestasi					
- Jumlah LPM berprestasi					
PKK aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Jumlah PKK Aktif					
Posyandu aktif	926	575	957	926	575

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
- Jumlah Posyandu aktif	1.775		1.731	1.645	1.169
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	575 Desa		575 Desa	575 Desa	

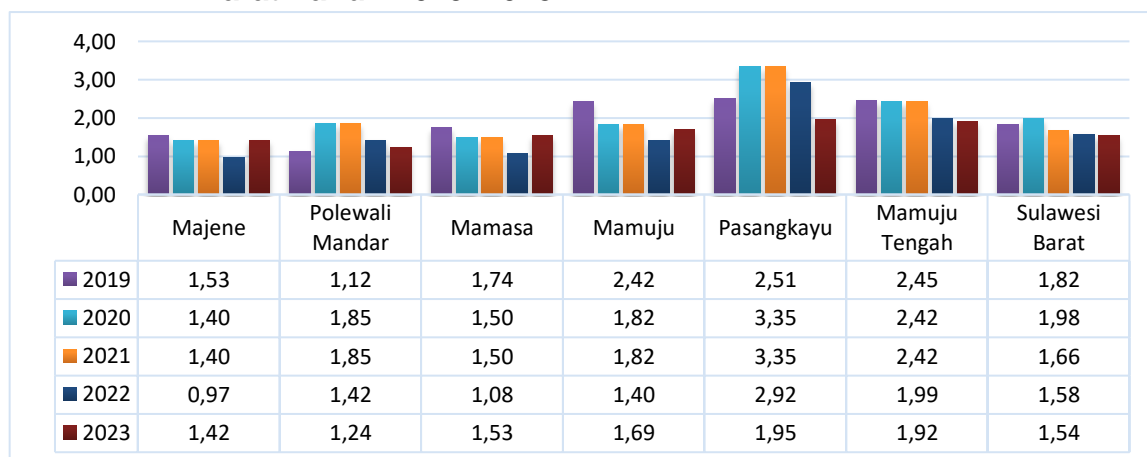
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat 2023

### 2.1.4.3.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan ke depan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 1,85 persen naik menjadi 1,98 persen pada tahun 2020. Dan hingga tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat menurun sebesar 1,58 persen.

**Grafik 2.55 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 197 jiwa/km<sup>2</sup>.

Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.481.077 jiwa terdiri dari

penduduk laki - laki sebanyak 750.773 jiwa dan perempuan sebanyak 730.304 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.54 persen.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya, di mana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2021 sebesar 2,69 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 6 (enam) dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, di mana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 37 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan merupakan angka tertinggi ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah terdapat pada D.I Yogyakarta (9 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun).

Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilitas. Disamping itu faktor sosial budaya juga berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

**Tabel 2.125 Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

Provinsi	ASFR (Age Specific Fertility Rate)							TFR	Rata-Rata UKP
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Sulawesi Barat	37.5	117.6	144.8	120.8	79.6	31.0	6.8	2.69	N/A

*Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang sangat penting.

**b. Rasio Akseptor KB**

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2018 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2012 ke tahun 2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun

ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.126 Rasio Akseptor Baru KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
JUMLAH AKSEPTOR BARU KB	24.034	18.803	N/A	11.312	24.227
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR	210.044	196.227	186.406	178.742	205.833
RASIO AKSEPTOR BARU KB	11,44	9,58	N/A	6,13	11,77

*Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2024*

### c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2019 sebesar 75,06 persen mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 77,92 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 49,90 persen, hingga di tahun 2023 menjadi 64,64 persen sebagaimana tabel di bawah ini. Penurunan pada tahun 2021 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

**Tabel 2.127 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Peserta KB Aktif	157.656	152.895	93.021	97.908	133.059
Jumlah Pasangan Usia Subur	210.044	196.227	186.406	178.742	205.833
<b>Cakupan Peserta KB Aktif (%)</b>	<b>75.06</b>	<b>77.92</b>	<b>49.90</b>	<b>54.78</b>	<b>64.64</b>

*Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2024*

## 2.1.4.3.15 Urusan Perhubungan

### a. Perhubungan Darat

Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, di mana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar serta tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat.

**Tabel 2.128 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2023**

Tipe Terminal	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal Tipe A	2	2	2	2	2
Terminal Tipe B	-	-	-	-	-
Terminal Tipe C	3	3	2	2	2
Terminal Pembantu	3	3	4	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.129 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023**

NO	NAMA TERMINAL	TYPE	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KABUPATEN MAMUJU</b>		
a.	Simbuang	A	Berfungsi
b.	Pasar Sentral Mamuju	C	Tidak Berfungsi
c.	Tarailu	C	Berfungsi
d.	Tasiu	TP	Berfungsi
<b>II</b>	<b>KABUPATEN MAJENE</b>		
a.	Lutang	TP	Berfungsi
b.	Ammana Wewang	C	Berfungsi
<b>III</b>	<b>KABUPATEN POLMAN</b>		
a.	Tipalayo	A	Berfungsi
b.	Polewali	TP	Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

## b. Perhubungan Udara

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.

**Tabel 2.130 Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2023**

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	2500 m x 45 m
Landas Hubung (Taxiway)	75 m x 18 m
Landas Parkir (Apron)	20.400 m <sup>2</sup>
Overrun	2 x 30 m x 30 m
Bahu (Shoulder)	2 x 60 m x 2.500 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampa Padang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2020 hingga sekarang. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tampa Padang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boeing sekelas Garuda.

**Tabel 2.131 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2023**

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu ( <i>Runway</i> )	1.200 m x 30 m
Landas Hubung ( <i>Taxiway</i> )	80 m x 15 m
Landas Parkir ( <i>Apron</i> )	60 m x 40 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

### c. Perhubungan Laut

Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktivitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat.

**Tabel 2.132 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2023**

URAIAN	Dimensi
DERMAGA – 1 (Deep = -9 M)	62 X 15 M <sup>2</sup>
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M)	101 X 15 M <sup>2</sup>
DERMAGA – 3 (2015)	100 X 15 M <sup>2</sup>
LAPANGAN PENUMPUKAN	108 M2
GUDANG	850 M2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.133 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2019–2023**

Indikator Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Perhubungan</b>					
Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.399.194	882.387	426.262	2.084.773	2,098,639
Jumlah penumpang yang tiba (masuk)	758.544	698.333	448.699	214.041	1,058,598
Jumlah penumpang yang berangkat (keluar)	960.765	700.861	433.688	212.221	1,040,041
Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C	28,46	23,47	22,44	22,18	
Rasio Izin Trayek	0	0	0	0	0
- Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan Darat	221.943	159.620	100.569	187.649	169,456
Jumlah angkutan Darat yang tiba (Masuk)	112.465	79.360	50.441	93.761	92,219
Jumlah angkutan Darat yang berangkat (Keluar)	109.478	80.260	50.128	93.888	77,237

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### 2.1.4.3.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*).

Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten.

**Tabel 2.134 Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat**

Kabupaten	Jumlah Layanan Internet Desa				Jumlah
	2019	2020	2021	2022	
Majene	5	5	-	-	10
Polewali Mandar	8	7	-	-	15
Mamasa	5	8	1	-	14
Mamuju	5	4	3	-	12
Pasangkayu	4	4	-	-	8
Mamuju Tengah	5	1	-	-	6
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>59</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2023*

KIM adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat, dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan Informasi.

**Tabel 2.135 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

NO	Kabupaten	Jumlah KIM			
		2018	2019	2021	2022
1	Mamuju	14	14	0	1
2	Majene	99	99	112	112
3	Polewali Mandar	1	1	4	2
4	Mamasa	50	50	121	123
5	Pasangkayu	3	3	11	11
6	Mamuju Tengah	1	4	6	6
	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>168</b>	<b>171</b>	<b>254</b>	<b>254</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten Mamasa mengalami Peningkatan sebanyak 2 Kelompok Informasi Masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya Masyarakat pada daerah tertentu secara khusus mengelola kelompok informasi yang bertujuan untuk memperlancar informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi.

Untuk Pengguna Pemprov dan OPD jumlah Portal/Website yang Aktif sebanyak 40 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 2 Portal/Website dan untuk Non OPD yang Aktif sebanyak 11 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 3 Portal/Website.

**Tabel 2.136 Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-		Jumlah
	Aktif	Belum Aktif	
Pemprov dan OPD	40	2	42
Non OPD	11	3	14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2022

**Tabel 2.137 WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018–2022**

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2023

#### 2.1.4.3.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun 2022 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 1.191 unit. Terdiri dari 891 koperasi aktif dan 300 koperasi tidak aktif.

**Tabel 2.138 Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Keaktifan		Jumlah	Pesentase Koperasi Aktif (%)
	Aktif	Tidak Aktif		
Majene	46	66	112	41.07
Polewali Mandar	139	117	256	54.30
Mamasa	12	4	16	75.00
Mamuju	215	75	290	74.14
Pasangkayu	44	73	117	37.61
Mamuju Tengah	34	79	113	30.09
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>490</b>	<b>414</b>	<b>904</b>	<b>54.20</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan, Sumber informasi yang terbatas, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

**Tabel 2.139 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

Kabupaten	Kategori Usaha				Jumlah	Persentase UMKM
	Mikro	Kecil	Menengah	Industri Besar		
Majene	7.185	2.654	9	0	9.848	100,00
Polewali Mandar	50.071	9.341	20	1	59.433	100,00
Mamasa	27.848	2.190	2	0	30.040	100,00
Mamuju	1.559	789	12	3	2.363	99,75
Pasangkayu	836	154	11	7	1.008	98,61
Mamuju Tengah	958	289	0	4	1.251	99,36
<b>Jumlah</b>	<b>88.457</b>	<b>15.417</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>103.943</b>	<b>99,97</b>

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.140 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

URAIAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi Aktif (unit)	75,15	N/A	70,03	71,96	78,21
Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non BPR/LKM	22150	N/A	N/A	N/A	N/A
Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	5 UKM	N/A	N/A	N/A	N/A

*Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2023*

#### 2.1.4.3.18 Urusan Penanaman Modal

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah investor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2020 bertambah sebanyak 24 investor sedangkan tahun 2019 sebanyak 16 investor dari tahun 2018, meskipun di tahun 2022 menjadi 447 investor. Jika dilihat dari jumlah investor pada tahun yang sama terlihat bahwa pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan karena pada tahun tersebut perusahaan yang berinvestasi adalah yang berskala besar dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 walaupun jumlah investor lebih banyak tetapi jumlah investasi rata-rata berskala kecil.

**Tabel 2.141 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Uraian	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	92 Investor	116 Investor	486 Investor	447 Investor	1887 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	1.339 M	347 M	482 M	1.719 M	2,37 T
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	219 Izin	218 Izin	501 Izin	20.800 Izin	1.376 Izin dan NonIzin
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	44,23	7,91	3,21	5,70	21,34
Lama Proses Perizinan (Rata-rata)	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3–6 Hari	3–5 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha	-	-	-	1 Pergub	1 Draft Pergub

*Sumber : DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Rasio tenaga kerja menunjukkan berapa rata-rata pekerja yang bekerja pada perusahaan. Pada tahun 2018 rasio tenaga kerja tertinggi. Jika dilihat dari jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja maka pada tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut orientasinya adalah bidang yang membutuhkan banyak

tenaga kerja sedangkan tahun 2017 dan khususnya tahun 2019 dan 2020 sebagian pekerjaannya dibantu oleh mesin.

Kenaikan dan penurunan realisasi investasi PMDN dari tahun 2018 ke 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana berturut-turut dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sebesar 376.24, -62,24, dan -78.69. Data tersebut berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi kewajiban setiap perusahaan secara berkala. Beberapa perusahaan masih belum mempunyai kesadaran untuk memberikan LKPM karena selain enggan untuk memberikan data realisasinya secara riil juga karena belum ada penerapan pemberian sanksi yang tegas. Penyebab penurunan lainnya adalah tidak ada perusahaan yang menambah modal ataupun aset yang juga turut dilaporkan dalam LKPM.

**Tabel 2.142 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	(4 = (2-3)/2*100)
2019	152.017.489.178	330.947.793.121	-54,07
2020	93.980.182.534	152.017.489.178	-38,18
2021	86.449.505.849	93.980.182.534	-8,01
2022	405.898.247.671	86.449.505.849	369,52
2023	359.254.822.015	405.898.247.650	-11,49

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.143 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	(4 = (2-3)/2*100)
2019	1.187.236.900.000	3.144.242.900.000	-62,24
2020	252.945.100.000	1.187.236.900.000	-78,69
2021	395.275.400.000	252.945.100.000	56,27
2022	1.313.346.200.000	395.275.400.000	232,26
2023	2.011.094.300.000	1.313.346.200.000	53,13

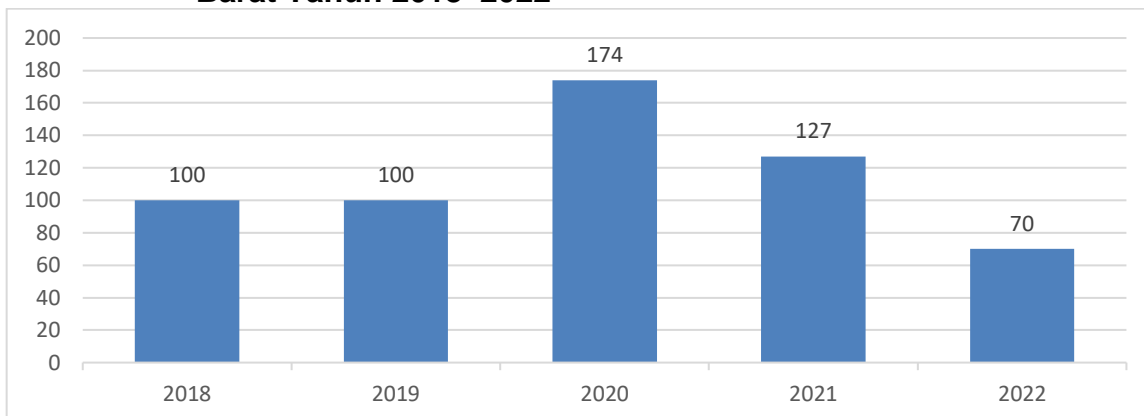
Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2024

### 2.1.4.3.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

#### a. Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2018 sebesar 64 Organisasi Kepemudaan meningkat menjadi 100 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 meningkat menjadi 127. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

**Grafik 2.56 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.144 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

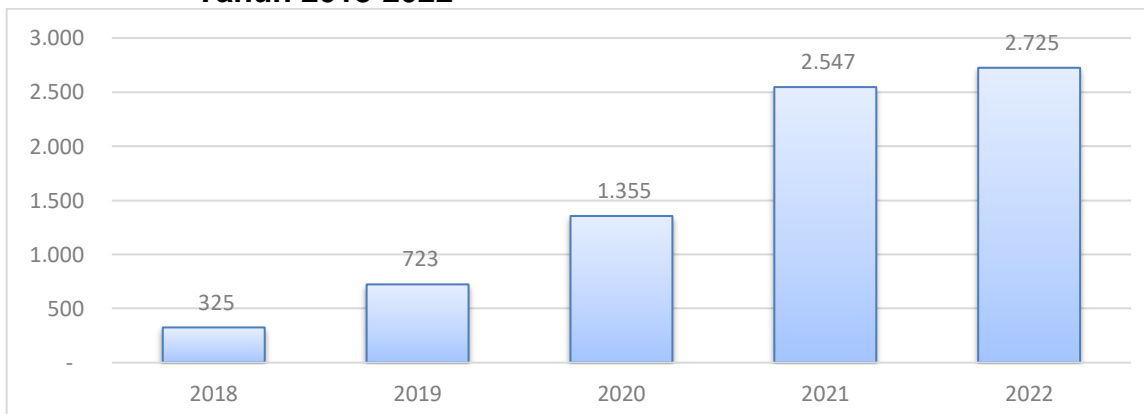
No.	Kabupaten	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)
1	Mamuju	21	0	21	100.00
2	Majene	21	110	131	16.03
3	Polewali Mandar	328	122	450	72.89
4	Mamasa	29	66	95	30.53
5	Pasangkayu	25	38	63	39.68
6	Mamuju Tengah	77	0	77	100.00
<b>Sulawesi Barat</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

## b. Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Wirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 325 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 2.725. Untuk meningkatkan kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.

**Grafik 2.57 Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

### c. Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga Pada tabel di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina sejak Tahun 2019-2023 sebanyak 3 Cabang Olahraga dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar sebanyak 34 Cabang Olahraga di Tahun 2023. Terdapat peningkatan cabang olahraga yang terdaftar hal ini dikarenakan bertambahnya cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Sulawesi Barat sedangkan jumlah cabang yang dibina tidak mengalami penambahan karena adanya kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 2.145 Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Persentase (%)
2019	3	33	9,09
2020	3	33	9,09
2021	4	33	12,12
2022	3	33	9,09
2023	3	34	8,82

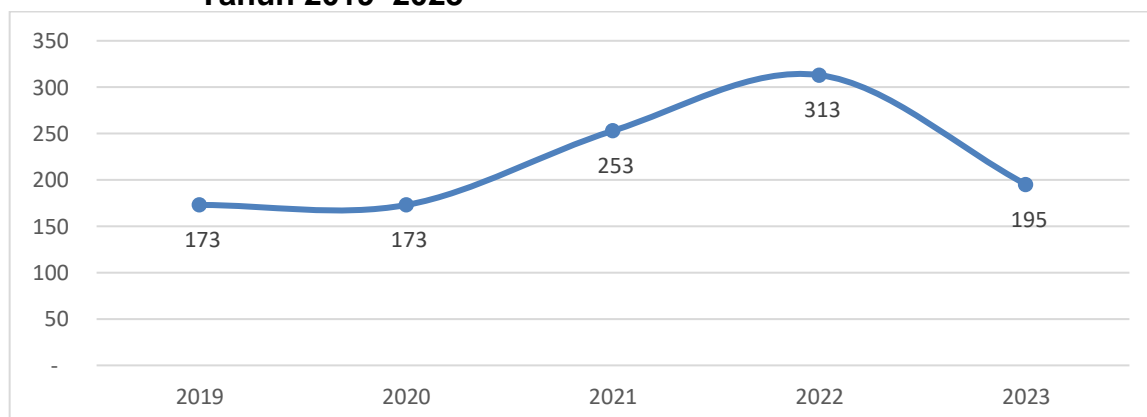
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.

### d. Pelatih Bersertifikasi

Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pelatih bersertifikasi tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2019 hingga 2020 kemudian meningkat di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, di tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 195 pelatih bersertifikat.

**Grafik 2.58 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

**e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat**

Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 18 atlet. Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012-2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak; dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada bidang keolahragaan masih sangat minim.

Pembinaan atlet pelajar tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2015-2020, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah atlet hal ini dikarenakan jumlah kuota atlit pelajar merupakan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga kegiatan ini bersifat rutin dengan sumber dana dekonsentrasi. Atlit yang menjadi binaan merupakan kategori usia pelajar berdasarkan hasil seleksi setiap tahun sesuai dengan jadwal tahun ajaran sesuai kebutuhan jumlah atlet yang telah lulus pada jenjang SMA dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2022 terdapat pengurangan Atlit cabang olahraga Takraw sebanyak 12 Atlit, sehingga hanya tersisa 18 Atlit dengan 3 Cabang Olahraga.

**Tabel 2.146 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina (Orang)
2019	38
2020	38
2021	30
2022	18
2023	18

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024

**f. Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga**

Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tertinggi pada Tahun 2019 yaitu Tingkat Nasional sebanyak 13 Orang dan tahun 2017 ditingkat Internasional sebanyak 2 Orang. Sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan terbanyak pada Tahun 2019 yaitu 2 medali. Sementara atlet yang memenangi kejuaraan dan prestasi selama Tahun 2023 sebanyak 5 medali.

**Tabel 2.147 Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah Atlet Yang Memenangi Kejuaraan			Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah
2019	13	-	13	2	-	2
2020	0	-	0	0	0	0
2021	2	0	2	2	0	2
2022	39	0	39	3	0	3
2023	20	0	20	5	0	5

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.148 Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2023**

Kabupaten	Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara				Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Mamuju	0	2	1	1	0	0	0	0
Majene	0	0	0	0	0	0	0	0
Polewali Mandar	1	0	0	1	0	0	0	0
Mamasa	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	0	1	0	0	0	0	0	0
Mamuju Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Jumlah Pemuda Pelopor yang dapat Mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam berbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumber daya lokal Pemilihan pemuda pelopor mencakup 5 (lima) bidang kepeloporan pemuda yaitu: Pendidikan; (2) Agama, Sosial, dan Budaya; (3) Pengelolaan Sumber daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata; (4) Pangan dan (5) Inovasi Teknologi dan mengacu pada Undang- Undang No. 40 Tahun 2009 dengan rentan usia 16 - 30 tahun.

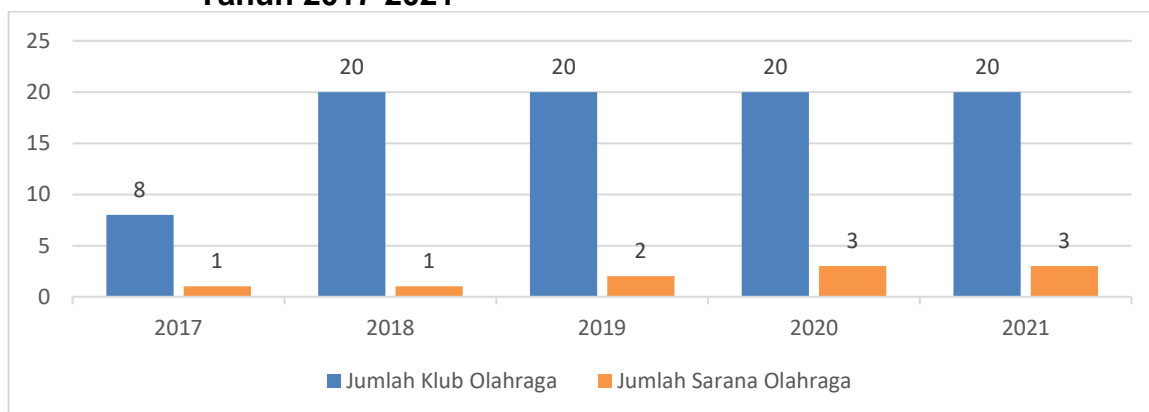
**Tabel 2.149 Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Tahun	Pemuda Pelopor di Bidang							Jumlah
	Pendidikan	Agama	Sosial dan Budaya	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Lingkungan dan Pariwisata	Pangan	Teknologi Tepat Guna	
2019	3	0	4	1	0	0	0	8
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	0	0	0	0	0	0	1
2022	1	0	0	0	0	0	0	1
2023	1	0	1	0	1	1	0	4

*Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2024*

g. Sarana dan Prasarana Olahraga

Grafik 2.59 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulawesi Barat yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu kano) dan olahraga takraw.

#### 2.1.4.3.20 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang reliable, up to date, dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengembangkan program Satu Data Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral perangkat daerah dalam aplikasi SAPOTA yang merupakan System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi Sapota ini akan diluncurkan di awal Tahun 2022.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Capaian kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku data sektoral Provinsi Sulawesi Barat.

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di provinsi Sulawesi Barat serta buku PDRB yang dituangkan dalam buku seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2.150 Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2019–2023**

No	Kabupaten	Buku Daerah Dalam Angka (Ada/Tidak)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.151 Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2019–2023**

No	Kabupaten	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ada/Tidak)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.152 Jumlah Tabel Data Statistik Sektorial Yang Dipublikasikan Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2022**

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data			
		2019	2020	2021	2022
1	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0	1	1	1
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah	0	1	2	2
3	Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	5	7	4
4	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	0	2	3	4
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	1
6	Biro Umum Sekretariat Daerah	0	1	1	3
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2	4	4
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	9	9	11
9	Badan Kepegawaian Daerah	1	7	7	7
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	3	3	3
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	3	4	4
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	3	4	11
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	2	1	3
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	20	18
15	Dinas Kesehatan	3	25	18	19
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	5	10	11
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	3	6	6
18	Dinas Sosial	4	3	9	9
19	Dinas Tenaga Kerja	2	3	12	13
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	7	6	13
21	Dinas Ketahanan Pangan	0	3	3	10
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	9	12	12
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	33	36	36

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data			
		2019	2020	2021	2022
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	6	7	9
25	Dinas Perhubungan	1	4	4	6
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	14	10	13
27	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	3	11	12	12
28	Dinas Perkebunan	0	3	16	5
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0	3	4	9
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	5	8	9
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	7	6
32	Dinas Pariwisata	3	3	6	6
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3	15	12	14
34	Dinas Kehutanan	1	6	6	6
35	Dinas Energi Sumberdaya Mineral	2	6	6	6
36	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	0	3	3	5
37	Dinas Transmigrasi	0	3	0	3
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	1	2	7
39	Inspektorat	0	5	6	10
40	Rumah Sakit Umum Daerah	0	6	6	6
41	Sekretariat DPRD	2	5	6	7
42	Badan Penghubung	0	0	0	3
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>	<b>231</b>	<b>299</b>	<b>347</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 2.153 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Jumlah Seluruh OPD	Jumlah OPD Yang Memiliki Data Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2019	41	16	39.02	39.02
2020	41	40	97.56	97.56
2021	41	39	95.12	95.12

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2022

#### 2.1.4.3.21 Urusan Persandian

Sesuai dengan UU 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

#### 2.1.4.3.22 Urusan Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi

pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59 persen), Toraja (13,95 persen), Bugis (10,79 persen), Jawa (5,38 persen), Suku Mandar (49,15 persen), dan suku lainnya (19,15 persen).

Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya termuat dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

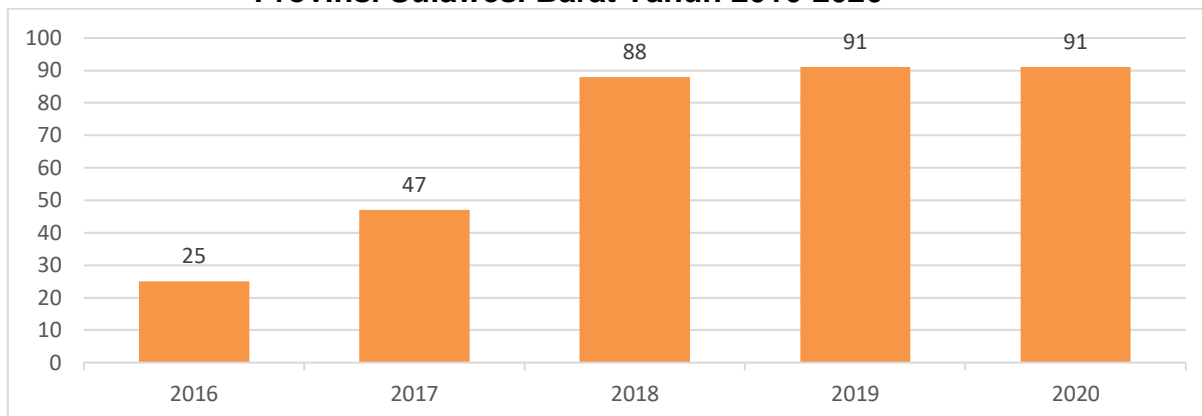
**Tabel 2.154 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018**

Keterangan	Tahun	
	2017	2018
Jumlah grup kesenian (Grup)	176	185
Jumlah Gedung (Buah)	3	3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	11
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.	10	34
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	75

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019*

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 25 hingga pada tahun 2020 sebesar 91. Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

**Grafik 2.60 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.155 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat**

TAHUN	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
2011		SANDEQ KATINTING	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	Ditetapkan
2013	201300046	SAIYYANG PATTU'DU	Seni Pertunjukan	Ditetapkan
2014	201400156	PASSAYANG-SAYANG	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Ditetapkan
2014	201400157	SANDEQ	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	Ditetapkan
2015	201500278	LOKA SATTAI /LOKA RO'DO /LOKA ANJOROI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2015	201500279	KAIN TENUN SUKOMANDI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600413	MANGARO	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600414	PERKAWINAN ADAT MANDAR	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600417	MASOSSOR MANURUNG /MANOSSOR MANURUNG	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600415	KEKE/ PAKEKE	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan

TAHUN	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
2016	201600416	CALONG	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2017	201700568	LIPA SAQBE MANDAR	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2018	201800794	MAPPATAMMAQ AL-QURAN	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800795	MAULIDAN SALABOSE	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800796	PUPU	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2022*

### 2.1.4.3.23 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat, namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan.

**Tabel 2.156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

No.	Kabupaten	Jumlah kunjungan	Jumlah rata-rata pengunjung	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
1	Majene	NA	NA	NA
2	Polewali Mandar	1.471	122,60	486,339
3	Mamasa	2.200	9,00	163.985
4	Mamuju	3.413	285,00	281.478
5	Pasangkayu	72	6,00	192.004
6	Mamuju Tengah	616	51,40	138.372
<b>Sulawesi Barat</b>		<b>709</b>	<b>59,08</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>8.481</b>	<b>553,08</b>	<b>1.262.178</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Jumlah kunjungan paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Mamuju yang mencapai 3.413 orang pada tahun 2021, namun jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2020 yang mencapai 3.578

orang, sedangkan di Kabupaten Majene tidak memiliki pengunjung perpustakaan selama tahun 2021.

**Tabel 2.157 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021**

Kabupaten	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah			Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Majene	-	-	-	-	-	-
Polewali Mandar	8,057	8,408	8,535	22,841	23,571	23,871
Mamasa	388	388	388	7.177	7.177	7.177
Mamuju	783	783	6,563	1,979	1,979	16,463
Pasangkayu	564	0	1,886	4,517	0	13,694
Mamuju Tengah	1,685	5	NA	2,555	253	NA
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>4</b>	<b>503</b>	<b>13</b>	<b>3,475</b>	<b>3,300</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah</b>	<b>11,481</b>	<b>10,087</b>	<b>17,385</b>	<b>42,544</b>	<b>36,280</b>	<b>61,219</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah se-Sulawesi Barat pada tahun 2021 mencapai 17.385 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak 61.219 buku, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data tahun sebelumnya.

Jumlah judul buku paling banyak ketersediaannya di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 8.535 judul buku pada tahun 2021, sedangkan di Kabupaten Mamasa menjadi jumlah judul buku paling sedikit yakni 388 judul buku, sedangkan jumlah koleksi buku yang tersedia paling banyak di Kabupaten Mamasa yang mencapai 7.177 buku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan buku di tahun 2021 untuk tiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah sampai saat ini belum melaporkan data jumlah koleksi buku dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2021.

**Tabel 2.158 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021**

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio (x1000)
1	2018	2.805	1.355.554	2,07
2	2019	2.826	1.380.256	2,05
3	2020	1.807	1.419.229	1,27
4	2021	1.807	1.442.225	1,25

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022 dan BPS (diolah)*

Jumlah perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 mencapai 1.807 unit, sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.442.225 orang. Dengan demikian, menunjukkan rasio perpustakaan persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1,25.

**Tabel 2.159 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020**

Kabupaten	Pustakawan		Tenaga Teknis		Penilai	
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
Mamuju	1	-	37	-	-	-
Majene	-	-	235	-	-	-
Polewali Mandar	2	-	30	-	-	-
Mamasa	3	12	-	5	-	5
Pasangkayu	-	-	148	-	-	-
Mamuju Tengah	-	-	37	-	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>487</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**Lanjutan tabel di atas**

Kabupaten	Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai			Persentase Bersertifikat (%)
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah	
Mamuju	38	-	38	100
Majene	235	-	235	100
Polewali Mandar	32	-	32	100
Mamasa	3	22	25	12
Pasangkayu	148	0	148	100
Mamuju Tengah	37	0	37	100
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>31</b>	<b>525</b>	<b>94</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Berdasarkan data di atas, hanya Kabupaten Mamasa yang tingkat persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat baru mencapai 12 persen. Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Mamasa sudah memiliki tenaga pustakawan yang bersertifikat sedangkan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah hanya memiliki tenaga teknis bersertifikat. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa memiliki jumlah pustakawan bersertifikat terbanyak yaitu 3 Pustakawan dan kabupaten Majene memiliki tenaga teknis bersertifikat terbanyak yaitu 235 di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki tim penilai yang bersertifikat.

#### **2.1.4.3.24 Urusan Kearsipan**

Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah

sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien.

a. Tenaga Kearsipan

Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal, tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim dan sangat terbatas, di mana dari seluruh kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil seperti yang dapat dilihat pada tabel Tabel Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat di atas.

b. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

**Tabel 2.160 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021**

Lembaga Kearsipan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kebutuhan	Tingkat Ketersediaan
LKD Provinsi Sulawesi Barat	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju	0	1	0
LKD Kabupaten Majene	0	1	0
LKD Kabupaten Polewali Mandar	0	1	0
LKD Kabupaten Mamasa	0	1	0
LKD Kabupaten Pasangkayu	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju Tengah	0	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan ketersediaan *record center*, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, *record center* hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

**Tabel 2.161 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

Tahun	Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah PD	Persentase (%)	Keterangan
2018	1	41	2,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2019	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah
2020	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah
2021	4	42	9,52	Biro Umum, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah
2022	2	42	4,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023*

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 OPD pada tahun 2021 yaitu Biro Umum, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan daerah. Tetapi diantara 4 OPD ini ada beberapa yang menerapkan arsip baku dan berdasarkan TND. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan 3 OPD lainnya walaupun

belum begitu sesuai dengan standar peneglolaan arsip tetapi sudah bisa dikategorikan ke dalam pengelolaan arsip secara baku.

**Tabel 2.162 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021**

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
1	2018	1
2	2019	2
3	2020	0
4	2021	1

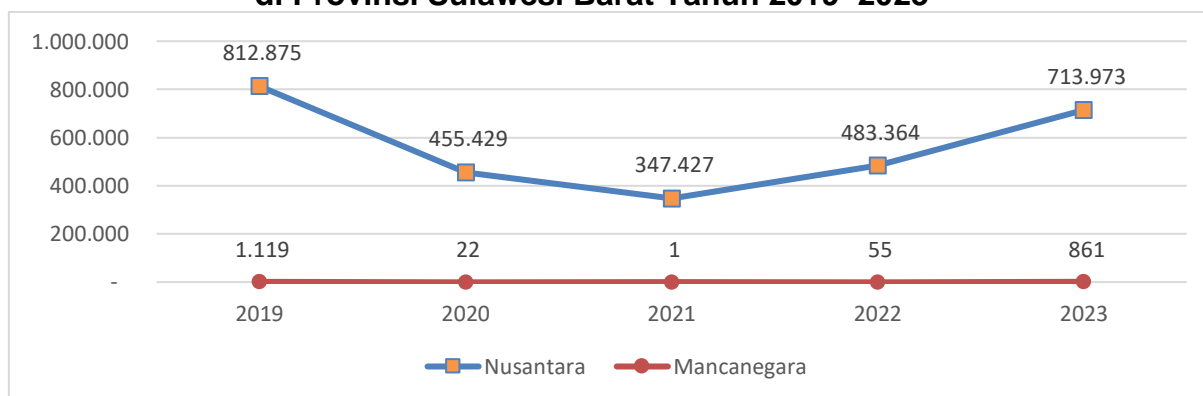
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 belum dilaksanakan dikarenakan anggaran pelaksanaan kegiatan dikenakan refocusing akibat pandemi. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sudah dilaksanakan satu kali kegiatan dan tahun 2019 dilaksanakan dua kali kegiatan, sementara di tahun 2021 dilaksanakan hanya sekali.

#### 2.1.4.3.25 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.

**Grafik 2.61 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

Terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 data memperlihatkan mengalami penurunan seiring menurunnya juga jumlah pergerakan orang di tahun 2020. Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebesar 812.875 pergerakan meskipun turun di tahun 2021 menjadi 347.427 pergerakan kemudian naik kembali di tahun 2023 menjadi 713.973. Turunnya jumlah pergerakan wisatawan

nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 disebabkan diterapkannya pembatasan pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena pandemi yang terjadi di seluruh wilayah.

**Tabel 2.163 Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

Tahun	Jumlah Hotel	Tingkat Penghuni Kamar	
		Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2019	152	46,76	17,78
2020	170	22,78	13,19
2021	143	27,77	16,86
2022	154	29,34	21,79
2023	157	37,58	19,41

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada tahun 2018, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 154 unit hingga pada tahun 2022. Hal itu menjadi indikator bahwa pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kondisi yang tidak menentu.

**Tabel 2.164 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2019–2023**

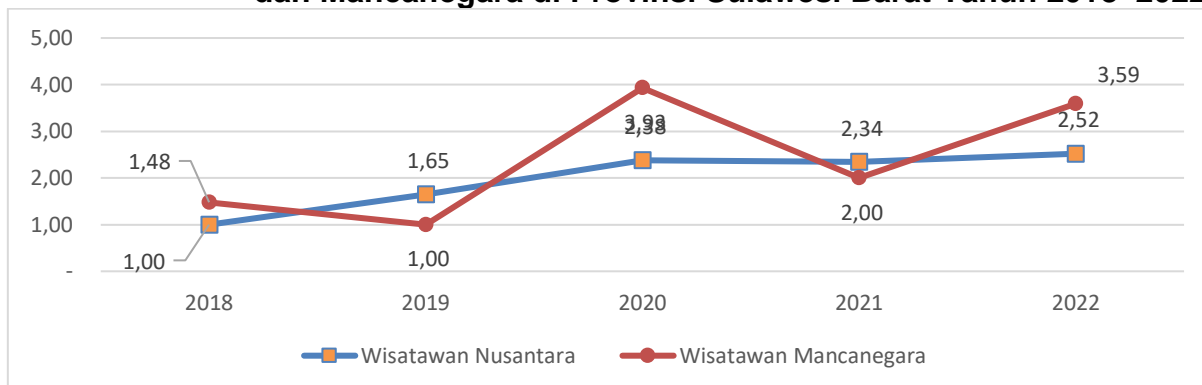
Kabupaten	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	47	96	96	96	96
Polewali Mandar	64	64	67	65	102
Mamasa	35	88	114	114	120
Mamuju	62	340	319	352	379
Pasangkayu	33	80	81	81	81
Mamuju Tengah	35	47	63	64	96
<b>Sulawesi Barat/Total</b>	<b>276</b>	<b>715</b>	<b>740</b>	<b>772</b>	<b>874</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan nusantara dan mancanegara.

Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya *event Sandeq Race* dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 tahun belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamuju.

**Grafik 2.62 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing maupun nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 723 orang pada tahun 2017 meningkat sebesar 1.119 kunjungan pada tahun 2019 dengan rata-rata lama menginap hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik. Adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi, belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi stakeholders, belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan, Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal; dan masih kurangnya investasi sektor pariwisata.

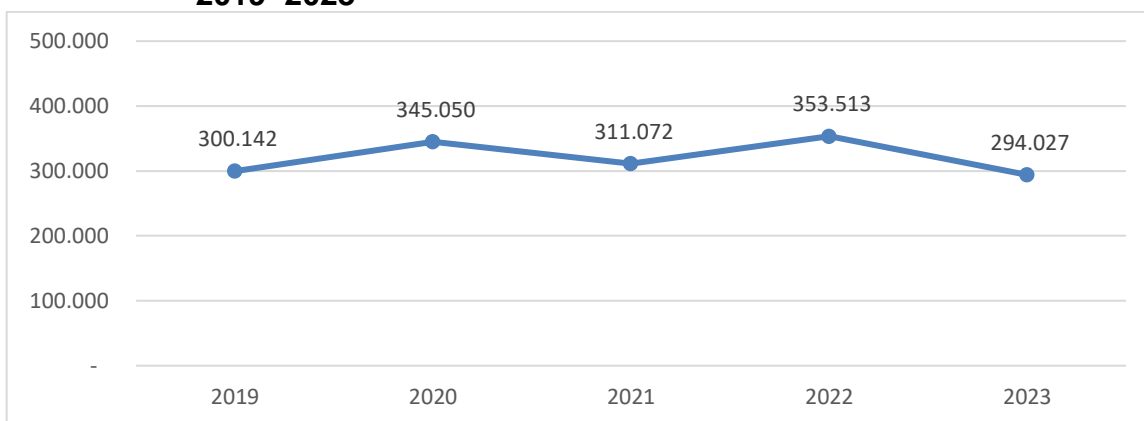
#### 2.1.4.3.26 Urusan Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2019, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 337,77 ribu orang atau sekitar 50,19 persen penduduk angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ke depannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

**a. Tanaman Pangan**

Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus menurun. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan akan tetapi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 16,83 persen di tahun 2022 ke tahun 2023 seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

**Grafik 2.63 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

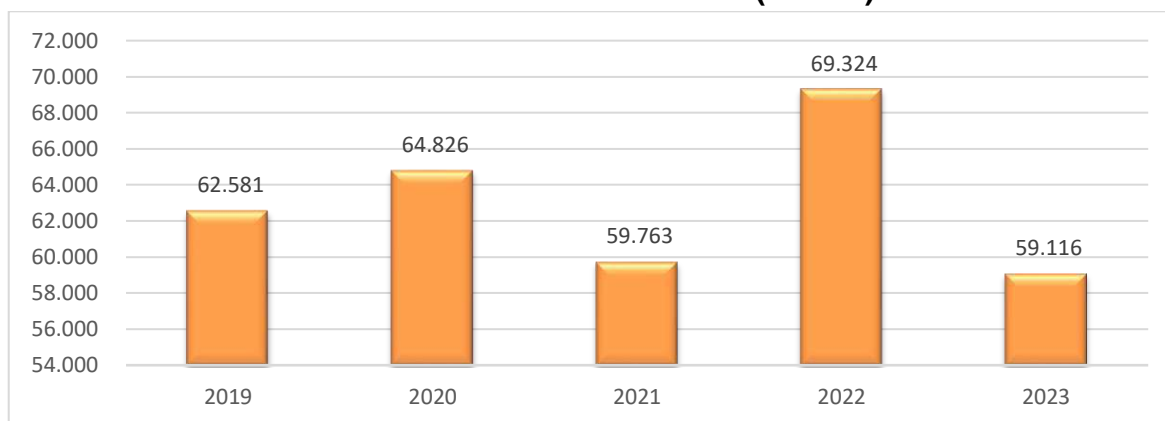
**Tabel 2.165 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

Komoditas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Padi</b>					
Luas Panen (ha)	67.835,00	64.826,18	59.763,18	70.847,00	58.796,37
Produksi (ton)	326.169,00	345.050,37	311.072,46	362.386,00	294.026,68
Produktivitas (ku/ha)	42,86	53,23	52,05	51,03	50,01
<b>2. Jagung</b>					
Luas Panen (ha)	136.166,00	94.396,90	44.912,80	59.832,50	37.234,72
Produksi (ton)	624.811,37	461.254,11	218.156,22	283.021,00	189.871,46
Produktivitas (ku/ha)	45,89	48,86	48,57	51,78	50,99
<b>3. Ubi Kayu</b>					
Luas Panen (ha)	816,00	1.121,00	1.049,20	1.802,00	798,55
Produksi (ton)	25.416,03	32.885,62	23.890,53	40.523,18	15.707,73
Produktivitas (ku/ha)	311,47	293,36	227,70	224,88	196,70
<b>4. Ubi Jalar</b>					
Luas Panen (ha)	405,40	394,70	354,70	463,00	401,52
Produksi (ton)	6.179,71	7.148,36	5.312,01	4.929,92	6.239,38
Produktivitas (ku/ha)	150,19	181,11	149,76	106,48	155,39
<b>5. Kacang Tanah</b>					
Luas Panen (ha)	251,40	201,50	248,00	274,00	257,21
Produksi (ton)	402,64	419,98	285,03	292,84	420,27
Produktivitas (ku/ha)	16,02	20,84	11,49	10,69	16,34
<b>6. Kedelai</b>					
Luas Panen (ha)	16.344,30	3.658,90	1.466,10	50,73	35,75

Komoditas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi (ton)	20.610,32	4.470,96	2.288,29	90,43	31,96
Produktivitas (ku/ha)	12,61	12,22	15,61	17,83	8,94
<b>7. Kacang Hijau</b>					
Luas Panen (ha)	255,50	465,70	410,00	364,00	323,38
Produksi (ton)	488,82	954,21	411,70	345,46	480,19
Produktivitas (ku/ha)	13,33	20,49	60,08	10,04	14,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Grafik 2.64 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2019–2023**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen padi di Sulawesi Barat selalu mengalami fluktuasi, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2020. Hal berbeda terjadi pada tahun 2022, di mana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, di mana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

#### **b. Peternakan**

Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 115.199 ekor, populasi kambing sekitar 197.162 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.994.718 ekor.

**Tabel 2.166 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2022**

Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Populasi (ekor)</b>					
Sapi Potong	95.287	96.639	113.380	115.199	119.207
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau	10.167	10.370	8.948	9.412	9.360
Kambing	193.944	194.772	196.680	197.162	200.998
Kuda	1.560	1.578	1.367	1.425	1.322
Babi	134.931	137.106	169.308	174.757	169.546
Ayam Ras	2.628.919	2.656.590	2.620.077	2.703.572	4.821.973
Ayam Kampung	4.575.252	4.856.281	4.986.648	4.994.718	4.674.344
Itik	390.025	396.484	361.543	391.201	231.648
<b>2. Produksi (kg)</b>					
Daging Sapi Potong	2.266.145	2.287.824	1.704.881	1.748.112	1.725.341
Daging Kerbau	150.604	205.834	201.942	205.875	233.899
Daging Kambing	212.741	167.780	160.453	158.859	151.800
Daging Kuda	-	-	-	-	450
Daging Babi	716.899	682.541	917.065	805.606	1.277.525
Daging Ayam Ras Pedaging	2.384.298	2.733.481	2.160.337	2.192.652	5.687.198
Daging Ayam Kampung	4.932.122	5.380.048	5.75.604	5.384.303	5.038.943
Daging Itik	245.671	249.742	227.539	246.191	146.608

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022 dan Sulbar Dalam Angka 2023

### c. Perkebunan

Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi dan Produktivitas berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.167 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Ton)**

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	7.517	-	238	5.128
Polewali Mandar	20.059	907	807	36.563
Mamasa	9	-	3.502	5.078
Mamuju	3.482	20.187	201	12.721
Pasangkayu	4.430	139.688	2	5.709
Mamuju Tengah	302	97.235	14	8.392
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>35.799</b>	<b>258.017</b>	<b>4.764</b>	<b>73.591</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

**Tabel 2.168 Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (ton/ha)**

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	2.123	-	1.247	816
Polewali Mandar	2.535	1.037	1.632	878
Mamasa	567	-	1.349	550
Mamuju	1.801	2.804	948	588
Pasangkayu	989	3.821	1.350	729
Mamuju Tengah	1.063	3.338	683	812
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>9.077</b>	<b>3.498</b>	<b>1.374</b>	<b>...</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Pada tahun 2023, produksi Kelapa Sawit Sulawesi Barat mencapai 258.017 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 139.688 ton dan 97.235 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari tahun sebelumnya, yang berakibat menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstabilkan harga.

Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao. Pada tahun 2023, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 73.591 ton. Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 36.563 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamujuyang sebesar 12.721 ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang cukup dan pengembangannya masih dapat dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.169 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 (Ha)**

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	8.812	-	1.010	12.694
Polewali Mandar	23.142	1.951	2.240	48.930
Mamasa	30	-	12.503	13.248
Mamuju	4.929	10.400	577	29.913
Pasangkayu	4.753	59.933	28	12.804
Mamuju Tengah	525	36.159	33	14.806
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>42.191</b>	<b>108.444</b>	<b>16.391</b>	<b>132.394</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

#### d. Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2019–2022, beberapa komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.170 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2020-2023**

Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
<b>Majene:</b>								
Bawang Merah	73	2.237	61	2.363	76	4.732	78	6.168
Cabai Besar	50	518	55	1.925	90	9.358	87	7.448
Cabai Keriting					38	2.905	47	4.764
Cabai Rawit	107	1.219	66	3.266	83	11.449	90	7.490

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	2	7	-	-	-	-	-	-
Tomat	71	521	58	961	93	4.464	50	2.415
Bawang Putih	151	7.410	-	-	-	-	-	-
Kangkung	42	244	57	565	42	495	35	472
Kacang Panjang	51	350	55	918	48	1.197	25	722
Bawang Daun	-	-	17	187	-	-	-	-
Bayam	64	312	67	575	58	676	28	319
Buncis	-	-	-	-	-	-	1	22
Ketimun					28	450	9	305
Labu Siam					-	-	-	-
Petsai	-	-	-	-	8	223	5	70
Terung					39	1.132	25	764
Wortel					-	-	-	-
<b>Polewali Mandar</b>								
Bawang Merah	97	3.130	163	1.654	134	600	52	257
Cabai Besar	150	2.138	142	1.819	103	1.176	96	1.240
Cabai Keriting					76	544	92	704
Cabai Rawit	97	1.557	80	1.087	93	813	135	1.207
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	76	1.273	82	1.127	75	926	93	1.123
Bawang Putih	3	55	-	-	-	-	-	-
Kangkung	97	1.540	100	675	123	732	95	546
Kacang Panjang	133	1.721	101	1.197	93	875	87	809
Bawang Daun	-	-	13	74	12	46	19	64
Bayam	52	744	43	327	69	482	53	324
Buncis	21	236	9	63	3	10	-	-
Ketimun					30	308	21	231
Labu Siam					11	192	24	237
Petsai	-	-	-	-	45	190	39	147
Terung					88	889	82	716
Wortel					-	-	-	-
<b>Mamasa</b>								
Bawang Merah	23	590	46	2.340	22	1.060	43	2.785
Cabai Besar	2	20	-	-	-	-	6	45
Cabai Keriting					3	16	-	-
Cabai Rawit	44	416	36	348	38	306	46	672
Kentang	24	2.580	12	1.013	7	700	3	300
Kubis	2	15	2	20	10	94	4	40
Tomat	52	824	55	711	34	431	16	586
Bawang Putih	39	1.392	11	360	11	480	2	80
Kangkung	75	1.167	72	1.121	48	703	29	413
Kacang Panjang	46	730	55	879	47	639	29	651
Bawang Daun	41	690	33	312	35	380	23	270
Bayam	70	423	95	609	58	331	39	232
Buncis	29	271	41	391	25	177	12	80
Ketimun					1	5	1	6
Labu Siam					-	-	6	205
Petsai	-	-	-	-	97	954	116	1.205
Terung					4	22	1	8
Wortel					10	88	3	22
<b>Mamuju</b>								

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Bawang Merah	42	84	213	471	350	720	315	913
Cabai Besar	701	2.689	3.925	13.219	4.230	14.650	4.516	19.751
Cabai Keriting					-	-	-	-
Cabai Rawit	745	2.780	3.975	20.203	4.320	14.650	4.506	18.710
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	971	1.838	4.620	7.301	4.630	9.960	4.752	17.331
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	1.018	2.863	4.825	14.239	4.845	15.180	4.768	16.888
Kacang Panjang	995	2.850	4.598	13.959	4.590	14.750	4.732	19.021
Bawang Daun	37	111	390	1.245	415	1.285	445	1.586
Bayam	1.070	1.934	4.860	10.568	4.865	8.965	4.890	16.690
Buncis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun					4.725	10.175	4.897	18.593
Labu Siam					465	1.490	400	1.570
Petsai	-	-	-	-	3.040	3.280	2.920	6.940
Terung					4.550	9.820	4.421	17.100
Wortel					-	-	-	-
<b>Pasangkayu</b>								
Bawang Merah	2	86	2	103	7	359	4	171
Cabai Besar	77	6.137	63	5.627	-	-	1	109
Cabai Keriting					59	5.647	37	4.978
Cabai Rawit	77	5.971	72	5.845	68	6.333	55	7.239
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	24	1.671	26	2.532	27	2.890	26	3.709
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	39	552	44	420	43	581	19	150
Kacang Panjang	59	4.122	46	4.450	46	5.148	34	4.386
Bawang Daun	2	9	2	69	2	94	2	87
Bayam	41	618	47	445	52	570	33	272
Buncis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun					8	941	8	552
Labu Siam					-	-	-	-
Petsai	-	-	-	-	-	-	4	53
Terung					28	3.519	19	2.903
Wortel					-	-	-	-
<b>Mamuju Tengah</b>								
Bawang Merah	7	184	-	-	1	10	-	-
Cabai Besar	39	1.315	61	2.032	-	-	-	-
Cabai Keriting					55	1.728	44	1.215
Cabai Rawit	58	2.044	76	2.401	53	1.408	62	1.724
Kentang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomat	40	1.468	57	2.140	34	996	29	925
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-
Kangkung	68	1.349	93	1.751	68	1.169	73	1.267
Kacang Panjang	62	2.157	60	2.694	51	1.302	62	1.610
Bawang Daun	27	273	53	569	23	232	25	274
Bayam	53	1.077	65	1.206	43	722	47	785
Buncis	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun					41	1.498	45	1.611
Labu Siam					-	-	-	-

Kabupaten	2020		2021		2022		2023	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Petsai	-	-	-	-	55	558	58	594
Terung					34	1.232	44	1.505
Wortel					-	-	-	-

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

#### 2.1.4.3.27 Urusan Kehutanan

Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Pada tahun 2022, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar 1.069.989 ha.

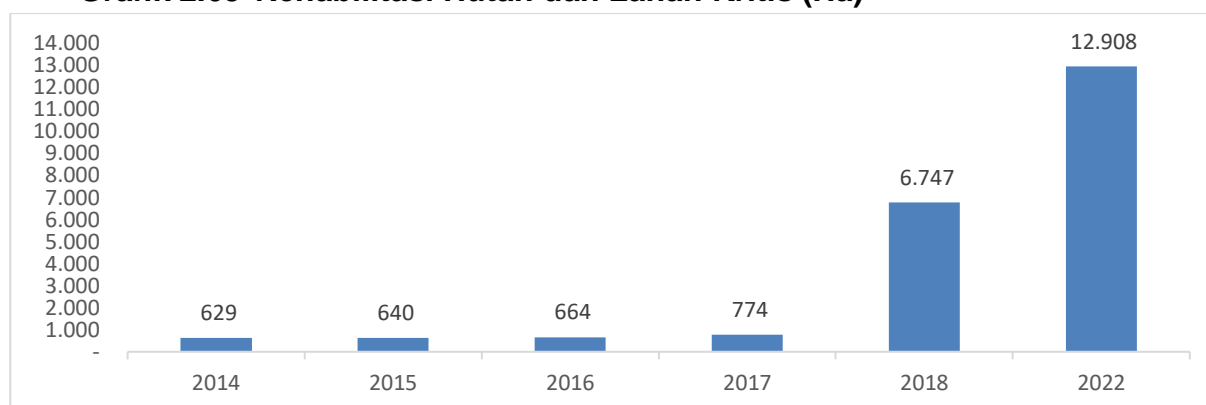
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 60 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan Suaka Alam, sementara sisanya merupakan kawasan hutan produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu kayu bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Tabel 2.171 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023**

Kabupaten	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Jumlah
Majene	44.405,18	0	7.590,28	6,33	0	52.001,79
Polewali Mandar	70.217,27	778,98	23.030,94	0	0	94.027,19
Mamasa	86.308,93	68.047,54	49.359,56	0	417,12	204.133,15
Mamuju	140.509,00	74.646,67	101.749,70	44.282,62	10.801,76	371.989,75
Pasangkayu	98.283,37	195,43	55.463,11	2.335,02	8.795,10	165.072,03
Mamuju Tengah	16.583,79	44.449,35	94.432,83	24.319,73	1.224,38	181.010,08
<b>2023</b>	<b>456.307,54</b>	<b>188.117,97</b>	<b>331.626,42</b>	<b>70.943,70</b>	<b>21.238,36</b>	<b>1.068.233,99</b>
2022	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2021	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2020	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2019	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2024

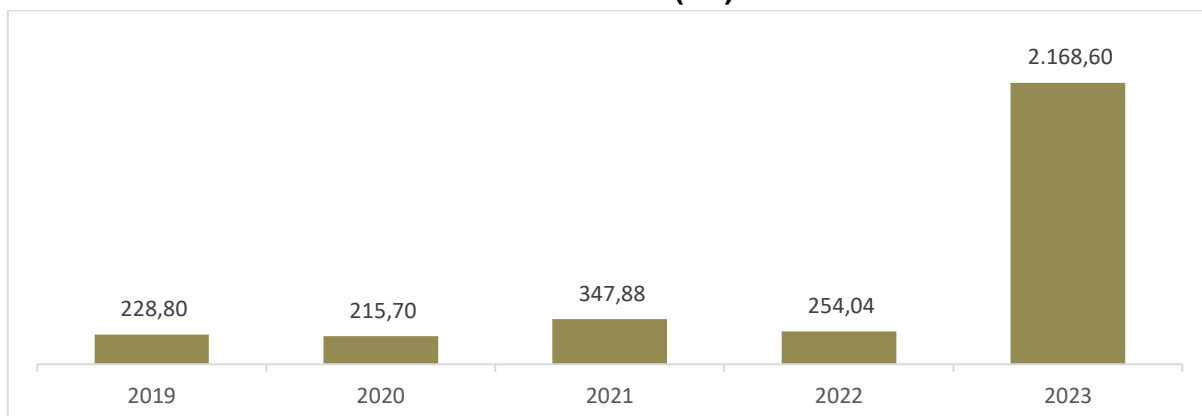
**Grafik 2.65 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)**



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 629 Ha meningkat menjadi 12.908 Ha pada tahun 2022.

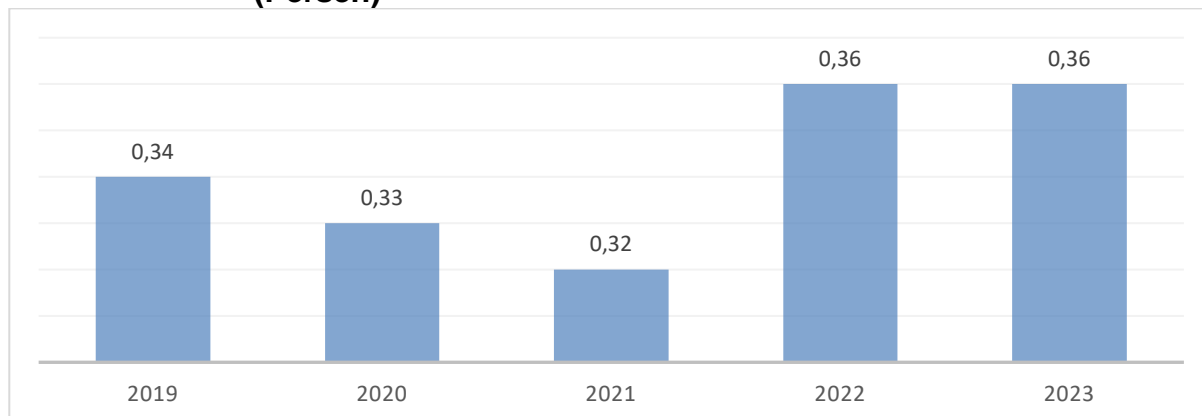
**Grafik 2.66 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Tahun 2019–2023**



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2019 sebanyak 228,80 Hektar naik menjadi 2.168,60 Hektar karena aktivitas *Illegal Logging* dan kebakaran hutan yang meningkat pada tahun 2023.

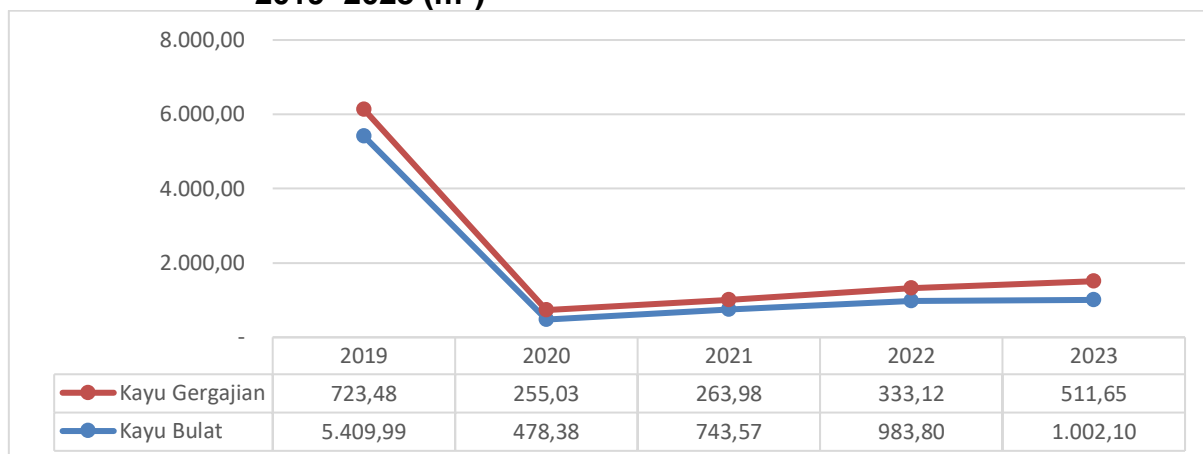
**Grafik 2.67 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2019–2023 (Persen)**



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari tahun 2019 sebesar 0,34 persen meningkat menjadi 0,36 persen pada tahun 2023.

**Grafik 2.68 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (m<sup>3</sup>)**



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

**Tabel 2.172 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat**

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
1	MAPILI	UNIT XI	KPH L	SK.799/MENHUT-II/2009	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor. 91 Tahun 2010	SK. 651/Menhut-II/2010	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2016	SKPD	77,196	Rotan, murbei, aren, damar	Wisata Bahari Palippis dan Labuang, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka, air terjun Kunyi, Air terjun Limbong, Agrowisata, calon Tahura Indorannuang
2	MAMASA TENGAH	Unit VIII	KPH L	SK.799/MENHUT-II/2009	Peraturan Bupati Mamasa Nomor. 8 Tahun 2010	SK. 340/Menhut-II/2011	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	37,962	Getah Pinus, Rotan, Bambu, Tanaman Seong, Aren, Alpukat, Markisa, Terong Belanda	Air Panas Belerang Kanan, Air Terjun Solokan, Air Terjun Mambulliling, Wisata Rohani Pena, Wisata Budaya Kuburan Tedong Tedong, Wisata Budaya Batu Kumila, Gua Kelelawar di Desa Pasapa Mambu
3	MAMASA BARAT	Unit VII	KPH P	SK.799/MENHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 341/Menhut-II/2011	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	53,555	Getah Pinus, Rotan, Bamboo, Nilam, Siong	Air Terjun Sambabo, Permandian Air Panas di Desa Uhelanu, Aliran Sungai Deras Untuk Arum Jeram
4	BONEHAU KALUMPANG	Unit XII	KPH L	SK.799/MENHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7e Tahun 2013	SK. 441/Menhut-II/2012	SK.6227/MENLHK - KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2019 10 Juli 2018	UPTD	81,624	Rotan, Damar, Madu, Getah, Nilam	Perdagangan Karbon, Wisata Air Terjun Di Hulu Sungai Kinatang, Wisata Alam Pendakian Di Desa Tabulahan, Wisata Religi Dan Wisata Budaya Pada Situs Budaya Tabulahan Di Kab. Mamasa, Situs Kamasi Di Kalumpang Dan Situs Palembang Di Kalumpang, Pemanfaatan Air Untuk Produksi Air Kemasan Di Desa Kinatang
5	MALUNDA	Unit X	KPH L	SK.799/MENHUT-II/2009	Peraturan Bupati Majene Nomor. 1 Tahun 2012	SK. 753/Menhut-II/2012		UPTD	52,071	Rotan, Gaharu, Lebah Madu	Permandian Air Panas Tallum Banua, Wisata Alam Arung Jeram Bambang, Wisata Alam Air Terjun Sambabo, Hutan Pendidikan Baruga Dua, Pengembangan Kegiatan Religi Tallum Banua

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
6	BUDONG - BUDONG	Unit V	KPH P	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 996/Menhut-II/2013	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/ 2015	UPTD	167,243	Rotan, Damar, Madu	Pemandangan Alam, Air Terjun, Sungai
7	LARIANG	Unit II	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 15 Tahun 2011	SK. 60/Menhut-II/2011	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	57,916	Rotan, Coklat, Sawit	
8	KAROSSA	UNIT IV	KPH P	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK.305/MENLHK .KPHP/PKPHP/H PL.0/2/2018	UPTD	63,110	rotan, getah getahan, buah buah, madu lebah	wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, perdagangan karbon
9	KARAMA	UNIT VI	KPH P	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	UPTD	156,918	rotan, damar, madu	pemandangan alam, air terjun, sungai
10	MAMASA TIMUR	UNIT IX	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11 /2016	SK. 4809/MENLHK-KPHL/PKPHL/D AS.3/2019	UPTD	51,086		
11	PASANG KAYU	UNIT I	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.730/MENLHK /SETJEN/PLA.0/ 12/2017	SK.10753/MENLHK.KPHL/PKHPL /DAS.3/122019	UPTD	25,662		
12	SARUDU	UNIT III	KPH L	SK.799/MENHU T-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ I/2019	SK. 3575/MENLHK - KPHL/PKPHL /DAS.3/4/2019	UPTD	68,384		

Tabel 2.173 Daftar Kelompok Tani Hutan Teregister Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

1) UPTD KPH MAMASA TENGAH

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	8
<b>KECAMATAN : SUMARORONG</b>						
1	SALUBALO	KADA SITURU'	2018	19 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-KS.001/2018
2	SALUBALO	BAKTI RIMBA	2018	21 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-BR.002/2018
3	SALUBALO	SIPAKASALLE	2018	17 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SPK.003/2018
4	SALUBALO	ANGGREK LENTERA	2018	23 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-AL.004/2018
5	SALUBALO	MESA PENAWA	2018	18 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-MP.005/2018
6	SALUBALO	MESAKADA SALUBULUNG	2018	20 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-MS.006/2018
7	SALUBALO	BINA LESTARI	2018	20 orang	Agroforestry dan Produksi Kopi Bubuk Kemasan	76/03/06/2008/KTH-BL.007/2018
8	SALUBALO	SULIO	2018	23 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah Trigona	76/03/06/2008/KTH-SL.008/2018
9	SALUBALO	KARTIKA JAYA SALUBULUNG	2018	20 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-KJS.009/2018
10	SALUBALO	SINAR BARU RANTELIVAK	2018	18 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SBR.010/2018
11	SALUBALO	SINAR KASIH	2018	17 orang	Agroforestry dan Sylvofisheri	76/03/06/2008/KTH-SK.011/2018
12	SALUBALO	WANATANI	2018	18 orang	Agroforestry dan Produksi Keripik Merk Keris	76/03/06/2008/KTH-WT.012/2018
13	SASAKAN	DADEKO	2019	21 orang	Agroforestry	76/03/06/2004/KTH-DD.013/2019
14	SASAKAN	BINA BERSAMA	2020	53 orang	Agroforestry, Budidaya Lebah dan Agrofisleri	76/03/06/2004/KTH-BB.014/2020
15	RANTEKAMASE	TUNAS BARU	2018	16 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-TB.015/2018
16	RANTEKAMASE	SATO' TALLANG	2018	17 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-ST.016/2018
17	RANTEKAMASE	TENDAN SITURU'	2018	15 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah Trigona	76/03/06/2010/KTH-TS.017/2018
18	RANTEKAMASE	RANTERANO	2018	27 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-RR.018/2018
19	RANTEKAMASE	TUNAS MUDA	2018	15 orang	Agroforestry	76/03/06/2010/KTH-TM.019/2018
20	RANTEKAMASE	SARASSA' HIJAU	2020	60 orang	Agroforestry dan Budidaya Lebah	76/03/06/2010/KTH-SH.020/2020
<b>KECAMATAN : MAMASA</b>						
21	OSANGO	GUNUNG LESTARI	2018	16 orang	Agroforestry dan Pembibitan Tanaman Produktif/Tanaman Kehutanan	76/03/03/2003/KTH-GL.001/2018

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	8
22	TAUPE	BATU MA'ILLONG	2022	40 orang	Budidaya Lebah Madu Trigona dan Kerajinan Tangan	76/03/03/2006/KTH-BM.002/2022
23	TAUPE	PERMAI	2020	22 orang	Agroforestry	76/03/03/2006/KTH-PM.003/2020
24	PEBASSIAN	SALUMAYANG	2013	30 orang	Agroforestry	76/03/03/2006/KTH-S.004/2020
25	PEBASSIAN	BATU MEBALI	2013	30 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/03/2006/KTH-BM.005/2020
<b>KECAMATAN : BALLA</b>						
26	BALLA TUMUKA	TOSARAPU BUNTU MUSSA	2021	35 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-TBM.001/2021
27	BALLA TUMUKA	BUNTU MUSSA	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-BM.002/2021
28	BALLA TUMUKA	BALLA PEU	2021	38 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-BP.003/2021
29	BALLA TUMUKA	SIKAMASE	2021	35 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-SM.004/2021
30	BALLA TUMUKA	PADAOKKO PADAKEDE	2021	34 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH-PP.005/2021
31	PIDARA	HARAPAN BARU	2016	25 orang	Kopi	76/03/12/2004/KTH-HB.006/2021
32	PIDARA	BAMBA SOLO	2011	30 orang	Kopi	76/03/12/2004/KTH-BS.007/2021
33	BALLA SATANETEEAN	KASARAPUAN	2013	23 orang	Getah pinus, Madu, Kopi, Jasling	76/03/12/2004/KTH-K.008/2021
<b>KECAMATAN : MESSAWA</b>						
34	PASMA MAMBU	PATANGLAOAN	2020	45 orang	Agroforestry dan Jasa Lingkungan	76.03.07/DPM/KTH-PL.001/2020
35	MALIMBONG	ORONG	2020	46 orang	Agroforestry dan Jasa Lingkungan	76/03/07/2005/KTH-OR.002/2020
36	SEPANG	SERUMPUN	2021	25 orang	Agroforestry	76/03/07/2004/KTH-SR.003/2021
37	SEPANG	BUTTU TALOBO	2022	30 orang	RHL	76/03/07/2004/KTH-BT.004/2022
38	SEPANG	KADA SITURU'	2022	45 orang	KBR	76/03/07/2004/KTH-KS.005/2022
39	SEPANG	BATU MEMBALI	2022	23 orang	KTA	76/03/07/2004/KTH-BM.006/2022
<b>KECAMATAN : TANDUKKALUA</b>						
40	MANNABABA	BINA TANI	2021	22 orang	KTA	76/03/09/2008/KTH-BT.001/2021
41	MANNABABA	CITRA ULUMEA	2021	21 orang	Agroforestry	76/03/09/2008/KTH-CU.002/2021
42	MANNABABA	TUNAS BARU	2021	19 orang	KTA	76/03/09/2008/KTH-TB.003/2021
43	MANABABA	BUNTU PARAWAN	2022	53 orang	RHL	76/03/09/2008/KTH-BP.004/2022
44	MESAKADA	RANTEKALUA	2019	37 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/09/2008/KTH-Rk.005/2022
45	MESAKADA	TORADA	2019	45 orang	Agroforestry, Kopi	76/03/09/2008/KTH-Tr.006/2022

2) UPTD KPH MAPILLI

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN BINUANG</b>						
46	Kaleok	Siparampe	2005	25	Agroforestry	76/04/06/2008/KTH-S.001/2005
47	Kaleok	Kayu Colo	2005	25	Agroforestry	76/04/06/2008/KTH-KC.002/2005
48	Amola	Batu Sambuah	2009	25	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-BS.003/2009
49	Amola	Mase mase	2006	21	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-MM.004/2006
50	Amola	Tondok Tanete	2012	22	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-TT.005/2012
51	Amola	Buttu Bandera	2019	27	Agroforestry	76/04/06/2009/KTH-BB.006/2019
52	Paku	Manyang Sallimbo	2014	20	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-MS.007/2014
53	Paku	Samalimbong	2000	26	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-S.008/2000
54	Paku	Kamiri II	2001	20	Agroforestry	76/04/06/2003/KTH-K.009/2001
55	Mirring	Trisetia	1998	26	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-T.010/1998
56	Mirring	Rano	2010	21	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-R.011/2010
57	Mirring	Buttu Puang	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2004/KTH-BP.012/2012
58	Amassangan	Buttu Te'neng	2015	25	Mangrove	76/04/06/1005/KTH-BT.013/2015
59	Amassangan	Batu tandakan	2015	18	Agroforestry	76/04/06/1005/KTH-BT.014/2015
60	Amassangan	Sehati	2009	15	Agroforestry	76/04/06/1005/KTH-S.015/2009
61	Batetangnga	Samaturu	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.016/2012
62	Batetangnga	Siajo	2012	25	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.017/2012
63	Batetangnga	Salu sitammu	2012	20	Agroforestry	76/04/06/2006/KTH-S.018/2012
64	Rea	Pantai Hijau	2018	17	Mangrove	76/04/06/2010/KTH-PH.019/2018
65	Kuajang	Kuajang	2001	25	Agroforestry	76/04/06/2002/KTH-K.020/2001
66	Tonyaman	Siamasei	2017	20	Agroforestry	76/04/06/2001/KTH-S.021/2017
67	Mammi	Lestari	2019	25	Agroforestry	76/04/06/2007/KTH-L.022/2019
68	Mammi	Batu Milan	2009	10	Agroforestry	76/04/06/2007/KTH-BM.023/2009
<b>KECAMATAN ANREAPI</b>						
69	Kunyi	Pangngulu Gigi	2015	42	Agroforestry	76/04/13/2005/KTH-PG.001/2015
70	Kunyi	Tappang Indah	2009	27	Agroforestry	76/04/13/2005/KTH-TI.002/2009
<b>KECAMATAN MATAKALI</b>						
71	Barumbung	Salinduk	1995	30	Agroforestry	76/04/14/2003/KTH-S.001/1995
72	Indo Makkombong	Mesakada	2011	30	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-M.002/2011
73	Indo Makkombong	Tammalate	2009	25	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-T.003/2009
74	Indo Makkombong	Bukit Hijau Tada 2	2005	30	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-BHT.004/2005
75	Indo Makkombong	Semangat Baru	2019	47	Agroforestry	76/04/14/2006/KTH-SB.005/2019

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
76	Pasiang	Kayuangin	2009	22	Agroforestry	76/04/14/2004/KTH-KA.006/2009
77	Pasiang	Messa Gau	2009	27	Agroforestry	76/04/14/2004/KTH-MG.007/2009
<b>KECAMATAN TAPANGO</b>						
78	Tuttula	Siammasei	2004	25	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-S.001/2004
79	Tuttula	Mala Pao	2014	15	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-MP.002/2014
80	Tuttula	Embun Pagi	2015	18	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-EP.003/2015
81	Tuttula	Bina Bersama	2014	15	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-BB.004/2014
82	Tuttula	Cinna Situru	2014	25	Agroforestry	76/04/07/2011/KTH-CS.005/2014
83	Kurrak	Suka Maju	2010	26	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-SM.006/2010
84	Kurrak	Batu Sangbua Bersatu	2012	24	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-BSB.007/2012
85	Kurrak	Malik Siparappe	2011	19	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-MS.008/2011
86	Kurrak	Hutan Lestari	2011	25	Agroforestry	76/04/07/2009/KTH-HL.009/2011
87	Kalimbua'	Limbong Miala	2007	21	Agroforestry	76/04/07/2013/KTH-LM.010/2007
88	Kalimbua'	Tunas Muda	2015	16	Agroforestry	76/04/07/2013/KTH-TM.011/2015
89	Bussu	Batu Sitodong	2015	18	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-BS.012/2015
90	Bussu	Sejahtera	2015	26	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-S.013/2015
91	Bussu	Tabulahang	2015	19	Agroforestry	76/04/07/2010/KTH-T.014/2015
92	Tapango Barat	Sejati	2015	26	Agroforestry	76/04/07/2008/KTH-S.015/2015
93	Jambu Malea	Bukit Indah	2007	23	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-BI.016/2007
94	Jambu Malea	Tamangingi	2007	30	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-T.017/2007
95	Jambu Malea	Cahaya Berkah	2016	30	Agroforestry	76/04/07/2012/KTH-CB.018/2016
96	Palatta	Samaturu	2009	19	Agroforestry	76/04/07/2007/KTH-S.019/2009
97	Riso	Tondo Pata	2015	23	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-TP.020/2015
98	Riso	Sarambu Indah	2015	30	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-SI.021/2015
99	Riso	Bukit Harapan	2009	25	Agroforestry	76/04/07/2006/KTH-BH.022/2009
<b>KECAMATAN WONOMULYO</b>						
100	Nepo	Pantai Lestari	2018	27	Mangrove	76/04/03/2007/KTH-PL.001/2018
101	Galeso	Sipatuo			Mangrove, Sylvofishre	76/04/03/2014/KTH-TM.002/20
102	Galeso	Perempuan Kreatif	2019	15	Tepung Mangrove	76/04/03/2014/KTH-TM.003/20
103	Galeso	Sahabat Penyus	2016	15	Mangrove dan Penyus	76.04.03/DM/KTH-SP.004/2016
<b>KECAMATAN LUYO</b>						
104	Pussui	Tanreangin	1990	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-T.001/1990
105	Pussui	Mesa Ate	2008	27	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-MA.002/2008
106	Pussui	Batu Sisoppo	2008	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-BS.003/2008

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
107	Pussui	Bura Pammase	2013	25	Agroforestry	76/04/10/2005/KTH-BP.004/2013
108	Tenggelang	Siamasei	2005	25	Agroforestry	76/04/10/2002/KTH-S.005/2005
109	Tenggelang	Buttu Salili	2008	25	Agroforestry	76/04/10/2002/KTH-BS.006/2008
110	Sambali-bali	Bunga Manyang	2007	25	Agroforestry	76/04/10/2007/KTH-BM.007/2007
<b>KECAMATAN ALLU</b>						
111	Sayoang	Siarioi	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2007/KTH-S.001/2004
112	Sarangiang	Dakko Pute	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-DP.002/2004
113	Sarangiang	Pao Asso	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-PA.003/2004
114	Sarangiang	Sure'Tammalele	2011	23	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-S.004/2011
115	Sarangiang	Tunas Kelapa	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-TK.005/2008
116	Sarangiang	Bukit Emas	2019	21	Agroforestry	76/04/15/2006/KTH-BE.006/2019
117	Puppuuring	Tammedingin	1999	25	Agroforestry	76/04/15/2005/KTH-T.007/1999
118	Puppuuring	Sululoppo	2012	20	Agroforestry	76/04/15/2005/KTH-S.008/2012
119	Alu	Bocco Tallu	1993	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-BT.009/1993
120	Alu	Malilu Sipkainga	1996	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-MS.010/1996
121	Alu	Ratte Lanu	2014	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-RL.011/2014
122	Alu	Galung-Galung	1996	25	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-GG.012/1996
123	Alu	Buttu Kaiyyang	2014	19	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-BK.013/2014
124	Alu	Alu Hijau	2019	16	Agroforestry	76/04/15/2008/KTH-AH.014/2019
125	Alu	Sabar Menunggu				
126	Kalumammang	Mesa Akkatta	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-MA.016/2008
127	Kalumammang	Uwai Tumbur	2014	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-UT.017/2014
128	Kalumammang	Sipaingarang	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-S.018/2010
129	Kalumammang	Lambe Mamea	2015	34	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-LM.019/2015
130	Kalumammang	Tunas Baru	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-TB.020/2010
131	Kalumammang	Batu sambua	2017	35	Agroforestry	76/04/15/2003/KTH-BS.021/2017
132	Pao-Pao	Alalang Mannannungan	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-AM.022/2008
133	Pao-Pao	Lolong Gimbal	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-LG.023/2010
134	Pao-Pao	Mannanungan	2010	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-M.024/2010
135	Pao-Pao	Lembang Maissang	2004	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-PLM.025/2004
136	Pao-Pao	Pummeawan	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-PMW.026/2004
137	Pao-Pao	Buttu Combong	2008	20	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-BC.027/2004
138	Pao-Pao	Tibusan	2011	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-T.028/2004
139	Pao-Pao	Uai Matama	2013	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-UM.029/2004

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
140	Pao-Pao	Padada	2008	25	Agroforestry	76/04/15/2004/KTH-Pdd.030/2004
<b>KECAMATAN LIMBORO</b>						
141	Renggeang	Batu Mengnganga	2014	20	Sutera Alam	76/04/11/2008/KTH-BM.001/2014
142	Renggeang	Renggeang Mandiri	2014	20	Sutera Alam	76/04/11/2008/KTH-RM.002/2014
143	Tandasura	Taerumakka	2003	17	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-T.003/2014
144	Tandasura	Daun Merandang	2008	24	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-DM.004/2014
145	Tandasura	Sinar Pukkopo	2010	25	Agroforestry	76/04/11/2003/KTH-SP.005/2014
146	Tangan Baru	Idola	2011	25	Agroforestry	76/04/11/2010/KTH-I.006/2014
147	Tangan Baru	Paraita	2015	21	Agroforestry	76/04/11/2010/KTH-P.007/2014
148	Salarri	Bukit Tandur	2008	20	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-BT.008/2014
149	Salarri	Bukit Gading	2016	20	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-BG.009/2014
150	Salarri	Mese Ate	1999	23	Agroforestry	76/04/11/2009/KTH-MA.010/2014
151	Napo	Samaturu	2005	23	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-S.011/2014
152	Napo	Suka Maju	2005	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-SM.012/2014
153	Napo	Siamasei	2005	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-S.013/2014
154	Napo	Bukit Todilaling	2001	25	Agroforestry	76/04/11/2005/KTH-BT.014/2014
155	Todang-todang	Wai Tirattis	2011	25	Agroforestry	76/04/11/2006/KTH-WT.015/2014
156	Todang-todang	Sale'ah	2017		Agroforestry	76/04/11/2006/KTH-S.016/2014
157	Pendulangan	Sisenga	2008	25	Agroforestry	76/04/11/2007/KTH-S.017/2014
<b>KECAMATAN TUTAR</b>						
158	Taloba	Tajang Pammase	2002	25	Agroforestry	76/04/05/2008/KTH-TP.001/2002
159	Taloba	Meriha Bersatu	2011	25	Agroforestry	76/04/05/2008/KTH-MB.002/2011
160	Arabua	Sisenga Sisalili	2009	25	Agroforestry	76/04/05/2010/KTH-SS.003/2018
<b>KECAMATAN CAMPALAGIAN</b>						
161	Laliko	Bukit Pasir Mangrove	2017	25	Konservasi dan Wisata	76/04/05/2002/KTH-BPM.001/2017

3) UPTD KPH MALUNDA

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN SENDANA</b>						
162	Binanga	Rimba Mangrove	2015	25	Konservasi dan Wisata Pendidikan MAn Grove	76/05/03/2016/KTH-RM.001/2015
163	Totolisi	Mangrove Lestari	2012	25	Konservasi dan Pembibitan	76/05/03/2004/KTH-ML.002/2012
164	Pundau	Pundo Sipatuo	2011	20	Agroforestry dan Peternakan	76/05/03/2020/KTH-PS.003/2011
165	Pundau	Batu Meana	2012	20	Agroforestry dan Peternakan	76/05/03/2020/KTH-BM.004/2012
<b>KECAMATAN TUBO</b>						
166	Tube Tengah	Mangrove Tosalama	2017	25	Konservasi	76.04.05/DTT/KTH-MT.001/2017
<b>KECAMATAN BANGGAE DAN BANGGAE TIMUR</b>						
167	Totoli	Lestari	2015	25	Agroforestry	76.05.01.1009/KTH-L.001/2015
168	Baurung	Kobar Lestari	2020	15	Penyu dan Mangrove	76.05.08.1001/DB/KTH-KL.002/2020

4) UPTD KPH KARAMA

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN KALUKKU</b>						
169	Guliling	Guliling Selatan	2011	25	Agroforestry	76/02/03/2010/KTH-GS.001/2011
170	Bebanga	Bunga Karang	2016	15	Konservasi dan Wisata Pendidikan Mangrove	76.02/01/111/KTH-BK.001/2016
171	Belang belang	Pasir Putih	2017	19	Konservasi dan Wisata	76/02/03/2006/KTH-PP.003/2017
172	Tadui	Ecotourism Green Tadui	2019	16	Konservasi dan Wisata Mangrove	76/02/01/2010/KTH-EGT.004/2019
173	Belang belang	Siaroi	2020	19	Agroforestry	76/02/01/2006/KTH-Sr.005/2020
174	Belang belang	Sipatuo	2020	27	Agroforestry	76/02/01/2006/KTH-St.006/2020
175	Bebanga	Lembbang Golla	2020	23	Agroforestry	76.02/01/111/KTH-LG.002/2020

5) UPTD KPH MAMASA TIMUR

No	xDesa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN : SESENAPADANG</b>						
176	Orobua	To'Mamesa	2020	34 orang	Agroforestry	76/03/08/2002/KTH-TM.001/2020
177	Malimbong	Barana	2021	17 orang	agroforestry	76/03/08/2013/KTH-BR.002/2021
178	Malimbong	Kasarapuan	2021	15 orang	Agroforestry	76/03/08/2013/KTH-KSP.003/2021
179	Orobua Timur	Pelita Timur	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/08/2004/KTH-PT.004/2021
180	Orobua Timur	Serumpun Salukanan	2021	28 orang	Agroforestry	76/03/08/2004/KTH-SP.005/2021
181	Malimbong	Suren	2021	20 orang	Agroforestry	76/03/08/2013/KTH-SR.006/2021
<b>KECAMATAN : SUMARORONG</b>						
182	Banea	Buttu Sareong	2021	29 orang	Agroforestry	76/03/06/2009/KTH-BS.001/2021
183	Banea	Tunas Muda	2021	23 orang	agroforestry	76/03/06/2009/KTH-TM.002/2021
<b>KECAMATAN : BALLA</b>						
184	Balla	Bukit Batu	2019	20 orang	Agroforestry, Tenun Tradisional, Kopi	76/03/12/2004/KTH.008/2021
185	Balla Satanetean	Tondon Saruran	2013	15 orang	Agroforestry	76/03/12/2004/KTH.008/2021

6) UPTD KPH MAMASA BARAT

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN : MAMBI</b>						
186	SALUBANUA	GAPOKTANHUT POANG BANUA	2021	125	Agroforestry	76/03/01/2016/KTH-BT.001/2021
187	RANTEBULAHAN	KTH TUNAS MUDA	2019	23	Agroforestry	76/03/01/2004/KTH-TM.001/2019
188	SALUMAKAK	RANTEKAMIRI	2019	19	Agroforestry	76/03/01/2025/KTH-R.002/2019
189	SALUMAKAK	KTH RUKUN DAMAI	2021	22 orang	Agroforestry dan Sylvopastory	76/03/01/2025/KTH-RD.003/2021
190	SALUDURIAN	KTH MEKAR INDAH	2021	20 orang	Agroforestry dan Sylvopastory	76/03/01/2030/KTH-MI.004/2021
<b>KECAMATAN : BAMBANG</b>						
191	SALUDENGEN	GAPOKTANHUT LESTARI ALAM SALUDENGEN	2020	28 orang	Agroforestry dan Sylvofishery	76/03/11/2012/KTH-MI.004/2020
192	SIKAMASE	KTH PAKLINDUAN	2020	30 orang	Agroforestry dan Sylposatory	76/03/11/2016/KTH-P.001/2020

193	SIKAMASE	RANTEKALUAK	2020	41 orang	Agroforestry dan Sylposatory	76/03/01/2030/KTH-R.002/2020
<b>KECAMATAN : MEHALAAN</b>						
194	MEHALAAN BARAT	KTH SADANDANGAN	2019	25 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/17/2005/KTH-S.001/2019
195	BOTTENG	MAWAR INDAH	2019	25 orang	Agroforestry & Kopi	76/03/17/2005/KTH-MI.002/2019
<b>KECAMATAN : RANTEBULAHAN TIMUR</b>						
196	SALUMOKANAN	KTH PENGUSAHA KOPI	2018	16 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/15/2001/KTH-PK.001/2018
197	SALUMOKANAN	KTH BANGABOSA	2020	15 orang	Agroforestry dan Kopi	76/03/15/2001/KTH-B.002/2020
198	SALUMOKANAN BARAT	SASAKE	2021	25 orang	Agroforestry	76/03/15/2003/KTH-S.003/2021
199	SALUMOKANAN	RIMBA HIJAU	2020	30 orang	Agroforestry	76/03/15/2001/KTH-RH.004/2020
200	SALUMOKANAN UTARA	RANTE LESTARI	2020	30 orang	Agroforestry	76/03/15/2008/KTH-RL.005/2020
<b>KECAMATAN : BUMAL</b>						
201	SALUTAMBUN BARAT	LOMBA	2020	23 orang	Agroforestry	76/03/16/2007/KTH-L.001/2020
<b>KECAMATAN : TABULAHAN</b>						
202	LAKAHANG	TANETE KAMANDE	2020		Agroforestry & SILVOPASTURE	76/03/05/1001/KTH-TK.001/2020
203	LAKAHANG	LANGSANG	2020	23 orang	Agroforestry & SILVOPASTURE	76/03/05/1001/KTH-L.002/2020

### 7) UPTD KPH BUDONG-BUDONG

No	Desa	Nama KTH	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Jenis kegiatan/ komoditi utama	Nomor register kelompok
1	2	3	4	5	6	10
<b>KECAMATAN : TOBADAK</b>						
204	Tobadak 6	Sumber Rejeki			HHBK Nilam	76/06/01/2003/KTH-SR.001/
205	Tobada 4	Alam Subur			HHBK Nilam	76/06/01/2003/KTH-AS.002/
<b>KECAMATAN : TOPOYO</b>						
206	Tabolang	Magbul Camb	2017	25 orang	HHBK Lebah Madu	76/06/04/2007/KTH.001/2017
207	Salupangka	Passari	2017	25 orang	HHBK Aren	76/06/04/2009/KTH.002/2017
208	Bamba Manurung	Sipalamban	2017	25 orang	Sengon	76/06/04/2012/KTH.003/2017
209	Salu Le'bok	Sipamse	2017	25 orang	Agroforestry	76/06/04/2013/KTH.004/2017
<b>KECAMATAN : BUDONG-BUDONG</b>						
210	Lumu	Pantai Indah	2018	25 orang	Mangrove	76/06/03/2002/KTH.001/2018
211	Salumanurung	Sehati 2	2017	25 orang	Agroforestry	76/06/03/2007/KTH.002/2017
<b>KECAMATAN : KAROSSA</b>						
212	Kambunong	Tanete Rea	2018	25 orang	Mangrove	76/06/05/2009/KTH.001/2018
<b>KECAMATAN : KAROSSA</b>						
213	Leling	Wana Bakti			Agroforestry	

Kelompok Tani Hutan Teregister (KTH Teregister) adalah sebuah kelompok tani yang berfokus pada kegiatan pertanian di hutan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat atau instansi terkait. KTH Teregister beroperasi di hutan dengan tujuan mengelola lahan tersebut secara berkelanjutan dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu contoh KTH Teregister adalah kelompok tani yang melakukan kegiatan agroforestri di hutan. Agroforestri merupakan sistem pertanian yang menggabungkan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan tanaman hutan di satu lahan. KTH Teregister yang menjalankan agroforestri biasanya mengelola kebun-kebun atau ladang-ladang yang terletak di dalam hutan atau di sekitar hutan.

Keberadaan KTH Teregister penting karena mereka berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Dengan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, KTH Teregister dapat menjaga produktivitas lahan pertanian, meminimalisir erosi tanah, serta mempertahankan keanekaragaman hayati di hutan.

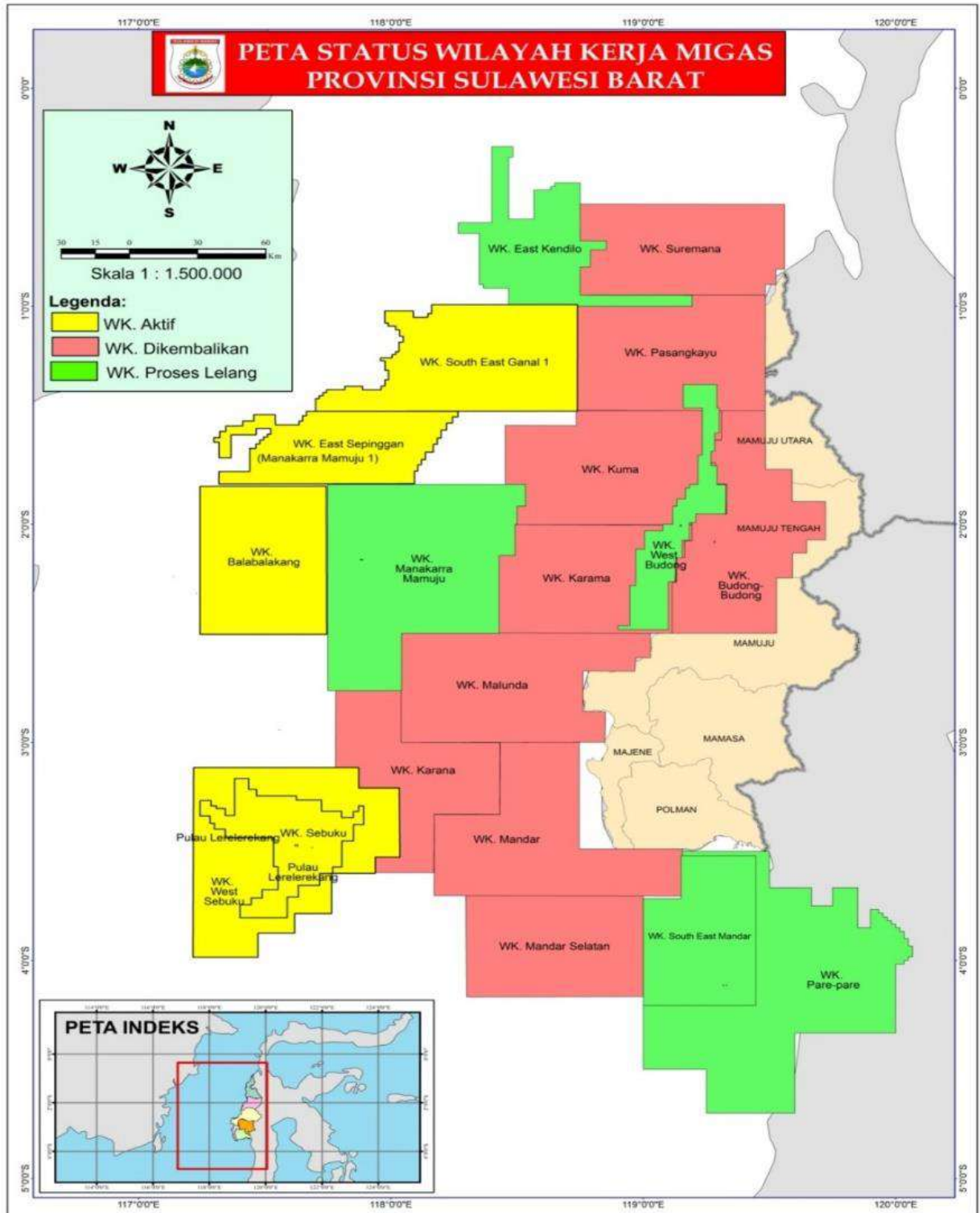
Di Provinsi Sulawesi Barat Kelompok Tani Hutan Teregister terdapat 7 UPTD di 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Madar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah.

#### **2.1.4.3.28 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, bijih besi, sulfida, serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, di mana menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radioaktif atau uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di mana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan Internasional, baik *offshore* maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada tahun 2013–2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

Gambar 2.12 Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional. Adapun kontraktor tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.174 Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional**

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MUBADALA PETROLIUM	SEBUKU	Majene	2,344.9 km <sup>2</sup>	Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013 Kegiatan Proses Penyertaan Modal/Participating Interest antara Kalsel dan Sulbar	Aktif (Produksi) Periode Efektif: 22 Sept 1997 – 21 Sept 2027
MUBADALA PETROLIUM	WEST SEBUKU	Majene	4,933 km <sup>2</sup>	PSC Kontrak tahun 2012 Study Geology	Aktif (Eksplorasi) Tanggal efektif KKS: 19 Des 2011
KRISENERGY BV. (BALA BALAKANG)	BALA-BALAKANG	Mamuju	4.190,96 km <sup>2</sup>	Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km <sup>2</sup> 2014 Pergantian nama blok sesuai dengan SK Kem ESDM No.15.K/13/DJM.E/ 2015	Aktif (Eksplorasi)
ENI INDONESIA. LTD	EAST SEPINGGAN (MANAKARRA MAMUJU 1)	Mateng, Pasangkayu		Pemprov Sulbar telah diusulkan penggantian nama WK menjadi Blok Manakarra Mamuju 1	Aktif (Eksplorasi)
NIKO RECOURCES LIMITED	SOUTHEAST GANAL 1	Matra & Mateng	Luas Wilayah:		Aktif (Eksplorasi)
	PARE PARE	Polewali, Pinrang, Parepare	8.373 km <sup>2</sup>		Proses Lelang
	MANAKARRA MAMUJU	Mamuju, Mateng	6.995 km <sup>2</sup>		Lelang Reguler 2016
	WEST BUDONG	Mamuju, Mateng, Matra	1.723 km <sup>2</sup>		Proses Lelang
	EAST KENDILO	Matra		Pemprov Sulbar mengusulkan penggantian Nama WK menjadi Blok Sendana 1	Proses Lelang
	SOUTHEAST MANDAR	Polewali		Konsulda WK Baru Migas berlangsung pd 17 Maret 2016	Lelang Reguler 2016
	SUREMANA 1	Matra		Lelang Reguler Tahun 2016	Lelang Reguler 2016
Pearl Oil	KARANA	Majene	5.389,68 Km <sup>2</sup>	Survey 2D (2008)	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013
STATOIL	KARAMA	Mamuju, Mateng	4.287,37 Km <sup>2</sup>	Sumur Eksplorasi Karama-1&Karama-2	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013
CONOCO PHILIPS	KUMA	Mateng, Matra	5086 Km <sup>2</sup>	SumurEksplorasi Kalukku-1	sda

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
EXXON	MANDAR	Majene, Polewali Mandar	4.196,25 Km2	Kris-1 32,30 mill laut Putera-1 26,04 mil laut Sultan-1 25,35 mill	sda
MARATHON	PASANG KAYU	Pasangkayu	4.707,63 Km2	Sumur Ekplorasi Bravo-1 Romeo-1	sda
EXXON	SUREMANA	Pasangkayu	5.339,63 Km2	Sumur Ekplorasi Rangkong-1	Sda
HARVEST BUDONG-BUDONG B.V.	BUDONG-BUDONG	Mamuju, Mateng & Matra	Tanggal efektif KKS: 16 Jan 2007 Luas Wilayah Kerja: 2.476,45 km <sup>2</sup>	Proses Terminasi/ Pengembalian Blok Migas Ke pemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Tanggal 5 Juni 2014.	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2014

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian, Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.175 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat**

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
Majene			
1. Ulumanda			
- Desa Sambabo	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Sungai Ure kang	Panas Bumi	-	-
2. Pamboang			
- Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Siang	Panas Bumi	-	-
- Desa S. Loppa	Panas Bumi	-	-
3. Sendana			
- Desa Limboro	Panas Bumi	64.531.353 ton	4.287
- Desa Ulidang	Batu Bara	(Hipotesa)	
Polewali Mandar			
1. Tapango		163.823,83 ton	5,
- Desa Tapango	Bijih Besi (Fe)	-	707
- Desa Lapejang	Bijih Besi (Fe)	-	300
- Desa Simbalutung	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Desa Bussu	Bijih Besi (Fe)	-	1.500
- Desa Takaturung	Panas Bumi	41 MWe	-
- Desa Riso/Kalimbua	Bijih Besi (Fe)	328.525 ton	8
2. Anreapi			
- Desa Pasiang dan Desa Papandangan	Bijih Besi (Fe)	-	1.750
- Desa Ulugalung	Logam Galena (Pb)	1.500 ton	199
- Desa Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan			
3. Binuang			
- Desa Mammi	Bijih Besi (Fe)	6.044,04 ton	2.445
- Desa Kurma	Logam Emas (Au)	-	3000
- Desa Batetangnga	Logam Galena (Pb)	-	2.000

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
4. Matakali - Desa Barumbung	Bijih Besi (Fe)	-	912
5. Campalagian - Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	-
6. Mapilli - Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Logam Emas (Au)	-	5.000
- Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	-	-
- Desa Andau	Panas Bumi	-	-
7. Bulo - Desa Sapporakki	Panas Bumi	292 Mwe	-
8. Matangnga - Desa Matangnga	Panas Bumi	115 Mwe	-
9. Balanipa - Desa Bala	Panas Bumi	-	-
10. Alu - Desa Pao-Pao	Panas Bumi	-	-
<b>Mamasa</b>			
1. Messawa - Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-
2. Pana - Desa Karaka, Uulusu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Desa Karaka, Uulusu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-
3. Tabulahan - Desa Talopak	Bijih Besi (Fe)	Hipotesa	888
- Desa Tarinding, Talopak	Logam Emas Primer (Au)	-	-
4. Sumarorong - Desa Ratta Bo'te	Bijih Besi (Fe)	Hipotesa	-
5. Aralle - Desa Salu Kaiyyang	Bijih Besi (Fe)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
6. Mamasa - Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	Hipotesa	-
- Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	900	-
- Desa Usango, Rambusaratu, Makau, Salu Mokanan Utara, Lindu Hahangan, Uhailano, Rantetangnga, Salu Kanan, Mungin, Rantekatoang, Indobanua, Rantekamiri, Tamalatik, Timbu Kanan, Malimbong	Panas Bumi	-	-
7. Tabang - Desa Baka Disura'	Logam Emas Primer (Au)	-	5.327
<b>Mamuju</b>			
1. Bonehau - Bonehau	Batu Bara	3.593.642 ton	1,6
- Desa Buttu Ada	Logam Emas (Au)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	1.073.570 ton	-
2. Kalumpang - Desa Karataun	Logam Emas Placer	-	-
	Logam Emas Primer (Au)	-	-
- Desa Bulo	Logam Tembaga (Cu)	-	-
3. Tapalang - Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
4. Tapalang Barat - Desa Tapalang	Panas Bumi	30 Mwe	-
5. Simboro - Desa Karema	Panas Bumi	10 Mwe	-
6. Kalukku - Ampallas - Desa Kona Kaiyyang	Panas Bumi Panas Bumi	40 Mwe 10 MWE	- -
Pasangkayu			
1. Tikke - Desa S. Lariang	Logam Emas Placer	103.896	-
2. Dapurang - Desa Masabo, Tarakedo	Logam Emas (Au) Logam Tembaga (Cu)	- -	- -
3. Baras	Batu Bara	-	-
4. Sarudu - Doda	Batu Bara Panas Bumi	- -	- -
Mamuju Tengah			
1. Topoyo - Desa Tabolang  - Desa Salulekbo	Logam Seng (Zn) Logam Mangan (Mn) Logam Emas (Au)	- - -	- - -
2. Karossa - Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au) Bijih Besi (Fe) Logam Tembaga (Cu) Logam Mangan (Mn) Logam Seng (Zn) Logam Galena (PbS)	- - - - - -	- - - - - -
3. Tobadak - Desa S. Andeang - Desa Salulekbo - Desa Panasuan	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn) Logam Emas (Au) Panas Bumi	- - -	- - -

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Untuk sebaran lokasi pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat bahwa terdapat 109 jumlah titik/lokasi dengan total luasan lokasi aktivitas pertambangan 5655,22 hektar. Kabupaten Polewali Mandar merupakan tempat terluas aktifitas pertambangan dimana terdapat 28 titik/lokasi dengan luasan 2217,89 hektar, luasan terkecil berada pada Kabupaten Mamasa terdapat 3 titik/lokasi dengan luasan 7,54 hektar.

**Tabel 2.176 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021–2023**

Kabupaten	Jumlah Titik/ Lokasi			Tahapan 2023	Luasan Lokasi aktifitas Pertambangan (ha)		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Mamuju	25	14	31	15 Eksp, 9 OP, 7 SIPB	16.016,24	11.025,69	1761,23
Majene	5	6	6	3 Eksp, 2 OP, 1 SIPB	79,98	123,08	151,73
Polewali Mandar	28	20	28	13 Eksp, 14 OP, 1 SIPB	543,29	2.110,58	2217,89
Mamasa	10	6	3	2 Eksp, 1 OP	26,43	13,00	7,54
Pasangkayu	12	11	15	5 Eksp, 7 OP, 3 SIPB	1.192,10	1.136,00	1179,64
Mamuju Tengah	15	19	27	10 Eksp, 9 OP, 8 SIPB	83,80	268,53	337,19
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>109</b>	<b>48 Eksp, 41 OP, 20 SIPB</b>	<b>17.941,84</b>	<b>14.677,20</b>	<b>5655,22</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Jumlah Desa/Kelurahan yang teraliri listrik dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu desa/kelurahan yang teraliri listrik, desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan sambungan listrik terbatas waktu. Pada tahun 2019 terdapat 611 desa/kelurahan yang teraliri listrik dan 36 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik tetapi disediakan sambungan listrik terbatas waktu sebanyak 36 desa/kelurahan, sedangkan pada tahun 2023 secara keseluruhan terdapat 625 desa/kelurahan yang teraliri listrik, 23 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu. Kondisi di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 terdapat 90 desa/kelurahan yang teraliri listrik dan terdapat 11 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu, Pada tahun 2023 di Kabupaten Mamasa masih terdapat 12 desa/kelurahan yang belum mendapat sambungan listrik dan 169 desa/kelurahan yang sudah teraliri listrik.

**Tabel 2.177 Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

KAB	KEC.	KEL/ DESA	DESA BELUM BERLISTRIK					RATIO DESA BERLISTRIK (%)					PERTUMB. RD BERLISTRIK 2019-2023
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Majene	8	82	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0.00
Polman	16	167	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0.00
Mamasa	17	181	24	25	21	16	12	86.74	86.2	88.4	91.16	93.37	7.48
Mamuju	11	101	12	15	15	14	11	88.12	85.1	85.1	86.13	89.11	1.24
Pasangkayu	12	63	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0.00
Mateng	5	54	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>648</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>94.46</b>	<b>93.8</b>	<b>94.46</b>	<b>85.37</b>	<b>96.45</b>	<b>3.36</b>

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

**Tabel 2.178 Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

No	Kabupaten	Sambungan Listrik Terbatas Waktu				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mamuju	12	15	15	14	11
2	Majene	0	0	0	0	0
3	Polewali Mandar	0	0	0	0	0
4	Mamasa	24	25	21	16	12
5	Pasangkayu	0	0	0	0	0
6	Mamuju Tengah	0	0	0	0	0
	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>23</b>

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Barat mendekati 100 persen pada 2025 Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS, PLTM dan jaringan listrik rumah tangga pada daerah terpencil. Melaksanakan program listrik hemat dan murah sebesar 24.000 RTS Mengembangkan system tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (on grid). Pengembangan pembangkit sistem Hybrid (PLTD & PLTS), pembangunan PLTMH di daerah-daerah terpencil untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

**Tabel 2.179 Ratio Elektrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**

KAB	RASIO ELEKTRIFIKASI (RE)					PELANGGAN AN PLN(RT)	NON- PLN (RT)	BELUM BERLISTRIK (RT)
	2019	2020	2021	2022	2023			
Majene	83,92	94,37	94,37	98,06	98,11	36.350	1.971	738
Polman	93,29	99,61	99,61	99,84	99,85	113.257	5.892	181
Mamasa	86,77	94,86	94,86	96,62	96,77	24.713	17.976	1.423
Mamuju	87,18	96,99	96,99	98,84	98,85	63.471	6.692	776
Pasangkayu	92,72	96,45	96,45	98,56	98,60	33.202	1.963	499
Mateng	89,36	93,58	93,58	97,67	97,73	31.893	440	751
<b>JUMLAH</b>	<b>89,73</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>	<b>98,67</b>	<b>98,71</b>	<b>302.886</b>	<b>34.934</b>	<b>4.368</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Penggunaan Energi/konsumsi energi final di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dan 2023, masih didominasi Minyak Bumi untuk menunjang kebutuhan energi sektor transportasi, dan disusul Batubara memenuhi kebutuhan PLTU, sedangkan saat ini pasokan EBT mendekati target nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.

**Tabel 2.180 Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 dan 2023**

ENERGI PRIMER	Definisi	2022		2023	
		MTOE	%	MTOE	%
Minyak Bumi	Total Pasokan Minyak Bumi	0.24	51.95	0.20	45.93
Batubara	Total Pasokan Batubara	0.12	21.68	0.13	31.44
Gas Bumi	Total Pasokan Gas Bumi	-	0	-	0
EBT	Total Pasokan EBT	0.10	21.68	0.10	22.63
<b>TOTAL</b>		<b>0.42</b>	<b>100</b>	<b>0.43</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024

Ketergantungan akan energi bahan bakar fosil menjadi masalah utama bangsa Indonesia, pemanfaatan energi daerah masih didominasi ketergantungan pada energi fosil khususnya pada sektor transportasi, industri maupun konsumen pengguna tertentu sejalan dengan gerak laju Pembangunan.

**Tabel 2.181 Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM**

Produk	TAHUN (KL)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Premium	93.299	84.052	67.416	13.312		
Pertalite	35.232	63.860	45.536	107.733	134.603	134.181
Pertamax	699	1.177	3.813	5.175	7360	4.267
Pertamax Turbo	16	21	444	636		112
Solar/Bio Solar	56.588	57.503	47.994	48.815	109.402.70	65.285
Dexlite	64	362	969	1.711	1600,67	926
Pertamina Dex	-	-	48	260	15.46	18
Minyak Tanah	16	-				-
Total	185,914	149,501				
Pertumbuhan (%)	5.99	24.36				

Sumber: PT. Pertamina

Pola Suplay penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat berasal dari TBBM Parepare dan Donggala Jumlah Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak yang berada di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak Solar (APMS), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan Agen Minyak Tanah (AMT) dengan rincian:

**Tabel 2.182 Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	LEMBAGA PENYALUR				
	SPBU Reguler	SPBU Mini	SPBU Kompak (ex-APMS)	SPBU Nelayan	Pertashop
Polewali Mandar	5			1	5
Mamasa	1		1		1
Majene	2	1	1	1	7
Mamuju	6			1	3
Mamuju Tengah	3			1	3
Pasangkayu	4		2	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

*Sumber: PT. Pertamina*

Kebutuhan BBM Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun semakin meningkat sehingga perlu disikapi dengan mendorong kebijakan dan peluang daerah untuk melakukan Konservasi energi BBM ke BBN, dengan mengoptimalkan potensi pemanfaatan tanaman sawit yang sangat besar di Provinsi Sulawesi Barat.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022 terdapat luas area penambangan yang liar seluas 88,00 hektar yang telah dilakukan penertiban terhadap penambangan liar tersebut seluas 29,30 hektar dengan persentase 33,30 persen penambangan liar yang ditertibkan pada tahun 2022.

**Tabel 2.183 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022**

No	Tahun	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan (Ha)	Luas Area Penambangan yang liar (Ha)	Persentase (%)
1	2018	115,8	41,09	281,82
2	2019	17,14	31,32	54,73
3	2020	16,54	21,28	77,73
4	2021	38,80	88,00	44,09
5	2022	29,30	88,00	33,30

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2023*

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menurut jenis komoditas di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 jumlah IUP mencapai 95 dan WIUP seluas 19.796,26 hektar dan pada tahun 2022 jumlah IUP sebesar 76 dengan WIUP seluas 14.665,34 hektar. Jumlah IUP pada jenis komoditas batuan yang terbanyak, baik itu pada tahun 2021 sebanyak 86 dan pada tahun 2022 sebanyak 70. Jumlah IUP untuk komoditas logam pada 2022 sebanyak 5 izin dan luas wilayah mencapai 3.367,02 hektar. Pada tahun 2022, persentase IUP berdasarkan

jenis komoditas terbesar pada komoditas batuan yang mencapai 92,11 persen sedangkan persentase WIUP terbesar pada komoditas Non Logam yang mencapai 63,09 persen.

**Tabel 2.184 Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2023**

Komoditas	2020				2021			
	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)
Logam	6	5,77	3.656,26	19,21	6	6,32	3.656,26	18,47
Non Logam	2	1,92	14.051,00	73,84	2	2,11	14.051,00	70,98
Batu Bara	1	0,96	98,00	0,51	1	1,05	98,00	0,50
Batuan	95	91,35	1.224,95	6,44	86	90,53	1.991,00	10,06
<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100,00</b>	<b>19.030,21</b>	<b>100,00</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>	<b>19.796,26</b>	<b>100,00</b>

**Lanjutan Tabel diatas**

Komoditas	2022				2023			
	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)	Jumlah IUP	Persentase (%)	Jumlah WIUP (ha)	Persentase (%)
Logam	5	6,58	3.367,02	22,96	3	2,75	1918,1	33,92
Non Logam	1	1,32	9.252,00	63,09	0	0	0	0
Batu Bara	0	0	0	0,00	1	0,92	98,00	1,73
Batuan	70	92,11	2.046,28	13,95	105	96,33	3.639,12	64,35
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>100,00</b>	<b>14.665,34</b>	<b>100,00</b>	<b>109</b>	<b>100,00</b>	<b>5.655,22</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2024*

*Catatan: - IUP = Izin Usaha Pertambangan,*

*- WIUP = Wilayah Izin Usaha Pertambangan*

### 2.1.4.3.29 Urusan Perdagangan

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekport yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

**Tabel 2.185 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal**

Indikator	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2022

### 2.1.4.3.30 Urusan Perindustrian

#### a. Jumlah Industri dan tenaga kerja

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

**Tabel 2.186 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat tahun 2014-2018**

Kabupaten	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja									
	Perusahaan					Tenaga Kerja				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Majene	210	265	428	428	428	492	2,033	2,424	2,815	2,770
Polewali Mandar	1,563	4,186	5305	6276	6264	5,470	8,512	10,856	13,200	13,741
Mamasa	591	459	459	459	459	1,727	1,500	1,500	1,500	1,500
Mamuju	585	548	598	692	730	1,795	1,701	1,483	2,965	2,767
Pasangkayu	415	474	479	527	676	1,171	2,386	1,951	1,515	1,912
Mamuju Tengah	273	273	307	307	262	508	508	473	438	438
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3,364</b>	<b>6,205</b>	<b>7576</b>	<b>8644</b>	<b>9236</b>	<b>10,655</b>	<b>16,640</b>	<b>18,687</b>	<b>22,433</b>	<b>23,128</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

#### b. Kawasan Industri

Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Namun ke depan telah direncanakan untuk membangun kawasan industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku, rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh

pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

**Tabel 2.187 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian**

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	99 IKM	9 IKM	61 IKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2024

#### **2.1.4.3.31 Urusan Transmigrasi**

Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman (2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009), UPT Botteng Pasembuk Kab. Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah direncanakan sejak tahun 2012, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan Kawasan Transmigrasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42 Ha;
2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77 Ha;
3. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha.
4. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas Penetapan kawasan 31.150 Ha;
5. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan 24.947,19 Ha;
6. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

Daftar Lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat:

1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42 Ha;

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
SKP A	13,207.54	APL	10,258.70	Budong-budong	Desa Babana	Berkembang	PUSAT SKP	Tempatan	Pertanian : Ubi Jalar, Padi, jagung
			62.12		Karossa	Tertinggal			
			2,470.81		Tobadak	Berkembang			
			180.66		Topoyo	Tertinggal			
					Desa Kabubu	Berkembang			
					Desa Tangkou	Tertinggal			
					Desa Bambamanuruni	Tertinggal			
					Desa Tabolang	Tertinggal			
					Desa Topoyo	Berkembang			
					Desa Salupangkang Lu	Tertinggal			
					Desa Tappilina	Tertinggal			
					Desa Paraili	Berkembang			
					Desa Salupangkang	Tertinggal			
					Desa Sinabatta	Sangat Tertinggal			
SKP B	17,362.54	APL	16,492.26	Budong-budong	Desa Wasputeh	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	Perkebunan : Pisang, Rambutan, Jeruk, Kelapa, Coklat
			0.00		Desa Pangalloang	Tertinggal			
			16.81		Desa Babana	Berkembang			
			306.25		Desa Pasappa	Sangat Tertinggal			
		HP	16.81	Tobadak	Desa Salo Adak	Tertinggal			
			306.25		Desa Mahaha	Berkembang			
			333.71		Desa Dambadaru	Tertinggal			
					Desa Sulobaja	Berkembang			
					Desa Palongan	Berkembang			
					Desa Batu Parigi	Tertinggal			
					Desa Tobadak	Berkembang			
				Topoyo	Desa Tabolang	Tertinggal			
					Desa Salulekko	Sangat Tertinggal			
		SKP C	16,516.34	APL	16,122.48	Budong-budong			
83.45	Desa Salumanurung				Berkembang				
240.66	Desa Pasappa				Sangat Tertinggal				
204.44	Desa Kire				Berkembang				
HPK	240.66			Tobadak	Desa Barakkang	Tertinggal			
	204.44				Desa Salogatta	Berkembang			
					Desa Babana	Berkembang			
					Desa Lembah Hada	Sangat Tertinggal			
					Desa Bojo	Tertinggal			
					Desa Pontanakayang	Berkembang			
				Pangale	Desa Polo Lereng	Tertinggal			
					Desa Polocamba	Tertinggal			
				Tobadak	Desa Kuo	Tertinggal			
					Desa Sulobaja	Berkembang			
			Desa Tobadak	Berkembang					

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016  
 Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - SK Menteri Nakertrans Nomor 293/MEN/D/2009 Tanggal 29 September 2009 Tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi

## 2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
KPB	1,788.72	APL	1,733.88	Lariang	Desa Bembakoro	Sangat Tertinggal	Pusat KPB	Baru	Kecamatan Lariang Tanaman Pangan : Jagung
SKP A	7,810.64	TUBUH AIR	54.84	Baras	Desa Towoni	Sangat Tertinggal	Pusat SKP	Pugar	Hortikultura : Jeruk Manis Perkebunan : Kelapa Sawit Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Buras
			6,376.92		Desa Bulu Parigi	Berkembang			
SKP B	12,840.42	HPK	10,762.41	Baras	Desa Balanti	Tertinggal	Pusat SKP	Pugar	Kecamatan Baras Tanaman Pangan : Jagung Hortikultura : Tomat Perkebunan : Kelapa Sawit Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Potong
			2,078.01		Desa Motu	Berkembang			
SKP C	5,709.98	APL	5,709.98	Lariang	Desa Kasano	Tertinggal	Pusat SKP	Pugar	Kecamatan Bulu Taba Tanaman Pangan : Padi Hortikultura : Durian Perkebunan : Kelapa Sawit Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Buras
					Desa Singgani	Berkembang			
					Desa Parabu	Berkembang			
					Desa Kulu	Tertinggal			
SKP D	8,753.01	TUBUH AIR	83.38	Bulu Taba	Desa Batu Matoru	Tertinggal	Pusat SKP	Pugar	Kecamatan Bulu Taba Tanaman Pangan : Padi Hortikultura : Durian Perkebunan : Kelapa Sawit Peternakan : Sapi, Babi, Ayam Buras
					Desa Kenangan	Tertinggal			
					Desa Bajawali	Tertinggal			
					Desa Sumber Sari	Tertinggal			
			184.24		Desa Lilimori	Berkembang			
					Desa Kasta Buana	Berkembang			
					Desa Karave	Berkembang			
					Desa Bukit Harapan	Tertinggal			
					Desa Leleiae	Berkembang			

Aspek Legal Kawasan : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 3 November 2017  
 Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi : - Surat Usulan Bupati Kabupaten Mamuju Utara kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 100/1039/VII/2017 Tanggal 9 Juni 2017

## Daftar Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat:

1. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha;

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Nama SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status				
KPB	239.01	APL	172.06	Ulumanda	Desa Sambabo	Tertinggal	Pusat KPB	Pugar		Pertanian : Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai dan Ubi Kayu
		HL	0.00		Desa Sambabo	Tertinggal				
		HPT	53.39		Desa Sambabo	Tertinggal				
SKP A	8.237.32	Tubuh Air	13.76		Desa Popenga		Pusat SKP A	Pugar	Baru	SP 3 Paku
		APL	8.178.70		Desa Ulumanda	Sangat Tertinggal				
		HL	0.00		Desa Panggalo	Sangat Tertinggal				
		Tubuh Air	58.62		Desa Tandeallo	Sangat Tertinggal				
					Desa Sulat	Sangat Tertinggal				
SKP B	7.327.80	APL	7.276.62	Tameroddo	Desa Kabiraan		Pusat SKP B	Pugar	Baru	SP 2 Tamajannang
		HPT	25.41		Desa Salutambung					
		Tubuh Air	21.77		Desa Sambalo					
					Desa Tallambalao					
					Desa Awo	Tertinggal				
					Desa Uliang					
					Desa Manyamba					
					Desa Seppong	Tertinggal				
					Desa Seppong	Tertinggal				
					Desa Tameroddo Utara					
					Desa Talu Barua Utara	Berkembang				
SKP C	14.245.02	APL	6.946.75	Malunda	Desa Tameroddo		Pusat SKP C	Pugar	Baru	SP 3 Limboro
		HL	0.00		Desa Malunda	Tertinggal				
		HP	14.36		Desa Lamungan Batu					
		HPT	7.076.90		Desa Kayu Angin					
		Tubuh Air	206.41		Desa Lombong					
					Desa Lombong Timur					
					Desa Mekatta					
					Desa Mekatta Selatan					
					Desa Sambangan					
					Desa Salurahongan	Tertinggal				
					Desa Malaya					
					Desa Lombang	Tertinggal				
					Desa Lombang Timur	Tertinggal				

- Aspek Legal Kawasan** : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017
- Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi** : - Surat Usulan Bupati Majene kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 560/2.a/2016
- Surat Usulan Bupati Majene kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 560/2.b/2016
- Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 530/40/2016 Tentang Wilayah Perencanaan untuk Calon Kawasan Transmigrasi seluas 37.649 Ha yang Terletak di Wilayah Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan Tammerodo Kabupaten Malene Tanggal 23 Juli 2016
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Majene bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050/125/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 009/7/25/15/SET Tanggal 10 Oktober 2017

**2. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas Penetapan kawasan 31.150 Ha;**

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status			
KPB	250.00	APL	483.27	Mambi	Desa Sendana	Tertinggal	PUSAT KPB		Pertanian : Padi Ladang dan Jagung
		TUBUH AIR	14.23						
SKP A	6.250.00	APL	7.467.86	Tabulahan	Desa Lakahang	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	
		HL	28.72		Desa Lakahang Utama	Tertinggal			
		HPT	52.05		Desa Burana	Sangat Tertinggal			
		KSA/KPA	0.01		Desa Gandang Dewata	Sangat Tertinggal			
		TUBUH AIR	53.39		Desa Malatiro	Tertinggal			
					Desa Saluleang	Sangat Tertinggal			
					Desa Talopak	Sangat Tertinggal			
					Desa Tampak Kurra	Tertinggal			
					Desa Timoro	Tertinggal			
					Desa Taora	Sangat Tertinggal			
SKP B	7.500.00			Buntu Malangka	Desa Salurinduk	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan	Perikanan : Budidaya
					Desa Buntu Malangka	Sangat Tertinggal			
					Desa Kebango	Sangat Tertinggal			
					Desa Ranteberang	Sangat Tertinggal			
					Desa Aralle	Tertinggal			
					Desa Panetean	Sangat Tertinggal			
					Desa Kalabe	Sangat Tertinggal			
		Desa Aralle Utara	Tertinggal						
		Desa Hahangan	Sangat Tertinggal						
		Desa Aralle Timur	Sangat Tertinggal						
		Desa Aralle Selatan	Tertinggal						
		Desa Ralleanak Utara	Sangat Tertinggal						
		Desa Ralleanak	Sangat Tertinggal						
		Desa Uhalanu	Tertinggal						
		Desa Baruru	Sangat Tertinggal						
		Desa Uhaidao	Sangat Tertinggal						
		Desa Pamoseang	Sangat Tertinggal						

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

SKP	Luas (Ha)	Klasifikasi	Luas	Kecamatan	Desa	Status	Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok					
SKPB				Buntu Malangka	Desa Kabae	Sangat Tertinggal			Perikanan : Budidaya Mas, Nila dan Lele					
					Desa Taora	Sangat Tertinggal								
					Desa Salutambun Barat	Sangat Tertinggal								
					Desa Salutambun	Tertinggal								
				Mambi					Desa Salutambun Timur	Sangat Tertinggal			Perkebunan : Kopi Arabika dan Kakao	
									Desa Tapalinna	Tertinggal		Tempatan		
									Desa Bujung Manurung	Tertinggal				
									Desa Indobanua	Sangat Tertinggal				
									Desa Talpukki	Sangat Tertinggal				
									Desa Sondonglajuk	Tertinggal				
									Desa Saludurian	Sangat Tertinggal		Pugar		
									Desa Salualo	Sangat Tertinggal				
									Desa Salumakak	Sangat Tertinggal		Tempatan		
									Desa Salubanua	Sangat Tertinggal				
SKPC	9,000.00	APL TUBUH AIR	9,038.83 38.41	Rantebulahan Timur	Desa Buangin	Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan						
					Desa Bambang Buda	Tertinggal								
					Desa Leko	Sangat Tertinggal		Tempatan						
					Desa Salumokanan Barat	Sangat Tertinggal								
					Desa Salumokanan	Tertinggal								
					Desa Kirak	Sangat Tertinggal								
					Desa Salumokanan Utara	Sangat Tertinggal								
					Desa Sampale	Sangat Tertinggal								
					Bambang	Desa Bambang	Tertinggal							
						Desa Bambang Timur	Tertinggal							
				Desa Ulumambi Barat		Sangat Tertinggal								
				Desa Ulumambi		Sangat Tertinggal		Tempatan						
				SKPD	8,150.00	APL TUBUH AIR	9,229.26 84.46	Mehalaan		Desa Salubulo	Sangat Tertinggal			Peternakan : Sapi Potong, Babi dan Itik
										Desa Balatana	Sangat Tertinggal			
Desa Mehalaan	Sangat Tertinggal	PUSAT SKP	Tempatan											
Desa Mehalaan Barat	Sangat Tertinggal													
Desa Leko Sukamaju	Sangat Tertinggal													
Desa Salubanua Selatan	Sangat Tertinggal		Tempatan											
Desa Katakata	Sangat Tertinggal													
Desa Salubalo	Sangat Tertinggal		Tempatan											
Desa Batteng	Sangat Tertinggal		Tempatan											
Desa Batteng	Sangat Tertinggal		Pugar											
Desa Kondo	Sangat Tertinggal													

**Aspek Legal Kawasan** : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016  
**Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi** : - Surat Usulan Bupati Mamasa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan  
- Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 471.2/KPTS.220/XI/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Wilayah Perencanaan Untuk  
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Mamasa bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan  
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 596/1263/SET Tanggal 9

### 3. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan 24.947,19 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok		
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status					
SKP A	7,215.90	APL HL HPT TUBUH AIR	7,182.25 13.81 112.04 41.18	Tubbi Taramanuk	Desa Taloba	Tertinggal		PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Ladang Perkebunan : Kakao, Langsat dan Durian Peternakan : Sapi dan Kambing	
					Desa Pollewani	Tertinggal					
					Desa Tubbi	Tertinggal					
					Desa Besoangin Utara	Tertinggal					
					Desa Piriang Tapiko	Tertinggal					
SKP B	5,658.03	APL HPT TUBUH AIR	4,871.74 862.42 30.04	Luyo	Desa Ratte	Sangat Tertinggal		PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Sawah Perkebunan : Kakao dan Langsat Perikanan : Budidaya Tambak	
					Desa Batupanga Daala	Tertinggal					
					Desa Peburru	Tertinggal					
					Desa Poda	Sangat Tertinggal					
					Desa Taramanuk Tua	Sangat Tertinggal					
				Tubbi Taramanuk	Desa Pollewani	Tertinggal					
					Desa Arabua	Tertinggal					
					Desa Taramanuk	Sangat Tertinggal					Pugar
					Desa Ambopadang	Tertinggal					
					Desa Pussui	Tertinggal					
SKP C	4,699.48	APL HPT TUBUH AIR	4,614.67 177.45 1.22	Luyo	Desa Pussui Barat	Tertinggal		PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Sawah Perkebunan : Kakao dan Langsat	
					Desa Batupanga	Tertinggal					
					Desa Batupanga Daala	Tertinggal					
					Desa Poda	Sangat Tertinggal					Pugar
					Desa Ambopadang	Tertinggal					
SKP D	7,373.78	APL HPT TUBUH AIR	4,436.25 3,060.58 20.32	Bulo	Desa Arabua	Tertinggal		PUSAT SKP	Pugar	Pertanian : Padi Sawah Perkebunan : Kakao dan Langsat Perikanan : Budidaya Tambak	
					Desa Sabura	Tertinggal					
					Desa Sepporaki	Tertinggal					
					Desa Pulliwa	Berkembang					
					Desa Ithing	Tertinggal					
					Desa Karombang	Tertinggal					Baru
					Desa BULO	Tertinggal					
					Desa Patambanua	Sangat Tertinggal					Baru

**Aspek Legal Kawasan** : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016  
**Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi** : - Surat Usulan Bupati Polewali Mandar kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang  
- Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS/595/652/HUK Tanggal 09 November 2015 Tentang Wilayah Perencanaan  
- Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 596/1263/SET Tanggal 9

4. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

SKP	Luas (Ha)	Kawasan Hutan		Kecamatan	Desa		Pusat SKP/KPB	Potensi SP	Pola Usaha Pokok	
		Klasifikasi	Luas		Nama	Status				
SKP A	5,743.34	APL	21,637.51	Kalukku	Desa Sinyoyoi	Sangat Tertinggal		Baru	Pertanian : Padi Sawah	
					Desa Beru-Beru	Berkembang		Baru		
		HPK	8,445.88		Desa Kalukku Barat	Berkembang	Pusat SKP			Perkebunan : Cabai
					Desa Pammulukang	Tertinggal		Baru		Rawit, Jeruk, Langsung, Kelapa, Lada, Kakao, Kemiri, Sagu
		TUBUH AIR	334.63		Desa Bebanga	Sangat Tertinggal		Baru		
					Desa Kalukku	Sangat Tertinggal	Pusat KPB			
		HPT	15,179.93		Desa Pokkang	Tertinggal		Baru		
					Desa Kabuloang	Berkembang		Baru		
		Desa Gulliling			Desa Gulliling	Sangat Tertinggal		Baru		Peternakan : Sapi dan Ayam
					Desa Sondang	Tertinggal		Baru		Pertanian : Padi Sawah
SKP B	5,061.57	APL	6,258.09	Simboro	Desa Botteng (UPT Bina)	Tertinggal		Baru	Pertanian : Padi Sawah	
					Desa Botteng (UPT Bina)	Tertinggal		Baru		
		HPT	90.71	Desa Botteng Utara	Tertinggal		Baru	Perkebunan : Cabai		
				Desa Pati'di	Berkembang		Baru	Rawit, Jeruk, Langsung, Kelapa, Lada, Kakao, Kemiri, Sagu		
		TUBUH AIR	137.75	Desa Takandeang	Tertinggal		Baru			
				Desa Galung	Sangat Tertinggal	Pusat SKP		Baru		
		Desa Galung		Desa Galung	Sangat Tertinggal		Baru			
				Desa Orobatu	Tertinggal		Baru	Peternakan : Sapi dan Ayam		
		Desa Tapaialang	Tertinggal		Baru					
		SKP C	7,018.81	APL	43,221.63	Papalang	Desa Bonda	Tertinggal		Baru
Desa Topore	Tertinggal							Baru		
HPT	46,075.23			Desa Papalang	Berkembang	Pusat SKP				
				Desa Losso	Tertinggal		Baru	Perkebunan : Kakao, Kelapa Dalam, Sawit, Kemiri, Kopi		
TUBUH AIR	885.42			Desa Kalonding	Berkembang		Baru			
				Desa Tarailu	Berkembang		Baru			
Desa Tamemongga				Desa Tamemongga	Tertinggal		Baru			
				Desa Leling	Sangat Tertinggal		Baru	Peternakan : Sapi dan Ayam		
Desa Leling Barat				Desa Leling Barat	Tertinggal		Baru	Pertanian : Padi, Jagung		
SKP D	7,865.27	APL	37,831.04	Bonehau	Desa Hinua	Tertinggal		Baru	Pertanian : Padi, Jagung	
					Desa Bonehau	Tertinggal	Pusat SKP			Baru
		HPT	38,286.82	Desa Bonehau	Tertinggal		Baru	Perkebunan : Kakao, Kopi dan Pala		
				Desa Salutiwo	Tertinggal		Baru	Pertambangan : Emas		
		TUBUH AIR	785.15	Desa Kinantang	Sangat Tertinggal		Baru			
				Desa Karataun	Sangat Tertinggal		Baru			
		Desa Siraun		Desa Siraun	Sangat Tertinggal		Baru	Pariwisata : Alam dan Budaya		
				Desa Siraun	Sangat Tertinggal		Baru	Peternakan : Babi, Ayam, Sapi dan Kerbau		
		Desa Salumakki		Desa Salumakki	Sangat Tertinggal		Baru			
				Desa Makkaliki	Tertinggal		Baru	Industri : Kain Sekomandi		
Desa Sandapang	Sangat Tertinggal		Baru							
Desa Karama	Sangat Tertinggal		Baru							

- Aspek Legal Kawasan** : - Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 3 November 2017
- Dokumen Pendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi:** - SK Bupati Kabupaten Mamuju tentang Wilayah Perencanaan Calon Kawasan Transmigrasi Nomor 188.45/737/KPTS/XI/2015 Tanggal 16 November 2015
- Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Mamuju bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050/353/XI/2015/BAPPEDA Bulan November 2015
  - Surat Usulan Bupati Mamuju kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 188.45/826/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016
  - Rekomendasi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 553.73/2667/SET Tanggal 10 November 2016

Sumber: Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.188 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun 2016 – 2021

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
<b>KAB. POLMAN</b>				
UPT. Piriang Tapiko	TPLK	2016 & 2017	100 KK	226 JIWA
UPT. Ratte	TPLK	2021	19 KK	152 JIWA
<b>KAB. MAMASA</b>				
UPT. Rano	TU/TPLK	2015-2021	250 KK	465 JIWA
<b>KAB. MAJENE</b>				
UPT. Tamajannang	TU/TPLK	2018	25 KK	81 JIWA
UPT. Ulumanda Tandiallo	TU/TPLK	2012 - 2013	250 KK	742 JIWA
<b>KAB. MAMUJU TENGAH</b>				
UPT. Saluandeang	TU/TPLK	2018-2021	193 KK	772 JIWA
UPT. Salulisu	TU/TPLK	2021	30 KK	119 JIWA
<b>KAB. PASANGKAYU</b>				

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
UPT. Tanjung Cina	Pola Perikanan Tambak (Nelayan)	2018	25 KK	85 JIWA
<b>KAB. MAMUJU</b>				
UPT. Sinyonyoi	TU/TPLK	2016	50 KK	146 JIWA

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.189 Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2023**

Uraian	Tahun (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2022	2023
Persentase Transmigran Swakarsa	27,19	54,84	62,31	54.84	62.31	39.13

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### 2.1.4.3.32 Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut. Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

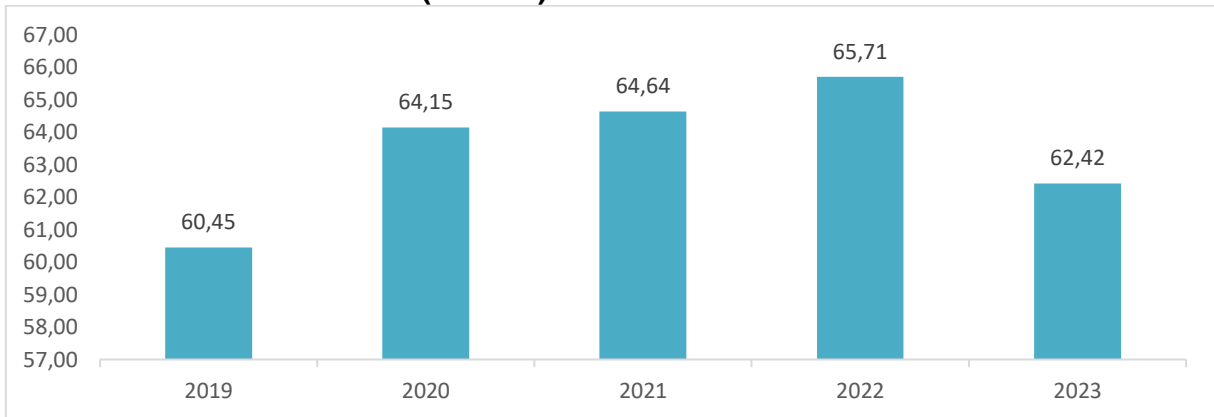
**Tabel 2.190 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat (Kg) Tahun 2022**

Kabupaten	Laut	Tambak	Kolam
Majene	0	330.038	96.240
Polewali mandar	14.702.683	17.696.696	15.423.015
Mamasa	0	0	3.931.940
Mamuju	1.868.788	7.674.426	12.380.507
Pasangkayu	0	7.654.450	1.873.000
Mamuju Tengah	9.688	2.998.204	120.792
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>16.581.159</b>	<b>36.353.814</b>	<b>33.825.494</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2023

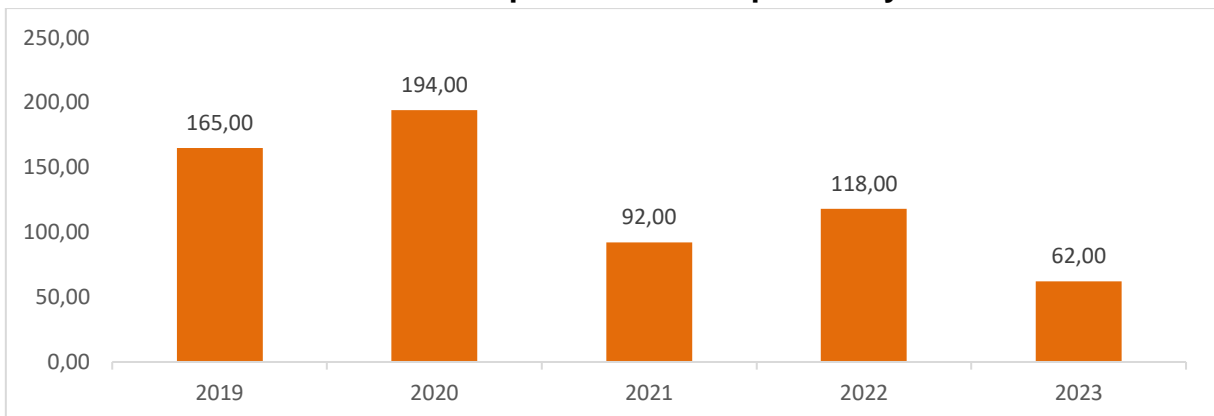
Pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 86.760.467 ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 16 ribu ton, air payau 36 ribu ton dan di air tawar 33 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling banyak terjadi pada perikanan tambak dan kolam.

**Grafik 2.69 Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)**



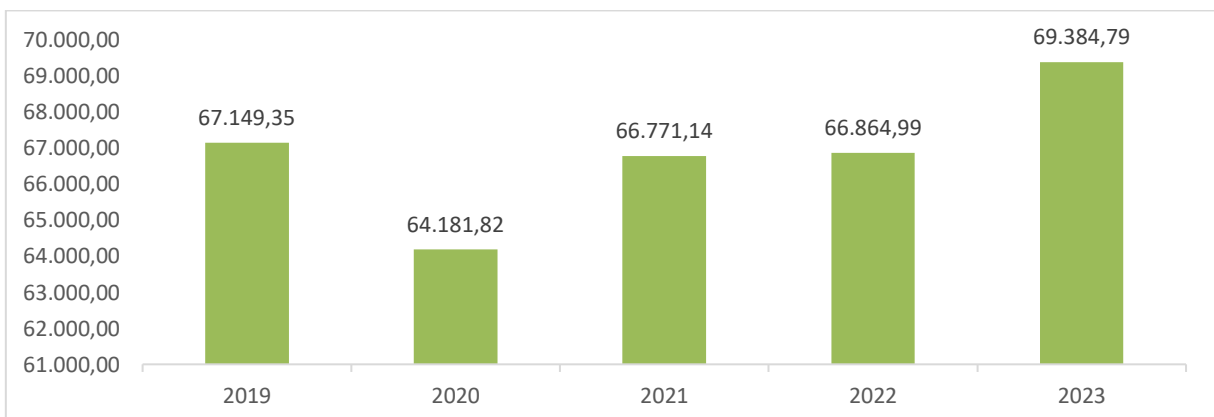
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Grafik 2.70 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan**



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Grafik 2.71 Jumlah Produksi Ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (Ton)**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2024

**Tabel 2.191 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018–2022**

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	56,328.18	67,149	64,182	66,771	66,865
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	102,501.16	105,554	133,569	132,911	80,511
Produksi Olahan (Ton)	5,698.45	3,226.42	3,270.55	3,270.69	3,287.04
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Konsumsi Ikan (Kg)	51,72	52,83	53,38	65,41	65,73
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)	1,00	1,00	7,00	7,00	15,00
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org)	114.77 (NTN)	177.63 (NTN)	118.51 (NTN)	117,54 (NTN)	104,96 (NTN)
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org)	94.86 (NTPi)	N/A	N/A	N/A	N/A
Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org)	1,389,831.79	N/A	N/A	N/A	N/A
Kawasan Konservasi (Ha)	147,307.393	149,000	149,000	184,682	184,682
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)	5.00	5.00	5.00	5.00	21.00
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel & Tepat Waktu (%)	16.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2023

#### 2.1.4.3.33 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan topdown process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function menjadi *money follow program* adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

**Tabel 2.192 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Perencanaan pembangunan</b>					
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	90,25	90,97	99,43	99,43	99,43
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	250	252	175	139	139
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	277	277	175	175	175
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	250	252	175	175	175
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	203	209	174	174	174
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### 2.1.4.3.34 Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

**Tabel 2.193 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2023

#### 2.1.4.3.35 Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk

menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*).

**Tabel 2.194 Data Kesenjangan antara Eksisting dengan Kebutuhan Pegawai Tahun 2023**

Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
Jabatan Pimpinan Tertinggi	41	46	5
Jabatan Administrator	202	214	12
Jabatan Pengawas	248	264	16
Jabatan Pelaksana	1.723	0	1.723
Jabatan Fungsional	3.196	0	3.196
<b>Jumlah</b>	<b>5.410</b>	<b>524</b>	<b>4.952</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024*

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified system*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

**Tabel 2.195 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021**

TAHUN	JUMLAH ASN PEMPROV SULBAR (Orang)	JUMLAH TOTAL JP (Jam)	JUMLAH RATA-RATA JAM PELAJARAN
2017	537	121.392	226
2018	265	61.608	232
2019	371	186.564	503
2020	47	34.600	736
2021	929	403.167	434

*Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022*

**Tabel 2.196 Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021**

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2018			2019		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
<b>1</b>	<b>KOMPETENSI MANAJERIAL</b>	<b>53</b>	<b>867</b>	<b>45.951</b>	<b>324</b>	<b>1.378</b>	<b>183.364</b>
	<i>DIKLATPIM</i>	53	867	45.951	50	867	43.350
	<i>PRAJABATAN/LATSAR CPNS</i>			-	274	511	140.014
<b>2</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL</b>	<b>181</b>	<b>627</b>	<b>13.860</b>	<b>17</b>	<b>230</b>	<b>1.700</b>
	<i>DIKLAT TOC</i>	30	87	2.610			-
	<i>DIKLAT PENGADAAN BJ</i>			-			-
	<i>DIKLAT P2UPD</i>	30	120	3.600			-
	<i>DIKLAT SATPOL-PP</i>	30	150	4.500			-
	<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</i>	25	30	750	10	30	300
	<i>DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD</i>			-			-
	<i>DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA</i>			-			-
	<i>PENGEMBANGAN WIDYAIWARA</i>	6	200	1.200	7	200	1.400
	<i>DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH</i>	30	20	600			-
	<i>DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL</i>			-			-
	<i>DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN</i>			-			-
	<i>DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH</i>	30	20	600			-
<b>3</b>	<b>KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>1.500</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>1.500</b>
	<i>DIKLAT REVOLUSI MENTAL</i>	30	50	1.500	30	50	1.500
	<i>PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL</i>			-			-
<b>4</b>	<b>KOMPETENSI PEMERINTAHAN</b>	<b>1</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI</i>	1	297	297			-
	<b>JUMLAH</b>	<b>265</b>	<b>1,841</b>	<b>61,608</b>	<b>371</b>	<b>1,658</b>	<b>186,564</b>

**Lanjutan Tabel di atas**

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2020			2021		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
<b>1</b>	<b>KOMPETENSI MANAJERIAL</b>	<b>40</b>	<b>830</b>	<b>33.200</b>	<b>601</b>	<b>647</b>	<b>388,847</b>
	<i>DIKLATPIM</i>	40	830	33.200	0	0	0
	<i>PRAJABATAN/LATSAR CPNS</i>				601	647	388,847
<b>2</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL</b>				<b>328</b>	<b>362</b>	<b>14,320</b>
	<i>DIKLAT TOC</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT PENGADAAN BJ</i>				40	39	1,560
	<i>DIKLAT P2UPD</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT SATPOL-PP</i>				0	0	0
	<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA</i>				0	0	0
	<i>PENGEMBANGAN WIDYAIWARA</i>				7	200	1,400
	<i>DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN</i>				0	0	0
	<i>DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH</i>				0	0	0

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2020			2021		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
	GOVERNMENT TRANSFORMATIONAL ACADEMY (GTA)				201	40	8,040
	DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)				40	27	1,080
	DIKLAT TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA				40	56	2,240
<b>3</b>	<b>KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DIKLAT REVOLUSI MENTAL				0	0	0
	PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL				0	0	0
<b>4</b>	<b>KOMPETENSI PEMERINTAHAN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>537</b>	<b>186.564</b>	<b>40</b>	<b>929</b>	<b>1,009</b>	<b>403,167</b>

Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah jabatan struktural berdasarkan kondisi struktur organisasi dan tata kerja yang ada dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana yang terisi pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Berdasarkan data kelembagaan pada tahun 2023 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 524 jabatan, sedangkan menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 491 jabatan. Kemudian Jumlah ASN berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 4.919 jabatan yang terdiri dari 1.723 fungsional umum dan 3.196 fungsional teknis.

**Tabel 2.197 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2023**

Tahun	Data Kelembagaan (Eselon)					Jabatan Menurut Kelompok Jabatan (Eselon)					Jabatan Fungsional		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Umum	Teknis	Total
2019	1	47	225	646	919	1	42	178	596	817	2.607	2.065	4.672
2020	1	47	225	646	919	1	44	202	611	858	2.133	2.396	4.529
2021	1	47	225	646	919	1	42	223	634	900	2.524	2.069	4.593
2022	1	47	225	646	919	1	46	208	625	880	2.539	2.120	4.659
2023	1	45	214	264	524	1	43	209	248	501	2.241	2.828	5.069

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan sistem melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

**Tabel 2.198 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil terhadap Kebutuhan
2019	5.488	8.220	Kurang	33,24
2020	5.387	8.220	Kurang	34,47
2021	5.493	8.220	Kurang	33,18
2022	5.539	8.220	Kurang	32,62
2023	5.570	8.220	Kurang	32,24

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### 2.1.4.3.36 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang bersinergi dengan propempera (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam menindaklanjuti program legislasi daerah.

**Tabel 2.199 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019–2023**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	80	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2023) Provinsi Sulbar

#### 2.1.4.3.37 Urusan Pengawasan

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

#### **2.1.4.3.38 Urusan Sekretariat Dewan**

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitas sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri. Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (*good Governance*).

#### **2.1.4.3.39 Urusan Pemerintahan Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik, dan juga di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada Tahun 2020 jumlah ormas yang aktif di Sulawesi Barat sebanyak 185 sedangkan jumlah ormas yang tidak aktif sebanyak 136 dari 311 ormas yang terdaftar. Berdasarkan tingkat keaktifan ormas, kabupaten Majene mencapai jumlah tertinggi yaitu 65 ormas dan mamasa berada pada tingkat terendah yaitu 9 ormas.

**Tabel 2.200 Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020**

No.	Kabupaten	Ormas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Majene	65	0	65
2.	Polewali Mandar	60	28	88
3.	Mamasa	9	0	9
4.	Mamuju	21	0	21
5.	Pasangkayu	20	53	73
6.	Mamuju Tengah	10	45	55
<b>Sulawesi Barat</b>		<b>185</b>	<b>126</b>	<b>311</b>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2022

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat 2021 sebesar 71,30 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 1,79 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Barat 2020 sebesar 73,09. Hal ini menunjukkan IDI di Provinsi Sulawesi Barat masih pada kategori “sedang”. Penurunan indeks demokrasi tersebut bisa menunjukkan adanya perubahan atau tantangan dalam aspek-aspek demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat selama periode tersebut.

Capaian IDI dari 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009, IDI Sulawesi Barat sebesar 67,99. Tahun 2010 turun menjadi 67,57, kembali turun pada 2011 menjadi 66,36, lalu kembali turun pada 2012 menjadi 63,65, kemudian tahun 2013 sedikit mengalami peningkatan menjadi 64,02, lalu tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 76,69, kemudian kembali turun pada tahun 2015 menjadi 68,25, dan pada tahun 2016 IDI Sulawesi Barat kembali meningkat menjadi 72,37. Pada tahun 2017, IDI Sulawesi Barat turun menjadi 67,74, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 71,46. Pada tahun 2019, IDI Sulawesi Barat kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,42, meski mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 73,09 dan kembali turun di tahun 2021 menjadi sebesar 71,30.

Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari tiga aspek yaitu Kebebasan Politik, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Pada nilai aspek kebebasan politik mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebesar 87,41 mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 81,58 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 86,38. Pada tahun 2021 nilai aspek yang tertinggi adalah pada aspek Hak-hak politik yaitu sebesar

81,75 persen. Adapun nilai aspek yang terendah yaitu pada aspek hak-hak politik yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sebesar 55,05 persen naik menjadi 70,22 persen tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan menjadi 61,09 persen dan menjadi yang tertinggi di tahun 2022 sebesar 83,64. Masih rendahnya nilai aspek tersebut perlu mendapat perhatian melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam politik khususnya dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

**Tabel 2.201 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek 2018–2022**

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Aspek				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kebebasan Politik	87.41	81.58	86.38	67,24	67,78
Hak-Hak Politik	55.05	70.22	61.09	81,75	83,46
Lembaga Demokrasi	77.45	83.60	75.45	62,80	68,90
Indeks Keseluruhan	71.46	77.42	73.09	71,30	74,03

Sumber: BPS, Sulbar.bps.go.id 2024

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD adalah proses penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini menghasilkan informasi kinerja yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat dan mendukung. Dengan adanya evaluasi, program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif, serta memiliki akuntabilitas yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran di semua tingkat pelaksanaan pembangunan dapat diukur dengan indikator kinerja yang telah didefinisikan sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan menggunakan Indikator Kinerja Utama, yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu.

Hasil evaluasi kinerja tahun lalu, selain mereview RPD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.202 EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2023  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab											
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp									
<b>Semua Bidang</b>																													
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	
												Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	90																
												Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	82																
												Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	85																
												Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	100	9.480.586.660	1.364.907.668	3.232.107.364	2.263.019.143	2.575.365.710		9.435.399.885	0,00%	99,52%	80,00	9.435.399.885					
												Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	0								0,00%		0,00						
Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	0								0,00%		0,00																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD (Poin)	20	-	-	-	-	19	19	93,75%	99,87%	18,75	274.941.300																	
													Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	8	275.311.300	156.496.750	30.220.000	16.075.000	6	72.149.550	68,75%	5,50							
													Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD (Poin)	29	-	-	-	-	27	27	93,10%	27,00							
													Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)	26	-	-	-	-	27	27	104,81%	27,25							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	194.046.900	2	149.378.350	-	17.720.000	2	9.675.000	-	17.265.550	4	194.038.900	100,00%	100,00%	4,00	194.038.900												
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	13.542.400	1	4.118.400	-	-	4.400.000	-	5.024.000	1	13.542.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.080.000	-	-	-	-	-	1	2.080.000	1	2.080.000	100,00%	100,00%	1,00	2.080.000														
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																1	3.000.000	1	3.000.000	-	-	-	-	-	1	3.000.000	100,00%	100,00%	1,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1.880.000	-	-	-	-	-	1	1.880.000	1	1.880.000	100,00%	100,00%	1,00	1.880.000														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																16	8.550.000	4	-	4	4.700.000	4	-	4	3.850.000	16	8.550.000	100,00%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	52.212.000	1	-	-	7.800.000	-	2.000.000	-	42.050.000	1	51.850.000	100,00%	99,31%	1,00														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup OPD (Persen)	100												
	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	100	6.622.986.853	853.366.606	2.547.254.827	1.488.459.217	1.703.566.110		6.592.646.760	0,00%	99,54%	0,00	6.592.646.760																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	6.611.136.853	65	851.494.206	65	2.547.254.827	65	1.488.459.217	65	1.693.588.510	65	6.580.796.760	100,00%	99,54%	65,00	6.580.796.760												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		1	4.350.000	-	-	-	-	1	4.350.000	1	4.350.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	7.500.000	4	1.872.400	5	-	4	-	5	5.627.600	18	7.500.000	100,00%	100,00%	18,00	7.500.000													
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	100	9.000.000	-	2.219.600	-	3.314.400	-	2.006.000	-	1.460.000	-	9.000.000	0,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	4.500.000	-	1.094.800	-	2.189.600	1	1.215.600	-	-	1	4.500.000	100,00%	100,00%	1,00	4.500.000													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	1	4.500.000	-	1.124.800	-	1.124.800	-	790.400	1	1.460.000	1	4.500.000	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I			II			III			IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Person)	100	295.967.191	-	75.457.446	-	92.355.000	-	76.245.000	-	50.442.000	-	294.499.446	0,00%	99,50%	0,00	294.499.446			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	153	141.095.000	-	68	64.850.000	85	76.245.000	-	-	153	141.095.000	100,00%	100,00%	153,00	141.095.000				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	9.300.000	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	1	5.400.000	1	9.300.000	100,00%	100,00%	1,00	9.300.000			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	4.500.000	1	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1	4.500.000	100,00%	100,00%	1,00	4.500.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	91	141.072.191	68	69.007.446	-	25.555.000	-	-	23	45.042.000	91	139.604.446	100,00%	98,96%	91,00	139.604.446			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Person)	100	832.558.360	-	136.017.996	-	260.736.457	-	172.102.067	-	261.091.882	-	829.948.402	0,00%	99,69%	0,00	829.948.402			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7.103.500	7	1.775.600	7	3.551.200	7	1.774.800	7	-	7	7.101.600	100,00%	99,97%	7,00	7.101.600			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	43.542.000	5	9.770.000	7	11.439.000	7	16.560.000	7	5.637.000	7	43.406.000	26,92%	99,69%	7,00	43.406.000			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	64.060.000	2	31.400.000	4	9.590.000	4	2.400.000	4	20.050.000	4	63.440.000	28,57%	99,03%	4,00	63.440.000			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	25	75.575.600	-	-	25	59.318.850	-	-	-	15.000.000	25	74.318.850	100,00%	98,34%	25,00	74.318.850			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	642.277.260	-	93.072.396	-	176.837.407	-	151.367.267	2	220.404.882	2	641.681.952	100,00%	99,91%	2,00	641.681.952			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Person)	100	299.068.080	-	-	-	-	-	290.209.880	-	8.360.000	-	298.569.880	0,00%	99,83%	0,00	298.569.880			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	34.510.000	-	-	-	-	1	34.510.000	-	-	1	34.510.000	100,00%	100,00%	1,00	34.510.000			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	8.111.880	-	-	-	-	2	8.111.880	-	-	2	8.111.880	100,00%	100,00%	2,00	8.111.880			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)	11	256.466.200	-	-	10	-	-	247.588.000	-	8.360.000	10	255.948.000	90,91%	99,80%	10,00	255.948.000			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Person)	100	489.268.876	-	88.801.866	-	112.224.085	-	99.993.605	-	180.712.535	-	481.732.091	0,00%	98,46%	0,00	481.732.091			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	157.761.000	-	19.400.000	-	36.152.000	-	24.150.000	1	78.059.000	1	157.761.000	100,00%	100,00%	1,00	157.761.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	148.685.976	-	34.802.266	-	18.272.485	-	46.243.605	1	41.831.235	1	141.149.591	100,00%	94,93%	1,00	141.149.591			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	182.821.900	-	34.599.600	-	57.799.600	-	29.600.000	1	60.822.300	1	182.821.500	100,00%	100,00%	1,00	182.821.500			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Person)	100	656.406.000	-	52.547.404	-	186.002.595	-	117.928.374	-	297.583.633	-	654.062.006	0,00%	99,64%	0,00	654.062.006			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	346.510.000	5	36.347.404	10	134.442.095	5	108.668.374	7	65.172.340	27	344.630.213	100,00%	99,46%	27,00	344.630.213			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	256.786.000	-	-	-	36.130.500	-	-	-	220.191.293	-	256.321.793	0,00%	99,82%	0,00	256.321.793			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	53.110.000	24	16.200.000	10	15.430.000	10	9.260.000	10	12.220.000	54	53.110.000	100,00%	100,00%	54,00	53.110.000			
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	96,23%	99,52%					
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab											
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp									
1	3	4	7	8								9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																										<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	68,5																										
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	90																										
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	90	35.920.682.953	5.904.269.884	10.812.621.249	8.613.107.015	10.448.335.190																					
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	90																										
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																												
		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	23																										
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	16																										
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	9	351.970.324	75.831.750	62.750.200	79.250.930	123.316.869																					
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	7,5																										
		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	16,9																										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	146.547.360	49.086.850	28.056.400	23.966.150	41.809.700																					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	16.359.980	-	7.294.600	3.548.600	5.513.000																					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.159.980	-	-	4.742.850	2.416.900																					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	7.279.980	-	-	-	7.279.850																					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	7.279.980	-	-	-	7.279.850																					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	8.515.190	2.875.400	5.632.250	-	8.507.650																					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	158.827.854	23.869.500	21.766.950	46.993.330	59.017.569																					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																												
		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD (Persen)	96																										
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	70	31.052.393.740	5.254.850.656	9.117.064.943	7.606.559.248	9.027.937.218																					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	168	30.435.583.809	5.146.919.273	8.974.381.936	7.506.088.423	8.786.885.113																					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	43.722.153	20.954.500	10.026.000	8.101.100	4.563.500																					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	206.029.335	24.507.483	39.501.107	15.562.965	107.735.795																					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	68.969.934	7.782.000	18.063.950	14.249.600	24.659.500																					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	40.151.810	10.570.000	20.117.950	9.453.860	-																					
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	36.305.800	3.316.100	7.936.300	13.045.150	11.927.310																					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	42.079.050	4.178.000	-	11.397.300	26.467.500																					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	179.551.849	36.623.300	47.037.700	28.661.250	65.698.500																					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	72.848.344	-	8.621.000	-	30.135.100	-	12.167.400	-	21.638.600	-	72.562.100	0,00%	99,61%	0,00	72.562.100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	72.848.344	3	8.621.000	6	30.135.100	9	12.167.400	12	21.638.600	12	72.562.100	100,00%	99,61%	12,00	72.562.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	85	377.689.360	-	35.129.074	-	69.746.120	-	194.440.468	-	69.326.760	-	368.642.422	0,00%	97,60%	0,00	368.642.422	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	15.325.270	-	2.525.500	-	6.066.950	-	2.527.600	1	4.203.600	1	15.323.650	100,00%	99,99%	1,00	15.323.650	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	168	127.500.000	-	-	168	-	168	127.372.500	168	-	168	127.372.500	100,00%	99,90%	168,00	127.372.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	129.217.510	2	12.182.400	4	39.628.300	5	45.168.100	9	27.369.000	9	124.347.800	128,57%	96,23%	9,00	124.347.800	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	75.558.080	1	13.293.174	1	17.503.470	1	11.777.068	1	28.956.560	1	71.530.272	100,00%	94,67%	1,00	71.530.272	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	30.088.500	3	7.128.000	6	6.547.400	9	7.595.200	12	8.797.600	12	30.068.200	100,00%	99,93%	12,00	30.068.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	988.761.881	-	126.039.545	-	317.820.493	-	291.929.748	-	239.830.289	-	975.620.075	0,00%	98,67%	0,00	975.620.075	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	27.889.500	1	18.294.870	1	3.821.000	1	-	1	5.735.000	1	27.850.870	100,00%	99,86%	1,00	27.850.870	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	178.744.000	1	43.607.000	2	41.502.700	3	48.518.000	3	45.034.000	3	178.661.700	150,00%	99,95%	3,00	178.661.700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	425.629.100	-	1.940.000	4	193.728.300	4	159.359.550	4	59.020.500	4	414.048.350	100,00%	97,28%	4,00	414.048.350	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	28	5.856.100	7	5.738.900	14	-	21	-	28	117.200	28	5.856.100	100,00%	100,00%	28,00	5.856.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	350.643.181	6	56.458.775	19	78.768.493	28	84.052.198	50	129.923.589	50	349.203.055	111,11%	99,59%	50,00	349.203.055	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	75	711.744.550	-	-	-	173.678.100	-	162.673.400	-	340.138.950	-	676.490.450	0,00%	95,05%	0,00	676.490.450	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	511.744.550	-	-	6	115.939.500	6	27.950.000	7	334.620.000	7	478.509.500	100,00%	93,51%	7,00	478.509.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	200.000.000	-	-	1	57.738.600	1	134.723.400	1	5.518.950	1	197.980.950	100,00%	98,99%	1,00	197.980.950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	708.784.714	-	152.856.288	-	191.209.385	-	170.328.187	-	188.282.020	-	702.675.880	0,00%	99,14%	0,00	702.675.880	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	21.920.180	3	6.704.200	6	4.736.000	9	2.130.000	12	8.345.450	12	21.915.650	100,00%	99,98%	12,00	21.915.650	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	686.864.534	18	146.152.088	36	186.473.385	54	168.198.187	72	179.936.570	72	680.760.230	100,00%	99,11%	72,00	680.760.230	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	1.656.490.040	-	250.941.571	-	850.216.908	-	95.757.634	-	437.864.484	-	1.634.780.597	0,00%	98,89%	0,00	1.634.780.597	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pajaknya (Unit)	29	199.988.950	7	47.995.611	17	48.223.568	24	44.765.656	29	49.808.022	29	190.792.857	100,00%	95,40%	29,00	190.792.857	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibavarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	52	202.410.050	12	62.079.260	27	52.048.140	42	33.686.978	52	54.276.497	52	202.090.875	100,00%	99,84%	52,00	202.090.875	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	940.103.000	-	116.965.500	1	722.517.150	2	-	2	99.079.965	2	938.562.615	100,00%	99,84%	2,00	938.562.615	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	313.988.040	1	23.901.200	2	27.428.050	3	17.305.000	4	234.700.000	4	303.334.250	100,00%	96,61%	4,00	303.334.250	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,46%	99,60%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab						
					I		II		III		IV														
					7		8		9		10									11		12		13=12/7x100%	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	3	4																	16						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	100		724.534.093		100,00%	98,42%	100,00	724.534.093	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)		100	736.158.598	255.584.273	198.979.798	142.406.982	127.563.040	100	724.534.093	100,00%	98,42%	100,00	724.534.093									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)		64,5	132.459.900	15	21.811.400	30	47.082.000	45	30.898.100	65	28.008.200	65	127.799.700	100,78%	96,48%	65,00	127.799.700					
Koordniasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	40.599.900	1	7.161.400	-	14.322.000	-	8.464.100	-	6.172.400	1	36.119.900	50,00%	88,97%	1,00	36.119.900					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3	91.860.000	1	14.650.000	-	32.760.000	-	22.434.000	-	21.835.800	1	91.679.800	33,33%	99,80%	1,00	91.679.800					
Koordniasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)		100	70.200.000	25	11.200.000	50	23.150.000	75	16.800.000	100	18.450.000	100	69.600.000	100,00%	99,15%	100,00	69.600.000					
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		3	70.200.000	1	11.200.000	-	23.150.000	-	16.800.000	-	18.450.000	1	69.600.000	33,33%	99,15%	1,00	69.600.000					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)		100	3.000.000	25	-	50	1.683.000	75	-	100	1.316.800	100	2.999.800	100,00%	99,99%	100,00	2.999.800					
Administrasi Kewagaian Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	3.000.000	-	-	-	1.683.000	-	-	-	1.316.800	-	2.999.800	0,00%	99,99%	0,00	2.999.800					
Penggadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)		100	52.145.000	25	36.750.000	50	5.295.000	75	2.520.000	100	2.580.000	100	47.145.000	100,00%	90,41%	100,00	47.145.000					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		47	37.245.000	11	36.750.000	-	495.000	-	-	-	-	11	37.245.000	23,40%	100,00%	11,00	37.245.000					
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		4	14.900.000	1	-	-	4.800.000	-	2.520.000	-	2.580.000	1	9.900.000	25,00%	66,44%	1,00	9.900.000					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)		100	377.106.800	25	171.570.073	50	79.776.150	75	66.151.973	100	58.682.498	100	376.180.694	100,00%	99,75%	100,00	376.180.694					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	127.448.016	-	119.184.700	-	5.704.700	-	1.483.000	-	1.074.700	-	127.447.100	0,00%	100,00%	0,00	127.447.100					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	34.000.000	-	3.851.800	-	14.609.350	-	5.200.300	-	10.277.850	-	33.939.300	0,00%	99,82%	0,00	33.939.300					
Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	10.001.300	-	475.000	-	2.790.000	-	1.290.000	-	5.446.000	-	10.001.000	0,00%	100,00%	0,00	10.001.000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	20.425.500	-	6.169.250	-	6.821.600	-	3.110.650	-	4.324.000	-	20.425.500	0,00%	100,00%	0,00	20.425.500					
Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		25	185.231.984	6	41.889.323	-	49.850.500	-	55.068.023	-	37.559.948	6	184.367.794	24,00%	99,53%	6,00	184.367.794					
Penggadaan Mebel			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			8.880.860	-	-	-	8.880.860	-	-	-	-	8.880.860	100,00%	-	-	8.880.860						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		1	8.880.860	-	-	-	8.880.860	-	-	-	-	8.880.860	0,00%	100,00%	0,00	8.880.860						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100	2.454.450	25	1.165.300	50	1.289.150	75	-	100	-	100	2.454.450	100,00%	100,00%	100,00	2.454.450					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	2.454.450	-	1.165.300	-	1.289.150	-	-	-	-	1	2.454.450	0,00%	100,00%	0,00	2.454.450					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100	89.911.588	25	13.087.500	50	31.823.638	75	26.036.909	100	18.525.542	100	89.473.589	100,00%	99,51%	100,00	89.473.589					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	20,57%	98,42%							
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah		Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	0,00%		100,00%		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI				
Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)			100														100,00%								
Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)			92		1.023.799.429		104.187.611		362.851.708		310.864.373		235.610.910		1.013.514.602		89,00%								
Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)			98														97,00%								
Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)			4,4														4,20								

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	22	311.391.260	24.909.400	133.160.450	70.123.700	78.096.100	306.289.650	0,00%	98,36%	0,00%	306.289.650	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	14,5	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	14	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	74.931.060	6.709.400	31.515.800	17.155.900	15.349.700	70.730.800	100,00%	94,39%	3,00	70.730.800	100,00%	94,39%	3,00	70.730.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	158.348.600	11.950.000	67.719.000	34.217.800	43.561.400	157.448.200	100,00%	99,43%	2,00	157.448.200	100,00%	99,43%	2,00	157.448.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	78.111.600	6.250.000	33.925.650	18.750.000	19.185.000	78.110.650	100,00%	100,00%	2,00	78.110.650	100,00%	100,00%	2,00	78.110.650	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	59.870.000	2.500.000	17.000.000	40.222.000	59.722.000	59.722.000	150,00%	99,75%	150,00	59.722.000	150,00%	99,75%	150,00	59.722.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	1,00	-	100,00%	0,00%	1,00	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	29	31.370.000	-	-	31.222.000	-	31.222.000	100,00%	99,53%	29,00	31.222.000	100,00%	99,53%	29,00	31.222.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	28.500.000	2.500.000	17.000.000	9.000.000	-	28.500.000	100,00%	100,00%	5,00	28.500.000	100,00%	100,00%	5,00	28.500.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	485.063.539	60.598.586	141.050.554	160.748.969	119.900.350	482.298.459	150,00%	99,43%	150,00	482.298.459	150,00%	99,43%	150,00	482.298.459	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.637.484	-	-	-	10.633.800	10.633.800	100,00%	99,97%	1,00	10.633.800	100,00%	99,97%	1,00	10.633.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	19	9.997.000	3.013.200	2.683.400	2.127.400	2.173.000	9.997.000	100,00%	100,00%	19,00	9.997.000	100,00%	100,00%	19,00	9.997.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	60.307.086	10.190.181	8.675.362	12.260.362	29.172.500	60.298.405	100,00%	99,99%	4,00	60.298.405	100,00%	99,99%	4,00	60.298.405	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	24.100.000	7.300.000	5.310.000	4.950.000	6.540.000	24.100.000	100,00%	100,00%	3,00	24.100.000	100,00%	100,00%	3,00	24.100.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15	83.483.251	3.993.450	38.027.600	17.050.500	24.400.500	83.472.050	100,00%	99,99%	15,00	83.472.050	100,00%	99,99%	15,00	83.472.050	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	243.894.100	34.229.995	65.212.972	116.015.297	28.304.560	243.762.824	100,00%	99,95%	30,00	243.762.824	100,00%	99,95%	30,00	243.762.824	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	4.244.618	-	-	3.839.750	403.650	4.243.400	100,00%	99,97%	3,00	4.243.400	100,00%	99,97%	3,00	4.243.400	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	48.400.000	1.871.760	2.141.220	4.505.660	18.272.340	45.790.980	100,00%	94,61%	1,00	45.790.980	100,00%	94,61%	1,00	45.790.980	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	66.124.630	1.744.950	32.198.100	16.832.850	15.348.000	66.123.900	175,00%	100,00%	175,00	66.123.900	175,00%	100,00%	175,00	66.123.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	66.124.630	1.744.950	32.198.100	16.832.850	15.348.000	66.123.900	100,00%	100,00%	2,00	66.123.900	100,00%	100,00%	2,00	66.123.900	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	101.350.000	14.434.675	39.442.604	22.936.854	22.266.460	99.080.593	200,00%	97,76%	200,00	99.080.593	200,00%	97,76%	200,00	99.080.593	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	88.030.000	14.434.675	26.122.604	22.936.854	22.266.460	85.760.593	100,00%	97,42%	5,00	85.760.593	100,00%	97,42%	5,00	85.760.593	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	13.320.000	-	13.320.000	-	-	13.320.000	100,00%	100,00%	2,00	13.320.000	100,00%	100,00%	2,00	13.320.000	
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	99,00%						
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		1.155.983.447	54.494.000	237.097.417	298.981.221	478.149.284	1.068.721.922	92,45%	1.068.721.922								
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		203.677.047	12.860.000	36.000.000	34.922.500	90.311.500	174.094.000	85,48%	174.094.000								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	121.745.047	-	19.750.000	26.172.500	46.239.500	92.162.000	33,33%	75,70%	1,00	92.162.000	33,33%	75,70%	1,00	92.162.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	14.930.000	1	7.430.000	-	3.750.000	-	3.750.000	-	-	1	14.930.000	100,00%	100,00%	1,00	14.930.000	KESRA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.480.000	-	-	-	-	-	-	1	15.480.000	1	15.480.000	100,00%	100,00%	1,00	15.480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.430.000	1	5.430.000	-	-	-	-	-	-	1	5.430.000	100,00%	100,00%	1,00	5.430.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.432.000	-	-	-	-	-	-	1	6.432.000	1	6.432.000	100,00%	100,00%	1,00	6.432.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	35.430.000	-	-	12.500.000	-	5.000.000	1	17.930.000	1	35.430.000	100,00%	100,00%	1,00	35.430.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4.230.000	-	-	-	-	-	1	4.230.000	1	4.230.000	100,00%	100,00%	1,00	4.230.000		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			4.520.000		-					4.520.000		4.520.000		100,00%		4.520.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.200.000	-	-	-	-	-	1	1.200.000	1	1.200.000	100,00%	100,00%	1,00	1.200.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	3.320.000	-	-	-	-	-	2	3.320.000	2	3.320.000	100,00%	100,00%	2,00	3.320.000		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			136.629.000		-	24.370.000		17.570.000		67.832.618		109.772.618		80,34%		109.772.618		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	38.000.000	-	-	-	-	-	1	38.000.000	1	38.000.000	100,00%	100,00%	1,00	38.000.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	59.345.000	-	-	22.000.000	-	14.020.000	1	23.325.000	1	59.345.000	100,00%	100,00%	1,00	59.345.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	-		-		-		-		0,00%		-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	39.284.000	-	-	2.370.000	-	3.550.000	-	6.507.618	2	12.427.618	100,00%	31,64%	2,00	12.427.618		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			623.949.700		34.034.200		132.584.530		185.038.276		247.033.784		598.690.790		95,95%		598.690.790	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	103.600.000	-	13.660.000	-	6.915.000	-	7.170.000	2	75.793.000	2	103.538.000	100,00%	99,94%	2,00	103.538.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.700.000	-	-	1	-	-	5.350.000	1	20.350.000	2	25.700.000	100,00%	100,00%	2,00	25.700.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	62.023.900	-	16.579.200	1	9.584.250	-	19.308.400	1	16.518.700	2	61.990.550	100,00%	99,95%	2,00	61.990.550	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	56	432.625.800	1	3.795.000	13	116.085.280	32	153.209.876	-	134.372.084	46	407.462.240	82,14%	94,18%	46,00	407.462.240	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			59.358.700		-			42.253.000		14.663.964		56.916.964		95,89%		56.916.964		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	31.672.000	-	-	1	-	-	31.500.000	-	100.000	1	31.600.000	100,00%	99,77%	1,00	31.600.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	16.933.700	-	-	-	-	-	-	-	14.563.964	-	14.563.964	0,00%	86,01%	0,00	14.563.964	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.753.000	1	-	-	-	-	10.753.000	-	-	1	10.753.000	100,00%	100,00%	1,00	10.753.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			-		-			-		-		-		0,00%		-		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			127.849.000		7.599.800		44.142.887		19.197.445		53.787.418		124.727.550		97,56%		124.727.550	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	99.614.000	1	4.469.800	1	42.642.887	2	19.197.445	-	30.183.168	4	96.493.300	100,00%	96,87%	4,00	96.493.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	23.965.000	-	3.130.000	1	-	-	-	1	20.834.250	2	23.964.250	100,00%	100,00%	2,00	23.964.250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4.270.000	-	-	1	1.500.000	-	-	1	2.770.000	2	4.270.000	100,00%	100,00%	2,00	4.270.000	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												84,83%	92,45%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	82									80		97,56%			82,00		SEKRETARI AT DAERAH BIRO UMUM
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	825									-		0,00%			82,00		
		Nilai Rapor SFBE Lingkup OPD (Poin)	4	100.114.102.527	19.731.139.887	28.195.748.732	22.389.994.287	29.047.984.029	99.364.866.935	88,50%	99,25%	4,00	99.364.866.935	100,00%	100,00%	4,00	99.364.866.935		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	100									93		93,33%			100,00		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	100									48		48,05%			100,00		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	25									-		0,00%			0,00		
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	21	644.186.100	129.417.525	144.439.225	120.124.600	246.945.622	640.926.972	0,00%	99,49%	0,00	640.926.972	100,00%	100,00%	0,00	640.926.972		
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	12,5									-		0,00%			0,00		
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	15									-		0,00%			0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	271.207.400	5	29.903.475	1	74.890.400	-	63.686.225	1	100.035.235	7	268.515.335	100,00%	99,01%	7,00	268.515.335	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	43.382.100	1	43.381.675	-	-	-	-	-	-	1	43.381.675	100,00%	100,00%	1,00	43.381.675	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	67.131.900	-	-	-	27.736.800	-	18.039.000	1	21.355.225	1	67.131.025	100,00%	100,00%	1,00	67.131.025	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	16.199.250	1	16.199.100	-	-	-	-	-	-	1	16.199.100	100,00%	100,00%	1,00	16.199.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	22.551.350	-	-	-	7.654.700	-	-	1	14.895.300	1	22.550.000	100,00%	99,99%	1,00	22.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	43.994.150	2	13.460.975	-	6.170.950	-	9.412.300	-	14.948.600	2	43.992.825	100,00%	100,00%	2,00	43.992.825	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	179.719.950	2	26.472.300	4	27.986.375	-	28.987.075	1	95.711.262	7	179.157.012	100,00%	99,69%	7,00	179.157.012	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100		20		48		71		91		91	91,24%			91,24		
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	100	30.059.674.133	58	3.873.204.628	72	11.099.115.072	82	7.184.740.829	98	7.837.309.442	98	29.994.369.971	98,00%	99,78%	98,00	29.994.369.971	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3360	28.107.523.093	1.073	3.536.109.028	850	10.694.891.247	800	6.671.149.827	630	7.148.560.919	3.353	28.050.711.021	99,79%	99,80%	3353,00	28.050.711.021	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100	206.118.950	-	30.342.325	100	58.679.550	-	51.188.175	-	65.374.400	100	205.584.450	100,00%	99,74%	100,00	205.584.450	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2450	1.289.483.290	900	194.323.775	726	244.912.125	400	361.162.427	400	488.132.973	2.426	1.288.531.300	99,02%	99,93%	2426,00	1.288.531.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	230.643.600	-	40.164.100	1	60.897.550	-	51.063.100	-	71.776.250	1	223.901.000	100,00%	97,08%	1,00	223.901.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	62.789.700	1	21.964.750	-	10.714.400	-	13.268.500	1	16.834.750	2	62.782.400	100,00%	99,99%	2,00	62.782.400	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	87.050.400	1	26.782.275	4	15.102.150	-	21.285.900	-	23.812.300	5	86.982.625	100,00%	99,92%	5,00	86.982.625	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16	76.065.100	4	23.518.375	4	13.918.050	4	15.622.900	4	22.817.850	16	75.877.175	100,00%	99,75%	16,00	75.877.175	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)</b>	100	5.119.682.670	14	729.130.175	34	1.018.175.425	54	1.098.850.146	76	1.823.283.683	76	4.669.439.429	76,30%	91,21%	76,30	4.669.439.429	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30	370.053.790	15	39.972.350	15	113.515.950	-	85.676.465	-	128.918.000	30	368.082.765	100,00%	99,47%	30,00	368.082.765	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2.698.612.850	4	372.482.750	-	515.947.425	-	512.327.000	-	860.353.475	4	2.261.110.650	100,00%	83,79%	4,00	2.261.110.650	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4	192.340.810	1	41.347.350	1	37.454.350	1	35.728.150	1	73.204.640	4	187.734.490	100,00%	97,61%	4,00	187.734.490	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	1.083.753.280	2	157.293.675	2	213.968.525	1	274.533.307	1	437.225.653	6	1.083.011.160	100,00%	99,93%	6,00	1.083.011.160	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	72	116.538.050	25	36.444.800	12	19.388.450	20	30.180.000	15	30.379.000	72	116.392.250	100,00%	99,87%	72,00	116.392.250	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	371.114.010	2	45.147.250	-	67.836.350	-	93.928.620	-	159.815.900	2	366.728.120	100,00%	98,82%	2,00	366.728.120	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	40	287.269.880	12	36.442.000	12	50.074.375	12	66.476.604	4	133.387.015	40	286.379.994	100,00%	99,69%	40,00	286.379.994	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persen)</b>	100	97.792.750	14	15.787.000	33	20.034.600	72	38.050.516	95	22.954.450	95	96.826.566	95,13%	99,01%	95,13	96.826.566	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	97.792.750	1	15.787.000	-	20.034.600	-	38.050.516	-	22.954.450	1	96.826.566	100,00%	99,01%	1,00	96.826.566	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)</b>	100	1.361.610.100	8	124.489.219	33	360.692.231	55	210.292.694	70	652.991.432	70	1.348.465.576	70,00%	99,03%	70,00	1.348.465.576	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6	392.267.800	-	-	-	-	-	-	6	392.226.800	6	392.226.800	100,00%	99,99%	6,00	392.226.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	142.057.900	1	17.152.125	-	46.511.925	-	51.373.875	-	26.630.775	1	141.668.700	100,00%	99,73%	1,00	141.668.700	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	27	221.141.050	5	25.167.525	9	43.632.700	6	46.779.126	7	105.487.650	27	221.067.001	100,00%	99,97%	27,00	221.067.001	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	75	66.462.650	75	19.604.625	-	15.086.025	-	14.926.575	-	16.804.475	75	66.421.700	100,00%	99,94%	75,00	66.421.700	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	34.160.000	-	-	1	16.186.775	-	17.000.000	1	925.925	2	34.112.700	100,00%	99,86%	2,00	34.112.700	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	240	505.520.700	55	62.564.944	-	239.274.806	-	80.213.118	185	110.915.807	240	492.968.675	100,00%	97,52%	240,00	492.968.675	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)</b>	100	12.077.334.592	35	3.882.183.695	60	2.732.164.262	72	2.473.721.379	93	2.988.433.612	93	12.076.502.948	92,58%	99,99%	92,58	12.076.502.948	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	1.756.897.830	5	364.413.300	18	235.177.150	3	324.220.500	-	833.032.450	26	1.756.843.400	104,00%	100,00%	26,00	1.756.843.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	15	722.480.215	5	204.943.115	10	152.957.150	-	148.858.010	-	215.539.575	15	722.297.850	100,00%	99,97%	15,00	722.297.850	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.365.301.937	2	2.235.698.957	-	1.155.588.158	-	1.129.257.233	-	844.687.100	2	5.365.231.448	100,00%	100,00%	2,00	5.365.231.448	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	287.427.000	5	91.209.525	7	54.096.150	-	17.528.950	-	124.538.705	12	287.373.330	100,00%	99,98%	12,00	287.373.330	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	2.975.188.300	3	936.512.199	3	879.120.884	3	542.728.668	3	616.742.790	12	2.975.104.541	100,00%	100,00%	12,00	2.975.104.541	

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	908.311.760	3	30.288.274	3	248.494.170	3	294.365.043	3	334.845.017	12	907.992.504	100,00%	99,96%	12,00	907.992.504	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	61.727.550	1	19.118.325	-	6.730.600	-	16.762.975	-	19.047.975	1	61.659.875	100,00%	99,89%	1,00	61.659.875	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	5.880.638.250	7	409.963.700	24	954.445.300	65	1.628.519.880	92	2.814.156.052	92	5.807.084.932	92,24%	98,75%	92,24	5.807.084.932	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	1	1.394.200.000	1	1.394.200.000	100,00%	99,59%	1,00	1.394.200.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	485	4.480.638.250	-	409.963.700	299	954.445.300	-	1.628.519.880	186	1.419.956.052	485	4.412.884.932	100,00%	98,49%	485,00	4.412.884.932	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	4.874.802.532	16	724.004.871	44	1.218.344.036	69	1.144.707.755	85	1.759.915.954	85	4.846.972.616	84,68%	99,43%	84,68	4.846.972.616	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	446.715.548	3	118.782.400	3	94.861.675	3	125.760.475	3	103.285.800	12	442.690.350	100,00%	99,10%	12,00	442.690.350	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	2.739.637.052	4	605.222.471	-	616.951.106	-	664.375.401	-	829.295.771	4	2.715.844.749	100,00%	99,13%	4,00	2.715.844.749	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.688.449.932	1	-	-	506.531.255	-	354.571.879	-	827.334.383	1	1.688.437.517	100,00%	100,00%	1,00	1.688.437.517	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	10.601.616.300	27	2.659.993.568	54	2.684.519.064	67	1.931.213.925	90	3.304.573.496	90	10.580.300.053	89,70%	99,80%	89,70	10.580.300.053	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	1.096.947.700	4	315.198.101	6	202.813.860	1	219.933.166	1	358.325.027	12	1.096.270.154	100,00%	99,94%	12,00	1.096.270.154	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	124	3.265.601.200	25	873.455.717	16	1.020.245.504	48	444.282.132	35	926.532.343	124	3.264.515.696	100,00%	99,97%	124,00	3.264.515.696	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	2.191.007.400	40	638.292.750	15	362.685.950	10	518.197.900	5	670.271.353	70	2.189.447.953	100,00%	99,93%	70,00	2.189.447.953	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	4.048.060.000	6	833.047.000	6	1.098.773.750	-	748.800.727	-	1.349.444.773	12	4.030.066.250	100,00%	99,56%	12,00	4.030.066.250	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100	1.079.280.917	25	188.547.243	45	268.229.698	65	269.362.984	92	344.602.025	92	1.070.741.950	91,76%	99,21%	91,76	1.070.741.950	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	12	71.619.917	3	16.520.758	3	21.726.000	3	16.294.500	3	16.294.500	12	70.835.758	100,00%	98,91%	12,00	70.835.758	
	Palaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	1	7.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	12	1.000.000.000	3	172.026.485	3	246.503.698	3	253.068.484	3	328.307.525	12	999.906.192	100,00%	99,99%	12,00	999.906.192	
	<b>Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah (Persen)	100	14.125.336.440	31	4.236.672.775	56	3.401.383.224	77	3.083.608.513	91	3.375.066.651	91	14.096.731.163	90,71%	99,80%	90,71	14.096.731.163	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4	5.471.021.300	2	1.543.834.275	2	1.434.139.442	-	1.242.400.622	-	1.246.698.310	4	5.467.072.649	100,00%	99,93%	4,00	5.467.072.649	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	8	8.654.315.140	4	2.692.838.500	2	1.967.243.782	-	1.841.207.891	2	2.128.368.341	8	8.629.658.514	100,00%	99,72%	8,00	8.629.658.514	
	<b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100	8.184.988.298	8	788.508.617	35	2.634.861.655	70	2.321.411.357	91	2.402.839.893	91	8.147.621.522	91,13%	99,54%	91,13	8.147.621.522	
	Penyiapan Materi Pimpinan	umlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	150	155.707.000	24	22.854.600	33	51.856.800	21	10.701.000	70	68.747.450	148	154.159.850	98,67%	99,01%	148,00	154.159.850	
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	800	7.597.941.698	200	732.719.892	170	2.456.207.783	269	2.261.677.416	100	2.114.141.147	739	7.564.746.238	92,38%	99,56%	739,00	7.564.746.238	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	1200	431.339.600	350	32.934.125	200	126.797.072	410	49.032.941	232	219.951.296	1.192	428.715.434	99,33%	99,39%	1192,00	428.715.434	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab								
				I		II		III		IV			12		14 = 6 + 12										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp									
1	3	4	7	8								9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	Persentase Pengelolaan Fasilitas Keprotokolan (Persen)	100	6.007.159.445	32	1.969.236.871	60	1.659.344.940	73	885.389.709	92	1.474.911.717	92	5.988.883.237	91,89%	99,70%	91,89	5.988.883.237							
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	800	1.082.850.400	200	104.305.150	170	287.986.600	269	205.932.983	100	469.453.682	739	1.067.678.415	92,38%	98,60%	739,00	1.067.678.415							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	4.012.636.745	3	1.820.366.021	3	1.005.033.450	3	495.944.066	3	691.150.585	12	4.012.494.122	100,00%	100,00%	12,00	4.012.494.122							
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	750	911.672.300	200	44.565.700	170	366.324.890	269	183.512.660	100	314.307.450	739	908.710.700	98,53%	99,68%	739,00	908.710.700							
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	80	13.347.318.520		1.064.242.510		4.512.409.472		4.252.305.847		3.486.663.638	-	13.315.621.467	0,00%	99,76%	80,00	13.315.621.467	INSPEKTOR AT DAERAH						
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	25	162.827.121	-	26.886.000	-	55.666.500	25	42.580.000	-	36.798.700	-	161.931.200	0,00%	99,45%	0,00	161.931.200							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			53.577.121		10.139.200		28.166.500		9.600.000		4.800.000		52.705.700		98,37%		52.705.700							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			16.500.000		4.000.000		2.500.000		6.250.000		3.750.000		16.500.000		100,00%		16.500.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			15.250.000		2.500.000		5.000.000		3.750.000		4.000.000		15.250.000		100,00%		15.250.000							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.250.000		2.746.800		5.000.000		3.750.000		3.750.000		15.246.800		99,98%		15.246.800							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			23.000.000		2.500.000		5.000.000		11.730.000		3.750.000		22.980.000		99,91%		22.980.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.250.000		2.500.000		5.000.000		3.750.000		3.999.700		15.249.700		100,00%		15.249.700							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.000.000		2.500.000		5.000.000		3.750.000		12.749.000		23.999.000		100,00%		23.999.000							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	100	10.338.280.249	25	748.090.997	50	3.231.050.429	75	3.638.866.700	100	2.692.799.635	100	10.310.807.761	100,00%	99,73%	100,00	10.310.807.761							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.282.780.249		740.590.997		3.215.064.429		3.620.561.206		2.680.155.135		10.256.371.767		99,74%		10.256.371.767							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			20.000.000		2.500.000		5.986.000		5.439.494		5.030.500		18.955.994		94,78%		18.955.994							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			35.500.000		5.000.000		10.000.000		12.866.000		7.614.000		35.480.000		99,94%		35.480.000							
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	22.400.000	25	-	50	8.400.000	75	4.400.000	100	9.599.000	100	22.399.000	100,00%	100,00%	100,00	22.399.000							
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			22.400.000		-		8.400.000		4.400.000		9.599.000		22.399.000		100,00%		22.399.000							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	572.558.460	25	48.291.000	50	336.827.858	75	98.456.023	100	88.244.398	100	571.819.279	100,00%	99,87%	100,00	571.819.279							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			152.400.000		-		151.500.000		200.000		700.000		152.400.000		100,00%		152.400.000							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			280.311.400		28.007.000		124.485.208		85.036.280		42.218.598		279.747.086		99,80%		279.747.086							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			92.239.000		20.284.000		39.397.650		10.099.743		22.384.800		92.166.193		99,92%		92.166.193							
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			47.608.060		-		21.445.000		3.120.000		22.941.000		47.506.000		99,79%		47.506.000							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	735.644.661	25	99.273.897	50	184.418.628	75	155.094.748	100	296.187.759	100	734.975.032	100,00%	99,91%	100,00	734.975.032							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.597.000		1.369.500		800.000		179.900		3.247.600		5.597.000		100,00%		5.597.000							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			109.500.000		24.500.000		26.679.913		22.151.487		36.168.600		109.500.000		100,00%		109.500.000							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			43.550.000		9.107.750		-		20.021.550		14.420.700		43.550.000		100,00%		43.550.000							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.540.000		-		3.900.000		2.670.000		1.950.000		8.520.000		99,77%		8.520.000							
	Penyediaan Bahan/Material			125.590.181		31.393.726		24.887.000		27.972.500		41.336.303		125.589.529		100,00%		125.589.529							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			442.867.480		32.902.921		128.151.715		82.099.311		199.064.556		442.218.503		99,85%		442.218.503							
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	593.460.830	25	4.013.000	50	485.372.154	75	2.941.000	100	100.085.500	100	592.411.654	100,00%	99,82%	100,00	592.411.654							
	Pengadaan Mebel			132.961.590		1.072.000		35.112.840		-		95.995.000		132.179.840		99,41%		132.179.840							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			388.614.640		-		384.259.314		-		4.090.500		388.349.814		99,93%		388.349.814							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab												
				I		II		III		IV			12		14 = 6 + 12														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp										
1	3	4	7	8								9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			71.884.600		2.941.000		66.000.000		2.941.000		-		71.882.000		100,00%		71.882.000		100,00%		71.882.000							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	279.572.770	25	50.174.343	50	76.030.240	75	72.484.360	100	80.824.124	100	279.513.067	100,00%	99,98%	100,00	279.513.067		99,98%		279.513.067							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38.000.000		6.999.000		10.500.000		10.985.000		9.515.000		37.999.000		100,00%		37.999.000		100,00%		37.999.000							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			97.322.770		18.356.543		19.863.240		26.299.360		32.744.924		97.264.067		99,94%		97.264.067		99,94%		97.264.067							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			144.250.000		24.818.800		45.667.000		35.200.000		38.564.200		144.250.000		100,00%		144.250.000		100,00%		144.250.000							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	642.574.429	25	87.513.273	50	134.643.663	75	237.483.016	100	182.124.522	100	641.764.474	100,00%	99,87%	100,00	641.764.474		99,87%		641.764.474							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			62.180.000		6.908.469		15.383.750		25.432.828		14.454.000		62.179.047		100,00%		62.179.047		100,00%		62.179.047							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			203.230.000		26.634.204		30.586.721		36.907.896		108.531.522		202.660.343		99,72%		202.660.343		99,72%		202.660.343							
	Pemeliharaan Mebel			22.500.000		5.000.000		-		7.864.500		9.600.000		22.464.500		99,84%		22.464.500		99,84%		22.464.500							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			71.350.000		18.931.300		10.740.200		21.757.500		19.915.000		71.344.000		99,99%		71.344.000		99,99%		71.344.000							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			257.133.229		23.769.300		77.232.992		133.307.292		22.630.000		256.939.584		99,92%		256.939.584		99,92%		256.939.584							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			26.181.200		6.270.000		700.000		12.213.000		6.994.000		26.177.000		99,98%		26.177.000		99,98%		26.177.000							
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%		99,76%										
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Tinggi										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	100													0,00%		50,00											
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	70,2													0,00%		35,05											
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	80	59.156.935.159		9.623.829.879		15.643.387.859		15.509.057.245		18.133.948.657		58.910.223.640		0,00%	99,58%	37,50	58.910.223.640										
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	70													0,00%		32,50											
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	99													0,00%		49,00											
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	23,15						25		25		25		107,99%		25,00												
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	20	1.224.533.790		221.277.400		162.780.308		21	193.002.000		21	647.242.450		21	1.224.302.158		105,00%	99,98%		21,00	1.224.302.158						
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	7,94							13		13				13		157,43%			12,50								
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	3,92							20		20				20		510,20%			20,00								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	661.987.540		181.295.800		162.780.308		2	153.435.500		164.244.300		2	661.755.908	100,00%	99,97%	2,00	661.755.908									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	101.298.700		-		-		-		1	101.298.700		1	101.298.700	100,00%	100,00%	1,00	101.298.700									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	96.658.900		-		-		-		1	96.658.900		1	96.658.900	100,00%	100,00%	1,00	96.658.900									
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	102.226.400	1	-		-		-		-	102.226.400		1	102.226.400	100,00%	100,00%	1,00	102.226.400									
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	93.326.800		-		-		-		1	93.326.800		1	93.326.800	100,00%	100,00%	1,00	93.326.800									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	74.870.650	1	20.982.000	1	-	1	21.016.500	1	32.872.150	4	74.870.650	100,00%	100,00%	4,00	74.870.650											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	94.164.800	2	18.999.600		-		-		18.550.000		56.615.200		2	94.164.800	100,00%	100,00%	2,00	94.164.800								
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	9.762.015.652	17	1.463.690.176	41	3.538.492.891	66	2.207.518.942	100	2.519.880.945	100	9.729.582.954	99,71%	99,67%	99,71	9.729.582.954		99,71%		9.729.582.954							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	102	8.866.467.222	101	1.277.020.476	101	3.479.645.091	100	1.930.393.042	99	2.147.287.200	100	8.834.345.809	98,28%	99,64%	100,25	8.834.345.809		98,28%		8.834.345.809							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	99	130.319.930	25	33.554.000	25	14.280.000	30	17.463.500	19	64.711.250	99	130.008.750	100,00%	99,76%	99,00	130.008.750		99,76%		130.008.750							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	240.695.200	3	20.937.800	3	42.027.800	3	114.292.000	3	63.437.600	12	240.695.200	100,00%	100,00%	12,00	240.695.200	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	144.485.950	3	36.557.800	3	-	3	36.567.200	3	71.360.950	12	144.485.950	100,00%	100,00%	12,00	144.485.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	95.103.600	1	21.729.500	-	2.540.000	-	18.712.800	-	52.121.195	1	95.103.495	100,00%	100,00%	1,00	95.103.495	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	100.988.700	1	26.230.600	-	-	-	32.347.000	1	42.411.100	2	100.988.700	100,00%	100,00%	2,00	100.988.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	103.475.750	3	27.327.500	3	-	4	32.678.100	3	43.470.150	13	103.475.750	100,00%	100,00%	13,00	103.475.750	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	80.479.300	3	20.332.500	3	-	3	25.065.300	3	35.081.500	12	80.479.300	100,00%	100,00%	12,00	80.479.300	
	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependidikan Lingkup SKPD (Persen)	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependidikan Lingkup SKPD (Persen)	100	4.028.138.080	100	170.920.040	100	1.599.246.130	100	1.916.869.350	100	335.694.135	100	4.022.729.655	100,00%	99,87%	100,00	4.022.729.655	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	277	123.372.000	-	-	-	-	106	80.100.000	171	42.222.000	277	122.322.000	100,00%	99,15%	277,00	122.322.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21600	3.645.909.680	-	-	10.800	1.554.529.950	10.800	1.836.769.350	-	250.344.735	21.600	3.641.644.035	100,00%	99,88%	21600,00	3.641.644.035	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	258.856.400	10	170.920.040	10	44.716.180	10	-	10	43.127.400	40	258.763.620	100,00%	99,96%	40,00	258.763.620	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	7.471.572.066	25	957.072.986	50	1.130.642.333	75	2.063.246.179	100	3.316.939.933	100	7.467.901.431	100,00%	99,95%	100,00	7.467.901.431	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	275.561.120	1	104.356.000	1	104.356.000	1	-	1	66.848.000	1	275.560.000	100,00%	100,00%	1,00	275.560.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	5	357.920.700	5	250.221.000	5	6.900.000	5	800.000	5	99.965.200	5	357.866.200	100,00%	99,99%	5,00	357.866.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5.224.159.000	6	446.717.840	6	583.904.178	6	1.860.061.179	6	2.333.452.938	6	5.224.136.135	100,00%	100,00%	6,00	5.224.136.135	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	205.950.000	1	-	1	58.250.000	1	75.029.000	-	72.671.000	3	205.950.000	100,00%	100,00%	3,00	205.950.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	50.702.550	-	-	-	-	-	-	1	48.891.550	1	48.891.550	100,00%	96,43%	1,00	48.891.550	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	255.845.946	-	-	1	97.989.900	1	76.020.000	1	81.835.900	1	255.845.800	75,00%	100,00%	0,75	255.845.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	244	1.101.432.750	35	155.778.146	35	279.242.255	30	51.336.000	144	613.275.345	244	1.099.631.746	100,00%	99,84%	244,00	1.099.631.746	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah (Persen)	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah (Persen)	100	2.268.628.518	-	-	-	49.800.000	50	1.269.943.900	100	922.267.000	100	2.242.010.900	100,00%	98,83%	100,00	2.242.010.900	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	38.388.000	-	-	-	-	-	9.232.900	1	25.000.000	1	34.232.900	100,00%	89,18%	1,00	34.232.900	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	70	932.808.768	-	-	-	-	19	478.772.500	51	439.397.600	70	918.170.100	100,00%	98,43%	70,00	918.170.100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	46	1.297.431.750	-	-	1	49.800.000	24	781.938.500	21	457.869.400	46	1.289.607.900	100,00%	99,40%	46,00	1.289.607.900	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (Persen)	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah (Persen)	100	3.345.461.790	25	482.336.592	50	1.063.864.961	75	620.489.088	100	1.171.886.371	100	3.338.577.012	100,00%	99,79%	100,00	3.338.577.012	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	107.012.300	3	-	3	34.839.000	3	36.462.400	3	35.710.900	12	107.012.300	100,00%	100,00%	12,00	107.012.300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	1.642.210.040	5	272.267.666	5	408.087.712	5	307.719.057	5	653.704.198	5	1.641.778.633	100,00%	99,97%	5,00	1.641.778.633	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	1.596.239.450	3	210.068.926	2	620.938.249	2	276.307.631	2	482.471.273	9	1.589.786.079	100,00%	99,60%	9,00	1.589.786.079	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	2.976.518.000	15	442.051.034	50	984.447.133	75	489.564.283	100	1.060.366.645	100	2.976.429.095	100,00%	100,00%	100,00	2.976.429.095	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	442.837.200	2	108.505.672	2	143.824.390	4	84.157.670	2	106.345.621	10	442.833.353	100,00%	100,00%	10,00	442.833.353	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	166	928.385.400	15	135.454.362	65	362.638.943	30	94.299.863	56	335.990.774	166	928.383.942	100,00%	100,00%	166,00	928.383.942	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1.115.018.000	1	171.255.000	-	285.382.000	2	241.434.750	2	416.938.250	5	1.115.010.000	100,00%	100,00%	5,00	1.115.010.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	147	133.173.800	30	26.836.000	50	26.836.000	30	6.170.000	37	73.306.000	147	133.148.000	100,00%	99,98%	147,00	133.148.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18	357.103.600	-	-	6	165.765.800	4	63.502.000	8	127.786.000	18	357.053.800	100,00%	99,99%	18,00	357.053.800	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tepat Waktu (Persen)	100	22.700.019.273	25	5.401.769.651	50	5.640.096.023	75	5.516.830.855	100	5.970.862.143	100	22.529.558.672	100,00%	99,25%	100,00	22.529.558.672	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	22.021.231.573	45	5.387.040.851	45	5.632.689.823	45	5.457.236.805	45	5.407.764.143	45	21.884.731.622	100,00%	99,38%	45,00	21.884.731.622	
	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	118	341.000.000	-	-	-	-	-	-	118	338.880.000	118	338.880.000	100,00%	99,38%	118,00	338.880.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	337.787.700	2	14.728.800	1	7.406.200	7	59.594.050	35	224.218.000	45	305.947.050	100,00%	90,57%	45,00	305.947.050	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD (Persen)	100	5.380.047.990	25	484.712.000	50	1.474.018.080	75	1.231.592.648	100	2.188.809.035	100	5.379.131.763	100,00%	99,98%	100,00	5.379.131.763	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	45	1.294.966.990	15	265.780.000	10	384.231.330	10	378.652.898	10	266.265.400	45	1.294.929.628	100,00%	100,00%	45,00	1.294.929.628	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	8	186.304.000	2	20.000.000	1	34.326.000	3	55.695.000	2	76.283.000	8	186.304.000	100,00%	100,00%	8,00	186.304.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	321	571.355.000	-	-	90	186.594.750	90	182.862.250	141	201.858.500	321	571.315.500	100,00%	99,99%	321,00	571.315.500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4	3.327.422.000	4	198.932.000	4	868.866.000	4	614.382.500	4	1.644.402.135	4	3.326.582.635	100,00%	99,97%	4,00	3.326.582.635	
														99,63%	99,58%				
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	76															73,00	
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	74	13.560.988.989		2.527.086.657		4.803.591.556		3.543.348.676		2.678.025.077		13.552.051.966		0,00%	99,93%	72,50	13.552.051.966
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	4,2												0,00%		4,10		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	93												0,00%		92,00		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	64,05	116.837.548	16	29.587.700	16	31.103.600	16	21.351.875	16	33.163.200	16	115.206.375	25,18%	98,60%	16,13	115.206.375	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	54.206.400	1	19.520.700	-	14.385.700	-	8.700.000	1	11.600.000	2	54.206.400	100,00%	100,00%	2,00	54.206.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	14.942.000	1	7.942.000	-	5.600.000	-	1.400.000	-	-	1	14.942.000	100,00%	100,00%	1,00	14.942.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.643.322	-	-	-	-	-	2.800.000	1	8.842.800	1	11.642.800	100,00%	100,00%	1,00	11.642.800	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.410.400	-	-	1	2.930.400	-	480.000	-	-	1	3.410.400	100,00%	100,00%	1,00	3.410.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.908.000	-	-	-	-	1	-	-	1.908.000	1	1.908.000	100,00%	100,00%	1,00	1.908.000	

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	27.196.626	-	2.125.000	1	8.167.500	-	5.846.875	1	9.411.700	2	25.571.075	100,00%	94,02%	2,00	25.571.075	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	3.530.800	-	-	1	-	-	2.125.000	1	1.400.700	2	3.525.700	100,00%	99,86%	2,00	3.525.700	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)		75	11.310.360.245	19	1.646.274.487	19	4.417.192.802	19	2.995.977.562	19	2.250.894.625	19	11.310.339.476	25,00%	100,00%	18,75	11.310.339.476	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	150	11.181.184.136	150	1.621.860.587	150	4.354.793.362	150	2.977.276.562	150	2.227.253.625	150	11.181.184.136	100,00%	100,00%	150,00	11.181.184.136	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	195	37.410.000	-	-	195	34.292.500	-	-	-	3.117.500	195	37.410.000	100,00%	100,00%	195,00	37.410.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	11.518.850	-	2.988.000	1	3.477.720	-	3.416.000	-	1.636.000	1	11.517.720	100,00%	99,99%	1,00	11.517.720	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	10.019.900	1	10.019.900	-	-	-	-	-	-	1	10.019.900	100,00%	100,00%	1,00	10.019.900	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	4.006.800	-	-	1	4.006.800	-	-	-	-	1	4.006.800	100,00%	100,00%	1,00	4.006.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	66.220.559	-	11.406.000	1	20.622.420	-	15.285.000	-	18.887.500	1	66.200.920	100,00%	99,97%	1,00	66.200.920	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)		75	802.096.140	19	594.057.900	19	49.793.750	19	76.254.750	19	80.704.000	19	800.810.400	25,00%	99,84%	18,75	800.810.400	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	188.791.840	1	32.923.600	1	49.793.750	1	50.694.750	1	54.125.000	1	187.537.100	25,00%	99,34%	1,00	187.537.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	70	613.304.300	70	561.134.300	-	-	-	25.560.000	-	26.579.000	70	613.273.300	100,00%	99,99%	70,00	613.273.300	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)		75	864.724.490	19	196.031.238	19	170.050.140	19	311.876.162	19	186.356.060	19	864.313.600	25,00%	99,95%	18,75	864.313.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	201.297.000	-	-	1	3.132.000	-	198.165.000	-	-	1	201.297.000	100,00%	100,00%	1,00	201.297.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	244.156.000	1	87.490.000	-	66.644.500	-	17.945.000	-	71.992.500	1	244.072.000	100,00%	99,97%	1,00	244.072.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5.772.000	2	792.000	2	-	2	2.980.000	2	2.000.000	2	5.772.000	40,00%	100,00%	2,00	5.772.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	83.482.550	1	11.357.360	-	19.023.640	-	16.825.560	-	36.243.560	1	83.450.120	100,00%	99,96%	1,00	83.450.120	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	330.016.940	1	96.391.878	-	81.250.000	-	75.960.602	-	76.120.000	1	329.722.480	100,00%	99,91%	1,00	329.722.480	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100	179.730.567	25	28.935.017	25	51.486.415	25	45.139.327	25	49.958.692	25	175.519.451	25,00%	97,66%	25,00	175.519.451	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	8.498.000	1	1.896.000	-	2.106.000	-	1.800.000	-	2.676.000	1	8.478.000	100,00%	99,76%	1,00	8.478.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	77.279.351	1	16.805.017	1	17.132.415	1	18.994.827	1	20.158.692	1	73.090.951	100,00%	94,58%	1,00	73.090.951	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	93.953.216	1	10.234.000	-	32.248.000	-	24.344.500	-	27.124.000	1	93.950.500	100,00%	100,00%	1,00	93.950.500	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100	287.239.999	25	32.200.315	25	83.964.849	25	92.749.000	25	76.948.500	25	285.862.664	25,00%	99,52%	25,00	285.862.664	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12							
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	267.239.999	20	27.205.000	20	83.664.849	20	87.179.000	20	67.818.500	20	265.867.349	100,00%	99,49%	20,00	265.867.349	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000	1	4.995.315	-	300.000	-	5.570.000	-	9.130.000	1	19.995.315	100,00%	99,98%	1,00	19.995.315	
			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																
			<b>Predikat Kinerja</b>																
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	0	3.724.939.177		612.171.649		1.299.905.261		814.859.278		944.788.421	-	3.671.724.609	0,00%	98,57%	0,00	3.671.724.609	<b>DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			89.529.000		41.529.350		5.600.000		10.496.900		27.139.700		84.765.950		94,68%		84.765.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	33.564.750	4	33.564.750	-	-	-	-	-	-	4	33.564.750	100,00%	100,00%	4,00	33.564.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.199.800	1	1.199.800	-	-	-	-	-	-	1	1.199.800	100,00%	100,00%	1,00	1.199.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.199.700	-	-	-	-	-	-	1	1.199.700	1	1.199.700	100,00%	100,00%	1,00	1.199.700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	17.964.800	1	3.964.800	-	2.800.000	-	4.155.000	-	7.000.000	1	17.919.800	100,00%	99,75%	1,00	17.919.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1	1.200.000	1	1.200.000	100,00%	100,00%	1,00	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	17.999.950	-	2.800.000	-	2.800.000	1	5.341.950	-	6.990.000	1	17.931.950	100,00%	99,62%	1,00	17.931.950	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	16.400.000	-	-	-	-	-	999.950	1	10.750.000	1	11.749.950	100,00%	71,65%	1,00	11.749.950	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			3.063.106.109		438.803.843		1.195.657.361		666.280.401		749.459.047		3.050.200.652		99,58%		3.050.200.652	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	30	3.061.109.509	30	438.803.843	29	1.195.657.361	29	665.280.501	29	748.462.347	117	3.048.204.052	390,00%	99,58%	117,00	3.048.204.052	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	996.700	-	-	-	-	-	-	-	996.700	-	996.700	0,00%	100,00%	0,00	996.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	999.900	-	-	-	-	-	999.900	-	-	-	999.900	0,00%	100,00%	0,00	999.900	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			25.356.500		22.586.250		2.500.000		-		-		25.086.250		98,93%		25.086.250	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	22.586.250	30	22.586.250	-	-	-	-	-	-	30	22.586.250	100,00%	100,00%	30,00	22.586.250	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	2.770.250	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	0,00%	90,24%	0,00	2.500.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			281.427.864		67.703.656		58.769.800		86.809.877		64.872.174		278.155.507		98,84%		278.155.507	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.819.000	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	-	1.750.000	0,00%	96,21%	0,00	1.750.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	60.004.048	1	12.652.076	-	10.325.000	1	9.415.000	1	27.479.750	3	59.871.826	100,00%	99,78%	3,00	59.871.826	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7.538.000	2	1.560.000	2	2.070.000	1	1.705.000	2	2.183.124	7	7.518.124	100,00%	99,74%	7,00	7.518.124	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	22.608.445	20	8.148.450	15	7.158.800	12	3.901.450	13	3.117.300	60	22.326.000	100,00%	98,75%	60,00	22.326.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	189.458.371	8	45.343.130	3	37.466.000	15	71.788.427	4	32.092.000	30	186.689.557	100,00%	98,54%	30,00	186.689.557	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	160.497.504	1	23.486.350	-	24.778.100	-	34.388.100	-	54.036.500	1	136.689.050	100,00%	85,17%	1	136.689.050
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	153.548.000	1	21.258.750	-	22.700.000	-	31.810.000	-	54.036.500	1	129.805.250	100,00%	84,54%	1,00	129.805.250
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	105.022.200	-	18.062.200	-	12.600.000	-	16.884.000	-	49.281.000	2	96.827.200	100,00%	92,20%	2,00	96.827.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	19.005.700	10	5.335.700	2	1.800.000	2	1.925.000	21	9.885.000	35	18.945.700	100,00%	99,68%	35,00	18.945.700
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	66,5															
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	80															
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	70															
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	85															
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	80	123.575.637	-	50.830.488	-	5.391.800	-	32.922.250	80	31.978.000	80	121.122.538	100,00%	98,01%	80,00	121.122.538
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	67.000.576	2	43.106.838	3	1.250.000	4	10.486.600	4	12.147.300	4	66.990.738	100,00%	99,99%	4,00	66.990.738
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	8.355.300	1	3.883.650	-	909.850	-	2.002.350	-	1.507.850	1	8.303.700	100,00%	99,38%	1,00	8.303.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.464.000	-	-	-	-	1	3.786.250	1	1.668.600	1	5.454.850	100,00%	99,83%	1,00	5.454.850
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	8.395.550	1	1.514.400	1	-	1	3.060.450	1	3.753.250	1	8.328.100	100,00%	99,20%	1,00	8.328.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.435.650	-	-	-	-	1	620.750	1	4.803.350	1	5.424.100	100,00%	99,79%	1,00	5.424.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	23.631.111	-	1.011.000	-	2.643.000	1	10.931.500	2	6.778.250	2	21.363.750	100,00%	90,41%	2,00	21.363.750
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5.293.450	-	1.314.600	-	588.950	-	2.034.350	-	1.319.400	-	5.257.300	0,00%	99,32%	0,00	5.257.300
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	98,5	6.854.368.492	30	1.657.157.957	50	1.740.954.635	70	1.450.694.985	99	1.955.818.597	99	6.804.626.174	100,00%	99,27%	98,50	6.804.626.174
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	74	6.829.182.092	74	1.654.757.957	74	1.740.954.635	74	1.446.474.985	74	1.937.348.397	74	6.779.535.974	100,00%	99,27%	74,00	6.779.535.974
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	10.323.850	-	-	-	-	-	-	-	10.323.850	-	10.323.850	0,00%	100,00%	0,00	10.323.850
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	14.862.550	1	2.400.000	1	-	1	4.220.000	1	8.146.350	4	14.766.350	100,00%	99,35%	4,00	14.766.350
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	75	74.560.100	75	18.500.000	75	-	75	31.971.550	75	24.080.000	75	74.551.550	100,00%	99,99%	75,00	74.551.550
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	74.560.100	3	18.500.000	3	-	3	31.971.550	3	24.080.000	12	74.551.550	100,00%	99,99%	12,00	74.551.550

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	403.801.191	25	96.788.486	50	34.560.000	75	165.551.350	100	105.063.395	100	401.963.231	100,00%	99,54%	100,00	401.963.231	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	20	3.851.000	5	280.000	5	-	5	1.710.000	5	1.861.000	5	3.851.000	25,00%	100,00%	5,00	3.851.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	34	36.195.000	5	8.786.000	15	4.043.000	10	15.247.000	4	6.285.000	34	34.361.000	100,00%	94,93%	34,00	34.361.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	36.293.700	10	7.486.250	30	3.950.000	50	10.735.350	60	14.122.100	60	36.293.700	100,00%	100,00%	60,00	36.293.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	203.526.491	35	80.236.236	15	26.567.000	15	13.924.000	-	82.795.295	65	203.522.531	100,00%	100,00%	65,00	203.522.531	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	123.935.000	-	-	1	-	-	123.935.000	-	-	1	123.935.000	100,00%	100,00%	1,00	123.935.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	380.090.264	50	181.110.000	50	77.560.000	-	-	-	4.615.380	100	263.285.380	100,00%	69,27%	100,00	263.285.380	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	380.090.264	6	181.110.000	4	77.560.000	-	-	-	4.615.380	10	263.285.380	100,00%	69,27%	10,00	263.285.380	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	400.505.480	100	67.510.241	100	31.940.058	100	125.184.447	100	173.830.294	100	398.465.040	100,00%	99,49%	100,00	398.465.040	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	2.600.000	28	500.000	50	500.000	75	500.000	100	1.100.000	100	2.600.000	100,00%	100,00%	100,00	2.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	139.105.480	3	28.460.241	3	10.290.058	2	45.084.447	4	53.230.294	12	137.065.040	100,00%	98,53%	12,00	137.065.040	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	258.800.000	3	38.550.000	3	21.150.000	2	79.600.000	2	119.500.000	10	258.800.000	100,00%	100,00%	10,00	258.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	328.728.200	100	190.207.483	100	21.691.776	100	54.957.477	100	58.718.930	100	325.575.666	100,00%	99,04%	100,00	325.575.666	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	167.060.000	4	70.775.483	-	21.691.776	2	47.441.477	-	26.537.930	6	166.446.666	100,00%	99,63%	6,00	166.446.666	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	16.960.000	10	3.506.000	10	-	10	4.617.000	-	8.837.000	30	16.960.000	100,00%	100,00%	30,00	16.960.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	126.403.200	1	104.701.000	1	-	1	259.000	1	21.354.000	1	126.314.000	100,00%	99,93%	1,00	126.314.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	18.305.000	8	11.225.000	4	-	6	2.640.000	-	1.990.000	18	15.855.000	90,00%	86,62%	18,00	15.855.000	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>															99,76%	97,94%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			7.215.650.065	685.163.255	3.170.348.412	1.104.734.037	1.848.186.971	6.808.432.675	94,36%	6.808.432.675	DINAS PARIWISATA								
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			479.119.742	39.425.000	175.151.350	32.127.851	89.835.141	336.539.342	70,24%	336.539.342									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			371.294.642	39.425.000	137.337.650	23.396.851	81.135.141	281.294.642	75,76%	281.294.642									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.357.000	-	9.357.000	-	-	9.357.000	100,00%	9.357.000									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	-	-	-	-	-	0,00%	-									
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.155.700	-	9.195.700	-	500.000	9.695.700	95,47%	9.695.700									
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4.837.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	93,03%	4.500.000									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			51.058.400	-	-	-	700.000	700.000	1,37%	700.000									
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.417.000	-	19.261.000	-	8.731.000	30.992.000	95,60%	30.992.000									
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			4.768.606.571	620.267.355	2.233.055.146	625.452.046	1.264.238.546	4.743.013.093	99,46%	4.743.013.093									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.605.333.393	620.267.355	2.220.655.146	621.252.046	1.123.158.846	4.585.333.393	99,57%	4.585.333.393									

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	SKPD Penanggungjawab				
				I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.000.378	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	6.000.000	99,99%	6.000.000					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		38.929.200	-	5.200.000	-	5.200.000	-	30.000.000	-	30.000.000	35.200.000	90,42%	35.200.000					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2.080.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	96,15%	2.000.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.297.200	-	-	-	-	-	3.297.200	-	3.297.200	3.297.200	100,00%	3.297.200					
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		44.775.000	-	-	-	-	-	43.000.000	-	43.000.000	43.000.000	96,04%	43.000.000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		65.946.400	-	4.200.000	-	4.200.000	4.200.000	57.537.500	-	57.537.500	65.937.500	99,99%	65.937.500					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.245.000	-	-	-	-	-	2.245.000	-	2.245.000	2.245.000	100,00%	2.245.000					
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		47.726.000	-	7.000.000	-	7.000.000	33.362.000	-	-	-	40.362.000	84,57%	40.362.000					
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		47.726.000	-	7.000.000	-	7.000.000	33.362.000	-	-	-	40.362.000	84,57%	40.362.000					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		244.758.960	-	76.445.700	-	76.445.700	141.907.020	-	-	-	23.255.680	98,71%	241.608.400					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		134.650.000	-	65.700.000	-	65.700.000	67.615.000	-	-	-	133.315.000	99,01%	133.315.000					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		17.545.560	-	-	-	-	4.730.000	-	-	12.000.000	16.730.000	95,35%	16.730.000					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		92.563.400	-	10.745.700	-	10.745.700	69.562.020	-	-	11.255.680	91.563.400	98,92%	91.563.400					
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		724.961.049	-	13.400.000	-	245.544.544	208.885.120	-	-	67.790.300	535.619.964	73,88%	535.619.964					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.490.000	-	3.750.600	-	3.750.600	-	-	-	5.000.000	8.750.600	92,21%	8.750.600					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.038.100	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	88,04%	15.000.000					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13.212.314	-	3.285.150	-	3.285.150	1.355.120	-	-	5.000.000	9.640.270	72,96%	9.640.270					
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		7.158.000	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	97,79%	7.000.000					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.993.360	-	4.330.000	-	4.330.000	530.000	-	-	-	4.860.000	69,49%	4.860.000					
	Penyediaan Bahan/Material		41.663.100	-	14.669.300	-	14.669.300	3.000.000	-	-	21.993.800	39.663.100	95,20%	39.663.100					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		337.806.175	-	13.400.000	-	13.400.000	170.000.000	-	-	20.796.500	337.705.994	99,97%	337.705.994					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		291.600.000	-	86.000.000	-	86.000.000	27.000.000	-	-	-	113.000.000	38,75%	113.000.000					
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		354.878.842	-	244.942.590	-	244.942.590	-	-	-	100.000.000	344.942.590	97,20%	344.942.590					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		103.040.430	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	97,05%	100.000.000					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		27.783.750	-	21.175.090	-	21.175.090	-	-	-	-	21.175.090	76,21%	21.175.090					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		224.054.662	-	223.767.500	-	223.767.500	-	-	-	-	223.767.500	99,87%	223.767.500					
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		455.081.947	-	12.070.900	-	171.214.141	-	-	-	246.250.291	429.535.332	94,39%	429.535.332					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		137.400.291	-	27.650.000	-	27.650.000	-	-	-	107.750.291	135.400.291	98,54%	135.400.291					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		70.661.656	-	12.070.900	-	35.094.141	-	-	-	-	47.165.041	66,75%	47.165.041					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		247.020.000	-	108.470.000	-	108.470.000	-	-	-	138.500.000	246.970.000	99,98%	246.970.000					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		140.516.954	-	16.994.941	-	16.994.941	63.000.000	-	-	56.817.013	136.811.954	97,36%	136.811.954					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		32.724.800	-	11.999.941	-	11.999.941	-	-	-	20.724.859	32.724.800	100,00%	32.724.800					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13.737.094	-	-	-	-	-	-	-	13.737.094	13.737.094	100,00%	13.737.094					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.520.000	-	-	-	-	-	-	-	13.520.000	13.520.000	100,00%	13.520.000					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV											
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%									14 = 6 + 12		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	3	4																				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			71.700.000		-		4.995.000			63.000.000				67.995.000					67.995.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.835.060		-		-			-			8.835.060						8.835.060		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											0,00%	94,36%										
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah	Sangat Tinggi										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			5.318.857.734		771.687.840		1.888.225.037			1.137.089.719			1.300.529.951		5.097.532.547				95,84%	5.097.532.547	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0	231.904.120	-	60.387.400	-	24.999.000	-	37.940.665	-	51.439.250	-	174.766.315	0,00%	75,36%	0,00			174.766.315		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	78.452.000	-	53.717.400	-	5.537.000	-	7.580.000	1	8.416.000	1	75.250.400	100,00%	95,92%	1,00			75.250.400		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	32.920.100	-	1.090.000	-	5.537.000	-	10.316.000	1	10.400.000	1	27.343.000	100,00%	83,06%	1,00			27.343.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00			-		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	21.220.000	-	-	-	4.200.000	-	5.348.000	1	6.937.000	1	16.485.000	100,00%	77,69%	1,00			16.485.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.500.000	-	-	-	-	-	213.424	1	-	1	213.424	100,00%	4,74%	1,00			213.424		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	90.812.020	-	5.580.000	-	9.725.000	-	14.483.241	1	25.686.250	1	55.474.491	100,00%	61,09%	1,00			55.474.491		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			4.318.603.895		628.564.819		1.686.778.445			941.292.717			1.051.328.138		4.307.964.119				99,75%	4.307.964.119	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	45	4.314.404.095	44	628.564.819	43	1.686.778.445	-	941.292.717	-	1.047.128.338	22	4.303.764.319	48,33%	99,75%	21,75			4.303.764.319		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	4.199.800	-	-	-	-	-	-	-	4.199.800	-	4.199.800	0,00%	100,00%	0,00			4.199.800		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			3.053.200		-		-		-	-	1.478.200		1.478.200						48,41%	1.478.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3.053.200	-	-	-	-	-	-	1	1.478.200	1	1.478.200	100,00%	48,41%	1,00			1.478.200		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			39.668.200		2.500.000		35.750.000		-	-	1.418.050		39.668.050						100,00%	39.668.050	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45	35.778.600	-	-	-	35.750.000	-	-	45	28.600	45	35.778.600	100,00%	100,00%	45,00			35.778.600		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00			-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	3.889.600	1	2.500.000	-	-	-	-	2	1.389.450	3	3.889.450	100,00%	100,00%	3,00			3.889.450		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			370.308.329		57.078.250		101.772.790			52.675.650			82.965.010		294.491.700				79,53%	294.491.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	68.020.600	1	12.269.600	2	12.338.825	-	10.929.150	5	14.387.450	8	49.925.025	100,00%	73,40%	8,00			49.925.025		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.180.700	-	-	-	12.500.000	-	-	1	1.206.635	1	13.706.635	100,00%	90,29%	1,00			13.706.635		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5	30.171.129	1	8.555.650	1	5.125.000	-	330.000	2	13.633.150	4	27.643.800	80,00%	91,62%	4,00			27.643.800		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	181.084.800	3	36.253.000	4	44.758.965	2	14.154.000	2	37.773.600	11	132.939.565	91,67%	73,41%	11,00			132.939.565		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab		
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	3	4	7	8								12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	75.851.100	-	-	-	27.050.000	-	27.262.500	-	15.964.175	1	70.276.675	100,00%	92,65%	1,00	70.276.675		
				78.228.100	-	-	-	9.200.000	-	58.830.000	-	2.747.400		70.777.400		90,48%		70.777.400		
				19.700.000	-	-	-	9.200.000	-	6.180.000	-	386.400		15.766.400	0,00%	80,03%	0,00	15.766.400		
			2	58.528.100	-	-	-	-	-	52.650.000	-	2.361.000		55.011.000	0,00%	93,99%	0,00	55.011.000		
				70.367.350	-	-	-	10.801.250	-	11.582.500	-	20.246.500		42.630.250		60,58%		42.630.250		
			1	51.717.400	-	-	-	10.401.250	-	11.582.500	-	19.108.400		41.092.150	0,00%	79,46%	0,00	41.092.150		
			1	18.649.950	-	-	-	400.000	-	-	-	1.138.100		1.538.100	0,00%	8,25%	0,00	1.538.100		
				206.724.540	-	23.157.371	-	18.923.552	-	34.768.187	-	88.907.403		165.756.513		80,18%		165.756.513		
			1	106.566.140	-	18.207.371	-	10.172.552	-	11.116.386	-	47.800.918		87.297.227	0,00%	81,92%	0,00	87.297.227		
			12	91.158.400	-	4.950.000	3	8.751.000	-	19.211.801	-	37.466.485	3	70.379.286	25,00%	77,21%	3,00	70.379.286		
			5	9.000.000	-	-	-	-	-	4.440.000	-	3.640.000		8.080.000	0,00%	89,78%	0,00	8.080.000		
														51,36%	95,84%					
														Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	82												0,00%		82,00			
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	0												0,00%		0,00			
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0	7.981.006.701	1.416.095.676		2.598.786.202		1.898.329.157		1.972.491.596		7.885.702.631		0,00%	98,81%	0,00	7.885.702.631		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	0												0,00%		0,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja (Poin)	48	366.645.500	12	141.538.000	24	65.063.480	36	50.200.230	48	96.041.000	30	352.842.710	62,50%	96,24%	30,00	352.842.710		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		192.862.900		123.738.000		34.303.480		15.768.317		18.820.000		192.629.797		99,88%		192.629.797		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		47.274.000		5.300.000		9.200.000		9.471.059		13.634.000		37.605.059		79,55%		37.605.059		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000		-		-		-		4.980.000		4.980.000		99,60%		4.980.000		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		17.073.900		3.000.000		1.800.000		5.507.480		5.680.000		15.987.480		93,64%		15.987.480		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		8.240.000		-		-		2.400.000		5.820.000		8.220.000		99,76%		8.220.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		36.700.000		5.000.000		10.000.000		8.750.000		12.925.000		36.675.000		99,93%		36.675.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59.494.700		4.500.000		9.760.000		8.303.374		34.182.000		56.745.374		95,38%		56.745.374		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	6.811.347.605	25	1.025.421.676	50	2.331.983.059	75	1.748.561.761	100	1.689.569.879	63	6.795.536.375	62,50%	99,77%	62,50	6.795.536.375		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.630.409.255		995.656.676		2.298.267.059		1.690.767.854		1.630.939.979		6.615.631.568		99,78%		6.615.631.568		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25.291.800		7.190.000		5.000.000		6.807.066		6.173.900		25.170.966		99,52%		25.170.966		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		23.310.800		2.500.000		3.750.000		10.470.261		6.527.000		23.247.261		99,73%		23.247.261		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		64.129.700		10.400.000		11.880.000		17.169.859		24.574.000		64.023.859		99,83%		64.023.859		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8.414.500		1.675.000		-		3.236.483		3.330.000		8.241.483		97,94%		8.241.483		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		16.146.250		2.700.000		3.886.000		4.632.076		4.780.000		15.998.076		99,08%		15.998.076		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		33.636.400		5.300.000		9.200.000		8.519.125		10.600.000		33.619.125		99,95%		33.619.125		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		10.008.900		-		-		6.959.037		2.645.000		9.604.037		95,95%		9.604.037		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD (Persen)	100	52.045.350	25	43.550.000	50	1.000.000	75	3.673.721	100	2.840.000	63	51.063.721	62,50%	98,11%	62,50	51.063.721		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		12.548.850		4.550.000		1.000.000		3.202.987		2.840.000		11.592.987		92,38%		11.592.987		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab						
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7	8								10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		39.496.500	39.000.000								470.734		-		39.470.734		99,93%		39.470.734				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	95	231.957.448	20	94.653.013	45	41.529.000	70	6.000.000	95	54.695.381	58	196.877.394	60,53%	84,88%	57,50	196.877.394						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.099.000	9.098.200								-		9.098.200		99,99%		9.098.200						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.460.600	6.214.000								-		1.146.060		7.360.060		98,65%		7.360.060				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.992.440	920.000								2.975.000		1.000.000		4.895.000		98,05%		4.895.000				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		36.456.195	6.898.000								10.000.000		5.000.000		14.322.500		36.220.500		99,35%		36.220.500		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		15.549.000	-								-		231.600		231.600		1,49%		231.600				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.427.050	4.020.000								-		-		3.677.944		7.697.944		91,35%		7.697.944		
	Penyediaan Bahan/Material		23.176.950	-								-		-		7.507.277		7.507.277		32,39%		7.507.277		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		126.796.213	67.502.813								28.554.000		-		27.810.000		123.866.813		97,89%		123.866.813		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	95	364.658.564	20	73.622.987	45	94.272.663	70	81.040.325	95	88.045.603	58	336.981.578	60,53%	92,41%	57,50	336.981.578						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		16.798.650	2.500.000								3.750.000		6.499.010		16.499.010		98,22%		16.499.010				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		161.829.614	41.322.987								23.088.663		36.820.325		33.746.793		134.978.768		83,41%		134.978.768		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		186.030.300	29.800.000								67.434.000		40.470.000		47.799.800		185.503.800		99,72%		185.503.800		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	60	154.352.234	15	37.310.000	30	64.938.000	45	8.853.120	60	41.299.733	38	152.400.853	62,50%	98,74%	37,50	152.400.853						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		154.352.234	37.310.000								64.938.000		8.853.120		41.299.733		152.400.853		98,74%		152.400.853		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		98,81%				
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	66,44	7.831.399.208		-		3.807.283.199		2.148.300.555		1.838.692.552		7.794.276.306	0,00%	99,53%	64,50	7.794.276.306	DINAS TRANSMIGRASI					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			1.103.698.080		-		619.763.240		197.742.480		284.422.000		1.101.927.720		99,84%		1.101.927.720						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	175.430.000	5	-	6	145.780.000	7	15.450.000	7	13.750.000	7	174.980.000	100,00%	99,74%	7,00	174.980.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	36.450.000	2	-	-	32.250.000	-	4.200.000	-	-	2	36.450.000	100,00%	100,00%	2,00	36.450.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	26.580.000	-	-	-	-	-	4.200.000	2	22.380.000	2	26.580.000	100,00%	100,00%	2,00	26.580.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	18.300.000	2	-	-	9.900.000	-	4.200.000	-	4.200.000	2	18.300.000	100,00%	100,00%	2,00	18.300.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	9.152.000	-	-	-	-	-	-	2	9.152.000	2	9.152.000	100,00%	100,00%	2,00	9.152.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	38.010.000	-	-	1	13.750.000	2	16.760.000	2	7.500.000	2	38.010.000	100,00%	100,00%	2,00	38.010.000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	799.776.080	1	-	2	418.083.240	5	152.932.480	7	227.440.000	7	798.455.720	100,00%	99,83%	7,00	798.455.720						
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			4.366.393.908		-		2.216.675.048		1.341.229.303		796.763.495		4.354.667.846		99,73%		4.354.667.846						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	4.254.627.908	37	-	37	2.182.925.048	37	1.310.139.303	37	749.837.495	37	4.242.901.846	100,00%	99,72%	37,00	4.242.901.846						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	56.926.000	-	-	1	16.250.000	1	10.000.000	2	30.676.000	2	56.926.000	100,00%	100,00%	2,00	56.926.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	54.840.000	3	-	7	17.500.000	11	21.090.000	14	16.250.000	14	54.840.000	100,00%	100,00%	14,00	54.840.000						
	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>			135.898.000		-		13.992.206		4.849.000		113.981.600		132.822.806		97,74%		132.822.806						
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	2	9.700.000	2	9.700.000	100,00%	97,00%	2,00	9.700.000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	101.150.000	-	-	-	-	-	-	2	101.081.600	2	101.081.600	100,00%	99,93%	2,00	101.081.600						

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	10.000.000	-	-	1	4.000.000	2	2.400.000	2	3.200.000	2	9.600.000	100,00%	96,00%	2,00	9.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	14.748.000	-	-	1	9.992.206	2	2.449.000	2	-	2	12.441.206	100,00%	84,36%	2,00	12.441.206	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			1.081.273.136		-		602.553.739		171.321.934		299.118.568		1.072.994.241		99,23%		1.072.994.241	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	111.000.000	3	-	3	61.620.000	3	28.650.000	3	20.730.000	3	111.000.000	100,00%	100,00%	3,00	111.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	48.710.200	3	-	3	24.450.000	3	20.250.000	3	3.985.200	3	48.685.200	100,00%	99,95%	3,00	48.685.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	70.718.000	7	-	7	31.550.000	7	4.500.000	7	34.500.000	7	70.550.000	100,00%	99,76%	7,00	70.550.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	35	106.821.376	10	-	18	75.000.000	25	10.000.000	35	21.820.000	35	106.820.000	100,00%	100,00%	35,00	106.820.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	63.957.000	6	-	14	36.457.000	24	2.500.000	30	25.000.000	30	63.957.000	100,00%	100,00%	30,00	63.957.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90	637.266.560	25	-	40	358.476.739	65	97.221.934	90	173.483.368	90	629.182.041	100,00%	98,73%	90,00	629.182.041	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	42.800.000	-	-	2	15.000.000	3	8.200.000	4	19.600.000	4	42.800.000	100,00%	100,00%	4,00	42.800.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			423.530.284		-		109.301.000		309.481.445		-		418.782.445		98,88%		418.782.445	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	179.464.800	-	-	-	-	5	178.910.045	-	-	5	178.910.045	100,00%	99,89%	5,00	178.910.045	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1.370.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	242.695.484	-	-	16	109.301.000	4	130.571.400	-	-	20	239.672.400	100,00%	98,84%	20,00	239.672.400	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			316.665.800		-		138.347.428		74.982.738		96.246.381		309.576.547		97,76%		309.576.547	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	156.438.000	6	-	12	74.159.000	18	36.250.000	24	46.000.000	24	156.409.000	100,00%	99,98%	24,00	156.409.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	79.727.800	6	-	12	37.398.428	18	17.732.738	24	17.566.381	24	72.697.547	100,00%	91,18%	24,00	72.697.547	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	80.500.000	1	-	2	26.790.000	3	21.000.000	3	32.680.000	3	80.470.000	100,00%	99,96%	3,00	80.470.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			403.940.000		-		106.650.538		48.693.655		248.160.508		403.504.701		99,89%		403.504.701	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	166.800.000	-	-	3	90.650.538	7	39.093.655	8	36.960.153	8	166.704.346	100,00%	99,94%	8,00	166.704.346	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	237.140.000	1	-	1	16.000.000	1	9.600.000	1	211.200.355	1	236.800.355	100,00%	99,86%	1,00	236.800.355	
														100,00%	99,53%				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																		
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	73																
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	99	5.761.590.067		864.381.989		2.207.027.484		1.289.632.437		1.355.167.789		5.716.209.699		99,21%		71,00	5.716.209.699
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	29									27						27,00	
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	16									22						137,50%	22,00
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	10	19.275.600		4.040.000		1.160.000		8.144.000		12	5.848.000		19.192.000		117,50%	99,57%	11,75
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	6									19					312,50%	18,75	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD (Poin)	100			100		100		100		100					100,00%	100,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	16.025.600	-	1.840.000	1	1.160.000	2	8.144.000	2	4.800.000	2	15.944.000	100,00%	99,49%	2,00	15.944.000	

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab							
				I		II		III		IV			12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	3	4	7	8								9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	850.000	1	-	1	-	1	-	1	848.000	1	848.000	100,00%	99,76%	1,00	848.000						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.400.000	1	2.200.000	1	-	1	-	1	200.000	1	2.400.000	100,00%	100,00%	1,00	2.400.000						
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	99	4.859.980.492	12	649.961.324	42	1.923.679.455	70	1.059.615.062	99	1.192.564.031	99	4.825.819.872	100,29%	99,30%	99,29	4.825.819.872						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	41	4.858.730.492	41	649.961.324	41	1.923.679.455	41	1.059.615.062	41	1.191.314.031	41	4.824.569.872	100,00%	99,30%	41,00	4.824.569.872						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.250.000	1	-	1	-	1	-	1	1.250.000	1	1.250.000	100,00%	100,00%	1,00	1.250.000						
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	100	11.100.000	98	5.000.000	99	6.000.000	99	100.000	99	395	395	11.100.000	395,00%	100,00%	395,00	11.100.000						
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD (Persen)	100		100		100		100		100		100		100		100,00%		100,00%	100,00				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	41	11.100.000	2	5.000.000	41	6.000.000	41	100.000	41	-	41	11.100.000	100,00%	100,00%	41,00	11.100.000						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	286.449.551	100	70.735.753	100	133.780.438	100	55.930.100	100	25.397.150	400	285.843.441	400,00%	99,79%	400,00	285.843.441						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	35.715.850	-	-	2	35.703.150	2	-	2	-	2	35.703.150	100,00%	99,96%	2,00	35.703.150						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	3	12.800.000	-	-	3	7.200.000	3	5.600.000	3	-	3	12.800.000	100,00%	100,00%	3,00	12.800.000						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	38.402.000	4	13.207.000	4	18.310.000	4	2.205.000	4	4.650.000	4	38.372.000	100,00%	99,92%	4,00	38.372.000						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	8.725.000	-	-	-	-	2	8.725.000	2	-	2	8.725.000	100,00%	100,00%	2,00	8.725.000						
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	20	21.141.341	20	7.595.750	20	6.980.500	20	1.524.900	20	4.923.150	20	21.024.300	100,00%	99,45%	20,00	21.024.300						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	169.665.360	13	49.933.003	45	65.586.788	48	37.875.200	50	15.824.000	50	169.218.991	100,00%	99,74%	50,00	169.218.991						
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	426.034.424	100	79.462.826	100	97.507.106	100	134.498.096	100	105.139.423	400	416.607.451	400,00%	97,79%	400,00	416.607.451						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	373.114.000	3	62.811.413	8	85.848.587	11	122.049.000	12	93.383.000	12	364.092.000	100,00%	97,58%	12,00	364.092.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	52.920.424	4	16.651.413	4	11.658.519	4	12.449.096	4	11.756.423	4	52.515.451	100,00%	99,23%	4,00	52.515.451						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	158.750.000	100	55.182.086	100	44.900.485	100	31.345.179	100	26.219.185	400	157.646.935	400,00%	99,31%	400,00	157.646.935						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya (Unit)	43	151.240.000	20	52.282.086	43	42.675.485	43	29.775.179	43	25.414.185	43	150.146.935	100,00%	99,28%	43,00	150.146.935						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	7.510.000	1	2.900.000	3	2.225.000	3	1.570.000	3	805.000	3	7.500.000	100,00%	99,87%	3,00	7.500.000						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			3.593.039.673		639.954.624		1.282.246.316		774.112.259		837.565.718		3.533.878.917		98,35%		3.533.878.917			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	12	130.234.500	12	8.624.000	-	54.150.300	-	23.362.000	-	44.020.900	12	130.157.200	100,00%	99,94%	12,00	130.157.200						

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	18.394.500	-	2.400.000	-	2.400.000	1	11.062.000	-	2.532.000	1	18.394.000	100,00%	100,00%	1,00	18.394.000	NGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.116.500	1	5.116.500	-	-	-	-	-	-	1	5.116.500	100,00%	100,00%	1,00	5.116.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.950.500	-	-	-	-	-	-	-	4.927.000	-	4.927.000	0,00%	99,53%	0,00	4.927.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	62.258.000	1	1.107.500	-	35.250.300	-	6.550.000	-	19.350.000	1	62.257.800	100,00%	100,00%	1,00	62.257.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	39.515.000	-	-	-	16.500.000	-	5.750.000	1	17.211.900	1	39.461.900	100,00%	99,87%	1,00	39.461.900	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			2.952.994.696		551.965.558		1.056.465.371		642.116.651		656.077.152		2.906.624.732		98,43%		2.906.624.732	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	26	2.882.935.796	26	548.372.158	26	1.024.777.871	25	632.366.651	25	631.862.352	102	2.837.379.032	392,31%	98,42%	102,00	2.837.379.032	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.593.400	1	3.593.400	-	-	-	-	-	-	1	3.593.400	100,00%	100,00%	1,00	3.593.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD (Laporan)	4	66.465.500	1	-	1	31.687.500	1	9.750.000	1	24.214.800	1	65.652.300	25,00%	98,78%	1,00	65.652.300	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			2.500.000		2.500.000		-		-		-		2.500.000		100,00%		2.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	2.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1	2.500.000	100,00%	100,00%	1,00	2.500.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			228.950.420		52.643.115		56.618.014		61.247.208		53.473.680		223.982.017		97,83%		223.982.017	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	4.950.000	-	-	2	1.325.000	2	1.125.000	3	2.500.000	7	4.950.000	100,00%	100,00%	7,00	4.950.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	53.962.400	5	21.544.000	5	6.050.000	5	13.313.000	5	12.805.000	5	53.712.000	100,00%	99,54%	5,00	53.712.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10.000.000	1	-	1	1.980.000	1	1.238.280	1	6.660.000	1	9.878.280	25,00%	98,78%	1,00	9.878.280	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15	34.818.000	15	2.000.000	15	10.428.000	15	10.584.000	15	11.714.000	15	34.726.000	100,00%	99,74%	15,00	34.726.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	125.220.020	8	29.099.115	12	36.835.014	15	34.986.928	25	19.794.680	25	120.715.737	41,67%	96,40%	25,00	120.715.737	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			43.927.100		-		43.927.100		-		-		43.927.100		100,00%		43.927.100	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	43.927.100	-	-	6	43.927.100	6	-	6	-	6	43.927.100	100,00%	100,00%	6,00	43.927.100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			114.764.000		-		46.629.500		25.120.000		42.321.574		114.071.074		99,40%		114.071.074	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	96	103.764.000	-	-	50	46.629.500	75	25.120.000	96	31.799.000	96	103.548.500	100,00%	99,79%	96,00	103.548.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	11.000.000	3	-	6	-	9	-	12	10.522.574	12	10.522.574	100,00%	95,66%	12,00	10.522.574	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			119.668.957		24.221.951		24.456.031		22.286.400		41.672.412		112.616.794		94,11%		112.616.794	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	101.190.000	7	20.171.951	7	20.456.031	7	18.206.400	7	35.304.412	7	94.138.794	100,00%	93,03%	7,00	94.138.794	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	9.290.000	1	2.250.000	1	800.000	1	3.060.000	1	3.180.000	1	9.290.000	100,00%	100,00%	1,00	9.290.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	9.188.957	5	1.800.000	5	3.200.000	5	1.000.000	5	3.188.000	5	9.188.000	100,00%	99,99%	5,00	9.188.000	
			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																
			<b>Predikat Kinerja</b>																
															330,77%		98,35%		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			6.634.946.305		1.554.233.587		1.721.436.853		2.262.928.965		1.087.027.371		6.625.626.776		99,86%		6.625.626.776	BADAN PENGHUBUNGG PROVISI
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			221.025.320		42.741.000		55.875.000		58.744.000		63.665.320		221.025.320		100,00%		221.025.320	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.169.000		-		12.169.000		-		-		12.169.000		100,00%		12.169.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			8.074.000		-		-		-		8.074.000		8.074.000		100,00%		8.074.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			9.074.000		-		-		-		9.074.000		9.074.000		100,00%		9.074.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.074.000		8.074.000		-		-		-		8.074.000		100,00%		8.074.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			9.074.000		-		-		-		9.074.000		9.074.000		100,00%		9.074.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			165.486.320		34.667.000		34.632.000		58.744.000		37.443.320		165.486.320		100,00%		165.486.320	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.074.000		-		9.074.000		-		-		9.074.000		100,00%		9.074.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.176.787.305		172.026.706		-		721.636.870		281.369.697		1.175.033.273		99,85%		1.175.033.273	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.157.307.780		162.826.706		-		711.357.870		281.369.697		1.155.554.273		99,85%		1.155.554.273	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.200.000		9.200.000		-		-		-		9.200.000		100,00%		9.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10.279.525		-		-		10.279.000		-		10.279.000		99,99%		10.279.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			144.440.000		-		-		143.792.255		507.900		144.300.155		99,90%		144.300.155	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			8.074.000		-		-		7.816.000		255.400		8.071.400		99,97%		8.071.400	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			116.463.000		-		-		116.406.000		53.000		116.459.000		100,00%		116.459.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			19.903.000		-		-		19.570.255		199.500		19.769.755		99,33%		19.769.755	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			13.260.000		-		-		9.419.000		3.840.800		13.259.800		100,00%		13.259.800	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			13.260.000		-		-		9.419.000		3.840.800		13.259.800		100,00%		13.259.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			459.128.500		459.128.500		-		-		-		459.128.500		100,00%		459.128.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			99.129.000		99.128.500		-		-		-		99.128.500		100,00%		99.128.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			360.000.000		360.000.000		-		-		-		360.000.000		100,00%		360.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.063.819.591		392.634.010		375.003.029		165.533.151		130.625.195		1.063.795.385		100,00%		1.063.795.385	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			51.303.500		18.189.000		10.700.000		15.958.500		6.456.000		51.303.500		100,00%		51.303.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			79.747.800		69.095.000		4.836.000		2.350.500		3.466.800		79.747.800		100,00%		79.747.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120.161.295		34.890.090		41.660.639		37.810.271		6.000.295		120.161.295		100,00%		120.161.295	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			89.000.000		42.000.000		20.124.000		21.768.500		5.107.500		89.000.000		100,00%		89.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			202.435.280		2.635.000		199.800.000		-		-		202.435.000		100,00%		202.435.000	
	Penyediaan Bahan/Material			75.317.300		28.438.500		9.700.000		32.360.000		4.810.000		75.308.500		99,99%		75.308.500	
	Fasilitas Kunjungan Tamu			101.800.000		46.044.000		12.008.000		42.795.880		942.000		101.789.880		99,99%		101.789.880	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			329.854.416		151.342.420		74.050.390		4.200.000		100.256.600		329.849.410		100,00%		329.849.410	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			14.200.000		-		2.124.000		8.490.000		3.586.000		14.200.000		100,00%		14.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			832.289.250		-		338.444.000		493.845.250		-		832.289.250		100,00%		832.289.250	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			589.000.000		-		277.500.000		311.500.000		-		589.000.000		100,00%		589.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			243.289.250		-		60.944.000		182.345.250		-		243.289.250		100,00%		243.289.250	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			905.885.150		125.002.454		215.224.848		354.577.311		208.717.657		903.522.270		99,74%		903.522.270	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			315.085.850		56.628.850		79.866.000		97.868.000		78.396.272		312.759.122		99,26%		312.759.122	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	82	686.430.906	-	191.067.113	4.924	206.533.780	-	140.645.780	-	144.718.600	4.924	682.965.273	6004,88%	99,50%	4924,00	682.965.273	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	35.833.668	6	35.742.000	-	-	-	-	6	-	12	35.742.000	200,00%	99,74%	12,00	35.742.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	189.711.375	3	44.692.000	-	67.232.000	-	39.665.000	3	38.076.500	6	189.665.500	100,00%	99,98%	6,00	189.665.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10.200.000	-	1.680.000	2	500.000	-	1.350.000	2	4.520.000	4	8.050.000	100,00%	78,92%	4,00	8.050.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	130.448.680	-	28.684.690	1	36.492.600	-	29.020.600	1	36.249.020	2	130.446.910	100,00%	100,00%	2,00	130.446.910	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	282.015.783	18	80.268.423	18	93.309.180	-	61.610.180	110	45.943.080	146	281.130.863	97,33%	99,69%	146,00	281.130.863	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.201.400	-	-	-	-	-	-	1	1.930.000	1	1.930.000	100,00%	87,67%	1,00	1.930.000	
	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	36.020.000	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-	18.000.000	-	36.000.000	0,00%	99,94%	0,00	36.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	3	8.747.500	-	-	-	8.700.000	-	-	-	-	-	8.700.000	0,00%	99,46%	0,00	8.700.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	8.747.500	-	-	1	8.700.000	1	-	1	-	1	8.700.000	100,00%	99,46%	1,00	8.700.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	82	631.031.136	-	125.029.728	49	224.132.231	-	112.644.677	-	156.887.812	49	618.694.448	59,93%	98,04%	49,14	618.694.448	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	167.400.000	-	25.300.000	8	56.100.000	-	29.700.000	2	56.300.000	10	167.400.000	100,00%	100,00%	10,00	167.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	34	183.659.636	34	43.114.728	34	44.242.331	34	40.182.677	34	44.537.812	34	172.077.548	100,00%	93,69%	34,00	172.077.548	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	279.971.500	12	56.615.000	12	123.789.900	12	42.762.000	12	56.050.000	12	279.216.900	100,00%	99,73%	12,00	279.216.900	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	82	215.225.844	-	76.892.305	58	60.558.700	-	43.065.000	-	34.616.120	58	215.132.125	70,70%	99,96%	57,97	215.132.125	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	215.225.844	-	76.892.305	10	60.558.700	-	43.065.000	3	34.616.120	13	215.132.125	100,00%	99,96%	13,00	215.132.125	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												99,88%	99,52%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	66,5										-		0,00%		63,50		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	80	16.914.452.179		2.312.557.102		5.807.839.012		3.885.861.844		4.627.210.970		16.633.468.928		98,34%	70,00	16.633.468.928	
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	70										-		0,00%		61,50		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	93										-		0,00%		91,50		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	21	533.547.848	-	98.244.400	-	109.975.300	-	146.988.080	21	147.330.500	21	502.538.280	100,00%	94,19%	21,00	502.538.280	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	270.185.830	3	68.987.900	3	52.783.500	3	89.868.480	3	34.255.500	3	245.895.380	60,00%	91,01%	3,00	245.895.380	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	10.000.000	-	-	-	-	5	6.390.300	-	200.000	5	6.590.300	100,00%	65,90%	5,00	6.590.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.000.000									9.970.200		99,70%		9.970.200		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.000.000									7.989.800		99,87%		7.989.800		

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	8.000.000	1	-	1	-	1	-	1	7.989.800	1	7.989.800	100,00%	99,87%	1,00	7.989.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	68.527.000	3	7.500.000	3	12.500.000	3	23.374.500	3	22.635.000	12	66.009.500	100,00%	96,33%	12,00	66.009.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	158.835.018	1	21.756.500	1	44.691.800	1	27.354.800	1	64.290.200	4	158.093.300	100,00%	99,53%	4,00	158.093.300	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	92	13.298.710.964	-	1.867.055.801	-	5.221.792.028	-	2.906.421.798	92	3.224.700.819	92	13.219.970.446	100,00%	99,41%	92,00	13.219.970.446	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	152	13.041.093.164	456	1.836.319.601	456	5.165.078.228	456	2.843.137.598	456	3.118.934.119	456	12.963.469.546	300,00%	99,40%	456,00	12.963.469.546	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10.918.500		-		4.721.500		660.000		5.535.000		10.916.500		99,98%		10.916.500	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2500	16.261.250	625	715.000	625	4.834.000	625	8.592.500	625	2.112.900	625	16.254.400	25,00%	99,96%	625,00	16.254.400	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	24	171.949.000	6	21.315.000	6	45.908.000	6	40.052.000	6	64.673.700	6	171.948.700	25,00%	100,00%	6,00	171.948.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			35.107.600		8.706.200		1.250.300		-		25.143.500		35.100.000		99,98%		35.100.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			7.052.000		-		-		2.145.000		4.907.000		7.052.000		100,00%		7.052.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			16.329.450		-		-		11.834.700		3.394.600		15.229.300		93,26%		15.229.300	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	34.475.225	-	1.474.700	-	3.560.000	-	14.210.000	100	12.657.500	100	31.902.200	100,00%	92,54%	100,00	31.902.200	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			7.358.225		1.474.700		1.155.000		3.603.000		753.900		6.986.600		94,95%		6.986.600	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			27.117.000		-		2.405.000		10.607.000		11.903.600		24.915.600		91,88%		24.915.600	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	85	378.927.200	-	17.195.000	-	106.117.300	-	99.291.900	85	138.220.982	85	360.825.182	100,00%	95,22%	85,00	360.825.182	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			149.820.000		12.025.000		25.635.000		56.354.000		48.195.500		142.209.500		94,92%		142.209.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			24.844.300		2.670.000		2.216.900		10.547.400		9.410.000		24.844.300		100,00%		24.844.300	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			35.000.000		-		-		19.859.500		15.020.000		34.879.500		99,66%		34.879.500	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			2.265.400		-		2.265.400		-		-		2.265.400		100,00%		2.265.400	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			166.997.500		2.500.000		76.000.000		12.531.000		65.595.482		156.626.482		93,79%		156.626.482	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	836.363.802	-	110.068.550	-	143.268.857	-	280.908.858	100	284.851.325	100	819.097.590	100,00%	97,94%	100,00	819.097.590	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.530.450		1.015.000		531.000		6.582.100		10.390.425		18.518.525		99,94%		18.518.525	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.958.000		-		2.710.000		22.560.000		4.530.000		29.800.000		99,47%		29.800.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			23.858.670		63.000		3.503.700		14.680.500		5.557.500		23.804.700		99,77%		23.804.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			179.130.000		25.298.100		37.812.700		37.156.000		78.800.400		179.067.200		99,96%		179.067.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40.028.950		2.015.000		5.154.300		10.310.800		16.728.100		34.208.200		85,46%		34.208.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.120.000		4.260.000		6.660.000		2.370.000		1.950.000		15.240.000		84,11%		15.240.000	
	Penyediaan Bahan/Material			96.587.350		7.017.000		25.554.500		33.464.850		30.445.000		96.481.350		99,89%		96.481.350	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			388.181.682		66.587.950		58.867.657		145.019.608		109.757.900		380.233.115		97,95%		380.233.115	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			17.460.000		3.812.500		2.475.000		8.765.000		2.365.000		17.417.500		99,76%		17.417.500	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		24.508.700	-	-	-	-	24.327.000		24.327.000		99,26%		24.327.000					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	85	243.679.400	-	-	5.000.000	-	12.205.000	85	225.141.000	85	242.346.000	100,00%	99,45%	85,00	242.346.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		243.679.400	-	-	5.000.000	-	12.205.000		225.141.000		242.346.000		99,45%		242.346.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	394.393.960	25	53.625.068	25	47.100.822	25	112.114.436	25	116.642.758	100,00%	83,54%	100,00	329.483.084			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		84.696.588		10.250.000		16.067.050		17.353.950		26.024.200		69.695.200		82,29%		69.695.200		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		309.697.372		43.375.068		31.033.772		94.760.486		90.618.558		259.787.884		83,88%		259.787.884		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	85	1.194.353.780	-	164.893.583	-	171.024.705	-	313.721.772	85	477.666.086	85	1.127.306.146	100,00%	94,39%	85,00	1.127.306.146	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		520.900.000		127.793.583		101.190.705		167.562.482		118.646.308		515.193.078		98,90%		515.193.078		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		230.573.780		-	8.580.000		23.175.000		198.710.778		230.465.778		99,95%		230.465.778			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		266.380.000		31.600.000		45.380.000		76.640.000		80.159.000		233.779.000		87,76%		233.779.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		147.080.000		-	10.594.000		44.074.290		73.085.000		127.753.290		86,86%		127.753.290			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.420.000		5.500.000		5.280.000		2.270.000		7.065.000		20.115.000		68,37%		20.115.000		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											233,99%		98,34%						
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Tinggi		Sangat Tinggi						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	0	5.892.478.947		932.693.832		2.084.243.701		1.286.192.923		1.539.232.403	-	5.842.362.859		99,15%	64,50	5.842.362.859	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	0										-	0,00%		65,00			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	60	113.019.240	-	30.250.000	-	35.774.900	-	7.581.000	-	36.016.820	-	109.622.720	0,00%	96,99%	0,00	109.622.720	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	65.330.240	1	18.000.000	-	28.550.900	-	-	-	17.501.820	1	64.052.720	100,00%	98,04%	1,00	64.052.720	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	21.940.000	1	12.250.000	-	5.474.000	-	-	-	1.290.000	1	21.688.000	100,00%	98,85%	1,00	21.688.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	23.980.000	-	-	-	-	-	4.907.000	-	17.225.000	-	22.132.000	0,00%	92,29%	0,00	22.132.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1.769.000	-	-	1	1.750.000	-	-	-	-	1	1.750.000	100,00%	98,93%	1,00	1.750.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	4.932.769.767	-	670.517.627	-	1.854.530.469	-	1.098.497.083	-	1.290.847.923	-	4.914.393.102	0,00%	99,63%	0,00	4.914.393.102	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	50	4.891.780.787	50	664.917.627	50	1.843.864.369	50	1.088.897.083	50	1.275.731.723	50	4.873.410.802	100,00%	99,62%	50,00	4.873.410.802	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	20.722.880	-	-	-	-	-	5.600.000	1	15.116.200	1	20.716.200	100,00%	99,97%	1,00	20.716.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	20.266.100	1	5.600.000	-	10.666.100	-	4.000.000	-	-	1	20.266.100	100,00%	100,00%	1,00	20.266.100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	76.904.600	-	4.167.200	-	52.520.650	-	4.724.100	-	2.710.000	-	64.121.950	0,00%	83,38%	0,00	64.121.950	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75	51.017.400	-	-	75	47.220.650	-	-	-	-	75	47.220.650	100,00%	92,56%	75,00	47.220.650	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	4.167.200	-	4.167.200	-	-	1	-	-	-	1	4.167.200	100,00%	100,00%	1,00	4.167.200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	21.720.000	-	-	2	5.300.000	-	4.724.100	-	2.710.000	2	12.734.100	100,00%	58,63%	2,00	12.734.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	417.271.840	-	100.899.318	-	86.861.222	-	125.041.935	-	100.377.400	-	413.179.875	0,00%	99,02%	0,00	413.179.875	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.110.000	-	-	-	-	-	-	1	4.089.000	1	4.089.000	100,00%	99,49%	1,00	4.089.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	70.000.000	1	8.785.000	1	15.133.473	1	31.603.000	1	14.333.000	1	69.854.473	100,00%	99,79%	1,00	69.854.473	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.300.000	-	-	100.000	1	200.000	-	2.999.000	1	3.299.000	100,00%	99,97%	1,00	3.299.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00%	80,00%	2,00	12.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	61.000.000	1	11.141.950	1	18.058.900	1	4.044.650	1	27.051.000	1	60.296.500	100,00%	98,85%	1,00	60.296.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	258.861.840	25	75.973.368	75	53.568.849	125	89.194.285	150	39.905.400	150	258.641.902	100,00%	99,92%	150,00	258.641.902	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	5.000.000	100	4.999.000	100	-	100	-	100	-	100	4.999.000	100,00%	99,98%	100,00	4.999.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	125.783.500	-	99.883.350	-	10.420.000	-	100.000	-	13.487.000	-	123.890.350	0,00%	98,49%	0,00	123.890.350	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.654.750	-	-	1	10.420.000	-	-	-	230.000	1	10.650.000	100,00%	99,96%	1,00	10.650.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	115.128.750	10	99.883.350	-	-	-	100.000	-	13.257.000	10	113.240.350	100,00%	98,36%	10,00	113.240.350	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	107.400.000	-	8.612.850	-	23.430.300	-	23.941.050	-	47.370.200	-	103.354.400	0,00%	96,23%	0,00	103.354.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	77.320.000	1	7.800.000	1	20.907.100	1	15.746.750	1	31.877.250	1	76.331.100	100,00%	98,72%	1,00	76.331.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	9.654.000	-	812.850	-	1.623.200	1	414.300	-	4.056.950	1	6.907.300	100,00%	71,55%	1,00	6.907.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	20.426.000	-	-	-	900.000	-	7.780.000	1	11.436.000	1	20.116.000	100,00%	98,48%	1,00	20.116.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	119.330.000	-	18.363.487	-	20.706.160	-	26.307.755	-	48.423.060	-	113.800.462	0,00%	95,37%	0,00	113.800.462	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	50	119.330.000	10	18.363.487	10	20.706.160	20	26.307.755	10	48.423.060	50	113.800.462	100,00%	95,37%	50,00	113.800.462	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,59%	99,15%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	100	304.083.149.168		42.690.727.865		94.643.957.888		68.543.702.465		96.195.814.305		302.074.202.523	0,00%	99,34%	100,00	302.074.202.523	DINAS PENDIDIKAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	2	762.307.553	1	40.266.200	1	145.514.418	-	439.120.272	-	134.213.000	2	759.113.890	100,00%	99,58%	2,00	759.113.890	<b>DAN KEBUDAYAAN</b>
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	75		50		-		-		-		50		66,67%		50,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	244.330.800	1	2.407.800	-	113.121.518	-	65.200.000	-	62.806.800	1	243.536.118	100,00%	99,67%	1,00	243.536.118	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	58.720.000	1	20.245.000	-	21.000.000	-	7.400.000	-	8.748.600	1	57.393.600	100,00%	97,74%	1,00	57.393.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	51.372.300	-	-	-	-	1	15.800.000	-	34.572.300	1	50.372.300	100,00%	98,05%	1,00	50.372.300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	14.479.489	1	2.503.400	-	-	-	-	-	11.950.000	1	14.453.400	100,00%	99,82%	1,00	14.453.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	17.613.300	-	15.110.000	-	-	1	-	-	2.503.300	1	17.613.300	100,00%	100,00%	1,00	17.613.300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	375.791.664	3	-	1	11.392.900	1	350.720.272	1	13.632.000	6	375.745.172	100,00%	99,99%	6,00	375.745.172	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	95	300.476.671.745	25	42.384.855.541	-	93.375.175.451	-	67.619.972.893	-	95.305.331.648	25	298.685.335.533	26,32%	99,40%	25,00	298.685.335.533	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3176	300.003.921.245	3.176	42.384.855.541	3.176	93.297.667.457	3.176	67.450.006.893	3.176	95.129.749.948	3.176	298.262.279.839	100,00%	99,42%	3176,00	298.262.279.839	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			296.496.000		-		7.307.994		146.566.000		113.404.500		267.278.494		90,15%		267.278.494	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	129.588.500	-	-	-	61.800.000	-	20.600.000	1	34.978.200	1	117.378.200	100,00%	90,58%	1,00	117.378.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	11.000.000	-	-	-	-	-	-	1	9.440.000	1	9.440.000	100,00%	85,82%	1,00	9.440.000	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	11.000.000	-	1	-	-	-	-	-	10.859.000	1	10.859.000	100,00%	98,72%	1,00	10.859.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	24.666.000	-	-	1	8.400.000	-	2.800.000	1	6.900.000	2	18.100.000	100,00%	73,38%	2,00	18.100.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			98.339.350		-		16.800.050		42.022.950		30.296.850		89.119.850		90,62%		89.119.850	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	27.827.650	-	-	1	50	-	8.599.950	-	13.548.650	1	22.148.650	100,00%	79,59%	1,00	22.148.650	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.023.200	-	-	1	-	-	-	-	5.023.200	1	5.023.200	100,00%	100,00%	1,00	5.023.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	65.488.500	-	-	-	16.800.000	-	33.423.000	1	11.725.000	1	61.948.000	100,00%	94,59%	1,00	61.948.000	
	<b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>			708.876.950		-		237.520.250		93.340.000		308.316.380		639.176.630		90,17%		639.176.630	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			129.500.000		-		-		-		129.500.000		129.500.000		100,00%		129.500.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	467.681.200	-	-	1	158.291.500	-	93.340.000	-	178.816.380	1	430.447.880	100,00%	92,04%	1,00	430.447.880	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	111.695.750	-	-	2	79.228.750	-	-	-	-	2	79.228.750	100,00%	70,93%	2,00	79.228.750	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			937.288.120		140.910.784		388.621.275		109.902.665		209.302.010		848.736.734		90,55%		848.736.734	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	134.390.000	1	19.993.000	1	56.859.000	1	26.949.915	1	17.839.500	1	121.641.415	100,00%	90,51%	1,00	121.641.415	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	31.068.000	1	1.924.000	1	5.554.000	1	945.000	1	10.670.400	1	19.093.400	100,00%	61,46%	1,00	19.093.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	46.728.050	1	20.598.950	1	9.361.200	1	1.150.750	1	3.423.394	1	34.534.294	100,00%	73,90%	1,00	34.534.294	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	550.211.120	4	98.394.834	4	274.847.075	4	42.857.000	4	128.668.716	4	544.767.625	100,00%	99,01%	4,00	544.767.625	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	12.290.950	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	162.600.000	1	-	1	42.000.000	1	38.000.000	1	48.700.000	1	128.700.000	100,00%	79,15%	1,00	128.700.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			476.947.950		-	396.879.399		-		79.914.279		476.793.678		99,97%			476.793.678	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	476.947.950	-	9	396.879.399	-	-	-	79.914.279	9	476.793.678	100,00%	99,97%	9,00	476.793.678		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365.107.500		97.905.000	2.627.750		199.609.125		39.547.570		339.689.445		93,04%			339.689.445	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.603.500	-	-	1.500.000	-	-	1	500.000	1	2.000.000	100,00%	76,82%	1,00	2.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	362.504.000	4	97.905.000	1.127.750	-	199.609.125	-	39.047.570	4	337.689.445	100,00%	93,15%	4,00	337.689.445		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			257.610.000		26.790.340	80.819.295		39.734.560		88.892.568		236.236.763		91,70%			236.236.763	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	229.610.000	24	22.410.340	73.269.295	24	39.734.560	24	81.917.568	24	217.331.763	100,00%	94,65%	24,00	217.331.763		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	28.000.000	40	4.380.000	7.550.000	40	-	40	6.975.000	40	18.905.000	100,00%	67,52%	40,00	18.905.000		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,86%	99,34%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	76,22											0,00%			76,08		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	82											0,00%			80,00		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	95	6.408.314.159	980.806.101	2.212.541.871	1.357.871.534	1.812.184.315	6.363.403.821					0,00%	99,30%		95,00		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	80											0,00%			75,00		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	24,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			0,00		
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	18,77	150.006.000	99.104.000	21.613.000	16.189.000	13.100.000	150.006.000					0,00%	100,00%		0,00	150.006.000	
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	12,07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			0,00		
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	7,94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	113.387.000	87.085.000	11.033.000	8.669.000	2	6.600.000	2	113.387.000	2	113.387.000	100,00%	100,00%	2,00	113.387.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7	24.619.000	9.019.000	5.600.000	5.000.000	7	5.000.000	7	24.619.000	7	24.619.000	100,00%	100,00%	7,00	24.619.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12.000.000	3.000.000	4.980.000	2.520.000	3	1.500.000	12	12.000.000	12	12.000.000	100,00%	100,00%	12,00	12.000.000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%								14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K								Rp	K	Rp
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16						
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	95	-	-	2.041.411.132	-	1.169.539.628	-	1.317.202.668	-	5.206.305.487	0,00%	99,53%	0,00	5.206.305.487								
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	50	5.227.417.459	-	678.152.059	-	2.041.411.132	-	1.169.539.628	50	1.314.034.468	50	5.203.137.287	100,00%	99,54%	50,00	5.203.137.287						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.852.600	1	-	-	-	-	-	-	1.821.000	1	1.821.000	100,00%	98,29%	1,00	1.821.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1.366.800	-	-	-	-	1	-	-	1.347.200	1	1.347.200	100,00%	98,57%	1,00	1.347.200						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	447.005.202	-	84.967.992	-	64.934.884	-	53.407.956	-	231.900.467	-	435.211.299	0,00%	97,36%	0,00	435.211.299						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	1	4.666.000	1	-	1	2.118.000	1	1.200.000	1	1.250.000	1	4.568.000	100,00%	97,90%	1,00	4.568.000						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	36.400.000	3	7.975.000	3	11.990.000	3	1.435.000	3	14.140.000	3	35.540.000	100,00%	97,64%	3,00	35.540.000						
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	13.276.600	2	2.948.700	2	3.085.500	2	3.855.000	2	2.952.400	2	12.841.600	100,00%	96,72%	2,00	12.841.600						
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	42.080.250	2	10.223.000	2	10.145.000	2	9.822.000	2	11.068.000	2	41.258.000	100,00%	98,05%	2,00	41.258.000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	350.582.352	-	63.821.292	-	37.596.384	-	37.095.956	32	202.490.067	32	341.003.699	100,00%	97,27%	32,00	341.003.699						
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	119.900.900	-	-	-	-	-	-	-	118.956.480	-	118.956.480	0,00%	99,21%	0,00	118.956.480						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	119.900.900	-	-	-	-	10	-	-	118.956.480	10	118.956.480	100,00%	99,21%	10,00	118.956.480						
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	375.001.000	-	85.591.750	-	58.736.655	-	101.136.750	-	121.823.000	-	367.288.155	0,00%	97,94%	0,00	367.288.155						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	9.750.000	-	1.000.000	-	7.026.655	-	530.000	12	1.000.000	12	9.556.655	100,00%	98,02%	12,00	9.556.655						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	365.251.000	-	84.591.750	-	51.710.000	-	100.606.750	12	120.823.000	12	357.731.500	100,00%	97,94%	12,00	357.731.500						
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	85.764.198	-	32.990.300	-	25.846.200	-	17.598.200	-	9.201.700	-	85.636.400	0,00%	99,85%	0,00	85.636.400						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	31	85.764.198	-	32.990.300	-	25.846.200	-	17.598.200	31	9.201.700	31	85.636.400	100,00%	99,85%	31,00	85.636.400						
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	99,30%								
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	69												0,00%				<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	95												0,00%									
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	85	7.998.656.539	1.101.224.011	2.509.659.366	1.942.090.323	2.345.144.222	7.898.117.922						0,00%	98,74%	7.898.117.922							
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	85												0,00%									
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			236.555.277	46.316.000	54.317.692	66.339.164	60.900.570	227.873.426						96,33%		227.873.426							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	118.158.944	4	31.316.000	4	21.217.424	4	32.725.520	2	28.000.000	14	113.258.944	87,50%	95,85%	14,00	113.258.944						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-						

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.950.269	-	-	-	-	1	2.950.268	-	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.950.268	1	-	1	2.950.268	1	-	1	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.950.269	-	-	-	-	1	2.950.268	-	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	38.619.500	2	5.000.000	2	8.000.000	2	9.285.081	1	16.302.570	7	38.587.651	87,50%	99,92%	7,00	38.587.651	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	70.926.027	2	10.000.000	3	22.150.000	2	18.428.027	1	16.598.000	8	67.176.027	88,89%	94,71%	8,00	67.176.027	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			5.838.072.568		849.335.985		2.068.895.374		1.477.157.236		1.387.134.620		5.782.523.215		99,05%		5.782.523.215	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	112	5.831.162.208	112	849.335.985	112	2.068.895.374	112	1.470.246.876	-	1.387.134.620	336	5.775.612.855	300,00%	99,05%	336,00	5.775.612.855	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	3.375.399	3	-	3	-	3	3.375.399	3	-	12	3.375.399	100,00%	100,00%	12,00	3.375.399	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	3.534.961	3	-	3	-	3	3.534.961	3	-	12	3.534.961	100,00%	100,00%	12,00	3.534.961	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			1.498.749		-		-		1.498.749		-		1.498.749		100,00%		1.498.749	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	1.498.749	3	-	3	-	3	1.498.749	3	-	12	1.498.749	100,00%	100,00%	12,00	1.498.749	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			77.257.820		2.500.000		41.427.602		15.930.218		17.400.000		77.257.820		100,00%		77.257.820	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	39.794.598	1	-	-	39.794.598	-	-	-	-	1	39.794.598	100,00%	100,00%	1,00	39.794.598	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	34.860.436	-	-	-	1.530.218	-	15.930.218	-	17.400.000	-	34.860.436	0,00%	100,00%	0,00	34.860.436	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2.602.786	1	2.500.000	-	102.786	1	-	-	-	2	2.602.786	100,00%	100,00%	2,00	2.602.786	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			1.261.147.104		115.059.924		186.337.691		240.931.676		666.169.249		1.228.498.540		97,41%		1.228.498.540	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	560.339.284	-	-	-	-	-	38.128.500	-	492.644.200	-	530.772.700	0,00%	94,72%	0,00	530.772.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	7	4.775.000	-	-	-	-	7	4.275.000	-	500.000	7	4.775.000	100,00%	100,00%	7,00	4.775.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	50.000.000	9	9.010.000	9	9.254.399	9	10.950.000	-	20.750.000	27	49.964.399	300,00%	99,93%	27,00	49.964.399	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	20.000.000	7	610.000	7	4.244.640	7	10.747.615	-	3.796.200	21	19.398.455	300,00%	96,99%	21,00	19.398.455	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	17.368.081	1	330.000	1	3.330.000	-	970.081	-	12.330.000	2	16.960.081	50,00%	97,65%	2,00	16.960.081	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30	70.000.000	30	-	30	15.579.516	30	35.838.965	-	18.509.916	90	69.928.417	300,00%	99,90%	90,00	69.928.417	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	130	538.664.739	25	105.109.924	45	153.929.136	45	140.021.495	15	137.638.933	130	536.699.488	100,00%	99,64%	130,00	536.699.488	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			294.795.021		69.177.102		82.353.955		60.012.050		81.193.521		292.736.628		99,30%		292.736.628	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	156.829.116	20	26.500.000	30	39.882.616	-	41.370.000	-	49.076.500	50	156.829.116	50,00%	100,00%	50,00	156.829.116	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	62.965.905	1	30.436.102	1	25.637.339	1	1.549.050	-	3.393.021	3	61.015.512	300,00%	96,90%	3,00	61.015.512	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	75.000.000	3	12.241.000	3	16.834.000	3	17.093.000	2	28.724.000	11	74.892.000	91,67%	99,86%	11,00	74.892.000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			289.330.000		18.835.000		76.327.052		80.221.230		112.346.262		287.729.544		99,45%		287.729.544			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	35.300.000	1	9.640.000	1	7.689.037	1	2.524.360	1	14.719.262	4	34.572.659	400,00%	97,94%	4,00	34.572.659			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	189.030.000	12	9.195.000	13	15.871.940	15	76.418.870	15	87.527.000	15	189.012.810	33,33%	99,99%	15,00	189.012.810			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	15.000.000	2	-	2	3.505.000	2	1.278.000	2	10.100.000	2	14.883.000	28,57%	99,22%	2,00	14.883.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000	1	-	-	49.261.075	-	-	-	-	1	49.261.075	100,00%	98,52%	1,00	49.261.075			
														241,54%	98,74%						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	90	8.300.227.955		1.103.019.988		3.000.421.178		2.149.097.095		1.975.242.376	-	8.227.780.637	0,00%	99,13%	82,50	8.227.780.637			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			228.229.900		111.696.650		40.860.500		27.324.300		48.343.450		228.224.900	100,00%			228.224.900			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	127.623.150	-	102.823.150	2	8.600.000	4	4.400.000	4	11.800.000	4	127.623.150	100,00%	100,00%	4,00	127.623.150			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	32.538.500	-	8.873.500	-	15.800.000	1	7.800.000	1	65.000	1	32.538.500	100,00%	100,00%	1,00	32.538.500			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.123.950	-	-	-	-	1	2.039.500	1	2.084.450	1	4.123.950	100,00%	100,00%	1,00	4.123.950			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	28.605.000	-	-	1	1.850.000	1	4.750.000	1	22.000.000	1	28.600.000	100,00%	99,98%	1,00	28.600.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.294.000	-	-	-	-	-	-	1	4.294.000	1	4.294.000	100,00%	100,00%	1,00	4.294.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	7.519.800	-	-	1	4.090.000	2	3.429.800	2	-	2	7.519.800	100,00%	100,00%	2,00	7.519.800			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	23.525.500	-	-	2	10.520.500	3	4.905.000	4	8.100.000	4	23.525.500	100,00%	100,00%	4,00	23.525.500			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			6.386.236.659		935.746.784		2.443.678.307		1.864.651.770		1.073.300.821		6.317.377.682		98,92%		6.317.377.682			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	70	6.309.493.859	67	935.746.784	67	2.414.388.307	67	1.851.696.970	67	1.038.803.021	67	6.240.635.082	95,71%	98,91%	67,00	6.240.635.082			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	21.379.750	-	-	-	7.000.000	-	2.800.000	1	11.579.750	1	21.379.750	100,00%	100,00%	1,00	21.379.750			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	55.363.050	-	-	-	22.290.000	1	10.154.800	2	22.918.050	2	55.362.850	100,00%	100,00%	2,00	55.362.850			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			92.508.500		-		66.057.630		698.500		25.752.000		92.508.130		100,00%		92.508.130			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70	51.681.000	-	-	69	51.543.000	69	138.000	69	-	69	51.681.000	98,57%	100,00%	69,00	51.681.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	40.827.500	1	-	1	14.514.630	4	560.500	5	25.752.000	5	40.827.130	100,00%	100,00%	5,00	40.827.130			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			535.471.330		30.355.725		176.969.241		129.029.755		199.107.100		535.461.821		100,00%		535.461.821			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4.338.250	-	-	-	436.450	3	2.440.500	4	1.461.300	4	4.338.250	100,00%	100,00%	4,00	4.338.250			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp	%	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp	%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	30.800.000	2	5.450.000	2	6.000.000	2	7.975.000	2	11.375.000	2	30.800.000	100,00%	100,00%	2,00	30.800.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	7.200.000	2	500.000	2	1.200.000	2	3.000.000	2	2.500.000	2	7.200.000	100,00%	100,00%	2,00	7.200.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	4.573.800	1	-	1	460.000	2	800.000	3	3.313.000	3	4.573.000	100,00%	99,98%	3,00	4.573.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	22.365.550	2	1.415.725	2	4.828.675	2	5.290.175	2	10.829.350	2	22.363.925	100,00%	99,99%	2,00	22.363.925		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	466.193.730	20	22.990.000	50	164.044.116	80	109.524.080	100	169.628.450	100	466.186.646	100,00%	100,00%	100,00	466.186.646		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			648.011.506		-		161.517.250		49.822.050		433.542.900		644.882.200		99,52%		644.882.200		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	648.011.506	-	-	1	161.517.250	3	49.822.050	3	433.542.900	3	644.882.200	100,00%	99,52%	3,00	644.882.200		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.070.660		17.578.329		81.392.600		51.564.700		137.090.900		287.626.529		99,85%		287.626.529		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	51.192.260	10	200.000	20	13.100.000	70	14.650.000	100	22.997.500	100	50.947.500	100,00%	99,52%	100,00	50.947.500		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	100.693.400	3	12.387.329	3	24.087.600	3	15.374.700	4	48.644.400	3	100.494.029	81,25%	99,80%	3,25	100.494.029		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	95.440.000	3	1.450.000	3	30.700.000	3	14.250.000	3	49.040.000	3	95.440.000	100,00%	100,00%	3,00	95.440.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	40.745.000	3	3.541.000	5	13.505.000	8	7.290.000	12	16.409.000	12	40.745.000	100,00%	100,00%	12,00	40.745.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.699.400		7.642.500		29.945.650		26.006.020		58.105.205		121.699.375		100,00%		121.699.375		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	116.577.400	2	7.642.500	3	29.945.650	15	20.884.020	20	58.105.205	20	116.577.375	100,00%	100,00%	20,00	116.577.375		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.122.000	-	-	-	-	1	5.122.000	1	-	1	5.122.000	100,00%	100,00%	1,00	5.122.000		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96,51%	99,13%				
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	68												0,00%		65,25			DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	89	8.055.636.508		1.263.880.472		2.741.546.549		1.995.108.033		2.021.857.032		8.022.392.086	0,00%	99,59%	72,00	8.022.392.086		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	93												0,00%		79,00			
		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	64,5	414.354.700	15	105.172.500	17	66.532.800	16	123.770.000	17	118.077.800	65	413.553.100	100,00%	99,81%	64,50	413.553.100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			126.772.500		91.572.500		800.000		22.400.000		11.850.000		126.622.500		99,88%		126.622.500		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.747.200		-		-		-		3.747.000		3.747.000		99,99%		3.747.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.417.200		-		-		-		3.417.200		3.417.200		100,00%		3.417.200		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.933.000		-		3.932.800		-		-		3.932.800		99,99%		3.932.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4.000.000		-		-		-		3.999.800		3.999.800		100,00%		3.999.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			258.503.800		13.600.000		58.050.000		99.550.000		86.653.800		257.853.800		99,75%		257.853.800		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.981.000		-		3.750.000		1.820.000		8.410.000		13.980.000		99,99%		13.980.000		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	97	6.487.707.853	22	931.263.741	25	2.499.714.275	28	1.455.773.530	22	1.577.951.736	97	6.464.703.282	100,00%	99,65%	97,00	6.464.703.282		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.335.706.853		931.263.741		2.462.214.275		1.393.273.530		1.525.956.736		6.312.708.282		99,64%		6.312.708.282		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.000.000		-		-		-		1.995.000		1.995.000		99,75%		1.995.000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	SKPD Penanggungjawab												
				I		II		III		IV						12	13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16						
				7		8		9		10							11		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp									
1	3	4																									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		150.001.000			37.500.000			62.500.000			50.000.000			150.000.000			100,00%		150.000.000							
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	96	4.109.000	22	-	27	3.106.000	25	1.000.000	22	-	96	4.106.000	100,00%	99,93%	96,00			4.106.000							
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.109.000			3.106.000			1.000.000			-		4.106.000			99,93%			4.106.000							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	96	20.037.010	22	20.037.000	27	-	25	-	22	10	96	20.037.010	100,00%	100,00%	96,00			20.037.010							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20.037.010		20.037.000			-				10		20.037.010			100,00%			20.037.010							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	90	556.188.245	20	116.415.082	25	116.343.600	25	213.708.246	20	109.112.646	90	555.579.574	100,00%	99,89%	90,00			555.579.574							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		82.422.940		9.626.300		9.879.600		11.945.100		50.939.896			82.390.896			99,96%			82.390.896							
	Penyediaan Bahan/Material		136.000.000		6.532.800		52.704.000		56.715.800		20.046.750			135.999.350			100,00%			135.999.350							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		289.365.305		89.755.982		53.760.000		124.047.346		21.626.000			289.189.328			99,94%			289.189.328							
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		48.400.000		10.500.000		-		21.000.000		16.500.000			48.000.000			99,17%			48.000.000							
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	50	100.000.000	12	-	14	-	15	18.110.000	9	81.869.357	50	99.979.357	100,00%	99,98%	50,00			99.979.357							
	Pengadaan Mebel		100.000.000						18.110.000		81.869.357			99.979.357			99,98%			99.979.357							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	90	345.499.700	20	86.192.149	25	12.688.870	25	137.256.257	20	102.351.483	90	338.488.759	100,00%	97,97%	90,00			338.488.759							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		145.500.000		37.500.000		-		62.500.000		45.500.000			145.500.000			100,00%			145.500.000							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		84.000.000		19.892.149		12.688.870		26.756.257		17.651.883			76.989.159			91,65%			76.989.159							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		115.999.700		28.800.000		-		48.000.000		39.199.600			115.999.600			100,00%			115.999.600							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	90	127.740.000	20	4.800.000	25	43.161.004	25	45.490.000	20	32.494.000	90	125.945.004	100,00%	98,59%	90,00			125.945.004							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		127.740.000		4.800.000		43.161.004		45.490.000		32.494.000			125.945.004			98,59%			125.945.004							
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	0	25.027.166.336		3.837.767.451		9.102.682.480		5.674.871.452		6.316.023.562		24.931.344.945	0,00%	99,62%	34,25			24.931.344.945							
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD (Poin)	64,5	120.079.450		12.128.000		17.595.000		19.109.400		62.445.000		111.277.400	0,00%	92,67%	0,00			111.277.400							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	54.994.000		6.500.000		11.795.000		11.343.000		17.356.000	2	46.994.000	100,00%	85,45%	2,00			46.994.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.070.000		-		-		600.000	1	4.470.000	1	5.070.000	100,00%	100,00%	1,00			5.070.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.070.000		-		-		-	1	5.070.000	1	5.070.000	100,00%	100,00%	1,00			5.070.000							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.162.000		1.628.000		-		-	1	3.534.000	1	5.162.000	100,00%	100,00%	1,00			5.162.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.162.000		-		-		-	1	5.162.000	1	5.162.000	100,00%	100,00%	1,00			5.162.000							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	6.144.200		-		1.000.000		1.000.000	1	4.144.200	0	6.144.200	25,00%	100,00%	0,25			6.144.200							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	38.477.250	-	4.000.000	-	4.800.000	-	6.166.400	1	22.708.800	1	37.675.200	100,00%	97,92%	1,00	37.675.200	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	95	23.086.015.891	-	3.408.647.051	-	8.677.297.380	72	5.268.757.492	-	5.707.748.262	-	23.062.450.185	0,00%	99,90%	0,00	23.062.450.185	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	265	22.951.187.891	-	3.396.647.051	-	8.632.068.380	202	5.247.781.492	265	5.652.182.662	265	22.928.679.585	100,00%	99,90%	265,00	22.928.679.585	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	58.928.000	-	-	-	27.229.000	-	2.400.000	1	28.342.000	1	57.971.000	100,00%	98,38%	1,00	57.971.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	29.790.000	-	4.800.000	-	7.200.000	-	7.200.000	1	10.590.000	1	29.790.000	100,00%	100,00%	1,00	29.790.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	46.110.000	-	7.200.000	-	10.800.000	-	11.376.000	1	16.633.600	1	46.009.600	100,00%	99,78%	1,00	46.009.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	92	5.510.000	-	-	-	-	50	2.010.000	-	1.800.000	-	3.810.000	0,00%	69,15%	0,00	3.810.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.510.000	-	-	-	-	-	2.010.000	1	1.800.000	1	3.810.000	100,00%	69,15%	1,00	3.810.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	75	45.137.000	-	5.900.000	-	8.900.000	40	8.100.000	-	18.035.200	-	40.935.200	0,00%	90,69%	0,00	40.935.200	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	45.137.000	-	5.900.000	-	8.900.000	-	8.100.000	1	18.035.200	1	40.935.200	100,00%	90,69%	1,00	40.935.200	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	80	783.872.051	-	288.811.300	-	146.279.000	71	139.586.200	-	198.017.500	-	772.694.000	0,00%	98,57%	0,00	772.694.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	172.072.200	-	143.670.000	-	-	4	-	4	26.925.000	4	170.595.000	100,00%	99,14%	4,00	170.595.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	4	23.791.000	-	7.739.000	-	7.581.500	3	4.218.700	4	4.216.600	4	23.755.800	100,00%	99,85%	4,00	23.755.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	59.900.625	-	8.855.000	-	7.847.000	3	10.192.600	4	30.883.900	4	57.778.500	100,00%	96,46%	4,00	57.778.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	21.636.800	-	1.800.000	-	-	2	11.936.800	4	7.650.000	4	21.386.800	100,00%	98,84%	4,00	21.386.800	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	62.381.856	-	17.909.200	-	10.158.100	4	20.199.700	4	14.103.100	4	62.370.100	100,00%	99,98%	4,00	62.370.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	444.089.570	-	108.838.100	-	120.692.400	4	93.038.400	4	114.238.900	4	436.807.800	100,00%	98,36%	4,00	436.807.800	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	95	253.767.944	-	46.678.400	-	67.183.800	75	56.454.460	-	63.530.800	-	234.047.460	0,00%	92,23%	0,00	234.047.460	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	25.520.000	-	2.500.000	-	3.792.500	1	3.863.000	4	5.000.000	4	15.145.500	100,00%	59,35%	4,00	15.145.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	228.247.944	-	44.378.400	-	63.391.300	3	52.601.460	4	58.530.800	4	218.901.960	100,00%	95,91%	4,00	218.901.960	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	95	732.784.000	-	75.402.700	-	185.427.300	75	180.853.900	-	264.446.800	-	706.130.700	0,00%	96,36%	0,00	706.130.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	56.380.000	-	8.726.000	-	21.666.400	1	8.453.100	2	17.467.900	2	56.313.400	100,00%	99,88%	2,00	56.313.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	217.920.000	-	40.726.700	-	44.164.700	2	57.772.000	2	69.250.900	2	211.914.300	100,00%	97,24%	2,00	211.914.300	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab		
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	3	4	7	8								12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	1	2.500.000	100,00%	100,00%	1,00	2.500.000				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	90	466.679.334	-	97.454.747	-	194.840.569	-	92.888.329	-	79.865.474	-	465.049.119	0,00%	99,65%	0,00	465.049.119		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.994.500	-	985.000	-	1.155.000	-	935.000	1	915.500	1	3.990.500	100,00%	99,90%	1,00	3.990.500		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	124.135.800	-	-	1	108.833.200	-	-	-	15.296.700	1	124.129.900	100,00%	100,00%	1,00	124.129.900		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22.238.740	-	6.896.750	-	7.163.500	-	6.204.000	1	1.971.275	1	22.235.525	100,00%	99,99%	1,00	22.235.525		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.039.560	-	2.472.000	-	5.185.400	-	4.400.000	1	7.981.800	1	20.039.200	100,00%	100,00%	1,00	20.039.200		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.150.000	2	660.000	2	330.000	2	660.000	2	990.000	2	2.640.000	100,00%	83,81%	2,00	2.640.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	38.862.534	-	23.966.050	-	14.715.600	1	-	-	-	1	38.681.650	100,00%	99,53%	1,00	38.681.650		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	254.258.200	-	62.474.947	-	57.457.869	-	80.689.329	2	52.710.199	2	253.332.344	100,00%	99,64%	2,00	253.332.344		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	85	112.178.476	-	11.239.140	-	41.734.353	-	15.880.471	-	35.867.686	-	104.721.650	0,00%	93,35%	0,00	104.721.650		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	48.040.000	-	4.500.000	-	19.500.000	-	8.540.000	1	15.500.000	1	48.040.000	100,00%	100,00%	1,00	48.040.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	64.138.476	-	6.739.140	-	22.234.353	-	7.340.471	1	20.367.686	1	56.681.650	100,00%	88,37%	1,00	56.681.650		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	85	616.891.000	-	34.673.800	-	247.721.578	-	42.206.400	-	290.926.960	-	615.528.738	0,00%	99,78%	0,00	615.528.738		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	520.041.500	5	23.430.800	-	210.685.578	3	25.460.400	2	259.116.960	10	518.693.738	100,00%	99,74%	10,00	518.693.738		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	86.699.500	-	8.743.000	-	34.586.000	-	15.366.000	1	27.990.000	1	86.685.000	100,00%	99,98%	1,00	86.685.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	10.150.000	2	2.500.000	-	2.450.000	-	1.380.000	3	3.820.000	5	10.150.000	100,00%	100,00%	5,00	10.150.000		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									98,37%	98,85%					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																			
	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)		80										90	112,50%			70,00			
	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)		70	20.684.488.254		2.712.370.847		7.827.753.483		4.451.122.287		5.488.395.642	70	20.479.642.259	100,00%	99,01%	61,50	20.479.642.259		
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)		85										85	100,00%			65,50			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)		98	465.578.172	-	28.925.200	-	172.690.000	-	96.459.315	98	150.389.106	98	448.463.621	100,00%	96,32%	98,00	448.463.621		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	313.123.676	1	21.144.000	1	166.940.000	1	56.407.700	1	54.115.406	4	298.607.106	100,00%	95,36%	4,00	298.607.106		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	12.933.100	-	4.170.400	-	-	-	7.472.500	1	1.290.200	1	12.933.100	100,00%	100,00%	1,00	12.933.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.736.600	-	-	-	-	-	-	1	7.736.600	1	7.736.600	100,00%	100,00%	1,00	7.736.600	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	6.986.700	1	3.610.800	-	-	-	957.000	3	2.418.900	4	6.986.700	100,00%	100,00%	4,00	6.986.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	1	-	-	-	-	-	-	4.998.300	1	4.998.300	100,00%	99,97%	1,00	4.998.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	10.678.150	-	-	-	-	2	628.250	2	10.049.900	4	10.678.150	100,00%	100,00%	4,00	10.678.150	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	109.119.946	-	-	5.750.000	-	30.993.865	1	69.779.800	1	106.523.665	25,00%	97,62%	1,00	106.523.665		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	16.746.965.722	25	2.341.154.472	25	6.400.549.093	25	3.713.155.135	25	4.246.943.362	100	16.701.802.062	100,00%	99,73%	100,00	16.701.802.062	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	191	16.632.663.691	191	2.341.154.472	191	6.375.549.093	191	3.681.390.085	191	4.189.792.012	764	16.587.885.662	400,00%	99,73%	764,00	16.587.885.662	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	22.411.950	3	3	-	3	8.446.600	3	13.896.500	12	22.343.100	100,00%	99,69%	12,00	22.343.100		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	36.012.700	-	1	12.500.000	1	8.558.350	2	14.917.550	4	35.975.900	100,00%	99,90%	4,00	35.975.900		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	44.252.181	-	-	12.500.000	1	8.972.100	1	22.606.900	2	44.079.000	100,00%	99,61%	2,00	44.079.000		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	100,00%	0,00%	4,00	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	9.418.700	-	-	-	2	5.788.000	2	3.614.700	4	9.402.700	100,00%	99,83%	4,00	9.402.700		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	2.206.500	-	-	-	2	-	2	2.115.700	4	2.115.700	100,00%	95,88%	4,00	2.115.700		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	79.205.000	25	48.267.000	25	5.730.000	25	6.618.000	25	14.252.485	100	74.867.485	100,00%	94,52%	100,00	74.867.485	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.590.000		-		-		-		14.252.485		14.252.485		76,67%		14.252.485	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	60.615.000	1	48.267.000	-	5.730.000	1	6.618.000	2	-	4	60.615.000	100,00%	100,00%	4,00	60.615.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	1.021.554.532	25	94.959.000	25	464.956.436	25	222.914.990	25	218.855.304	100	1.001.685.730	100,00%	98,06%	100,00	1.001.685.730	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	11.825.000	1	2.022.000	-	-	-	6.153.500	3	3.379.500	4	11.555.000	100,00%	97,72%	4,00	11.555.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	327.912.100	-	1	326.857.500	1	-	2	-	4	326.857.500	100,00%	99,68%	4,00	326.857.500		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	135.000.000	1	9.907.000	1	26.567.500	1	38.603.446	1	59.340.120	4	134.418.066	100,00%	99,57%	4,00	134.418.066	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	45.929.450	1	34.030.000	-	-	-	3.960.000	3	3.600.000	4	41.590.000	100,00%	90,55%	4,00	41.590.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			198.950		-		-		-				-		0,00%		-	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	76.193.800	-	-	1	12.075.000	1	21.266.950	2	31.677.300	4	65.019.250	100,00%	85,33%	4,00	65.019.250	



No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4																16	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	64	6.225.105.879	64	873.480.767	64	2.457.834.230	64	1.362.967.429	64	1.516.509.817	64	6.210.792.243	100,00%	99,77%	64,00	6.210.792.243	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	150	1.566.000	35	1.566.000	150	-	150	-	150	-	150	1.566.000	100,00%	100,00%	150,00	1.566.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	6.849.150	3	1.309.750	6	-	6	-	12	5.539.400	12	6.849.150	100,00%	100,00%	12,00	6.849.150	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	10.829.800	3	1.921.000	6	-	6	1.726.600	12	7.182.200	12	10.829.800	100,00%	100,00%	12,00	10.829.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	4.830.000	-	-	-	-	-	-	2	4.830.000	2	4.830.000	100,00%	100,00%	2,00	4.830.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	18.233.200	1	1.000.000	2	6.262.500	2	3.200.000	3	7.770.700	3	18.233.200	100,00%	100,00%	3,00	18.233.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20	3.308.000	3	-	9	2.416.000	9	-	20	892.000	20	3.308.000	100,00%	100,00%	20,00	3.308.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	20.399.300	20	750.000	50	7.013.396	65	950.000	-	11.669.300	-	20.382.696	0,00%	99,92%	0,00	20.382.696	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	3.499.900	-	-	2	3.286.400	2	-	2	207.000	2	3.493.400	100,00%	99,81%	2,00	3.493.400	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	11.899.700	-	-	1	2.486.000	2	-	2	9.408.600	2	11.894.600	100,00%	99,96%	2,00	11.894.600	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	4.999.700	3	750.000	4	1.240.996	4	950.000	5	2.053.700	5	4.994.696	100,00%	99,90%	5,00	4.994.696	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	110.939.445	10	2.000.000	38	94.730.030	47	7.000.000	-	6.575.000	-	110.305.030	0,00%	99,43%	0,00	110.305.030	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64	82.000.000	-	-	64	81.517.530	-	-	-	-	64	81.517.530	100,00%	99,41%	64,00	81.517.530	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	8.917.500	-	-	2	6.712.500	2	1.000.000	2	1.200.000	2	8.912.500	100,00%	99,94%	2,00	8.912.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	15.021.945	1	2.000.000	2	4.000.000	2	6.000.000	2	3.000.000	2	15.000.000	100,00%	99,85%	2,00	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	5.000.000	2	-	-	2.500.000	-	-	1	2.375.000	3	4.875.000	100,00%	97,50%	3,00	4.875.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	809.767.446	10	97.669.881	30	238.364.506	73	254.537.029	-	218.850.582	-	809.421.998	0,00%	99,96%	0,00	809.421.998	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10.501.125	-	-	3	3.973.500	2	2.823.825	-	3.699.650	5	10.496.975	100,00%	99,96%	5,00	10.496.975	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	77.500.000	2	9.500.000	2	13.419.000	2	22.328.000	2	32.252.500	2	77.499.500	100,00%	100,00%	2,00	77.499.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	21.500.000	2	1.296.000	2	6.212.800	2	6.991.200	2	7.000.000	2	21.500.000	100,00%	100,00%	2,00	21.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	39.941.211	1	4.107.725	1	11.682.150	1	10.265.200	1	13.885.436	1	39.940.511	100,00%	100,00%	1,00	39.940.511	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	549.693.510	30	78.334.556	60	167.178.956	75	174.649.054	100	129.194.996	100	549.357.562	100,00%	99,94%	100,00	549.357.562	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	9.631.600	6	1.631.600	8	2.948.100	8	2.979.750	10	2.068.000	10	9.627.450	100,00%	99,96%	10,00	9.627.450	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6	101.000.000	4	2.800.000	5	32.950.000	5	34.500.000	6	30.750.000	6	101.000.000	100,00%	100,00%	6,00	101.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	522.720.050	-	167.077.200	50	240.392.790	79	416.000	-	112.029.554	-	519.915.544	0,00%	99,46%	0,00	519.915.544	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	99.916.000	-	-	-	-	-	3	99.529.554	3	99.529.554	100,00%	99,61%	3,00	99.529.554		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	40.424.250	-	-	3	40.071.000	-	278.000	-	-	3	40.349.000	100,00%	99,81%	3,00	40.349.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	247.479.800	4	167.077.200	8	78.145.000	8	138.000	8	-	8	245.360.200	100,00%	99,14%	8,00	245.360.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	134.900.000	-	-	1	122.176.790	-	-	-	12.500.000	1	134.676.790	100,00%	99,83%	1,00	134.676.790	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	73.821.460	5	11.230.900	25	16.230.077	55	22.664.248	-	23.666.644	-	73.791.869	0,00%	99,96%	0,00	73.791.869	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	66.962.960	3	11.230.900	3	13.112.577	3	22.040.748	3	20.549.144	3	66.933.369	100,00%	99,96%	3,00	66.933.369	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	6.858.500	1	-	1	3.117.500	1	623.500	1	3.117.500	1	6.858.500	100,00%	100,00%	1,00	6.858.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	391.828.000	8	59.099.810	46	59.815.576	82	215.978.133	-	52.557.232	-	387.450.751	0,00%	98,88%	0,00	387.450.751	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	45.000.000	1	1.965.860	1	17.779.576	1	16.356.118	1	6.273.232	1	42.374.786	100,00%	94,17%	1,00	42.374.786	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	139.300.000	6	25.000.000	20	27.060.000	20	58.022.100	20	28.982.000	20	139.064.100	100,00%	99,83%	20,00	139.064.100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	50.050.000	3	5.000.000	3	14.976.000	3	12.772.000	10	17.302.000	10	50.050.000	100,00%	100,00%	10,00	50.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	157.478.000	1	27.133.950	-	-	-	128.827.915	-	-	1	155.961.865	100,00%	99,94%	1,00	155.961.865	
														100,00%	99,71%				
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			9.543.595.904		1.831.222.376		3.092.180.928		2.046.717.155		2.497.905.380		9.468.025.839		99,21%		9.468.025.839	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0	583.564.460	-	35.333.100	-	136.912.700	-	128.946.563	-	257.256.897	-	558.449.260	0,00%	95,70%	0,00	558.449.260	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	320.001.550	-	-	1	128.112.700	-	78.846.563	-	107.713.236	1	314.672.499	100,00%	98,33%	1,00	314.672.499	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	62.909.000	1	25.309.000	-	8.800.000	-	8.800.000	-	19.909.055	1	62.818.055	100,00%	99,86%	1,00	62.818.055	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	41.427.700	-	-	-	-	-	8.800.000	-	32.627.700	-	41.427.700	0,00%	100,00%	0,00	41.427.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	10.024.100	1	10.024.100	-	-	-	-	-	-	1	10.024.100	100,00%	100,00%	1,00	10.024.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	8.130.450	-	-	-	-	-	-	1	8.130.450	1	8.130.450	100,00%	100,00%	1,00	8.130.450	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	29.376.400	-	-	-	-	-	4.000.000	1	16.493.029	1	20.493.029	100,00%	69,76%	1,00	20.493.029	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	111.695.260	-	-	-	-	1	28.500.000	-	72.383.427	1	100.883.427	100,00%	90,32%	1,00	100.883.427	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			6.380.374.552		1.130.770.706		2.114.998.280		1.435.542.221		1.692.763.945		6.374.075.152		99,90%		6.374.075.152	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	65	6.231.343.472	65	1.130.770.706	65	2.097.398.280	65	1.419.342.221	65	1.580.816.545	65	6.228.327.752	100,00%	99,95%	65,00	6.228.327.752	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	7.371.500	-	-	-	-	-	-	-	7.371.500	-	7.371.500	0,00%	100,00%	0,00	7.371.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	49.342.730	-	-	-	-	-	-	-	49.313.050	-	49.313.050	0,00%	99,94%	0,00	49.313.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	92.316.850	1	-	1	17.600.000	1	16.200.000	1	55.262.850	4	89.062.850	100,00%	96,48%	4,00	89.062.850	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			11.000.000		10.929.456		-		-		-		10.929.456		99,36%		10.929.456	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	11.000.000	-	10.929.456	1	-	-	-	-	-	1	10.929.456	100,00%	99,36%	1,00	10.929.456	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			1.135.693.803		247.271.165		272.990.098		283.117.479		330.617.488		1.133.996.230		99,85%		1.133.996.230	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	20	21.568.493	10	8.000.000	5	7.000.000	5	3.000.000	-	3.535.000	20	21.535.000	100,00%	99,84%	20,00	21.535.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	750	109.552.950	50	28.440.000	50	19.000.000	400	28.500.000	-	33.460.000	500	109.400.000	66,67%	99,86%	500,00	109.400.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	72.107.100	3	10.500.000	3	19.500.000	3	13.500.000	-	28.591.000	9	72.091.000	75,00%	99,98%	9,00	72.091.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	176.119.900	3	7.880.000	3	80.820.000	3	39.460.000	3	47.907.000	12	176.067.000	100,00%	99,97%	12,00	176.067.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	20	158.624.850	5	77.890.724	5	-	5	38.945.362	5	41.733.762	20	158.569.848	100,00%	99,97%	20,00	158.569.848	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	597.720.510	30	114.560.441	30	146.670.098	30	159.712.117	30	175.390.726	30	596.333.382	20,00%	99,77%	30,00	596.333.382	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			313.299.075		-		309.344.080		-		100.000		309.444.080		98,77%		309.444.080	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	285.178.700	-	-	-	281.261.080	4	-	-	100.000	4	281.361.080	100,00%	98,66%	4,00	281.361.080	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	28.120.375	-	-	-	28.083.000	1	-	-	-	1	28.083.000	100,00%	99,87%	1,00	28.083.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			712.370.014		319.513.673		108.170.850		127.774.792		128.240.278		683.699.593		95,98%		683.699.593	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	184.695.178	3	27.500.000	3	61.557.000	3	33.100.000	-	62.357.400	9	184.514.400	75,00%	99,90%	9,00	184.514.400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	187.874.836	20	32.413.673	15	36.863.850	15	41.494.792	-	58.728.178	50	169.500.493	69,44%	90,22%	50,00	169.500.493	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	339.800.000	2	259.600.000	2	9.750.000	2	53.180.000	2	7.154.700	2	329.684.700	66,67%	97,02%	2,00	329.684.700	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			407.294.000		87.404.276		149.764.920		71.336.100		88.928.772		397.432.068		97,58%		397.432.068	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	223.738.000	10	64.204.276	5	61.004.920	-	47.136.100	4	41.602.772	19	213.948.068	95,00%	95,62%	19,00	213.948.068	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	183.556.000	1	23.200.000	-	88.760.000	-	24.200.000	-	47.324.000	0	183.484.000	25,00%	99,96%	0,25	183.484.000	
														89,56%		99,21%			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																		
		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)	85												0,00%		75,00		
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	98	4.483.208.856		652.257.515		1.008.207.489		1.375.316.045		1.356.848.803		4.392.629.852	0,00%	97,98%	97,00	4.392.629.852	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	68,5											0,00%		65,50			



No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	34.160.000	-	5.000.000	-	10.000.000	1	9.000.000	-	10.160.000	1	34.160.000	100,00%	100,00%	1,00	34.160.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	4.093.715	-	-	-	-	1	2.279.800	1	1.800.000	2	4.079.800	100,00%	99,66%	2,00	4.079.800	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen)	90	3.157.173.077	-	452.089.636	-	1.249.850.069	60	676.830.637	-	747.272.854	60	3.126.043.196	66,80%	99,01%	60,12	3.126.043.196	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	40	3.092.403.077	40	441.489.636	40	1.228.650.069	40	666.230.637	40	724.902.854	40	3.061.273.196	100,00%	98,99%	40,00	3.061.273.196	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	17.580.000	-	2.800.000	-	5.600.000	-	2.800.000	1	6.380.000	1	17.580.000	100,00%	100,00%	1,00	17.580.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	47.190.000	1	7.800.000	1	15.600.000	1	7.800.000	1	15.990.000	4	47.190.000	100,00%	100,00%	4,00	47.190.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	90	17.040.000	-	2.800.000	-	5.600.000	70	2.800.000	-	5.840.000	70	17.040.000	77,78%	100,00%	70,00	17.040.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	17.040.000	-	2.800.000	-	5.600.000	1	2.800.000	-	5.840.000	1	17.040.000	100,00%	100,00%	1,00	17.040.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	0	208.055.000	-	12.500.000	-	139.445.000	-	12.510.000	-	32.600.000	-	197.055.000	0,00%	94,71%	0,00	197.055.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	110.455.000	-	-	1	110.445.000	-	10.000	-	-	1	110.455.000	100,00%	100,00%	1,00	110.455.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	90.600.000	-	12.500.000	-	29.000.000	1	12.500.000	1	32.600.000	1	86.600.000	100,00%	95,58%	1,00	86.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	0	295.003.549	-	71.519.670	-	40.435.152	-	16.889.600	-	147.604.855	-	276.449.277	0,00%	93,71%	0,00	276.449.277	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	28.966.000	-	4.454.000	1	6.252.000	-	5.277.000	1	12.974.000	2	28.957.000	100,00%	99,97%	2,00	28.957.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	13.464.100	-	792.000	1	1.236.200	-	2.150.600	1	9.019.600	2	13.198.400	100,00%	98,03%	2,00	13.198.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	46.069.625	-	10.968.550	-	9.694.650	1	2.757.000	1	22.498.500	1	45.918.700	100,00%	99,67%	1,00	45.918.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	205.853.824	1	55.305.120	-	23.252.302	9	6.705.000	2	103.112.755	12	188.375.177	100,00%	91,51%	12,00	188.375.177	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0	103.447.900	-	-	-	-	-	53.422.900	-	49.900.000	-	103.322.900	0,00%	99,88%	0,00	103.322.900	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	103.447.900	-	-	-	-	4	53.422.900	4	49.900.000	4	103.322.900	100,00%	99,88%	4,00	103.322.900	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0	388.237.620	-	48.664.674	-	172.019.713	-	40.422.508	-	84.522.059	-	345.628.954	0,00%	89,03%	0,00	345.628.954	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	93.960.000	3	14.938.000	8	17.500.000	11	7.500.000	12	17.500.000	12	57.438.000	100,00%	61,13%	12,00	57.438.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	81.200.120	2	13.526.674	8	14.619.713	10	20.922.508	12	26.622.059	12	75.690.954	100,00%	93,22%	12,00	75.690.954	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	213.077.500	2	20.200.000	8	139.900.000	10	12.000.000	12	40.400.000	12	212.500.000	100,00%	99,73%	12,00	212.500.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0	663.373.937	-	16.086.352	-	247.470.440	-	33.106.700	-	313.597.224	-	610.260.716	0,00%	91,99%	0,00	610.260.716	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	56.380.000	-	11.906.352	-	16.550.000	1	5.200.000	1	22.720.000	1	56.376.352	100,00%	99,99%	1,00	56.376.352	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	401.490.000	4	1.466.000	15	45.379.000	21	27.866.700	28	277.669.336	28	352.381.036	100,00%	87,77%	28,00	352.381.036	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	185.443.937	-	-	1	178.200.440	2	40.000	2	4.618.888	2	182.859.328	100,00%	98,61%	2,00	182.859.328	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	20.060.000	1	2.714.000	3	7.341.000	1	-	1	8.589.000	6	18.644.000	100,00%	92,94%	6,00	18.644.000	
														99,82%	96,84%				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	0												0,00%		3632,50		
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	0	939.151.951		226.302.358		315.699.128		160.540.050		233.770.725		936.312.261	0,00%	99,70%	214,00	936.312.261	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	0												0,00%		4969,50		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	24,08												0,00%		0,00		
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	20,5												0,00%		0,00		
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	10,8	166.875.500		23.530.800		52.372.000		39.963.800		50.345.100		166.211.700	0,00%	99,60%	0,00	166.211.700	
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	8,85												0,00%		0,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	43.292.500	1	1.229.900	-	18.750.000	-	10.500.000	1	12.789.800	2	43.269.700	100,00%	99,95%	2,00	43.269.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	13.196.500	1	1.950.450	-	5.846.050	-	3.000.000	-	2.400.000	1	13.196.500	100,00%	100,00%	1,00	13.196.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	3.300.500	-	-	-	-	-	1.350.650	1	1.949.850	1	3.300.500	100,00%	100,00%	1,00	3.300.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.596.500	1	1.950.450	-	1.046.050	-	600.000	-	-	1	3.596.500	100,00%	100,00%	1,00	3.596.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.300.500	-	-	-	-	-	1.350.650	1	1.949.850	1	3.300.500	100,00%	100,00%	1,00	3.300.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	69.688.500	-	11.500.000	-	18.870.100	-	16.262.500	2	22.430.200	2	69.062.800	100,00%	99,10%	2,00	69.062.800	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	30.500.500	1	6.900.000	1	7.859.800	1	6.900.000	1	8.825.400	4	30.485.200	100,00%	99,95%	4,00	30.485.200	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	-	
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	100	31.916.050	-	3.905.850	-	12.778.700	-	5.822.250	-	9.053.900	-	31.560.700	-	98,89%	-	31.560.700	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	2.190.500	-	644.350	-	613.650	-	932.500	1	-	1	2.190.500	100,00%	100,00%	1,00	2.190.500	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	3.486.200	-	935.700	-	998.100	-	689.750	1	862.650	1	3.486.200	100,00%	100,00%	1,00	3.486.200	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	2.130.500	-	-	-	978.000	-	-	1	1.152.500	1	2.130.500	100,00%	100,00%	1,00	2.130.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.360.650	-	-	-	-	-	-	1	1.360.650	1	1.360.650	100,00%	100,00%	1,00	1.360.650	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1.930.500	-	1.575.150	-	-	-	-	1	-	1	1.575.150	100,00%	81,59%	1,00	1.575.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	18.915.950	-	750.650	-	8.911.400	-	4.200.000	1	5.053.900	1	18.915.950	100,00%	100,00%	1,00	18.915.950	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.901.750	-	-	-	1.277.550	-	-	1	624.200	1	1.901.750	100,00%	100,00%	1,00	1.901.750	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	6.324.800	-	481.900	-	2.100.000	-	1.350.000	-	2.360.150	-	6.292.050	0,00%	99,48%	0,00	6.292.050	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6.324.800	-	481.900	-	2.100.000	-	1.350.000	1	2.360.150	1	6.292.050	100,00%	99,48%	1,00	6.292.050	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	61.058.850	-	3.841.500	-	42.060.000	-	6.600.000	-	8.554.300	-	61.055.800	0,00%	100,00%	0,00	61.055.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	28.500.000	-	-	1	28.500.000	-	-	-	-	1	28.500.000	100,00%	100,00%	1,00	28.500.000	
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	28.890.500	-	733.100	-	13.560.000	-	6.600.000	1	7.994.350	1	28.887.450	100,00%	99,99%	1,00	28.887.450	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1.030.350	-	470.400	-	-	-	-	1	559.950	1	1.030.350	100,00%	100,00%	1,00	1.030.350	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2.638.000	1	2.638.000	1	-	-	-	-	-	2	2.638.000	100,00%	100,00%	2,00	2.638.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	427.565.201	-	161.051.075	-	105.435.809	-	84.145.600	-	75.562.075	-	426.194.559	0,00%	99,68%	0,00	426.194.559	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	55.000.000	-	12.500.000	-	9.000.000	-	16.700.000	1	16.797.000	1	54.997.000	100,00%	99,99%	1,00	54.997.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.500.000	-	1.124.800	-	750.000	-	600.000	2	3.017.200	2	5.492.000	100,00%	99,85%	2,00	5.492.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	82.530.000	-	80.480.550	1	-	-	800.000	-	980.000	1	82.260.550	100,00%	99,67%	1,00	82.260.550	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	284.535.201	25	66.945.725	35	95.685.809	10	66.045.600	5	54.767.875	75	283.445.009	100,00%	99,62%	75,00	283.445.009	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	85.072.050	-	-	-	69.824.550	-	-	-	15.240.000	-	85.064.550	0,00%	99,99%	0,00	85.064.550	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	85.072.050	-	-	3	69.824.550	-	-	1	15.240.000	4	85.064.550	100,00%	99,99%	4,00	85.064.550	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	7.594.500	-	1.882.800	-	1.667.000	-	1.116.500	-	2.924.600	-	7.590.900	0,00%	99,95%	0,00	7.590.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	7.594.500	-	1.882.800	-	1.667.000	-	1.116.500	1	2.924.600	1	7.590.900	100,00%	99,95%	1,00	7.590.900	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	152.745.000	-	31.608.433	-	29.461.069	-	21.541.900	-	69.730.600	-	152.342.002	0,00%	99,74%	0,00	152.342.002	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	85.780.000	2	25.298.433	5	23.452.069	2	17.331.900	2	19.450.200	11	85.532.602	100,00%	99,71%	11,00	85.532.602	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			13	32.900.000	3	5.960.000	4	3.269.000	2	2.160.000	4	21.360.400	13	32.749.400	100,00%	99,54%	13,00	32.749.400				
			14	28.575.000	1	-	6	2.640.000	3	2.050.000	4	23.880.000	14	28.570.000	100,00%	99,98%	14,00	28.570.000				
			6	5.490.000	1	350.000	1	100.000	2	-	2	5.040.000	6	5.490.000	100,00%	100,00%	6,00	5.490.000				
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	99,70%						
			Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			60		100		70		96,37				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
			924.339.764		100.724.224		303.320.486		175.424.838		322.097.160		901.566.708		97,54%		52,50		100,00		901.566.708	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			70										55,00		94,45							
			96,37										0,00%									
			159.060.000		33.382.000		40.056.000		44.239.500		40.872.000		158.549.500		99,68%				158.549.500			
			20.310.000		4.686.000		4.200.000		6.344.000		5.080.000		20.310.000		100,00%				20.310.000			
			22.800.000		6.930.000		5.951.000		5.600.000		4.200.000		22.681.000		99,48%				22.681.000			
			9.640.000		-		-		7.980.000		1.660.000		9.640.000		100,00%				9.640.000			
			15.020.000		7.844.000		4.776.000		2.400.000		-		15.020.000		100,00%				15.020.000			
			10.500.000		-		-		900.000		9.600.000		10.500.000		100,00%				10.500.000			
			73.690.000		12.150.000		23.351.000		20.765.500		17.032.000		73.298.500		99,47%				73.298.500			
			7.100.000		1.772.000		1.778.000		250.000		3.300.000		7.100.000		100,00%				7.100.000			
			25.042.464		2.800.000		4.046.000		6.704.000		11.338.400		24.888.400		99,98%				24.888.400			
			20.980.000		2.800.000		4.046.000		5.600.000		8.380.000		20.826.000		99,27%				20.826.000			
			4.062.464		-		-		1.104.000		2.958.400		4.062.400		100,00%				4.062.400			
			122.586.000		-		103.495.000		-		3.040.000		106.535.000		86,91%				106.535.000			
			122.586.000		-		103.495.000		-		3.040.000		106.535.000		86,91%				106.535.000			
			448.389.000		44.403.000		134.873.985		81.531.426		187.490.997		448.299.408		99,98%				448.299.408			
			131.000.000		24.236.000		23.245.000		21.761.000		61.738.000		130.980.000		99,98%				130.980.000			
			17.350.000		2.120.000		3.180.000		4.922.000		7.128.000		17.350.000		100,00%				17.350.000			
			80.060.000		-		78.266.000		-		1.775.250		80.041.250		99,98%				80.041.250			
			219.979.000		18.047.000		30.182.985		54.848.426		116.849.747		219.928.158		99,98%				219.928.158			
			57.940.000		-		-		-		54.200.000		54.200.000		93,55%				54.200.000			
			57.940.000		-		-		-		54.200.000		54.200.000		93,55%				54.200.000			
			10.000.000		1.330.000		1.800.000		2.774.000		4.096.000		10.000.000		100,00%				10.000.000			
			10.000.000		1.330.000		1.800.000		2.774.000		4.096.000		10.000.000		100,00%				10.000.000			
			101.322.300		18.809.224		19.049.501		40.175.912		21.059.763		99.094.400		97,80%				99.094.400			
			56.082.300		7.993.251		7.908.900		30.201.757		8.608.392		54.712.300		97,56%				54.712.300			



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12								16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Predikat Kinerja																	
			Sangat Rendah																	
			Sangat Tinggi																	
			DINAS KESEHATAN																	
			17.550.475.850		2.374.262.074		5.910.907.408		4.300.724.084		4.753.860.431		17.339.753.997		98,80%		17.339.753.997			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.962.600	0,00%			0,00%		233.962.600	
		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	75	269.802.050	22.400.000	86.026.200	34.600.000	90.936.400	233.962.600	0,00%	86,72%	0,00%								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.271.000	-	-	2.700.000	17.454.500	20.154.500		99,43%		20.154.500							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	72	30.080.850	72	5.600.000	100	23.650.500	100	-	100	29.250.500	138,89%	97,24%	100,00%	29.250.500				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	27.132.300	-	-	-	7.000.000	-	19.846.000	-	26.846.000	0,00%	98,94%	0,00%	26.846.000				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	20.144.400	-	-	19.901.400	-	-	-	-	19.901.400	0,00%	98,79%	0,00%	19.901.400				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	15.778.800	-	-	-	-	-	10.275.900	-	10.275.900	0,00%	65,12%	0,00%	10.275.900				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	126.283.750	1	14.000.000	-	31.102.000	-	23.400.000	-	36.200.000	1	104.702.000	20,00%	82,91%	1,00%	104.702.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	30.110.950	1	2.800.000	-	11.372.300	-	1.500.000	-	7.160.000	1	22.832.300	20,00%	75,83%	1,00%	22.832.300		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	96	14.818.273.646	9	2.057.214.301	-	5.020.258.888	-	3.957.136.044	-	3.770.382.467	9	14.804.991.700	9,06%	99,91%	8,70%	14.804.991.700		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	160	14.694.250.746	160	2.033.526.551	160	5.007.616.888	-	3.925.434.244	-	3.714.430.367	80	14.681.008.050	50,00%	99,91%	80,00%	14.681.008.050		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	18.569.750	1	770.750	-	-	-	9.550.000	-	8.210.000	1	18.530.750	25,00%	99,79%	1,00%	18.530.750		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	12.439.250	-	8.697.000	-	3.742.000	-	-	-	-	12.439.000	0,00%	100,00%	0,00%	12.439.000			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	64.724.000	-	14.220.000	-	8.900.000	-	9.953.100	-	31.650.900	-	64.724.000	0,00%	100,00%	0,00%	64.724.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	28.289.900	4	-	4	-	4	12.198.700	4	16.091.200	4	28.289.900	22,22%	100,00%	4,00%	28.289.900		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	85	36.571.500	85	-	-	15.782.750	-	-	-	20.323.750	85	36.106.500	100,00%	98,73%	85,00%	36.106.500		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	27.081.500	-	-	-	12.397.750	-	-	-	14.683.750	-	27.081.500	0,00%	100,00%	0,00%	27.081.500		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	9.490.000	4	-	4	3.385.000	4	-	4	5.640.000	4	9.025.000	100,00%	95,10%	4,00%	9.025.000		
	<b>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependidikan Lingkup SKPD (Persen)	100	123.355.000	100	10.789.456	-	34.946.571	-	20.299.996	-	54.484.977	25	120.521.000	25,00%	97,70%	25,00%	120.521.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17	95.151.000	2	10.789.456	-	28.546.571	-	16.999.996	-	38.814.977	2	95.151.000	11,76%	100,00%	2,00%	95.151.000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			28.204.000		-	6.400.000		3.300.000		15.670.000		25.370.000		89,95%			25.370.000		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	100	331.824.850	100	49.870.745	-	139.828.273	-	30.531.000	-	55.736.530	25	275.966.548	25,00%	83,17%	25,00%	275.966.548		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13.870.400	1	-	1	4.580.000	-	-	-	9.011.880	2	13.591.880	200,00%	97,99%	2,00%	13.591.880		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	1	24.662.400	1	1.680.000	1	5.665.500	-	4.325.000	-	3.500.000	2	15.170.500	200,00%	61,51%	2,00%	15.170.500		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	36.240.000	1	7.077.000	-	7.300.000	-	9.550.000	-	11.000.000	1	34.927.000	100,00%	96,38%	1,00%	34.927.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	24.443.500	1	-	1	9.972.000	-	-	-	4.500.000	2	14.472.000	200,00%	59,21%	2,00%	14.472.000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
			K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	20.180.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	0,00%	9,91%	0,00	2.000.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	39.693.650	1	-	-	21.953.500	-	900.000	-	9.412.250	1	32.265.750	100,00%	81,29%	1,00	32.265.750		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	172.734.900	25	41.113.745	50	90.357.273	75	15.756.000	100	16.312.400	100	163.539.418	100,00%	94,68%	100,00	163.539.418		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	444.898.854	-	-	117.974.400	-	-	-	-	322.996.231	-	440.970.631	0,00%	99,12%	0,00	440.970.631		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	323.660.777	-	-	53.000.000	-	-	-	-	267.473.100	-	320.473.100	0,00%	99,02%	0,00	320.473.100		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	121.238.077	-	-	64.974.400	-	-	-	-	55.523.131	-	120.497.531	0,00%	99,39%	0,00	120.497.531		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	95	1.197.584.500	20	223.937.512	-	308.845.163	-	244.156.182	-	354.736.046	-	1.131.674.903	0,00%	94,50%	0,00	1.131.674.903		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	532.530.000	1	80.000.000	-	122.000.000	-	125.100.000	-	165.600.000	1	492.700.000	50,00%	92,52%	1,00	492.700.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	471.080.500	3	136.437.512	6	107.391.662	6	104.906.182	6	105.453.646	6	454.169.002	50,00%	96,41%	6,00	454.169.002		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	193.974.000	3	7.500.000	6	79.453.501	9	14.150.000	12	83.682.400	12	184.785.901	100,00%	95,26%	12,00	184.785.901		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	90	328.165.450	90	10.050.060	-	187.245.163	-	14.000.862	-	84.264.030	23	295.560.115	25,00%	90,06%	22,50	295.560.115		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	88.150.000	1	-	-	15.003.080	-	7.989.955	-	45.800.000	1	68.793.035	33,33%	78,04%	1,00	68.793.035		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	90.349.450	6	8.750.060	6	40.885.611	6	2.770.907	6	31.599.030	24	84.005.608	400,00%	92,98%	24,00	84.005.608		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	24.790.000	4	1.300.000	8	6.965.000	-	3.240.000	-	6.865.000	12	18.370.000	80,00%	74,10%	12,00	18.370.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	124.876.000	1	-	1	124.391.472	1	-	1	-	4	124.391.472	400,00%	99,61%	4,00	124.391.472		
														53,74%	98,80%					
														Rendah	Sangat Tinggi					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			6.202.982.312		1.029.844.509		1.822.594.469		1.919.918.468		1.237.992.949		6.010.350.395		96,89%		6.010.350.395	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0	433.047.600	-	120.822.700	-	31.159.800	-	123.066.048	-	134.540.351	-	409.588.899	0,00%	94,58%	0,00	409.588.899		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	224.186.940	1	101.267.500	2	-	6	52.228.300	10	63.676.400	10	217.172.200	100,00%	96,87%	10,00	217.172.200		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	37.143.800	1	9.143.800	-	5.600.000	2	8.400.000	-	12.600.000	3	35.743.800	150,00%	96,23%	3,00	35.743.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	13.549.950	-	-	-	-	1	3.721.900	2	9.210.500	2	12.932.400	100,00%	95,44%	2,00	12.932.400		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	47.999.840	1	10.411.400	-	20.060.000	-	5.370.000	-	7.490.000	1	43.331.400	50,00%	90,27%	1,00	43.331.400		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	28.196.170	-	-	-	-	-	5.312.350	2	21.619.900	2	26.932.250	100,00%	95,52%	2,00	26.932.250		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	50.819.700	-	-	1	2.168.800	3	32.704.998	5	11.867.051	5	46.740.849	100,00%	91,97%	5,00	46.740.849		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	31.151.200	-	-	1	3.331.000	2	15.328.500	4	8.076.500	4	26.736.000	100,00%	85,83%	4,00	26.736.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	0	4.188.712.731	-	607.412.261	-	1.457.426.629	-	1.363.343.529	-	713.870.821	-	4.142.053.240	0,00%	98,89%	0,00	4.142.053.240	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	45	4.109.647.831	45	602.055.211	45	1.449.488.629	-	1.349.869.529	-	687.009.971	90	4.088.423.340	200,00%	99,48%	90,00	4.088.423.340	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	26.907.000	5	2.800.000	15	2.800.000	50	4.407.000	75	7.000.000	75	17.007.000	75,00%	63,21%	75,00	17.007.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	10.544.500	-	-	20	2.240.000	50	5.595.500	50	-	50	7.835.500	50,00%	74,31%	50,00	7.835.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	8.210.000	-	-	-	-	-	-	80	5.850.000	80	5.850.000	80,00%	71,25%	80,00	5.850.000	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	10	9.284.000	-	2.557.050	-	-	-	-	-	4.028.350	-	6.585.400	0,00%	70,93%	0,00	6.585.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	12.469.400	1	-	2	2.898.000	3	3.471.500	4	3.100.000	4	9.469.500	100,00%	75,94%	4,00	9.469.500	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5	11.650.000	-	-	-	-	1	-	3	6.882.500	3	6.882.500	60,00%	59,08%	3,00	6.882.500	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD (Persen)	0	109.081.150	-	2.800.000	-	7.834.250	-	66.190.000	-	7.000.000	-	83.824.250	0,00%	76,85%	0,00	83.824.250	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	41.483.500	-	-	-	2.233.500	45	39.250.000	45	-	45	41.483.500	45,00%	100,00%	45,00	41.483.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10	43.016.900	1	-	1	2.500.000	6	22.050.000	6	-	6	24.550.000	60,00%	57,07%	6,00	24.550.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	24.580.750	-	2.800.000	1	3.100.750	2	4.890.000	3	7.000.000	3	17.790.750	60,00%	72,38%	3,00	17.790.750	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	0	515.705.516	-	161.342.208	-	87.960.500	-	180.655.831	-	40.458.178	-	470.416.717	0,00%	91,22%	0,00	470.416.717	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	16.564.500	-	3.662.000	-	-	-	2.544.700	-	2.338.500	-	8.545.200	0,00%	51,59%	0,00	8.545.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	15	10.004.685	-	-	5	1.844.000	7	2.968.000	7	870.000	7	5.682.000	46,67%	56,79%	7,00	5.682.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	40.310.591	1	8.590.000	3	6.750.000	6	4.640.000	8	7.135.000	18	27.115.000	180,00%	67,27%	18,00	27.115.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	25.099.850	3	9.259.800	-	-	5	462.600	6	4.748.000	14	14.470.400	140,00%	57,65%	14,00	14.470.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10	60.407.600	3	20.222.650	3	13.737.300	7	10.914.200	10	11.803.100	23	56.677.250	230,00%	93,82%	23,00	56.677.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	363.318.290	4	119.607.758	5	65.629.200	8	159.126.331	8	13.563.578	8	357.926.867	80,00%	98,52%	8,00	357.926.867	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			128.194.995		-		116.203.100		-		-		116.203.100		90,65%		116.203.100	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	128.194.995	-	-	8	116.203.100	8	-	8	-	8	116.203.100	80,00%	90,65%	8,00	116.203.100	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			507.340.587		73.916.340		57.959.010		116.736.352		224.671.538		473.283.240		93,29%		473.283.240	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	373.142.500	1	72.850.000	2	52.013.250	3	78.734.250	4	165.766.750	4	369.364.250	80,00%	98,99%	4,00	369.364.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	104.110.937	-	1.066.340	-	1.445.760	2	31.242.102	2	42.012.188	2	75.766.390	40,00%	72,77%	2,00	75.766.390	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	16.779.600	-	-	-	-	-	3.400.000	-	12.845.600	-	16.245.600	0,00%	96,82%	0,00	16.245.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	13.307.550	-	-	2	4.500.000	3	3.360.000	3	4.047.000	3	11.907.000	60,00%	89,48%	3,00	11.907.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			320.899.733		63.551.000		64.051.180		69.926.708		117.452.061		314.980.949		98,16%		314.980.949	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	215.099.050	2	57.151.000	2	50.226.180	4	56.863.208	4	48.054.200	4	212.294.588	80,00%	98,70%	4,00	212.294.588	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	105.800.683	1	6.400.000	2	13.825.000	2	13.063.500	4	69.397.861	4	102.686.361	80,00%	97,06%	4,00	102.686.361	
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	161,33%	96,89%			
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	68,5											0,00%		66,50		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	90	5.486.944.436		895.916.430		2.027.612.658		1.168.827.550		1.368.791.225		5.461.147.863	0,00%	99,53%	80,00		5.461.147.863
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (Poin)	85											0,00%		70,00			
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	95											0,00%		85,00			
														0,00%					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	24	179.014.350	-	90.210.350	-	35.414.200	24	23.100.000	24	30.289.800	24	179.014.350	100,00%	100,00%	24,00	179.014.350	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	89.247.550	3	63.752.550	3	10.695.000	3	8.000.000	4	6.800.000	4	89.247.550	100,00%	100,00%	4,00	89.247.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.499.900	1	2.499.900	1	-	1	-	1	-	1	2.499.900	100,00%	100,00%	1,00	2.499.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.494.900	-	-	-	-	-	-	1	1.494.900	1	1.494.900	100,00%	100,00%	1,00	1.494.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.499.900	1	2.499.900	1	-	1	-	1	-	1	2.499.900	100,00%	100,00%	1,00	2.499.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.494.900	-	-	-	-	-	-	1	1.494.900	1	1.494.900	100,00%	100,00%	1,00	1.494.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	56.258.000	1	18.658.000	1	14.400.000	1	10.800.000	2	12.400.000	2	56.258.000	100,00%	100,00%	2,00	56.258.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	25.519.200	-	2.800.000	2	10.319.200	2	4.300.000	4	8.100.000	4	25.519.200	100,00%	100,00%	4,00	25.519.200	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	99	4.391.706.820	-	642.125.879	-	1.718.575.558	55	959.440.405	99	1.046.999.992	99	4.367.141.834	100,00%	99,44%	99,00	4.367.141.834	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	141	4.355.584.620	141	635.520.879	141	1.705.858.358	141	951.040.405	141	1.038.599.992	141	4.331.019.634	100,00%	99,44%	141,00	4.331.019.634	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	36.122.200	-	6.605.000	1	12.717.200	1	8.400.000	1	8.400.000	1	36.122.200	100,00%	100,00%	1,00	36.122.200	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)	95	21.109.000	-	3.200.000	-	8.780.000	95	9.043.000	95	-	95	21.023.000	100,00%	99,59%	95,00	21.023.000	



No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	32.183.000	1	2.449.800	1	1.730.000	1	4.002.000	1	23.803.928	1	31.985.728	100,00%	99,39%	1,00	31.985.728	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.975.000	-	-	-	-	1	3.746.900	-	5.852.115	1	9.599.015	100,00%	96,23%	1,00	9.599.015	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	24.000.000	1	3.979.800	1	9.600.000	1	3.200.000	1	7.180.000	1	23.959.800	100,00%	99,83%	1,00	23.959.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	13.200.000	-	-	-	-	-	-	1	12.714.436	1	12.714.436	100,00%	96,32%	1,00	12.714.436	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	16.780.000	2	1.040.000	2	3.385.200	2	4.391.200	2	7.159.000	2	15.975.400	100,00%	95,21%	2,00	15.975.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	33.000.000	1	-	1	12.500.000	-	7.446.000	1	10.855.000	3	30.801.000	100,00%	93,34%	3,00	30.801.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)		97	4.317.846.330	-	601.704.566	-	1.644.361.199	-	988.763.006	95	1.034.534.399	95	4.269.363.170	97,94%	98,88%	95,00	4.269.363.170	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	43	4.178.146.330	43	594.296.016	43	1.608.140.799	43	954.778.906	43	984.146.185	43	4.141.361.906	100,00%	99,12%	43,00	4.141.361.906	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	1	863.800	1	304.400	1	2.795.900	1	5.210.300	1	9.174.400	100,00%	91,74%	1,00	9.174.400	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	31.800.000	1	5.189.750	1	3.424.000	1	8.423.800	1	13.318.250	1	30.355.800	100,00%	95,46%	1,00	30.355.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	7.900.000	-	-	-	-	-	-	1	4.238.310	1	4.238.310	100,00%	53,65%	1,00	4.238.310	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	90.000.000	3	1.355.000	3	32.492.000	3	22.764.400	2	27.621.354	11	84.232.754	91,67%	93,59%	11,00	84.232.754	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)		97	23.355.540	97	-	97	8.496.240	97	10.099.500	97	2.643.500	97	21.239.240	100,00%	90,94%	97,00	21.239.240	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	23.355.540	1	-	1	8.496.240	1	10.099.500	1	2.643.500	1	21.239.240	100,00%	90,94%	1,00	21.239.240	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)		97	296.146.400	97	-	97	171.984.200	97	4.138.400	97	56.931.640	97	233.054.240	100,00%	78,70%	97,00	233.054.240	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	161.938.400	-	-	1	149.947.000	-	-	-	-	1	149.947.000	100,00%	92,80%	1,00	149.947.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	15.000.000	1	-	1	4.877.200	1	4.138.400	1	5.931.640	1	14.947.240	100,00%	99,65%	1,00	14.947.240	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	119.208.000	1	-	1	17.160.000	-	-	6	51.000.000	8	68.160.000	200,00%	57,18%	8,00	68.160.000	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai SAKIP Lingkup OPD (Poin)	88												0,00%		65,50		N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen)	85	7.686.579.319	1.050.563.463		3.023.182.023		1.432.195.984		2.147.748.130		7.653.689.600	0,00%	99,57%	85,00	7.653.689.600		
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persen)	75											0,00%		75,00			
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
		Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	22		27		27		27		26		26		115,91%		25,50		
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	15	197.448.600	21	75.340.000	21	39.096.500	21	42.278.300	25	40.733.800	25	197.448.600	166,67%	100,00%	25,00	197.448.600	
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	11		13		13		13		14		14		127,27%		14,00		
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	18		19		19		19		20		20		109,72%		19,75		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	120.964.200	2	64.019.200	2	19.535.000	-	20.610.000	-	16.800.000	4	120.964.200	100,00%	100,00%	4,00	120.964.200	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.100.600	-	-	-	-	1	2.100.600	-	-	1	2.100.600	100,00%	100,00%	1,00	2.100.600	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	3.775.600	-	-	-	-	1	3.775.600	-	-	1	3.775.600	100,00%	100,00%	1,00	3.775.600	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.099.900	1	2.099.900	-	-	-	-	-	-	1	2.099.900	100,00%	100,00%	1,00	2.099.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.395.600	-	-	-	-	-	224.700	1	1.170.900	1	1.395.600	100,00%	100,00%	1,00	1.395.600	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	55.416.100	-	8.230.000	-	13.980.000	-	14.067.400	1	19.138.700	1	55.416.100	100,00%	100,00%	1,00	55.416.100	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	11.696.600	4	990.900	1	5.581.500	1	1.500.000	1	3.624.200	7	11.696.600	100,00%	100,00%	7,00	11.696.600	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	99		17		68		79		100		100		100,63%		99,62		
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	80	5.644.199.889	88	770.860.773	99	2.208.231.437	99	1.232.744.899	100	1.403.582.201	385	5.615.419.310	481,40%	99,49%	385,12	5.615.419.310	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	48	5.487.443.689	48	743.132.773	48	2.163.619.937	48	1.195.959.399	48	1.355.981.001	48	5.458.693.110	100,00%	99,48%	48,00	5.458.693.110	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	124.024.900	1	22.738.000	1	37.401.500	-	27.010.000	-	36.845.400	2	123.994.900	100,00%	99,98%	2,00	123.994.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	755.800	-	-	-	-	-	-	1	755.800	1	755.800	100,00%	100,00%	1,00	755.800	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	31.975.500	-	4.990.000	-	7.210.000	1	9.775.500	-	10.000.000	1	31.975.500	100,00%	100,00%	1,00	31.975.500	
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																	
		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	85	32.550.300	63	4.980.000	63	10.170.300	73	7.440.000	93	9.960.000	93	32.550.300	109,41%	100,00%	93,00	32.550.300	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	32.550.300	-	4.980.000	1	10.170.300	-	7.440.000	-	9.960.000	1	32.550.300	100,00%	100,00%	1,00	32.550.300	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																	
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	96	127.261.600	60	8.100.000	77	37.296.000	77	8.400.000	100	73.465.600	100	127.261.600	104,17%	100,00%	100,00	127.261.600	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	48	33.710.400	48	5.600.000	48	8.510.400	48	8.400.000	48	11.200.000	48	33.710.400	100,00%	100,00%	48,00	33.710.400	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			68	93.551.200	-	2.500.000	31	28.785.600	-	-	37	62.265.600	68	93.551.200	100,00%	100,00%	68,00	93.551.200		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	95	319.705.761	78	81.762.948	95	65.117.381	95	43.041.700	100	129.738.964	100	319.660.993	105,26%	99,99%	100,00	319.660.993		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.862.400	1	1.862.400	-	-	-	-	-	7.000.000	1	8.862.400	100,00%	100,00%	1,00	8.862.400		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	39.673.689	1	9.715.000	1	12.735.689	1	7.035.000	1	10.188.000	1	39.673.689	100,00%	100,00%	1,00	39.673.689		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000	1	1.245.000	1	3.600.000	1	4.855.000	1	15.300.000	1	25.000.000	100,00%	100,00%	1,00	25.000.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	44.292.000	1	2.000.000	1	24.625.300	1	14.666.700	1	3.000.000	1	44.292.000	100,00%	100,00%	1,00	44.292.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	201.877.672	20	66.940.548	7	24.156.392	9	16.485.000	41	94.250.964	77	201.832.904	256,67%	99,98%	77,00	201.832.904		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	666.207.300	100	-	100	353.957.200	100	-	100	311.730.000	100	666.687.200	100,00%	99,92%	100,00	666.687.200		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	88	666.207.300	-	-	38	353.957.200	-	-	50	311.730.000	88	666.687.200	100,00%	99,92%	88,00	666.687.200		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	75	298.976.428	75	56.896.798	75	62.869.108	82	59.554.485	99	119.146.365	99	298.466.756	132,16%	99,83%	99,12	298.466.756		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	59.244.200	1	11.114.200	1	13.500.000	1	14.820.000	2	19.740.000	2	59.174.200	100,00%	99,88%	2,00	59.174.200		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	125.750.528	3	24.161.598	3	25.029.608	3	19.606.985	3	56.562.665	3	125.360.856	100,00%	99,69%	3,00	125.360.856		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	113.981.700	3	21.621.000	3	24.339.500	3	25.127.500	4	42.843.700	4	113.931.700	100,00%	99,96%	4,00	113.931.700		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	85	400.229.441	13	52.622.944	62	246.444.097	78	38.736.600	100	59.391.200	100	397.194.841	117,65%	99,24%	100,00	397.194.841		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	58.975.340	1	9.230.540	1	16.593.600	1	17.392.100	1	13.259.100	1	56.475.340	100,00%	95,76%	1,00	56.475.340		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	109.429.088	5	24.395.604	11	41.438.384	5	9.595.100	7	33.465.400	28	108.894.488	140,00%	99,51%	28,00	108.894.488		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	32.066.313	14	9.140.000	2	3.716.113	5	6.543.500	9	12.666.700	30	32.066.313	100,00%	100,00%	30,00	32.066.313		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	199.758.700	-	9.856.800	1	184.696.000	1	5.205.900	1	-	1	199.758.700	100,00%	100,00%	1,00	199.758.700		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		104,68%		99,57%	
															Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			107.606.941.904		4.936.293.186		13.870.613.613		52.144.763.267		36.414.697.148		107.366.367.214		99,78%		107.366.367.214	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.748.855		10.000.000		15.300.000		34.703.800		32.691.650		92.695.450		99,94%		92.695.450		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	12.103.800	-	-	3	-	-	10.503.800	1	1.600.000	4	12.103.800	100,00%	100,00%	4,00	12.103.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	34.878.850	-	10.000.000	1	9.078.850	-	15.800.000	-	-	1	34.878.850	100,00%	100,00%	1,00	34.878.850		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	32.880.150	-	-	-	-	-	8.400.000	-	24.466.750	-	32.866.750	0,00%	99,96%	0,00	32.866.750		

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.248.050	-	-	1	6.221.150	-	-	-	-	1	6.221.150	100,00%	99,57%	1,00	6.221.150		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.102.375	-	-	-	-	-	-	1	3.099.550	1	3.099.550	100,00%	99,91%	1,00	3.099.550		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3.535.630	2	-	1	-	-	-	1	3.525.350	4	3.525.350	100,00%	99,71%	4,00	3.525.350		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			41.489.901.554		4.898.793.186		13.841.563.613		11.390.121.205		11.196.656.259		41.327.134.263		99,61%		41.327.134.263		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	345	41.223.648.754	397	4.853.243.186	399	13.827.813.613	399	11.283.603.205	399	11.118.216.859	1.584	41.082.876.863	462,03%	99,66%	1594,00	41.082.876.863		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	3.479.500	-	-	-	-	-	-	2	3.476.400	2	3.476.400	100,00%	99,91%	2,00	3.476.400		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	262.773.300	3	45.550.000	3	13.750.000	3	106.518.000	3	74.963.000	12	240.781.000	100,00%	91,63%	12,00	240.781.000		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			2.292.350		-		-		-		2.292.350		2.292.350		100,00%		2.292.350		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2.292.350	2	-	-	-	-	-	-	2.292.350	2	2.292.350	100,00%	100,00%	2,00	2.292.350		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			53.351.025		7.500.000		3.750.000		21.900.000		20.143.525		53.293.525		99,89%		53.293.525		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	53.351.025	3	7.500.000	3	3.750.000	3	21.900.000	3	20.143.525	12	53.293.525	100,00%	99,89%	12,00	53.293.525		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			54.381.494		-		-		4.185.000		-		4.185.000		7,70%		4.185.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	54.381.494	3	-	3	-	3	4.185.000	-	-	9	4.185.000	75,00%	7,70%	9,00	4.185.000		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			135.000.000		20.000.000		10.000.000		45.000.000		32.500.000		107.500.000		79,63%		107.500.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	135.000.000	3	20.000.000	3	10.000.000	3	45.000.000	3	32.500.000	12	107.500.000	100,00%	79,63%	12,00	107.500.000		
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			65.779.266.626		-		-		40.648.853.262		25.130.413.364		65.779.266.626		100,00%		65.779.266.626		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	65.779.266.626	1	-	1	-	1	40.648.853.262	1	25.130.413.364	1	65.779.266.626	100,00%	100,00%	1,00	65.779.266.626		
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	238,65%	99,78%				
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			6694	311.835.488.157		330.951.750		9.232.541.451		44.957.436.110		224.376.611.898		278.897.541.209	0,00%	89,44%	6553,00	278.897.541.209	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Persen)	90	123.762.717.105	30	249.501.000	-	1.222.422.220	-	19.107.952.828	-	88.862.094.211	30	109.441.970.259	33,33%	88,43%	30,00	109.441.970.259		
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	18	4.474.125.000	-	-	18	-	-	870.963.310	-	1.911.219.435	18	2.782.182.745	100,00%	62,18%	18,00	2.782.182.745		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	16	5.082.688.000	-	-	16	-	-	1.242.436.727	-	2.827.530.038	16	4.069.966.765	100,00%	80,08%	16,00	4.069.966.765		

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun (Ruang)	13	5.577.322.250	-	-	13	-	-	1.382.411.233	-	2.751.885.268	13	4.134.296.501	100,00%	74,13%	13,00	4.134.296.501	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah dibangun (Ruang)	11	4.719.745.750	-	-	11	-	-	1.242.259.672	-	2.515.323.469	11	3.757.583.141	100,00%	79,61%	11,00	3.757.583.141	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah dibangun (Ruang)	10	4.291.982.500	-	-	10	-	-	1.128.203.508	-	2.252.311.137	10	3.380.514.645	100,00%	78,76%	10,00	3.380.514.645	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun (Ruang)	8	1.894.183.600	-	-	8	-	-	564.285.756	-	1.169.993.667	8	1.734.279.423	100,00%	91,56%	8,00	1.734.279.423	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun (Ruang)	14	3.434.340.400	-	-	14	-	-	900.621.267	-	1.859.174.880	14	2.759.796.147	100,00%	80,36%	14,00	2.759.796.147	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			691.875.000	-	-				229.417.863		403.018.234		632.436.097		91,41%		632.436.097	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah dibangun (Unit)	7	3.142.650.000	-	-	7	-	-	628.985.985	-	1.362.050.869	7	1.991.036.854	100,00%	63,36%	7,00	1.991.036.854	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun (Paket)	22	11.486.121.456	-	-	22	331.881.900	-	1.761.753.545	-	7.930.666.620	22	10.024.302.065	100,00%	87,27%	22,00	10.024.302.065	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun (Unit)	7	2.369.565.275	-	-	7	-	-	469.278.528	-	957.724.607	7	1.427.003.135	100,00%	60,22%	7,00	1.427.003.135	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi (Ruang)	26	4.560.800.850	-	-	26	-	-	1.255.826.468	-	2.354.453.431	26	3.610.279.899	100,00%	79,16%	26,00	3.610.279.899	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan direhabilitasi (Ruang)	1	63.550.000	-	-	1	-	-	17.093.400	-	25.127.333	1	42.220.733	100,00%	66,44%	1,00	42.220.733	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah direhabilitasi (Ruang)	1	159.387.500	-	-	1	-	-	41.052.000	-	63.241.850	1	104.293.850	100,00%	65,43%	1,00	104.293.850	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi (Ruang)	2	321.337.500	-	-	2	-	-	110.389.050	-	156.256.450	2	266.645.500	100,00%	82,98%	2,00	266.645.500	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah dibangun (Ruang)	1	158.875.000	-	-	1	-	-	41.808.960	-	92.225.000	1	134.033.960	100,00%	84,36%	1,00	134.033.960	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi (Ruang)	1	158.875.000	-	-	1	-	-	29.341.500	-	64.588.500	1	93.930.000	100,00%	59,12%	1,00	93.930.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi (Ruang)	4	637.550.000	-	-	4	-	-	157.404.289	-	388.741.011	4	546.145.300	100,00%	85,66%	4,00	546.145.300	
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	2	255.450.000	-	-	2	-	-	65.182.500	-	146.636.624	2	211.819.124	100,00%	82,92%	2,00	211.819.124	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	126	6.179.573.500	-	-	126	-	-	1.250.874.991	-	4.928.698.509	126	6.179.573.500	100,00%	100,00%	126,00	6.179.573.500	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			26.250.000	-	-				-	-	-		-		0,00%		-	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			200.120.750	-	-				-	-	199.883.250		199.883.250		99,88%		199.883.250	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	4.206.469.600	-	-	1	-	-	3.996.534.500	-	107.400.000	1	4.103.934.500	100,00%	97,56%	1,00	4.103.934.500	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			959.892.624	-	-				-	-	824.786.852		824.786.852		85,92%		824.786.852	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	75	835.492.400	-	-	75	110.268.000	-	249.708.990	-	441.928.255	75	801.905.245	100,00%	95,98%	75,00	801.905.245	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	168	1.405.994.170	-	-	168	23.150.000	-	649.246.363	-	664.701.148	168	1.337.097.511	100,00%	95,10%	168,00	1.337.097.511	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Lembaga dan Manajemen Sekolah Menengah Atas yang telah dibina (Lembaga)	20	553.371.005	-	-	20	-	-	-	-	238.140.250	20	238.140.250	100,00%	43,03%	20,00	238.140.250	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	90	51.506.118.000	-	-	90	9.075.000	-	-	90	50.229.003.242	45	50.238.078.242	50,00%	97,54%	45,00	50.238.078.242	
	Pemeliharaan Mebel			609.000.000	-	-				-	-	608.619.162		608.619.162		99,94%		608.619.162	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	60	955.489.010	60	-	-	316.207.100	-	68.709.980	-	535.422.780	60	920.339.860	100,00%	96,32%	60,00	920.339.860	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Layanan di bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1.496.537.095	1	-	-	230.964.670	-	554.162.443	-	638.093.440	1	1.423.220.553	100,00%	95,10%	1,00	1.423.220.553	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	962.648.820	1	249.501.000	-	200.875.550	-	200.000.000	-	94.298.900	1	744.675.450	100,00%	77,36%	1,00	744.675.450	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)	91	385.335.050	91	-	-	-	-	-	-	118.950.000	91	118.950.000	100,00%	30,87%	91,00	118.950.000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Persen)	90	180.261.234.142	35	81.450.750	-	7.906.076.881	-	25.398.222.322	-	128.300.191.699	35	161.685.941.652	38,89%	89,70%	35,00	161.685.941.652	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	14	3.996.675.900	-	-	14	45.954.810	-	1.032.044.187	-	2.532.339.584	14	3.610.338.581	100,00%	90,33%	14,00	3.610.338.581	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun (Ruang)	16	18.245.025.625	-	-	16	234.218.826	-	4.159.580.680	-	9.648.056.494	16	14.041.856.000	100,00%	76,96%	16,00	14.041.856.000	
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang telah di Bangun (Ruang)	100	39.587.770.375	-	-	100	475.118.550	-	9.746.483.090	-	22.332.561.398	100	32.554.163.038	100,00%	82,23%	100,00	32.554.163.038	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang telah dibangun (Ruang)	26	3.839.545.450	-	-	26	45.382.995	-	976.246.036	-	2.251.518.583	26	3.273.147.614	100,00%	85,25%	26,00	3.273.147.614	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun (Ruang)	15	5.925.801.750	-	-	15	75.126.155	-	1.545.718.569	-	3.541.156.463	15	5.162.001.187	100,00%	87,11%	15,00	5.162.001.187	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah dibangun (Unit)	1	740.085.700	-	-	1	-	-	90.176.400	-	642.381.775	1	732.558.175	100,00%	98,98%	1,00	732.558.175	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	59	19.749.969.031	-	-	59	549.742.835	-	3.249.043.822	-	12.599.765.306	59	16.398.551.963	100,00%	83,03%	59,00	16.398.551.963	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (RKS) yang akan direhabilitasi (Ruang)	6	1.132.591.050	-	-	6	10.560.540	-	278.347.047	-	647.706.101	6	936.613.688	100,00%	82,70%	6,00	936.613.688	
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan direhabilitasi (Ruang)	1	643.204.825	-	-	1	2.723.175	-	57.721.325	-	538.658.097	1	599.102.597	100,00%	93,14%	1,00	599.102.597	
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi (Ruang)	3	754.719.175	-	-	3	-	-	194.792.963	-	436.112.440	3	630.905.403	100,00%	83,59%	3,00	630.905.403	
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang (Ruang)	2	74.401.075	-	-	2	1.050.225	-	19.933.271	-	47.211.114	2	68.194.610	100,00%	91,66%	2,00	68.194.610	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebelur Sekolah yang telah disediakan (Jenis)	222	6.737.971.750	-	-	222	-	-	902.603.254	-	5.835.368.496	222	6.737.971.750	100,00%	100,00%	222,00	6.737.971.750	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	200.120.750	-	-	1	-	-	-	-	199.938.750	1	199.938.750	100,00%	99,91%	1,00	199.938.750	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia (Paket)	15	27.524.087.500	-	-	15	5.849.710.320	-	1.123.810.000	-	18.999.498.080	15	25.973.018.400	100,00%	94,36%	15,00	25.973.018.400	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7044	324.159.700	7.044	-	7.044	-	7.044	81.000.000	7.044	243.000.000	7.044	324.000.000	100,00%	99,95%	7044,00	324.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	110	714.953.300	-	-	110	68.750.000	-	383.666.300	-	253.063.988	110	705.480.288	100,00%	98,68%	110,00	705.480.288	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	294	2.536.310.070	-	-	294	187.162.100	-	828.282.170	-	1.421.302.990	294	2.436.747.260	100,00%	96,07%	294,00	2.436.747.260	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan yang telah dibina (Sekolah)	30	336.352.356	-	-	30	-	-	-	-	265.440.420	30	265.440.420	100,00%	78,92%	30,00	265.440.420	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	129	45.303.660.000	-	-	129	-	-	129	-	45.303.660.000	65	45.303.660.000	50,00%	100,00%	64,50	45.303.660.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	11	112.000.000	-	-	11	-	-	-	-	111.949.660	11	111.949.660	100,00%	99,96%	11,00	111.949.660	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	60	191.850.750	60	81.450.750	-	108.800.000	-	-	-	-	60	190.250.750	100,00%	99,17%	60,00	190.250.750	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Layanan dibidang Pendidikan (Dokumen)	1	1.514.978.010	1	-	-	251.776.350	-	728.773.208	-	375.001.960	1	1.355.551.518	100,00%	89,48%	1,00	1.355.551.518	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	74.500.000	-	74.500.000	0,00%	99,33%	0,00	74.500.000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	Layanan Pendidikan Khusus yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan (Persen)	80	7.811.536.910	25	-	-	104.042.350	-	451.260.960	-	7.214.325.988	25	7.769.629.298	31,25%	99,46%	25,00	7.769.629.298	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	547.012.360	-	-	3	33.732.900	-	-	-	498.906.582	3	532.639.482	100,00%	97,37%	3,00	532.639.482	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	100.120.750	-	-	1	-	-	-	-	99.832.000	1	99.832.000	100,00%	99,71%	1,00	99.832.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	300	420.135.700	-	-	300	-	-	-	-	419.800.000	300	419.800.000	100,00%	99,92%	300,00	419.800.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	360	695.118.100	-	-	360	70.309.450	-	305.389.960	-	301.694.406	360	677.393.816	100,00%	97,45%	360,00	677.393.816	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	25	175.000.000	-	-	25	-	-	145.871.000	-	29.100.000	25	174.971.000	100,00%	99,98%	25,00	174.971.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	25	5.674.150.000	-	-	25	-	25	-	-	5.674.150.000	13	5.674.150.000	50,00%	100,00%	12,50	5.674.150.000	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)	25	200.000.000	-	-	25	-	-	-	-	190.843.000	25	190.843.000	100,00%	95,42%	25,00	190.843.000	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												82,75%		89,44%					
<b>Predikat Kinerja</b>												Tinggi		Tinggi					
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Persen)	100	399.989.850	-	-	-	-	-	-	-	327.547.000	-	327.547.000	0,00%	81,89%	100,00	327.547.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			399.989.850								327.547.000		327.547.000		81,89%		327.547.000	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			399.989.850								327.547.000		327.547.000		81,89%		327.547.000	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%		81,89%					
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah		Tinggi					
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan (Persen)	100	646.135.770	49.785.770		135.410.000			69.390.000		338.802.360	-	593.388.130	0,00%	91,84%	100,00	593.388.130	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			646.135.770	49.785.770		135.410.000			69.390.000		338.802.360		593.388.130		91,84%		593.388.130	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dokumen)	1	646.135.770	-	49.785.770	1	135.410.000	-	69.390.000	-	338.802.360	1	593.388.130	100,00%	91,84%	1,00	593.388.130	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												100,00%		91,84%					
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi					
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan (Persen)	100	1.038.450.700	-	-	154.500.000			200.000.000		421.886.000	-	776.386.000	0,00%	74,76%	100,00	776.386.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Dibina, Dikembangkan dan Dilindungi (Persen)	0	1.038.450.700	-	-	154.500.000	-	200.000.000	-	421.886.000	-	776.386.000	0,00%	74,76%	0,00	776.386.000		
	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah Yang Tersusun (Kamus)	1	174.885.700	-	-	-	-	-	-	-	173.585.000	-	173.585.000	0,00%	99,26%	0,00	173.585.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV									12		14 = 6 + 12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku)	5560	863.565.000	-	-	5.560	154.500.000	-	200.000.000	-	248.301.000	5.560	602.801.000	100,00%	69,80%	5560,00	602.801.000					
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,16%	74,76%							
													Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																						
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi (Persen)	94,44												0,00%		91,66		DINAS KESEHATAN				
		Jumlah Absolut Angka Kematian Ibu (Kasus)	46												0,00%		50,00						
		Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) (Angka)	7,56												0,00%		8,38						
		Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Persen)	60												0,00%		49,00						
		Persentase ketercapaian Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Persen)	64	37.924.439.170	2.385.350.000	6.893.811.457	5.744.321.654	19.899.445.563	34.922.928.674	0,00%	92,09%	59,00	34.922.928.674										
		Prevalensi Balita Wasting (Persen)	6												0,00%		63,00						
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi (Persen)	100												0,00%		100,00						
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Persen)	100												0,00%		100,00						
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Persen)	94,23												0,00%		94,13						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas melaksanakan manajemen Puskesmas dengan Pendekatan keluarga Sehat sebesar 20% (Persen)	80	9.127.977.575	88	17.658.000	-	1.387.028.657	-	1.411.109.504	-	4.175.313.410	88	6.991.109.571	109,68%	76,59%	87,74	6.991.109.571					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			900.350.000		-		-		150.000.000		450.000.000		600.000.000		66,64%		600.000.000					
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.528.669.791		-		522.143.060		458.281.000		804.485.589		1.784.909.649		70,59%		1.784.909.649					
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			909.893.419		-		-		-		840.724.008		840.724.008		92,40%		840.724.008					
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan			1.179.785.455		-		4.990.005		13.809.000		1.025.353.453		1.044.152.458		88,50%		1.044.152.458					
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			245.779.500		-		7.406.000		70.604.000		154.205.080		232.215.080		94,48%		232.215.080					
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			158.085.700		-		38.920.750		10.098.000		86.286.000		135.304.750		85,59%		135.304.750					
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			3.205.413.710		17.658.000		813.568.842		708.317.504		814.259.280		2.353.803.626		73,43%		2.353.803.626					
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Logistik kesehatan yang tersedia yang terdampak Krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana yang sesuai standar (Jenis)	100	28.367.109.625	100	2.367.692.000	-	5.375.449.800	-	4.270.658.150	-	15.500.969.200	25	27.514.769.150	25,00%	97,00%	25,00	27.514.769.150					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			1.831.888.714		-		218.110.450		37.480.000		1.513.983.604		1.769.574.054		96,60%		1.769.574.054					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			362.189.000		-		37.886.000		36.166.000		244.393.250		318.445.250		87,92%		318.445.250					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			794.127.720		-		81.305.400		219.177.000		472.088.000		772.570.400		97,29%		772.570.400					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.633.930.650		-		213.153.400		245.505.100		1.994.362.120		2.453.020.620		93,13%		2.453.020.620					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			433.272.810		-		47.628.650		-		368.520.100		416.148.750		96,05%		416.148.750					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			338.623.750		-		84.715.000		70.268.700		172.502.572		327.486.272		96,71%		327.486.272					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		6.338.000.250	-	600.059.000	1.098.318.000	4.240.266.964		5.938.643.964	93,70%	5.938.643.964							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		136.000.000	-	130.817.000	2.850.000	-	133.667.000	98,28%	133.667.000								
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		14.173.135.831	2.365.192.000	3.572.679.000	2.371.750.000	5.863.474.000	14.173.095.000	100,00%	14.173.095.000								
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		163.803.650	2.500.000	29.597.000	52.735.350	60.725.450	145.557.800	88,86%	145.557.800								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		963.382.900	-	280.442.900	48.860.000	539.946.140	869.249.040	90,23%	869.249.040								
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		149.319.350	-	65.242.000	60.582.000	22.347.000	148.171.000	99,23%	148.171.000								
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		49.435.000	-	13.814.000	26.966.000	8.360.000	49.140.000	99,40%	49.140.000								
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Kabupaten Kota yang melaporkan Data Kesehatan Prioritas secara lengkap dan Tepat Waktu (Persen)	90	269.895.770	83	69.962.000	62.554.000	126.814.953	83	259.330.953	92,59%	96,09%	83,33	259.330.953				
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		194.947.600	-	69.962.000	8.720.000	109.809.953	188.491.953	96,69%	188.491.953								
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		74.948.170	-	-	53.834.000	17.005.000	70.839.000	94,52%	70.839.000								
	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		159.456.200	-	61.371.000	-	96.348.000	157.719.000	98,91%	157.719.000								
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		159.456.200	-	61.371.000	-	96.348.000	157.719.000	98,91%	157.719.000								
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	92,09%							
									<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Persen)	66	1.652.649.150	84.000.000	175.367.146	253.629.000	672.128.940	1.185.125.086	0,00%	71,71%	63,00	1.185.125.086	DINAS KESEHATAN				
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		1.652.649.150	84.000.000	175.367.146	253.629.000	672.128.940	1.185.125.086	71,71%	1.185.125.086								
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan (Orang)	340	1.525.526.450	60	84.000.000	97.334.146	226.829.000	654.319.240	60	1.062.482.386	17,65%	69,65%	60,00	1.062.482.386			
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		127.122.700	-	78.033.000	26.800.000	17.809.700	122.642.700	96,48%	122.642.700								
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	16,23%	71,71%							
									<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sedang							
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial (Persen)	97	382.645.000	-	133.195.700	78.253.000	165.194.000	376.642.700	0,00%	98,43%	95,00	376.642.700	DINAS KESEHATAN				
	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar (Persen)	100	70.176.650	100	-	35.894.000	33.170.000	-	100	69.064.000	100,00%	98,41%	100,00	69.064.000			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		70.176.650	-	35.894.000	33.170.000	-	69.064.000	98,41%	69.064.000								
	<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dipederadan yang memenuhi standar (Persen)	100	312.468.350	100	-	97.301.700	45.083.000	165.194.000	100	307.578.700	100,00%	98,44%	100,00	307.578.700			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		263.152.150	-	62.381.000	31.483.000	164.594.000	258.458.000	98,22%	258.458.000								
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik		49.316.200	-	34.920.700	13.600.000	600.000	49.120.700	99,60%	49.120.700								
									<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	98,43%							
									<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS (Persen)	50	1.757.108.520	-	156.891.000	148.124.000	1.309.330.450	1.614.345.450	0,00%	91,88%	45,00	1.614.345.450	DINAS KESEHATAN				
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kabupaten yang melaksanakan minimal 5 tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Persen)	100	591.041.380	33	-	40.210.000	38.939.000	455.406.000	33	534.555.000	33,33%	90,44%	33,33	534.555.000			
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		591.041.380	-	40.210.000	38.939.000	455.406.000	534.555.000	90,44%	534.555.000								
	<b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah Jenis Media Informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat daerah Provinsi (Jenis)	100	1.016.673.100	100	-	69.979.000	49.823.000	834.604.450	100	954.406.450	100,00%	93,88%	100,00	954.406.450			





No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab						
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	3	4	7	8								9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		Persentase Tingkat Kondisi Mantap Jalan Provinsi (Persen)	50,19	65.363.026.674	7.341.058.118	3.262.370.152	13.133.640.806	38.706.803.316	62.443.872.392	0,00%	95,53%	46,69	62.443.872.392	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
		Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana (Persen)	100							0,00%	100,00													
	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	Persentase Panjang Jalan Provinsi yang Terbangun / Ditingkatkan (Persen)	48,19	65.363.026.674	7.341.058.118	3.262.370.152	13.133.640.806	38.706.803.316	62.443.872.392	100,00%	95,53%	48,19	62.443.872.392											
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan		262.904.000	-	-	-	262.662.685	262.662.685		99,91%	262.662.685												
		Pembangunan Jalan		15.736.993.504	185.672.124	196.726.243	698.147.592	14.095.250.991	15.175.796.950		96,43%	15.175.796.950												
		Rekonstruksi Jalan		45.102.326.000	6.712.101.997	2.414.476.394	11.831.848.371	22.461.896.491	43.420.323.253		96,27%	43.420.323.253												
		Pemeliharaan Rutin Jalan		2.069.238.400	363.283.997	497.909.849	402.383.743	757.160.389	2.020.737.978		97,66%	2.020.737.978												
		Pembangunan Jembatan		1.682.429.800	-	1.000.000	83.046.100	992.552.760	1.076.598.860		63,99%	1.076.598.860												
		Pemeliharaan Rutin Jembatan		125.001.000	-	72.257.666	22.410.000	22.070.000	116.737.666		93,39%	116.737.666												
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		384.133.970	80.000.000	80.000.000	95.805.000	115.210.000	371.015.000		96,58%	371.015.000												
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	95,53%												
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi dengan Kualifikasi Jabatan Ahli (Persen)	48,01	284.565.370	19.361.650	38.056.400	59.621.252	146.679.885	263.719.187	0,00%	92,67%	35,60	263.719.187	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Tersertifikasi di Provinsi Sulawesi Barat (Persen)	38,93	142.548.070	535.000	12.927.400	21.147.052	98.002.569	132.612.021	100,00%	93,03%	38,93	132.612.021											
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		142.548.070	535.000	12.927.400	21.147.052	98.002.569	132.612.021		93,03%	132.612.021												
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	Persentase Ketersediaan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat (Persen)	38,93	81.810.200	10.670.000	16.945.000	23.314.200	23.469.000	74.398.200	100,00%	90,94%	38,93	74.398.200											
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		81.810.200	10.670.000	16.945.000	23.314.200	23.469.000	74.398.200		90,94%	74.398.200												
	<b>Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>			60.207.100	8.156.650	8.184.000	15.160.000	25.208.316	56.708.966		94,19%	56.708.966												
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi		60.207.100	8.156.650	8.184.000	15.160.000	25.208.316	56.708.966		94,19%	56.708.966												
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	92,67%												
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi (Persen)	37,8	912.767.629	37.443.000	84.729.656	193.626.190	539.287.536	855.086.382	0,00%	93,68%	36,30	855.086.382	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	Persentase Ketersediaan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kawasan Strategis Provinsi (Persen)	36,8	534.249.000	3.038.000	5.000.000	95.350.000	408.731.885	512.119.885	100,00%	95,86%	36,80	512.119.885											
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		534.249.000	3.038.000	5.000.000	95.350.000	408.731.885	512.119.885		95,86%	512.119.885												
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kawasan Strategis Provinsi (Persen)	36,8	174.322.013	9.415.000	31.845.040	45.993.330	58.439.251	145.692.621	100,00%	83,58%	36,80	145.692.621											
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		174.322.013	9.415.000	31.845.040	45.993.330	58.439.251	145.692.621		83,58%	145.692.621												
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>			170.967.000	22.860.000	30.000.000	49.432.860	63.840.100	166.132.960		97,17%	166.132.960												
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		170.967.000	22.860.000	30.000.000	49.432.860	63.840.100	166.132.960		97,17%	166.132.960												
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>			33.229.616	2.130.000	17.884.616	2.850.000	8.276.300	31.140.916		93,71%	31.140.916												
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		33.229.616	2.130.000	17.884.616	2.850.000	8.276.300	31.140.916		93,71%	31.140.916												
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	93,68%												
										<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																								

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>																			
			1.656.194.752	28.113.200	65.388.200	191.310.977	1.349.939.989	1.634.752.366	98,71%	1.634.752.366									
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	0	167.171.340	-	1.005.000	-	16.363.350	-	58.057.480	-	80.734.288	-	156.160.118	0,00%	93,41%	0,00	156.160.118	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Perumahan Hasil Identifikasi di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Provinsi (Persen)	50	71.283.340	-	1.005.000	-	-	20	24.106.000	45	44.748.308	45	69.859.308	90,00%	98,00%	45,00	69.859.308	
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan Yang Potensi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	2	58.088.000	-	-	1	16.363.350	2	33.951.480	2	3.230.000	2	53.544.830	100,00%	92,18%	2,00	53.544.830	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	20	37.800.000	-	-	-	-	-	-	18	32.755.980	18	32.755.980	90,00%	86,66%	18,00	32.755.980	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dokumen)	0	88.491.890	-	-	-	3.395.000	-	76.596.297	-	7.270.000	-	87.261.297	0,00%	98,61%	0,00	87.261.297	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Persen)	100	88.491.890	-	20	3.395.000	40	76.596.297	80	7.270.000	80	87.261.297	80,00%	98,61%	80,00	87.261.297		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Warga Negara yang Terkena Bencana atau Relokasi Program Provinsi (Unit)	0	1.400.531.522	-	27.108.200	-	45.629.850	-	56.657.200	-	1.261.935.701	-	1.391.330.951	0,00%	99,34%	0,00	1.391.330.951	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana (Persen)	100	1.400.531.522	15	27.108.200	15	45.629.850	15	56.657.200	100	1.261.935.701	100	1.391.330.951	100,00%	99,34%	100,00	1.391.330.951	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												98,27%	98,71%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>																			
			24.489.000	9.220.000	-	-	-	12.655.000	-	-	-	-	21.875.000	89,33%	21.875.000				
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		10.809.000	9.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.220.000	85,30%	9.220.000				
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di permukiman Kumuh (Laporan)	6	10.809.000	-	9.220.000	-	-	-	-	-	-	9.220.000	0,00%	85,30%	0,00	9.220.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan pelaksanaan penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Laporan)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		13.680.000	-	-	-	-	12.655.000	-	-	-	-	12.655.000	92,51%	12.655.000				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		13.680.000	-	-	-	-	12.655.000	-	-	-	-	12.655.000	92,51%	12.655.000				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	89,33%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Tinggi						
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>																			
			35.535.702.749	436.852.488	1.489.902.055	4.445.284.005	28.680.259.407	35.052.297.955	98,64%	35.052.297.955									
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan dengan PSU (Unit)	0	35.535.702.749	-	436.852.488	-	1.489.902.055	-	4.445.284.005	-	28.680.259.407	-	35.052.297.955	0,00%	98,64%	0,00	35.052.297.955	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Dokumen)	100	2.097.266.810	20	35.503.000	20	77.639.000	20	30.385.430	95	1.884.841.310	95	2.028.368.740	95,00%	96,71%	95,00	2.028.368.740	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Dokumen)	100	33.023.928.178	5	42.495.000	40	1.358.645.055	50	4.414.743.325	100	26.795.418.097	195	32.611.301.477	195,00%	98,75%	195,00	32.611.301.477	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Penunjang Fungsi Permukiman (Dokumen)	10	369.219.961	5	313.714.488	5	53.618.000	5	155.250	5	-	5	367.487.738	50,00%	99,53%	5,00	367.487.738	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		45.287.800	45.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.140.000	99,67%	45.140.000				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												187,34%	98,64%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16							
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		288.786.240	282.545.967	4.635.000	-	-	287.180.967	99,44%	287.180.967	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN							
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Dokumen)	0	288.786.240	-	282.545.967	-	4.635.000	-	-	287.180.967	0,00%	99,44%	0,00	287.180.967			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan PSU (Dokumen)	30	288.786.240	28	282.545.967	28	4.635.000	28	-	28	-	28	287.180.967	93,33%	99,44%	28,00	287.180.967
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										93,33%	99,44%							
<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi (Persen)	100	3.164.224.877	376.655.350	1.100.026.725	749.136.850	909.974.000	-	3.135.792.925	0,00%	99,10%	100,00	3.135.792.925	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani (Persen)	100	2.946.800.049	25	330.490.350	25	1.028.241.875	25	672.030.625	25	888.158.250	25	2.918.921.100	25,00%	99,05%	25,00	2.918.921.100
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah gangguan yang dicegah (Gangguan)	25	1.674.538.060	5	215.202.500	5	581.269.375	5	375.955.625	10	491.189.500	10	1.663.617.000	40,00%	99,35%	10,00	1.663.617.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dalam daerah dan Luar Daerah dan Pengawasan dan Pengamanan (Kabupaten dan Provinsi Lainnya)	1	1.142.734.560	1	94.878.125	-	383.675.000	-	281.531.250	-	372.093.750	1	1.132.178.125	100,00%	99,08%	1,00	1.132.178.125
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan - Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum, Bahaya Rokok di Lingkungan Masyarakat. dan Rapat Koordinasi di 6 Kabupaten (Orang)	3	97.527.429	1	20.409.725	1	52.047.500	1	10.043.750	-	13.625.000	3	96.125.975	100,00%	98,56%	3,00	96.125.975
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			27.000.000	-	11.250.000	4.500.000	11.250.000	27.000.000	100,00%	27.000.000	100,00%	27.000.000		27.000.000			
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Provinsi (Orang)	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-			
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP (Persen)	100	217.424.828	25	46.165.000	25	71.784.850	25	77.106.225	25	21.815.750	25	216.871.825	25,00%	99,75%	25,00	216.871.825
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			128.925.340	41.415.000	53.466.100	31.675.500	2.309.500	128.866.100	99,95%	128.866.100		128.866.100					
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Pergub yang ditangani (Perda/Pergub)	6	88.499.488	-	4.750.000	-	18.318.750	6	45.430.725	-	19.506.250	6	88.005.725	100,00%	99,44%	6,00	88.005.725
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										63,16%	99,10%							
<b>Predikat Kinerja</b>										Rendah	Sangat Tinggi							
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)	100	133.936.366	40.545.600	60.205.375	13.184.375	17.812.500	-	131.747.850	0,00%	98,37%	100,00	131.747.850	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (Persen)	100	133.936.366	25	40.545.600	25	60.205.375	25	13.184.375	25	17.812.500	25	131.747.850	25,00%	98,37%	25,00	131.747.850

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			113.310.616		40.545.600		39.579.625		13.184.375		17.812.500		111.122.100		98,07%		111.122.100		
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			20.625.750		-		20.625.750		-		-		20.625.750		100,00%		20.625.750		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													0,00%	98,37%						
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>																				<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana (Persen)	3,165	4.283.569.506		335.002.998		600.366.651		600.732.076		2.444.449.039		3.980.550.764	0,00%	92,93%	1,55	3.980.550.764			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase Ketersediaan dan penyelesaian dokumen kebencanaan (persen)	90	109.322.478	-	20.182.478	-	59.140.000	70	10.000.000	-	20.000.000	70	109.322.478	77,78%	100,00%	70,00	109.322.478			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang)	100	109.322.478	20	20.182.478	60	59.140.000	90	10.000.000	100	20.000.000	100	109.322.478	100,00%	100,00%	100,00	109.322.478			
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana (Persen)	80	3.121.576.151	-	152.262.300	-	229.022.209	70	337.842.255	-	2.197.277.525	70	2.916.404.289	87,50%	93,43%	70,00	2.916.404.289			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan (Dokumen)	1	2.500.000	-	2.500.000	-	-	1	-	1	-	1	2.500.000	100,00%	100,00%	1,00	2.500.000			
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	90	3.116.576.151	40	147.262.300	20	229.022.209	30	337.842.255	-	2.197.277.525	90	2.911.404.289	100,00%	93,42%	90,00	2.911.404.289			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Dokumen)	1	2.500.000	-	2.500.000	-	-	1	-	-	-	1	2.500.000	100,00%	100,00%	1,00	2.500.000			
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana (Persen)	100	566.519.174	-	51.528.294	-	84.902.658	60	199.825.500	-	158.392.147	60	494.648.599	60,00%	88,88%	60,00	494.648.599			
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	6	45.588.294	6	45.588.294	-	-	-	-	-	-	6	45.588.294	100,00%	100,00%	6,00	45.588.294			
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	750	5.000.000	-	5.000.000	-	-	450	-	300	-	750	5.000.000	100,00%	100,00%	750,00	5.000.000			
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	6	505.930.880	-	940.000	3	84.902.658	2	199.825.500	1	158.392.147	6	444.060.305	100,00%	87,77%	6,00	444.060.305			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Persen)	80	496.151.703	-	111.029.926	-	227.301.784	70	53.064.321	-	68.779.367	70	460.175.398	87,50%	92,75%	70,00	460.175.398			
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Laporan)	6	292.329.078	-	31.594.305	4	121.022.911	1	48.064.321	1	58.779.367	6	259.460.904	100,00%	88,76%	6,00	259.460.904			
	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dokumen)	1	203.822.625	-	79.435.621	-	106.278.873	1	5.000.000	-	10.000.000	1	200.714.494	100,00%	98,48%	1,00	200.714.494			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													100,00%	92,93%						
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>																				
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan Sosial (Persen)	53,57	681.883.350		41.220.000		51.698.000		264.194.050		324.029.400		681.141.450	0,00%	99,89%	46,43	681.141.450		<b>DINAS SOSIAL</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Ketaatan Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan (Persen)	100	51.925.440	15	14.810.000	50	14.368.000	83	14.050.000	-	8.474.000	-	51.702.000	0,00%	99,57%	0,00	51.702.000			
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Intensitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin dan Non Izin UGB dan PUB (Aktivitas)	4	51.925.440	2	14.810.000	3	14.368.000	3	14.050.000	4	8.474.000	4	51.702.000	100,00%	99,57%	4,00	51.702.000			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase PSKS yang Memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial (Persen)	75	629.957.910	4	26.410.000	10	37.330.000	29	250.144.050	35	315.555.400	35	629.439.450	46,67%	99,92%	35,00	629.439.450			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	69	81.341.000	-	-	-	-	-	-	69	81.075.400	69	81.075.400	100,00%	99,67%	69,00	81.075.400			
	Jumlah Kelembagaan Sosial Masyarakat yang meningkatkan kemampuannya (Lembaga)	3	548.616.910	1	26.410.000	2	37.330.000	2	250.144.050	3	234.480.000	3	548.364.050	100,00%	99,95%	3,00	548.364.050			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
			Predikat Kinerja																			
			Sangat Tinggi																			
			Sangat Tinggi																			
			100,00%																			
			99,89%																			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
			Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial (Persen)		59	1.883.035.523		59.907.760		361.912.100		675.068.480		760.337.303		1.857.225.643	0,00%	98,63%	47,00	1.857.225.643	DINAS SOSIAL	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pantli		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Pantli (Persen)	100	845.330.000	-	-	58	259.655.900	66	295.562.180	-	272.015.811	-	827.233.891	0,00%	97,86%	0,00	827.233.891	
			Penyediaan Sandang			40.000.000	-	-		5.000.000		6.250.000		28.630.000		39.880.000		99,70%		39.880.000		
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			687.183.000	-	-		239.643.900		279.172.180		168.071.000		686.887.080		99,96%		686.887.080		
			Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		Intensitas Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	6	118.147.000	-	-	3	15.012.000	3	10.140.000	6	75.314.811	6	100.466.811	100,00%	85,04%	6,00	100.466.811	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pantli		Persentase Anak Terlantar yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Pantli (Persen)	100	426.630.308	-	-	6	21.291.000	66	258.173.300	-	145.812.700	-	425.277.000	0,00%	99,68%	0,00	425.277.000	
			Penyediaan Makanan			40.000.000	-	-		7.291.000		6.250.000		26.285.000		39.826.000		99,57%		39.826.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			386.630.308	-	-		14.000.000		251.923.300		119.527.700		385.451.000		99,69%		385.451.000		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pantli			324.795.960	-	-		23.265.200		97.583.000		198.986.768		319.834.968		98,47%		319.834.968		
			Penyediaan Permakanan			39.060.000	-	-		-		-		38.939.884		38.939.884		99,68%		38.939.884		
			Penyediaan Sandang			53.372.000	-	-		5.000.000		6.250.000		41.861.884		53.111.884		99,51%		53.111.884		
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			232.363.960	-	-		18.265.200		91.333.000		118.185.000		227.783.200		98,03%		227.783.200		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pantli		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Pantli (Persen)	100	200.000	-	200.000	100	-	-	-	-	-	200.000	0,00%	100,00%	0,00	200.000		
			Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah Gepong yang dipulangkan ke Daerah Asal (Orang)	1	200.000	1	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	100,00%	100,00%	1,00	200.000		
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Pantli		Persentase PPKS Lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial di Dalam Pantli (Persen)	100	286.079.255	23	59.707.760	62	57.700.000	68	23.750.000	-	143.522.024	-	284.679.784	0,00%	99,51%	0,00	284.679.784	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Orang)	50	227.568.055	-	18.120.000	20	42.927.500	-	23.750.000	30	141.371.684	50	226.169.184	100,00%	99,39%	50,00	226.169.184	
			Kordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dokumen)	10	58.511.200	6	41.587.760	10	14.772.500	10	-	10	2.150.340	10	58.510.600	100,00%	100,00%	10,00	58.510.600	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
			Predikat Kinerja																			
			Sangat Rendah																			
			Sangat Tinggi																			
			21,48%																			
			98,63%																			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																			
			Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi (Persen)		60	6.204.019.790		55.321.980		261.403.980		2.058.980.450		3.588.729.940		5.964.436.350	0,00%	96,14%	60,00	5.964.436.350	DINAS SOSIAL	
			Penggantian Anak antar WNI dan Penggantian Anak oleh Orang Tua Tunggal		Persentase Penggantian Anak yang Mendapatkan Hak Asuh Sesuai Dengan Ketentuan (Persen)	100	25.351.000	-	-	-	-	-	-	25.323.000	-	25.323.000	0,00%	99,89%	0,00	25.323.000		
			Penggantian Anak antar WNI		Jumlah Sidang COTA (Sidang)	5	25.351.000	-	-	-	-	-	5	25.323.000	5	25.323.000	100,00%	99,89%	5,00	25.323.000		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran DTKS (Persen)	100	6.178.668.790	33	55.321.980	100	261.403.980	100	2.058.980.450	-	3.563.406.940	-	5.939.113.350	0,00%	96,12%	0,00	5.939.113.350	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Tersedianya Bantuan Sosial Bagi Warga Pra Sejahtera (Paket)	600	4.333.668.760	-	32.499.000	-	203.324.600	282	1.999.000.000	600	2.069.734.800	600	4.304.558.400	100,00%	99,33%	600,00	4.304.558.400	
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan FM yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	60	1.845.000.030	25	22.822.980	-	58.079.380	-	59.980.450	35	1.493.672.140	60	1.634.554.950	100,00%	88,59%	60,00	1.634.554.950	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			
			Predikat Kinerja																			
			Sangat Tinggi																			
			Sangat Tinggi																			
			100,00%																			
			96,14%																			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA																			
			Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani (Persen)		100	269.005.010		173.950.000		33.830.000		34.454.000		26.650.000		268.884.000	0,00%	99,96%	100,00	268.884.000	DINAS SOSIAL	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani (Persen)	100	269.005.010	76	173.950.000	80	33.830.000	90	34.454.000	-	26.650.000	-	268.884.000	0,00%	99,96%	0,00	268.884.000	
			Penyediaan Permakanan		Jumlah Korban Bencana yang menerima Permakanan saat tanggap darurat bencana (Jiwa)	5000	84.005.010	-	-	500	25.880.000	3.500	33.704.000	5.000	24.300.000	5.000	83.884.000	100,00%	99,86%	5000,00	83.884.000	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
	3	4	7		8		9		10		11		12		13		14		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan (Peraturan Perusahaan (PP) )	3	199.999.900	-	88.049.850	3	64.657.750	-	46.592.100	-	-	3	199.299.700	100,00%	99,65%	3,00	199.299.700	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB Struktur Skla Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan )	25	58.997.820	-	13.010.000	-	133.400	25	42.794.000	-	2.980.000	25	58.917.400	100,00%	99,86%	25,00	58.917.400	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi			489.770.050		136.816.950		125.866.650		168.966.500		56.285.800		487.935.900		99,63%		487.935.900	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara )	50	199.991.300	-	37.800.000	-	41.248.100	40	84.069.550	-	36.590.000	40	199.707.650	80,00%	99,86%	40,00	199.707.650	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus yang diselesaikan (Kasus )	10	31.075.800	-	-	-	-	8	12.340.000	-	18.735.800	8	31.075.800	80,00%	100,00%	8,00	31.075.800	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja )	10	22.503.400	-	-	-	7.803.400	10	14.500.000	-	-	10	22.303.400	100,00%	99,11%	10,00	22.303.400	
	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi (Perusahaan )	25	236.199.550	-	99.016.950	-	76.815.150	25	58.056.950	-	960.000	25	234.849.050	100,00%	99,43%	25,00	234.849.050	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			239.656.775		61.855.000		10.174.000		59.677.775		107.216.000		238.922.775		99,69%		238.922.775	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Peraturan Gubernur UMP yang Ditetapkan (Pergub )	1	239.656.775	-	61.855.000	-	10.174.000	-	59.677.775	-	107.216.000	-	238.922.775	0,00%	99,69%	0,00	238.922.775	
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	71,08%	99,66%		
															<b>Predikat Kinerja</b>	Sedang	Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>			862.752.750		343.794.300		244.045.450		97.910.000		174.833.900		860.583.650		99,75%		860.583.650	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>			862.752.750		343.794.300		244.045.450		97.910.000		174.833.900		860.583.650		99,75%		860.583.650	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan Norma kerja (Perusahaan )	420	714.911.300	-	336.754.300	300	110.904.000	50	90.570.000	70	174.833.900	420	713.062.200	100,00%	99,74%	420,00	713.062.200	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah kasus Perusahaan yang di limpahkan ke rana hukum (Perusahaan )	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (Perusahaan )	225	147.841.450	100	7.040.000	125	133.141.450	-	7.340.000	-	-	225	147.521.450	100,00%	99,78%	225,00	147.521.450	
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	99,75%		
															<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																		
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	67,2	919.154.458		241.650.000		430.407.020		81.076.950		138.384.000		891.517.970	0,00%	96,99%	66,50	891.517.970	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN</b>
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	92,5												0,00%		91,50		
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Kabupaten yang Berkomitmen dalam Pembangunan Berbasis Gender di Prov. Sulawesi Barat (Kabupaten)	6	148.034.238	-	11.650.000	-	87.092.000	-	-	-	33.968.700	-	132.710.700	0,00%	89,65%	0,00	132.710.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	68.034.238	-	11.650.000	1	10.205.000	-	-	-	33.416.700	1	55.271.700	100,00%	81,24%	1,00	55.271.700	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan yang disosialisasikan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Kebijakan)	1	80.000.000	-	-	1	76.887.000	-	-	-	552.000	1	77.439.000	100,00%	96,80%	1,00	77.439.000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah kabupaten yang melibatkan perempuan dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Kabupaten)	6	771.120.220	-	230.000.000	-	343.315.020	-	81.076.950	-	104.415.300	-	758.807.270	0,00%	98,40%	0,00	758.807.270	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Orang)	287	771.120.220	76	230.000.000	200	343.315.020	230	81.076.950	287	104.415.300	287	758.807.270	100,00%	98,40%	287,00	758.807.270	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00%	96,99%					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Persen)	85,96	599.204.000	136.182.200		119.864.289		88.889.679		154.649.809	-	499.585.977	0,00%	83,37%	76,20	499.585.977	DINAS PEMERDA YAAN PEREMPUAN,	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang melibatkan para pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Kabupaten)	6	109.700.000	-	-	76.895.000	-	26.805.000	-	6.000.000	-	109.700.000	0,00%	100,00%	0,00	109.700.000	PERLINDUNGAN ANAK,	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memahami tentang hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan (Orang)	40	109.700.000	-	40	76.895.000	-	26.805.000	-	6.000.000	40	109.700.000	100,00%	100,00%	40,00	109.700.000	PENGENDALIAN	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang memerlukan koordinasi tingkat daerah dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan (Kabupaten)	6	429.504.000	-	109.682.200	-	39.219.289	-	58.334.679	-	123.619.809	-	330.855.977	0,00%	77,03%	0,00	330.855.977	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Persen)	17	175.000.000	5	73.942.200	10	28.569.289	14	27.359.679	17	37.990.809	17	167.861.977	100,00%	95,92%	17,00	167.861.977	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Kasus)	23	254.504.000	7	35.740.000	15	10.650.000	20	30.975.000	23	85.629.000	23	162.994.000	100,00%	64,04%	23,00	162.994.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			60.000.000		26.500.000		3.750.000		3.750.000		25.030.000		59.030.000		98,38%		59.030.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	24.900.000	-	24.000.000	1	-	-	-	-	-	1	24.000.000	100,00%	96,39%	1,00	24.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih dan memahami tentang penanganan bagi perempuan korban kekerasan baik TPPO maupun PKDRT (Orang)	22	35.100.000	5	2.500.000	5	3.750.000	20	3.750.000	22	25.030.000	22	35.030.000	100,00%	99,80%	22,00	35.030.000	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00%	83,37%					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi					
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>			32.320.000		5.000.000		5.090.000		3.750.000		4.325.000		18.165.000		56,20%		18.165.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data terpilih (Dokumen)	1	32.320.000	-	5.000.000	-	5.090.000	-	3.750.000	-	4.325.000	-	18.165.000	0,00%	56,20%	0,00	18.165.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	32.320.000	-	5.000.000	1	5.090.000	-	3.750.000	-	4.325.000	1	18.165.000	100,00%	56,20%	1,00	18.165.000	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100,00%	56,20%					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah					
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Persen)	83,33	390.992.780		165.833.850		37.283.200		62.241.020		109.985.600	-	375.343.670	0,00%	96,00%	66,67	375.343.670	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten Layak Anak level Pratama (Kabupaten)	6	231.370.000	-	165.833.850	-	8.589.000	-	31.521.020	-	20.290.000	-	226.233.870	0,00%	97,78%	0,00	226.233.870	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam evaluasi KLA (Kabupaten)	6	181.800.000	6	160.833.850	-	1.089.000	-	13.850.000	-	3.570.000	6	179.342.850	100,00%	98,65%	6,00	179.342.850	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak yang berpartisipasi dalam Forum Anak Nasional dan Provinsi (Anak)	3	49.570.000	-	5.000.000	-	7.500.000	3	17.671.020	-	16.720.000	3	46.891.020	100,00%	94,60%	3,00	46.891.020	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang memiliki Forum Anak Kecamatan dan Desa (Kabupaten)	6	159.622.780	-	-	-	28.694.200	-	30.720.000	-	89.695.600	-	149.109.800	0,00%	93,41%	0,00	149.109.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang ikut terlibat dalam kegiatan hari anak nasional dan tingkat provinsi (Anak)	90	159.622.780	-	-	90	28.694.200	-	30.720.000	-	89.695.600	90	149.109.800	100,00%	93,41%	90,00	149.109.800	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
															100,00%	96,00%			
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar (Persen)	0,75	221.765.800	-	5.000.000	-	64.702.800	-	48.577.500	-	82.468.654	-	200.748.954	0,00%	90,52%	1,00	200.748.954	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang melibatkan para pihak lingkup daerah yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak (Kabupaten)	6	102.170.000	-	2.500.000	-	9.565.000	-	21.427.500	-	60.828.790	-	94.321.290	0,00%	92,32%	0,00	94.321.290	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM terlatih tentang aplikasi data simfoni (Orang)	30	102.170.000	-	2.500.000	-	9.565.000	-	21.427.500	30	60.828.790	30	94.321.290	100,00%	92,32%	30,00	94.321.290	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten yang memerlukan koordinasi tingkat daerah yang menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Kabupaten)	6	44.999.800	-	2.500.000	-	32.749.800	-	3.750.000	-	5.000.000	-	43.999.800	0,00%	97,78%	0,00	43.999.800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Layanan)	20	44.999.800	-	2.500.000	20	32.749.800	-	3.750.000	-	5.000.000	20	43.999.800	100,00%	97,78%	20,00	43.999.800	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak terkait (Persen)	100	74.596.000	-	-	-	22.388.000	-	23.400.000	-	16.639.864	-	62.427.864	0,00%	83,69%	0,00	62.427.864	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih dan memahami tentang perlindungan khusus anak (Orang)	26	74.596.000	-	-	26	22.388.000	-	23.400.000	-	16.639.864	26	62.427.864	100,00%	83,69%	26,00	62.427.864	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
															100,00%	90,52%			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			2.712.889.980		417.821.450		201.638.048		343.354.797		337.247.050		1.300.061.345		47,92%		1.300.061.345	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.184.219.220		383.665.800		89.600.750		45.783.500		270.213.350		789.263.400		36,13%		789.263.400	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	2	80.830.560	-	9.571.400	-	24.947.000	-	18.663.750	-	15.859.600	-	69.041.750	0,00%	85,42%	0,00	69.041.750	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1.649.290.000	-	-	-	9.623.750	-	11.325.750	-	245.713.750	-	266.663.250	0,00%	16,17%	0,00	266.663.250	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)	1	26.093.100	1	25.755.000	-	-	-	-	-	-	1	25.755.000	100,00%	98,70%	1,00	25.755.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			428.065.560		348.339.400		55.030.000		15.794.000		8.640.000		427.803.400		99,94%		427.803.400	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16					
	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>		116.348.910	-	15.561.450	90.226.800	489.000	106.277.250		91,34%		106.277.250							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	1	116.348.910	-	15.561.450	-	90.226.800	-	489.000	-	106.277.250	0,00%	91,34%	0,00	106.277.250			
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		412.321.850	34.155.650	96.475.848	207.344.497	66.544.700	404.520.695		98,11%		404.520.695							
	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1	72.699.650	-	5.830.000	-	100.000	-	12.621.725	-	53.515.000	-	72.066.725	0,00%	99,13%	0,00	72.066.725	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2	293.473.950	-	85.698.848	-	194.722.772	-	10.479.700	-	290.901.320	0,00%	99,12%	0,00	290.901.320			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan survey Analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan (Laporan)	1	46.148.250	-	28.325.650	-	10.677.000	-	-	-	2.550.000	-	41.552.650	0,00%	90,04%	0,00	41.552.650	
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,96%	47,92%								
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>							<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
			181.313.960	-	60.758.750	39.211.400	63.995.500	163.965.650		90,43%		163.965.650		DINAS KETAHANAN PANGAN					
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		45.859.000	-	5.194.250	4.887.500	35.158.000	45.239.750		98,65%		45.239.750							
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	7	45.859.000	-	5.194.250	-	4.887.500	-	35.158.000	-	45.239.750	0,00%	98,65%	0,00	45.239.750			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		135.454.960	-	55.564.500	34.323.900	28.837.500	118.725.900		87,65%		118.725.900							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Dokumen)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Dokumen)	1	59.404.520	-	51.814.500	-	5.004.000	-	-	-	56.818.500	0,00%	95,65%	0,00	56.818.500			
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	76.050.440	-	3.750.000	-	29.319.900	-	28.837.500	-	61.907.400	0,00%	81,40%	0,00	61.907.400			
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	90,43%								
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>							<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
			143.760.785	23.849.720	43.791.750	25.325.500	37.183.650	130.150.620		90,53%		130.150.620		DINAS KETAHANAN PANGAN					
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		143.760.785	23.849.720	43.791.750	25.325.500	37.183.650	130.150.620		90,53%		130.150.620							
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (Dokumen)	1	11.251.000	1	11.251.000	-	-	-	-	1	11.251.000	100,00%	100,00%	1,00	11.251.000			
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat)	4	118.593.785	-	12.598.720	4	33.145.950	-	25.325.500	-	37.183.650	4	108.253.820	100,00%	91,28%	4,00	108.253.820	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	1	13.916.000	-	-	10.645.800	-	-	-	-	10.645.800	0,00%	76,50%	0,00	10.645.800			
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		90,32%	90,53%								
								<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM																			
				22.288.272.496		4.642.682.746		3.126.991.907		7.114.479.298		7.048.572.815		21.932.726.766		98,40%		21.932.726.766	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Ha)	0	22.288.272.496	-	4.642.682.746	-	3.126.991.907	-	7.114.479.298	-	7.048.572.815	-	21.932.726.766	0,00%	98,40%	0,00	21.932.726.766	
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Ha)	15	22.288.272.496	1	4.642.682.746	3	3.126.991.907	4	7.114.479.298	9	7.048.572.815	9	21.932.726.766	59,33%	98,40%	8,90	21.932.726.766	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		59,33%	98,40%				
												Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Persen)	100	385.074.108		2.500.000		12.390.000		3.526.000		366.658.100	-	385.074.100	0,00%	100,00%	100,00	385.074.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi (Dokumen)	1	385.074.108	-	2.500.000	-	12.390.000	-	3.526.000	1	366.658.100	1	385.074.100	100,00%	100,00%	1,00	385.074.100	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	1	385.074.108	-	2.500.000	-	12.390.000	-	3.526.000	1	366.658.100	1	385.074.100	100,00%	100,00%	1,00	385.074.100	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%				
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																			
		Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup (Persen)	75	1.506.823.408		184.482.556		351.667.622		567.923.491		392.264.370	-	1.496.338.039	0,00%	99,30%	75,00	1.496.338.039	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu (Persen)	73,33	1.041.829.891	-	71.985.194	-	260.644.622	73	403.993.971	73	295.024.470	73	1.031.648.257	100,00%	99,02%	73,33	1.031.648.257	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	91.779.300	-	16.149.300	1	36.265.000	1	9.520.000	1	29.750.000	1	91.684.300	100,00%	99,90%	1,00	91.684.300	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Milosisi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	104.293.650	-	29.054.500	2	39.850.000	2	17.783.400	2	17.603.750	2	104.291.650	100,00%	100,00%	2,00	104.291.650	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	845.756.941	-	26.781.394	1	184.529.622	2	376.690.571	3	247.670.720	3	835.672.307	100,00%	98,81%	3,00	835.672.307	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan (Ha)	19	464.993.517	-	112.497.362	-	91.023.000	7	163.929.520	19	97.239.900	19	464.689.782	100,00%	99,93%	19,00	464.689.782	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas wilayah yang direhabilitasi (HA)	19	464.993.517	7	112.497.362	7	91.023.000	7	163.929.520	19	97.239.900	19	464.689.782	100,00%	99,93%	19,00	464.689.782	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,30%				
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																			
		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah (Persen)	4,86	61.846.754		2.500.000		14.970.000		12.783.000		31.536.750	-	61.789.750	0,00%	99,91%	4,81	61.789.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah titik pengumpulan limbah B3 (Titik)	8	61.846.754	-	2.500.000	-	14.970.000	4	12.783.000	8	31.536.750	8	61.789.750	100,00%	99,91%	8,00	61.789.750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1	61.846.754	-	2.500.000	-	14.970.000	-	12.783.000	1	31.536.750	1	61.789.750	100,00%	99,91%	1,00	61.789.750	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,91%				
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																			
		Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Persen)	35,71	37.996.704		2.500.000		14.010.000		9.388.000		12.068.700	-	37.966.700	0,00%	99,92%	35,71	37.966.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan (Pengawasan)	12	37.996.704	-	2.500.000	-	14.010.000	10	9.388.000	12	12.068.700	12	37.966.700	100,00%	99,92%	12,00	37.966.700	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	1	37.996.704	-	2.500.000	-	14.010.000	-	9.388.000	1	12.068.700	1	37.966.700	100,00%	99,92%	1,00	37.966.700	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	99,92%				
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan (Persen)	2	328.489.460	-	-	43.109.750		19.015.000		262.190.750	-	324.315.500	0,00%	98,73%	2,00	324.315.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project (Lembaga Masyarakat)	2	328.489.460	-	-	43.109.750	1	19.015.000	2	262.190.750	2	324.315.500	100,00%	98,73%	2,00	324.315.500		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH (Orang)	2	270.879.710	-	-	-	-	15.265.000	2	251.440.750	2	266.705.750	100,00%	98,46%	2,00	266.705.750		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	57.609.750	-	-	43.109.750	1	3.750.000	1	10.750.000	1	57.609.750	100,00%	100,00%	1,00	57.609.750		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	98,73%				
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup (Persen)	17	52.230.000	-	-	48.480.000		3.750.000		-	-	52.230.000	0,00%	100,00%	17,00	52.230.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Memberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA (Kabupaten)	1	52.230.000	-	-	48.480.000	-	3.750.000	-	-	-	52.230.000	0,00%	100,00%	0,00	52.230.000		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2	52.230.000	-	-	48.480.000	2	3.750.000	2	-	2	52.230.000	100,00%	100,00%	2,00	52.230.000		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	100,00%				
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan (Persen)	100	31.350.504	2.500.000		13.820.000		8.428.000		6.554.500	-	31.302.500	0,00%	99,85%	100,00	31.302.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang tertangani (Pengaduan)	3	31.350.504	-	2.500.000	-	13.820.000	3	8.428.000	4	6.554.500	4	31.302.500	133,33%	99,85%	4,00	31.302.500	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima (Pengaduan)	3	31.350.504	-	2.500.000	-	13.820.000	3	8.428.000	4	6.554.500	4	31.302.500	133,33%	99,85%	4,00	31.302.500	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														133,33%	99,85%				
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan (Persen)	0,133	147.944.500	18.295.000		66.046.500		6.996.000		56.470.200	-	147.807.700	0,00%	99,91%	0,13	147.807.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Volume Timbulan Sampah Yang Tertangani/terkelola (Ton)	95404,11	147.944.500	-	18.295.000	14,168	66.046.500	-	6.996.000	14,168	56.470.200	14,168	147.807.700	14,85%	99,91%	14168,10	147.807.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	147.944.500	-	18.295.000	-	66.046.500	1	6.996.000	1	56.470.200	1	147.807.700	100,00%	99,91%	1,00	147.807.700	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	99,91%				
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																			
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik (Persen)	0	404.429.277		81.871.500		95.653.656		59.310.250		160.435.100	-	397.270.506	0,00%	98,23%	0,00	397.270.506	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			227.538.865		43.652.500		37.393.250		14.157.250		126.175.100		221.378.100		97,29%		221.378.100	
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah data penduduk Non permanen dan rentan adminduk (Dokumen)	1	87.767.115	-	9.107.750	1	37.393.250	-	14.157.250	-	22.544.000	1	83.202.250	100,00%	94,80%	1,00	83.202.250	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																			
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>																			
		Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa (Persen)	45	289.465.000	52.744.450	92.716.000	19.358.000	110.587.600	-	275.406.050	0,00%	95,14%	35,00	275.406.050					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3	289.465.000	52.744.450	92.716.000	3	19.358.000	-	110.587.600	3	275.406.050	100,00%	95,14%	3,00	275.406.050			
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	150.000.000	52.744.450	92.716.000	-	-	-	-	1	145.460.450	100,00%	96,97%	1,00	145.460.450			
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	139.465.000	-	-	-	19.358.000	1	110.587.600	1	129.945.600	100,00%	93,17%	1,00	129.945.600			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												100,00%	95,14%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>																			
		Persentase Desa yang Memiliki Regulasi Perkawinan Anak (Persen)	40	5.471.006.140	167.186.907	2.864.587.285	1.417.820.677	798.095.400	-	5.247.690.269	0,00%	95,92%	30,00	5.247.690.269					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa (Persen)	80,01								0,00%		68,25						
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	113	5.471.006.140	167.186.907	2.864.587.285	1.417.820.677	113	798.095.400	113	5.247.690.269	100,00%	95,92%	113,00	5.247.690.269				
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	60	140.000.000	-	562.500	100.671.000	60	28.951.200	60	130.184.700	100,00%	92,99%	60,00	130.184.700				
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	6	180.991.560	5.988.000	22.804.500	16.612.868	6	135.234.750	6	180.640.118	100,00%	99,81%	6,00	180.640.118				
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	6	169.500.000	1.982.200	24.510.419	17.925.249	6	92.419.500	6	136.837.368	100,00%	80,73%	6,00	136.837.368				
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	55.524.950	25.726.209	16.350.732	1.374.600	-	-	1	43.451.541	100,00%	78,26%	1,00	43.451.541				
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	120	200.000.000	-	-	120	184.334.000	-	13.820.000	120	198.154.000	100,00%	99,08%	120,00	198.154.000			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	100	150.000.000	-	-	100	142.064.000	-	4.336.750	100	146.400.750	100,00%	97,60%	100,00	146.400.750			
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	6	200.000.000	24.782.200	-	-	35.380.900	6	107.176.900	6	167.340.000	100,00%	83,67%	6,00	167.340.000			
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	6	120.000.000	-	-	-	-	6	113.881.340	6	113.881.340	100,00%	94,90%	6,00	113.881.340			
		Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	1	4.254.989.630	108.708.298	2.800.359.134	919.458.060	1	302.274.960	1	4.130.800.452	100,00%	97,08%	1,00	4.130.800.452				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												100,00%	95,92%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>																			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Persen)	80	5.269.888.946	18.096.200	879.968.430	817.021.390	3.186.408.486	-	4.901.494.506	0,00%	93,01%	70,00	4.901.494.506					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		Persentase Posyandu yang Aktif (Persen)	98								0,00%		96,50						

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (Lembaga Kemasyarakatan)	2156	5.269.888.946	-	18.096.200	-	879.968.430	-	817.021.390	2.115	3.186.408.486	2.115	4.901.494.506	98,10%	93,01%	2115,00	4.901.494.506	AT DAN DESA
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	6	3.461.103.346	-	3.900.000	-	87.800.000	-	558.855.670	6	2.495.443.048	6	3.145.998.718	100,00%	90,90%	6,00	3.145.998.718	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (Lembaga)	6	500.000.000	-	-	-	68.083.000	-	46.776.700	6	375.546.276	6	490.405.976	100,00%	98,08%	6,00	490.405.976	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	145.000.000	1	9.829.600	-	128.583.000	-	2.220.000	-	1.230.000	1	141.862.600	100,00%	97,84%	1,00	141.862.600	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	6	230.000.000	-	4.366.600	-	3.089.400	6	189.174.680	-	14.560.000	6	211.190.680	100,00%	91,82%	6,00	211.190.680	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dokumen)	6	283.785.600	-	-	6	247.572.430	-	1.730.000	-	18.065.900	6	267.368.330	100,00%	94,21%	6,00	267.368.330	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	650.000.000	-	-	-	344.840.600	-	18.264.340	1	281.563.262	1	644.668.202	100,00%	99,18%	1,00	644.668.202	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	93,01%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>																			
	Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun (Persen)		2,56	496.761.166	-	-	-	12.910.000	-	212.040.247	-	264.441.399	-	489.391.646	0,00%	98,52%	2,60	489.391.646	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan daerah yang melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk (Kabupaten)	6	496.761.166	-	-	-	12.910.000	-	212.040.247	-	264.441.399	-	489.391.646	0,00%	98,52%	0,00	489.391.646	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK (Laporan)	1	496.761.166	-	-	-	12.910.000	1	212.040.247	-	264.441.399	1	489.391.646	100,00%	98,52%	1,00	489.391.646	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	98,52%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>																			
	ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) (Persen)		27	487.320.580	-	3.750.000	-	88.853.220	-	175.119.050	-	189.225.160	-	456.947.430	0,00%	93,77%	32,00	456.947.430	
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Proporsi dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB (Persen)	100	450.000.000	-	-	-	58.819.570	-	172.849.050	-	189.225.160	-	420.893.780	0,00%	93,53%	0,00	420.893.780	
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kabupaten yang mendapatkan pengetahuan dan kesadaran stakeholder terkait kesehatan reproduksi (Kabupaten)	6	450.000.000	-	-	3	58.819.570	5	172.849.050	6	189.225.160	6	420.893.780	100,00%	93,53%	6,00	420.893.780	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Proporsi dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB (Persen)	100	37.320.580	-	3.750.000	-	30.033.650	-	2.270.000	-	-	-	36.053.650	0,00%	96,61%	0,00	36.053.650	
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KBPK	Jumlah kelompok KBK yang mengikuti pelatihan pembuatan makanan tambahan untuk balita di Kab. Majene dan Kab. Polman (Kelompok)	10	37.320.580	-	3.750.000	10	30.033.650	-	2.270.000	-	-	10	36.053.650	100,00%	96,61%	10,00	36.053.650	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	93,77%			
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Prevalensi Perkawinan Anak (Persen)	15,5	247.603.220	15.376.900		60.282.780		108.604.697		52.657.000	-	236.921.377	0,00%	95,69%	16,00	236.921.377		
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			117.681.120	15.376.900		14.785.780		58.371.697		20.195.000		108.729.377		92,39%		108.729.377		
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	102.681.120	-	11.626.900	1	13.535.780	-	53.409.199	-	20.195.000	1	98.766.879	100,00%	96,19%	1,00	98.766.879	
	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Dokumen)	1	15.000.000	-	3.750.000	1	1.250.000	-	4.962.498	-	-	1	9.962.498	100,00%	66,42%	1,00	9.962.498	
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			129.922.100	-	45.497.000		50.233.000		32.462.000		128.192.000		98,67%		128.192.000			
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	1	129.922.100	-	-	1	45.497.000	-	50.233.000	-	32.462.000	1	128.192.000	100,00%	98,67%	1,00	128.192.000	
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	95,69%			
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase Layanan Angkutan Darat (Persen)	7012552756	808.298.160	90.172.000		245.880.958		110.787.802		357.014.000	-	803.854.760	0,00%	99,45%	0,00	803.854.760		DINAS PERHUBUNGAN
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>			294.649.000	4.078.000		6.260.000		27.937.000		256.134.000		294.409.000		99,92%		294.409.000		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			294.649.000	4.078.000		6.260.000		27.937.000		256.134.000		294.409.000		99,92%		294.409.000		
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>			114.084.690	8.880.000		105.204.690		-		-		114.084.690		100,00%		114.084.690		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi (Paket)	3	114.084.690	-	8.880.000	3	105.204.690	-	-	-	-	3	114.084.690	100,00%	100,00%	3,00	114.084.690	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>			364.893.449	63.584.000		113.786.862		82.439.187		100.880.000		360.690.049		98,85%		360.690.049		
	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi (Kegiatan)	1	308.849.587	1	46.978.000	1	83.159.000	1	73.629.187	-	100.880.000	1	304.646.187	75,00%	98,64%	0,75	304.646.187	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			34.897.862	8.780.000		17.307.862		8.810.000		-		34.897.862		100,00%		34.897.862		
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum LLAJ untuk jaringan jalan provinsi (Kegiatan)	1	21.146.000	-	7.826.000	1	13.320.000	-	-	-	-	1	21.146.000	100,00%	100,00%	1,00	21.146.000	
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>			24.879.406	13.630.000		11.249.406		-		-		24.879.406		100,00%		24.879.406		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi (Kegiatan)	1	24.879.406	-	13.630.000	1	11.249.406	-	-	-	-	1	24.879.406	100,00%	100,00%	1,00	24.879.406	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			9.791.615	-	9.380.000		411.615		-		-	9.791.615		100,00%		9.791.615		
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang (Kegiatan)	1	9.791.615	-	9.380.000	1	411.615	-	-	-	-	1	9.791.615	100,00%	100,00%	1,00	9.791.615	

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12								16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,68%	99,45%					
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>																				
		Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi (Persen)	808333333	588.499.197	12.745.000		173.256.661		20.602.036		381.895.500		588.499.197	0,00%	100,00%	0,00	588.499.197			DINAS PERHUBUNGAN
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		12.957.481	12.745.000		212.481		-		-		12.957.481		100,00%		12.957.481			
		Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12.957.481	12.745.000		212.481		-		-		12.957.481		100,00%		12.957.481			
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		22.926.716	-		9.374.680		13.552.036		-		22.926.716		100,00%		22.926.716			
		Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	22.926.716	-		9.374.680		13.552.036		-		22.926.716	100,00%	100,00%	1,00	22.926.716			
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		552.615.000	-		163.669.500		7.050.000		381.895.500		552.615.000		100,00%		552.615.000			
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		552.615.000	-		163.669.500		7.050.000		381.895.500		552.615.000		100,00%		552.615.000			
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		3,90%	100,00%					
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>																				
		Persentase Kemajuan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi (Persen)	100	39.007.392	-		37.930.000		1.077.392		-		39.007.392	0,00%	100,00%	0,00	39.007.392			DINAS PERHUBUNGAN
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		39.007.392	-		37.930.000		1.077.392		-		39.007.392		100,00%		39.007.392			
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1	39.007.392	-		37.930.000		1.077.392		-		39.007.392	100,00%	100,00%	1,00	39.007.392			
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	100,00%					
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																				
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>																				
		Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	85	8.045.466.100	1.477.385.880		4.170.189.592		210.381.323		2.180.853.485		8.038.810.280	0,00%	99,92%	82,50	8.038.810.280			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERENCANAAN
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	85	8.045.466.100	20	1.477.385.880	50	4.170.189.592	70	210.381.323	85	2.180.853.485	85	8.038.810.280	100,00%	99,92%	85,00	8.038.810.280		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	13.000.000	4	-	6	-	10	-	10	13.000.000	10	13.000.000	83,33%	100,00%	10,00	13.000.000		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	123.123.050	3	19.999.800	3	35.548.050	3	36.025.000	3	31.550.000	12	123.122.850	100,00%	100,00%	12,00	123.122.850		
		Pelayanan Informasi Publik	12	450.198.050	3	143.882.430	6	113.130.500	9	77.830.800	12	109.650.400	12	444.494.130	100,00%	98,73%	12,00	444.494.130		
		Layanan Hubungan Media	60	4.760.198.850	20	-	20	2.734.963.942	20	74.995.523	-	1.949.409.085	60	4.759.368.550	100,00%	99,98%	60,00	4.759.368.550		
		Manajemen Komunikasi Krisis	6	51.700.650	5	1.165.900	-	534.750	-	-	1	49.950.000	6	51.650.650	100,00%	99,90%	6,00	51.650.650		
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12	147.245.500	3	62.337.750	6	36.012.350	8	21.530.000	12	27.294.000	12	147.174.100	100,00%	99,95%	12,00	147.174.100		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Unit)	2	2.500.000.000	1	1.250.000.000	-	1.250.000.000	1	-	-	-	2	2.500.000.000	100,00%	100,00%	2,00	2.500.000.000		
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi														0,00%					
															99,97%	99,92%				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>																			
		Persentase Perangkat Daerah dengan Rapor SPBE pada Kategori Minimal Cukup (Persen)	88,1	4.496.616.143	854.415.680	803.013.154		967.490.537		1.840.994.723		-	4.465.914.094	0,00%	99,32%	69,05	4.465.914.094		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAAN	
		Persentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa (Persen)	95,48											0,00%		73,74				
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Kelentutan Perundang-Undangan (Perangkat Daerah)	42	1.296.750.679	12	575.854.650	10	498.606.549	10	91.613.946	10	110.748.738	42	1.276.823.883	100,00%	98,46%	42,00	1.276.823.883		
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang Menggunakan Domain dan Sub Domain Pemerintah Provinsi (OPD)	42	825.489.100	42	493.895.000	-	161.085.549	-	57.418.946	-	93.758.738	42	806.158.233	100,00%	97,66%	42,00	806.158.233		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Terkoneksi Jaringan Fiber Optik Pemerintah Provinsi (OPD)	42	471.261.575	36	81.959.650	6	337.521.000	-	34.195.000	-	16.990.000	42	470.665.650	100,00%	99,87%	42,00	470.665.650		
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya SPBE pada semua Domain Evaluasi (Indikator)	31	3.199.865.468	31	278.561.030	31	304.406.605	31	875.876.591	31	1.730.245.985	31	3.189.090.211	100,00%	99,66%	31,00	3.189.090.211		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi (Indeks)	2,35	580.065.024	2	194.032.000	2	217.010.355	2	85.812.310	-	79.583.897	2	576.438.562	75,00%	99,37%	1,76	576.438.562		
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Capaian Indikator Terhadap Target SPBE yang Sudah Ditentukan Sesuai Dokumen Rencana Induk (Indikator)	25	388.703.500	25	16.906.259	25	-	25	85.343.741	25	284.735.177	25	386.985.177	100,00%	99,56%	25,00	386.985.177		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Terkoneksi Jaringan Internet Pemprov yang Terintegrasi (OPD)	42	1.472.429.183	36	67.622.771	6	5.466.250	-	396.146.093	-	1.000.098.560	42	1.469.333.674	100,00%	99,79%	42,00	1.469.333.674		
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Umum yang Digunakan Oleh OPD Pemerintah Provinsi (Aplikasi)	5	215.530.339	-	-	2	500.000	5	160.657.447	5	53.440.000	5	214.597.447	100,00%	99,57%	5,00	214.597.447		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Memiliki Tenaga Teknis SPBE Bersertifikat (Orang)	42	543.137.422	42	-	42	81.430.000	42	147.917.000	42	312.388.351	42	541.735.351	100,00%	99,74%	42,00	541.735.351		
															96,77%	99,32%				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																			
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>																			
				311.803.150	134.596.000	5.600.000	-			138.525.962			278.721.962		89,39%		278.721.962		DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			156.676.500	85.977.800	5.600.000	-			48.618.200			140.196.000		89,48%		140.196.000			
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			78.338.250	18.679.800	2.800.000	-			48.618.200			70.098.000		89,48%		70.098.000			
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			78.338.250	67.298.000	2.800.000	-			-			70.098.000		89,48%		70.098.000			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			155.126.650	48.618.200	-	-			89.907.762			138.525.962		89,30%		138.525.962			
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			155.126.650	48.618.200	-	-			89.907.762			138.525.962		89,30%		138.525.962			
															0,00%	89,39%				
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>																			
				10.731.000	2.400.000	-	-		4.000.000			4.331.000		10.731.000		100,00%		10.731.000	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			10.731.000	2.400.000	-	-		4.000.000			4.331.000		10.731.000		100,00%		10.731.000		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			10.731.000		2.400.000		-		4.000.000		4.331.000		10.731.000		100,00%		10.731.000	DINAS, DAN PERDAGANGAN	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		100,00%													
			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi													
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			169.563.250		-		-		128.026.630		24.240.000		152.266.630		89,80%		152.266.630	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			169.563.250		-		-		128.026.630		24.240.000		152.266.630		89,80%		152.266.630		
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			24.309.000		-		-		-		24.240.000		24.240.000		99,72%		24.240.000		
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			78.338.250		-		-		71.130.180		-		71.130.180		90,80%		71.130.180		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkerjasama dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			66.916.000		-		-		56.896.450		-		56.896.450		85,03%		56.896.450		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		89,80%													
			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Tinggi													
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			807.690.603		82.545.400		-		140.647.750		551.954.189		775.147.339		95,97%		775.147.339	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			807.690.603		82.545.400		-		140.647.750		551.954.189		775.147.339		95,97%		775.147.339		
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			406.650.003		-		-		-		405.489.155		405.489.155		99,71%		405.489.155		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			401.040.600		82.545.400		-		140.647.750		146.465.034		369.658.184		92,17%		369.658.184		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		95,97%													
			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi													
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			937.351.000		62.700.000		79.950.000		203.500.000		562.140.243		908.290.243		96,90%		908.290.243	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			937.351.000		62.700.000		79.950.000		203.500.000		562.140.243		908.290.243		96,90%		908.290.243		
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			629.520.000		62.700.000		79.950.000		203.500.000		267.480.000		613.630.000		97,48%		613.630.000		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			307.831.000		-		-		-		294.660.243		294.660.243		95,72%		294.660.243		
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%		96,90%													
			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi													
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>																			
	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal (Persen)		40,5	783.673.613		164.479.500		292.427.086		192.677.027		134.086.050		783.669.663		0,00%	100,00%	40,00	783.669.663	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		55	511.850.663	18	152.968.500	67	248.731.186	77	49.067.027	77	61.083.350	77	511.850.063	140,75%	100,00%	77,41	511.850.063		
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	356.444.063	-	152.968.500	1	166.418.536	-	37.057.027	-	-	1	356.444.063	100,00%	100,00%	1,00	356.444.063		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah (Kegiatan usaha)	21	155.406.600	-	-	21	82.312.650	-	12.010.000	-	61.083.350	21	155.406.000	100,00%	100,00%	21,00	155.406.000		

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya (Persen)	20	271.822.950	70	11.511.000	70	43.695.900	70	143.610.000	70	73.002.700	70	271.819.600	350,00%	100,00%	70,00	271.819.600	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1	271.822.950	-	11.511.000	-	43.695.900	1	143.610.000	-	73.002.700	1	271.819.600	100,00%	100,00%	1,00	271.819.600	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>																		
		Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal (Persen)	25	560.421.350		20.478.350		43.339.062		178.299.248		309.524.094	-	551.640.754	0,00%	98,43%	20,00	551.640.754	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (Persen)	75	560.421.350	80	20.478.350	80	43.339.062	80	178.299.248	80	309.524.094	80	551.640.754	106,67%	98,43%	80,00	551.640.754	
	Peleaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1	560.421.350	-	20.478.350	1	43.339.062	-	178.299.248	-	309.524.094	1	551.640.754	100,00%	98,43%	1,00	551.640.754	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>																		
		Tingkat Fasilitas Layanan Perizinan Pelaku Usaha (Persen)	1,05																
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan (Persen)	90	1.268.299.168		394.401.300		414.558.880		93.807.688		364.725.050	-	1.267.492.918	0,00%	99,94%	1,06	1.267.492.918	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP (Persen)	75	1.268.299.168	100	394.401.300	100	414.558.880	100	93.807.688	100	364.725.050	100	1.267.492.918	133,33%	99,94%	100,00	1.267.492.918	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi (Pelaku Usaha)	340	748.697.774	183	257.326.186	135	213.691.600	166	68.548.688	96	208.571.450	580	748.137.924	170,59%	99,93%	580,00	748.137.924	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi (Kegiatan Usaha)	340	391.820.942	409	86.094.712	412	171.077.230	335	23.249.000	220	111.198.600	1.376	391.619.542	404,71%	99,95%	1376,00	391.619.542	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi (Orang)	7	95.705.362	6	26.025.312	1	22.670.050	-	2.010.000	-	44.955.000	7	95.660.362	100,00%	99,95%	7,00	95.660.362	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi (Kegiatan usaha)	24	32.075.090	-	24.955.090	24	7.120.000	-	-	-	-	24	32.075.090	100,00%	100,00%	24,00	32.075.090	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>																		
		Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal (Persen)	100	925.500.000		147.741.476		333.862.800		155.010.000		288.470.400	-	925.084.676	0,00%	99,96%	90,00	925.084.676	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	Rasio Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Rasio)	14	925.500.000	15	147.741.476	46	333.862.800	6	155.010.000	-	288.470.400	67	925.084.676	479,64%	99,96%	67,15	925.084.676	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	300	522.479.960	60	36.300.476	120	255.427.800	60	91.965.000	60	138.503.400	300	522.196.676	100,00%	99,95%	300,00	522.196.676	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	65	403.020.040	29	111.441.000	12	78.435.000	8	63.045.000	33	149.967.000	82	402.888.000	126,15%	99,97%	82,00	402.888.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>																		
		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan (Persen)	100	38.324.512		27.716.512		4.678.000		-		5.885.000	-	38.279.512	0,00%	99,88%	100,00	38.279.512	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
	<b>Usulan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi (Persen)	100	38.324.512	68	27.716.512	14	4.678.000	-	-	-	5.885.000	82	38.279.512	82,10%	99,88%	82,10	38.279.512	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab						
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	3	4	7	8								10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16		
			Kp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		262.666.930	-	-	-	-	-	-	244.605.000	-	-	17.375.000	-	-	261.980.000	-	-	99,74%	-	-	261.980.000	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		230.524.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.493.900	-	-	226.493.900	-	-	98,25%	-	-	226.493.900	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		109.604.250	-	-	-	-	-	-	28.752.000	-	-	77.176.334	-	-	105.928.334	-	-	96,65%	-	-	105.928.334	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		7.270.000.000	-	-	-	-	-	-	3.039.000.000	-	-	-	-	7.270.000.000	-	-	100,00%	-	-	7.270.000.000	-		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengurus Organisasi Keolahragaan yang Mengikuti Pelatihan ( Orang ) ( Orang )	3	7.270.000.000	1	3.731.000.000	1	500.000.000	-	3.039.000.000	1	-	-	3	7.270.000.000	100,00%	100,00%	3,00	7.270.000.000	-	-	-	-	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		103,17%	97,78%							
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>																0,00%							
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi (Organisasi )	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik															0,00%								
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	0,00%								
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																							
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>																							
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Penyelenggaraan dan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat (Persen)	100	235.917.920	48.599.833	-	17.749.700	-	-	43.882.809	-	123.557.558	-	233.789.900	0,00%	99,10%	90,00	233.789.900	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	42	235.917.920	48.599.833	-	17.749.700	8	-	43.882.809	42	123.557.558	42	233.789.900	100,00%	99,10%	42,00	233.789.900	-	-	-	-	-	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral															0,00%								
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	99,10%								
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																							
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>																							
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal (Persen)	4	384.493.500	95.167.350	-	10.555.700	1	-	157.540.714	1	117.400.219	4	380.663.983	100,00%	99,00%	4,00	380.663.983	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Laporan)	2	20.847.000	-	-	-	1	-	15.000.600	2	5.594.000	2	20.594.600	100,00%	98,79%	2,00	20.594.600	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase penyelenggara sistem elektronik dengan indeks kematangan siber bernilai baik (Persen)	51,8	189.737.950	10.300.000	-	10.555.700	52	-	97.516.114	60	71.283.219	60	189.655.033	115,64%	99,96%	59,90	189.655.033	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	20	173.908.550	84.867.350	-	-	20	-	45.024.000	20	40.523.000	20	170.414.350	100,00%	97,99%	20,00	170.414.350	-	-	-	-	-	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		107,72%	99,00%								
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>																			
		Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan (Persen)	100	5.857.729.975		245.148.260		829.821.931		972.945.475		3.475.131.336	-	5.523.047.002	0,00%	94,29%	100,00	5.523.047.002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25	4.682.560.275	15	1.074.180	-	518.665.931	-	904.400.295	-	2.974.172.736	15	4.398.313.142	60,00%	93,93%	15,00	4.398.313.142	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3	2.970.495.045	-	-	-	431.331.380	3	808.272.565	-	1.661.404.017	3	2.901.007.962	100,00%	97,66%	3,00	2.901.007.962	
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	46	1.712.065.230	-	1.074.180	-	87.334.551	-	96.127.730	-	1.312.768.719	-	1.497.305.180	0,00%	87,46%	0,00	1.497.305.180	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0	634.732.200	-	244.074.080	-	11.356.000	-	1.820.000	-	362.738.600	-	619.988.680	0,00%	97,68%	0,00	619.988.680	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2	634.732.200	-	244.074.080	2	11.356.000	-	1.820.000	-	362.738.600	2	619.988.680	100,00%	97,68%	2,00	619.988.680	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	540.437.500	-	-	-	299.800.000	-	66.725.180	-	138.220.000	-	504.745.180	0,00%	93,40%	0,00	504.745.180	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1	540.437.500	-	-	-	299.800.000	-	66.725.180	-	138.220.000	-	504.745.180	0,00%	93,40%	0,00	504.745.180	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													61,55%	94,29%					
<b>Predikat Kinerja</b>													Rendah	Sangat Tinggi					
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>																	
		Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan (Persen)	100	2.181.277.690	-	-	-	-	-	343.088.241	-	1.778.085.529	-	2.121.173.770	0,00%	97,24%	100,00	2.121.173.770	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	2.181.277.690	-	-	-	-	-	343.088.241	-	1.778.085.529	-	2.121.173.770	0,00%	97,24%	0,00	2.121.173.770	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50	351.490.850	-	-	-	-	50	145.609.231	-	198.000.000	50	343.609.231	100,00%	97,76%	50,00	343.609.231	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3	1.829.786.840	-	-	3	-	-	197.479.010	-	1.580.085.529	3	1.777.564.539	100,00%	97,15%	3,00	1.777.564.539	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													100,00%	97,24%					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>																	
		Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan (Persen)	100	598.259.350	-	-	-	99.991.300	-	-	-	476.071.450	-	576.062.750	0,00%	96,29%	100,00	576.062.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan (Persen)	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		100,00			
		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2	598.259.350	1	-	-	99.991.300	-	-	-	476.071.450	1	576.062.750	50,00%	96,29%	1,00	576.062.750	
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1	598.259.350	-	-	2	99.991.300	-	-	-	476.071.450	2	576.062.750	200,00%	96,29%	2,00	576.062.750	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													200,00%	96,29%					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4																	
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>																			
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Persen)	100	86.400.000	-	-	-	-	-	-	82.252.347	-	82.252.347	0,00%	95,20%	100,00	82.252.347	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Cagar Budaya yang dicegah dan ditanggulangi dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan (Persen)	0	86.400.000	-	-	-	-	-	-	82.252.347	-	82.252.347	0,00%	95,20%	0,00	82.252.347		
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang didayagunakan (Situs)	1	86.400.000	-	-	1	-	-	-	82.252.347	1	82.252.347	100,00%	95,20%	1,00	82.252.347		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												100,00%	95,20%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																			
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>																			
			5.715.274.500	26.156.000	1.948.129.310	2.220.448.298	1.508.253.369	5.702.986.977	99,79%	5.702.986.977	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		509.811.000	17.150.000	116.540.000	323.366.100	51.790.000	508.846.100	99,81%	508.846.100									
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi		72.730.000	-	-	72.697.100	-	72.697.100	99,95%	72.697.100									
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		131.650.000	17.150.000	29.150.000	33.259.200	51.790.000	131.349.200	99,77%	131.349.200									
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		305.431.000	-	87.390.000	217.409.800	-	304.799.800	99,79%	304.799.800									
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		5.205.463.500	9.006.000	1.831.589.310	1.897.082.198	1.456.463.369	5.194.140.877	99,78%	5.194.140.877									
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		218.861.500	-	-	-	209.679.900	209.679.900	95,80%	209.679.900									
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		4.986.602.000	9.006.000	1.831.589.310	1.897.082.198	1.246.783.469	4.984.460.977	99,96%	4.984.460.977									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	99,79%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>																			
			170.149.000	15.990.000	18.042.000	83.184.500	52.750.000	169.966.500	99,89%	169.966.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		33.149.000	-	-	32.986.500	-	32.986.500	99,51%	32.986.500									
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		33.149.000	-	-	32.986.500	-	32.986.500	99,51%	32.986.500									
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		72.500.000	9.800.000	16.300.000	17.700.000	28.700.000	72.500.000	100,00%	72.500.000									
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		72.500.000	9.800.000	16.300.000	17.700.000	28.700.000	72.500.000	100,00%	72.500.000									
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		64.500.000	6.190.000	1.742.000	32.498.000	24.050.000	64.480.000	99,97%	64.480.000									
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		22.252.000	6.190.000	1.742.000	-	14.300.000	22.232.000	99,91%	22.232.000									

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		42.248.000				32.498.000		9.750.000		42.248.000		100,00%		42.248.000				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											0,00%	99,89%							
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>																			
	Cakupan Kawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat (Kawasan)	0	8.433.035.265	3.350.000	655.456.965	2.538.431.982	4.126.466.810	-	7.323.705.757	0,00%	86,85%	0,00	7.323.705.757						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		437.620.414	3.350.000	69.103.770	35.650.000	325.784.600		433.888.370		99,15%		433.888.370						
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen dan penetapan Peninjauan kembali Perda RZWP3K (Dokumen)	1	48.562.914	-	3.350.000	1	45.212.914	1	-	1		1	48.562.914	100,00%	100,00%	1,00	48.562.914	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi WP3K yang Ditetapkan oleh Pemerintah (KKPD)	184682	389.057.500	-	184.682	23.890.856	184.682	35.650.000	184.682	325.784.600	184.682	385.325.456	100,00%	99,04%	184682,00	385.325.456		
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		85.225.800	-	34.434.800	6.270.000	41.407.400		82.112.200		96,35%		82.112.200						
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi/ pertimbangan teknis untuk izin lokasi perairan dan izin Pengelolaan Perairan di WP3K (Jenis)	1	57.496.800	-	1	32.316.800	1	6.270.000	1	18.910.000	1	57.496.800	100,00%	100,00%	1,00	57.496.800		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan (Rekomendasi)	3	27.729.000	-	-	2.118.000	1	-	3	22.497.400	3	24.615.400	100,00%	88,77%	3,00	24.615.400		
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		7.910.189.051	-	551.918.395	2.496.511.982	3.759.274.810		6.807.705.187		86,06%		6.807.705.187						
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Jenis)	50		-	-	40		50		50		100,00%		50,00				
		Jumlah SDM dalam Mengolah Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Terlatih (Orang)	150	3.652.169.451	-	364.567.395	665.238.882	2.386.050.160	3.415.856.437	93,53%	3.415.856.437								
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	50	3.925.963.300	-	-	134.873.500	40	1.797.109.200	49	1.154.366.150	49	3.086.348.850	98,00%	78,61%	49,00	3.086.348.850		
	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	50	45.049.900	-	-	-	45	33.014.900	50	11.020.000	50	44.034.900	100,00%	97,75%	50,00	44.034.900		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM WP3K yang Mendapatkan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	287.006.400	-	-	52.477.500	30	1.149.000	100	207.838.500	100	261.465.000	100,00%	91,10%	100,00	261.465.000		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>											99,07%	86,85%							
<b>Predikat Kinerja</b>											Sangat Tinggi	Tinggi							
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>																		
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat (Persen)	67967,45	15.899.922.140	191.554.650	1.763.181.609	6.846.833.765	4.850.711.564		13.652.281.588		0,00%		61928,52		13.652.281.588				DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%								
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
		Persentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat (Persen)	117,54											0,00%		113,48			
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		68.622.300	62.000	18.310.000	4.387.600	44.958.000	67.717.600	98,68%	67.717.600									
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Dokumen)	1	670.000	-	670.000	1	-	1	-	1	670.000	100,00%	100,00%	1,00	670.000			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Jenis)	1	67.952.300	-	62.000	-	17.640.000	-	4.387.600	1	44.958.000	1	67.047.600	100,00%	98,67%	1,00	67.047.600	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		359.044.725	139.109.000	134.335.000	18.288.700	62.693.375	354.426.075	98,71%	354.426.075									
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Dokumen)	2	107.243.100	1	106.351.000	2	-	2	818.700	2	-	2	107.169.700	100,00%	99,93%	2,00	107.169.700	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		127.339.625	5.190.000	49.250.000	17.470.000	51.419.625	123.329.625	96,85%	123.329.625									
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		124.462.000	27.568.000	85.085.000	-	11.273.750	123.926.750	99,57%	123.926.750									
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		-	-	-	-	-	-	0,00%	-				0,00%	0,00%	0,00	-		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (Jenis)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		15.470.732.015	51.069.650	1.610.536.609	6.823.958.465	4.743.060.189	13.228.624.913	85,51%	13.228.624.913									
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Lokasi)	3	26.266.080	3	-	3	4.830.000	3	11.532.450	3	9.793.750	3	26.156.200	100,00%	99,58%	3,00	26.156.200	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Jenis)	12	15.191.573.780	-	50.639.700	-	1.525.040.165	10	6.758.139.154	12	4.625.220.554	12	12.959.039.573	100,00%	85,30%	12,00	12.959.039.573	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (Lokasi)	3	252.892.155	3	429.950	3	80.666.444	3	54.286.861	3	108.045.885	3	243.429.140	100,00%	96,26%	3,00	243.429.140	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1.523.100	1.314.000	-	199.000	-	1.513.000	99,34%	1.513.000									
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1.523.100	1.314.000	-	199.000	-	1.513.000	99,34%	1.513.000									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													98,41%	85,86%					
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat (Persen)	106642,21	4.928.941.827	84.556.000	751.667.381	1.648.955.073	2.169.735.248	4.654.913.702	0,00%	94,44%	105479,19	4.654.913.702						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fishing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan (Persen)	100	1.097.317.460		5.400.000		233.668.450		585.078.140		216.980.400		1.041.126.990	0,00%	94,88%	100,00	1.041.126.990		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil			1.097.317.460		5.400.000		233.668.450		585.078.140		216.980.400		1.041.126.990		94,88%		1.041.126.990		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut (Kegiatan)	8	262.164.000	1	5.400.000	2	65.411.550	5	48.880.000	7	102.686.100	7	222.377.650	87,50%	84,82%	7,00	222.377.650		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut (Kegiatan)	12	762.809.300	1	-	3	133.060.500	8	536.198.140	12	77.149.300	12	746.407.940	100,00%	97,85%	12,00	746.407.940		
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			72.344.160		-		35.196.400		-		37.145.000		72.341.400		100,00%		72.341.400		
															90,42%	94,88%				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat (Persen)	10867,02	16.287.963.986		-		1.102.706.565		9.461.045.793		5.389.501.317		15.953.253.675	0,00%		10711,09	15.953.253.675		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat (Persen)	50,27											0,00%		49,71				
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			160.862.846		-		42.454.000		67.244.676		46.673.250		156.371.926		97,21%		156.371.926		
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			63.013.170		-		17.950.000		6.273.000		37.098.250		61.321.250		97,31%		61.321.250		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			97.849.676		-		24.504.000		60.971.676		9.575.000		95.050.676		97,14%		95.050.676		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			242.611.440		-		111.882.040		60.120.300		68.710.000		240.712.340		99,22%		240.712.340		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) (Kelompok)	10	127.211.400	1	-	2	15.090.000	7	50.860.300	10	60.060.000	10	126.010.300	100,00%	99,06%	10,00	126.010.300		
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi (Kabupaten)	10	115.400.040	3	-	8	96.792.040	9	9.260.000	10	8.650.000	10	114.702.040	100,00%	99,40%	10,00	114.702.040		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			15.884.489.700		-		948.370.525		9.333.680.817		5.274.118.067		15.556.169.409		97,93%		15.556.169.409		
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku Usahan Pengolah/distribusi Ikan (Dokumen)	3	433.806.000	-	-	1	810.380	1	550.000	2	269.113.100	2	270.473.480	66,67%	62,35%	2,00	270.473.480		
	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelaku Usaha Perikanan (Pelaku Usaha)	50	15.450.683.700	-	-	-	947.560.145	45	9.333.130.817	49	5.005.004.967	49	15.285.695.929	98,00%	98,93%	49,00	15.285.695.929		
															96,23%	97,95%				

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	SKPD Penanggungjawab		
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%					
				8	9	10	11	12	13	14 = 6 + 12	16								
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>																			
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>																			
			1.885.866.680	6.509.000	245.219.200	305.000.000	1.259.057.480	1.815.785.680	96,28%	1.815.785.680	DINAS PARIWISATA								
	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>		1.826.238.480	6.509.000	185.683.000	305.000.000	1.259.057.480	1.756.249.480	96,17%	1.756.249.480									
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		35.756.000	6.509.000	29.258.000	-	-	35.767.000	100,03%	35.767.000									
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		1.790.482.480	-	156.425.000	305.000.000	1.259.057.480	1.720.482.480	96,09%	1.720.482.480									
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>		59.628.200	-	59.536.200	-	-	59.536.200	99,85%	59.536.200									
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		50.000.000	-	49.908.000	-	-	49.908.000	99,82%	49.908.000									
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		9.628.200	-	9.628.200	-	-	9.628.200	100,00%	9.628.200									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	96,28%									
<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>																			
			1.983.947.600	-	619.874.316	715.000.000	641.073.290	1.975.947.606	99,60%	1.975.947.606	DINAS PARIWISATA								
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>		1.983.947.600	-	619.874.316	715.000.000	641.073.290	1.975.947.606	99,60%	1.975.947.606									
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		99.621.300	-	80.599.156	15.000.000	3.022.150	98.621.306	99,00%	98.621.306									
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1.784.326.300	-	457.663.260	685.000.000	637.663.040	1.780.326.300	99,78%	1.780.326.300									
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri		100.000.000	-	81.611.900	15.000.000	388.100	97.000.000	97,00%	97.000.000									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	99,60%									
<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>																			
			2.600.500.000	547.851.600	1.415.095.900	512.934.400	115.618.100	2.591.500.000	99,65%	2.591.500.000	DINAS PARIWISATA								
	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>		2.600.500.000	547.851.600	1.415.095.900	512.934.400	115.618.100	2.591.500.000	99,65%	2.591.500.000									
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		1.020.000.000	-	607.065.600	412.934.400	-	1.020.000.000	100,00%	1.020.000.000									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		415.500.000	199.578.000	215.922.000	-	-	415.500.000	100,00%	415.500.000									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar		1.165.000.000	348.273.600	592.108.300	100.000.000	115.618.100	1.156.000.000	99,23%	1.156.000.000									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>									0,00%	99,65%									
<b>Predikat Kinerja</b>									Sangat Rendah	Sangat Tinggi									
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>																			
			5.238.973.064	-	1.374.704.580	2.370.000.000	1.366.268.484	5.110.973.064	97,56%	5.110.973.064	DINAS PARIWISATA								
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>		5.238.973.064	-	1.374.704.580	2.370.000.000	1.366.268.484	5.110.973.064	97,56%	5.110.973.064									
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		1.353.094.164	-	229.948.200	570.000.000	543.145.964	1.343.094.164	99,26%	1.343.094.164									
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		2.246.631.160	-	760.076.670	900.000.000	546.554.490	2.206.631.160	98,22%	2.206.631.160									

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16										
			K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
			1.639.247.740	-	384.679.710		900.000.000	276.568.030		1.561.247.740		95,24%		1.561.247.740							
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,56%							
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>																					
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Produksi Dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan (Persen)	20	2.753.269.200		206.195.500		295.267.364		756.893.277		1.383.010.643		-	2.641.366.784		0,00%	95,94%	20,00	2.641.366.784	DINAS PERKEBUNAN
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6	27.011.500	6	22.877.000	6	1.250.000	6	-	6	-	6	24.127.000	100,00%	89,32%	6,00	24.127.000			
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alisintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		27.011.500		22.877.000		1.250.000		-		-		24.127.000		89,32%		24.127.000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		-		-		-		-		-		-		0,00%		-			
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	6	2.349.896.700	6	103.466.000	6	216.747.364	6	698.853.277	6	1.222.602.143	6	2.241.668.784	100,00%	95,39%	6,00	2.241.668.784			
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		90.992.800		15.975.000		22.420.000		8.205.000		43.272.211		89.872.211		98,77%		89.872.211			
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		2.258.903.900		87.491.000		194.327.364		690.648.277		1.179.329.932		2.151.796.573		95,26%		2.151.796.573			
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1	376.361.000	1	79.852.500	1	77.270.000	1	58.040.000	1	160.408.500	1	375.571.000	100,00%	99,79%	1,00	375.571.000			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		376.361.000		79.852.500		77.270.000		58.040.000		160.408.500		375.571.000		99,79%		375.571.000			
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	95,94%						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>																					
		Persentase Produksi Perkebunan yang Memenuhi SNI dan Standar Pasar Global (Persen)	20	574.579.625		157.380.300		17.131.000		146.245.783		234.381.054		-	555.138.137		0,00%	96,62%	15,00	555.138.137	DINAS PERKEBUNAN
		Penataan Prasarana Pertanian	1	574.579.625	1	157.380.300	1	17.131.000	1	146.245.783	1	234.381.054	1	555.138.137	100,00%	96,62%	1,00	555.138.137			
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		26.884.975		-		-		9.011.609		14.958.000		23.969.609		89,16%		23.969.609			
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		64.158.300		64.158.300		-		-		-		64.158.300		100,00%		64.158.300			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		60.984.050		19.957.000		12.091.000		24.101.197		3.220.000		59.369.197		97,35%		59.369.197			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		54.070.400		36.695.000		5.040.000		7.653.556		3.810.000		53.198.556		98,39%		53.198.556			
		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian		91.442.300		-		-		-		81.794.530		81.794.530		89,45%		81.794.530			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		36.570.000		36.570.000		-		-		-		36.570.000		100,00%		36.570.000			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		240.469.600		-		-		105.479.421		130.598.524		236.077.945		98,17%		236.077.945			
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	96,62%						
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>																					
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persen)	60	170.565.999		129.274.999		31.891.480		-		8.670.000		-	169.836.479		0,00%	99,57%	60,00	169.836.479	DINAS PERKEBUNAN
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100	170.565.999	25	129.274.999	50	31.891.480	75	-	100	8.670.000	63	169.836.479	62,50%	99,57%	62,50	169.836.479			



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian > 4 Laporan (Laporan)	6	814.750.450	1	20.000.000	1	245.134.550	2	426.106.500	2	117.350.000	6	808.591.050	100,00%	99,24%	6,00	808.591.050	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Ketersediaan benih Unggul tanaman perkebunan > 50% (Persen)	100	3.475.782.915	25	328.559.050	25	488.900.686	25	703.855.391	25	1.857.747.002	100	3.379.062.129	100,00%	97,22%	100,00	3.379.062.129	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih yang terbitkan > 10 Sertifikat (Sertifikat)	100	243.667.180	-	-	33	59.540.000	33	67.987.000	34	71.013.100	100	198.540.100	100,00%	81,48%	100,00	198.540.100	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luas Cakupan Penyaluran/Distribusi Benih/ Bibit Unggul Hortikultura (Hektar)	4	2.093.024.655	1	113.208.400	1	218.941.186	1	248.115.515	1	1.463.877.540	4	2.044.142.641	100,00%	97,66%	4,00	2.044.142.641	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas Cakupan Penyediaan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Pangan (Hektar)	4	1.139.091.080	1	215.350.650	1	210.419.500	1	387.752.876	1	322.856.362	4	1.136.379.388	100,00%	99,76%	4,00	1.136.379.388	
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Yang Berkualitas (Persen)	100	1.277.372.563	25	132.573.590	25	264.939.501	25	438.624.050	25	427.368.045	100	1.263.505.186	100,00%	98,91%	100,00	1.263.505.186	
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peternak Pada Sentra Produksi Benih/Bibiternak yang Terlatih (Orang)	2	553.000	1	533.000	-	-	-	-	1	20.000	2	553.000	100,00%	100,00%	2,00	553.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sentra Pengembangan dan Pengelolaan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan Kewenangan Provinsi (Sentra)	4	85.699.700	1	78.550.590	-	-	-	-	3	-	4	78.550.590	100,00%	91,66%	4,00	78.550.590	
	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang terlatih (Orang)	4	1.191.119.863	1	53.490.000	1	264.939.501	1	438.624.050	1	427.348.045	4	1.184.401.596	100,00%	99,44%	4,00	1.184.401.596	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			20.078.680		522.000		879.800		11.372.700		6.920.000		19.694.500		98,09%		19.694.500	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			8.171.860		-		879.800		-		6.920.000		7.799.800		95,45%		7.799.800	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan			11.906.820		522.000		-		11.372.700		-		11.894.700		99,90%		11.894.700	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak Dari Luar Provinsi yang Dikembangkan Pada Kawasan Peternakan (Ekor)	1000	217.336.540	-	-	-	178.126.365	-	20.150.000	1.000	16.250.000	1.000	214.526.365	100,00%	98,71%	1000,00	214.526.365	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Bibit ternak dari Luar Provinsi (Ekor)	1000	217.336.540	-	-	333	178.126.365	333	20.150.000	334	16.250.000	1.000	214.526.365	100,00%	98,71%	1000,00	214.526.365	
														99,65%	97,93%				
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Lahan Pertanian yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas (Persen)	78									78		100,00%			87,50		
		Persentase Kesesuaian Pengembangan Lahan Pertanian dengan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas (Persen)	78	12.422.765.000	-		229.266.570		5.458.521.345		6.141.891.779	78	11.829.679.694	100,00%	95,23%		87,50	11.829.679.694	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah (Persen)	78									78		100,00%			87,50		



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16				
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp			
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	0,03%	99,50%		
<b>Predikat Kinerja</b>																	Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan (Persen)	30	51.954.500	3.150.000	17.362.500	13.283.600	14.397.000	30	48.193.100	100,00%	92,76%	12,50	48.193.100						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi izin usaha perkebunan > 50% (Persen)	0	51.954.500	-	3.150.000	-	17.362.500	-	13.283.600	-	14.397.000	-	48.193.100	0,00%	92,76%	0,00	48.193.100		
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Jumlah Dokumen standar pelayanan perizinan usaha perkebunan < 3 (Dokumen)	1	23.150.000	-	3.150.000	-	11.125.000	-	3.750.000	1	5.000.000	1	23.025.000	100,00%	99,46%	1,00	23.025.000		
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penilaian izin usaha Perkebunan > 4 (Rekomendasi)	4	21.580.000	-	1	6.237.500	1	8.790.000	2	5.000.000	4	20.027.500	100,00%	92,81%	4,00	20.027.500			
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian				7.224.500	-	-	-	743.600		4.397.000		5.140.600			71,16%		5.140.600			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	86,09%	92,76%		
<b>Predikat Kinerja</b>																	Tinggi	Sangat Tinggi		
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian Pada Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Kewenangan Provinsi (Persen)	78									78		100,00%		87,50				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Persentase Lembaga Ekonomi Petani pada Kawasan Pertanian Yang Menerapkan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani (Persen)			78	10.090.571.286	394.331.400	511.653.900	922.882.964	7.888.768.053	78	9.717.636.317	100,00%	96,30%	87,50	9.717.636.317						
Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP (Persen)			78						78		100,00%		87,50							
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase Kawasan Pengembangan Pertanian Yang Mengakses dan Menerapkan Teknologi Pertanian Berstandar GAP dan GHP (Persen)	100	6.343.262.515	25	207.726.400	25	322.001.000	25	304.534.460	25	5.201.316.358	100	6.035.578.218	100,00%	95,15%	100,00	6.035.578.218		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Kelembagaan Petani yang Mengakses Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang di Diseminasikan (Kelompok)	6	472.009.740	1	207.726.400	-	149.794.500	2	59.610.030	3	23.802.080	6	440.933.010	100,00%	93,42%	6,00	440.933.010		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelembagaan Petani yang Mengakses Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Berstandar GAP dan GHP (Kelompok)	4	5.871.252.775	-	-	1	172.206.500	1	244.924.430	2	5.177.514.278	4	5.594.645.208	100,00%	95,29%	4,00	5.594.645.208		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Persentase kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan perkebunan > 50% (Persen)	100	3.747.308.771	-	186.605.000	-	189.652.900	-	618.348.504	100	2.687.451.695	100	3.682.058.099	100,00%	98,26%	100,00	3.682.058.099		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Pembentukan/ Restrukturisasi dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani pada Kawasan Pengembangan Pertanian (Lembaga)	6	213.100.000	1	186.605.000	2	25.475.000	-	-	3	-	6	212.080.000	100,00%	99,52%	6,00	212.080.000		
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		Jumlah kelompok tani yang memahami anjuran teknis dan administrasi kelembagaan petani >100 (Kelompok Tani)	50	3.534.208.771	-	-	25	164.177.900	-	618.348.504	25	2.687.451.695	50	3.469.978.099	100,00%	98,18%	50,00	3.469.978.099		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	100,00%	96,30%		
<b>Predikat Kinerja</b>																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>																				
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>		Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Kehutanan (Persen)	0	3.777.105.238	138.081.100	1.124.054.500	817.910.500	1.591.076.430	-	3.671.122.530	0,00%	97,19%	34,11	3.671.122.530						DINAS KEHUTANAN
Nilai Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) (Juta Rupiah)			0										0,00%	250,00						
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah KPH yang menyusun Rencana Tata Hutan (unit)	12	134.991.500	-	21.010.400	-	17.445.000	9	8.499.500	-	87.871.000	-	134.825.900	0,00%	99,88%	0,00	134.825.900		
Kordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan (kali)	5	134.991.500	-	21.010.400	-	17.445.000	4	8.499.500	5	87.871.000	5	134.825.900	100,00%	99,88%	5,00	134.825.900		



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	13=12/7x100%
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah DAS Kewenangan Provinsi yang dikelola (Unit)	1	832.133.370	-	-	-	25.082.000	1	293.964.700	-	-	507.726.500	1	826.773.200	100,00%	99,36%	1,00	826.773.200			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			832.133.370	-	-	-	25.082.000		293.964.700	-	-	507.726.500		826.773.200		99,36%		826.773.200			
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0,00%	99,36%							
												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>																						
	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi (Persen)	7	149.440.140	-	-	24.700.000	-	53.120.000	-	-	30.938.000	-	39.815.600	-	148.573.600	0,00%	99,42%	5,00	148.573.600	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi (Dokumen)	1	36.593.200	-	-	5.310.000	-	19.600.000	-	-	10.450.000	-	1.015.600	-	36.375.600	0,00%	99,41%	0,00	36.375.600		
	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah (Persen)	0	112.846.940	-	-	19.390.000	-	33.520.000	-	-	20.488.000	-	38.800.000	-	112.198.000	0,00%	99,42%	0,00	112.198.000		
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul (Dokumen)	1	74.178.940	-	-	19.390.000	-	33.520.000	-	-	14.680.000	1	6.040.000	1	73.630.000	100,00%	99,26%	1,00	73.630.000		
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi (Laporan)	1	38.668.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.808.000	1	32.760.000	1	38.668.000	100,00%	99,74%	1,00	38.668.000	
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		100,00%	99,42%							
												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>																						
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	Persentase Perusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan (Persen)	25	548.655.260	-	-	84.285.160	-	230.865.920	-	-	28.666.956	-	202.491.654	-	546.309.690	0,00%	99,57%	25,00	546.309.690	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) (Persen)	25	500.210.630	-	-	73.598.460	-	225.275.920	-	-	28.666.956	-	170.633.054	-	498.174.390	0,00%	99,59%	0,00	498.174.390		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	1	209.642.270	-	-	35.901.820	-	40.160.060	-	-	1	133.546.650	1	209.608.530	100,00%	99,98%	1,00	209.608.530			
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Laporan)	1	290.568.360	-	-	37.696.640	-	185.115.860	-	-	1	37.086.404	1	288.565.860	100,00%	99,31%	1,00	288.565.860			
	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi,Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan) (Persen)	25	48.444.630	-	-	10.686.700	-	5.590.000	-	-	-	-	31.858.600	-	48.135.300	0,00%	99,36%	0,00	48.135.300		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	1	48.444.630	-	-	10.686.700	-	5.590.000	-	-	1	31.858.600	1	48.135.300	100,00%	99,36%	1,00	48.135.300			
												<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		100,00%	99,57%							
												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>																				
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (Persen)	98,32	1.812.685.746		105.749.400		158.574.100		1.051.446.292		373.641.591		1.689.411.383	0,00%	93,20%	98,21	1.689.411.383	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan (Persen)	10	12.911.000	-	4.260.000	-	2.390.000	-	5.600.000	-	-	-	12.250.000	0,00%	94,88%	0,00	12.250.000		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	5	12.911.000	-	4.260.000	-	2.390.000	-	5.600.000	5	-	5	12.250.000	100,00%	94,88%	5,00	12.250.000		
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tingkat Ketaatan Pemilik instalasi Pembangkit Listrik Untuk kepentingan Sendiri yang Memenuhi Kewajiban aspek perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan (Persen)	10	32.781.000	-	7.720.000	-	9.480.000	-	15.376.000	-	-	-	32.576.000	0,00%	99,37%	0,00	32.576.000		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 5 Rekomendasi Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	5	32.781.000	-	7.720.000	-	9.480.000	-	15.376.000	5	-	5	32.576.000	100,00%	99,37%	5,00	32.576.000		
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tingkat Ketaatan Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang memenuhi kewajiban aspek manajemen mutu, teknis dan keselamatan ketenagalistrikan dan penggunaan produk dalam negeri (Persen)	10	15.510.000	-	4.100.000	-	4.138.000	-	3.450.000	-	3.430.000	-	15.118.000	0,00%	97,47%	0,00	15.118.000		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)	1	15.510.000	-	4.100.000	-	4.138.000	-	3.450.000	1	3.430.000	1	15.118.000	100,00%	97,47%	1,00	15.118.000		
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Bantuan (Persen)	0,15	1.751.483.746	-	89.669.400	-	142.566.100	-	1.027.020.292	-	370.211.591	-	1.629.467.383	0,00%	93,03%	0,00	1.629.467.383		
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dokumen)	1	57.542.200	-	13.755.000	-	3.310.000	-	13.956.000	1	25.133.852	1	56.154.852	100,00%	97,59%	1,00	56.154.852		
	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)	490	1.443.680.546	-	41.810.400	-	111.823.100	-	873.121.682	233	296.492.939	233	1.323.248.121	47,55%	91,66%	233,00	1.323.248.121		
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	1	100.261.000	-	21.864.000	-	26.883.000	-	12.476.000	1	38.990.800	1	100.213.800	100,00%	99,95%	1,00	100.213.800		
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	20	150.000.000	-	12.240.000	-	550.000	20	127.466.610	-	9.594.000	20	149.850.610	100,00%	99,90%	20,00	149.850.610		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												58,23%	93,20%							
<b>Predikat Kinerja</b>												Rendah	Sangat Tinggi							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			841.089.000		25.005.000		238.966.400		10.653.000		156.041.000		430.665.400		51,20%		430.665.400	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			841.089.000		25.005.000		238.966.400		10.653.000		156.041.000		430.665.400		51,20%		430.665.400		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			86.644.800		25.005.000		11.942.200		10.653.000		33.835.000		81.435.200		93,99%		81.435.200		
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			754.444.200		-		227.024.200		-		122.206.000		349.230.200		46,29%		349.230.200		

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab			
			7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4																				
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya																					
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0,00%	51,20%							
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Rendah							
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																					
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		361.226.598		40.792.836		18.285.798		118.538.178		155.159.355		332.776.167		92,12%				332.776.167			DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	Pengembangan Layanan Pengujian		325.296.198		22.875.836		18.285.798		101.478.178		154.279.355		296.919.167		91,28%				296.919.167			
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		35.930.400		17.917.000		-		17.060.000		880.000		35.857.000		99,80%				35.857.000			
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		35.930.400		17.917.000		-		17.060.000		880.000		35.857.000		99,80%				35.857.000			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0,00%	92,12%							
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																					
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		4.566.272.850		240.768.000		271.871.600		236.375.000		3.597.727.855		4.346.742.455		95,19%				4.346.742.455			DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		4.566.272.850		240.768.000		271.871.600		236.375.000		3.597.727.855		4.346.742.455		95,19%				4.346.742.455			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0,00%	95,19%							
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																					
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi RPIP yang dilaksanakan (Dokumen)	5	3.687.989.940	5	22.958.375	5	120.873.660	5	898.626.696	5	2.619.706.060	5	3.662.164.791	100,00%	99,30%	5,00		3.662.164.791			DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		205.975.640		-		-		94.894.500		107.976.500		202.871.000		98,49%				202.871.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		68.694.250		-		-		24.128.000		37.520.000		61.648.000		89,74%				61.648.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		3.318.378.544		12.956.375		85.657.660		766.067.596		2.438.590.560		3.303.272.191		99,54%				3.303.272.191			
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		94.941.506		10.002.000		35.216.000		13.536.600		35.619.000		94.373.600		99,40%				94.373.600			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														0,00%	99,30%							
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Tinggi							
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																					
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		21.368.100		-		-		21.368.100		-		21.368.100		100,00%				21.368.100			DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab						
					I		II		III		IV									12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	Facilities Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			21.368.100		-		-		21.368.100		-		21.368.100		100,00%		21.368.100	PERDAGANGAN						
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	100,00%					
			Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																									
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																									
	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis (Persen)	92	1.908.356.080		-	439.463.631		561.241.350		523.862.550		1.524.567.531	0,00%	79,89%	91,25	1.524.567.531	DINAS TRANSMIGRASI								
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		1.908.356.080		-	439.463.631		561.241.350		523.862.550		1.524.567.531		79,89%		1.524.567.531									
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Potensi Kawasan dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang Tersusun (Dokumen)	8	1.243.398.900	-	2	341.131.600	4	449.161.350	7	172.776.550	7	963.069.500	87,50%	77,45%	7,00	963.069.500								
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kesepakatan Satuan Lahan Permukiman dan Satuan Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang Tersusun dan Ditetapkan (Dokumen)	2	65.569.000	-	2	65.351.000	2	-	2	-	2	65.351.000	100,00%	99,67%	2,00	65.351.000								
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luasan Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Satuan Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Legalitas (Hektar)	2000	546.278.180	-	1.000	24.201.031	1.800	108.540.000	1.800	310.582.000	1.800	443.323.031	90,00%	81,15%	1800,00	443.323.031								
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Areal Transmigrasi dan Hak Pengelolaan Transmigrasi yang Tersusun (Dokumen)	6	53.110.000	1	2	8.780.000	6	3.540.000	6	40.504.000	6	52.824.000	100,00%	99,46%	6,00	52.824.000								
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																88,99%	79,89%					
			Predikat Kinerja																Tinggi	Tinggi					
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																									
	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya (Persen)	96	2.177.801.820		2.161.800		898.147.500		504.641.075		723.184.280		2.128.134.655	0,00%	97,72%	96,00	2.128.134.655	DINAS TRANSMIGRASI							
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2.177.801.820		2.161.800		898.147.500		504.641.075		723.184.280		2.128.134.655		97,72%		2.128.134.655								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen MoU Kerjasama antar Daerah dan Hasil Monitoring (Dokumen)	5	2.161.800	4	2.161.800	5	-	5	-	5	-	5	2.161.800	100,00%	100,00%	5,00	2.161.800							
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Persebaran Penduduk Pada Permukiman Transmigrasi (Dokumen)	276	328.010.000	120	276	326.271.600	276	-	276	-	276	326.271.600	100,00%	99,47%	276,00	326.271.600								
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Orang yang Memahami Program Transmigrasi yang Mendukung Pengembangan Wilayah (Orang)	275	318.808.160	50	200	231.690.000	275	85.977.600	275	-	275	317.667.600	100,00%	99,64%	275,00	317.667.600								
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditingkatkan Kompetensi Dasar dan Penunjang Usahanya (Orang)	300	1.528.821.860	-	100	340.185.900	200	418.663.475	300	723.184.280	300	1.482.033.655	100,00%	96,94%	300,00	1.482.033.655								
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	97,72%					
			Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI																									
	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (Persen)	66,67	5.242.603.520		-	931.301.702		1.950.733.520		2.106.586.490		4.988.621.712	0,00%	95,16%	50,00	4.988.621.712	DINAS TRANSMIGRASI								
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		5.242.603.520		-	931.301.702		1.950.733.520		2.106.586.490		4.988.621.712		95,16%		4.988.621.712									
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah SDM Transmigrasi yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Edukasi Formal dan Non Formal (Orang)	50	1.041.301.140	25	25	354.808.400	50	44.540.000	50	593.356.500	50	992.704.900	100,00%	95,33%	50,00	992.704.900								
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mendapatkan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (UPT)	21	4.201.302.380	-	7	576.493.302	18	1.906.193.520	21	1.513.229.990	21	3.995.916.812	100,00%	95,11%	21,00	3.995.916.812								
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	95,16%					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16									
SEKRETARIAT DAERAH												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	100	546.153.048	96.719.119		149.428.339		124.977.279		170.670.287	100	541.795.024	100,00%	99,20%	100,00	541.795.024	SEKRETARIAT DAERAH		
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian (Persen)	100	229.039.900	25	32.072.600	50	55.809.700	75	47.872.400	100	91.959.604	100	227.714.304	100,00%	99,42%	100,00	227.714.304	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Perekonomian (Dokumen)	5	127.022.400	1	16.502.600	-	12.610.600	-	31.732.400	-	65.436.204	1	126.281.804	20,00%	99,42%	1,00	126.281.804		
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Dalam Memperkuat Infrastruktur dan Peningkatan Akses Keuangan Daerah (Dokumen)	5	102.017.500	1	15.570.000	-	43.199.100	-	16.140.000	-	26.523.400	1	101.432.500	20,00%	99,43%	1,00	101.432.500		
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Persen)	100	70.333.100	25	13.668.800	50	10.035.100	75	22.765.600	100	23.824.800	100	70.294.300	100,00%	99,94%	100,00	70.294.300		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				-		-		-		-			-		0,00%					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pemantauan HET LPG (Dokumen)	4	70.333.100	1	13.668.800	-	10.035.100	-	22.765.600	-	23.824.800	1	70.294.300	25,00%	99,94%	1,00	70.294.300		
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>		Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD (Persen)	100	246.780.048	25	50.977.719	50	83.583.539	75	54.339.279	100	54.885.883	100	243.786.420	100,00%	98,79%	100,00	243.786.420		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Laporan)	4	55.510.515	1	14.968.050	-	23.804.180	-	6.715.100	-	7.592.883	1	53.080.213	25,00%	95,62%	1,00	53.080.213		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Laporan)	4	79.966.133	1	13.365.300	-	29.990.159	-	9.616.690	-	26.583.800	1	79.555.949	25,00%	99,49%	1,00	79.555.949		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Laporan)	4	111.303.400	1	22.644.369	-	29.789.200	-	38.007.489	-	20.709.200	1	111.150.258	25,00%	99,86%	1,00	111.150.258		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		22,90%		99,20%				
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi				
<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan (Persen)	100	239.234.950		100.007.350		62.572.850		26.902.200		45.143.200	100	234.625.600	100,00%	98,07%	100,00	234.625.600	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100	131.751.040	25	78.057.350	50	25.181.850	75	4.883.700	100	22.839.500	100	130.962.400	100,00%	99,40%	100,00	130.962.400	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan yang bersumber dari APBN (Laporan)	5	91.939.490	1	70.037.350	-	14.651.000	-	3.235.400	-	3.273.600	1	91.197.350	20,00%	99,19%	1,00	91.197.350		
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Wilayah di Kabupaten (Laporan)	5	39.811.550	1	8.020.000	-	10.530.850	-	1.648.300	-	19.565.900	1	39.765.050	20,00%	99,88%	1,00	39.765.050		
<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100	107.483.910	25	21.950.000	50	37.391.000	75	22.018.500	100	22.303.700	100	103.663.200	100,00%	96,45%	100,00	103.663.200		
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	5	107.483.910	1	21.950.000	-	37.391.000	-	22.018.500	-	22.303.700	1	103.663.200	20,00%	96,45%	1,00	103.663.200		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20,00%		98,07%				
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Tinggi				
<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+ (Persen)	66,67												0,00%		33,33	SEKRETARIAT DAERAH		
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 10 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP (Persen)	100	1.031.548.479		58.349.986		415.209.248		304.392.930		246.645.656		1.024.597.820	0,00%	99,33%	100,00	1.024.597.820	BIRO ORGANISASI	





No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			77.600.000		3.780.000		25.658.008		33.978.772		14.066.380		77.483.160		99,85%		77.483.160	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			158.307.218		20.579.964		58.960.000		46.591.400		27.867.200		153.998.564		97,28%		153.998.564	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			247.150.000		13.800.000		118.890.000		51.468.750		51.833.750		235.992.500		95,49%		235.992.500	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,65%	
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																		
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persen)	99,12	42.327.474.197		7.634.826.909		9.012.629.667		10.845.014.567		14.787.462.255		42.279.933.398	0,00%	99,89%	49,40	42.279.933.398	SEKRETARIAT DPRD
	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	Persentase PERDA dan Peraturan DPRD Yang Disahkan (Persen)	100	3.831.528.060	25	379.682.868	50	1.153.901.021	75	1.506.164.349	100	784.494.547	100	3.824.242.785	100,00%	99,81%	100,00	3.824.242.785	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	527.611.520	-	-	1	166.595.000	-	277.633.022	1	82.350.307	2	526.578.329	100,00%	99,80%	2,00	526.578.329	
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda (Dokumen)	8	2.469.598.800	3	358.479.324	3	557.471.471	2	875.878.577	2	676.665.610	10	2.468.494.982	125,00%	99,96%	10,00	2.468.494.982	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4	117.821.460	1	4.010.000	2	46.775.000	1	45.585.550	-	20.845.550	4	117.216.100	100,00%	99,49%	4,00	117.216.100	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	716.496.280	1	17.193.544	2	383.059.550	1	307.067.200	-	4.633.080	4	711.953.374	100,00%	99,37%	4,00	711.953.374	
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase Peningkatan Kebijakan Anggaran yang Selesai Dibahas (Persen)	100	3.794.977.800	-	-	10	219.448.112	35	1.423.702.340	100	2.149.627.821	100	3.792.778.273	100,00%	99,94%	100,00	3.792.778.273	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	103.020.000	-	-	-	-	2	-	-	103.020.000	2	103.020.000	100,00%	100,00%	2,00	103.020.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	96.201.200	-	-	-	-	2	-	-	96.201.200	2	96.201.200	100,00%	100,00%	2,00	96.201.200	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Laporan)	1	1.246.513.760	-	-	-	-	-	-	1	1.245.963.667	1	1.245.963.667	100,00%	99,96%	1,00	1.245.963.667	
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD (Dokumen)	1	1.017.505.880	-	-	-	-	1	718.214.480	-	298.427.200	1	1.016.641.680	100,00%	99,92%	1,00	1.016.641.680	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1.331.736.960	-	-	-	219.448.112	1	705.487.860	-	406.015.754	1	1.330.951.726	100,00%	99,94%	1,00	1.330.951.726	
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persen)	100	3.367.298.593	50	685.607.441	100	1.380.384.813	-	661.029.341	100	636.053.900	100	3.363.075.495	100,00%	99,87%	100,00	3.363.075.495	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	2	996.236.320	1	154.730.640	1	358.409.318	-	106.602.170	-	374.592.000	2	994.334.128	100,00%	99,81%	2,00	994.334.128	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	516.454.600	1	169.510.701	1	236.271.323	-	104.135.000	-	6.450.000	2	516.367.024	100,00%	99,98%	2,00	516.367.024	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	2	518.107.100	1	115.453.000	1	261.916.261	-	133.481.500	-	6.670.000	2	517.520.761	100,00%	99,89%	2,00	517.520.761	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	2	568.935.650	1	169.561.620	1	253.017.861	-	99.340.000	-	46.385.000	2	568.304.481	100,00%	99,89%	2,00	568.304.481	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	119.708.620	1	76.351.480	-	6.101.620	-	-	-	36.920.000	1	119.373.100	100,00%	99,72%	1,00	119.373.100	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2	168.583.183	-	-	1	4.421.000	-	-	1	163.911.900	2	168.332.900	100,00%	99,85%	2,00	168.332.900	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	479.273.120	-	-	-	260.247.430	1	217.470.671	-	1.125.000	1	478.843.101	100,00%	99,91%	1,00	478.843.101	
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Dalam TUPOKSI (Persen)	25	6.525.945.231	50	435.217.100	75	1.808.738.734	-	2.378.257.571	100	1.896.698.810	100	6.518.912.215	400,00%	99,89%	100,00	6.518.912.215	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan awal RKPD (Dokumen)	2	34.378.880	1	26.378.880	-	8.000.000	1	-	-	-	2	34.378.880	100,00%	100,00%	2,00	34.378.880	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	170.608.147	-	59.205.627	-	17.784.000	-	61.646.000	1	31.896.000	1	170.531.627	100,00%	99,96%	1,00	170.531.627	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	60.575.000	1	60.575.000	-	-	-	-	-	-	1	60.575.000	100,00%	100,00%	1,00	60.575.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	100.613.996	-	-	1	95.393.996	-	5.220.000	-	-	1	100.613.996	100,00%	100,00%	1,00	100.613.996	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	1	129.410.000	-	-	1	129.410.000	-	-	-	-	1	129.410.000	100,00%	100,00%	1,00	129.410.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	2	361.976.784	-	-	-	90.536.784	2	49.227.000	-	-	2	360.380.384	100,00%	99,56%	2,00	360.380.384	
		Jumlah Dokumen RPJPD Tahun 2025 - 2045 (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan (Persen)	100	12.525.000	-	-	-	3.600.000	-	8.925.000	-	-	-	12.525.000	0,00%	100,00%	0,00	12.525.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	42	12.525.000	-	-	-	3.600.000	-	8.925.000	-	-	-	12.525.000	0,00%	100,00%	0,00	12.525.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100	410.901.338	-	22.350.000	-	145.223.227	-	112.973.940	-	130.023.300	-	410.570.467	0,00%	99,92%	0,00	410.570.467	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	315.076.338	1	2.500.000	1	88.813.227	1	94.413.940	1	129.018.300	4	314.745.467	100,00%	99,89%	4,00	314.745.467	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	45.670.000	-	-	-	33.030.000	-	12.640.000	2	-	2	45.670.000	100,00%	100,00%	2,00	45.670.000	
	Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	6	50.155.000	1	19.850.000	4	23.380.000	1	5.920.000	-	1.005.000	6	50.155.000	100,00%	100,00%	6,00	50.155.000	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Persen)	100	55.089.000	-	3.050.000	-	33.564.000	-	18.360.000	-	-	-	54.974.000	0,00%	99,79%	0,00	54.974.000	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	55.089.000	-	3.050.000	-	33.564.000	-	18.360.000	-	-	-	54.974.000	0,00%	99,79%	0,00	54.974.000	
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
																	81,39%	99,84%	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD (Persen)	100	2.205.251.059		297.332.712		563.541.939		554.870.510		785.799.200	-	2.201.544.361	0,00%	99,83%	100,00	2.201.544.361	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap RPJMD (Persen)	100	607.988.459	-	137.793.120	-	192.844.579	-	109.616.010	-	167.044.400	-	607.298.109	0,00%	99,89%	0,00	607.298.109	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	8.745.000	-	-	-	-	-	8.745.000	1	-	1	8.745.000	100,00%	100,00%	1,00	8.745.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan (Perangkat Daerah )	15	5.205.000	15	1.790.000	-	-	-	1.340.000	-	2.075.000	15	5.205.000	100,00%	100,00%	15,00	5.205.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan (Perangkat Daerah)	15	48.603.080	-	-	-	8.453.000	15	20.627.000	-	19.510.000	15	48.590.000	100,00%	99,97%	15,00	48.590.000	

No	Programi/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7		8		9		10								
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4																	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	84.179.000	-	18.567.000	-	12.274.000	-	17.555.000	4	35.665.000	4	84.061.000	100,00%	99,86%	4,00	84.061.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	16.972.000	-	5.870.000	-	5.620.000	-	5.304.010	2	-	2	16.794.010	100,00%	98,95%	2,00	16.794.010	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah )	10	6.220.000	10	1.780.000	10	1.390.000	10	1.675.000	10	1.340.000	10	6.185.000	100,00%	99,44%	10,00	6.185.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Perangkat Daerah)	10	60.606.000	-	-	-	28.047.000	10	16.020.000	-	16.446.000	10	60.513.000	100,00%	99,85%	10,00	60.513.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	377.458.379	-	109.786.120	-	137.060.579	-	38.350.000	4	92.008.400	4	377.205.099	100,00%	99,93%	4,00	377.205.099	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terhadap RPJMD (Persen)	100	1.274.674.640	-	118.959.592	-	268.151.060	-	354.388.500	-	531.409.000	-	1.272.908.152	0,00%	99,86%	0,00	1.272.908.152	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	831.507.860	-	64.901.512	-	154.025.060	-	222.362.000	1	389.388.000	1	830.676.572	100,00%	99,90%	1,00	830.676.572	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah )	6	14.644.000	6	2.590.000	-	250.000	-	1.990.000	-	9.793.000	6	14.623.000	100,00%	99,86%	6,00	14.623.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah )	6	45.313.640	-	-	-	-	6	26.239.000	-	18.997.200	6	45.236.200	100,00%	99,83%	6,00	45.236.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	114.613.220	-	20.572.000	-	23.830.000	-	29.608.000	1	40.476.800	1	114.466.800	100,00%	99,89%	1,00	114.466.800	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	156.981.920	-	17.667.280	-	84.861.000	-	35.905.000	1	18.390.000	1	156.823.280	100,00%	99,90%	1,00	156.823.280	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah )	5	15.647.000	-	4.970.000	5	200.000	-	396.800	-	10.076.000	5	15.642.800	100,00%	99,97%	5,00	15.642.800	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah )	5	45.853.500	-	-	-	-	5	22.268.700	-	23.479.000	5	45.747.700	100,00%	99,77%	5,00	45.747.700	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	50.113.500	-	8.258.800	-	4.985.000	-	15.619.000	1	20.809.000	1	49.671.800	100,00%	99,12%	1,00	49.671.800	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap RPJMD (Persen)	100	322.587.960	-	40.580.000	-	102.546.300	-	90.866.000	-	87.345.800	-	321.338.100	0,00%	99,61%	0,00	321.338.100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	50.903.000	-	4.640.000	-	10.980.000	-	19.929.000	1	15.295.000	1	50.844.000	100,00%	99,88%	1,00	50.844.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah )	2	4.548.000	2	-	-	-	-	-	-	4.548.000	2	4.548.000	100,00%	100,00%	2,00	4.548.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	2	17.251.800	-	-	-	-	2	17.027.000	-	222.800	2	17.249.800	100,00%	99,99%	2,00	17.249.800		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	4.082.800	-	-	-	2.510.000	-	1.175.000	1	316.800	1	4.001.800	100,00%	98,02%	1,00	4.001.800		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	183.116.160	-	29.380.000	-	88.051.300	-	28.125.000	2	37.111.000	2	182.667.300	100,00%	99,75%	2,00	182.667.300		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	4	8.290.000	4	-	-	-	-	4.655.000	-	3.620.000	4	8.275.000	100,00%	99,82%	4,00	8.275.000		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (Perangkat Daerah)	4	40.514.400	-	-	-	-	4	16.300.000	-	23.571.400	4	39.871.400	100,00%	98,41%	4,00	39.871.400		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	13.881.800	-	6.560.000	-	1.005.000	-	3.655.000	2	2.660.800	2	13.880.800	100,00%	99,99%	2,00	13.880.800		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>														100,00%	99,83%					
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
<b>KEUANGAN</b>																				
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>																				
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)		100	237.805.916.406		49.936.079.983		62.859.986.282		52.953.049.038		61.606.689.726		227.355.805.029	0,00%	95,61%	100,00	227.355.805.029	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase Ketepatan Waktu Penahapan Penyusunan APBD (Persen)	95	1.209.710.518	-	190.876.071	-	276.616.650	-	248.226.660	-	473.362.784	-	1.189.082.165	0,00%	98,29%	0,00	1.189.082.165		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	81.190.500	-	5.721.779	-	34.494.210	2	30.713.150	2	10.260.580	2	81.189.719	100,00%	100,00%	2,00	81.189.719		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	35.124.900	-	-	-	-	2	19.810.540	2	15.313.900	2	35.124.440	100,00%	100,00%	2,00	35.124.440		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42	2.827.209	-	-	-	-	-	-	-	42	2.824.250	42	2.824.250	100,00%	99,90%	42,00		2.824.250
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42	9.042.596	-	-	-	-	-	-	-	42	9.040.500	42	9.040.500	100,00%	99,98%	42,00		9.040.500
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	42	4.053.023	42	4.052.050	42	-	42	-	-	42	4.052.050	100,00%	99,98%	42,00	4.052.050			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (OPD)	42	2.553.023	-	-	-	-	-	-	-	42	2.552.050	42	2.552.050	100,00%	99,96%	42,00		2.552.050
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	248.172.017	-	17.547.736	-	17.907.500	-	58.368.860	2	152.286.090	2	246.110.186	100,00%	99,17%	2,00	246.110.186		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	135.233.400	-	-	-	-	-	2.661.000	2	132.571.524	2	135.232.524	100,00%	100,00%	2,00	135.232.524		
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	117.874.510	-	16.545.388	-	85.256.090	-	6.112.160	1	9.840.000	1	117.753.638	100,00%	99,90%	1,00	117.753.638		
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2	64.127.720	-	16.769.550	1	8.599.300	2	5.848.500	2	16.687.500	2	47.904.850	100,00%	74,70%	2,00	47.904.850		
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	49.974.270	-	17.800.918	1	14.845.550	2	16.776.900	2	550.000	2	49.973.368	100,00%	100,00%	2,00	49.973.368		
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	31.067.900	-	6.389.100	-	9.615.100	-	2.200.000	2	12.843.260	2	31.047.460	100,00%	99,93%	2,00	31.047.460		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					7		8		9		10								
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4																	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	120	428.469.450	-	106.049.550	120	105.898.900	120	105.735.550	120	108.593.130	120	426.277.130	100,00%	99,49%	120,00	426.277.130	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepatuhan Kabupaten terhadap rekomendasi hasil evaluasi (Persen)	97	287.287.150	-	4.912.500	-	31.413.300	-	42.874.760	-	207.386.000	-	286.586.560	0,00%	99,76%	0,00	286.586.560	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi (Produk Hukum)	12	122.867.000	-	4.912.500	-	7.206.250	-	21.482.500	12	88.566.000	12	122.167.250	100,00%	99,43%	12,00	122.167.250	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	12	66.390.000	-	-	-	-	-	7.070.000	12	59.320.000	12	66.390.000	100,00%	100,00%	12,00	66.390.000	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	12	58.475.000	-	-	-	5.110.000	12	3.565.000	12	49.800.000	12	58.475.000	100,00%	100,00%	12,00	58.475.000	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi (Dokumen)	12	2.609.350	3	-	6	1.304.250	9	1.305.100	12	-	12	2.609.350	100,00%	100,00%	12,00	2.609.350	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (Laporan)	1	10.534.300	1	-	1	10.534.300	1	-	1	-	1	10.534.300	100,00%	100,00%	1,00	10.534.300	
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30	26.411.500	-	-	-	7.258.500	30	9.452.160	30	9.700.000	30	26.410.660	100,00%	100,00%	30,00	26.410.660	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD (Persen)	93	800.080.425	-	142.145.050	-	196.932.110	-	132.098.850	-	311.515.100	-	782.691.110	0,00%	97,83%	0,00	782.691.110	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	127.242.039	2	22.080.950	6	26.691.850	9	30.539.800	12	46.662.100	12	125.974.700	100,00%	99,00%	12,00	125.974.700	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	12	8.588.500	2	30.000	5	3.537.800	9	2.945.000	12	2.065.000	12	8.577.800	100,00%	99,88%	12,00	8.577.800	
	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	152	20.108.000	200	403.650	200	8.108.500	200	2.199.300	200	8.842.850	200	19.554.300	131,58%	97,25%	200,00	19.554.300	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12	17.070.000	2	2.390.000	6	430.000	9	2.540.000	12	11.709.800	12	17.069.800	100,00%	100,00%	12,00	17.069.800	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4	192.520.160	1	32.977.650	2	20.502.450	3	35.116.500	4	93.920.200	4	182.516.800	100,00%	94,80%	4,00	182.516.800	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	4	37.989.150	1	528.600	2	14.851.550	3	3.206.200	4	19.085.150	4	37.671.500	100,00%	99,16%	4,00	37.671.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	72.759.300	2	19.013.950	6	39.380.400	10	5.580.600	12	8.282.400	12	72.257.350	100,00%	99,31%	12,00	72.257.350	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	4	16.165.003	1	2.570.000	2	288.000	3	10.156.000	4	2.606.000	4	15.620.000	100,00%	96,63%	4,00	15.620.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	4	285.717.866	2	57.533.800	6	76.166.560	10	35.057.550	12	112.964.100	12	281.722.010	300,00%	98,60%	12,00	281.722.010	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	7.712.407	-	1.366.450	-	3.069.000	-	1.475.900	1	1.778.500	1	7.689.850	100,00%	99,71%	1,00	7.689.850	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	14.208.000	-	3.250.000	50	3.906.000	50	3.282.000	100	3.599.000	100	14.037.000	100,00%	98,80%	100,00	14.037.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Persen)	100	764.315.088	-	110.687.725	-	234.193.586	-	117.967.177	-	260.239.950	-	723.088.438	0,00%	94,61%	0,00	723.088.438	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	53.170.599	3	9.922.800	6	10.297.050	9	5.108.800	12	27.778.400	12	53.107.050	100,00%	99,88%	12,00	53.107.050	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	516	181.986.750	70	32.515.600	182	40.430.850	294	38.995.450	516	66.701.950	516	178.643.850	100,00%	98,16%	516,00	178.643.850
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18	49.052.236	4	5.068.700	9	25.501.736	13	5.425.900	18	13.038.600	18	49.034.936	100,00%	99,96%	18,00	49.034.936
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	100.765.825	-	40.625.625	1	50.341.400	1	748.800	1	8.640.000	1	100.355.825	100,00%	99,59%	1,00	100.355.825
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2	138.067.685	-	-	1	58.878.000	1	31.164.727	2	48.024.900	2	138.067.627	100,00%	100,00%	2,00	138.067.627
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindaklanjuti terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	10.265.092	-	-	-	-	1	9.113.050	1	1.123.700	1	10.236.750	100,00%	99,72%	1,00	10.236.750
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	4	193.462.400	-	17.426.800	-	30.288.100	-	18.748.900	4	89.952.650	4	156.416.450	100,00%	80,85%	4,00	156.416.450
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	15.278.792	-	-	-	8.333.500	-	3.092.200	1	3.853.050	1	15.278.750	100,00%	100,00%	1,00	15.278.750
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Peserta)	50	13.254.917	25	5.128.200	25	5.233.650	50	2.724.800	50	-	50	13.086.650	100,00%	98,73%	50,00	13.086.650
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	1	9.010.792	1	-	1	4.889.300	1	2.844.550	1	1.126.700	1	8.860.550	100,00%	98,33%	1,00	8.860.550
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	96	234.263.276.309	-	49.400.831.731	-	61.954.284.386	-	52.318.399.541	-	60.221.288.692	-	223.894.804.350	0,00%	95,57%	0,00	223.894.804.350
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	18.432.685.502	1	5.117.587.293	1	4.986.740.408	1	4.455.822.847	1	3.872.534.954	1	18.432.685.502	100,00%	100,00%	1,00	18.432.685.502
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	12.935.025.000	-	-	1	287.500.000	1	1.600.000.000	1	6.320.000.000	1	8.207.500.000	100,00%	63,45%	1,00	8.207.500.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	5.990.269.459	-	-	-	-	-	-	1	349.322.500	1	349.322.500	100,00%	5,83%	1,00	349.322.500
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	4	196.905.296.348	1	44.283.244.438	2	56.680.043.978	3	46.262.576.694	4	49.679.431.238	4	196.905.296.348	100,00%	100,00%	4,00	196.905.296.348
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Menggunakan SIFD (Persen)	80	481.246.916	-	86.626.906	-	166.546.250	-	93.482.050	-	132.897.200	-	479.552.406	0,00%	99,65%	0,00	479.552.406
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	2	145.789.140	1	30.129.900	1	57.998.600	1	13.146.950	2	43.846.900	2	145.122.350	100,00%	99,54%	2,00	145.122.350
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	200	335.457.776	75	56.497.006	273	108.547.650	273	80.335.100	273	89.050.300	273	334.430.056	136,50%	99,69%	273,00	334.430.056
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,29%	95,61%		
														<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>																	
		Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD (Persen)	100	641.340.747		85.173.903		191.328.660		179.562.710		143.937.758		600.003.031	0,00%	93,55%	100,00	600.003.031
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase Tindaklanjuti Penyelesaian Masalah BMD (Persen)	45	641.340.747	-	85.173.903	-	191.328.660	-	179.562.710	-	143.937.758	-	600.003.031	0,00%	93,55%	0,00	600.003.031
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	89.112.430	-	22.069.000	-	46.276.350	-	20.100.180	1	-	1	88.445.530	100,00%	99,25%	1,00	88.445.530
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	5.602.365	-	-	-	5.598.950	1	-	1	-	1	5.598.950	100,00%	99,94%	1,00	5.598.950





No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	12	2.027.358.199	178.883.552	528.701.137	1.197.700.595	111.775.124	-	2.017.060.408	0,00%	99,49%	11,00	2.017.060.408	<b>BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	235	1.546.542.198	15	151.918.000	212	302.114.037	235	983.997.033	235	98.693.424	235	1.536.722.494			100,00%	99,37%	235,00	1.536.722.494
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis (Orang)	235	1.546.542.198	15	151.918.000	212	302.114.037	235	983.997.033	235	98.693.424	235	1.536.722.494			100,00%	99,37%	235,00	1.536.722.494
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional (Orang)	40	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			100,00%	99,90%	40,00	480.337.914
		Jumlah Akreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi (Sertifikat)	1	480.816.001	1	26.965.552	1	226.587.100	1	213.703.562	1	13.081.700	1	480.337.914			100,00%	100,00%	1,00	480.337.914
		Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi (Orang)	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00%	0,00%	0,00	-
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	1	223.049.460	-	26.965.552	-	150.732.121	1	32.563.046	1	12.532.500	1	222.793.219			100,00%	99,88%	1,00	222.793.219
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (Dokumen)	5	9.350.000	1	-	4	-	5	9.350.000	5	-	5	9.350.000			100,00%	100,00%	5,00	9.350.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Orang)	40	248.416.541	-	-	40	75.854.979	40	171.790.516	40	549.200	40	248.194.695			100,00%	99,91%	40,00	248.194.695
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												100,00%		99,49%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi						
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				1.132.222.501	9.090.000	99.790.392	384.847.109	606.619.275		1.100.346.776	97,18%			1.100.346.776	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH</b>					
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>			529.227.487	9.090.000	23.420.150	226.063.765	247.495.890	506.069.805	95,62%	506.069.805				506.069.805						
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			48.500.513	-	-	-	-	46.905.098	96,71%	46.905.098				46.905.098						
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dijadikan bahan kebijakan (Dokumen)	1	300.034.000	9.090.000	23.420.150	142.159.415	106.201.542	93,61%	280.871.107	100,00%	93,61%	1,00	280.871.107						
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dijadikan bahan kebijakan (dokumen)	1	180.692.974	-	-	-	83.904.350	98,67%	178.293.600	100,00%	98,67%	1,00	178.293.600						
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			150.000.000	-	61.158.750	13.927.348	71.435.100	146.521.198	97,68%	146.521.198				146.521.198						
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang dijadikan bahan kebijakan (dokumen)	1	150.000.000	-	61.158.750	13.927.348	71.435.100	97,68%	146.521.198	100,00%	97,68%	1,00	146.521.198						
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan</b>			133.893.506	-	-	10.265.680	121.972.840	132.238.520	98,76%	132.238.520				132.238.520						
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen bidang penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang dijadikan bahan kebijakan (Dokumen)	1	133.893.506	-	-	10.265.680	121.972.840	98,76%	132.238.520	100,00%	98,76%	1,00	132.238.520						
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			319.101.508	-	15.211.492	134.590.316	165.715.445	315.517.253	98,88%	315.517.253				315.517.253						
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi			309.255.016	-	5.365.000	134.590.316	165.715.445	305.670.761	98,84%	305.670.761				305.670.761						
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Terbitan (Kali)	1	9.846.492	-	1	9.846.492	-	9,846	9,846	100,00%	100,00%	1,00	9.846.492						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												68,40%		97,18%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sedang		Sangat Tinggi						

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV									
					7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12								16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>																				
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>																		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				2.176.261.084	922.444.629	549.089.806	319.602.856	253.898.519			2.045.035.810		93,97%			2.045.035.810			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				343.428.000	187.800.000	153.600.000	-	-			341.400.000		99,41%			341.400.000			
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				423.630.000	294.815.074	-	-	-			294.815.074		69,59%			294.815.074			
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya				223.625.000	35.175.000	45.450.000	72.765.000	70.075.000			223.465.000		99,93%			223.465.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1.185.578.084	404.654.555	350.039.806	246.837.856	183.823.519			1.185.355.736		99,98%			1.185.355.736			
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	93,97%			
															<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>																		INSPEKTORAT DAERAH	
	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)				3	4.026.197.670	500.378.000	1.123.698.891	936.166.669	1.463.063.793		4.023.307.353	0,00%	99,93%	3,00	4.023.307.353				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				349	2.748.852.030	49	368.825.000	100	775.057.192	100	706.095.524	100	896.993.393	349	2.746.971.109	100,00%	99,93%		349,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					1.115.428.480	219.275.000	246.780.072	256.529.000	392.625.400		1.115.209.472		99,98%			1.115.209.472			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					699.859.800	-	280.882.760	195.762.188	223.102.280		699.747.228		99,98%			699.747.228			
	Revisi Laporan Kinerja					361.617.950	70.760.000	101.364.360	76.320.000	113.147.950		361.592.310		99,99%			361.592.310			
	Revisi Laporan Keuangan					139.869.200	31.490.000	92.280.000	479.200	15.410.000		139.659.200		99,85%			139.659.200			
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota					69.915.800	-	-	26.800.336	43.275.000		69.875.336		99,94%			69.875.336			
	Kerjasama Pengawasan Internal					-	-	-	-	-		-		0,00%		-				
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					362.161.000	47.300.000	53.750.000	150.404.800	109.432.763		360.887.563		99,65%			360.887.563			
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100	1.277.345.640	25	131.553.000	50	348.641.699	75	230.071.145	100	566.070.400	100	1.276.336.244	100,00%	99,92%		100,00
	Pengamanan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					32.698.000	-	-	14.070.000	18.428.000		32.498.000		99,39%			32.498.000			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.244.647.640	131.553.000	348.641.699	216.001.145	547.642.400		1.243.838.244		99,93%			1.243.838.244			
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	99,93%			
															<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>																			INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti (Persen)				100	1.199.883.160	59.968.392	263.343.152	204.070.945	669.934.220		1.197.316.709	0,00%	99,79%	100,00	1.197.316.709				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				2	314.599.000	-	-	1	6.695.000	1	307.384.860	2	314.079.860	100,00%	99,83%	2,00	314.079.860		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					279.299.000	-	-	-	278.811.460		278.811.460		99,83%			278.811.460			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan					35.300.000	-	-	6.695.000	28.573.400		35.268.400		99,91%			35.268.400			
	Pendampingan dan Asistensi				100	885.284.160	25	59.968.392	50	263.343.152	75	197.375.945	100	362.549.360	100	883.236.849	100,00%	99,77%	100,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	-	-	-		-		0,00%		-				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					45.260.000	21.340.000	9.280.000	-	14.598.500		45.218.500		99,91%			45.218.500			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					726.320.840	27.928.392	243.453.152	197.375.945	255.976.080		724.733.569		99,78%			724.733.569			
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					113.703.320	10.700.000	10.610.000	-	91.974.780		113.284.780		99,63%			113.284.780			
															<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	0,00%	99,79%			
															<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																			
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persen)	98	547.782.355	25.087.893	196.625.525	191.524.000	76.497.500	-	489.734.918	0,00%	89,40%	97,00	489.734.918	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			547.782.355	25.087.893	196.625.525	191.524.000	76.497.500		489.734.918		89,40%		489.734.918					
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			430.045.780	-	169.326.000	181.624.000	31.126.000		382.076.000		88,85%		382.076.000					
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			117.736.575	25.087.893	27.299.525	9.900.000	45.371.500		107.658.918		91,44%		107.658.918					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	89,40%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Tinggi						
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (Persen)	97	2.778.167.707	96.992.500	54.488.800	1.527.613.300	898.963.195	-	2.578.057.795	0,00%	92,80%	94,00	2.578.057.795	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			2.778.167.707	96.992.500	54.488.800	1.527.613.300	898.963.195		2.578.057.795		92,80%		2.578.057.795					
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			494.100.000	53.970.000	-	187.516.500	178.656.507		420.143.007		85,03%		420.143.007					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.641.787.747	-	8.603.800	1.313.101.800	279.955.488		1.601.661.088		97,56%		1.601.661.088					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			355.134.580	-	32.460.000	8.820.000	244.325.800		285.605.800		80,42%		285.605.800					
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			287.145.380	43.022.500	13.425.000	18.175.000	196.025.400		270.647.900		94,25%		270.647.900					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0,00%	92,80%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Persen)	97	430.194.400	209.572.400	1.850.000	-	215.767.600	-	427.190.000	0,00%	99,30%	94,00	427.190.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			430.194.400	209.572.400	1.850.000	-	215.767.600	-	427.190.000		99,30%		427.190.000					
	Penyusunan Program Kerja Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			63.041.500	62.902.000	-	-	-		62.902.000		99,78%		62.902.000					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV								
					8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16							
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16								
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Diband Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		367.152.900	146.670.400	1.850.000	-	215.767.600	364.288.000	99,22%	364.288.000									
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		-	-	-	-	-	-	0,00%	-									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	99,30%								
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	97	320.832.985	-	-	213.628.120	99.312.000	312.940.120	0,00%	97,54%	94,00	312.940.120					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		320.832.985	-	-	213.628.120	99.312.000	312.940.120	97,54%	312.940.120									
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kerneravaan di Daerah		-	-	-	-	-	-	0,00%	-									
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kerneravaan di Daerah		320.832.985	-	-	213.628.120	99.312.000	312.940.120	97,54%	312.940.120									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	97,54%								
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		3.808.562.202	-	1.519.411.170	1.393.019.300	853.217.430	3.765.647.900	98,87%	3.765.647.900								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		3.808.562.202	-	1.519.411.170	1.393.019.300	853.217.430	3.765.647.900	98,87%	3.765.647.900									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		260.285.262	-	190.966.170	11.640.000	56.274.930	258.881.100	99,46%	258.881.100									
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		295.508.480	-	28.445.000	114.189.000	139.509.800	282.143.800	95,48%	282.143.800									
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		33.360.760	-	-	31.652.800	1.700.000	33.352.800	99,98%	33.352.800									
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		3.219.407.700	-	1.300.000.000	1.235.537.500	655.732.700	3.191.270.200	99,13%	3.191.270.200									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	98,87%								
									Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
			<b>2.103.379.795.985</b>			<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>			<b>96,96%</b>	<b>96,41%</b>									
						<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>			<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>									

---

Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023

1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1. Bidang Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Permasalahan

- 1) Jumlah Anak Tidak Bersekolah masih sangat Tinggi di Sulawesi Barat;
- 2) Alokasi Anggaran Pendidikan belum maksimal mendukung Proses Perencanaan berbasis data khusus urusan pendidikan yg mana harus berdasarkan hasil assemen pada Rapor Pendidikan, terutama pada Peningkatan Literasi, Numerasi Siswa SMA/SMK/SLB sehingga Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan dasar pendidikan pada sasaran peserta didik yang di tandai dengan kualitas Siswa yan belum berdayasaing pada ajang lomba2 tingkat nasional;
- 3) Pemenuhan PTK belum terdistribusi secara merata

b. Beberapa Hal teknis yang menjadi faktor penghambat:

- 1) Evaluasi terhadap kurikulum belum terlaksana secara kompherensip dan berkelanjutan, karena hanya sebatas formalitas oleh pengawas, sedangkan dari manajemen dinas belum melakukan hal tersebut secara khusus;
- 2) Dukungan terhadap Pembinaan Bakat peserta didik, Tryout peserta lomba tingkat provinsi dan Nasional masih sangat rendah Misalnya: Penyediaan tenaga ahli sebagai pendamping siswa peserta lomba Tk. Nasional sangat terbatas dan hanya formalitas dikarena keterbatasan anggaran;
- 3) Partisipasi Siswa SLB dan proses pembelajaran sangat rendah dikarenakan akses dan mobilisasi ABK dari rumah ke satuan pendidikan masih belum terpenuhi

c. Capaian

- 1) Pemerintah sudah melaksanakan beberapa program yang menangani khusus masalah ATS, melalui sisialisasi, pendataan, rekonfirmasi data dan penanganan lainnya;
- 2) Hampir semua sarana ruang dan peralatan pd satuan pendidikan SLB sdh di siapkan secara maksimal

1.2. Bidang Urusan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

a. Permasalahan

- 1) Target untuk peningkatan kelas RS tidak tercapai karena Beberapa indikator yang masih perlu dilengkapi terutam sub spesialis dan sarana (Bank Darah RS/BDRS), dan pertimbangan kebijakan kementerian kesehatan masih menerapkan rujukan berjenjang;
- 2) Survey Kepuasan Masyarakat/pelanggan (IGD, Rawat jalan dan Rawat Inap) tidak memenuhi standar karena disebabkan Waktu Pelayanan, Alu/prosedur pelayanan, Kompetensi dan Perilaku pelaksana, saranaprasanya yang kurang memadai;
- 3) Indikator Pelayanan rawat Jalan/inap (waktu tunggu, jumlah kunjungan, BOR, TOI dan BTO) tidak memenuhi standar/tidak tercapai karena adanya pembatasan kunjungan pasien selama covid, dan jadwal poliklinik yang belum buka tiap hari, kurang pemakaian tempat tidur selama Covid, karena menurunnya rujukan kasus dari Fasilitas Tingkat

- Pertama (Puskesmas dan klinik), saranaprasarana kurang memadai pasca gempa, dan Covid, keluhan tentang ketersediaan obat, promosi RS masih minim;
- 4) Realisasi penyerapan anggaran masih rendah karena terlambatnya proses pengadaan barjas, persoalan mekanisme pengadaan barjas, menumpuk penyerapan anggaran akhir tahun
- b. Capaian
- 1) Capaian Akreditasi tahun 2019 s/d sekarang 2022 adalah Tingkat Utama;
  - 2) Kelas RSUD Provinsi Sulawesi Barat masih berstatus Kelas C;
  - 3) IGD = 67,01 %, Rawat Jalan= 84,31% Rawat Inap = 85,92%;
  - 4) Hasil Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik RSUD Provinsi Sulawesi barat dengan nilai 2,66 /C (cukup);
  - 5) Waktu Tunggu = 158,9 Menit, Jumlah Kunjungan perhari = 115, BOR= 43%, TOI=5hari dan BTO = 18 kali;
  - 6) Capaian Realisasi per 31 Des 2023 = 96,87 %
- 1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Permasalahan
- 1) Keterlambatan pekerjaan Gedung tambahan Dinas PUPR yang diperuntukan Kantor UPTD wilayah sungai;
  - 2) Beberapa Pekerjaan Jalan terhambat akibat Cuaca buruk, bencana alam longsor, peralatan dan tenaga kerja kurang memadai;
  - 3) Tahapan Penerapan SPM Air Minum dan Sanitasi Belum dilakukan;
  - 4) Proses antri pembuatan aplikasi (SIMTARU) pada Dinas Kominfo sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal (proses pembuatan dilakukan pada APDP sehingga terlambat);
  - 5) Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi, terkendala terkait penyusunan RZWP3K oleh dinas Kelutan sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana (rapat -rapat koordinasi yang tidak terlaksana)".
- b. Capaian
- 1) Pada akhir pekerjaan hanya mencapai 47,58% yang dapat dilaksanakan hingga akhir tahun sehingga dilakukan pemutusan kontrak;
  - 2) Kegiatan terlaksana 100% walaupun pada kegiatan tidak terbayarkan sepenuhnya karena terkendala sertifikat;
  - 3) Sudah melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan PKS Spam Regional Polman-Majene;
  - 4) pekerjaan terselesaikan hanya 80,52 %;
  - 5) pekerjaan selesai baru 60%;
  - 6) Dari target 22.63 Km yang tercapai hanya 22.04 km sehingga tingkat capaian jalan kondisi mantap yang terbangun tahun ini sebesar 97,39%;
  - 7) Dari target 126 meter jembatan terbangun, hanya mencapai 108 meter yang terlaksana sehingga tingkat capai 85,71 %;
  - 8) capaian fisik mencapai 88,36%;

- 9) Program Website Sistem Informasi tata Ruang (SIMTARU) sudah selesai dibuat untuk selanjutnya dilengkapi data yang diperlukan.
- 1.4. Bidang Urusan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat
    - a. Permasalahan
      - 1) Banyaknya Paket Program PSU Yang gagal Tender di Barjas karena vendor tidak memenuhi persyaratan;
      - 2) Masih banyak rumah korban bencana yang belum direlokasi;
      - 3) Masih Banyak RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi;
      - 4) Belum adanya data valid terkait RTLH di Kawasan kumuh 10 sampai 15 Ha dari Kabupaten
    - b. Capaian
      - 1) Sudah terlaksananya paket program PSU Sebanyak 9 Pembangunan Dreinase, 11 Pembangunan Rabat Beton dan 3 Pembangunan sarana Air Bersih di Kab. Polman, sebanyak 23 Pembangunan Dreinase, 24 Pembangunan Rabat Beton dan 2 Pembangunan Saran Air Bersih di Kab. Mamuju, Sebanyak 3 Pembangunan Rabat Beton, 7 Pembangunan Sarana Air bersih dan 1 Pembangunan Dreinase Kab. Majene, Sebanyak 9 Pembangunan Dreinase;
      - 2) Pembangunan Sarana Air Bersih, dan 3 Pembangunan Rabat Beton di Kab. Mamasa, Sebanyak 10 Pembangunan Rabat Beton, 2 Pembangunan Sarana Air Bersih dan 3 Pembangunan Drainase di Kab. Pasangkayu, Sebanyak 3 Pembangunan Sarana Air Bersih Di Kabupaten Mamuju Tengah;
      - 3) Sudah membangun 24 Unit Rumah di Ulimanda dan Merehabilitasi 37 Unit di Sese;
      - 4) Sudah Menyentuh PSU di Kawasan Permukiman Kumuh;
      - 5) SK Kumuh Sudah ada.
  - 1.5. Bidang Urusan Pertanahan
    - a. Permasalahan
      - 1) Tahapan penilaian harga tanah yang terlambat sehingga Pembebasan Lahan Basarnas tidak selesai;
      - 2) Tidak ada kesepakatan harga tanah dengan Pemilik Lahan Akses Terminal Type B dan MARR II.
    - b. Capaian
      - 1) Tahapan penilaian harga tanah yang terlambat sehingga Pembebasan Lahan Basarnas tidak selesai;
      - 2) Tidak ada kesepakatan harga tanah dengan Pemilik Lahan Akses Terminal Type B dan MARR II.
  - 1.6. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 1.6.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
      - a. Permasalahan
        - 1) Penyelesaian dokumen Kebencanaan sampai dinyatakan Sah dan legal mulai Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Kedaruratan Bencana masih

- belum dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap semua aspek menyangkut penanggulangan bencana;
- 2) SK. Gubernur perihal: Tim Reaksi Cepat belum ada yang berakibat pada pelaksanaan respon cepat terhadap bencana tidak maksimal saat ini TRC hanya sebatas pada sektor OPD Bencana saja;
  - 3) Fasilitasi Kegiatan Respon cepat dan bantuan logistik pada daerah - daerah yang terkena bencana tidak maksimal, dikarenakan minimnya anggaran sehingga tidak semua area yang terkena bencana dapat difasilitasi termasuk pengadaan gudang logistic.
- b. Capaian
- 1) Capaian Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baru mencapai 97,22% dari target 100%
- 1.6.2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- a. Permasalahan
- 1) Kurangnya Pengetahuan anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar dalam meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 2) Rendahnya pemahaman aparatur/ masyarakat tentang PERDA/PERKADA;
  - 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung.
- b. Capaian
- 1) Pelaksanaan Bimtek Peningkatan kapasitas building Satpol PP dalam Pelaksanaan Tupoksi dan Jiwa korsa Aparatur Satpol PP Sebanyak 70 Peserta, dan Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Peran dan Kapasitas Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan kinerja Polisi Pamong Praja yang berdaya guna sebanyak 70 Peserta;
  - 2) Pelaksanaan Sosialisasi PERKADA tentang Tabung Gas LPG 3 kilo di Kab. Mamasa dan PERKADA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penerimaan Pajak Rokok;
  - 3) Pencapaian SPM TibunTranmas 62 %.
- 1.7. Bidang Urusan Pekerjaan Sosial
- a. Permasalahan
- 1) Masih rendahnya tingkat Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta belum optimalnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - 2) Belum tercapainya indikator Persentase Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Provinsi belum maksimalnya pemutakhiran DTKS tingkat Pemerintah Desa sehingga dimungkinkan ada masyarakat yang seharusnya masuk sebagai penerima bantuan sosial tidak tercover;
  - 3) Belum maksimalnya Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) disebabkan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki panti rehabilitas sosial bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar (ANTAR), Lanjut Usia (Lansia), Gelandangan dan pengemis (GEPENG), (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA.
- b. Capaian
- 1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Barat masih sebatas respon kasus serta pemberian bantuan sosial sebagai bentuk

perlindungan dan jaminan sosial dengan dukungan Penguatan peran PSKS;

- 2) Capaian sebesar 58,21 % dari target 60% secara angka artinya data masyarakat miskin yang perlu diberikan bantuan semakin sedikit, tapi capaian bisa diakibatkan akibat pengelolaan DTKS yang tidak optimal di desa;
- 3) Data capaian Rehabilitasi Sosial bagi (PPKS) yaitu Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar (ANTAR), Lanjut Usia (Lansia), Gelandangan dan pengemis (GEPENG), (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA belum dapat mencapai target renstra tahun 2022.

## 2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### 2.1. Bidang Urusan Kebudayaan

#### a. Permasalahan

- 1) Belum maksimalnya pendataan terkait kebudayaan dan cagar budaya serta Pemanfaatan DAPOBUD di Sulawesi Barat. Serta kesadaran dan kepedualian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya dan cagar budaya;
- 2) Kendala internal di dalam dinas, yaitu cepatnya perputaran pegawai. Hal ini menyebabkan hilangnya data, sehingga menyulitkan dalam proses pendaftaran. Jika data hilang maka proses pendaftaran dimulai dari awal lagi, yaitu pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan sebagainya. Tentunya proses pencatatan cagar budaya diperlukan waktu untuk menyelesaikannya hingga siap untuk didaftarkan;
- 3) Pemenuhan PTK belum terdistribusi secara merata;
- 4) Sangat kurang SDM Guru dan pengelola seni dan kebudayaan secara khusus sehingga sangat terbatas dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
- 5) Kendala internal di dalam dinas, yaitu cepatnya perputaran pegawai. Hal ini menyebabkan hilangnya data, sehingga menyulitkan dalam proses pendaftaran. Jika data hilang maka proses pendaftaran dimulai dari awal lagi, yaitu pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan sebagainya. Tentunya proses pencatatan cagar budaya diperlukan waktu untuk menyelesaikannya hingga siap untuk didaftarkan.

#### b. Capaian

- 1) Melakukan Pendataan Seni dan Kebudayaan berbasis IT. Dengan pengadaan Server dan Pengadaan SDM pengelola data kebudayaan;
- 2) Melaksanakan edukasi kebudayaan melalui even2 kebudayaan baik di sekolah maupun di masyarakat secara umum.

### 2.2. Bidang Urusan Tenaga Kerja

#### a. Permasalahan

- 1) Peningkatan produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan.

#### b. Capaian

- 1) Belum adanya kantor tetap UPTDBLK. Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pelaksana teknis pelatihan kompetensi tenaga kerja dan mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 2.3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
- a. Permasalahan
    - 1) Capaian Rehabilitasi Lahan pada Tahun 2022 sebesar 35 Ha sehingga total rehabilitasi lahan sampai dengan tahun 2022 sebesar 147,9 Ha;
    - 2) Walaupun Capaian Indeks Kualitas Air (56,41) telah melampaui target (55-75) tetapi masih tergolong kategori Cukup Baik.
  - b. Capaian
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dari target 2017-2022 sebesar 292,21 Ha dan hanya terealisasi 147,9 Ha, ini disebabkan karena keterbatasan Anggaran yang di alokasikan setiap tahunnya pada kegiatan tersebut;
    - 2) Permasalahan Indeks kualitas Air yang masih rendah dikarenakan tingginya Parameter E-Coli yang disebabkan oleh Kotoran Ternak dan Manusia yang langsung dibuang ke badan Sungai, Tingginya Parameter TSS yang disebabkan oleh terjadi Kerusakan Lahan dibagian hulu sungai.
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Permasalahan
    - 1) Masih kurangnya Tenaga SDM yang di miliki oleh UPTD PPA terkait Pengelolaan Kasus;
    - 2) Kurangnya Koordinasi yang Efektif dengan DP3A di 6 Kab Provinsi Sulbar, terkait berbagai masalah Kasus;
    - 3) Kabupaten Layak Anak adalah program yang diinisiasi Kementerian PPPA RI dan sejak tahun 2017 dilakukan evaluasi KLA melalui aplikasi guna memantau dan mereview sejauh mana langkah-langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam 5 klaster, 24 indikator disetiap kabupaten. Sehingga permasalahan dalam upaya percepatan KLA adalah:
      - Peran gugus tugas KLA di tingkat provinsi dan kabupaten belum maksimal;
      - Tidak menjadikan KLA sebagai program prioritas.
    - 4) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mencapai 250 orang, dengan rincian Anak Laki-laki = 59, Anak Perempuan = 76, Laki-Laki Dewasa = 15, Perempuan Dewasa = 100);
    - 5) Belum terbentuknya UPTD PPA di semua kabupaten;
    - 6) Masih rendahnya kapasitas petugas layanan di Provinsi dan Kabupaten;
    - 7) Masih rendahnya pemahaman pemangku kebijakan terkait pentingnya penyusunan Anggaran Responsif Gender di setiap OPD.
  - b. Capaian

- 1) UPTD PPA, melakukan penanganan berupa Penjangkauan langsung ke Korban dan melakukan Asesmen terhadap Kasus yang di alami Korban;
- 2) Dengan melakukan Assesment terhadap Pelapor maka tugas UPTD PPA melakukan Mediasi terhadap Pelapor dan Terlapor dan melakukan Rujukan apa yang harus di berikan terhadap pendampingan Korban;
- 3) Tahun 2019, 6 (enam) kabupaten di provinsi sulawesi barat sudah dalam tahap inisiasi yang berarti bahwa sudah ikut dalam evaluasi KLA melalui aplikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA;
- 4) Tahun 2021, ada 2 (dua) kabupaten yaitu Polewaali Mandar dan Majene sudah mendapatkan penghargaan KLA kategori Pratama (33%);
- 5) Tahun 2022, 1 (satu) kabupaten yaitu Majene mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama (16,6%);
- 6) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022 (kondisi s/d 15 Desember 2022) sebanyak 156 orang dengn rincian Anak laki-laki = 30 orang, anak perempuan = 61 orang, laki-laki dewasa = 12, dan perempuan dewasa = 53. Terdapat penurunan angka kekerasan dari tahun sebelumnya sebanyak 94 korban (37,6%);
- 7) UPTD PPA yang sudah terbentuk di Kab. Majene, untuk Kab. Mamasa saat ini sudah sampai pada tahap A1, diharapkan awal 2023 bisa terbentuk;
- 8) Telah dilaksanakan Kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas layanan di provinsi dan kabupaten;
- 9) Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 10) Telah tersusun Rencana Aksi Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

## 2.5. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk

### a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Kelompok UPPKS yang diberi pembinaan di Kabupaten;
- 2) Tidak tersedianya data by name by address terhadap sasaran yang beresiko stunting;
- 3) Kurangnya Komunikasi, informasi dan edukasi bagi usia kawin pertama umur 15-19 tahun tentang pentingnya program KKBPK melalui KB-MKJP;
- 4) Kurangnya pengetahuan pelajar tentang pendidikan kependudukan Bonus Demografi, Stunting, dampak perkawinan anak, dan kesehatan reproduksi remaja.

### b. Capaian

- 1) Memberikan makanan tambahan berdasarkan kearifan lokal dalam menekan angka stunting;
- 2) Rapat koordinasi lintas sektor ditingkat Kabupaten Majene;
- 3) Adanya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 tahun 2022 tentang Integrasi Materi pendidikan kependudukan yang memuat materi bonus demografi, kesehatan reproduksi remaja, dampak

perkawinan anak dan stunting pada mata pelajaran di SMA/SMK/MA. Dan terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di 3 Kabupaten.

## 2.6. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

### a. Permasalahan

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dari target 2017-2022 sebesar 292,21 Ha dan hanya terealisasi 147,9 Ha, ini disebabkan karena keterbatasan Anggaran yang di alokasikan setiap tahunnya pada kegiatan tersebut;
- 2) Permasalahan Indeks kualitas Air yang masih rendah dikarenakan tingginya Parameter E-Coli yang disebabkan oleh Kotoran Ternak dan Manusia yang langsung dibuang ke badan Sungai, Tingginya Parameter TSS yang disebabkan oleh terjadi Kerusakan Lahan dibagian hulu sungai.

### b. Capaian

- 1) Capaian Rehabilitasi Lahan pada Tahun 2022 sebesar 35 Ha sehingga total rehabilitasi lahan sampai dengan tahun 2022 sebesar 147,9 Ha;
- 2) Walaupun Capaian Indeks Kualitas Air (56,41) telah melampaui target (55-75) tetapi masih tergolong kategori Cukup Baik.

## 2.7. Bidang Urusan Pangan

### a. Permasalahan

- 1) Masih ada 3 kabupaten yang belum menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Yaitu Kab. Polman, Mamasa dan Mateng karena keterbatasan anggaran \* Regulasi yang ada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019;
- 2) Naiknya Harga Pangan (Inflasi);
- 3) Belum ada petugas Data Distribusi Pangan atau Data Keluar Masuknya barang di Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan untuk melakukan analisa Ketersediaan Barang Pangan Pokok;
- 4) Tidak ada Data Harga tingkat Produsen sebagai Pedoman dalam rangka analisis tingkat disparitas harga antar produsen (Petani) dan Pedagang Pengecer;
- 5) Untuk Kegiatan Gersaharum;
- 6) Dalam Proses Penyaluran bantuan Akses Berupa Jalan Menuju Kelokasi Kelompok Cukup Menghambat Penyaluran;
- 7) kurangnya Monitoring ke Kelompok;
- 8) Kurangnya Pembinaan Teknis kepada petani;
- 9) Cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab memperlambat pendistribusian Bantuan;
- 10) Dalam Proses Pembibitan Berupa Cabai terdapat hama pengganggu berupa bekicot dan serangga lainnya yang menghambat pertumbuhan Bibit Cabai;
- 11) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan aktivitas Pengembangan Industri Pangan Lokal;
- 12) Jumlah Kelompok Industri pangan Lokal masih terbatas;
- 13) Permasalahan dalam Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Di Sulawesi Barat, diantaranya;

- 14) Belum adanya regulasi dalam penanganan pada daerah rentan rawan pangan;
  - 15) Kurangnya sinergitas Program/Kegiatan lintas OPD dalam Penanganan Daerah Rentan Pangan;
  - 16) Ketersediaan data beberapa indikator pada OPD terkait, sehingga menggunakan data estimasi (SAE) dari Pusat;
  - 17) Bertambahnya Daerah Rawan Pangan sebanyak 14 daerah;
  - 18) Pelaku Usaha tidak konsisten dalam menerapkan GAP (Good agriculture Practis) karena kurangnya tenaga pendampingan dikarenakan kurangnya anggaran operasional untuk pendamping.
- b. Capaian
- 1) Target Nasional Cadangan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, adalah 164 Ton;  
\* Cadangan Pangan Provinsi: tahun 2019 sebanyak, 5.000 Kg; untuk tahun 2020 sbanyak 9.000 Kg; tahun 2021 sebanyak 6.600 Kg; tahun 2022 sebanyak 95.950 kg. Jadi Cadangan Pangan Provinsi sebanyak 116.550 Kg;
  - 2) Pemantauan Harga \* Kordinasi oleh pihak terkait \* Melakukan Gerakan Pangan Murah;
  - 3) Melakukan Kordinasi dan Persuratan dalam permintaan Data ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Kemenhub);
  - 4) Tahun 2022, ada 4 klp yang di bantu. Dengan pemberian alat pengolahan pembuatan kripik amplang dan pelatihan. Kelompok telah memproduksi dan telah memasarkan di warung sekitar. Produksi ampalng setiap 2 hari sebanyak 50 bungkus;
  - 5) Telah melakukan Analisis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan setiap tahun, yang melibatkan Kabupaten dan OPD terkait. Yang diupdate tiap tahun dalam mengidentifikasi daerah rentan rawan pangan;
  - 6) Penanganan daerah Rawan Pangan dalam bentuk pemberian bantuan Pangan ke daerah rawan Pangan. Tahun 2021 sebanyak 3 daerah, untuk tahun 2022 sebanyak 14;
  - 7) Dalam Capaian Pengawasan Keamanan Pangan tahun 2022 UPTD BSP PSAT telah melakukan survey dan pengambilan sampel ke pelaku usaha PSAT yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dikirim produknya ke Laboratorium yang terakreditasi. Untuk Tahun 2019, telah di menghasilkan Produk PSAT Sebanyak 5 sertifikat. tahun 2020, sebanyak 3 sertifikat (Rambutan dan Durian), 2 Registrasi Beras. tahun 2021 sebanyak 3 sertifikat (Pepaya Calina Kab. Pasangkayu, Pepaya Calina Kab. Majene, Pisang Kepok di Mamuju Tengah), tahun 2022 sebanyak 2 sertifikat (Jambu Kristal di Polewali Mandar dan Nenas di kec. Malunda Kab. Majene).

## 2.8. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Permasalahan
    - 1) Target persentase kepemilikan dokumen kependudukan belum tercapai dikarenakan data yang Update untuk data Semester II belum keluar (akhir januari-awal february);
    - 2) Target rasio bayi berakta kelahiran untuk target capaiannya belum tercapai dikarenakan alat ukur untuk menghitung rumus capaian target itu sudah tidak ada lagi di server SIAK (data yang dikeluarkan berakta 0-18 Th);
    - 3) Kepemilikan KTP EI masih banyak yang bermasalah dikarenakan adanya data ganda penduduk yang sebesar (93.411).
  - b. Capaian
    - 1) Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 63%;
    - 2) Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk 1,45;
    - 3) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi;
    - 4) Penerapan Ktp nasional yang berbasis NIK;
    - 5) Rasio bayi berakte kelahiran;
    - 6) Rasio pasangan berakte nikah 0,36;
    - 7) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90%;
    - 8) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil 33%;
    - 9) Persentase validitas data kependudukan 100%;
    - 10) Persentase profile kependudukan 37%;
    - 11) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Disdukcapil.
- 2.9. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Permasalahan
    - 1) 202 Desa yang masih berstatus tertinggal/sangat tertinggal
  - b. Capaian
    - 1) Posisi IDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 berada pada angka 0.6309 Poin dengan status Berkembang
    - 2) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 64,87 %
    - 3) Persentase Peningkatan Desa mandiri sebesar 0,522%
- 2.10. Bidang Urusan Perhubungan
- a. Permasalahan
    - 1) Pembangunan Terminal Tipe B Belum Bisa Beroperasi;
    - 2) Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi;
    - 3) Forum LLAJ Belum efektif;
    - 4) Angkutan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi belum terdata dengan baik
    - 5) Belum ada pelabuhan kewenangan Provinsi yang dikelola;
    - 6) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Belum ada;
    - 7) Koordinasi Lintas Kewenangan.
  - b. Capaian
    - 1) Pekerjaan Toilet, Pematangan lahan terminal, Drainase, LPJU sudah selesai;
    - 2) Pengadaan fasilitas keselamatan jalan sudah sesuai dengan target output, namun target outcome belum tercapai;
    - 3) Sudah dilaksanakan setiap tahun namun belum disusunnya rencana aksi;
    - 4) Sudah dilaksanakan pengawas perusahaan angkutan;

- 5) Sudah melakukan penyusunan pra FS Terminal Khusus;
  - 6) sudah dianggarkan namun di refocusing;
  - 7) Telah dilakukan koordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan untuk usulan penambahan trayek baru penyeberangan, juga telah dilakukan koordinasi dengan Pihak Maskapai untuk trayek penerbangan yang baru.
- 2.11. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
- a. Permasalahan
    - 1) Masih rendahnya kualitas internier di komplek perkantoran Gubernur. Perlu peningkatan jaringan internet lokal kompleks perkantoran gubernur.
  - b. Capaian
    - 1) jaringan internet lokal kompleks perkantoran gubernur untuk tahun 2022 100%.
- 2.12. Bidang Urusan Persandian
- a. Permasalahan
    - 1) Belum adanya tanda tangan elektronik
- 2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
- a. Permasalahan
    - 1) Manajerial pengelolaan koperasi dan kepatuhan pengurus koperasi terhadap aturan belum berjalan maksimal;
    - 2) Agregasi pembiayaan yang menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UKM masih rendah;
    - 3) Belum maksimalnya akses pasar, promosi produk UMKM dan mendorong serta fasilitas UMKM pada market place;
    - 4) kurangnya akses kemudahan dan kesempatan pengembangan usaha bagi koperasi dan UMKM;
    - 5) Masih rendah dan kurang bersaing produk UMKM lokal pada pasar nasional serta penumbuh kembangan UMKM yg bergerak pada pemanfaatan sumber daya lokal daerah;
    - 6) proposal kelompok Penerima Bantuan lambat kami terima.
  - b. Capaian
    - 1) Menjaga dan meningkatkan kapasitas pelaku koperasi simpan pinjam khususnya skala desa (KUD) dan mengarahkan pada koperasi dengan manajerial yang modern;
    - 2) 30 koperasi simpan pinjam yang aktif dan produktif telah menerima bimtek SKKNI manajer;
    - 3) 90 pelaku usaha telah dilatih pemanfaatan digital market atau perluasan akses pasar baik dalam maupun luar negeri, sehingga tercipta peluang pasar bagi produk koperasi dan UMKM, dan telah Menumbuhkan Calon Wirausaha Pemula sebanyak 88 WUB;
    - 4) Telah difasilitasi dan pemberian wadah pengembangan akses pasar dan informasi bagi pelaku koperasi dan usaha pada pameran produk skala lokal, nasional maupun internasional melalui pendampingan dan sosialisasi;
    - 5) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk pemasaran, intervensi pada kebijakan KUR, literasi perluasan akses pasar dan

pendampingan hukum, serta bantuan alat pengembangan usaha bagi pelaku usaha;

- 6) Minimal 120 usaha start up terbentuk dari wirausaha muda, 45 usaha dengan manajemen usaha modern, 40 usaha berskala produksi naik serta bantuan barang yang diserahkan pada pelaku usaha;
- 7) Telah Difasilitasi 377 UMKM untuk Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari target kementerian sebesar 270;
- 8) Sosialisasi dan pendampingan lapangan pada sertifikasi produk, perluasan jaringan akses pasar dan kemitraan usaha khususnya dengan daerah yang lebih unggul telah dilakukan kepada 298 UKM;
- 9) Minimal 180 usaha mikro berkembang skala produksi dan kualitas usaha, 7 pendamping dengan standarisasi kinerja yang lebih baik, dan Target 120 usaha (ON BOARDINR UKM) atau naik kelas realisasi 128 Usaha (Melebihi Realisasi) hal ini karena dampingan menetrasi pasar dengan keunggulan produk dan akses pada digital marketing;
- 10) Telah Diberikan Bantuan Barang Kepada Kelompok Masyarakat Fotografi Pengadaan Sarana Studio Digital dan Fotografi (Kamera 2 Unit, SD Card, Drone 2 Unit, Gimbal Stabilizier, Tripod, Laptop, Flash Kamera, Layar Abstrak, Lensa, Trigger), Klp. Perbengkelan: Pengadaan Peralatan Perbengkelan (Aki, Ban Luar, Gear Set, Oli, Selang Kompresor, Tools Set), Pengadaan Peralatan Perbengkelan (Dongkrak Buaya, Gerinda, Kompresor, Kunci Inggris, Kunci L, Kunci Ring Pass, Kunci T, Mesin Bor Listrik, Mesin Las, Obeng, Tang Potong dan Lancip), Pengadaan Sembako (Gula, Susu, Minyak Goreng, Terigu, Sirup, Mie Instan).

#### 2.14. Bidang Urusan Perdagangan

##### a. Permasalahan

- 1) Perdagangan bebas memperluas peluang pasar produk ekspor Sulawesi Barat dari komoditas perkebunan namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai;
- 2) Peningkatan volume barang beredar yang merupakan dampak berkembangnya dan maraknya perdagangan online belum diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap kualitas dan keamanannya secara optimal;
- 3) Sebagian besar UMKM/pelaku usaha belum memiliki Tim Pemasaran terlebih digital marketing, Sistem pemasaran berbasis online dengan menggunakan website yang profesional pada UMKM/pelaku usaha belum banyak yang memiliki, Artikel atau tulisan mengenai produk UMKM di Sulawesi Barat belum banyak yang tersebar di luar Sulawesi Barat;
- 4) Meningkatnya inflasi di Sulawesi Barat akibat dari kenaikan harga BBM, Distributor barang pokok dan barang penting masih kurang.

##### b. Capaian

- 1) Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan kepada pelaku usaha ekspor di Sulawesi;
- 2) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dalam rangka ekspor barang yang diekspor keluar negeri;

- 3) Melaksanakan pengawasan/pembinaan pada 60 pelaku usaha/ritel modern di Sulawesi Barat;
- 4) Melaksanakan pelatihan pemasaran berbasis digitalisasi kepada UMKM/pelaku usaha di Sulawesi Barat;
- 5) Melaksanakan pasar murah dalam rangka menekang laju inflasi di Sulawesi Barat dan Melaksanakan pemantauan harga pangan pokok dan barang penting secara kontinyu dalam wilayah Sulawesi Barat.

2.15. Bidang Urusan Perindustrian

a. Permasalahan

- 1) Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan kepada pelaku usaha ekspor di Sulawesi;
- 2) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dalam rangka ekspor barang yang diekspor keluar negeri;
- 3) Melaksanakan pengawasan/pembinaan pada 60 pelaku usaha/ritel modern di Sulawesi Barat;
- 4) Melaksanakan pelatihan pemasaran berbasis digitalisasi kepada UMKM/pelaku usaha di Sulawesi Barat;
- 5) Melaksanakan pasar murah dalam rangka menekang laju inflasi di Sulawesi Barat dan Melaksanakan pemantauan harga pangan pokok dan barang penting secara kontinyu dalam wilayah Sulawesi Barat.

b. Capaian

- 1) Melaksanakan kolaborasi dan pembinaan kepada pelaku usaha ekspor di Sulawesi;
- 2) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dalam rangka ekspor barang yang diekspor keluar negeri;
- 3) Melaksanakan pengawasan/pembinaan pada 60 pelaku usaha/ritel modern di Sulawesi Barat;
- 4) Melaksanakan pelatihan pemasaran berbasis digitalisasi kepada UMKM/pelaku usaha di Sulawesi Barat;
- 5) Melaksanakan pasar murah dalam rangka menekang laju inflasi di Sulawesi Barat dan Melaksanakan pemantauan harga pangan pokok dan barang penting secara kontinyu dalam wilayah Sulawesi Barat.

2.16. Bidang Urusan Penanaman Modal

a. Permasalahan

- 1) Perkembangan regulasi investasi dan/atau Penanaman Modal yang dinamis (sering berubah) dan multisektoral terkait Penanaman Modal sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha khususnya pemberian fasilitas/ insentif dalam rangka pelaksanaan kemudahan berusaha dan Strategi Promosi;
- 2) Penyusunan Perda penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berbasis risiko dan SOP, sebagai tindak lanjut dari PP No. 5/2021, PP No.6/2021 dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017;
- 3) Masih terbatasnya dukungan system dan aplikasi mandiri yang mendukung pelaksanaan SPBE dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik;
- 4) Masih kurangnya ketersediaan Sarana dan prasarana sesuai standar yang dipersyaratkan permendagri 138/2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah, maupun hasil rekomendasi dari

auditor pelayanan publik (KPK/KemenPAN, Irjen Kemendagri, Ombudsman maupun masyarakat);

- 5) Data Potensi belum dilengkapi dengan kajian kelayakan (Faseability Study) yang berbasis spasial;
- 6) Kompetensi SDM untuk mewujudkan pelayanan prima perlu ditingkatkan baik wawasan pemahaman perubahan regulasi maupun kemampuan teknis dalam upaya peningkatan soft skill dan hard skill;
- 7) Masih belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar stakeholders yang terkait penanaman modal.

b. Capaian

- 1) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Pembuatan Video Profil Investasi Provinsi Sulawesi Barat dengan memuat beberapa Sektor;
- 3) Tersedia Peta Potensi Tambang yang disusun bersama Unhas Tahun 2021;
- 4) Tahun 2021 sudah dilaksanakan Kursus Bahasa Inggris sebanyak 30 Orang.

2.17. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Permasalahan

- 1) Lemahnya Pemahaman Tentang Pendidikan Karakter dan Keterampilan Pemuda Dalam Berwirausaha;
- 2) Belum Maksimalnya Pendayagunaan Pemuda dan Kelembagaan Pemuda Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan yang Direncanakan Oleh Pemerintah;
- 3) Belum Tersusunnya Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Dalam Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
- 4) Masih Minimnya Prestasi Atlet;
- 5) Sarana dan Prasarana Olah Raga yang belum memenuhi standar;
- 6) Minimnya Atlet Usia Dini;
- 7) Partisipasi dan Kebugaran Jasmani masyarakat berolahraga masih rendah.

b. Capaian

- 1) Tahun 2022 kurang lebih 200 pemuda telah mendapatkan pelatihan Kewirausahaan;
- 2) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- 3) Telah ditetapkan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan Pemuda dalam RPJMN dan telah diturunkan dalam RPJMD;
- 4) Perolehan 5 medali Perunggu pada pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2022 dan 1 Perunggu Pada Kejurnas Takraw;
- 5) Telah terdapat beberapa Gedung dan Lapangan Olahraga di Beberapa Kabupaten;
- 6) Terdapat 30 orang atlet dan 3 cabor binaan di PPLP;
- 7) Pelaksanaan event Olahraga Tradisional serta Senam Massa.

- 2.18. Bidang Urusan Perpustakaan
  - a. Permasalahan
    - 1) Belum tersedianya Gedung Layanan Perpustakaan yang representative.
  - b. Capaian
    - 1) Progres Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sudah mencapai 85%.
- 2.19. Bidang Kearsipan
  - a. Permasalahan
    - 1) Belum tersedianya Sarana Penyimpanan Arsip (Depot Arsip) yang sesuai Standar.
  - b. Capaian
    - 1) Telah dibuatkan Perencanaan (Detail Engineering Design/DED) untuk Depot Arsip.
- 3. Urusan Pilihan
  - 3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
    - a. Permasalahan
      - 1) Terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) diakhir tahun anggaran 2022, pada pergeseran ke 3 setelah perubahan APBD TA 2022 tanggal 5 Desember 2022 berupa kegiatan pembangunan/pengadaan Pabrik Es dan Cold Storage sebesar 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar) dengan rincian 2 Paket Pabrik Es masing-masing direkomendasikan di UPTD PP Kasiwa dan UPTD PP Banggae dan 1 unit Cold Storge di UPTD PP Kasiwa, namun untuk pengadaan tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan karena waktu proses lelang dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tidak mencukupi waktu;
      - 2) Tidak tercapainya target salah satu indikator utama urusan bidang kelautan dan perikanan berupa Nilai Tukar Nelayan (NTN) di karenakan selama tahun 2022 hasil tangkapan perikanan menurun disebabkan iklim/cuaca tidak memungkinkan untuk melaut (menangkap ikan);
      - 3) Terdapat Anggaran DAK yang tidak Bisa dilaksanakan karena terkendala petunjuk teknis pelaksanaan DAK ditambah dengan sisa tender sebesar RP. 9.444.000.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), pada batas waktu 21 Juli 2022 beberapa kegiatan DAK tersebut tidak terkontrak.
    - b. Capaian
      - 1) Capaian salah satu indikator kinerja yaitu angka konsumsi di Sulawesi Barat yang cenderung dari tahun ke tahun melampaui target dan pada semester I tahun 2022 mengindikasikan angka konsumsi ikan sebesar 33,50 kg/perkapita/tahun dapat di capai bahkan bisa melampaui target 55 kg/perkapita.tahun, sementara capaian indikator lainnya berupa angka produksi perikanan masih menunggu publikasi one data KKP RI.

3.2. Bidang Urusan Pariwisata

a. Permasalahan

- 1) Sarana dan Prasarana di objek wisata yang masih minim, Dukungan proses keuangan belum optimal, Akses ke lokasi objek wisata masih belum lancar, Dukungan SDM yang belum optimal

b. Capaian

- 1) Jumlah wisatawan mancanegara yang makin meningkat, Peningkatan hunian kamar hotel

3.3. Urusan Pertanian

3.3.1. Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

a. Permasalahan

- 1) Dibutuhkan support sistem/dukungan terkait dinamika kebijakan perencanaan penganggaran. Termasuk usulan pokok pokok pikiran, kegiatan bersumber dari DID dan BTT Sumber daya manusia di DTPHP yang minim sehingga kesulitan mendapatkan data lapangan yang rill Pengembangan Padi Ramah lingkungan seluas 40 Ha, mengalami gagal panen (rebah) sehingga hanya bisa dilakukan pemanenan sekira 5 Ha dengan jumlah benih 5.175 Kg.pada perbanyak benih padi pokok, dengan luas 8 Ha mengalami gagal panen seluas 0,27 Ha sehingga benih yang dihasilkan mencapai 25.750 KgPopulasi ternak khususnya sapi mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebanyak 336 ekor yakni dari 115.090 menjadi 114.754. penurunan terjadi di wilayah kab pasangkayu akibat penyakit jembrana sebanyak 336 kematian pada sapi potong. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah provinsi dalam penanganan PMK dan Jembrana. sehingga untuk menunjang penanganannya menggunakan Dana APBN.

b. Capaian

- 1) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Besar dan Sedang sudah mencapai nol Kasus. Kasus penyakit jembrana pada sapi bali masih dalam penanganan. Kasus telah terjadi di kab Pasangkayu dan pada posisi sudah melandai dan laporan kematian terakhir per 3 Desember 2022. (Terlampir);
- 2) Peningkatan Populasi tetap ditunjukan pada peningkatan jumlah hewan unggas yakni 7.675.274 ekor pada tahun 2021 dan 8.138.970 ekor pada tahun 2022;
- 3) Pada pengembangan tanaman sayuran Cabai dan bawang merah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi pada tahun 2022 yakni mendapatkan anggaran DID dan BTT untuk penanganan Inflasi dan ketahanan pangan daerah. Peningkatan produksi pada 2 komoditi tersebut menunjukkan angka yang cukup baik yakni dari 2021 sebanyak 693,1 Ton menjadi 860,0 Ton pada bawang merah. dan cabai dari Tahun 2021 sebanyak 5.777 Ton menjadi 6.679 ton pada tahun 2022. terjadi pula penambahan luas lahan 485 Ha pada tahun 2021 dan 491 Ha pada tahun 2022 untuk komoditi Bawang merah;

- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani mengalami penambahan panjang yang cukup signifikan yakni pada tahun 2021 sepanjang 13.836 meter, pada tahun 2022 sepanjang 13.591,6 Meter sehingga untuk data panjang Jalan Usaha Tani dari tahun 2017 - 2022 menjadi 27.428 Meter. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada tahun 2022 sepanjang 5.082 Meter (dilakukan perhitungan untuk interfensi anggaran APBD). Sedangkan untuk penggunaan alat mesin pertanian yang berasal dari bantuan pemerintah mengalami penurunan diakibatkan peraturan undang undang yang membatasi;
- 5) Peningkatan produksi terjadi pada komoditi padi dan jagung. pada tahun 2021, produksi padi 311.072 Ton menjadi 362.386 Ton pada tahun 2022. Dan pada komoditi jagung sebanyak 218.156,22 ton menjadi 283.021,00 pada tahun 2022. terdapat pula gerakan merdeka pangan pada 2 komoditi tersebut, dengan tujuan untuk penambahan luas lahan dan edukasi kepada petani tentang budidaya dan penggunaan teknologi yang baik. Dalam hal Perbanyak benih padi yang mencapai kurang lebih 30.000 Kg mampu menyumbang PAD sebesar Rp. 400.000.000. - UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, telah memberikan pelayanan laboratorium dan klinik hewan serta Surveilans untuk penentuan nilai prefelensi daerah bebas kompartemen (status kesehatan daerah) dan pemeriksaan penyakit hewan menular strategis dan produk asal hewan.

### 3.3.2. Dinas Perkebunan

#### a. Permasalahan

- 1) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Besar dan Sedang sudah mencapai nol Kasus. Kasus penyakit jembrana pada sapi bali masih dalam penanganan. Kasus telah terjadi di kab Pasangkayu dan pada posisi sudah melandai dan laporan kematian terakhir per 3 Desember 2022. (Terlampir);
- 2) Peningkatan Populasi tetap ditunjukkan pada peningkatan jumlah hewan unggas yakni 7.675.274 ekor pada tahun 2021 dan 8.138.970 ekor pada tahun 2022;
- 3) Pada pengembangan tanaman sayuran Cabai dan bawang merah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi pada tahun 2022 yakni mendapatkan anggaran DID dan BTT untuk penanganan Inflasi dan ketahanan pangan daerah. Peningkatan produksi pada 2 komoditi tersebut menunjukkan angka yang cukup baik yakni dari 2021 sebanyak 693,1 Ton menjadi 860,0 Ton pada bawang merah. dan cabai dari Tahun 2021 sebanyak 5.777 Ton menjadi 6.679 ton pada tahun 2022. terjadi pula penambahan luas lahan 485 Ha pada tahun 2021 dan 491 Ha pada tahun 2022 untuk komoditi Bawang merah;
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani mengalami penambahan panjang yang cukup signifikan yakni pada tahun 2021 sepanjang 13.836 meter, pada tahun 2022 sepanjang

13.591,6 Meter sehingga untuk data panjang Jalan Usaha Tani dari tahun 2017 - 2022 menjadi 27.428 Meter. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada tahun 2022 sepanjang 5.082 Meter (dilakukan perhitungan untuk interfensi anggaran APBD). Sedangkan untuk penggunaan alat mesin pertanian yang berasal dari bantuan pemerintah mengalami penurunan diakibatkan peraturan undang undang yang membatasi;

5) Peningkatan produksi terjadi pada komoditi padi dan jagung. pada tahun 2021, produksi padi 311.072 Ton menjadi 362.386 Ton pada tahun 2022. Dan pada komoditi jagung sebanyak 218.156,22 ton menjadi 283.021,00 pada tahun 2022. terdapat pula gerakan merdeka pangan pada 2 komoditi tersebut, dengan tujuan untuk pertambahan luas lahan dan edukasi kepada petani tentang budidaya dan penggunaan teknologi yang baik. Dalam hal Perbanyak benih padi yang mencapai kurang lebih 30.000 Kg mampu menyumbang PAD sebesar Rp. 400.000.000. - UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, telah memberikan pelayanan laboratorium dan klinik hewan serta Surveilans untuk penentuan nilai prefelensi daerah bebas kompartemen (status kesehatan daerah) dan pemeriksaan penyakit hewan menular strategis dan produk asal hewan.

b. Capaian

- 1) Menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB;
- 2) Semakin menurunnya izin Hak pengelolaan Hutan (HPH);
- 3) Potensi Kayu dalam kawasan yang sudah menurun.

3.4. Bidang Urusan Energi Sumber Daya Mineral

a. Permasalahan

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses listrik baik PLN maupun non PLN;
- 2) Masih terdapat 31 Desa belum berlistrik;
- 3) Data detail lokasi dan nama rumah tangga yang belum berlistrik dan desa belum terdata dengan baik;
- 4) Masih banyaknya pemegang IUP yang belum memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Masih terdapat penambangan tanpa izin;
- 6) Belum adanya dokumen Blue Print Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga belum dapat maksimal pendataan dan penyaluran anggaran PPM para pemegang izin usaha pertambangan komoditas batuan ke masyarakat sekitar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi di lapangan;
- 7) Belum ada Pergub tentang Penetapan nilai perolehan air tanah;
- 8) Belum ada pergub tentang Penetapan zona konservasi Air tanah pada cekungan air tanah.

b. Capaian

- 1) Jumlah rumah tangga Berlistrik per Juni 2022 sebanyak 329.118 Rumah tangga (RE = 98,49%);

- 2) Jumlah Desa yang sudah Berlistrik per Juni 2022 sebanyak 619 Desa (Rasio Desa Berlistrik = 95,23%);
- 3) Data jumlah rumah tangga belum berlistrik sudah ada namun perlu permutakhiran;
- 4) Banyak Pemegang IUP Yang Belum Memenuhi Kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Sudah melakukan Pendataan Penambangan tanpa Izin;
- 6) Sudah melakukan pengumpulan dan Pengolahan Data dan Membuat draft naskah akademis tentang pergub penetaan perolehan air tanah;
- 7) Sudah melakukan pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.

### 3.5. Bidang Urusan Transmigrasi

#### a. Permasalahan

- 1) Jumlah Penempatan Warga Transmigrasi TA. 2022 adalah sebanyak 134 KK, terdiri dari 84 KK TPA (Transmigran Penduduk Asal) dan 50 KK TPS (Transmigran Penduduk Setempat) diharapkan adanya dukungan dari pemerintah provinsi khususnya dalam pemberian dukungan sarana dan prasarana kepada transmigran yang ada;
- 2) Lahan penempatan warga transmigrasi membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dalam hal legalitas lahan.

#### b. Capaian

- 1) Untuk pencapaian indikator Persentase Transmigran Swakarsa dan Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB telah mencapai target yang diharapkan namun untuk indikator kontribusi transmigrasi terhadap PDRB baru dapat dihitung pada tahun 2023 disebabkan penempatan transmigrasi baru dilakukan pada triwulan 3 dan 4;
- 2) Dari 6 Kabupaten permasalahan legalitas masih menjadi permasalahan di 2 kabupaten yaitu kabupaten mamasa dan kabupaten mamuju tengah.

## 4. Urusan Pendukung

### 4.1. Bidang Urusan Sekretariat Daerah

#### 4.1.1. Biro Perekonomian dan Pembangunan

##### a. Permasalahan

- 1) Belum maksimalnya pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan dan tingkat kualitas kebijakan yang dihasilkan belum optimal dan belum sepenuhnya terimplementasikan di beberapa OPD.

##### b. Capaian

- 1) Tingkat Inflasi yang terkendali melalui peran TPID;
- 2) Tingkat penetapan tarif batas atas/bawah air minum;
- 3) Tingkat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dan gas 3 Kg;
- 4) Keberhasilan dalam fasilitasi penyerahan dana Participating of Interest (PI) dari PT. Moebadala ke Perumda Sebuku Energi Malaqbi.

#### 4.1.2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

##### a. Permasalahan

- 1) Perangkat Daerah dalam menetapkan jadwal perencanaan tidak tepat waktu;

- 2) Perangkat Daerah tidak menganggarkan biaya visitasi.
- b. Capaian
  - 1) Penetapan Jadwal perencanaan pengadaan;
  - 2) Mengusulkan biaya dukungan visitasi dari Biro PBJ.
- 4.1.3. Biro Pemerintahan dan Kesra
  - a. Permasalahan
    - 1) Penetapan Jadwal perencanaan pengadaan;
    - 2) Mengusulkan biaya dukungan visitasi dari Biro PBJ.
  - b. Capaian
    - 1) Persentase pengelolaan administrasi kebijakan daerah bidang pemerintahan dan otonomi daerah 100%;
    - 2) Persentase pengelolaan administrasi kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat 98,83%.
- 4.1.4. Biro Hukum
  - a. Permasalahan
    - 1) Terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000 pada perubahan APBD TA 2022 Untuk kebutuhan Penyelesaian sengketa batas wilayah Sulteng-sulbar yang tidak dapat terlaksana karena proses penyaluran anggaran tersebut harus melalui hibah/BKK.
  - b. Capaian
    - 1) Persentase penyelesaian masalah hukum (300% target 1 terealisasi 3 kasus);
    - 2) Persentase penyelesaian masalah Non litigasi (100%, 2 kasus);
    - 3) Pelaporan Aksi HAM (100%, 4 laporan).
- 4.1.5. Biro Organisasi
  - a. Permasalahan
    - 1) Masih adanya OPD yang memperoleh Nilai SAKIP rendah dikarenakan masih rendahnya kepedulian OPD;
    - 2) Masih rendahnya nilai Reformasi Birokrasi (RB) dikarenakan masih rendahnya kepedulian OPD.
  - b. Capaian
    - 1) Nilai SAKIP B;
    - 2) Nilai RB B.
- 4.1.6. Biro Umum
  - a. Permasalahan
    - 1) Belum terpenuhinya target serapan disebabkan beberapa item belanja yang tidak dapat dilakukan intervensi yakni gaji dan tunjangan lingkup sekretariat, BPO dan gaji KDH;
    - 2) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dibidang keuangan, pengelolah BMD, keprotokolan, pelayanan persuratan pimpinan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan;
    - 3) internalisasi core values, ASN berakhlak belum optimal (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal adaktif dan kolaboratif;
    - 4) belum adanya data aset yang valid dan akurat lingkup secretariat.

- b. Capaian
  - 1) Persentase ASN dengan deskripsi pekerjaan yang sesuai 100%;
  - 2) Nilai SAKIP lingkup OPD 77 Poin;
  - 3) Tingkat dukungan mutu data sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup SKPD 4 Skala Likert;
  - 4) Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup SKPD 98,88%..
- 4.2. Bidang Urusan Sekretariat DPRD
  - 4.2.1. Sekretariat DPRD
    - a. Capaian
      - 1) Sisa Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Yaitu Uang Jasa Pengabdian Dan Sisa Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Dprd Sesuai Dengan Regulasi Yang Mengatur- Sisa Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn Yang Tidak Terserap 100% Sesuai Dengan Kinerja Asn- Sisa Anggaran Dari Selisih Harga Standar Harga Satuan (Shs) Dengan Harga Riil Di Pasaran Serta Sisa Anggaran Dari Pelaksanaan Tender (Selisih Harga Hps Dengan Harga Penawaran Pihak Penyedia);
      - 2) Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pada Proses Penausahaan Keuangan Tidak Stabil Yang Disebabkan Kendala Teknis Aplikasi Sehingga Berpengaruh Terhadap Proses Pencairan Anggaran.
- 5. Urusan Unsur Penunjang
  - 5.1. Bidang Urusan Perencanaan
    - a. Permasalahan
      - 1) Monitoring terhadap hasil Bimtek Geospasial Belum maksimal;
      - 2) Tindak Lanjut temuan BPK terhadap Kebijakan Satu Peta belum terselesaikan.
    - b. Capaian
      - 1) Sudah melaksanakan Bimtek Geospasial kepada operator geospasial setiap OPD;
      - 2) Sudah dilakukan Coaching Clinic kepada operator di OPD untuk pengumpulan data spasial.
  - 5.2. Bidang Urusan Keuangan
    - a. Permasalahan
      - 1) Permasalahan pada penggunaan Sistem Informasi (aplikasi baru) yang mengharuskan Sumber Daya pengelola keuangan untuk lebih ekstra dalam hal penyusunan laporan;
      - 2) Kepedulian dari SKPD yang belum maksimal dalam melakukan rekonsiliasi laporan, baik BMD maupun Keuangan;
      - 3) Pengamanan BMD yang kurang maksimal, baik dalam hal administrasi, fisik, dan hukum;
      - 4) Penggunaan dan pemanfaatan BMD yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
      - 5) Masih banyak aset yang dimanfaatkan dengan tidak maksimal;

- 6) Masih banyak OPD yang belum mengoptimalkan BMD yang berada dalam penguasaannya;
  - 7) Masih banyaknya tunggakan kendaraan bermotor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
- b. Capaian
- 1) Pada tahun 2022, BPKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD T.A. 2021), berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - 2) Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi sebesar 454.007.244.906,69 dari anggaran sebesar 428.261.986.457 atau 106,01%;
  - 3) Dalam hal peningkatan kualitas layanan bagi wajib pajak UPTB Samsat Mamuju Utasa (Rehabilitasi Meja Resepsionis dan pengerjaan jalan masuk);
  - 4) Telah dilakukan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan BMD pada setiap OPD;
  - 5) Pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi dan Aplikasi E-Koreksi dan Sipamandar dalam hal rekonsiliasi, konsolidasi, dan pencairan;
  - 6) Mengeluarkan kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang mampu meningkatkan animo masyarakat dalam membayar pajak;
  - 7) Mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi SIPADA untuk mempermudah sistem informasi perjalanan dinas dan rekapan kwitansi perjalanan dinas.
- 5.3. Bidang Urusan Kepegawaian
- a. Permasalahan
- 1) Adanya perubahan kebijakan tentang fasilitasi pendidikan lanjutan ASN yang sebelumnya dikenal dengan izin dan tugas belajar saat ini hanya dikenal dengan tugas belajar sehingga untuk fasilitasi pendidikan lanjutan ini masih menunggu perubahan peraturan kepala daerah tentang tugas belajar.
- b. Capaian
- 1) Tahun 2022 masih menggunakan 1) peraturan kepala daerah yang lama namun untuk tahun 2023 telah diusulkan dalam propemperkada.
- 5.4. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- a. Permasalahan
- 1) Sarana Gedung sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi ASN belum ada/memadai, Gedung diklat yang selama ini digunakan adalah gedung/aset Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Perumahan, sehingga akan mempengaruhi penilaian pada saat re akreditasi program pelatihan yang telah ada maupun akreditasi program pelatihan yang baru sebagai syarat penyelenggaraan pelatihan secara mandiri;
- b. Capaian
- 1) Indikator Kinerja Utama BPSDM adalah Persentase ASN yang mengikuti pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun

dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 5,50%, dengan perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN/PNS Pemprov. Sulbar. Dari perhitungan tersebut, realisasi kinerja BPSDM Tahun 2022 adalah sebesar 8,5 % dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan melalui fasilitasi BPSDM sebanyak 547 orang dari jumlah ASN/PNS keseluruhan sebanyak 6.434 orang.

- 5.5. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
  - a. Permasalahan
    - 1) Berkurangnya 1 kajian yang dilakukan pada tahun 2022 disebabkan adanya rasionalisasi anggaran.
  - b. Capaian
    - 1) Peresentase pemanfaatan hasil kelitbanan target tahun 2022 90 %.
6. Urusan Unsur Pengawasan
  - 6.1. Bidang Urusan Inspektorat Daerah
    - a. Permasalahan
      - 1) Proses Bisnis dan Data Hasil Pengawasan masih berbasis manual.
    - b. Capaian
      - 1) Membangun Sistem Informasi Hasil Pengawasan berbasis Digital.
7. Urusan Unsur Pemerintahan Umum
  - 7.1. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - a. Permasalahan
      - 1) Tidak adanya permasalahan yang sangat mendasar terkecuali adanya Hibah DHD'45 yang tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan tidak lengkapnya administrasi Dana Hibah tersebut.
    - b. Capaian
      - 1) Seluruh rangkaian program kegiatan dapat terselesaikan dengan baik.

## **2.3. Permasalahan Pembangunan**

### **2.3.1. Permasalahan terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **A. Perekonomian**

Kondisi Perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat Perekonomian Sulawesi Barat masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif ditengah tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat ditahun 2023 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 58,55 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 35,43 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 meningkat positif jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,31 persen (c-to-c). Perekonomian Sulawesi Barat memberikan andil terhadap sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan hal ini terkonfirmasi dari pangsa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Sulawesi Barat tercatat sebesar 44,72 persen kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11, 16 persen, Perekonomian Sulawesi Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan di Sulawesi Barat seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata, kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalama rangka menurungkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan. Gambaran kondisi permasalahan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Barat belum akseleratif.**

Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, kinerja perekonomiannya belum mencapai tingkat akseleratif yang diharapkan. Beberapa faktor telah menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, namun masih terdapat kekurangan dalam jaringan transportasi, terutama di daerah pedesaan. Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi daya saing ekonomi daerah. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan juga menjadi kendala. Fluktuasi harga komoditas dan kerentanan terhadap perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada ekonomi lokal.

#### **2. Belum kuatnya indutsri pengolahan berbasis masyarakat.**

Di Provinsi Sulawesi Barat, industri pengolahan berbasis masyarakat belum mencapai tingkat kekuatan yang diharapkan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan kekayaan alam lainnya, namun industri pengolahan masih mengalami tantangan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan dalam proses pengolahan. Banyak masyarakat lokal yang masih

bergantung pada metode tradisional dalam mengolah hasil pertanian atau perikanan mereka, yang sering kali tidak efisien dan kurang menghasilkan produk berkualitas. Kurangnya akses terhadap pasar dan distribusi juga menjadi hambatan dalam mengembangkan industri pengolahan berbasis masyarakat. Banyak produsen lokal yang kesulitan untuk menjual produk mereka di pasar yang lebih luas karena terbatasnya jaringan distribusi dan kurangnya akses pasar yang memadai.

3. Belum optimalnya hilirisasi

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pabrik pengolahan yang modern dan terintegrasi dengan baik. Keterbatasan fasilitas pengolahan menyebabkan produk-produk lokal Sulawesi Barat sering harus dijual mentah tanpa nilai tambah, sehingga berpotensi mengurangi potensi pendapatan bagi para petani dan produsen lokal serta rendahnya tingkat teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan juga menjadi kendala. Banyak produsen lokal masih menggunakan metode pengolahan tradisional yang tidak efisien dan tidak memenuhi standar kualitas pasar yang lebih tinggi. Keterbatasan akses terhadap pasar dan distribusi juga merupakan faktor yang mempengaruhi hilirisasi. Kurangnya jaringan distribusi yang memadai membuat sulit bagi produsen lokal untuk menjual produk mereka di pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Potensi unggulan daerah belum berbasis investasi

Potensi unggulan daerah yang belum berbasis investasi merujuk pada sumber daya atau keunggulan yang dimiliki suatu daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menarik investasi, salah satunya perlu adanya dukungan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Over) sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di provinsi Sulawesi Barat, yang termuat berupa feasibility study terkait kelayakan potensi yang akan diinvestasikan.

B. Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 pertumbuhan IPM selalu tumbuh positif dari 65,73 poin menjadi 67,55 poin. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat masih berada pada kategori level sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 73,55 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah.
2. Komponen IPM dari sektor pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah, dimana RLS di Sulawesi Barat mencapai 8,13 tahun berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,77 tahun. Komponen berikutnya adalah Harapan Lama Sekolah. HLS di Sulawesi Barat sebesar 12,88 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 13,15 tahun. Permasalahan utama yang terkait sektor pendidikan di Sulawesi Barat yaitu masih minimnya sarana dan prasarana

pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta perlunya perubahan pola pikir dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Barat sebesar 65,63 tahun sementara nasional sebesar 71,85 tahun. Rendahnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kematian bayi, kematian balita, dan jumlah kematian Ibu di tahun 2023. Beberapa permasalahan di sektor kesehatan sangat berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, perilaku hidup bersih dan sehat yang belum berjalan secara ideal, terbatasnya Sumberdaya Manusia bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berkompeten.
4. Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih (22,93%) dan masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses sanitasi layak (27,25%), faktor yang kedua adalah Perilaku Kesehatan, diantaranya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,50% (Risksdas 2018), masih tingginya pernikahan usia anak mencapai 19,20% tertinggi ke-tiga secara nasional. Faktor selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan terkait dengan penyediaan Akses dan Fasilitas Kesehatan dimana berdasarkan data bahwa Akses Desa/Kelurahan menuju rumah sakit sebesar 46,7%, Rumah sakit bersalin 15,0%, Puskesmas 74,9%, Poliklinik 37,7%, dan Akses Desa/Kelurahan menuju ke tempat Dokter sebesar 63,1% (Podes 2018, TNP2K) dan selanjutnya adalah faktor keturunan yang hanya berkontribusi sebesar 5 persen terhadap derajat kesehatan.
5. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat juga disebabkan oleh tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan gizi, dimana masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi serta sektor terkait lainnya seperti sanitasi dan air bersih yang berkualitas juga sangat mempengaruhi permasalahan stunting.

#### C. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Kondisi lingkungan hidup dan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim serta nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). Gambaran lainnya yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, dan penganggulangan bencana. Gambaran kondisi permasalahan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut.

1. **Permasalahan Perubahan Iklim**

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai wilayah di dunia, termasuk Sulawesi Barat. Perubahan Iklim merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi.
2. **Permasalahan Pencemaran Lingkungan**

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Ini dapat dilihat dari grafik persentase pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Barat yang semakin tahun mengalami penurunan.

Selain sampah permasalahan Limbah B3 Medis perlu juga mendapatkan perhatian. Limbah medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis baik biologis maupun non biologis yang dihasilkan oleh fasyankes (rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya termasuk laboratorium kesehatan). Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber kontaminasi dan pencemaran lingkungan
3. **Permasalahan Wilayah Pesisir**

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu

ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Berupa Pengembangan generasi lingkungan

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengembangan sekolah Adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipasi dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini

5. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah Kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setiap tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penegakan Hukum sehingga dari tahun 2020 sampai tahun 2023 persentase penegakan hukum mencapai 100 Persen

6. Permasalahan Hampir punahnya Keanekaragaman Hayati

Khusus di Provinsi Sulawesi Barat Keberadaan burung Maleo menjadi semakin terancam punah. Maleo (*Macrocephalon maleo*) adalah satwa endemik Sulawesi dan tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Burung ini hanya ada di Pulau Sulawesi dan populasinya makin terancam karena maraknya pembukaan lahan di habitatnya berupa kawasan pantai berpasir panas atau pegunungan dengan sumber air panas atau kondisi geotermal tertentu. Pencurian telur maleo juga mengancam kelestarian burung itu. Seekor maleo memang hanya bertelur sebutir dalam satu musim. Untuk itu diperlukan suatu aksi nyata bagaimana untuk melestarikan burung maleo tersebut

7. Nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia Sulawesi Barat tertinggi secara Nasional

Berdasarkan data dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir, jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini, seperti yang terjadi pada tahun 2021 di mana gempa mengakibatkan tidak hanya kerusakan signifikan pada bangunan, namun juga menimbulkan korban jiwa

dan luka-luka. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Provinsi Sulawesi Barat memiliki Indeks risiko 160,09 (tinggi).

#### D. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 - 2023 cenderung menunjukkan peningkatan. walaupun nilainya pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 60,20 (B). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

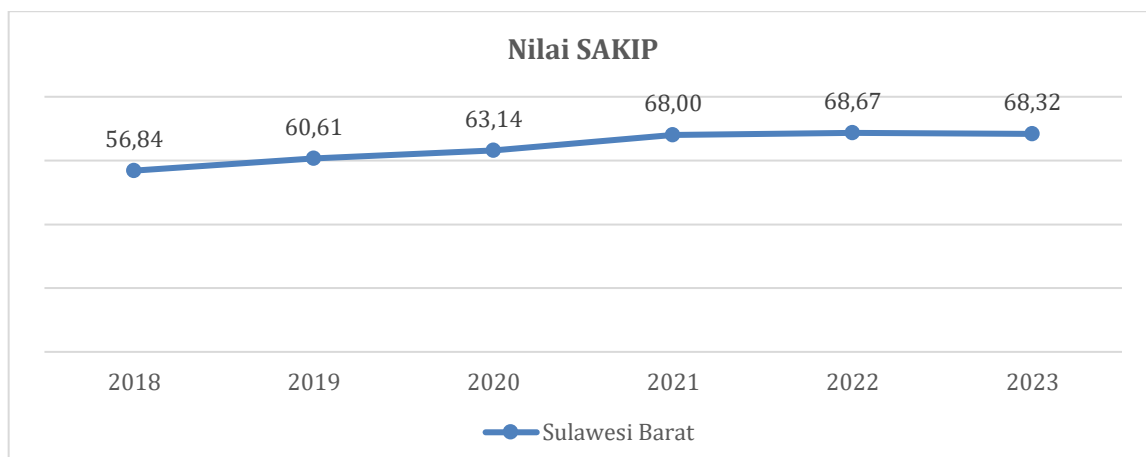
**Grafik 2.72 Nilai Reformasi Birokrasi**



Sumber:

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP yang diperoleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018-2023 menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2023 nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Barat memperoleh 68,32 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan nilai 68,67 dengan predikat B.

Grafik 2.73 Nilai SAKIP



Sumber:

Tata Kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh kinerja ASN yang baik. Namun manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, harus didukung dengan penempatan dan penataan ASN secara transparan, jaminan pengembangan karir bagi ASN, adanya Assesment Center, fasilitasi pendidikan bagi ASN, serta pengembangan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi bagi ASN. Serta diperlukannya sarana dan prasarana pengembangan kepegawaian yang memadai.

### 2.3.2. Permasalahan Terkait Bidang Urusan

Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagai berikut

#### 5.3.2.1. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. PENDIDIKAN

1. Jumlah Anak Putus Sekoah jenjang Dikdasmen Tinggi dikarenakan factor ekonomi, selain itu perpindahan siswa tidak ditelusur sampai dengan sekolah lanjutan;
2. Kekurangan guru penggerak
  - Kurangnya kesadaran dan dukungan: Banyak masyarakat dan pemangku kepentingan Pendidikan belum sepenuhnya menyadari mafaat dan pentingnya sekolah penggerak;
  - Kurangnya sumber daya : Termasuk dan fasilitas dan pengjar yang berkualitas;
  - Keberlanjutan program sekolah penggerak hanya berjalan sementara waktu atau mengandalkan dan dukungan eksternal.

3. Kemampuan Literasi dan Numerasi berada di bawah rata-rata nasional:
  - Rendahnya kualitas pembelajaran adalah tidak dilakukannya aktivitas refleksi dalam pembelajaran
  - Pemahaman dan aspek refleksi belum menjadi perhatian Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru;
  - Belum secara menyeluruh memahami transformasi pembelajaran;
  - Optimalisasi platform masih cukup rendah

## B. KESEHATAN

### 1. Permasalahan Jumlah Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Barat masih kurang, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, jumlah dokter di provinsi ini masih di bawah standar WHO yaitu 1:1000, sedangkan di Sulawesi Barat rasionya masih sekitar 1:5864, termasuk jumlah perawat dan bidan yang masih kurang dari standar rasio dari WHO, puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan yang lengkap. Dampak yang di timbulkan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengakibatkan penumpukan pada antrian pasien
- Keterlambatan penanganan pasien
- Kurangnya layanan kesehatan yang komprehensif

### 2. Permasalahan Distribusi Obat-obatan dan Alat Kesehatan

Masih ada masalah dengan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Sulawesi Barat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi menunjukkan bahwa beberapa puskesmas di daerah ini masih mengalami kekurangan stok obat-obatan dan alat kesehatan yang penting untuk diagnosis dan pengobatan. Dampak yang di timbulkan adalah sebagai berikut :

- Layanan kesehatan yang terbatas
- Kesulitan dalam mendiagnosis penyakit
- Keterlambatan penanganan pasien
- Pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan
- Beban biaya kesehatan bagi masyarakat untuk membeli obat di apotek
- Tertundanya proses penyembuhan

### 3. Permasalahan Ketimpangan Fasilitas Kesehatan

Permasalahan fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Barat, seperti di banyak wilayah Indonesia, masalah tersebut menjadi perhatian serius yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil dan terluar. 49,6% masyarakat pedesaan di Sulawesi Barat masih kesulitan mengakses Puskesmas dan 37,7% masyarakat pedesaan di Sulawesi Barat masih kesulitan mengakses rumah sakit.

(Riset Kesehatan Dasar 2018). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut antara lain :

- Masyarakat di daerah terpencil dan terluar kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
- Keterlambatan penanganan pasien.
- Meningkatnya angka kematian, terutama di daerah terpencil.
- Ketidakadilan dalam akses kesehatan.

kurangnya fasilitas kesehatan dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan kesehatan yang tersedia. Puskesmas dan rumah sakit di daerah pedesaan sering kali memiliki keterbatasan dalam peralatan medis dan obat-obatan yang tersedia. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan tenaga medis dalam melakukan diagnosis yang akurat dan memberikan perawatan yang tepat kepada pasien. Selain itu, kekurangan fasilitas kesehatan juga dapat menghambat upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di masyarakat. Program-program kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyuluhan kesehatan mungkin tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

4. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan Yang Masih Kurang  
Masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan praktik kesehatan yang baik. Program-program pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan, serta masih tingginya kebiasaan merokok, kurang olahraga, dan konsumsi makanan tidak sehat. Dampak yang ditimbulkan antara lain:
  - Meningkatnya angka penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, stroke, dan jantung
  - Beban biaya kesehatan bagi masyarakat
  - Menurunnya kualitas hidup

5. Masih Tingginya Kematian Ibu dan Bayi  
Di Sulawesi Barat, tingkat kematian ibu dan bayi masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian yang mendalam. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Sulbar masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Menurut data terbaru tahun 2023 sebesar 43 AKI, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yaitu 30 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu meliputi akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya perawatan prenatal dan pasca-natal, serta kekurangan tenaga medis yang berkualitas di daerah

pedesaan. Sedangkan untuk kematian bayi tahun 2022 tercatat 498 kasus kematian, angka tersebut sangat jauh dari target nasional yaitu 27 per 1.000 kelahiran hidup. Dampak yang di timbulkan :

- Setiap kematian ibu dan bayi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat.
- Masa depan anak-anak yang kehilangan ibu menjadi terancam.
- Kematian ibu dan bayi dapat menyebabkan trauma dan gangguan emosional bagi keluarga.
- Depresi, kecemasan, dan rasa bersalah yang mendalam. Faktor yang mendasari :
- Akses Pelayanan Kesehatan yang Terbatas:
  - o Masyarakat di daerah terpencil dan terluar kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai.
  - o Kurangnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan di daerah terpencil.
- Rendahnya Kesadaran Masyarakat:
  - o Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan bayi.
  - o Masih tingginya praktik budaya yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi.
- Gizi Buruk:
  - o Kekurangan asupan gizi pada ibu dan bayi dapat meningkatkan risiko kematian.
- Keterlambatan Mencari Bantuan Medis:
  - o Masih banyak ibu dan bayi yang terlambat mencari bantuan medis saat mengalami komplikasi.

#### 6. Masih Tingginya Angka Prevalensi Stunting

Pada tahun 2023 berdasarkan data riset Survey Kesehatan Indonesia (SKI), Sulawesi Provinsi Sulawesi Barat saat ini berada pada urutan kelima tertinggi secara nasional dengan capaian sebesar 30,3 persen atau turun sebesar 4,7 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 35 persen. Pentingnya pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya terkait dengan kesehatan anak secara individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Stunting dapat menghambat potensi manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengurangi produktivitas, kreativitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, investasi dalam pencegahan dan penanganan stunting merupakan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan negara secara keseluruhan. Dampak yang di timbulkan sangat besar, di antaranya :

- Dampak pada Anak-anak:
  - o Gangguan Pertumbuhan Fisik dan Otak:
    - Anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki tubuh yang lebih pendek dan kurus dibandingkan anak-anak seusianya.

- Perkembangan otak mereka juga akan terhambat, sehingga dapat menyebabkan kesulitan belajar, memori yang lemah, dan masalah kognitif lainnya.
- Meningkatkan Risiko Penyakit:
  - Anak-anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap berbagai penyakit, seperti infeksi, diare, dan pneumonia.
  - Mereka juga lebih berisiko terkena penyakit kronis di masa depan, seperti diabetes, stroke, dan jantung.
- Menurunkan Kecerdasan dan Prestasi Sekolah:
  - Perkembangan otak yang terhambat akibat stunting dapat menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan belajar dan prestasi sekolah yang rendah.
  - Hal ini dapat berakibat pada peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan.
- Menyebabkan Gangguan Emosi dan Perilaku:
  - Anak-anak yang mengalami stunting lebih mudah mengalami depresi, kecemasan, dan masalah perilaku lainnya.
  - Hal ini dapat berakibat pada hubungan sosial yang buruk dan kualitas hidup yang rendah.
- Dampak pada Keluarga dan Masyarakat:
  - Beban Ekonomi Keluarga:
    - Biaya pengobatan dan perawatan anak-anak yang mengalami stunting dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarga.
    - Hal ini dapat menyebabkan keluarga menjadi miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
  - Meningkatnya Beban Sosial:
    - Meningkatnya jumlah anak-anak yang mengalami stunting dapat meningkatkan beban sosial bagi masyarakat.
    - Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
  - Menurunkan Produktivitas Bangsa:
    - Anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki kemampuan dan produktivitas yang lebih rendah di masa depan.
    - Hal ini dapat berakibat pada menurunnya daya saing bangsa di kancah internasional.
- Dampak pada Ekonomi Negara:
  - Meningkatnya Biaya Kesehatan:
    - Biaya pengobatan dan perawatan anak-anak yang mengalami stunting dapat menjadi beban bagi negara.
    - Hal ini dapat berakibat pada berkurangnya anggaran untuk sektor lain, seperti pendidikan dan infrastruktur.
  - Menurunnya Produktivitas Tenaga Kerja:

- Anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki kemampuan dan produktivitas yang lebih rendah di masa depan.
- Hal ini dapat berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara.

#### C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Pemenuhan tenaga Ahli yang dilatih dan tersertifikasi belum optimal. Pemenuhan tenaga Ahli yang dilatih dan tersertifikasi masih sangat dibutuhkan di Sulawesi Barat, dimana Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan sertifikat tenaga ahli sebanyak 529 orang. Beberapa jumlah tenaga kerja yang terlatih namun belum bersertifikasi perlu diikutkan sertifikasi ini. Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi 1.180 orang, hal ini masih jauh dari capaian kinerja, dimana tingkat capaian hingga pada tahun 2023 masih sebanyak 44,67 %. Jadi jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian kerja adalah sebesar 55,33 %, atau jika dikonversi dalam jumlah orang adalah sebanyak 653 orang tenaga ahli.
2. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal. Banyaknya indikasi pemanfaatan yg tdk sesuai dg peruntukannya sampai mengarah ke indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yg membutuhkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang termasuk dengan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Daerah yg dilaksanakan setiap 2 tahun sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja dan PP No. 21 thn 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Pemenuhan pengairan daerah irigasi Kewenangan Sulawesi Barat belum optimal. Luas daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi barat keseluruhan 19.114 Ha yang dilayani oleh jaringan irigasi Dari tahun 2018 sampai tahun 2023 yakni 3751.20 Ha. Dimana pada tahun 2023 luas irigasi yang ditingkatkan menjadi 60 Ha, dan direhabilitasi hanya 321 Ha karena keterbatasan anggaran jadi total irigasi yang di tingkatkan dan direhabilitasi menjadi 381, sehingga pada tahun 2023 Luas Areal D.I Kewenangan provinsi yang fungsional dalam kondisi baik sekitar 3751.20 Ha Dengan demikian rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Provinsi Sulawesi Barat yakni 19,63 %. Sehingga dapat dikatakan Belum Optimalnya pemenuhan pengairan daerah irigasi
4. Kondisi mantap jalan provinsi yang masih rendah. Tahun 2023 terjadi perubahan status jalan di beberapa ruas jalan berdasarkan SK gubernur Nomer.188.4/278/SULBAR/VII/2022 TANGGAL 11 Juli 2022 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Sulawesi Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi bebearapa perbedaan capean kondisi jalan keseluruhan pada tahun 2023, Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun Anggaran 2023 dengan panjang

528,310 km, dimana terdapat 45.84 persen dalam kondisi mantap, dan 54.16 persen dalam kondisi tidak mantap

5. Belum adanya SPAM Regional dan SPALD Regional. Sampai saat ini Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang berskala Regional/lintas Kabupaten. Saat ini perencanaan pembangunan SPAM Regional Polman-Majene yang rencananya akan mengambil sumber dari Sungai Matama, sampai saat ini melewati tahap Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Penyusunan DED perlu dilakukan Review Rencana Induk SPAM Sulawesi Barat untuk menyesuaikan kondisi terkini di lapangan dengan dokumen RISPAM yang telah ada sebelumnya. Proses pembangunannya akan di bangun bersama oleh kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Pengelolaan Pengembangan Sistem air limbah terkendala dalam hal pendataan, dimana dibutuhkan kegiatan Identifikasi dan koordinasi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala regional di wilayah Sulawesi Barat sesuai kebutuhan, Karena belum lengkapnya data SPALD baik kabupaten maupun Provinsi, dimana kegiatan ini termasuk kedalam peningkatan standar layak hidup dan masuk kedalam Program upaya penurunan stunting

#### D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Barat masih rendah. Berdasarkan data BPS, rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 adalah 59,28%. Beberapa faktor penyebabnya adalah Tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya penghasilan masyarakat membuat banyak keluarga tidak mampu membangun atau membeli rumah yang layak. Selain itu rumah tidak layak huni juga disebabkan Keterbatasan Infrastruktur dimana Banyak wilayah di Sulawesi Barat yang belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi. Hal ini menyulitkan pembangunan perumahan yang layak.
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana belum maksimal. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana merupakan salah satu Standar Pelayanan Dasar (SPM) yang wajib dipenuhi oleh Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat yang menyebabkan korban jiwa dan berbagai kerugian baik yang bersifat materil maupun non materil.

#### E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dan penanganan kebakaran
2. Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan penanganan darurat bencana.

## F. SOSIAL

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial yang tepat sasaran dan program pelatihan keterampilan juga dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas;
2. Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, diharapkan angka putus sekolah dapat berkurang dan angka partisipasi sekolah meningkat;
3. Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan. Kesehatan yang baik adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, serta memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Program kesehatan ibu dan anak, serta upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak, menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Sosial. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas sosial menjadi strategi penting dalam pembangunan sosial. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerintah berupaya menciptakan komunitas yang mandiri dan berdaya saing. Pengembangan kelembagaan sosial dan adat juga dilakukan untuk memperkuat dasar kekuatan masyarakat;
5. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana. Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir. Oleh karena itu, pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan responsif menjadi prioritas. Program mitigasi dan penanggulangan bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi kelompok rentan.

Bidang urusan sosial dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, pemerintah daerah berupaya

menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Melalui strategi pelaksanaan yang efektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

### **5.3.2.2. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **A. TENAGA KERJA**

1. Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja;
2. Masih rendahnya Kompetensi dan Skill Tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pendampingan bagi tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
4. Minimnya sertifikasi tenaga kerja

#### **B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Tingginya korban untuk kekerasan Perempuan dan anak
2. Masih tingginya perkawinan anak
3. Permasalahan beban ganda selain ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah
4. Masih marajnya tindak perdagangan orang (TPPO)
5. Perlunya peningkatan pemberdayaan Perempuan dalam kewirausahaan

#### **C. PANGAN**

1. Kurangnya kolaborasi stakeholder terkait intervensi penanganan daerah rawan pangan
2. Semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan dan lain-lain
3. Kurangnya animo para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi/registrasi terhadap produk pangan segar asal tumbuhan
4. Tingginya tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap pangan yang beragam dan bergizi
5. Redahnya pendapatan masyarakat membuat mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang murah dan mengenyangkan dari pada makanan yang bergizi
6. Kurangnya pengetahuan tentang B2SA: Banyak masyarakat Sulawesi Barat yang belum memahami pentingnya pola makan B2SA.
7. Tingkat pendidikan yang rendah: Rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat kurang memiliki akses terhadap informasi tentang B2SA.
8. Kebiasaan makan yang tidak sehat: Masyarakat Sulawesi Barat masih terbiasa dengan pola makan yang tinggi karbohidrat dan rendah protein, sayur, dan buah.
9. Stigma terhadap makanan tertentu: Ada stigma terhadap beberapa jenis makanan yang dianggap tidak bergizi, sehingga masyarakat enggan untuk mengkonsumsinya.
10. Ketersediaan pangan yang terbatas: Di beberapa daerah di Sulbar, akses terhadap pangan yang beragam dan bergizi masih terbatas.

11. Infrastruktur yang kurang memadai: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan transportasi, menyulitkan distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil.
12. Faktor Lainnya : Bencana alam: Bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, dapat mengganggu produksi pangan dan akses masyarakat terhadap pangan. Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen dan penurunan produksi pangan.

#### D. LINGKUNGAN HIDUP

1. Tingginya degradasi Lingkungan. Degradasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas manusia, perubahan iklim, dan bencana alam. Berikut adalah beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap tingginya degradasi lingkungan:
  - Polusi: Pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, pertanian, dan perkotaan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya
  - Semakin luasnya Kerusakan lahan dan terjadinya Abrasi akibat kerusakan mangrove di wilayah pesisir
  - Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  - Perubahan Iklim: Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca mengakibatkan perubahan pola cuaca, naiknya permukaan laut, dan meningkatnya frekuensi serta intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai
2. Tingginya pencemaran lingkungan akibat Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis. Pencemaran sampah dan Limbah B3 medis di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa hal yaitu Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, Banyaknya Limbah B3 yang belum Terkelola Dengan baik, dan Belum maksimalnya pengelolaan sampah dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat belum efektif merupakan masalah krusial yang harus ditangani. Beberapa penyebab utamanya yaitu yang pertama adalah kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. penyebab lainnya adalah kurangnya pembinaan dan Pengawasan terhadap Masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah masalah yang kompleks dan berdampak signifikan pada efektivitas upaya pelestarian lingkungan. Di Sulawesi Barat, beberapa

faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diantaranya:

- Belum Optimalnya pengembangan Generasi Lingkungan
  - Belum maksimalnya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah
5. Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup belum maksimal. Pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup yang belum maksimal merupakan tantangan signifikan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan data yang efektif sangat penting untuk mendukung keputusan berbasis bukti, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kondisi lingkungan. Berikut penyebab Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup belum maksimal di Sulawesi Barat:
- Belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing
  - Belum Maksimalnya akuntabilitas Data dan Informasi melalui Website sebagai media informasi

#### **E. PERTANAHAN**

1. Masih ada lahan yang belum bersertifikat. Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki potensi agraria yang besar dengan luas lahan yang cukup signifikan. Namun, permasalahan agraria, terutama terkait kepemilikan dan sertifikasi lahan, masih menjadi isu krusial yang belum terselesaikan dengan baik. Masalah ini berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari aspek hukum, ekonomi, hingga sosial. Sejumlah lahan di Sulawesi Barat, terutama yang berada di pedesaan dan daerah terpencil, masih belum memiliki sertifikat resmi. Sertifikat tanah merupakan bukti legal atas kepemilikan lahan, yang diperlukan untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pemiliknya. Ketiadaan sertifikat tanah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk sengketa lahan, dan ketidakpastian hukum. Permasalahan lahan yang belum bersertifikat di Sulawesi Barat merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan, sehingga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi di Sulawesi Barat
2. Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah. Kasus sertifikat ganda terjadi ketika dua atau lebih sertifikat tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah yang sama. Di Sulawesi Barat, insiden ini sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dalam konflik berkepanjangan akibat klaim kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Sertifikat ganda terjadi ketika lebih dari satu sertifikat dikeluarkan untuk bidang tanah

yang sama, menciptakan situasi di mana beberapa pihak mengklaim kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Di Sulawesi Barat, fenomena ini cukup sering ditemui, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian pengawasan administratif yang memadai.

3. Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan. Konflik pertanahan di Sulawesi Barat sering kali terjadi antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan. Banyak masyarakat lokal yang merasa hak atas tanah mereka diabaikan atau tidak diakui, sementara perusahaan dan pemerintah sering kali mengklaim lahan tersebut untuk pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam. Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan di Sulawesi Barat merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif. Dengan komitmen dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta adanya upaya yang berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera di Sulawesi Barat.
4. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T). Saat ini, ketimpangan P4T di Sulawesi Barat terlihat dari distribusi tanah yang tidak merata, di mana sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir individu atau perusahaan besar, sementara masyarakat lokal, terutama petani kecil dan masyarakat adat, memiliki akses yang sangat terbatas terhadap lahan. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam atau memanfaatkannya untuk keperluan lain yang produktif.

#### F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan profil kependudukan.

#### G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

#### H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### I. PERHUBUNGAN

1. Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan. Di Sulawesi Barat, beberapa faktor mungkin telah menghambat perkembangan sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan diantaranya keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya yang kurang memadai, terminal yang tidak cukup, dan akses yang terbatas ke pelabuhan dan bandara; Pendanaan yang terbatas mungkin menjadi hambatan besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi; Kurangnya perencanaan yang matang dan koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta dapat menghambat pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, dan Faktor-faktor

sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi perkembangan sistem transportasi.

2. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut di Sulawesi Barat merupakan isu yang krusial dan berdampak langsung pada kesejahteraan serta keselamatan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini yaitu: Ketersediaan rambu dan marka jalan yang masih minim, terutama di daerah terpencil, menyebabkan ketidakjelasan bagi pengguna jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan, Kurangnya penerangan di jalan-jalan utama dan daerah pedesaan membuat pengendara rentan terhadap kecelakaan, terutama pada malam hari, dan anyak kendaraan, baik darat maupun laut, yang tidak memenuhi standar keselamatan karena kurangnya perawatan atau usia kendaraan yang sudah tua.
3. Belum optimalnya pergerakan penumpang dan barang pada pelabuhan dan Bandara. Belum optimalnya pergerakan penumpang dan barang pada pelabuhan dan Bandara di Sulawesi Barat dikarenakan jumlah penumpang dan barang yang masuk ataupun keluar dari Sulawesi Barat jumlahnya sedikit. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh Kurangnya integrasi antara pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi darat lainnya dapat menghambat pergerakan penumpang dan barang antar moda transportasi dan Kurangnya investasi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan fasilitas di pelabuhan dan bandara dapat menyebabkan penurunan daya saing dan kurangnya daya tarik bagi investor dan operator transportasi
4. Belum adanya fasilitas/sarana transportasi yang dikelola berdasarkan kewenangan yang ada sesuai undang-undang. Fasilitas/sarana transportasi seperti terminal, bandara, maupun pelabuhan belum ada yang dikelola oleh provinsi secara optimal, kebanyakan fasilitas/sarana transportasi di Sulawesi Barat adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang dikelola melalui instansi vertikal
5. Masalah kewenangan dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi baik kabupaten maupun pusat sehingga terdapat program kegiatan yang belum dapat terlaksana atau dijalankan secara maksimal seperti rencana pembangunan Bandara Polewali Mandar, Bandara Pasangkayu dan Pengembangan Bandara Sumarorong. Balai/Taman Uji yang berfungsi hanya satu se Sulawesi Barat yaitu di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga UJI KIR kendaraan terkendala
6. Masih terbatasnya SDM terutama SDM ketransportasian. Keterbatasan SDM transportasi ini berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Selain itu, minimnya pengetahuan dan keterampilan di bidang transportasi juga menyebabkan sulitnya menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi

**J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
2. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

1. Dukungan diversifikasi dan kualitas produk dari pelaku usaha yang masih rendah
2. Masih kurangnya media informasi terkait produk-produk yang dipamerkan dalam bentuk brosur, katalog dan website
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

**L. PENANAMAN MODAL**

1. Belum tersedianya validasi data terkait peta potensi dan peluang investasi maupun UMKM yang siap untuk dimitrakan dengan usaha berskala nasional.
2. Belum tersedianya Potensi unggulan yang berbasis IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang siap ditawarkan
3. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Penanaman Modal akan berakhir di Tahun 2025
4. Belum tersedia dokumen panduan Strategi promosi investasi.
5. Masih kurangnya even-even promosi investasi
6. Belum optimalnya capaian target realisasi investasi akibat masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha melaporkan kegiatan usahanya yaitu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7. Belum terbentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
8. Belum optimalnya satu peta dan belum ditetapkannya RTRW sebagai acuan penting untuk perizinan berusaha yang menggunakan tata ruang wilayah.
9. Belum tersedianya SOP terintegrasi antara SOP administrasi di PTSP dan SOP teknis di OPD teknis.

**M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

1. Masih terdapat kepengurusan kelembagaan kepemudaan yang belum jelas
2. Data kepemudaan yang belum valid
3. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah bidang kepemudaan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga
5. Masih rendahnya Sumber daya Manusia (SDM) pelatih dan wasit cabang olahraga
6. Minimnya pembinaan atlit Tingkat pelajar dan usia dini
7. Minimnya pemberian reward kepada Atlit yang berprestasi

**N. STATISTIK**

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral dikarenakan belum optimalnya data terstruktur yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan terinput sesuai jadwal update pada portal satu data.
2. Masih minimnya kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan pimpinan, sehingga seringkali data yang dimiliki tidak tersusun rapi dan tidak tercatat dengan baik, sehingga banyak dari kamus data yang terdapat pada portal data sudah merupakan data agregat atau beberapa data juga menjadi kurang berkualitas.

#### O. PERSANDIAN

1. Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan rendahnya pembangunan aplikasi perangkat daerah yang memenuhi standart teknis.
2. Masih minimnya SDM yang memahami tentang keamanan informasi pada masing-masing perangkat daerah.

#### P. KEBUDAYAAN

1. Masih kurangnya OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) yang terdata, dikembangkan dan dilestariakan

#### Q. PERPUSTAKAAN

1. Kurangnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan/fungsional pustakawan belum memadai
3. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan
4. Belum memiliki regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan
5. Kurangnya jumlah koleksi bahan Pustaka
6. Perlunya pengembangan perpustakaan multimedia

#### R. KEARSIPAN

1. Belum tersedianya sarana penyimpanan arsip/depo arsip
2. Belum tersedianya record centre di setiap OPD/pencipta arsip
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan belum memadai
4. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan
5. Penataan dan pengelolaan arsip pengelolaan arsip belum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

### **5.3.2.3. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan**

#### A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi
2. Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan
3. Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial/Kawasan

4. Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang dikelola secara spasial/Kawasan (one village one product)
5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan
6. Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan
7. Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
8. Masih belum optimalnya upaya pengawasan SDKP
9. Minimnya kualitas sumber daya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan

#### B. PARIWISATA

1. Sarana dan Prasarana di objek wisata yang masih minim
2. Dukungan proses keuangan belum optimal
3. Akses ke lokasi objek wisata masih belum lancar
4. Dukungan SDM yang belum optimal
5. Kolaborasi antar stakeholder yang masih kurang intens

#### C. PERTANIAN

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani
2. Masih Rendahnya daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultra
3. Belum adanya fluktuasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura
4. Peningkatan populasi ternak belum optimal
5. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis belum optimal
6. Produk Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal dan berdaya saing belum optimal
7. Jumlah unit usaha dan kelompok tani binaan belum optimal
8. Pertumbuhan produksi termasuk peningkatan produktivitas pada komoditas unggulan perkebunan (kakao, kelapa, kopi dan sawit) banyak dipengaruhi oleh populasi tanaman tua, dan tidak optimalnya input pada tanaman menghasilkan.
9. Adanya alih komoditas, komoditas perkebunan membutuhkan waktu tahunan baru mulai berproduksi.
10. Pekebun yang tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan berkebun, melainkan juga bekerja pada sektor lain.
11. Ekskalasi permasalahan yang makin kompleks berbanding terbalik dengan kemampuan penanganan yang dilaksanakan seiring dengan alokasi yang makin terbatas dan cenderung jangkauannya makin menurun.
12. Komoditas perkebunan adalah komoditas ekspor yang menuntut peningkatan mutu dan kualitas produksi yang berstandar internasional.

13. Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan kemajuan teknologi di sektor perkebunan. Serta peningkatan produksi dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman perkebunan
14. Penguatan kelembagaan petani dan kemitraan oleh berbagai pelaku usaha. Sumber daya petani perkebunan yang masih perlu ditingkatkan.
15. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi penunjang pembangunan perkebunan.
16. Pengawasan dan pengendalian peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsin di sektor perkebunan.
17. Peta geospasial komoditas tanaman perkebunan yang baru dapat diidentifikasi untuk sementara ada pada tanaman sawit.
18. Hak atas kepemilikan dan penggunaan lahan yang sebagian besarnya belum terdaftar di pertanahan.
19. Kemajuan perkebunan dibutuhkan kolaborasi semua sektor, dan menghindari ego sektoral.
20. Metode dan pola penanganan pengelolaan perkebunan masih kurang pembaruan.
21. Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim belum optimal.

#### D. KEHUTANAN

1. Telatnya SK Penetapan Kawasan Konservasi diterbitkan oleh kementerian LHK
2. Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan belum Rampung

#### E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

1. Belum adanya kajian geologi detail terkait kejadian bencana di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Sebagai wilayah yang berada pada pertemuan lempeng tektonik, aktivitas seismik di Sulawesi Barat cukup tinggi. Selain itu, kondisi geologisnya yang didominasi pegunungan dan perbukitan juga meningkatkan potensi tanah longsor. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kajian geologi detail dan komprehensif yang dilakukan untuk memetakan potensi bencana di Sulawesi Barat. Minimnya data dan informasi geologi yang akurat menjadi kendala dalam upaya mitigasi bencana di wilayah ini. Akibatnya, setiap kali terjadi bencana seperti gempa atau tanah longsor, dampak yang ditimbulkan cenderung lebih parah karena langkah-langkah pencegahan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kurangnya kajian geologi detail juga berdampak pada sulitnya mengembangkan sistem peringatan dini dan melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Masyarakat di daerah rawan bencana seperti Sulawesi Barat seharusnya diberikan pemahaman mengenai karakteristik bencana di wilayahnya dan bagaimana mengantisipasinya. Namun hal ini sulit dilakukan jika data geologisnya sendiri masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan kajian geologi detail di

Sulawesi Barat. Kerja sama multidisiplin antara pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar pengembangan kebijakan dan program penanggulangan bencana. Dengan demikian, diharapkan risiko dan dampak buruk akibat bencana alam di Sulawesi Barat dapat diminimalisir di masa mendatang.

2. Belum ada penetapan zona konservasi air tanah dan nilai perolehan air tanah di Sulawesi Barat. Zona konservasi air tanah sangat penting untuk melindungi daerah imbuhan air tanah. Penetapan nilai perolehan juga diperlukan agar pemanfaatan air tanah tidak berlebihan melebihi daya dukung akuifernya. Dengan belum adanya penetapan tersebut, maka pengelolaan dan perlindungan air tanah menjadi kurang optimal. Potensi terjadinya eksploitasi air tanah secara berlebihan menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan air tanah itu sendiri.
3. Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen dan masih rendahnya rasio desa berlistrik. Rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 98,71%, artinya masih ada sekitar 1,29% rumah tangga yang belum teraliri listrik. Selain itu, masih banyak desa-desa terpencil yang belum memiliki akses listrik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti letak geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya investasi pembangunan di daerah tersebut. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa ini menjadi tertinggal. Investasi infrastruktur seperti jaringan transmisi dan distribusi perlu ditingkatkan agar listrik dapat mengalir ke seluruh pelosok desa. Dengan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik yang tinggi, diharapkan kesejahteraan dan pembangunan Sulawesi Barat dapat lebih merata
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti masih minimnya data/kajian potensi EBT di Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, seperti energi panas bumi, tenaga air, tenaga surya, bioenergi, dan lainnya. Namun pemanfaatannya masih sangat minim. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan, antara lain:
  - Minimnya data dan kajian potensi EBT di Sulawesi Barat. Data akurat mengenai lokasi, cadangan, dan potensi EBT yang dapat dimanfaatkan masih sangat terbatas
  - Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait EBT. Pemahaman masyarakat Sulawesi Barat mengenai manfaat dan potensi EBT di daerahnya masih rendah
  - Terbatasnya infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Barat yang menghambat penyaluran energi dari pembangkit EBT
  - Rendahnya minat investor untuk mengembangkan proyek EBT karena kurangnya insentif dan kepastian berusaha

- eknologi pemanfaatan EBT yang digunakan umumnya masih konvensional dan kurang ramah lingkungan
- 5. Belum Optimalnya pengendalian dan pengawasan kepada pemegang IUP. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Barat dinilai masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP, seperti melakukan penambangan di luar wilayah yang diizinkan, tidak melakukan reklamasi lahan bekas tambang, dan lain sebagainya. Lemahnya pengawasan ini berpotensi merugikan negara karena potensi penerimaan dari sektor pertambangan tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan agar kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pendapatan yang optimal bagi negara. Pengawasan perlu dilakukan baik pada tahap perizinan, pelaksanaan kegiatan, hingga pascatambang
- 6. Belum adanya penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya alam yang penting di Sulawesi Barat. Namun belum ada penetapan harga patokan untuk komoditas ini di daerah tersebut. Ketiadaan harga patokan dapat menyebabkan potensi kerugian negara/daerah karena penerimaan dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan tidak optimal. Penetapan harga patokan diperlukan agar ada kepastian dan standarisasi harga jual mineral bukan logam dan batuan di Sulawesi Barat. Hal ini penting untuk menghindari praktik jual beli di bawah harga pasar yang merugikan negara. Pemerintah daerah Sulawesi Barat perlu segera menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan melalui peraturan daerah atau keputusan gubernur. Penetapan harga patokan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan sekaligus mencegah praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.

#### F. PERDAGANGAN

1. Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang;
4. Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.

#### G. PERINDUSTRIAN

1. Rendahnya pelaporan pelaku industri melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
2. Belum adanya penjabaran teknis Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3. Fasilitas pendukung pelaku IKM yang telah mendapatkan bantuan peralatan belum memadai

4. Kompetensi pelaku industri dalam mengoperasikan peralatan masih kurang

#### H. TRANSMIGRASI

1. **Infrastruktur yang Belum Memadai.** Salah satu permasalahan utama dalam bidang transmigrasi adalah kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah-daerah transmigrasi. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan sering kali belum tersedia atau belum dalam kondisi yang baik. Hal ini menghambat mobilitas dan akses masyarakat transmigran terhadap layanan dasar;
2. **Kurangnya Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi.** Masyarakat transmigran sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti lahan pertanian yang produktif, pasar, dan modal usaha. Keterbatasan ini menghambat mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
3. **Ketidakpastian Kepemilikan Lahan.** Permasalahan legalitas dan kepemilikan lahan sering menjadi hambatan bagi transmigran. Ketidakjelasan status lahan dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam berinvestasi untuk pengembangan lahan pertanian atau usaha lainnya.
4. **Keterbatasan Keterampilan dan Pendidikan.** Banyak transmigran yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang terbatas. Hal ini membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja dan mengembangkan usaha produktif. Keterbatasan ini juga menghambat mereka untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan lahan atau usaha.
5. **Kurangnya Akses Terhadap Layanan Kesehatan.** Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi permasalahan bagi masyarakat transmigran. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga medis di daerah transmigrasi membuat layanan kesehatan sulit dijangkau, sehingga kesehatan masyarakat sering terabaikan.
6. **Integrasi Sosial dan Budaya.** Integrasi sosial dan budaya antara transmigran dengan masyarakat lokal sering kali menghadapi tantangan. Perbedaan adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan dapat menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan, yang pada akhirnya menghambat proses integrasi dan kohesi sosial.

Permasalahan dalam bidang urusan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan penanganan yang komprehensif dan terencana. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, akses ekonomi, legalitas lahan, keterampilan dan pendidikan, layanan kesehatan, serta integrasi sosial, diharapkan program transmigrasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak, perlu mengimplementasikan strategi pembangunan yang terarah dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **5.3.2.4. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Umum**

##### **A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

1. Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial dan politik

#### **5.3.2.5. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Penunjang**

##### **A. PERENCANAAN**

1. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah. Rencana pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sinkron dengan rencana pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan program dan kegiatan pembangunan antara pusat dan daerah seringkali tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Akibatnya, anggaran pembangunan seringkali tidak efektif karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak selaras antara pusat dan daerah. Selain itu, pencapaian target pembangunan nasional juga menjadi terhambat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah demi tercapainya efektivitas pembangunan nasional.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana. Sumber daya perencana saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas, jumlah perencana yang ada tidak mencukupi untuk menangani seluruh perencanaan pembangunan di daerah. Sementara dari sisi kualitas, banyak perencana yang belum memiliki kompetensi memadai dalam perencanaan pembangunan. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak optimal. Banyak program prioritas daerah yang tertunda karena keterbatasan perencana. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan juga belum memadai karena minimnya keahlian perencana. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perencana menjadi penting untuk dilakukan. Upaya rekrutmen perencana berkompeten perlu digalakkan. Sementara itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas juga perlu diberikan kepada perencana yang sudah ada agar mereka memiliki kemampuan perencanaan yang memadai. Dengan sumber daya perencana yang mumpuni, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas
3. Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan. Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan forum musyawarah tahunan mulai dari tingkat desa hingga nasional untuk menampung aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan. Namun, seringkali usulan prioritas dari masyarakat melalui musrenbang belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan anggaran, ketidakselarasan usulan dengan rencana pembangunan, atau lemahnya advokasi

kelompok masyarakat. Akibatnya, banyak program prioritas masyarakat tidak terwujud meskipun sudah diusulkan melalui mekanisme resmi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas musrenbang dan advokasi masyarakat agar aspirasi dapat tertampung lebih optimal dalam perencanaan pembangunan

4. Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal. Basis data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, saat ini basis data dan informasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. basis data dan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terintegrasi antar instansi terkait perencanaan pembangunan. Data masih tersebar dan belum terkelola dengan baik. Akibatnya, perencanaan pembangunan daerah seringkali tidak tepat sasaran dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Program kerap tumpang tindih antar instansi. Diperlukan upaya penguatan basis data dan informasi daerah, mulai dari pendataan, integrasi data, hingga analisis data yang mendalam. Basis data yang kuat akan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif

## **B. KEUANGAN**

1. Proses migrasi aplikasi SIPD.GO.ID ke SIPD.RI menghambat proses pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban)
2. Masih adanya Pemda Kabupaten yang tidak mengikuti rekomendasi dari hasil evaluasi R-APBD;
3. Masih ada beberapa OPD yang tidak tepat waktu dalam melakukan rekonsiliasi.
4. Kurang tepatnya OPD dalam menyusun anggaran kas (seringnya permintaan pergeseran oleh SKPD);
5. Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang sampai saat ini bermasalah sehingga proses pencairan DAK Fisik tahap pertama belum salur.
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman OPD selaku pengguna barang dalam melakukan penertiban dan pengamanan aset;
7. Masih banyaknya BMD pada OPD yang belum optimal penggunaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Kondisi aset lainnya yang masih banyak belum ditindaklanjuti melalui penghapusan BMD
9. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak;
10. Masih tingginya angka tunggakan PKB baik pribadi maupun milik Pemda Kabupaten;
11. Masih kurang akuratnya data dari stakeholder terkait (dealer, finance, perusahaan pemakai air permukaan, wapu BBM)

**C. KEPEGAWAIAN**

1. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
2. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
3. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai

**D. PENDIDIKAN PELATIHAN**

1. Belum optimalnya kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Barat ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN

**E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.

**5.3.2.6. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pendukung**

**A. SEKRETARIAT DAERAH**

1. Realisasi anggaran tidak maksimal, disebabkan adanya sebesar 40% dari nilai UP yang tidak dapat terserap/digunakan karena tersimpan pada Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang sampai saat ini belum dapat digunakan
2. Pelaksanaan beberapa pembiayaan terhadap aktivitas dalam pengendalian inflasi belum dapat terlaksana dikarenakan pagu yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RKPD
3. Percepatan barang dan jasa belum maksimal
4. Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya.

**B. SEKRETARIAT DPRD**

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.

**5.3.2.7. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pengawasan**

**A. INSPEKTORAT**

1. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di beberapa OPD;
2. Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Guna mewujudkan Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang nantinya berpotensi menjadi salah satu pendorong kinerja pada LU Pertanian. Kemudian, penyelenggaraan berbagai event skala besar, IKN diprediksi akan meningkat dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, harus Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyangga agar dapat memenuhi kebutuhan yang akan muncul dalam pengembangan IKN tersebut. Dibutuhkan Percepatan peningkatan kegiatan pembangunan untuk mendukung kegiatan di IKN. Pembangunan ekonomi khususnya untuk menunjang IKN tidak lain adalah bagaimana upaya pemerintah bersama masyarakat dalam meningkatkan skala perekonomian suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan seperangkat data untuk pendukung perencanaan maupun evaluasi, sehingga target sasaran setiap tahapan pembangunan tidak meleset. Salah satu data yang sangat populer di dalam setiap perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah memanfaatkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Termasuk di dalamnya berbagai indikator turunan seperti capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita, dan lain-lain. Dengan mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan serta menurunnya tingkat kemiskinan pada kurun waktu yang sama. Meskipun tidak selalu sejalan., pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu pada suatu wilayah tertentu. Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan pembangunan, meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan III-2023 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 15,05 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan tercatat sebesar 9,16 triliun rupiah. Perekonomian Sulawesi Barat tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 0,29 persen. PDB Nasional Triwulan III-2023 berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar 5.296,00 triliun rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 tercatat sebesar 3.124,90 triliun rupiah.

Pola pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nasional) dan Sulawesi Barat menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Pada Triwulan III-2023, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year on year lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang mampu tumbuh 7,50 persen. Ini merupakan yang kedua kalinya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada di atas nasional pasca Gempa Bumi mamuju tahun 2021 dan pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang mencapai 7,50 persen secara year on year tidak terlepas dari faktor basis yang rendah pada periode sebelumnya (low base effect).

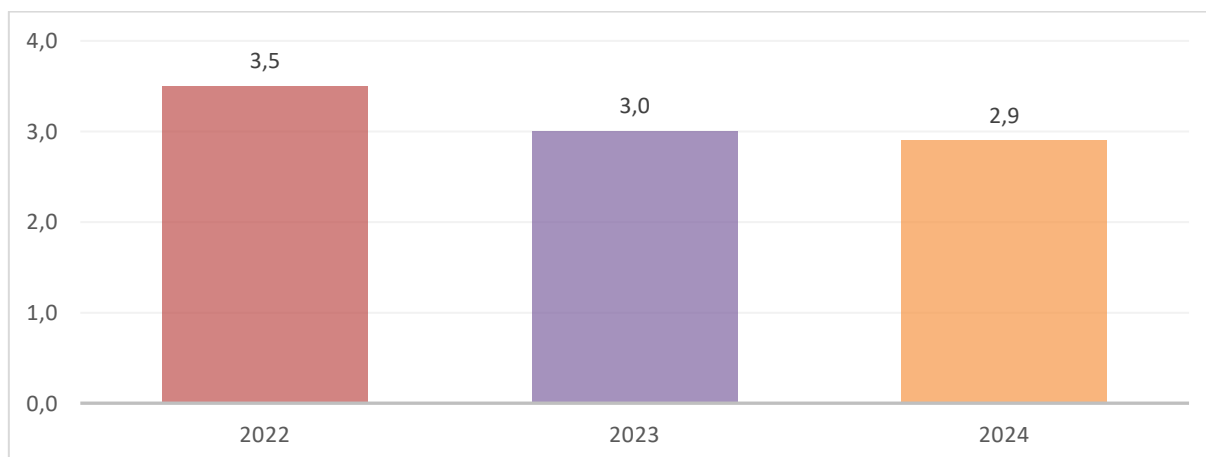
### 3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Dalam laporan *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2023, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,5% pada 2022, menjadi 3% pada 2023, dan turun lagi jadi 2,9% pada 2024. Dalam WEO edisi Juli 2023, IMF sempat memperkirakan pertumbuhan global tahun depan bisa mencapai 3%. "Proyeksi terbaru untuk tahun 2024 menurun 0,1 poin persentase dibanding proyeksi kami pada bulan Juli. Angka pertumbuhan ini juga masih jauh di bawah rata-rata historis," menurut IMF dalam laporannya.

IMF memaparkan ada sejumlah faktor yang berisiko menekan pertumbuhan ekonomi global. Risiko utamanya adalah krisis sektor real estat di Tiongkok. Krisis real estat di Tiongkok bisa semakin parah dan menjadi risiko penting bagi perekonomian global, menurut IMF. Jika harga real estat turun terlalu cepat, neraca perbankan akan memburuk dan menimbulkan dampak finansial. Tapi jika harga real estat ditopang secara artifisial, akan berdampak pada terganggunya peluang investasi di sektor lain, pengurangan aktivitas konstruksi baru, dan turunnya penjualan.

Selain itu, gejolak harga komoditas juga berpotensi membebani pertumbuhan ekonomi global. Harga komoditas bisa lebih fluktuatif jika terjadi ketegangan politik dan gangguan terkait perubahan iklim. Harga minyak bumi sudah naik sekitar 25% karena pemangkasan pasokan dari OPEC. Harga pangan masih tetap tinggi dengan meningkatnya eskalasi perang di Ukraina. Fragmentasi geoekonomi juga menyebabkan naiknya harga distribusi komoditas antarwilayah. IMF menilai gejolak harga komoditas itu bisa menaikkan laju inflasi, serta kian membebani negara-negara yang memiliki banyak utang. Di tengah situasi ini, IMF pun mendorong negara-negara untuk menguatkan kerja sama. Semua negara harus berupaya membatasi fragmentasi geoekonomi yang menghambat kemajuan bersama. Negara-negara perlu berupaya memulihkan kepercayaan terhadap kerangka kerja sama multilateral berbasis aturan yang mengedepankan transparansi, kepastian kebijakan, dan mendorong kemakmuran global bersama-sama.

**Grafik 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global**



Sumber: International Monetary Fund (IMF)

### **3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional**

Perekonomian Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi yang lemah. Perekonomian global 2024 diperkirakan masih dalam posisi yang lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 oleh International Monetary Fund (IMF) hanya sebesar 3,1 persen, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023. Pelemahan global dan tren harga komoditas yang melemah tentu harus kita waspadai karena akan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia alhamdulillah selama periode 2023 masih bisa bertahan di 5 persen atau dalam hal ini 5,05 persen. Ini karena kuartal empat tetap terjaga di atas 5 persen. kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

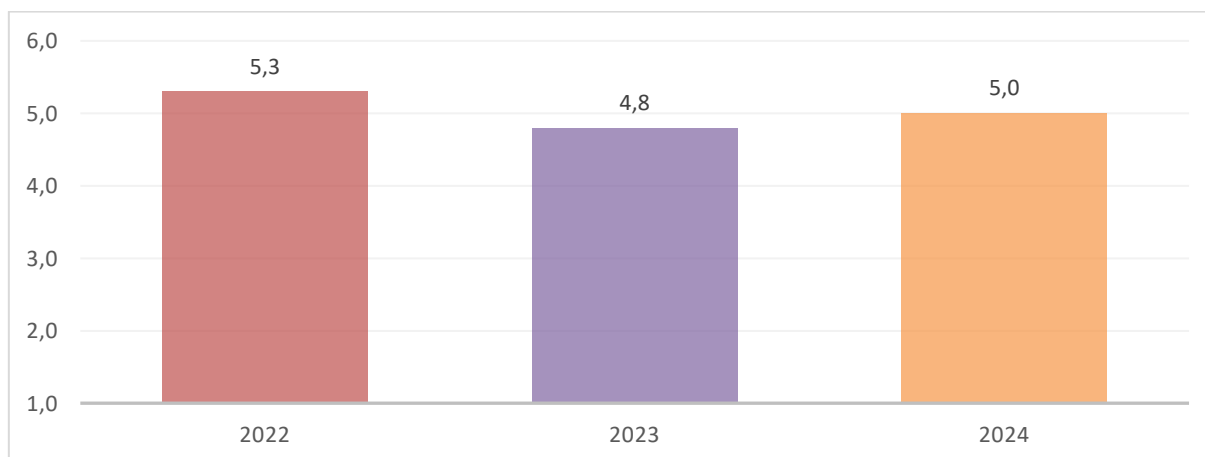
Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju, meski diterpa gelombang ketidakpastian. Artikel ini akan menjelajahi panggung ekonomi di kuartal keempat tahun 2023, menggali ke dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan mengawali kuartal pertama 2024, meretas rintangan ekonomi global yang menghadang di tahun 2024, dan menanggapi tantangan -tantangan spesifik yang melibatkan Indonesia dalam panggung yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04 persen (*year on year/yooy*), sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5 persen. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tumbuh 4,82 persen di 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga. Sementara itu, investasi tumbuh 4,40 persen, didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan investasi melambat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Belanja pemerintah turun menjadi 2,95 persen di 2023 yang disebabkan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran. Meskipun demikian, belanja pemerintah masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial pemerintah yang terus berlanjut. Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Sementara itu, peningkatan impor didorong oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu bersaing di pasar global. Secara kumulatif sepanjang 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 5,31 persen pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi di kuartal IV atau Q4 2023 antara lain dapat dilihat dari sisi neraca permintaan agregat: 1) Melambatnya konsumsi rumah tangga menjadi 4,5 persen (yoy) pada Q4 2023 dibanding Q3 2023 sebesar 5,1 persen (yoy), terutama disebabkan melemahnya (tertundanya) daya beli kelas menengah ke atas, serta relatif terbatasnya kenaikan konsumsi segmen berpenghasilan rendah di tengah kenaikan belanja sosial dan politik menjelang pemilihan umum (pemilu); 2) Perlambatan investasi menjadi 5,0 persen (yoy) pada Q4 2023, dibandingkan 5,8 persen pada Q3 2023. Investasi mesin dan peralatan serta kendaraan bermotor mengalami perlambatan seiring melemahnya ekspor dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI), sementara investasi bangunan dan infrastruktur relatif bertahan didukung belanja modal pemerintah; dan 3) Melambatnya kinerja ekspor-impor. Kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan PDB menurun menjadi 0,4 *percentage point* (ppt) pada Q4 2023 dari 0,5 ppt pada Q3 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan impor lebih tinggi ketimbang ekspor seiring perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang melemah.

**Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**



Sumber : Asian Development Bank

Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program nasional oleh Pemerintah. Perbaikan kinerja ekspor terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti CPO, batu bara dan besi baja, serta sejumlah produk manufaktur seperti kimia organik, kendaraan bermotor, dan alas kaki, yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral. Perbaikan kinerja ekspor tercatat di sejumlah wilayah, khususnya Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Jawa, dan Sumatera. Sementara itu, untuk mendorong penguatan ekonomi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu dilanjutkan dan penerapannya berfokus pada pemberian dukungan langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. Di saat yang sama Program PEN akan menstimulasi kinerja UMKM dan koperasi melalui insentif usaha dan dukungan pembiayaan.

Kondisi perekonomian secara nasional juga di pengaruhi oleh Pemandangan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemandangan ibu kota ke lokasi baru di Luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Nantinya, dampak pemandangan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi +0,1%. Pemandangan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemandangan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional serta menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal sebesar 0,3% basis poin walaupun pemandangan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam. Pemandangan ibu kota Negara ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia di antaranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik dan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong akselerasi dan optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Negara khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

### **3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah**

#### **3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Daerah**

Perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,80% (yoy) – 5,60% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2023. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Sulawesi Barat diperkirakan meningkat didorong peningkatan Konsumsi RT dan PMTB/Investasi. Konsumsi RT diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2024 disertai dengan kinerja positif dari Konsumsi LNPRT. Adanya momen Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 menjadi highlight momen positif yang dapat meningkatkan konsumsi. Lebih lanjut, kondisi ini juga

didukung dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Barat 2024 menjadi sebesar Rp2.914.958, tingkat inflasi yang mulai melandai sesuai dengan target pemerintah, dan pemberian berbagai jenis bantuan sosial. Di samping itu, adanya momen HBKN (Idul Fitri, Idul Adha dan Nataru), pembayaran tunjangan hari raya, dan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8% turut berpotensi meningkatkan konsumsi, baik dari sisi belanja barang maupun mobilitas antar daerah. Kemudian, komponen Investasi diproyeksikan meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan investasi didorong oleh rekonstruksi Kompleks Perkantoran Gubernur, pembangunan Gedung DPRD, pengembangan area Pelabuhan Belang-Belang, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Budong-Budong yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi daerah menjelaskan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

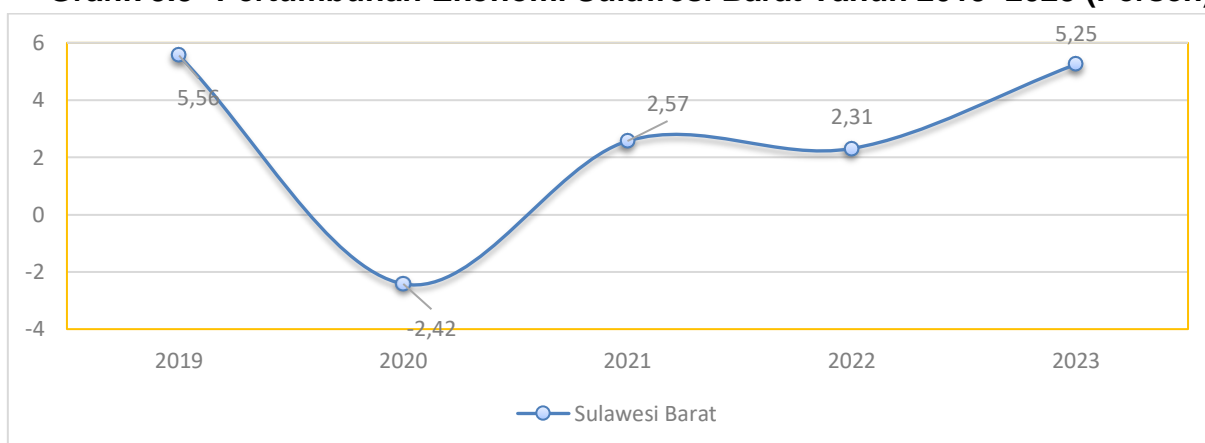
Potensi ekonomi pertanian Sulawesi Barat sebagai penopang IKN diantaranya memiliki potensi sebagai pemasok hasil pangan, pemasok hasil perkebunan, pemasok buah dan sayuran, pemasok hasil olahan pertanian ke IKN maupun wilayah lainnya. Selanjutnya, produksi padi di Sulawesi Barat masih terhitung rendah, tapi ini sekaligus menjadi sebuah potensi yang bisa dioptimalkan. Pembangunan Sulawesi Barat mempunyai kekuatan menjadi posisi strategis di jalur ALKI-II menghubungkan samudera hindia, Indonesia, dan Pusat Ekonomi Asia-Pasifik. Potensi SDA yang beragam dan besar: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, ESDM, dan Pariwisata. Kemudian beberapa kelemahan yang ditemukan diantaranya sebagian besar usaha ekonomi bersifat tradisional, pengangguran dan kemiskinan; jumlah penduduk kecil dan IPM rendah.}

Merujuk pada Laporan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Perekonomian tahun 2023 (kumulatif dari triwulan I-IV 2023) dibanding tahun 2022 (kumulatif triwulan I-IV 2022) mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen (cumulative to cumulative atau c-to-c). Besaran pertumbuhan pada tahun 2023 lebih laju dibanding pertumbuhan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,31 persen secara c-to-c. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023, sebanyak 16 kategori lapangan usaha (dari 17 kategori lapangan usaha) memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Kategori industri pengolahan menempati pertumbuhan tertinggi secara c-to-c, yakni mampu tumbuh sebesar 14,46 persen. Pada urutan selanjutnya, terdapat kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,47 persen, serta kategori transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,30 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang andil sebesar 1,68 poin dari total pertumbuhan secara c-to-c. Selanjutnya, kategori industri pengolahan mempunyai

andil pertumbuhan sebesar 1,54 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,54 poin. Sementara itu, terkontraksinya satu kategori lapangan usaha yakni kategori jasa keuangan juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan perekonomian. Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2023 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 58,55 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 35,43 triliun rupiah.

Pada skala regional di Kawasan Sulawesi Maluku Papua, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 terjadi di Maluku Utara yang mampu mencapai pertumbuhan sebesar 20,49 persen, disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 11,91 persen. Adapun Sulawesi Barat hanya mampu tumbuh sebesar 5,25 persen, menempati posisi tujuh dari empat belas provinsi di Kawasan Sulampua.

**Grafik 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2019–2023 (Persen)**

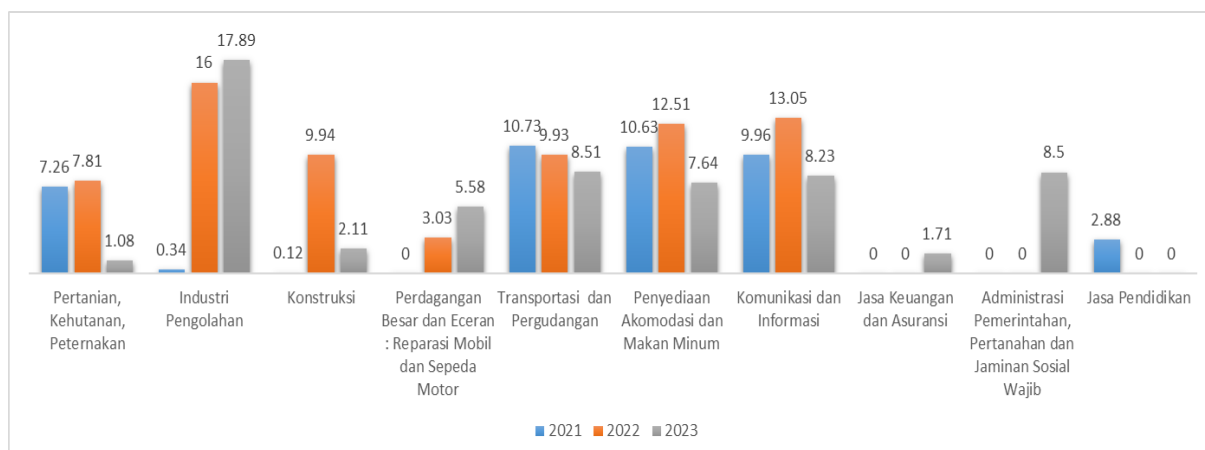


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2024

#### a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah menyebabkan perekonomian tumbuh pada beberapa kategori lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori industri pengolahan yang mampu tumbuh sebesar 17,89 persen. Selanjutnya, diikuti kategori pengadaan listrik dan gas yang mampu tumbuh sebesar 12,73 persen dan kategori transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 8,51 persen. Untuk kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan yaitu 7,64 persen yang sebelumnya pada tahun 2022 mampu mencapai 12,51 persen, diikuti dengan kategori komunikasi dan informasi sebesar 8,23 persen. Kategori jasa keuangan pada tahun 2021 berada pada angka -9,57 dan 2022 sebesar -5,21 mulai naik di angka 1,71 persen pada tahun 2023, sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2021 berada di angka -13,29 dan pada tahun 2022 pada angka -2,23, mampu naik di angka 8,5 pada tahun 2023. Untuk kategori jasa Pendidikan pada tahun 2021 berada di angka 2,88 mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar -0,20 dan pada tahun 2023 berada di angka -0,79.

**Grafik 3.4 Pertumbuhan Beberapa Kategori PDRB Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) (persen), 2021-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2024

Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori industri pengolahan yang menyumbang andil sebesar 1,87 poin dari total pertumbuhan secara y-on-y. Selanjutnya, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai andil pertumbuhan sebesar 0,65 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,53 poin. Sementara itu, terkontraksinya beberapa kategori lapangan usaha juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

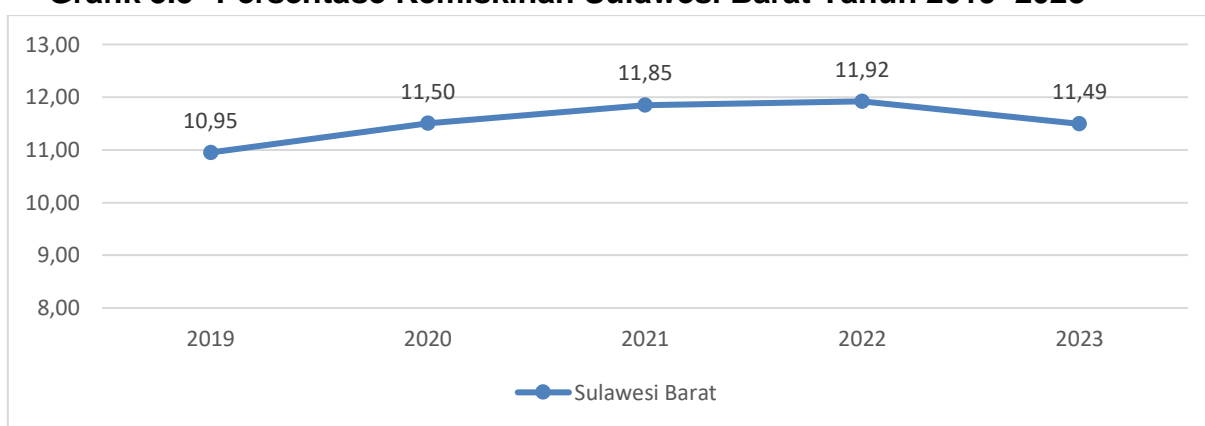
#### b. Kondisi Kemiskinan

Pada Bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 11,49 persen atau turun 0,43 persen poin dibandingkan September 2022 dan turun 0,26 persen poin dibandingkan Maret 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2023 sebanyak 164,14 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 5,12 ribu jiwa jika dibandingkan September 2022 dan mengalami penurunan sebesar 1,58 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2022. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2022 sebesar 9,33 persen turun menjadi 9,08 persen pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari sebesar 12,58 persen pada September 2022 menjadi 12,10 persen pada Maret 2023. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 77,20 persen. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan September 2022 yaitu sebesar 77,10 persen.

Penurunan absolut jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 terutama terjadi di daerah perdesaan. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sebesar 4,55 ribu jiwa jika dibandingkan September 2022 dan meningkat sebesar 0,08 ribu jiwa dibandingkan Maret 2022. Sementara itu, di daerah perkotaan pada Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 0,57 ribu jiwa absolut jumlah penduduk miskin dibandingkan bulan September 2022. Jika dibandingkan selama setahun (Maret 2022), terjadi penurunan absolut jumlah penduduk miskin sebesar 1,66 ribu jiwa.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2023 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret 2023. Jumlah sampel sebesar ± 345.000 rumah tangga secara nasional dimaksudkan bahwa data kemiskinan yang disajikan hanya sampai tingkat kabupaten.

**Grafik 3.5 Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2024

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 760,28 ribu orang, naik 10,83 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan 1,95 persen poin menjadi sebesar 71,05 pada Agustus 2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 2,27 persen, turun 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 743,01 ribu orang, mengalami kenaikan sebanyak 11,11 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,67 persen poin). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,99 persen poin). Sebanyak 73,35 persen (544,98 ribu orang) bekerja pada kegiatan informal, turun 3,90 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 2,62 persen poin, sementara itu persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,68 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

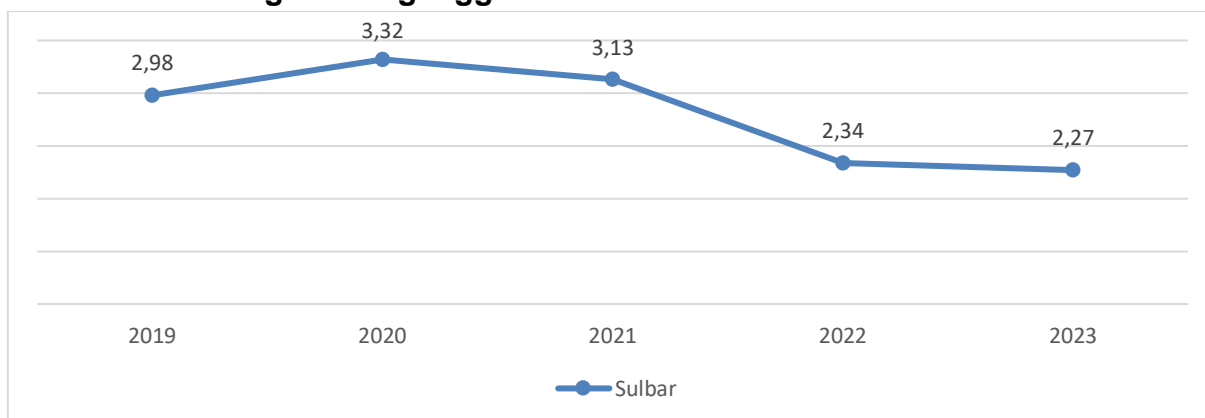
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 71,05 persen, naik 0,78 persen poin dibanding Agustus 2021 dan turun sebesar 1,95 persen poin dibanding Agustus

2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,28 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,40 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2022 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,67 persen poin); Konstruksi (1,25 persen poin); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,25 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,99 persen poin), Industri Pengolahan (1,25 persen poin), serta Transportasi dan Pergudangan (0,44 persen poin).

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2021, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,47 persen poin), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,03 persen poin), dan Konstruksi (0,62 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Industri Pengolahan (2,35 persen poin), Jasa Pendidikan (0,95 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,46 persen poin).

**Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat Tahun 2019–2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 2024

### 3.1.3.2. Proyeksi Perekonomian Daerah

Proyeksi keuangan daerah merujuk pada perkiraan atau estimasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kondisi keuangan lainnya yang akan dialami oleh suatu pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun ke depan. Proyeksi ini penting karena membantu pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan mereka secara efektif. Proyeksi keuangan daerah biasanya disusun dengan memperhatikan berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial yang dapat memengaruhi kondisi keuangan. Data historis, analisis tren, konsultasi dengan ahli keuangan, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan lokal sering digunakan dalam menyusun proyeksi ini. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (y-on-y). Peningkatan penciptaan nilai tambah menyebabkan perekonomian tumbuh pada beberapa kategori lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori industri

pengolahan yang mampu tumbuh sebesar 17,89 persen. Selanjutnya, diikuti kategori pengadaan listrik dan gas yang mampu tumbuh sebesar 12,73 persen dan kategori transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 8,51 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori industri pengolahan yang menyumbang andil sebesar 1,87 poin dari total pertumbuhan secara y-on-y. Selanjutnya, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mempunyai andil pertumbuhan sebesar 0,65 poin dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,53 poin. Sementara itu, terkontraksinya beberapa kategori lapangan usaha juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di kehidupan manusia. Sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program Sustainable Development Goals (SDG's) kedua, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Barat dari Lapangan usaha sektor pertanian yang masih menjadi pembentuk utama perekonomian Sulawesi Barat. Struktur Perekonomian Sulawesi Barat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pangsa lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB Sulbar tercatat sebesar 44,72 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,16 persen serta kelapa sawit dan olahannya. Ditinjau dari andil pertumbuhan yang diberikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan andil pertumbuhan terbesar yakni sebesar 1,68 poin dari total pertumbuhan secara c-to-c.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya dipengaruhi oleh ketiadaan kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang sempat diterapkan pada tahun 2022. Dari sisi Lapangan Usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong Inflasi agar tetap stabil melalui sinergi dan kolaborasi program dengan mengedepankan Strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif) yang dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun 2024.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang direncanakan di dalam dokumen RKP Tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

### **3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah**

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana transfer pusat dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi pembayaran.
2. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan deviden yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peningkatan kinerja layanan BLUD.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
9. Mendorong kerjasama yang intensif dengan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dalam penagihan pajak dan opsen pajak yang menjadi kewenangan masing masing.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Balai Wilayah Sungai III Sulawesi, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Instansi terkait lainnya.
11. Meningkatkan kinerja dan akurasi data yang menjadi dasar perhitungan dalam pengalokasian dana transfer oleh pemerintah pusat.

Secara umum realisasi untuk pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.020.337.607.783,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025, kebijakan Pendapatan Daerah diproyeksikan berdasarkan asumsi rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023-2025. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan analisis trend yang dilakukan serta upaya-upaya intensifikasi yang direncanakan, diasumsikan kenaikan PAD sebesar 1,48% dengan rencana kenaikan pajak daerah sebesar 3,55%, penurunan pendapatan retribusi daerah sebesar -223,93%, penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar -72,36% dan kenaikan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 11,22%. Selanjutnya gambaran realisasi tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan 2024 dan proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Tahun 2025-2026 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026**

Uraian	Realisasi APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA. 2023	Pagu (P-III) APBD TA. 2024	Proyeksi / Target 2025	Proyeksi / Target 2026
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.894.618.795.334</b>	<b>2.020.337.607.783</b>	<b>1.890.882.552.920</b>	<b>1.906.494.094.747</b>	<b>1.960.932.541.199</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>457.963.285.700</b>	<b>464.752.317.440</b>	<b>513.306.424.920</b>	<b>521.009.488.769</b>	<b>566.800.502.393</b>
Pajak Daerah	376.418.749.983	383.079.135.260	403.933.082.115	418.805.184.155	440.155.374.509
Retribusi Daerah	3.437.211.600	2.523.518.343	16.198.822.000	5.000.694.320	17.520.645.875
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.183.285.026	8.097.676.056	14.186.140.691	8.230.290.824	8.230.290.824
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69.924.039.091	71.051.987.781	78.988.380.114	88.973.319.470	100.894.191.185
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.434.593.300.534</b>	<b>1.552.930.071.938</b>	<b>1.376.167.028.000</b>	<b>1.384.689.480.010</b>	<b>1.393.297.156.540</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	18.934.592.849	24.295.688.206	1.376.167.028.000	20.240.010.000	20.240.010.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	969.853.896.329	1.013.152.771.627	1.076.196.155.000	1.064.478.597.010	1.073.086.273.540
Dana Alokasi Khusus (DAK)	402.941.678.356	506.861.104.105	299.970.873.000	299.970.873.000	299.970.873.000
Dana Insentif Daerah (DID)/Fiskal	42.863.133.000	8.620.508.000	0	0	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.062.209.100</b>	<b>2.655.218.405</b>	<b>1.409.100.000</b>	<b>795.125.968</b>	<b>834.882.266</b>
Hibah	2.062.209.100	7.814.357	1.409.100.000	795.125.968	834.882.266
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0	355.444.200	0	0	0
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0	2.291.959.848	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.894.618.795.334</b>	<b>2.020.337.607.783</b>	<b>1.890.882.552.920</b>	<b>1.906.494.094.747</b>	<b>1.960.932.541.199</b>

### **3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah menjadi komponen dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan merealisasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: gaji ASN, kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD dan BLUD; Belanja Jasa Kantor meliputi listrik, air, telepon/internet); dan belanja premi asuransi.
2. Pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran prioritas daerah serta pemenuhan pelayanan dasar.
3. Pengalokasian daerah untuk belanja wajib (mandatory spending), diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, APIP dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
4. Pengalokasian belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi.
5. Dukungan penganggaran program prioritas tahun 2025 antara lain :
  - a. Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif;
  - b. Pemenuhan Layanan Dasar untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik;
  - c. Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup;
  - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang Melayani.
6. Dukungan penganggaran program strategis pada APBD yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp.2.032.092.861.107,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025, belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.1.807.005.953.408,00 mengalami penurunan sebesar -1,72% dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penurunan rencana belanja daerah tersebut, akan memberikan dampak bagi pengalokasian belanja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga diperlukan pemfokusan belanja dalam kerangka prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

**Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026**

Uraian	Realisasi APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA. 2023	Pagu (P-III) APBD TA. 2024	Proyeksi / Target 2025	Proyeksi / Target 2026
<b>BELANJA</b>	<b>2.089.718.217.226</b>	<b>2.032.092.861.107</b>	<b>1.847.909.501.814</b>	<b>1.807.005.953.408</b>	<b>1.868.963.009.976</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.315.943.743.498</b>	<b>1.412.033.398.809</b>	<b>1.403.574.218.361</b>	<b>1.059.579.070.371</b>	<b>1.120.180.712.494</b>
Belanja Pegawai	606.681.872.761	641.336.657.512	745.041.459.978	817.238.203.430	837.669.158.515
Belanja Barang dan Jasa	628.999.130.965	707.493.944.795	537.770.548.157	204.535.388.463	250.052.603.090
Belanja Bunga	24.890.208.737	18.432.685.502	11.810.170.626	8.723.438.878	3.376.912.289
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	53.762.531.035	40.715.111.000	106.937.039.600	28.582.039.600	28.582.039.600
Belanja Bantuan Sosial	1.610.000.000	4.055.000.000	2.015.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>547.546.846.841</b>	<b>414.597.343.450</b>	<b>226.165.611.101</b>	<b>577.380.018.815</b>	<b>577.424.168.948</b>
Belanja Modal Tanah	17.898.298.672	18.719.773.147	49.900.851.520	60.562.620.000	40.562.620.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.589.673.273	156.584.512.680	47.057.291.739	78.186.778.208	78.186.778.208
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	131.955.470.775	123.131.105.879	61.241.563.643	160.134.716.408	180.134.716.408
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	272.994.673.862	106.195.431.644	63.343.682.826	263.343.682.826	263.387.832.959
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.108.730.259	2.221.525.096	559.500.000	7.039.500.000	7.039.500.000
Belanja Aset Lainnya	0	7.744.995.004	4.062.721.373	8.112.721.373	8.112.721.373
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.323.158.559</b>	<b>349.322.500</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	1.323.158.559	349.322.500	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>224.904.468.328</b>	<b>205.112.796.348</b>	<b>198.169.67.2.352</b>	<b>160.046.864.222</b>	<b>161.358.127.534</b>
Belanja Bagi Hasil	190.619.089.493	196.905.296.348	198.169.67.2.352	155.046.864.222	161.358.127.534
Belanja Bantuan Keuangan	34.285.378.835	8.207.500.000	0	5.000.000.000	0
<b>JUMLAH DAERAH</b>	<b>2.089.718.217.226</b>	<b>2.032.092.861.107</b>	<b>1.847.909.501.814</b>	<b>1.807.005.953.408</b>	<b>1.868.963.009.976</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>- 195.099.421.892</b>	<b>- 11.755.253.324</b>	<b>42.973.051.106</b>	<b>99.488.141.339</b>	<b>91.969.531.223</b>

### **3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.64.105.879.693,00 Namun untuk Tahun Anggaran 2025, diasumsikan tanpa memperhitungkan adanya SiLPA. Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. proyeksi Tahun 2026 telah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2026**

Uraian	Realisasi APBD TA. 2022	Realisasi APBD TA. 2023	Pagu (P-III) APBD TA. 2024	Proyeksi / Target 2025	Proyeksi / Target 2026
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>365.969.587.736</b>	<b>116.545.164.888</b>	<b>56.515.090.233</b>	<b>99.488.141.339</b>	<b>91.969.531.223</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	170.299.649.601	116.545.164.888	56.515.090.233	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	195.669.938.135	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.945.712.546</b>	<b>40.684.031.871</b>	<b>99.488.141.339</b>	<b>99.488.141.339</b>	<b>91.969.531.223</b>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	53.945.712.546	40.684.031.871	99.488.141.339	99.488.141.339	91.969.531.223
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>312.023.875.190</b>	<b>75.861.133.017</b>	<b>- 42.973.051.106</b>	<b>- 99.488.141.339</b>	<b>- 91.969.531.223</b>
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>116.924.453.298</b>	<b>64.105.879.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan atau penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Serta tetap memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan mengoptimalkan penerapan konsep *money follow program priority*.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi dokumen yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Tujuan dan sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran yang dijabarkan kedalam RKPD setiap tahunnya, yakni:

##### **1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah**

Kemandirian Ekonomi Daerah diarahkan pada empat sasaran utama yaitu:

- Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah
- Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin
- Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat
- Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

##### **2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya**

Pembangunan Manusia yang Unggul diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:

- Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

##### **3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana**

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:

- Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
- Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah

4. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa*

Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa diarahkan pada tiga sasaran, yaitu:

- Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing

Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Dokumen RPD Tahun 2023-2026 telah menggambarkan proses *cascading* kinerja mulai dari level tujuan, sasaran, sampai kepada program pembangunan daerah yang diikuti dengan penetapan indikator kinerja dan target setiap tahunnya. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan targetnya untuk Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026**

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target RPD 2025	Target Akhir Periode 2026
<b><i>Tujuan 1 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah</i></b>	<b>Pendapatan Perkapita</b>	<b>Juta Rupiah/Kapita/Tahun</b>	<b>39,24</b>	<b>50,29</b>	<b>54,61</b>
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,25	5,8	6,7
Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,49	9,73	9,06
Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	Indeks Gini Rasio	Poin	0,351	0,338	0,325
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,27	2,45	1,95
<b><i>Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya</i></b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>69,8</b>	<b>70,36</b>	<b>71,56</b>
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata	Indeks Pendidikan	Poin	0,6226 (2021)	0,6815	0,6986
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,6962 (2021)	0,7551	0,7722
<b><i>Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana</i></b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	<b>78,05</b>	<b>78,50</b>	<b>80,50</b>
Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	32	34,9	35,2
Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	160,08 / Tinggi	153 / Tinggi	144 / Sedang

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target RPD 2025	Target Akhir Periode 2026
<b>Tujuan 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Poin/Kategori	60,20/B	74,66BB	80,16 / A
Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai AKIP	Poin / Kategori	68,32/B	77,54 / BB	80,54 / A
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	76,631 (2022)	76,279	77,042
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Poin	2,89	2,80	3,00
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Poin	0	100	100

Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 pada tabel diatas dilaksanakan secara berkesinambungan dari Tahun ke Tahun selama periode RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional Tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 5 (lima) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari dukungan pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat serta mendorong partisipasi masyarakat

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya.

Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, dengan tema RKP 2025 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan. Prioritas intervensi kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Dalam rangka merefleksikan hal tersebut, setiap wilayah dibagi kedalam pokok – pokok intervensi kewilayahan dan prasarana. Untuk Agenda Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Agenda Pembangunan Nasional di Sulawesi Barat

<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Highlight Indikator Intervensi</b>
Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembangunan Rumah Sakit Jiwa di Kab. Mamuju</li> <li>● Penanganan anak tidak sekolah (penyediaan moda transportasi)</li> <li>● Pembangunan unit sekolah baru di Kab. Pasangkayu</li> <li>● Penurunan kematian ibu dan bayi</li> <li>● Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)</li> </ul>
Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan sarana perbibitan ternak berkelanjutan di Kab. Polewali Mandar</li> <li>● Penyediaan sarana benih tanaman perkebunan di Kab. Polewali Mandar</li> <li>● Pengembangan kawasan padi kaya gizi di Kab. Majene</li> <li>● Pengembangan kawasan bawang merah di Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar</li> <li>● Pengembangan sarana prasarana sistem rantai dingin di Kab. Mamuju</li> <li>● Revitalisasi tambak udang di Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, dan Kab. Pasangkayu</li> <li>● Penyediaan fasilitas untuk mendukung hasil penangkapan ikan terukur di Kab. Mamuju</li> <li>● Eskalasi produksi garam rakyat di Kab. Majene</li> <li>● Penyediaan perlengkapan pengujian mutu barang di Kab. Mamuju</li> <li>● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belumberlistrik yang tidak mampu atau berada pada daerah 3T di 6 kabupaten/kota</li> <li>● Pengembangan Bandara Tampa Padang, Mamuju Preservasi jalan di Kab. Mamuju (Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Jln. Martadinata, Jln. Yos Sudarso, Ruas Salubatu–Bonehau–Kalumpang–Batas Luwu Utara), Kab. Mamasa (Ruas Mamasa–Tabang, Tabone–Nosu–Pana) serta Ruas Karossa–Topoyo</li> </ul>

<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Highlight Indikator Intervensi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hilirisasi Industri Kelapa</li> </ul>
Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government, dan peningkatan kapasitas aparatur</li> </ul>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal</li> <li>● Penerapan smart digital farming</li> </ul>
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan ekonomi budaya melalui pemanfaatan cagar budaya sebagai ruang ekspresi budaya dan revitalisasi warisan budaya wastra</li> <li>● Pengendalian banjir Sungai Karema, Lumu, Mandar, dan Kalukku</li> <li>● Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan (SAR)</li> </ul>

#### **4.2.1. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

##### **A. Pendidikan**

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah
2. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Bagi Peserta Didik
3. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
4. Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik dari Keluarga yang Tidak Mampu dan Berprestasi
5. Pengembangan Boarding School
6. Olimpiade Sains dan Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional
7. Pemberian Beasiswa untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan
9. Sosialisasi Mitigasi Bencana Satuan Pendidikan
10. Sosialisasi Pencegahan, Perundungan, Kekerasan Seksual, Narkoba, Hukuman Fisik, Pencegahan Intoleransi bagi Satuan Pendidikan
11. Pelaksanaan Job Fair SMK

12. Pelatihan Manajemen bagi SDM Sekolah untuk Mendapatkan Status BLUD
  13. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Produktif.
  14. Pembangunan Talud Sekolah
  15. Pengadaan Mebel Sekolah
  16. Bantuan Alat Kesenian
- B. Kesehatan
1. Deteksi Dini dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
  2. Pendampingan Implementasi Penanganan Kasus Hepatitis
  3. Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta & TB
  4. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
  5. Kegiatan deteksi dini penyakit menular dapat mencegah penyebaran penyakit menular
  6. Pengadaan Suplemen Vitamin Pencegahan Stunting
  7. Pelatihan PDP (Pengobatan Dukungan Dan Perawatan ) Pada ODHIV
  8. Surveilans Faktor Resiko Kasus DBD di Kabupaten
  9. Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi
  10. Pelatihan ANC Lengkap Bagi tenaga Kesehatan
  11. Promosi Kesehatan
  12. Pelatihan Peningkatan Kader Posyandu
  13. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
  14. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Kadar HB Ibu Hamil dan Remaja Putri
  15. Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
  16. Kegiatan Pelaksanaan Investigasi Kontak TBC
  17. Pelatihan Pemantauan dan Penilaian Pertumbuhan Balita Bagi Petugas Kesehatan
- C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pembangunan Jalan di ruas jalan Provinsi
  2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo
  3. Survey Investigasi Desain (SID) untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai hasil identifikasi kewenangan Wilayah Sungai di Provinsi Sulawesi Barat
- D. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Prasarana Drainase permukiman yang layak untuk distribusi limbah Rumah Tangga, Air Hujan dan Menekan Pertumbuhan Stunting
  2. Prasarana Jalan Rabat beton permukiman yang layak untuk memudahkan moda distribusi masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi
  3. Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum
  4. Prasarana air bersih untuk kebutuhan sehari hari (Mandi Cuci Kakus) sekaligus mendukung pengetasan pertumbuhan stunting

5. Dokumen Perencanaan Penyediaan prasarana Drainase permukiman yang layak untuk distribusi limbah Rumah Tangga, Air Hujan dan Menekan pertumbuhan Stunting
- E. Perhubungan
1. Pengadaan Lampu Jalan
- F. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Pengadaan Kwh Untuk Masyarakat Prasejahtera
- G. Kelautan dan Perikanan
1. Pengadaan Bibit Ikan (Nila, Ikan Mas, Lele)
  2. Bantuan Mesin Katinting K3 dan mesin Dalam (Pakai Tangki)
  3. Bantuan Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga dan Roda Empat
  4. Bantuan Freezer Ikan
  5. Bantuan Coolbox
  6. Bantuan Alat Tangkap Jaring/Pukat, GPS, Purse Seine
  7. Pengadaan Kapal dan Perahu Sandeq
  8. Bantuan Pupuk Urea
  9. Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
  10. Bangunan kolam ikan (baru/rehab)
  11. Kebun budidaya rumput laut
  12. Bagang Perahu Mini
- H. Kepemudaan dan Olahraga
1. Pelatihan Kewirausahaan
  2. Peningkatan Kapasitas TOT Volley
  3. Peningkatan Kapasitas Redi Papan
  4. Rehab Lapangan Sepak Bola, Lapangan Takraw
  5. Bantuan Kelompok Wirausaha Muda
  6. Bantuan Perlengkapan Olahraga (Bola Volley, Bola Takraw, Net, Baju Olahraga,
  7. Event Turnamen Keolahragaan
  8. Sosialisasi Bahaya Ancaman Radikalisme
- I. Pangan
1. Pengadaan Bibit Itik
  2. Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Berupa Benih Sayuran
  3. Pengadaan bibit ayam
  4. Pembibitan Bibit Cabai
  5. Pembuatan kandang ayam/itik
- J. Komunikasi dan Informatika
1. Sekolah Internet Kelompok Informasi Masyarakat
- K. Koperasi dan UKM
1. Bantuan Sarana UKM Fotografi
  2. Bantuan Sarana UKM Perbengkelan Motor
  3. Pengadaan peralatan pertukangan
  4. Pemberian Bantuan Sarana Perdagangan Berupa Kendaraan Roda 2, Roda 3 dan Roda 4 Pemasar Perdagangan
  5. Pengadaan mesin menjahit

6. Pemberian Bantuan Sarana Perdagangan Berupa Sarana PKL (Coolbox, Freezer, Showcase, Lemari Etalase, Mesin Espresso, dan Alat/Peralatan Café)
  7. Bantuan Usaha Peralatan Laundry
  8. Bantuan Sarana UKM Barang Campuran
  9. Pemberian Bantuan Bahan Pokok
  10. Bantuan Peralatan Alat Percetakan
  11. Bantuan Peralatan Kue
  12. Bantuan Peralatan Galon
  13. Bantuan Usaha Peralatan Salon
  14. Bantuan Usaha Peralatan Salon
- L. Pariwisata
1. Event tahunan pariwisata
  2. Pelatihan pengelola usaha kepariwisataan
- M. Pemberdayaan Perempuan
1. Workshop Ekonomi Perempuan (Pelatihan tataboga, Pemberian alat atau modal kerja)
- N. Pertanian
1. Pengadaan Bibit Durian, Bibit Alpukat, Bibit Pala
  2. Pengadaan Bibit Bawang Merah
  3. Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan dan Pupuk, Bibit Coklat dan Kopi
  4. Prasarana pengolahan hasil kakao
  5. Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani
  6. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani
  7. Prasarana pengolahan hasil kelapa
- O. Perpustakaan
1. Pelatihan Keterampilan dengan memanfaatkan perpustakaan
- P. Sosial
1. Bantuan Sosial KUBE FM
  2. Bantuan UEP Kewirausahaan Karang Taruna
  3. Bantuan Sosial UEP
- Q. Tenaga Kerja
1. Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Jalan Tani
  2. Perluasan Kesempatan Kerja Padat karya Infrastruktur Pembangunan Rabat Beton
  3. Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Talud
  4. Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur Pembangunan saluran Buang Permanen
  5. Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Produktif Ternak Ayam
  6. Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Jembatan Gantung
  7. Pendataan sarana HI dan jamsostek diperusahaan yang ada di Sulbar
  8. Pembinaan pencegahan perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan yang ada di Sulbar

9. Job Fair/Bursa Kerja
  10. Pembangunan BLK Provinsi Sulawesi Barat
  11. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
  12. Sosialisasi Pembinaan Pengupahan Struktur dan Skala Upah diperusahaan
  13. Pelatihan Kompetensi Menjahit
  14. Pelatihan Kompetensi Tatarias dan Kecantikan
  15. Pendampingan Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan diperusahaan
- R. Transmigrasi
1. Penguatan Infrastrukturu Jalan Tani, Rabat Beton, Drainase dan Talud
- S. Urusan Penunjang
1. Hibah Rumah Ibadah
  2. Hibah Kegiatan Keagamaan lainnya.

#### **4.2.2. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan Isu Global dan Nasional sebagai Berikut:

1. Isu Global
  - a) Perubahan Paradigma Pembangunan Global  
Perubahan paradigma pembangunan global merujuk pada transformasi dalam cara pandang, pendekatan, dan strategi yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam usaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Seiring waktu, paradigma pembangunan telah mengalami beberapa perubahan penting yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.  
Perubahan paradigma pembangunan global mencerminkan evolusi pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini mencakup pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kemandirian lokal, dan keadilan dalam proses pembangunan.
  - b) Kebijakan Pro-Lingkungan, yang memperhatikan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung  
Kebijakan pro-lingkungan merupakan serangkaian langkah, peraturan, dan program yang dirancang untuk melindungi lingkungan dan

mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Kebijakan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta dalam mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan tindakan segera dan berkelanjutan. Kebijakan pro-lingkungan yang memperhatikan perubahan iklim meliputi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, Adaptasi Terhadap Dampak Iklim dan Reforestasi dan Penghijauan.

c) Adaptasi Teknologi (Society 5.0.)

Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Meskipun Society 5.0 menawarkan banyak manfaat, adaptasi teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama karena semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, ada kekhawatiran tentang pengangguran akibat otomatisasi dan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan yang tidak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data

d) Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Lebih Hijau

Dalam era modern ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik yang ramah lingkungan.

e) Penggunaan Sistem Keuangan Digital

Sistem keuangan digital telah menjadi bagian integral dari ekonomi modern, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan. Penggunaan sistem keuangan digital mencakup berbagai aspek seperti pembayaran digital, perbankan online, dan investasi digital

2. Isu Nasional

a) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam kerangka Superhub Ekonomi Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Dalam kerangka Superhub Ekonomi Nusantara, pembangunan IKN bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga transformasi ekonomi yang terintegrasi dengan berbagai sektor. Berikut adalah narasi

yang menggambarkan visi dan implementasi pembangunan IKN dalam kerangka Superhub Ekonomi Nusantara

- b) Bonus Demografi dengan SDM yang Berkualitas  
Bonus demografi merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan strategi yang komprehensif untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan, peningkatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan kesetaraan gender, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
  - c) Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Lebih Cepat  
Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang mencakup provinsi-provinsi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, memiliki potensi alam yang luar biasa namun masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengembangan KTI sebagai prioritas nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pengembangan yang lebih cepat di KTI diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dan memanfaatkan potensi yang ada.
  - d) Hilirisasi Industri yang mengedepankan prinsip Green Economy dan Blue Economy  
Hilirisasi industri dengan mengedepankan prinsip Green Economy dan Blue Economy adalah langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengembangan teknologi, peningkatan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, peningkatan kapasitas SDM, dan skema pembiayaan yang inovatif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah ini akan membantu Indonesia mencapai kesejahteraan ekonomi jangka panjang dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
3. Isu Regional
- a) Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA  
Sulawesi, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang utama Superhub Ekonomi Nusantara dan pusat industri berbasis sumber daya alam (SDA). Dengan mengoptimalkan potensi geografis, sumber daya alam, dan manusia, serta mengembangkan infrastruktur yang memadai, Sulawesi dapat memainkan peran strategis sebagai penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan pusat industri berbasis SDA. Investasi berkelanjutan dalam sektor-sektor kunci ini akan membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi Sulawesi dan Indonesia secara keseluruhan, menjadikan pulau ini sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
  - b) Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut, Udara)

Konektivitas yang baik antar wilayah darat, laut, dan udara adalah fondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan meningkatkan jaringan transportasi dan mengatasi tantangan yang ada, dapat mencapai potensi penuhnya sebagai daerah yang maju dan sejahtera, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional Indonesia.

c) Kerjasama Regional Sulawesi

Kerjasama regional di Sulawesi memiliki potensi besar untuk memperkuat integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antar provinsi-provinsi di pulau ini. Dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia, kerjasama regional dapat menjadi instrumen penting dalam memajukan Sulawesi secara keseluruhan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

d) Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Kebencanaan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang saling terkait secara kompleks. Kebencanaan alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, dan lain sebagainya sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya, perubahan lingkungan hidup seperti penebangan hutan, polusi udara dan air, serta perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana.

#### **4.2.3. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024**

Berdasarkan hal hal yang disebutkan dalam sub bab sebelumnya dan dalam rangka mengimplementasikan Tahapan Pertama RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 serta RPD Tahun 2023 – 2026 maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yaitu “**Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**”, yang kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut: (1) Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Inklusif (2) Pemenuhan Layanan Dasar Untuk Kualitas Hidup yang lebih baik (3) Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidup, dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital yang melayani.

Berdasarkan Prioritas yang dijabarkan sebelumnya, Pemerintah Sulawesi Barat menjabarkan prioritas tersebut kedalam sasaran sebagai berikut :

1. **Prioritas Provinsi 1**

Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

**Sasaran:**

- 1.1. Meningkatkan Produktivitas dan nilai tambah seluruh sub sektor pertanian
- 1.2. Menguatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah

1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja dan Daya Saing Ekonomi

**2. Prioritas Provinsi 2**

Pemenuhan Layanan Dasar untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik

**Sasaran:**

- 2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan
- 2.2. Mempercepat pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
- 2.3. Meningkatkan Intervensi Penanganan Stunting Secara Efektif dan Terintegrasi

**3. Prioritas Provinsi 3**

Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup

**Sasaran:**

- 3.1. Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah
- 3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

**4. Prioritas Provinsi 4**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang Melayani

**Sasaran:**

- 4.1. Menguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital
- 4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Berfokus pada Kompetensi dan Kinerja
- 4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Pasca Pilkada Serentak 2024

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat menjadi panduan pemerintah kabupaten dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025 yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 berbasis sinkronisasi dan integrasi merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten.

#### **5.1. Arah Kebijakan Umum**

##### **5.1.1 Standar Pelayanan Minimal**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Pendidikan

Pentingnya Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berdasarkan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan yang perlu ditingkatkan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Terdapat 10 (sepuluh) indikator prioritas kabupaten yaitu:

- a. Indikator PAUD. Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun, jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten yang bersangkutan.
- b. Indikator Dasmen. Angka partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam, jumlah warga negara usia -15 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang Pendidikan. Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam Pendidikan pada seluruh jenjang Pendidikan. jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten yang bersangkutan.
- c. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 Kesetaraan, jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (\*), Partisipasi anak usia 7-8 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- d. Kemampuan Literasi. Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar; pendidikan menengah, kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi. Merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi)
- e. Kemampuan Numerasi, rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (pada pelayanan dasar Pendidikan dasar). Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan

- mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.
- f. Indikator PAUD. Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkbn minimal akreditasi B, Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evakuasi kelayakan dilakukan oleh Badan Aktreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrument akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan terhadap standar nasional Pendidikan. Persentase jumlah satuan PAUD yang akreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.
  - g. Indikator PAUD. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4, pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/DIV, Pendidik PAUD pada satuan Pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam undang0undang guru dan dosen, persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1.D4 di kota/kabupaten.
  - h. Indikator dasmen, iklim keamanan. Indeks iklim keamanan di satuan Pendidikan, Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan Pendidikan, perlindungan, hukuman fisik, pelecehan seksual dan aktivitasbnarkoba di lingkungan satuan Pendidikan. Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis dan rasa aman terhadap perundungan, hukuma fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras dan narkoba berdasarkan survey lingkungan belajar
  - i. Iklim kebhinekaan di satuan Pendidikan, Konmdisi satuan Pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan Pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen berkebangsaan, Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar.
  - j. 10. Iklim inklusivitas di satuan Pendidikan, Iklim inlusivitas menyangkut bagaimana satuan Pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas maupunlatar belakang sosial budaya. Nilai trerata iklim inklusivitas meliouti layanan disabilitas, CBI, sikap terjadap disabilitas dan fasilitas satuan Pendidikan disabilitas berdasarkan survey lingkungan belajar.

## 2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di tingkat kabupaten/kota merupakan standar yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Berikut adalah komponen utama dan strategi untuk mencapai SPM kesehatan di kabupaten ialah (i) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) meliputi Pelayanan Antenatal: Minimal empat kali selama kehamilan, Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan: Penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, Pelayanan Pasca Persalinan: Pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir minimal tiga kali setelah persalinan dan Imunisasi Lengkap: Penyediaan imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan anak; (ii) Pelayanan Kesehatan Reproduksi melakukan Pemeriksaan dan Pengobatan

Penyakit Menular Seksual (PMS): Akses terhadap layanan untuk diagnosis dan pengobatan PMS dan Konseling dan Tes HIV: Penyediaan layanan konseling dan tes HIV untuk ibu hamil dan populasi berisiko; (iii) Pelayanan Gizi melalui pemantauan gizi anak dan suplementasi gizi lainnya; (iv) Pelayanan Kesehatan Dasar; (v) Pelayanan Kesehatan Lingkungan meliputi Sanitasi dan Air Bersih: Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, Pengelolaan Limbah Medis: Pengelolaan limbah medis yang aman dan sesuai standar; (vi) Pelayanan Kesehatan Sekolah lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan :**

SPM Kesehatan Provinsi	
Kinerja Provinsi	1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
SPM Kesehatan Kab/Kota	
Siklus Hidup	1. Ibu Hamil 2. Ibu Bersalin 3. Bayi Baru Lahir 4. Balita (12-59 bulan) 5. Usia Pendidikan Dasar (7-15 tahun) 6. Usia Produktif (15-59 tahun) 7. Usia Lanjut (60+ tahun)
Penyakit Tidak Menular	8. Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas 9. Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas 10. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Penyakit Menular	11. Orang Terduga Tuberkulosis 12. Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

**3. Pekerjaan Umum**

SPM Bidang Pekerjaan Umum mencakup SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota. SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub-bidang Air Minum; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk sub-bidang air limbah.

Materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

**4. Perumahan Rakyat**

SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud untuk Daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada Kawasan bukan fungsi permukiman;

- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
  - e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
  - b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
  - c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota perlindungan masyarakat; dan
  - d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Agar mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum dapat tercapai secara maksimal, idealnya keempat faktor tersebut harus disiapkan secara terintegrasi atau bersama-sama. Artinya, mutu pelayanan dasar dalam pelayanan sub urusan trantibum tidak semata-mata melihat pada seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur saja, tetapi juga bagaimana kemampuan atau dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan standar operasional prosedur yang dibutuhkan, sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan, serta upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).

Diharapkan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi dapat melakukan Proses perencanaan yang sepenuhnya berbasis SPM, Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan SPM, Menjadikan prioritas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Membuat pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran dan Membuat pemetaan kawasan atau daerah terdampak atas penegakan perda.

### **5.1.2 8 (Delapan) Agenda Prioritas**

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan hingga diadakannya Pemilihan Kepala Daerah, Kementerian Dalam Negeri sementara ini menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat untuk menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai Kepala Daerah hingga dilantiknya Kepala Daerah definitif. Dalam menjalankan tugas Penjabat Gubernur, terdapat 8 Agenda Prioritas yang telah ditetapkan, diantaranya:

#### **1. Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, Luber Jurdil, Aman dan Damai**

Pilkada Serentak 2024 merupakan perhelatan politik yang sangat penting di Indonesia, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di

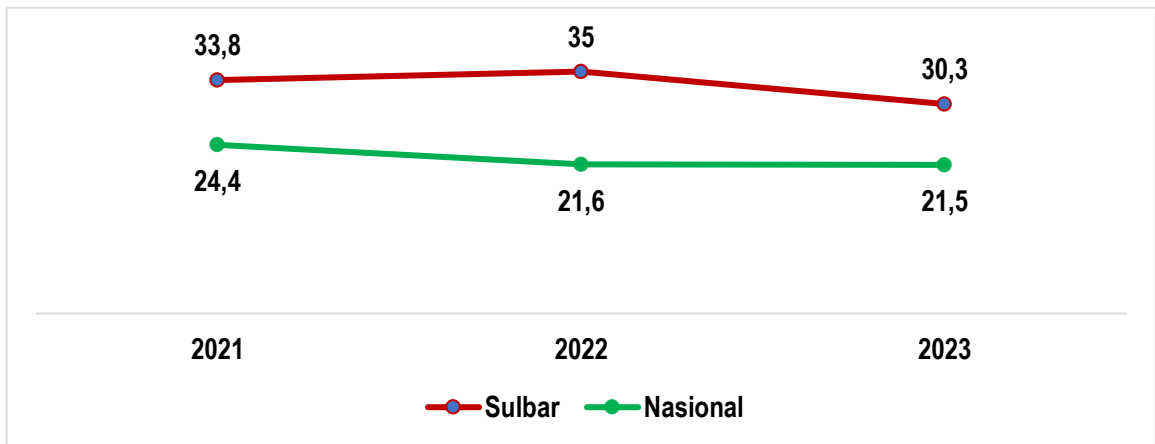
berbagai wilayah. Untuk memastikan Pilkada berjalan sukses, beberapa prinsip utama harus dijaga: Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia), Jurdil (Jujur dan Adil), aman, dan damai. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yakni, (i) Pendidikan dan Sosialisasi Pemilih, melakukan kampanye edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya Pilkada, hak dan kewajiban pemilih, serta cara pemilihan yang benar; (ii) Informasi Kandidat: Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai para calon kepala daerah, termasuk visi, misi, dan program kerja mereka; (iii) Pengawasan dan Penegakan Hukum; (iv) Pengawasan Independen: Meningkatkan peran lembaga pengawas pemilu independen seperti Bawaslu untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan; (v) Penegakan Hukum: Menindak tegas segala bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi; (vi) Keamanan dan Ketertiban; (vii) Koordinasi Keamanan: Bekerjasama dengan aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk menjaga keamanan selama proses pemilihan berlangsung; (viii) Pengaturan Logistik: Memastikan distribusi logistik pemilu (kertas suara, kotak suara, dll.) dilakukan dengan tepat waktu dan aman; (ix) Netralitas dan Profesionalisme Penyelenggara; (x) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: dengan melakukan Gerakan Sadar Pilkada dan mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta sosialisasi melalui Media Sosial untuk kampanye positif dan informasi yang berkaitan dengan Pilkada; (xi) Pencegahan Konflik dengan melakukan dialog dan mediasi serta pemantauan potensi konflik.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan Luber Jurdil, aman, dan damai, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan legitimate.

## **2. Penanganan Gizi Buruk, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem**

Masalah anak pendek (Stunting) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Permasalahan Stunting merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan mengatasi Stunting sebagai salah satu tantangan utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia berkualitas dalam mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

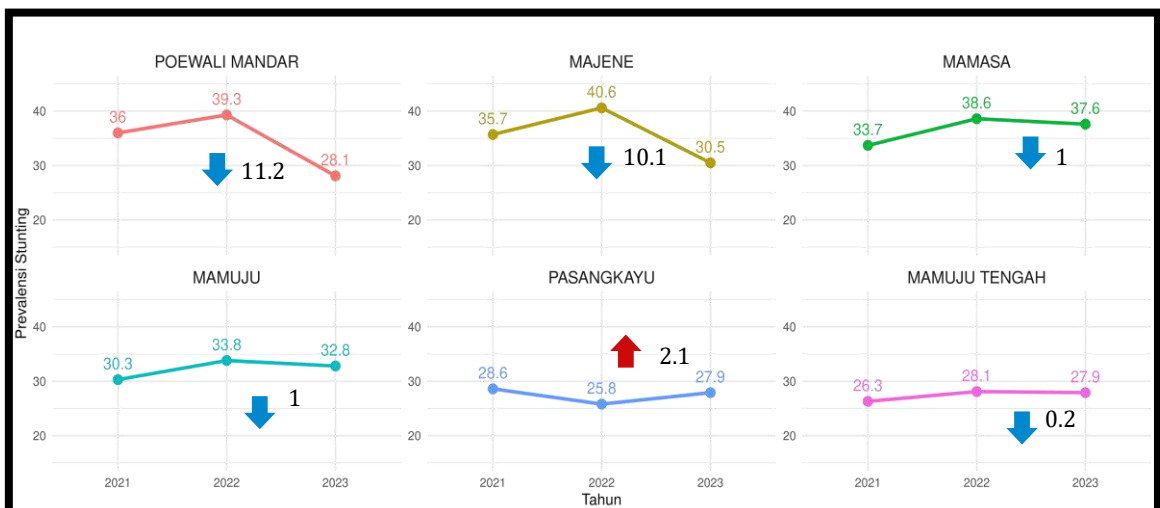
**Grafik 5.1 Perbandingan Angka Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023**



Sumber : Kementerian Kesehatan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 prevalensi Stunting Sulawesi Barat sebesar 41,60 persen, sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi Stunting Sulawesi Barat terjadi penurunan angka prevalensi Stunting sebesar 1,3 persen atau menjadi sebesar 40,3 persen dan menurun secara signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 33,8 persen atau turun sebesar 6,5 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021. Prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan trend penurunan hingga tahun 2023 mencapai 30,3%, namun meskipun secara statistik terjadi penurunan prevalensi Stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih tinggi jika mengacu kepada standar WHO yakni harus dibawah 20 persen. Provinsi Sulawesi Barat juga masih menduduki urutan kelima secara nasional angka Stunting tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya.

**Grafik 5.2 Perbandingan Angka Prevalensi Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023**



Sumber : Kementerian Kesehatan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Berdasarkan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2023, Kabupaten Majene yang merupakan kabupaten dengan angka prevalensi tertinggi tahun 2022 mengalami penurunan signifikan sebesar 10,1%, disusul dengan Kabupaten Polewali Mandar yang pada tahun 2022 mencapai angka prevalensi sebesar 39,3% mengalami penurunan sebesar 11,2%. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting ini diikuti dengan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait diantaranya penerbitan Surat Edaran Ayo ke Posyandu oleh Gubernur Sulawesi Barat, perjanjian kerja sama dengan Polda, BKKBN dan Kementerian Agama terkait penanganan stunting, pelaksanaan kolaborasi mitra berbasis Aksi 3 di Wilayah lokus stunting, pembentukan Satgas 4+1, menyusun peta jalan Percepatan penanganan stunting, peningkatan kapasitas bimbingan teknis bagi kader dan petugas kesehatan dalam hal penguatan pengelolaan posyandu, integrasi layanan primer dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kluster ibu hamil, balita dan remaja yang fokus pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, evaluasi Hasil PMT, pemberian Makanan Tambahan (PMT) bersumber ADD, CSR dan DAK BK Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil melalui USG Mobile bekerjasama dengan TP PKK serta pemicuan Jamban Sehat melalui pemberian bantuan langsung Dinas kesehatan dalam percepatan akses sanitasi/Jamban untuk pencegahan dan penanggulangan Stunting dan menandatangani MoU dengan Korem terkait pencegahan, Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Rapat Terbatas tanggal 21 Juni 2021 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat not persen pada 2024.

Menindaklanjuti arahan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Fenomena sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat adalah:

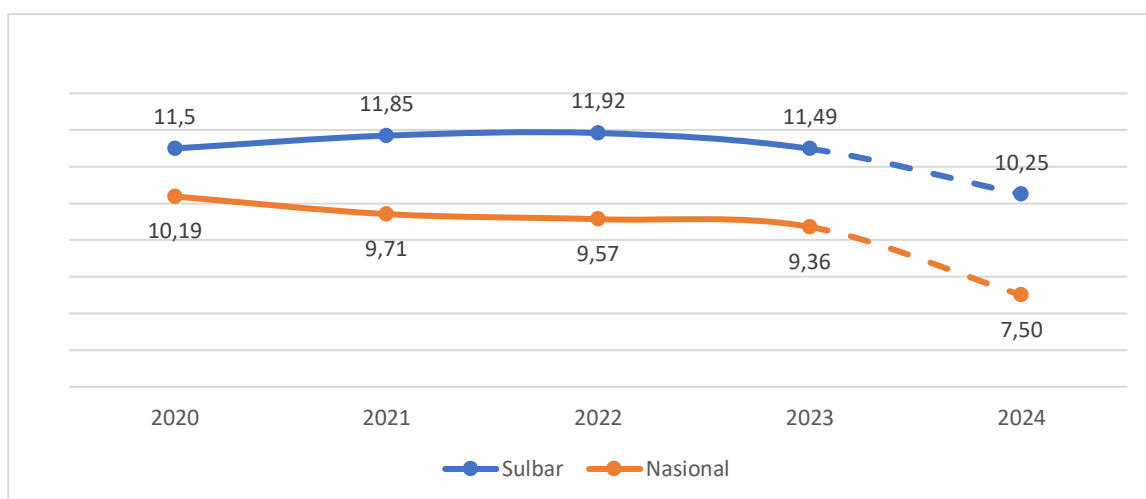
a. Tingkat Pengangguran

- Pengangguran Sulbar sebesar 2,27%, Pekerja terbesar di sektor Pertanian 48,25%
- Lapangan kerja yang tersedia didominasi adalah lapangan kerja informal dengan upah yang rendah.

- Rendahnya keterampilan atau pendidikan sehingga belum cukup untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak.
- b. Pertumbuhan Ekonomi
  - Pertumbuhan ekonomi Sulbar 7,5%. Pertumbuhan yang tinggi namun belum Inklusif sehingga belum optimal menyerap tenaga kerja yang ada.
  - Akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, teknologi, dan informasi masih terbatas.
- c. Kualitas Sumberdaya Manusia
  - Indeks Pembangunan Manusia 69,80 poin, masih cukup rendah.
  - Banyaknya permasalahan seperti stunting (35%), Anak tidak Sekolah (48.105 jiwa), Pernikahan Usia Anak (11.70%).
  - Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terbatas.
- d. Kemiskinan Perdesaan yang tinggi
  - Kemiskinan perdesaan sebesar 83,95%, mata pencaharian utama masyarakat perdesaan adalah pertanian, namun produktivitas pertanian masih rendah
  - Masih terdapat wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang sulit.

Pada bulan maret 2023, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 11,49 persen atau turun sebesar 0,43 persen poin dari tahun 2022. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,76 persen turun menjadi 9,08 persen pada Maret 2023. sedangkan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari sebesar 12,26 persen pada Maret 2022 menjadi 12,10 persen pada Maret 2023.

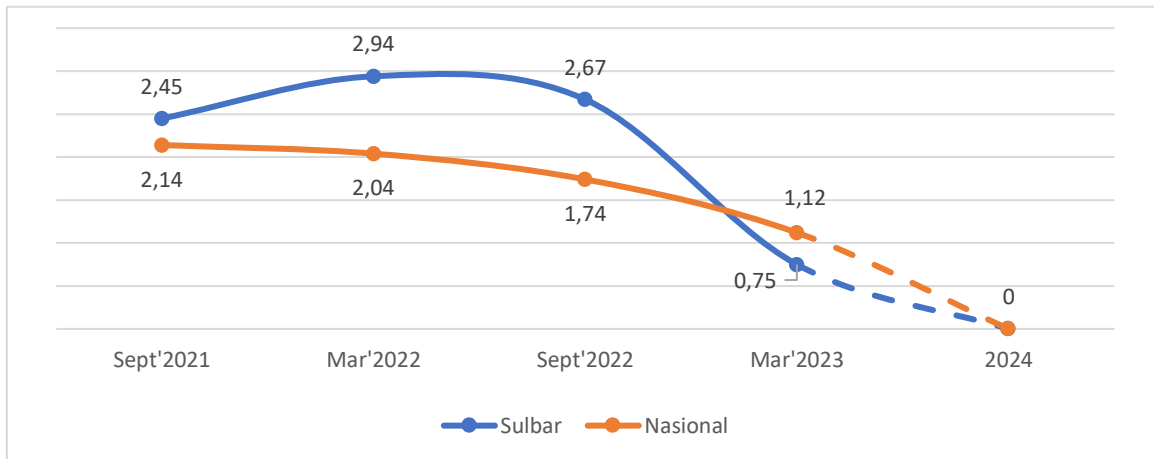
**Grafik 5.3 Persentase Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional 2020-2023**



Sumber: BPS Sulbar

Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 sudah berada di bawah nasional. Dibandingkan pada tahun 2022 provinsi Sulawesi Barat masih berada diatas nasional yang sebesar 2.67 persen.

**Grafik 5.4 Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023**



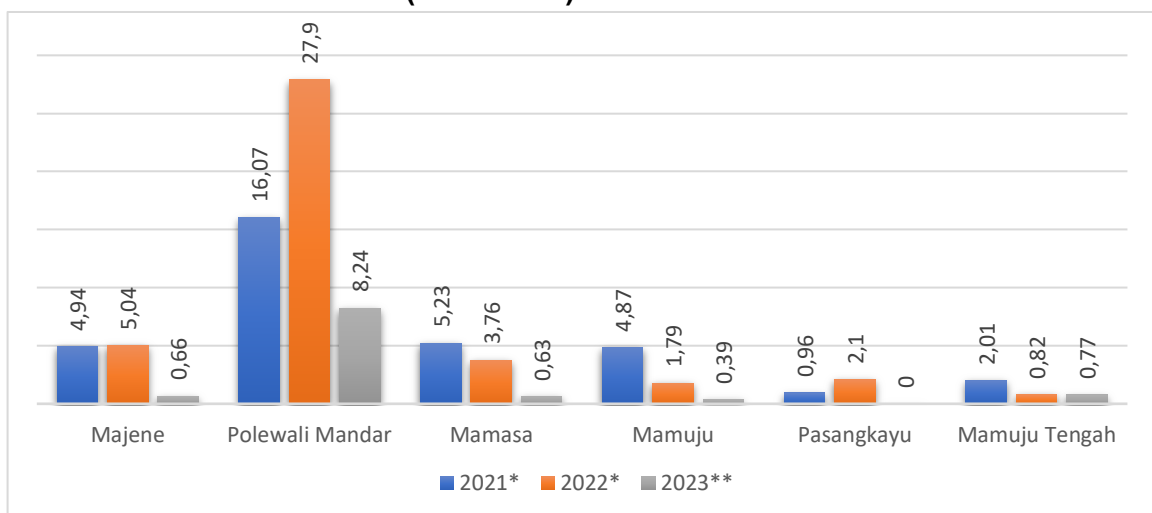
*Keterangan*

2021-2022 : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

2023 : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Berdasarkan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Estimasi Jumlah penduduk miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat 2023 sebanyak 10,68 ribu jiwa. Pada tahun 2023 Jumlah Kemiskinan Ekstrem tertinggi berada pada kabupaten polewali mandar yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,24 ribu jiwa dan Kabupaten Pasangkayu mammallike Jumlah penduduk miskin ekstrem yang sudah mencapai target nol.

**Grafik 5.5 Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten Tahun 2023 (Ribu Jiwa)**



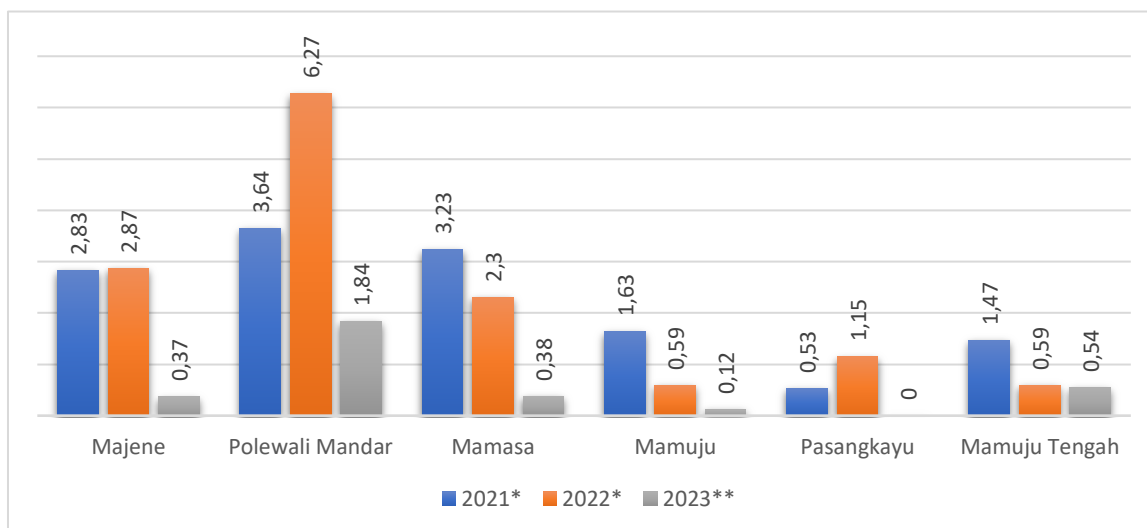
*Keterangan*

2021-2022 : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

2023 : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun 2023 sudah mencapai nol persen, namun penurunan cukup signifikan berada pada Kabupaten Polewali Mandar dari 6,27 persen di tahun 2022 menjadi 1,84 persen tahun 2023.

**Grafik 5.6 Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten Tahun 2023 (%)**



**Keterangan**

2021-2022 : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

2023 : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat;  
Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
  - 1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
  - 2) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.
  - 3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 4) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat; serta  
Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
  - 1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
  - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.

- 3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
  - 4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
  - 5) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
- Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
- 1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
  - 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

### **3. Pengendalian Inflasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Pengendalian inflasi merupakan tugas penting pemerintah daerah karena inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mempengaruhi kestabilan harga barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi.

Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari enam kabupaten yaitu Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, dua kabupaten yang menjadi fokus utama untuk pengendalian inflasi yaitu Kabupaten Mamuju merupakan indikator perhitungan inflasi kategori perkotaan yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota ini memiliki aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, sehingga fluktuasi harga di Mamuju dapat mempengaruhi inflasi di seluruh Kabupaten. Sedangkan Kabupaten Majene merupakan indikator perhitungan inflasi kategori perdesaan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan. Produktivitas di Majene berkontribusi signifikan terhadap pasokan bahan pangan di daerah tersebut.

Dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi, pemerintah daerah dapat mengendalikan inflasi dengan lebih efektif, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, diatur dengan kebijakan yang tepat agar inflasi dapat dikendalikan secara efektif dalam Upaya pengendalian inflasi di provinsi Sulawesi Barat antara lain:

- a. Menjaga stabilitas harga dengan melaksanakan gerakan pangan murah
- b. Mendorong diversifikasi produk pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas Tunggal

- c. Memperkuat distribusi pangan untuk memperlancar arus barang dari produsen ke pasar
  - d. Peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perikanan melalui penyuluhan
  - e. Menjaga stabilitasi pasokan bahan pokok melalui pengelolaan stok dan cadangan pangan
  - f. Melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran Pasokan
  - g. Memperkuat kerjasama dengan daerah lain untuk memastikan ketersediaan barang dan mengurangi ketergantungan impor
  - h. Meningkatkan aksesibilitas transportasi ke daerah terpencil untuk memastikan pasokan barang
  - i. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian Inflasi
  - j. Memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan sinergi
- 4. Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru**

Peningkatan investasi, hilirisasi, dan pembangunan ekosistem ekonomi hijau dan biru adalah strategi yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut melalui (i) Peningkatan Investasi, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mempermudah proses perizinan, memberikan insentif fiskal, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung investasi di sektor-sektor prioritas, aktif mempromosikan potensi investasi kepada investor domestik dan asing melalui pameran, konferensi, dan forum bisnis internasional serta mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek-proyek strategis, terutama di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi hijau; (ii) Hilirisasi Industri, mendorong hilirisasi dengan mengembangkan rantai nilai industri, terutama di sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kapasitas industry serta menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor-sektor hilir; (iii) Pembangunan Ekosistem Ekonomi Hijau seperti Mendorong investasi dan penggunaan energi terbarukan seperti solar, angin, dan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, implementasi praktik pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk daur ulang dan pengolahan limbah industry serta mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia serta meningkatkan produktivitas melalui teknologi ramah lingkungan; (iv) melakukan Pembangunan Ekosistem Ekonomi Biru dengan mengelola atas sumber daya laut dan pesisir untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan dan ekowisata, mendorong penggunaan teknologi perikanan yang efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem laut serta investasi dalam proyek-proyek restorasi ekosistem pesisir seperti rehabilitasi

terumbu karang, mangrove, dan padang lamun untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, Sulawesi Barat dapat mendorong investasi, meningkatkan hilirisasi industri, serta membangun ekosistem ekonomi hijau dan biru yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

## **5. Kedaulatan dan Ketahanan Pangan**

Kedaulatan dan ketahanan pangan adalah dua konsep penting dalam mencapai kesejahteraan dan keamanan. Kedaulatan pangan berfokus pada hak negara dan masyarakat untuk menentukan kebijakan pangan mereka sendiri, sementara ketahanan pangan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cukup, aman, dan bergizi sepanjang waktu. Berikut adalah beberapa strategi untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan: (i) Meningkatkan Produksi Pertanian dilakukan dengan modernisasi pertanian, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman yang tahan terhadap hama, penyakit dan perubahan iklim serta melakukan diversifikasi tanaman; (ii) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan; (iii) Meningkatkan Infrastruktur Pertanian dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk memudahkan distribusi hasil pertanian, membangun fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti gudang berpendingin, untuk mengurangi kerugian pasca panen dan memperpanjang umur simpan produk pangan serta memperbaiki akses petani ke pasar melalui pembangunan pasar lokal dan penguatan jaringan pemasaran; (iv) melakukan penguatan Kapasitas Petani melalui Pendidikan dan pelatihan program pendidikan dan pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan akses ke sumber daya keuangan; (v) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung; (vi) Penguatan Ketahanan Pangan dengan membangun cadangan pangan strategis untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau krisis pangan, mendorong konsumsi pangan lokal dan diversifikasi pola makan untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan meningkatkan ketahanan pangan serta melaksanakan program bantuan pangan bagi kelompok rentan untuk memastikan akses pangan yang merata.

## **6. Membangun Konektivitas dengan IKN dan Wilayah Sekitarnya**

Membangun konektivitas dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis untuk membangun konektivitas tersebut: (i) Pengembangan Infrastruktur Transportasi baik transportasi darat, laut dan udara; (ii) Penguatan Infrastruktur Digital dengan membangun infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi di IKN dan wilayah sekitarnya untuk mendukung ekonomi digital dan layanan public; (iii) Pengembangan Ekonomi dan Industri; (iv) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung misalnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan

harmonis dengan perkembangan wilayah sekitar dan memberikan insentif bagi investasi di sektor infrastruktur dan transportasi untuk mempercepat pembangunan konektivitas; (v) Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Lokal; (vi) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat seperti peningkatan produktifitas komoditas unggulan pisang dan sukun; (vii) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, pembangunan konektivitas dengan IKN dan wilayah sekitarnya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah terkait.

#### **7. Sinergi Program Pusat dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) serta Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Menciptakan sinergi antara program pusat dengan daerah serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah beberapa langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melakukan Sinkronisasi Kebijakan dan Program dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan local dan membentuk forum koordinasi reguler antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sinergi antara program pusat dan daerah serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan inklusif, membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **8. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil yaitu melakukan penguatan institusi hukum dan keamanan, melakukan pencegahan konflik, melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi efektif dengan semua stakeholder, serta dengan melakukan penguatan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

### **5.2. Arah Kebijakan Kewilayahan**

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten, Arah kebijakan pembangunan kabupaten terdiri atas kebijakan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan kebijakan pembangunan kabupaten berbasis prioritas pembangunan daerah provinsi.

## **5.2.1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

### **5.2.1.1. Penentuan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum menetapkan kawasan strategis Nasional di wilayah Sulawesi Barat, Walaupun demikian, berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah ini, maka ada beberapa kawasan strategis provinsi yang layak ditetapkan sebagai berikut :

#### **1. Kawasan Lumbung beras**

Untuk kepentingan ketahanan pangan berupa padi dan berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka ditetapkan pengembangan kawasan sawah irigasi teknis di Kabupaten Pasangkayu, Pengembangan irigasi Teknis Tommo di Kabupaten Mamuju, Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, dan pengembangan kawasan sawah irigasi teknis di Kabupaten Polewali Mandar, yang dipadu selaraskan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang potensial menyediakan air sepanjang tahun, Sungai-sungai yang potensial mendukung sistem irigasi teknis persawahan di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju seperti S, Kaluku, S, Karosa, S, Budong-Budong, S, Karama, S, Babalang, S, Tomo, S, Lariang, Sungai-sungai yang potensial mendukung sistem irigasi teknis persawahan di Kabupaten Polewali Mandar seperti S, Sa'dang Maloso, S, Mandar dan S, Mapili,

#### **2. Kawasan Perkebunan**

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: sentra-sentra perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju, sentra-sentra perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sentra-sentra perkebunan jeruk di wilayah perbatasan Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju, sentra-sentra perkebunan kelapa disepanjang pesisir Selat Makassar, sentra-sentra perkebunan kopi, teh dan hortikultura di Kabupaten Mamasa.

### **5.2.1.2. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya terdapat di setiap kabupaten, Pengembangan kawasan budaya di Kabupaten Mamuju seperti rumah adat mamuju di Kota Mamuju dan pengembangan kerajinan tenun ikat Sekomandi, Di Kabupaten Majene terdapat Kompleks Pemakaman Raja-raja Mandar, Museum Majene, Makam pahlawan Mandar, Makam I Mannyambungi, Makam Syech Al Ma'ruf, Monumen Hj, Andi Depu, Kawasan wisata budaya dan alam di Kabupaten Mamasa, yang budaya dan karakter alamnya mirip dengan Tana Toraja terdapat Kompleks Makam Tedong-Tedong dan lokasi lokasi perayaan adat, Pengembangan kawasan pariwisata Mamasa dipadu selaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasional dari Bandara Baharuddin Lopa ke Kabupaten Tana Toraja dan sebaliknya yang melewati Kabupaten Mamasa.

### **5.2.1.3. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung**

Untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan Kawasan Lindung Nasional (KLN) Suaka Margasatwa Mampie dan Lampoko sebagai suaka margasatwa dan margasatwa laut, begitu juga dengan Suaka Margasatwa Kalumpang yang ada di Kabupaten Mamuju, Taman Nasional Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju dan Mamasa serta kawasan perlindungan laut di sekitar P, Karampuang, P, Balabalakang di Kabupaten Mamuju dan P, Lere-lerekang di Kabupaten Majene.

### **5.2.2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi**

Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hasil sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka ditetapkan target arah kebijakan pembangunan terhadap kabupaten untuk memenuhi harapan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten Tahun 2025 yang terdiri dari 4 (empat) prioritas, sebagai berikut: 1) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah; 2) Meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas; 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kabupaten Majene**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Majene dengan melalui penguatan implementasi SPM, modernisasi tata kelola pemerintahan, maksimalisasi potensi bonus demografi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kabupaten Majene akan diarahkan pada pengembangan pusat pendidikan pada semua level pendidikan, terutama perguruan tinggi negeri (Universitas Sulawesi Barat), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta memudahkan akses lapangan kerja. Pada aspek ketenagakerjaan didorong melalui Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan pelaksanaan *on the job training* dan pelatihan kerja berbasis kompetensi, Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja melalui pemagangan Kewirausahaan tenaga kerja produktif dan pendataan ketenagakerjaan. Di bidang pembangunan ekonomi, akan diarahkan pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal melalui Pengembangan Kampung Sutera yang dipusatkan di Pamboang dan Malunda dan pengembangan UMKM lainnya. Begitupun disektor pertanian dengan Peningkatan Produktivitas Hasil

Pertanian dan Perikanan serta Pengembangan melalui diversifikasi produk unggulan sektor perikanan seperti abon, tuna, maupun pengembangan komoditi rumput laut yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yang tentunya disertai dengan adanya fasilitas yang memadai untuk nelayan didaerah tersebut. Pengembangan disektor pariwisata yang sangat mendukung seperti Pantai Dato dan Pantai Barane, makam raja-raja dan pahlawan mandar, pengembangan museum, dan pengembangan kawasan monumen kecil dan menengah yang kondusif, Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, serta optimalisasi program Bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dari sektor Kesehatan dengan Optimalisasi dan peningkatan Posyandu sebagai pusat layanan terdepan dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kualitas layanan Kesehatan dan Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi. Dari sektor Pendidikan Program Beasiswa keluarga tidak mampu untuk siswa kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, merupakan stimulan aktif yang mendorong angka bertahan sekolah dan meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat.

**Tabel 5.1 Highlight Kebijakan Kabupaten Majene Tahun 2025**

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan hutan Produksi Terbatas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif mendukung penanganan inflasi.</li> <li>3. Pengembangan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industry pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>4. Kawasan pengembangan peternakan kambing.</li> <li>5. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>6. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung dsetinasi unggulan.</li> <li>7. Penyajian peta potensi berbasis IPRO</li> <li>8. Peningkatan kapasitas melalui dukungan digitalisasi UMKM dan fasilitasi HAKI.</li> <li>9. Melakukan stabilisasi harga melalui pemantauan harga pangan.</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pengentasan stunting</li> <li>2. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</li> <li>3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</li> </ol>

<b>Prioritas</b>	<b>Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>5. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> <li>6. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya Pendidikan</li> <li>7. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>8. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>9. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Litaersi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan</li> </ol>
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan debit air bersih berkurang</li> <li>2. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>3. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>4. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>5. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>6. Pengelolaan pasokan air berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan dan banjir</li> <li>7. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>8. Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap memantau, mengarsipkan, dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama</li> <li>9. Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana</li> <li>10. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	11. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. Optimalisasi dan harmonisasi, regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah</li> <li>4. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</li> <li>5. Penguatan integritas partai politik</li> <li>6. Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat</li> </ol>

## 2. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar pada sektor ekonomi diarahkan sebagai pusat perdagangan dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan industri melalui strategi pemasaran hasil produk pertanian dan UMKM berbasis teknologi digital, peningkatan daya saing industri pengolahan, serta mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Pengembangan kawasan destinasi wisata di gugus Pulau Kecamatan Binuang dan Destinasi Wisata Agro Kebun Raya Bulu. Pengembangan sektor pertanian terpadu berbasis korporasi petani menggunakan strategi sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS yang potensial menyediakan air sepanjang tahun. Untuk pembangunan sosial budaya, daerah ini akan diarahkan sebagai pusat pengembangan kebudayaan karena didukung oleh keanekaragaman budaya, mulai dari seni tari tradisional, seni sastra (kalinda'da), perahu sandeq, hingga peninggalan sejarah makam para raja, tokoh agama, dan pahlawan. Sedangkan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan laut, bandara perintis, pengembangan wilayah dan pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

**Tabel 5.2 Highlight Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025**

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan hutan Produksi Terbatas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif</li> <li>3. Pengembangan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industry pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>4. Kawasan pengembangan peternakan kambing.</li> <li>5. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>6. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung dsetinasi unggulan.</li> <li>7. Penyajian peta potensi berbasis IPRO.</li> <li>8. Peningkatan kapasitas UKM melalui dukungan digitalisasi UMKM dan fasilitasi HAKI.</li> <li>9. Pengembangan Tanaman Aren melalui pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>2. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya Pendidikan</li> <li>4. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan melihat rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru/murid yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar</li> <li>5. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, mutu dan kualitas tenaga kependidikan melalui sertifikasi guru</li> <li>6. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>7. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>8. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	<p>kebhinekaan</p> <p>10. Percepatan pengentasan stunting</p> <p>11. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</p> <p>12. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</p>
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>2. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>3. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan debit air bersih berkurang</li> <li>4. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>5. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>6. Pertanian ramah iklim dan berkelanjutan</li> <li>7. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu</li> <li>8. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>9. Percepatan penanganan kawasan kumuh</li> </ol>
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. Profesionalisme dan Integritas ASN</li> <li>4. Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik</li> </ol>

### 3. Kabupaten Mamasa

Sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten yang berada pada dataran tinggi dengan cuaca udara yang sangat dingin, pada sektor pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan perkebunan, yang dikembangkan pada sentra perkebunan kopi,

kakao, jagung, nilam dan tanaman hortikultura yang sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Mamasa. Pengembangan Keparawisataan yang diarahkan pada pengembangan kawasan wisata budaya dan pelestarian keindahan alam, pengembangan kawasan makam, dan pengembangan lokasi perayaan adat. Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kegiatan sosial budaya di daerah ini. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, wilayah Kabupaten Mamasa akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari sektor Kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit, Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga Kesehatan, Peningkatan kualitas pelayanan posyandu melalui Posyandu Ceting dan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder melalui program dan kegiatan yang menyoar lokus percepatan penurunan stunting. Dari sektor Pendidikan dengan Intervensi melalui program dan kegiatan seperti Pengelolaan pendidikan PAUD, Pengelolaan Sekolah Dasar, Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan Pemberiaan Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu yaitu program Indonesia Pintar serta Intervensi pada program pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

**Tabel 5.3 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamasa Tahun 2025**

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif mendukung penanganan inflasi.</li> <li>3. Pengembangan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industry pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>4. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>5. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung destinasi unggulan.</li> <li>6. Penyajian peta potensi berbasis IPRO</li> <li>7. Peningkatan kapasitas UKM melalui dukungan digitalisasi UMKM dan fasilitasi HAKI.</li> <li>8. Pengembangan Tanaman Aren melalui pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>2. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	<p>dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, mutu dan kualitas tenaga kependidikan melalui sertifikasi guru</li> <li>5. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>6. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>7. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan</li> <li>9. Percepatan pengentasan stunting</li> <li>10. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</li> <li>11. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</li> </ol>
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan pada kawasan hutan</li> <li>2. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>3. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>4. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>5. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>6. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>7. Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap memantau, mengarsipkan, dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama</li> <li>8. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu</li> <li>9. Percepatan penanganan kawasan kumuh</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>4. peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik</li> </ol>

#### 4. Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memegang peran strategis, dimana pengembangan wilayah diarahkan sebagai pusat pemerintahan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Kabupaten Mamuju dalam bidang pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong penetapan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Belang-Belang Mamuju melalui surat rekomendasi lokasi dan Kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Mamuju, Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan pertanian, Pengembangan UMKM melalui (Peningkatan SDM/Pelatihan, Perizinan, Peralatan) terutama Fasilitas Industri Rumah Tangga dengan bantuan akses modal dengan bantuan pasar serta Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Pemulihan pasca bencana gempa bumi dengan memaksimalkan bantuan terkait dengan Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan sesuai dengan data yang valid. Dari sektor Pendidikan dengan adanya Intervensi program pada kegiatan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Non-Formal, Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu yaitu Program Indonesia Pintar dan Program Beasiswa Keluarga Miskin dan Intervensi pada Program Portal ATS. Dari sektor Kesehatan dengan Bantuan Jaminan Kesehatan kepada penduduk miskin seperti BPJS Mandiri Gratis dan Kartu Mamuju Keren, Penguatan kelembagaan serta koordinasi tingkat Kabupaten (OPD), Kecamatan, Desa untuk memaksimalkan intervensi integrasi percepatan penurunan stunting dan Peningkatan kualitas koordinasi di Desa untuk memaksimalkan intervensi percepatan penurunan stunting melalui Rumah Desa Sehat. Rumah Gizi sebagai salah satu model berbasis komunitas sebagai upaya mengembangkan kedaulatan dan ketahanan pangan melalui pemberdayaan Ibu PKK Desa/Kelurahan serta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**Tabel 5.4 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tahun 2025**

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Penyusunan kajian terkait pemekaran wilayah dalam mewujudkan pembentukan kota mamuju sebagai ibu kota provinsi.</li> <li>3. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif mendukung penanganan inflasi.</li> <li>4. peningkatan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industri pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>5. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>6. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung dsetinasi unggulan.</li> <li>7. Penyajian peta potensi berbasis IPRO</li> <li>8. Peningkatan kapasitas UKM melalui dukungan digitalisasi UMKM dan fasilitasi HAKI.</li> <li>9. Perlunya peningkatan layanan dan sosialisasi tentang penanaman modal.</li> <li>10. Melakukan stabilisasi harga melalui pemantauan harga pangan.</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>2. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya Pendidikan</li> <li>4. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, mutu dan kualitas tenaga kependidikan melalui sertifikasi guru</li> <li>5. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>6. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>7. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	<p>Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan</p> <p>9. Percepatan pengentasan stunting</p> <p>10. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</p> <p>11. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</p>
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan debit air bersih berkurang</li> <li>2. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>3. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>4. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>5. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>6. Pengelolaan pasokan air berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan dan banjir</li> <li>7. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>8. Memperkuat dokumen kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerja sama antar daerah untuk pengurangan risiko</li> <li>9. Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana</li> <li>10. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>11. Percepatan penanganan kawasan kumuh</li> </ol>
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. Optimasi dan Harmonisasi Regulasi termasuk Proses Pra Regulasi yang Memadai di Daerah</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan Smart Government serta Penguatan Kapasitas Aparatur Daerah dan Lembaga dalam Hal Manajemen Data dan Keanan Informasi, Kapasitas SDM ASN, dan Pengelolaan Aset Daerah</li> <li>5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sipil yang Bermakna termasuk Pelibatan Masyarakat</li> <li>6. Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi, Transparansi Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Jasa-Jasa, serta Transparansi Layanan Perizinan berbasis Digital</li> <li>7. Percepatan Digitalisasi Layanan Publik dan Pelaksanaan Audit SPBE untuk Penguatan Aspek Pemerintahan Digital</li> <li>8. Peningkatan Respon terhadap Laporan Pelayanan Publik Masyarakat</li> </ol>

#### 5. Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Mamuju Utara yang telah berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dengan didukung pengembangan irigasi pertanian pada desa Bambaira, desa Kasaloang, Desa Patika, Desa Rondonmayang, disamping itu adanya inovasi dengan Penguatan program *strong from home*/pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur-sayuran. Dari sektor industri melalui peningkatan daya saing UMKM Khususnya untuk udang Vaname dan Peternakan (sapi, kambing), Mengoptimalkan CSR sektor industri yang ada di Pasangkayu. Intervensi pada kelompok pesisir melalui mesin kapal dan alat tangkap, Pengembangan Komoditi gula aren. Ini merupakan dukungan Kabupaten untuk Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Mendorong dan mengembangkan kreatifitas dan ekonomi kreatif. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini, maka akan dikembangkan kawasan pertambangan minyak blok suremana, blok pasangkayu, dan blok kuma. Dari sektor Pendidikan dengan Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga kependidikan lainnya, Pemerataan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dan perbaikan akses layanan pendidikan. Dari sektor Kesehatan dengan Meningkatkan akses layanan kesehatan, Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, penerapan gerakan hidup sehat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil dan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita.

**Tabel 5.5 Highlight Kebijakan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025**

<b>Prioritas</b>	<b>Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi</b>
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif.</li> <li>3. Pengembangan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industry pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>4. Kawasan pengembangan peternakan yang berbasis unggulan.</li> <li>5. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>6. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung dsetinasi unggulan.</li> <li>7. Penyajian peta potensi berbasis IPRO</li> <li>8. Peningkatan kapasitas UKM melalui dukungan digitalisasi UMKM dan fasilitasi HAKI.</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>2. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> <li>3. dan kualitas tenaga kependidikan melalui sertifikasi guru</li> <li>4. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>5. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>6. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Litaersi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan</li> <li>8. Percepatan pengentasan stunting</li> <li>9. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</li> <li>10. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</li> </ol>
Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<p>berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan debit air bersih berkurang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>3. Penegakan hukum lingkungan dalam upaya mencegah illegal logging serta pembabatan hutan pada area kawasan lindung</li> <li>4. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>5. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>6. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>7. Pengelolaan pasokan air berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan dan banjir</li> <li>8. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>9. Memperkuat dokumen kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerja sama antar daerah untuk pengurangan risiko</li> <li>10. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>11. Percepatan penanganan kawasan kumuh</li> </ol>
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan publik</li> <li>4. Pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan.</li> <li>5. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</li> </ol>

#### 6. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan ibukota kabupaten adalah Topoyo. Arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tidak jauh berbeda dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Mamuju. Pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Mamuju Tengah diarahkan pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS) yang potensial. Pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra sentra perkebunan kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan kelapa dalam. Selain itu, pengembangan kawasan pertambangan minyak blok karama dan blok budong-budong kini masuk kedalam wilayah daerah ini yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Mamuju. Pengembangan sarana pertanian (sektor unggulan), diversifikasi produk unggulan pertanian dan pengelolaan perikanan budidaya. Dari sektor industri melalui pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Pengembangan UMKM dan investasi, Pengembangan produksi dan hilirisasi pertanian. Dari sektor tenaga kerja untuk mengembangkan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam menekan tingkat pengangguran. Mendorong investasi baru padat karya, Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan serta Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Dari sektor Pendidikan dan Kesehatan dengan Pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, Pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, Penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.

**Tabel 5.6 Highlight Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025**

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan lainnya.</li> <li>2. Pengembangan Kawasan komoditi tanaman pangan alternatif mendukung penanganan inflasi.</li> <li>3. Pengembangan Kawasan tambak, budidaya perikanan air tawar dan laut, yang didukung dengan industry pengolahan ikan hasil perikanan.</li> <li>4. Peningkatan kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan.</li> <li>5. Optimalisasi pengembangan Kawasan wisata dalam mendukung dsetinasi unggulan.</li> <li>6. Penyajian peta potensi berbasis IPRO</li> <li>7. Peningkatan kapasitas UMKM serta dukungan fasilitasi HAKI.</li> </ol>
Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan wajib belajar 12 tahun melalui pemerataan layanan pada semua jenjang pendidikan</li> <li>2. Pemerataan akses pendidikan melalui pemberian dana beasiswa</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya Pendidikan</li> <li>4. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, mutu dan kualitas tenaga kependidikan melalui sertifikasi guru</li> <li>5. Pengadaan perlengkapan peserta didik dan penyediaan biaya personil</li> <li>6. Pembinaan kelembagaan sekolah menengah, pengembangan konten digital sebagai pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan</li> <li>7. Dalam peningkatan kapasitas bidang Pendidikan dilakukan bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL</li> <li>8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan target dan capaian pendidikan terdapat indikator yang mencakup beberapa aspek diantaranya Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Litaersi, Kompetensi Numerasi hingga iklim keamanan, inklusivitas dan kebhinekaan</li> <li>9. Percepatan pengentasan stunting</li> <li>10. Pengentasan kemiskinan ekstrem terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif</li> <li>11. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis kesehatan, penyediaan sistem telemedicine dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat</li> </ol>
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki kualitas ekosistem lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan debit air bersih berkurang</li> <li>2. Peningkatan tutupan lahan pada lahan kritis dan menekan laju deforestasi</li> <li>3. Penegakan hukum lingkungan dalam upaya mencegah illegal logging serta pembabatan hutan pada area kawasan lindung</li> <li>4. Pertanian ramah iklim dan berkelanjutan</li> <li>5. Percepatan sanitasi aman dan berkelanjutan melalui pembangunan IPLT</li> <li>6. Reformasi pengelolaan sampah di daerah dari berbasis TPA menjadi TPST</li> <li>7. Peningkatan dan Optimalisasi jasa lingkungan penyediaan air dalam rangka pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman dan berkelanjutan</li> <li>8. Pengelolaan pasokan air berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan dan banjir</li> <li>9. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu</li> </ol>

Prioritas	Highlight Kebijakan/ Indikasi Intervensi
	10. Percepatan penanganan kawasan kumuh
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pencegahan dan Pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, dan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li> <li>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government dan peningkatan kapasitas aparatur</li> <li>3. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.</li> <li>4. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</li> <li>5. Penguatan integritas partai politik</li> <li>6. Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</li> <li>8. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital.</li> <li>9. Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</li> </ol>

### 5.2.3. Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini Rasio. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)





Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian IPM kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	
		Realisasi	
		2022	2023
1	Kabupaten Majene	67,84	68,62
2	Kabupaten Polewali Mandar	64,79	65,59
3	Kabupaten Mamasa	67,21	67,83
4	Kabupaten Mamuju	68,88	69,61
5	Kabupaten Pasangkayu	68,61	69,11
6	Kabupaten Mamuju Tengah	66,89	67,45
Provinsi Sulawesi Barat		66,92	67,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

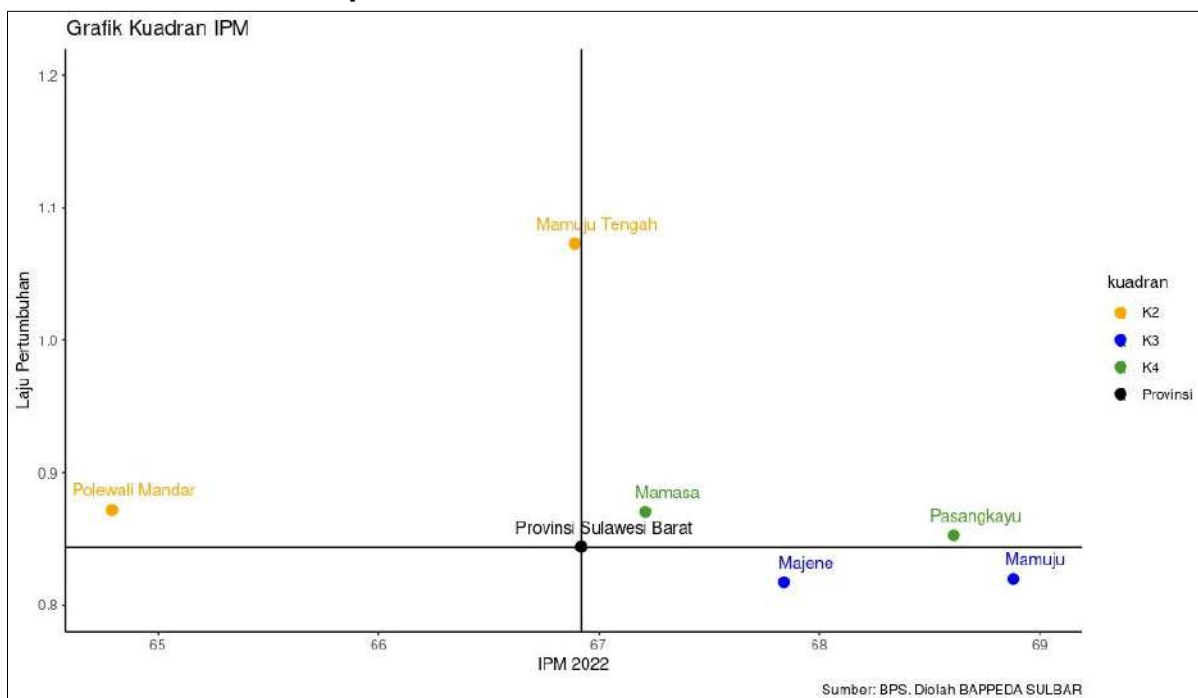
**Tabel 5.8 Kategori Capaian IPM Kabupaten**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM dan Laju pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b>
III		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, 2023

- a) Kuadran II, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah
- b) Kuadran III, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju
- c) Kuadran IV, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu

**Grafik 5.7 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Tahun 2022-2023**



Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM, antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan IPM.

**Tabel 5.9 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2025**

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (poin)		
		Target		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Majene	68,53	69,05	
2	Kabupaten Polewali Mandar	65,13	65,49	
3	Kabupaten Mamasa	68,10	67,80	
4	Kabupaten Mamuju	68,50	69,00	
5	Kabupaten Pasangkayu	69,64	70,27	
6	Kabupaten Mamuju Tengah	67,14	67,40	
	Provinsi Sulawesi Barat	68,16	69,36	

## 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu, Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah, Berdasarkan Capaian LPE kabupaten

tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka capaian LPE kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 5.10 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	
		Realisasi	
		2022	2023
1	Kabupaten Majene	2,39	5,28
2	Kabupaten Polewali Mandar	3,59	4,58
3	Kabupaten Mamasa	1,76	2,72
4	Kabupaten Mamuju	3,15	4,37
5	Kabupaten Pasangkayu	-0,12	6,78
6	Kabupaten Mamuju Tengah	2,20	2,80
Provinsi Sulawesi Barat		2,30	5,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, pengembangan produksi pertanian dan perkebunan menjadi prioritas pembangunan kewilayahan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ditambah dengan peluang baru yang terbuka dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, sehingga memperbesar peluang Provinsi Sulawesi Barat dalam memasok kebutuhan pangan maupun tenaga kerja di IKN. Sehingga Pemerintah Sulawesi Barat memberikan target optimistik pada setiap kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 5.11 Penetapan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tahun 2025**

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)		
		Target		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Majene	6,25	6,37	6,37
2	Kabupaten Polewali Mandar	5,40	5,50	5,5
3	Kabupaten Mamasa	6,00	3,0-4,0	4,5
4	Kabupaten Mamuju	5,5-5,6	5,6-5,7	4,7-5,8
5	Kabupaten Pasangkayu	7,13	7,53	8,67
6	Kabupaten Mamuju Tengah	4,33	5,17	4,35-5,76
Provinsi Sulawesi Barat		4,5	5,1	5,23-5,80

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)





Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja TPT kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5.12 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten**

No	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	
		Realisasi	
		2022	2023
1	Kabupaten Majene	2,19	2,67
2	Kabupaten Polewali Mandar	2,16	1,95
3	Kabupaten Mamasa	2,06	2,35
4	Kabupaten Mamuju	3,06	2,99
5	Kabupaten Pasangkayu	2,38	2,02
6	Kabupaten Mamuju Tengah	1,88	1,83
Provinsi Sulawesi Barat		2,34	2,27

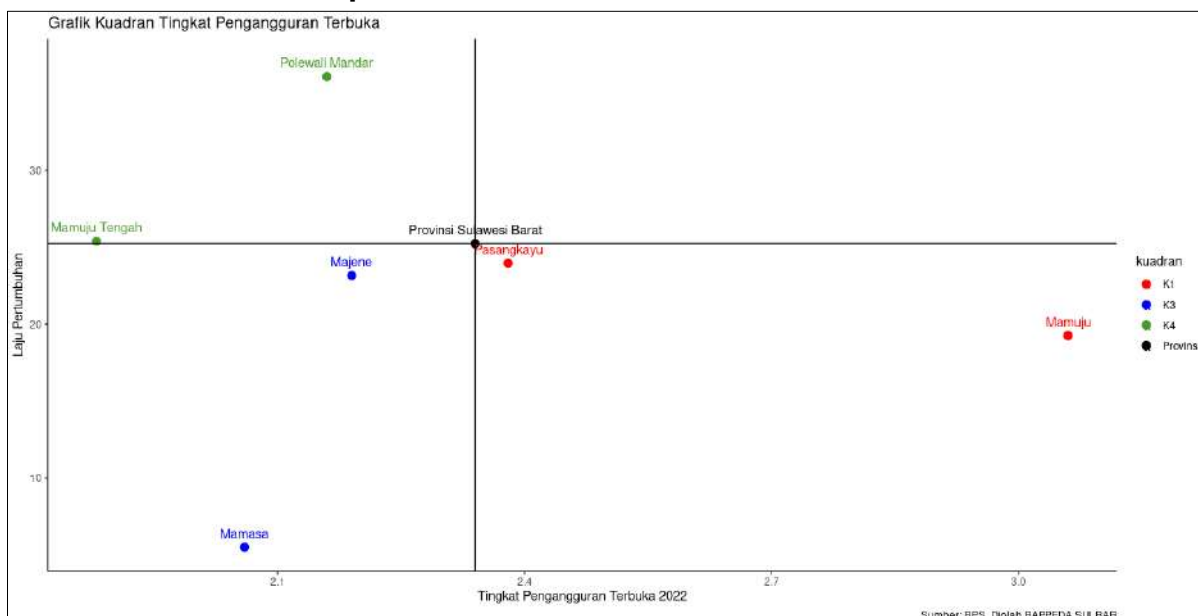
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Tabel 5.13 Kategori Capaian TPT Kabupaten**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian Provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIBAWAH capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT DIATAS capaian provinsi

- a) Kuadran I, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju.
- b) Kuadran III, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.
- c) Kuadran IV, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah.

**Grafik 5.8 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Pertumbuhan TPT Kabupaten Tahun 2022-2023**



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Salah satunya dengan menyiapkan angkatan kerja dalam memenuhi kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

**Tabel 5.14 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten**

No	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
		Target		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Majene	2,70	2,00	2,19
2	Kabupaten Polewali Mandar	3,00	2,00	1,85
3	Kabupaten Mamasa	1,90	2,00	2,01
4	Kabupaten Mamuju	2,49	2,49	2,1
5	Kabupaten Pasangkayu	2,57	2,37	1,99
6	Kabupaten Mamuju Tengah	2,50	1,80	1,7
	Provinsi Sulawesi Barat	2,98	2,76	1,1–1,8

#### 4. Persentase Penduduk Miskin





Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5.15 Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten**

No	Kabupaten	Tingkat Penduduk Miskin (Persen)	
		Realisasi	
		2022	2023
1	Kabupaten Majene	15,13	14,54
2	Kabupaten Polewali Mandar	16,39	16,08
3	Kabupaten Mamasa	14,51	14,31
4	Kabupaten Mamuju	7,63	7,57
5	Kabupaten Pasangkayu	5,09	4,79
6	Kabupaten Mamuju Tengah	7,17	7,32
Provinsi Sulawesi Barat		11,75	11,49

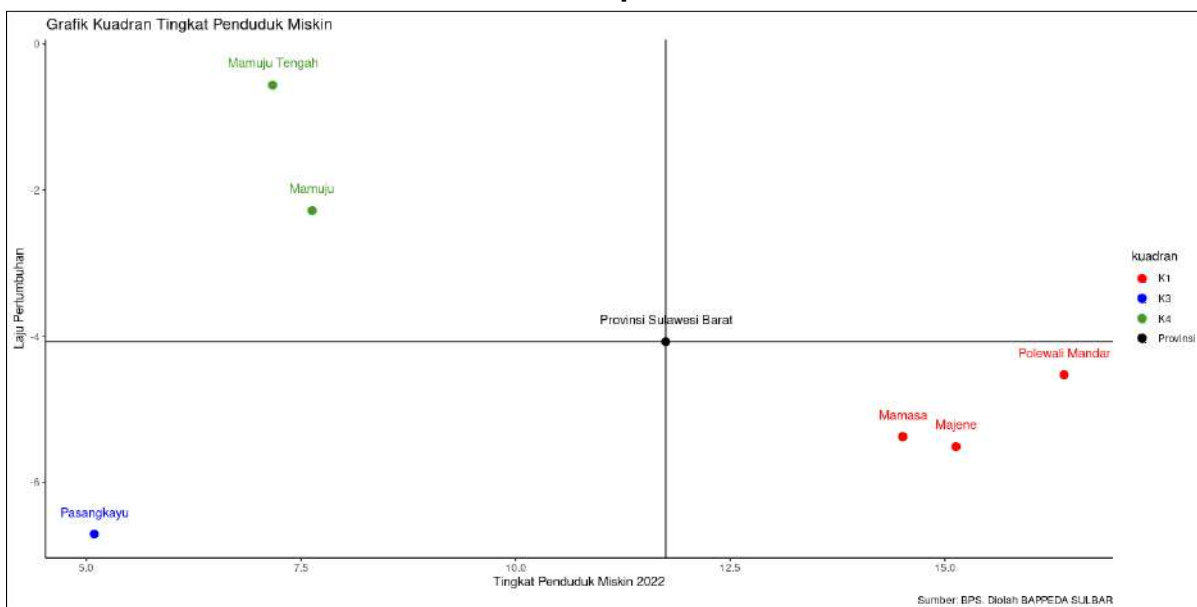
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Tabel 5.16 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten**

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

- a) Kuadran I, Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.
- b) Kuadran III, Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju.
- c) Kuadran IV, Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pasangkayu.

**Grafik 5.9 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tahun 2022-2023**



Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten tahun 2024.

**Tabel 5.17 Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten**

No	Kabupaten	Tingkat Penduduk Miskin (Persen)		
		Target		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Majene	12,00	11,58	11,17
2	Kabupaten Polewali Mandar	15,20	15,71	15,37
3	Kabupaten Mamasa	12,60	13,00	11,81
4	Kabupaten Mamuju	5,50	6,00	4,5
5	Kabupaten Pasangkayu	4,43	4,40	4,1
6	Kabupaten Mamuju Tengah	6,13	5,17	6,27
Provinsi Sulawesi Barat		10,72	10,25	8,0-9,0

## 5. Indeks Gini Rasio

Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Distribusi tersebut digambarkan dengan angka 0-1, dimana angka 1 menunjukkan ketimpangan terbesar antar daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Indeks Gini Ratio kabupaten tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja Indeks Gini Ratio kabupaten dapat ditampilkan sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 5.18 Capaian Indeks Gini Ratio Kabupaten**

No	Kabupaten	Indeks Gini Rasio (Poin)	
		Realisasi	
		2022	2023
1	Kabupaten Majene	0,377	0,340
2	Kabupaten Polewali Mandar	0,392	0,333
3	Kabupaten Mamasa	0,325	0,380
4	Kabupaten Mamuju	0,388	0,372
5	Kabupaten Pasangkayu	0,320	0,292
6	Kabupaten Mamuju Tengah	0,354	0,344
Provinsi Sulawesi Barat		0,362	0,351

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten tahun 2024. Berikut merupakan target indeks gini rasio :

**Tabel 5.19 Penetapan Target Indeks Gini Ratio Kabupaten**

No	Kabupaten	Indeks Gini Ratio (Poin)		
		Target		
		2023	2024	2025
1	Kabupaten Majene	0,336	0,329	0,321
2	Kabupaten Polewali Mandar	0,330	0,313	0,325
3	Kabupaten Mamasa	0,330	0,310	0,330
4	Kabupaten Mamuju	0,280	0,300	0,320
5	Kabupaten Pasangkayu	0,375	0,280	0,270
6	Kabupaten Mamuju Tengah	0,375	0,300	0,285
Provinsi Sulawesi Barat		0,350	0,346	0,345-0,349

## 6. Indikator Utama Pembangunan (31 Indikator)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 terdapat 31 Indikator Pembangunan yang merupakan pengukuran dari keberhasilan capaian pembangunan diantaranya:

**Tabel 5.20 Target Indikator Utama Pembangunan**

Target Provinsi Tahun 2025		Target Tahun 2025					
Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama		Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,37	5,5	4,5	4,7 – 5,8	8,67	4,35 – 5,76
2.	Tingkat Kemiskinan	11,17	15,37	11,81	4,5	4,1	6,27
3.	Indeks Modal Manusia		n/a		0		
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,19	1,85	2,01	2,1	1,99	1,7
5.	Rasio Gini	0,321	0,326	0,33	0,32	0,27	0,285
6.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		n/a		59,0	72,34	
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27	25,5	28,5	30,7	n/a	25,15
8.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		n/a		n/a	n/a	
9.	Ekspor Barang dan Jasa		15,1		n/a		
10.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		5,55		n/a		
11.	Konsumsi Listrik per Kapita		1010		634788000		
12.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		n/a		n/a		
13.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan		11,16 – 11,21				
14.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)		0,868		0,065		0,045

Target Provinsi Tahun 2025		Target Tahun 2025					
Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama		Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				n/a		
16.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)		67,15		67,5		
17.	Indeks Integritas Nasional		74,13		75		
18.	PDRB per kapita		40,5 – 40,56	21,33	54,32		31,69
19.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi		42,84	88	62,23		
20.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal		5		5 orang		
21.	Kontribusi PDRB Provinsi		27,5		24,74		
22.	Penurunan intensitas emisi GRK		34,9		0	0,4	
23.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		61,4		50,01	76,07	
24.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		n/a		4		
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,95		3,8	2,5	
26.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		1,4		5,21		
27.	Tingkat Inflasi		2		2,25		
28.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		9,82		n/a		
29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,47		0,510		
30.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		0,24		0,29		
31.	Indeks Demokrasi Indonesia		Sedang		n/a	8,67	



## **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, setelah dirumuskan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka selanjutnya diperlukan perumusan program pada level *outcome* dan kegiatan pada level *output* yang nantinya akan saling memberikan kontribusi terhadap pencapaian di atasnya, sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas yakni *impact*. Agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud, yang pada hakekatnya dokumen perencanaan tahunan (RKPD) menjadi penjabaran/ pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka dirumuskan program-program yang diharapkan menjadi solusi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan daerah setelah memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2023.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tabel 6.1 berikut ini.



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	251.550.000,00			-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-	516.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2 Dokumen	66.550.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		66.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada  Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	375.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-	-	555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	450.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	1.025.500.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-	1.510.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	5.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	600.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	600.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-	1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	550.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	-	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersekap pada Perguruan Tinggi Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi Persentase Lulusan SMK yang Tersekap dalam IDUKA Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, Inklusivitas Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i>	-			92,39 Persen 42,23 Persen 53,31 Persen 75,01 Nilai 93,44 Persen 2,34 Nilai	152.544.342.837,00						-	281.701.301.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan	-			100 Persen	62.131.791.156,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas	-	105.661.661.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Pana, Manipi	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	1.091.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		2.660.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	247.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				4 Unit	1.022.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		4.004.850.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				4 Ruang	630.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Ruang	281.359.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		361.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Ruang	264.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		378.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				1 Ruang	208.687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				50 Paket	2.496.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		3.889.487.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	582.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		366.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Dapurang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		1.942.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				2 Paket	193.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		295.208.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				3500 Peserta didik	3.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Sekolah Menengah Atas		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				120 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>				1704 Orang	321.851.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		439.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				300 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				25 Satuan Pendidikan	554.977.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKONSTRUKSI DAN PERAWAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		3.315.015.220,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS</i>				92 Satuan Pendidikan	36.309.910.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		54.542.708.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</i>				92 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		292.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				11 Unit	176.319.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas														
			<i>Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi</i>				12 Orang	150.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				400 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				2 Konten Digital	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				4 Dokumen	872.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		959.987.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				3 Dokumen	1.094.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				2 Komunitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				5 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Sekolah Menengah Atas		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				10 Buku	78.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		87.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				3 Unit	234.657.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		696.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				4 Ruang	1.431.224.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		2.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Ruang	719.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		852.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				2 Ruang	567.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				130 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	Sekolah Menengah Atas		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				93 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Sekolah Menengah Atas		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan</i>	-			100 Persen	73.862.496.681,00			-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-	-	146.751.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Pedongga, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Bajawali	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		21.961.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	2.129.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Bambang, Ulumambi Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				16 Ruang	3.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				10 Ruang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		2.928.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				4 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		2.196.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														
			<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				25 Unit	4.222.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi</i>				3 Ruang	1.184.847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi</i>				1 Ruang	311.172.000,00	Kab. Mamasa, Tandung Kalua, Sindagamanik	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				2 Paket	894.117.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	582.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				13 Paket	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				8486 Peserta didik	2.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Penganan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				270 Peserta Didik	1.275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		439.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				129 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS</i>				129 Satuan Pendidikan	30.463.135.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		49.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</i>				129 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				155 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				400 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				150 Konten Digital	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				129 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				2 Dokumen	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														
			<i>Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi</i>				30 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				5 Komunitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK														
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			<i>Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi</i>				50 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				2700 Buku	275.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				2 Unit	142.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMA	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		2.196.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			<i>Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi</i>				1 Ruang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				4 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				9 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				129 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	206.451.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				36 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	16.550.055.000,00			-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		29.288.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		878.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		1.431.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		1.431.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				10 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			<i>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				2 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		1.431.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				2 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik														
			<i>Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				4 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		1.031.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				409 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				649 Peserta Didik	800.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				75 Orang	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS</i>				25 Satuan Pendidikan	5.988.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				25 Orang	211.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		311.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				1 Konten Digital	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		311.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		311.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi</i>				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK														
			<i>Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia</i>				10 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				6 Ruang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				25 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				75 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Ruang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat</i>				1 Ruang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				1 Ruang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			<i>Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	-	-			-	<b>880.000.000,00</b>						-	<b>1.028.500.000,00</b>	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-			-	550.000.000,00			-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		665.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				136 Orang	275.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		363.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun</i>				1 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-			-	330.000.000,00			-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		363.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				30 Orang	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun</i>				1 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	285.000.000,00						-	423.500.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	285.000.000,00			-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	423.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.2.2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-			-	530.000.000,00						-	917.950.000,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	530.000.000,00			-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-	-	917.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun</i>				100 Kamus	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan</i>				6 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi</i>				3530 Buku	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-		554.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun</i>				1 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.2.4. Penguatan Literasi Sekolah	-		121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>7.506.500.000,00</b>							<b>20.235.575.000,00</b>	
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>7.506.500.000,00</b>							<b>20.235.575.000,00</b>	
1.	<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	-	-			-	<b>4.531.500.000,00</b>						-	<b>5.989.950.000,00</b>	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	3.061.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				3 Objek	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		2.196.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				12 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		465.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara</i>				2 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	481.500.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	732.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				3 Objek	281.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Peng embangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		532.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.600.000.000,00			-	1.2.5. Peng embangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	2.196.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				2 Objek	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Peng embangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>				12 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Peng embangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>				1 Unit	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		1.398.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional</b>	-	-			-	<b>475.000.000,00</b>						-	<b>832.400.000,00</b>	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	475.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	832.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>				30 Sertifikat	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				3 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		133.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	1.300.000.000,00						-	3.913.140.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	3.913.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>				2 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		1.996.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		1.118.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
			<i>Jumlah Penulisan Sejarah Lokal</i> <i>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	-	-			-	<b>650.000.000,00</b>						-	<b>7.703.235.000,00</b>	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	399.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				3 Objek	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				3 Objek	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		199.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	450.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	7.303.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi</i>				3 Objek	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		705.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>				3 Objek	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		5.999.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>				3 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	-	-			-	<b>550.000.000,00</b>						-	<b>1.796.850.000,00</b>	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	550.000.000,00			-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-	-	1.796.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		399.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				12 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		199.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum</i>				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		332.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1.2.5. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Digital, serta Penguatan Kemitraan	-		532.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		332.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	NON URUSAN														
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD</i>	-			85 Poin 69,76 Poin 95 Poin 90 Poin	392.406.220.376,00						-	358.741.401.807,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	-			100 Persen	392.406.220.376,00			-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-	-	358.741.401.807,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3180 Orang/ Bulan	392.406.220.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	2.2.3. Penguatan Tata Kelola Pendidikan	-		358.741.401.807,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		<b>DINAS KESEHATAN</b>						<b>53.544.838.794,00</b>							<b>80.037.750.442,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>53.493.854.344,00</b>							<b>79.946.765.992,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>53.493.854.344,00</b>							<b>79.946.765.992,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan	-			87 Poin 68.5 Poin 95 Poin	21.251.153.792,00						-	38.290.193.992,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan	-			85 Persen 85 Poin	286.522.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	20.271.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	33.832.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	22.144.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	21.879.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	136.283.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	32.110.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan</i>	-			98 Persen	18.903.670.892,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat	-	18.925.193.992,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				135 Orang/ Bulan	18.779.193.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat		18.779.193.992,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	29.569.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat		31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.439.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	50.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	30.289.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Provinsi Sulawesi Barat		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah</i>	-			95 Persen	43.081.500,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	28.081.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan</i>	-			100 Persen	130.486.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				160 Paket	58.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	52.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Kesehatan</i>	-			100 Persen	626.370.400,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	17.012.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.870.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		16.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		475.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			95 Persen	80.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			97 Persen	996.523.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	96.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 Persen	184.500.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	336.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	28.922.700.552,00						-	36.608.572.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	4.100.182.552,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	6.335.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				2 Unit	3.628.182.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		3.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</i>				1 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				25 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas</i>				6 Unit	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				6 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Angka Kejadian Malaria Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Yang Manfaatkan Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah Jenis Pengadaan Barang dan jasa Untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Sesuai Standar Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan Jumlah Ketersediaan Jenis logistik kesehatan tersedia yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/Atau Berpotensi Bencana yang sesuai standar Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan pelayanan anak usia sekolah dan remaja Persentase kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi</i>	-			7.5 Angka 98 Persen 90 Persen 7 Jenis 97 Persen 3 Jenis 88 Persen 1 Dokumen 100 Persen 83 Persen 98.0 Persen 83 Persen 33 Persen 100 Persen 7 Kegiatan 94.9 Persen 95 Persen 50 Persen 9168 Orang 97 Persen 65 Persen 100 Persen 85 Persen 94.9 Persen 73.9 Persen 67 Persen 14 Persen 61.2 Persen 83 Persen 86 Persen 96 Persen 95 Persen 90 Persen 85 Persen 44 Persen 9,1 Persen 6,2 Persen 82 Persen 100 Persen	24.657.518.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	-	-	29.878.572.000,00	DINAS KESEHATAN	





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang diawasi / diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar Persentase tim penanggulangan krisis tenaga Kesehatan Yang di latih dalam Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di fasilitas kesehatan Persentase tim tenaga Kesehatan gerak cepat dalam Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang aktif di Fasilitas kesehatan Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat													
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1000 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	-		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1000 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.4. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	-		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>				8 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak	-		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				17 Dokumen	6.420.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		2.790.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		358.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				6 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				23 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				12 Dokumen	14.428.618.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		18.445.572.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota</i>				8 Dokumen	335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.137.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>				3 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-		76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota</i>				7 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>				1 Unit	58.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														
			<i>Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>				10 Paket	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		107.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.020.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>				125 Keluarga	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu</i>	-			23.81 Persen 97 Persen	85.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				3 Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Proporsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Yang Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas</i>	-			100 Persen 73.9 Persen	80.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				6 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	-			69 Persen	2.000.000.000,00						-	1.575.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut Yang sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Memenuhi Standar</i>	-			74 Persen 87.5 Persen	140.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				30 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi</i>				20 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	-			84 Persen	1.860.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.415.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				120 Orang	1.665.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				4 Dokumen	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Provinsi Sulawesi Barat		215.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial</i>	-			98 Persen	120.000.000,00						-	145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	<i>Persentase Layanan perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Sesuai Standar</i>	-			100 Persen	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan</i>				12 Sarana	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	<i>Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) diperedaran yang memenuhi standar</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			<i>Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>				6 Sarana	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	1.200.000.000,00						-	3.328.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	140.000.000,00			-	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	-	1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>				10 Dokumen	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Jenis Media Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</i>	-			9 Jenis	950.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.378.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Sulawesi Barat		1.020.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Sulawesi Barat		358.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase desa yang melaksanakan UKBM</i>	-			55 Persen	110.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Sulawesi Barat	-	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				5 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Sulawesi Barat		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X	NON URUSAN						50.984.450,00							90.984.450,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						50.984.450,00							90.984.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<p>Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan</p> <p>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan</p>	-			68.5 Poin  87 Poin 95 Poin	50.984.450,00						-	90.984.450,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 Persen	50.984.450,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	90.984.450,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	50.984.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		90.984.450,00	DINAS KESEHATAN
		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>						<b>124.385.854.496,00</b>							<b>124.386.663.983,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						124.366.615.496,00							124.367.424.983,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						124.366.615.496,00							124.367.424.983,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<p>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas Kesehatan</p> <p>Nilai SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan</p> <p>Nilai Rapor SPBE Lingkup Dinas Kesehatan</p>	-			95 Poin 68.5 Poin  87 Poin	112.550.077.628,00						-	112.550.887.115,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Kesehatan	-			85 Persen 85 Poin	64.650.132,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	65.459.619,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.692.076,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.692.076,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.692.076,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.692.076,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.692.076,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.692.076,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.094.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		8.094.876,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.094.876,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		8.904.363,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	9.692.076,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.692.076,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	9.692.076,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.692.076,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.902.025.181,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	50.902.025.181,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				4212 Orang/ Bulan	50.902.025.181,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		50.902.025.181,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada  Perangkat Daerah	-	-			-	6.413.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	6.413.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Dokumen	6.413.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.413.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.050.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	6.050.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				12 Dokumen	6.050.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.050.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	750.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	750.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	750.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		750.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	60.470.939.315,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	60.470.939.315,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	60.470.939.315,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		60.470.939.315,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	10.232.217.223,00						-	10.232.217.223,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	9.809.105.789,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	9.809.105.789,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit</i>				3 Unit	545.782.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		545.782.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				10 Unit	8.373.373.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		8.373.373.789,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				5 Unit	889.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		889.950.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	227.277.864,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	227.277.864,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				12 Dokumen	227.277.864,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		227.277.864,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	195.833.570,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	195.833.570,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i>				1 Unit	102.333.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		102.333.570,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				37 Unit	93.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		93.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	-	-			-	<b>1.584.320.645,00</b>						-	<b>1.584.320.645,00</b>	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	984.502.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	984.502.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				2 Orang	984.502.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		984.502.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	599.818.645,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	599.818.645,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				750 Orang	599.818.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		599.818.645,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>19.239.000,00</b>							<b>19.239.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>19.239.000,00</b>							<b>19.239.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>19.239.000,00</b>						-	<b>19.239.000,00</b>	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	19.239.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	19.239.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	6.413.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.413.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	6.413.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.413.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	6.413.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		6.413.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>92.622.686.220,00</b>							<b>105.968.000.000,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						92.622.686.220,00							105.968.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						92.622.686.220,00							105.968.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Dinas PUPR Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup Dinas PUPR</i>	-			100 Persen 68,50 Poin 68,5 Poin	19.408.344.220,00						-	22.512.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD</i>	-			6,50 Poin 12 Poin 100 Persen 23 Poin 12,50 Poin 18 Poin	453.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	441.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	217.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	105.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.801.255.064,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	13.873.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				149 Orang/ Bulan	15.572.255.064,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		13.644.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				157 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2500 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				24 Dokumen	157.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		147.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				24 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada  Perangkat Daerah	-	-			-	8.500.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				525.000.000,00			-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	530.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	225.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				149 Orang	110.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	395.589.156,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	490.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.089.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			95 Persen	220.000.000,00			-	-	-	-	1.425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				25 Unit	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	165.000.000,00			-	-	-	-	198.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		123.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	-			95 Persen	840.000.000,00			-	-	-	-	505.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				30 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	285.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				60 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Sumare	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b><i>Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik</i></b>	-			42,08 Persen	9.164.342.000,00						-	13.586.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perencanaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun</i>	-			3 Dokumen	400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Pengguna Air	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Pengguna Air		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Pengguna Air		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara</i>	-			210 Hektar 1131 Hektar	8.764.342.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air	-	13.186.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				1.5 KM	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				2 KM	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tapango, Tapango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan</i>				0.5 KM	200.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tandung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				0.3 KM	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Masyarakat Pengguna Air		5.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Bambaيرا, Bambaيرا Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				5 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara</i>				2 Bendung	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		716.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				2 Dokumen	714.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Aralle, Aralle	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pengguna Air		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b><i>Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten 'Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) 'Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)</i></b>	-			<b>69,1 Persen 19 Persen 23 Persen</b>	<b>240.000.000,00</b>						-	<b>900.000.000,00</b>	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Persentase kesiapan pembangunan dan pengelolaan SPAM Regional Polman-Majene</i>	-			30,13 Persen	240.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				2 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>'Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah</b>	-			12 Persen	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Upaya Pemenuhan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</b>	-			100 Persen	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Jumlah dokumen koordinasi dan pendataan terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>'Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung</i>	-			100 Persen 78,57 Persen	460.000.000,00						-	6.350.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>	-			13 Dokumen	460.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	6.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)</i>				1 Bangunan Gedung Negara	160.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara</i>				1 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				1 Bangunan Gedung	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya</b>	-			<b>25 Persen</b>	<b>250.000.000,00</b>						-	<b>1.200.000.000,00</b>	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi</i>	-			3 Dokumen	250.000.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				1 Kawasan	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b><i>Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana</i></b>	-			<b>53,19 Persen 53,19 Persen 100 Persen</b>	<b>62.050.000.000,00</b>						-	<b>56.215.000.000,00</b>	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana Panjang jalan dan jembatan provinsi yang dipelihara</i>	-			20,03 Kilometer 83 Kilometer 37,10 Kilometer	62.050.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	masyarakat sulawesi barat	-	56.215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				2 Jembatan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	masyarakat sulawesi barat		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				0.3 KM	350.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	masyarakat sulawesi barat		10.466.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				4 Jembatan	15.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	masyarakat sulawesi barat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				95 KM	800.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	masyarakat sulawesi barat		2.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				6,5 KM	45.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	masyarakat sulawesi barat		40.149.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				528 KM	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	masyarakat sulawesi barat		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan</i>				12 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Masyarakat Sulawesi barat		1.428.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>				200 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Masyarakat Sulawesi barat		1.428.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</i>	-			1 Laporan	180.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	<i>Jumlah Laporan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</i>	-			2 Laporan	100.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>'Penyelesaian Materi Teknis RTRW Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang Sesuai Dengan RTRW Provinsi</b>	-			1 Kabupaten/Kota 38,8 Persen	500.000.000,00						-	1.469.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi</i>	-			0 Dokumen	75.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				15 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<i>Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i>	-			3 Dokumen	125.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-			2 Dokumen	120.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	-			1 Dokumen	180.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat	-	619.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>				1 Kasus	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		219.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0008	Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif</i>				1 Kasus	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat Sulawesi barat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN</b>								<b>27.690.629.357,00</b>						<b>75.203.390.000,00</b>		
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>13.413.296.724,00</b>							<b>37.815.390.000,00</b>	
	<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>13.413.296.724,00</b>							<b>37.815.390.000,00</b>	
1.	<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>6.413.296.724,00</b>						-	<b>6.215.500.000,00</b>	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	184.286.526,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	382.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	130.135.486,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2 Dokumen	18.999.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	10.151.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		32.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.259.231.372,00			-	-	-	-	4.570.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					43 Orang/ Bulan	5.208.187.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					45 Dokumen	10.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				20 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				20 Laporan	8.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				10 Dokumen	9.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				5 Dokumen	11.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	6.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	412.782.691,00			-	-	-	-	554.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	11.564.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	32.310.591,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		40.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	30.407.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	534.996.135,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	589.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				37 Laporan	400.798.048,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	104.110.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	16.779.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	13.307.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2.	<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	-	-			-	<b>1.950.000.000,00</b>						-	<b>8.219.000.000,00</b>	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	310.000.000,00			-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	1.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				5 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi</i>				5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		215.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi</i>				5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	1.204.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</i>				50 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		251.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>				60 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		315.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				50 orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		112.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0008	Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi</i>				50 orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		251.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	1.400.000.000,00			-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		5.360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>				50 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		4.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan</i>				50 Unit Rumah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi</i>				20 Unit Rumah	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	40.000.000,00			-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-	-	505.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan</i>				5 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>				50 Rumah Tangga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
3.	<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>7.806.000.000,00</b>	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina</i>				50 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	800.000.000,00			-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-	-	7.601.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki</i>				100 Unit Rumah	800.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Totoli Kab. Majene, Pamboang, Bonde Kab. Majene, Banggae Timur, Baurung Kab. Mamasa, Mamasa, Osango Kab. Mamasa, Sumarorong, Tabone Kab. Mamasa, Messawa, Messawa Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Barakkang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		7.601.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	-	-			-	<b>4.000.000.000,00</b>						-	<b>15.273.350.000,00</b>	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	4.000.000.000,00			-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	15.273.350.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</i>				50 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		1.360.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														
			<i>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman</i>				50 Lokasi	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		13.402.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman</i>				3 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		305.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang</i>				20 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		205.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
5.	1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-			-	50.000.000,00						-	301.540.000,00	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	-			-	50.000.000,00			-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-	-	301.540.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah</i>				5 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		301.540.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						14.000.000.000,00							36.500.000.000,00	
	2.10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						14.000.000.000,00							36.500.000.000,00	
1.	2.10.03	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	-	-			-	14.000.000.000,00						-	36.500.000.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-			-	14.000.000.000,00			-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-	-	36.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>				20 Dokumen	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah</i>				20 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan</i>				25 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			<i>Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>				20 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>277.332.633,00</b>							<b>888.000.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>277.332.633,00</b>							<b>888.000.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>277.332.633,00</b>						-	<b>888.000.000,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.963.500,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	17.143.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	10.819.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.469.400,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	10.469.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	178.899.733,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	138.099.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	40.800.683,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	
		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>							<b>21.448.828.198,00</b>							<b>39.885.492.000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>21.248.828.198,00</b>							<b>39.645.492.000,00</b>		
	<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>21.248.828.198,00</b>							<b>39.645.492.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	-			75 Poin 95 Persen 85 Persen 4.2 Poin	20.036.428.198,00						-	30.909.492.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD	-			26 Poin 100 Persen 20 Poin 10 Poin	18.000.000,00			-	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat	-	252.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			95 Persen	12.950.626.863,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat	-	20.987.292.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				120 Orang/ Bulan	12.838.626.863,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		16.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		3.947.292.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			85 Persen	3.609.587.040,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat	-	1.743.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	449.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		423.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	3.079.087.040,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				33 Orang	81.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		720.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	1.537.034.795,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat	-	1.878.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	69.446.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	408.885.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	159.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				8 Laporan	745.382.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		720.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	129.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Lingkup Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.311.179.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	4.416.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	623.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		2.916.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				53 Unit	657.979.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	210.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	552.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	400.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah	-	1.080.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				17 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah		480.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				18 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Barang Milik Daerah		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi</i>	-			100 Persen	1.032.400.000,00						-	5.376.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditangani</i>	-			100 Persen	722.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Warga Sulawesi Barat	-	3.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>				6 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Warga Sulawesi Barat		540.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				12 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>				25 laporan	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		780.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			<i>Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja</i>				100 Orang	227.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		840.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				20 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		420.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	<i>Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani sesuai SOP</i>	-			100 Persen	175.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat	-	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				6 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		540.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				6 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Warga Sulawesi Barat		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>				6 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	<i>Persentase PPNS yang dibina</i>	-			100 Persen	135.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	576.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</i>				1 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		576.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten</i>	-			100 Persen	180.000.000,00						-	3.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	<i>Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>	-			100 Persen	180.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat	-	3.360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>				1 Dokumen	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait</i>				1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Warga Sulawesi Barat		2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X	NON URUSAN						200.000.000,00							240.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						200.000.000,00							240.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	200.000.000,00						-	240.000.000,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>								<b>11.645.599.587,00</b>							<b>8.056.188.040,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.570.599.587,00							7.496.188.040,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.570.599.587,00							7.496.188.040,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD</i>	-			85 Poin 80 Poin 90 Porsen	5.970.599.587,00						-	5.331.188.040,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			95 Porsen	196.335.711,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	227.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	18.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/Bulan	3.894.642.547,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		3.890.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	17.580.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	50.720.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah lingkup SKPD</i>	-			95 Persen	36.990.000,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	36.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			95 Persen	185.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			95 Persen	222.420.000,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	445.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	113.420.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		290.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	1.030.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 Persen	122.593.289,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	123.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	13.540.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	109.052.789,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		98.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 Persen	214.318.040,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar	-	261.188.040,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	59.440.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		60.440.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				28 Unit	143.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		185.870.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	6.556.840,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		7.556.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	5.321.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Prov. Sulbar		7.321.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<i>Indeks risiko bencana yg diturunkan</i>	-			153,85 Poin	5.600.000.000,00						-	2.165.000.000,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	<i>Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan di nyatakan Sah/Legal</i>	-			100 Persen	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota</i>				80 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase peningkatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana</i>	-			95 Persen	4.100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha	-	850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas</i>				4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														
			<i>Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani</i>				6 Kegiatan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana</i>				650 Orang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase Penanganan tanggap darurat Bencana</i>	-			100 Persen	1.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha	-	765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			<i>Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</i>				6 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				2500 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		425.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</i>				6 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.2. Cepat Tanggap Darurat Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	-			90 Persen	250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3.2.3. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun</i>				6 kabupaten/kota	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	3.2.3. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana	Aparatur, Tokoh Masyarakat, Swasta dan dunia usaha		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	NON URUSAN						75.000.000,00							560.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						75.000.000,00							560.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD</i>	-			80 Poin 90 Persen 85 Poin	75.000.000,00						-	560.000.000,00	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			95 Persen	75.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	560.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		560.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<b>DINAS SOSIAL</b>						<b>15.838.484.612,00</b>							<b>26.353.800.020,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.812.034.612,00							26.320.300.020,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						15.812.034.612,00							26.320.300.020,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD</i>	-			3,78 Poin 80 Poin 71,50 Persen 92,84 Persen	8.864.034.612,00						-	9.385.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			26 Poin 14 Poin 14 Poin 26 Poin	157.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	282.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial		13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan	Dinas Sosial		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			90 Persen 99,48 Persen	7.061.956.552,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial	-	7.014.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				61 Orang/Bulan	7.051.856.552,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		7.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				120 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial	-	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	238.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial	-	307.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				61 Paket	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Sosial		40.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	529.450.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	763.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	65.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	38.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Sosial		450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	86.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	86.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 Persen	249.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial	-	357.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		87.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	74.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	115.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Sosial		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Pemberdayaan Sosial</i>	-			53,57 Persen	400.000.000,00						-	1.545.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Izin dan Non Izin Pelaksanaan UGB dan PUB yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan</i>	-			100 Persen	30.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Penyelenggara UGB & PUB	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>				6 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Penyelenggara UGB & PUB		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	<i>PSKS yang memiliki Kompetensi Pemberdayaan Sosial</i>	-			66 Persen	370.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PSKS	-	1.345.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PSKS		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				69 Orang	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PSKS		625.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				10 Lembaga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PSKS		570.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	-			100 Persen	5.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	<i>Persentase Penanganan KTK PM yang dipulangkan</i>	-			100 Persen	5.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	KTK PM	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	KTK PM		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial</i>	-			53 Persen	1.268.000.000,00						-	3.675.000.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	<i>Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</i>	-			100 Persen	468.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS	-	1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>				3 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	<i>Persentase Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial</i>	-			100 Persen	387.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	PPKS	-	830.000.020,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	PPKS		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		20,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				100 Orang	130.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>				6 Dokumen	67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	<i>Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial</i>	-			100 Persen	288.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS	-	1.165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	90.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				90 Orang	60.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				20 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				61 Orang	83.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	PPKS		480.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi</i>				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantii	<i>Persentase Gelandangan dan Pengemis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial</i>	-			100 Persen	25.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				20 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			<i>Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	-	-			-	100.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS	-	260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				35 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		260.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b><i>Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi</i></b>	-			60 Persen	4.225.000.000,00						-	10.360.000.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	<i>Persentase Anak yang mendapatkan hak asuh sesuai dengan ketentuan</i>	-			100 Persen	5.000.000,00			-	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	-	-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>				5 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.4.1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Perluasan Jangkauan Perlindungan Sosial	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	<i>Persentase Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS</i>	-			100 Persen	4.220.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS	-	10.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				320 Keluarga	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		4.800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>				104.003 Keluarga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Penanganan Kemiskinan	PPKS		1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				2920 Orang	3.020.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PPKS		4.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<i>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi</i>	-			100 Persen	1.000.000.000,00						-	1.005.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	<i>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Tertangani</i>	-			100 Persen	1.000.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulanga n Bencana Daerah	PPKS	-	1.005.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi</i>				5000 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulanga n Bencana Daerah	PPKS		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>				5000 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulangn Bencana Daerah	PPKS		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>				50 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulangn Bencana Daerah	PPKS		280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi</i>				150 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	3.2.3. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana	PPKS		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi</i>				800 Orang	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	SS-3.1. Me nguatkan Sistem Pen anggulang an Bencana Daerah	PPKS		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi</i></b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000,00</b>						-	<b>150.000.000,00</b>	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	<i>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-2.2. Me mpercepat Pengentas an Kemiskinan dan Ketimp an gan	PSKS	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Makam	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	PSKS		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X	NON URUSAN						26.450.000,00							33.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						26.450.000,00							33.500.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD</i>	-			3,78 Poin 80 Poin 71,50 Persen 92,84 Persen	26.450.000,00						-	33.500.000,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			26 Poin 14 Poin 14 Poin 26 Poin	7.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	7.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			90 Persen 99,48 Persen	19.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	22.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	14.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		17.000.000,00	DINAS SOSIAL	
		<b>DINAS TENAGA KERJA</b>							<b>39.733.266.881,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>38.167.279.633,00</b>							<b>0,00</b>		
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>38.167.279.633,00</b>							<b>0,00</b>		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	<b>9.184.370.633,00</b>						-	<b>0,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	321.427.700,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	41.427.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.336.821.490,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				65 Orang/Bulan	8.276.821.490,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				65 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	131.121.443,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	21.568.493,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	109.552.950,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	175.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	-	-			-	<b>8.600.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	8.500.000.000,00			-	1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				1000 Orang	7.770.145.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja</i>				8 Unit	729.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.3.9. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja melalui Penguatan Vokasi dan Kompetensi serta Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Produktif	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	50.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				10 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	-	-			-	<b>19.400.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.075.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				5460 Orang	18.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD</i>				16 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	250.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)</i>				1000 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-			-	75.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				16 Orang	75.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	-	-			-	<b>520.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>				5 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek</i>				10 Laporan	50.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	240.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				25 Perkara	100.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				10 Perkara	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi</i>				25 Perusahaan	90.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	180.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			<i>Jumlah Penetapan UMP</i>				1 Surat Keputusan	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	-	-			-	<b>462.909.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	462.909.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>				500 Perusahaan	302.909.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>				3 Kasus	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>				50 Perusahaan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	NON URUSAN						1.565.987.248,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.565.987.248,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.565.987.248,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	195.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	530.731.950,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	72.107.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	158.624.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	435.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	185.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.255.298,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	95.255.298,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>8.982.667.999,00</b>							<b>14.130.504.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>8.982.667.999,00</b>							<b>14.130.504.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.522.667.999,00							11.706.504.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD	-			85 Poin 70,0 Poin	6.840.667.999,00						-	8.235.000.000,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			75 Poin	90.000.000,00			-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	6.048.403.789,00			-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur	-	-	5.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/Bulan	6.008.403.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur	-		5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	95.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				50 Paket	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			90 Persen	440.000.000,00			-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	60.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 Persen	57.264.210,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				100 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	12.264.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				50 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b><i>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender</i></b>	-			<b>88,10 Persen</b>	<b>437.000.000,00</b>						-	<b>825.000.000,00</b>	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	287.000.000,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Perangkat Daerah	-	475.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi</i>				1 Laporan	137.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Perangkat Daerah		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi</i>				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Organisasi Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				30 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Organisasi Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan)</i>	-			95,76 Persen	454.665.000,00						-	1.289.504.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kab yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah dalam Pencegahan KDRT</i>	-			6 Kabupaten	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan	-	260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				6 Perangkat Daerah	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah dan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan</i>	-			6 Kabupaten	129.665.000,00			-	1. Penanganan Kemiskinan	-	-	429.504.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat</i>				30 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penanganan Kemiskinan	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i>				30 Layanan	54.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Penanganan Kemiskinan	-		254.504.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakn Advokasi Kebijakan dan Pendampingan bagi Perempuan Korban Kekerasan	-			6 Kabupaten	175.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				35 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Perempuan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b><i>Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Terpilah</i></b>	-			86 Persen	50.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Kabupaten yang Menyajikan Data Gender dan Anak di Tingkat Provinsi</i>	-			6 Kabupaten	50.000.000,00			-	1. Penanganan Kemiskinan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penanganan Kemiskinan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b><i>Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak</i></b>	-			100 Persen	515.335.000,00						-	782.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Kabupaten yang Mendapatkan Penghargaan KLA</i>	-			100 Persen	415.335.000,00			-	1. Penanganan Kemiskinan	-	-	635.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penangan Kemiskinan	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			<i>umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi</i>				25 perangkat daerah	215.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penangan Kemiskinan	-		235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Penangan Kemiskinan	-	-	147.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														
			<i>jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Penangan Kemiskinan	-		147.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
6.	<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar</b>	-			<b>84,85 Persen</b>	<b>225.000.000,00</b>						-	<b>275.000.000,00</b>	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM yang Terlatih tentang Aplikasi Data Simfoni</i>	-			50 Orang	125.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Anak	-	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	Anak		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan</i>	-			6 Kabupaten 20 lembaga	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Penanganan Pernikahan Usia Anak	AMPK	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Penanganan Pernikahan Usia Anak	AMPK		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>460.000.000,00</b>							<b>2.424.000.000,00</b>	
1.	<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<i>Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun</i>	-			<b>2,52 Persen</b>	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>1.175.000.000,00</b>	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	-			6 Kabupaten	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	-	-	1.175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Penangan Pernikahan Usia Anak	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun) Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)</i>	-			22 Persen 9,8 Persen	180.000.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-			6 Kabupaten	180.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Masyarakat PUS	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	Masyarakat PUS		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan</i>				6 Daerah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.3.3. Peningkatan Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak	Masyarakat PUS		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Prevalensi Perkawinan Anak</i>	-			60,00 Indeks 15 Persen	130.000.000,00						-	599.000.000,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-			6 Kabupaten	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penanganan Kemiskinan	-	-	410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>				35 Keluarga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Penangan Kemiskinan	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			<i>Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</i>				25 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta ORmas Tingkat Daerah Provinsi	-			6 Kabupaten	30.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.2. Peningkatan Akses Pangan Keluarga yang Berkualitas	Organisasi Masyarakat	-	189.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga															
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				25 Organisasi	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.2. Peningkatan Akses Pangan Keluarga yang Berkualitas	Organisasi Masyarakat		189.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
		<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>							<b>13.454.029.104,00</b>							<b>14.980.000.000,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>13.454.029.104,00</b>							<b>14.980.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						13.454.029.104,00							14.980.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	-			80 Poin 90 Persen 4,20 Poin	5.895.029.104,00						-	7.740.000.000,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD	-			30 Poin 15 Poin 30 Poin 25 Poin	221.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD	-	795.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Lingkup OPD		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Lingkup OPD		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			100 Persen 98 Persen	5.175.137.744,00			-	-	-	-	5.220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/Bulan	5.172.137.744,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	55.000.000,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				70 Paket	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	199.891.360,00			-	-	-	-	730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				25 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				25 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	101.891.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	32.000.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	72.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	140.000.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				5 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<i>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tingkat Kecukupan Protein (AKP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal Inflasi Pangan Bergejolak</i>	-			92,99 Nilai 100 Persen 78 Nilai 26,32 Persen 5 Persen	5.879.000.000,00						-	5.220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah Laporan Harga Pangan sebagai bahan kebijakan pengendalian inflasi pangan Tersedianya Informasi Stok Pangan Pokok Strategis, informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi, dan informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Persentase pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga</i>	-			1 Laporan 1 Dokumen 100 Persen	3.849.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat	-	2.620.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				1 Laporan	1.909.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				1 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi</i>				1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	<i>Persentase Cadangan Pangan Pemerintah</i>	-			30 TON	980.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat	-	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara</i>				106 Ton	100.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				20 Ton	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berkas Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				38 Ton	700.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berkas Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berkas Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	<i>Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</i>	-			1 Laporan	1.050.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat	-	1.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</i>	-			5,8 Persen	1.150.000.000,00						-	1.170.000.000,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	<i>Rekomendasi Kebijakan Peta dan kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi</i>	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<i>Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan</i>	-			1 Dokumen	950.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat	-	870.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				1 Dokumen	670.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan</i>	-			0,94 Persen	530.000.000,00						-	850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan</i>	-			100 Persen 30 Persen	530.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				3 Sertifikat	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Mene mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Hilirisasi dan Mene mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	96.722.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		68.224.248,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.327.048,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.327.048,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.327.048,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.327.048,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	56.754.240,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	29.198.328,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			90 Persen 99 Persen	6.314.195.924,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	5.151.535.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				53 Orang/ Bulan	6.278.464.164,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		5.086.535.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	35.731.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi KepegawaianLingkup OPD</i>	-			90 Persen	102.399.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	87.671.798,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				53 Paket	44.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		26.896.662,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	48.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				53 Orang	9.479.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		10.775.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			90 Persen	366.924.852,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	314.233.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	31.283.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		28.397.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		2.770.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		8.066.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				34 Paket	20.629.732,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		29.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	301.012.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		246.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			95 Persen	21.365.460,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	21.365.460,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			90 Persen	178.648.760,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	25.841.062,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	87.640.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		7.841.062,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				24 Laporan	91.008.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			90 Persen	149.187.560,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN	-	144.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	127.640.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		128.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	11.160.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		4.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	10.387.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	ASN dan Non ASN		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	-			100 Persen	195.000.000,00						-	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun	-			2 Dokumen	115.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji Provinsi	-			1 Dokumen	80.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<i>Persentase Ketaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan Hidup</i>	-			75 Persen	2.875.000.000,00						-	3.879.935.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu</i>	-			73,33 Persen	2.875.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat	-	3.879.935.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>				10 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim</i>				20 Laporan	1.630.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim</i>				6 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun</i>				2 laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														
			<i>Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		3.526.935.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan</i>				8 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b><i>Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i></b>	-			<b>0,54 Poin</b>	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Keanekaragaman Hayati</i>	-			100 Persen	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Limbah</b>	-			4,860 Persen	215.000.000,00						-	1.592.915.580,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah titik pengumpulan limbah B3</i>	-			8 Titik	215.000.000,00			-	SS-3.1. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	1.592.915.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				2 Dokumen	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		1.592.915.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH</b>	-			6,25 Persen	120.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	-			16 Usaha/Kegiatan	120.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	-			2 Persen	620.000.000,00						-	335.194.194,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project	-			2 Lembaga	620.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	335.194.194,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				200 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				10 Lembaga	465.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		120.194.194,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b><i>Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup</i></b>	-			17 Persen	50.000.000,00						-	113.724.633,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Penghargaan yang diberikan</i>	-			9 Penghargaan	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	113.724.633,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				2 Entitas	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		113.724.633,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<i>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	-			100 Persen	75.000.000,00						-	203.265.690,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	<i>Jumlah Pengaduan yang tertangani</i>	-			2 Pengaduan	75.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat	-	203.265.690,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				2 Pengaduan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Masyarakat		203.265.690,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<i>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Persampahan</i>	-			35 Persen 0,133 Persen	350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Volume Timbunan Sampah Yang Tertangani/terkelola	-			97404 TON	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.1.2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>5.855.271.408,00</b>							<b>4.623.080.089,27</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>2.022.174.563,00</b>							<b>1.433.176.011,00</b>	
	<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>2.022.174.563,00</b>							<b>1.433.176.011,00</b>	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	-			70 Poin 5 Poin 100 Persen	672.174.563,00						-	563.176.011,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD	-			10 Poin 20 Poin 20 Poin	41.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten	-	35.176.011,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		1.176.011,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	-			100 Persen	2.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	60.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				30 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	254.174.563,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	166.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	33.174.563,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				7 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				65 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	165.000.000,00			-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	60.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	90.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi	-	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Disdukcapil Provinsi		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				10	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik</b>	-			<b>95 Persen</b>	<b>450.000.000,00</b>						-	<b>350.000.000,00</b>	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	<i>Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</i>	-			100 Persen	180.000.000,00			-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten	-	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	-			100 Persen	170.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten	-	130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.2.3. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, khususnya bagi Pemilih Pemula	Disdukcapil Kabupaten		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</i>	-			100 Persen	100.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Bombong Lambe Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b><i>Cakupan Layanan Pencatatan Sipil</i></b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000,00</b>						-	<b>150.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase pengelolaan data layanan pencatatan sipil</i>	-			100 Persen	190.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	<i>persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</i>	-			100 Persen	110.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	Disdukcapil Kabupaten	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2.1.1. Penurunan Angka Perkawinan Anak	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	-			100 Persen	150.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Kabupaten		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	-			35,71 Persen	400.000.000,00						-	320.000.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi</i>	-			100 Persen	260.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi	-	210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi</i>	-			100 Persen	140.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Kabupaten	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Kabupaten		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>				24 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Kabupaten		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun</i>	-			100 Persen	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	<i>Persentase Penyediaan Profil Kependudukan</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Disdukcapil Provinsi		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	NON URUSAN						3.833.096.845,00							3.189.904.078,27	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.833.096.845,00							3.189.904.078,27	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD</i>	-			100 Persen 70 Poin 5 Poin	3.833.096.845,00						-	3.189.904.078,27	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	3.833.096.845,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	3.189.904.078,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29 Orang/ Bulan	3.833.096.845,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		3.189.904.078,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
								<b>10.410.752.887,00</b>							<b>15.741.454.645,00</b>	
									<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.410.752.887,00							15.741.454.645,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.410.752.887,00							15.741.454.645,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Dinas PMD Sulbar Nilai Indeks SPBE Dinas PMD Sulbar Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	-			98 Persen 3,20 Poin 74,50 Poin	6.510.752.887,00						-	8.271.454.645,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Dinas PMD Sulbar Nilai Pengukuran Kinerja Dinas PMD Sulbar Nilai Evaluasi Internal Dinas PMD Sulbar Nilai Pelaporan Kinerja Dinas PMD Sulbar</i>	-			22,35 Poin 22,35 Poin 18,63 Poin 11,18 Poin	145.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	9.560.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	14.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas PMD Sulbar Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Dinas PMD Sulbar</i>	-			29,40 Persen 68,40 Persen	5.233.947.527,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	5.069.454.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				42 Orang/ Bulan	5.151.947.527,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		4.909.454.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas PMD Sulbar</i>	-			97 Persen	13.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas PMD Sulbar</i>	-			97 Persen	105.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Dinas PMD Sulbar</i>	-			97 Persen	554.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	922.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	17.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				110 Laporan	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		67.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			97 Persen	57.245.360,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	57.245.360,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			97 Persen	176.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	620.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		325.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			97 Persen	225.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat	-	540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	62.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				15 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	13.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.	2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b><i>Persentase Desa yang Aktif Melakukan Kerjasama Desa</i></b>	-			<b>15,65 Persen</b>	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>440.000.000,00</b>	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Desa yang di Fasilitasi Kerjasama Desa</i>	-			60 Desa	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pemerintah Desa	-	440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pemerintah Desa		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pemerintah Desa		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa</i>	-			80,01 Persen	1.700.000.000,00						-	3.630.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	-			143 Desa	1.700.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa	-	3.630.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penanganan Pernikahan Usia Anak	Pemerintah Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			<i>Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>				176 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Desa		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4.	2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b><i>Persentase PKK Aktif</i></b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>2.000.000.000,00</b>						-	<b>3.400.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif Jumlah PKK Aktif	-			2271 Posyandu 575 Desa	2.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Penanganan Stunting	Posyandu, PKK	-	3.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Penanganan Stunting	Posyandu, PKK		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya</i>				120 Lembaga	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Penanganan Stunting	Posyandu, PKK		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				3 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Posyandu, PKK		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				18 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				18 Laporan	85.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perhubungan</i>	-			96 Persen	6.923.588.672,00			-	1.1.3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				65 Orang/Bulan	6.913.588.672,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada  Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perhubungan</i>	-			95 Persen	5.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				18 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perhubungan</i>	-			95 Persen	110.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perhubungan</i>	-			95 Persen	529.225.060,00			-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	49.225.060,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				130 Laporan	225.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			95 Persen	50.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Keaktifitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	275.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	85.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 Persen	285.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				37 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b><i>Persentase Layanan Angkutan Darat</i></b>	-			<b>83,13 Persen</b>	<b>1.090.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Dokumen LLAJ Provinsi</i>	-			1 Dokumen	50.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Jumlah Paket Penyediaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>	-			2 Paket	350.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>				100 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Jumlah Pembangunan Terminal Tipe B</i>	-			1 Unit	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B														
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>	-			1 Kegiatan	350.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Andalalin di Jalan Provinsi</i>	-			1 Dokumen	5.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan</i>	-			1 Kegiatan	65.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ														
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				2 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia</i>	-			0 Unit	20.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b><i>Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi</i></b>	-			<b>81.67 Persen</b>	<b>145.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	<i>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			2 Izin	25.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	<i>Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</i>	-			1 Izin	50.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	-			1 Dokumen	20.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional</i>	-			1 Izin	25.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.11.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-			1 Izin	25.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-			-	25.000.000,00						-	0,00		
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-			-	25.000.000,00			-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian															
			Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.3. Peningkatan Keaktifan dan Kapasitas Jaringan Transportasi dalam mendukung Distribusi Barang/Jasa	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN							20.801.782.586,00							23.118.838.299,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.801.782.586,00							23.118.838.299,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						20.036.786.965,00							20.568.838.299,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	-			98,5 Persen 80 Poin 4,2 Poin 80 Persen	11.439.524.964,00						-	10.298.838.299,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD	-			80 Poin 80 Poin 80 Poin	162.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	162.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</i>	-			98,5 Persen 98 Persen	8.534.338.299,00			-	-	-	-	8.539.838.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				78 Orang/ Bulan	8.495.838.299,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.495.838.299,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	-	-	-	185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				150 Paket	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	345.000.000,00			-	-	-	-	370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				100 Paket	85.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				100 Paket	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	1.056.186.665,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	350.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	706.186.665,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	502.000.000,00			-	-	-	-	512.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	410.000.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	220.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
2.	<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	-			<b>85 Persen</b>	<b>5.097.262.000,00</b>						-	<b>5.900.000.000,00</b>	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</i>	-			85 Persen	5.097.262.000,00			-	-	-	-	5.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				12 Laporan	1.454.944.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			<i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>				12 Konten	556.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>				6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>				1 Komunitas	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				60 Permohonan	697.793.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				100 Media	88.524.750,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
3.	<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa</b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>3.500.000.001,00</b>						-	<b>4.370.000.000,00</b>	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Jumlah Indikator SPBE yang Dipenuhi berdasarkan Domain Evaluasi</i>	-			31 Indikator	3.500.000.001,00			-	-	-	-	4.370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i>				2 Dokumen	562.322.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			0				0 0	599.832.968,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>				7 Layanan	616.466.103,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			0				00	894.269.277,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>				4 Aplikasi	326.738.675,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				41 perangkat daerah	500.370.762,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>400.000.000,00</b>							<b>1.250.000.000,00</b>	
1.	<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	-	-			-	<b>400.000.000,00</b>						-	<b>1.250.000.000,00</b>	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				100 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>				100% Persentase	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>				100% Persentase	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>				12 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				12 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>364.995.621,00</b>							<b>1.300.000.000,00</b>	
1.	<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	-	-			-	<b>364.995.621,00</b>						-	<b>1.300.000.000,00</b>	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengamanan informasi, pengamanan sistem elektronik/aplikasi dan pengamanan sinyal</i>	-			10 Persen	299.321.000,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				2 Laporan	149.778.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				42 Perangkat Daerah	149.543.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-			-	65.674.621,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>				42 Perangkat Daerah	65.674.621,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
		<b>DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN</b>							<b>19.743.157.291,00</b>						<b>25.682.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.814.392.000,00							7.512.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.814.392.000,00							7.512.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPDP	-			85 Poin	1.040.000.000,00						-	2.452.000.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	-			85 Poin	250.000.000,00			-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	308.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		180.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			98 Persen	15.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			98 Persen	5.000.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			90 Persen	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	180.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				80 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			85 Persen	155.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	616.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				5 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			98 Persen	155.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		660.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			98 Persen	200.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	475.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		90.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		190.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Berkualitas</b>	-			<b>85 Persen</b>	<b>250.000.000,00</b>						-	<b>350.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	-			85 Persen	250.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				120 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<i>Persentase Koperasi yang Berkualitas</i>	-			85 Persen	250.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				120 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<i>Persentase Koperasi yang Berkualitas Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi</i>	-			85 Persen 14 Persen	469.392.000,00						-	680.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	-			85 Persen	469.392.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	680.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				5 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				60 Keluarga	109.392.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i>				60 Unit Usaha	160.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		180.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.07	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b><i>Petsentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha</i></b>	-			<b>35 Persen</b>	<b>2.000.000.000,00</b>						-	<b>2.550.000.000,00</b>	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	2.000.000.000,00			-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	2.550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>				20 Unit Usaha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>				420 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		1.350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Wirausaha</b>	-			3 Persen	805.000.000,00						-	1.130.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<i>Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	-			30 Persen	805.000.000,00			-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	1.130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				275 Unit Usaha	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				278 Orang	305.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						6.980.000.000,00							10.260.000.000,00	
	3.30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						5.220.000.000,00							7.470.000.000,00	
1.	3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<i>Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok</i>	-			18,5 Persen	700.000.000,00						-	850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Persentase Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	-			43 Persen	700.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-	-	850.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>				8 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				8 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.8. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	-		600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2.	<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas</b>	-			<b>30,77 Persen</b>	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>350.000.000,00</b>	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</i>	-			2 Promosi	100.000.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>				10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3.	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	-	-			-	<b>570.000.000,00</b>						-	<b>1.930.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				1 laporan	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		1.600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	330.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i>				8 Kasus	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
4.	<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	-	-			-	<b>3.850.000.000,00</b>						-	<b>4.340.000.000,00</b>	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-			-	250.000.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-	-	340.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>				5 UMKM	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Me nguatkan D iversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		340.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	3.600.000.000,00			-	SS-1.3. Me ningkatkan Investasi, K esempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-	-	4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				80 UMKM	3.600.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mambi, Mambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.3. Me ningkatkan Investasi, K esempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>1.760.000.000,00</b>							<b>2.790.000.000,00</b>	
1.	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b><i>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat</i></b>	-			<b>6,82 Persen 11,56 Persen</b>	<b>1.760.000.000,00</b>						-	<b>2.790.000.000,00</b>	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan</i>	-			20 Pelaku Usaha	1.760.000.000,00			-	-	-	-	2.790.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				8 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		910.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				3 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Pemasaran Produk Unggulan	-		1.700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi														
			<i>- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan</i>				20 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>7.948.765.291,00</b>							<b>7.910.000.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>7.948.765.291,00</b>							<b>7.910.000.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai SAKIP Lingkup OPDP</i>	-			<b>85 Poin</b>	<b>7.948.765.291,00</b>						-	<b>7.910.000.000,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			85 Poin	250.000.000,00			-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-		380.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Daerah Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			98 Persen	7.441.756.175,00			-	-	-	-	7.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				67 Orang/Bulan	7.441.756.175,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			85 Persen	157.009.116,00			-	-	-	-	310.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.009.116,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			98 Persen	100.000.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				50 Laporan	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>								<b>13.575.528.214,00</b>							<b>13.858.665.926,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.575.528.214,00							13.858.665.926,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						13.575.528.214,00							13.858.665.926,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup DPMPPTSP Tingkat Capaian Kinerja Lingkup DPMPPTSP Nilai Rapor SPBE Lingkup DPMPPTSP Nilai SAKIP Lingkup DPMPPTSP</i>	-			75 Poin 85 Poin 3,4 Poin 65.50 Poin	8.424.253.214,00						-	8.278.665.926,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup DPMPPTSP Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup DPMPPTSP Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup DPMPPTSP Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup DPMPPTSP</i>	-			9 Poin 13 Poin 20 Poin 26 Poin	260.000.000,00			-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	350.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		205.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup DPMPTSP Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DPMPTSP	-			99 Persen 99 Persen	6.537.863.924,00			-	-	Laporan Realisasi Keuangan	-	5.925.258.634,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6.360.363.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Laporan Realisasi Keuangan		5.855.258.634,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan Realisasi Keuangan		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan Realisasi Keuangan		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan Realisasi Keuangan		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup DPMPSTSP</i>	-			90 Persen	20.000.000,00			-	-	Laporan Barang Milik Daerah DPMPSTSP	-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan Barang Milik Daerah DPMPSTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan Lingkup DPMPSTSP</i>	-			98 Persen	154.389.290,00			-	-	Dokumen Kesiapan ASN DPMPSTSP	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				83 Paket	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Kesiapan ASN DPMPSTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				50 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Kesiapan ASN DPMPSTSP		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				50 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Kesiapan ASN DPMPSTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	51.389.290,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Kesiapan ASN DPMPSTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DPMPSTSP</i>	-			97 Persen	217.000.000,00			-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP	-	360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum DPMPSTSP		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 Persen	260.000.000,00			-	-	Laporan BMD	-	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			95 Persen	470.000.000,00			-	-	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP	-	528.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	110.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		155.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	210.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Penunjang Urusan DPMPTSP		53.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			85 Persen	505.000.000,00			-	-	Laporan BMD	-	425.007.292,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	85.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Laporan BMD		175.007.292,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b><i>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal</i></b>	-			<b>40 Persen</b>	<b>2.155.000.000,00</b>						-	<b>2.275.000.000,00</b>	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Bidang Usaha yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal</i>	-			55 Persen	950.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	1.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				3 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	<i>Persentase Sektor Usaha yang Tersedia Peta Potensinya</i>	-			20 Persen	1.205.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	1.175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	285.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				6 Daerah	275.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				3 Dokumen	645.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		675.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b><i>Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal</i></b>	-			<b>12 Persen</b>	<b>1.530.000.000,00</b>						-	<b>1.850.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal</i>	-			20 Persen	1.530.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	1.850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				4 Dokumen	1.430.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		1.650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan</i>	-			85 Persen 90 Persen	741.275.000,00						-	730.000.000,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai dengan SOP Melalui PTSP</i>	-			80 Persen	741.275.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	730.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				50 Pelaku Usaha	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				300 Pelaku Usaha	301.275.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>				50 Kegiatan Usaha	210.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	-			100 Persen	610.000.000,00						-	610.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</i>	-			80 Persen 5 Orang	610.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	610.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				50 Kegiatan usaha	270.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				10 Kegiatan usaha	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				300 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</b>	-			<b>90 Persen</b>	<b>115.000.000,00</b>						-	<b>115.000.000,00</b>	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</i>	-			100 Persen	115.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat	-	115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Pelaku Usaha, Investor, UMKM, Masyarakat		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>						<b>16.045.652.336,00</b>							<b>33.042.000.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>9.527.563.296,00</b>							<b>26.310.000.000,00</b>	
	<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>						<b>9.527.563.296,00</b>							<b>26.310.000.000,00</b>	
1.	<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>527.563.296,00</b>						-	<b>710.000.000,00</b>	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	290.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.2.1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan	-		110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	2.563.296,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	2.563.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	90.000.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	205.000.000,00			-	-	-	-	215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	-	-			-	<b>1.443.400.000,00</b>						-	<b>3.550.000.000,00</b>	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.443.400.000,00			-	4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	-	3.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>				192 Orang	590.103.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4.2.2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-		1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				5 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-1.3. Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi</i>				1 Dokumen	103.767.580,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			<i>Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda</i>				100 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				30 Orang	99.529.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				200 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.3.5. Mem perluas Lapangan Pekerjaan melalui Penciptaan Wirausaha Baru dan M eningkatkan Peran Serta Kepe mudaan	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b><i>Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</i></b> <b><i>Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</i></b>	-			<b>100 Orang</b> <b>100 Persen</b>	<b>7.556.600.000,00</b>						-	<b>22.050.000.000,00</b>	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga</i> <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus</i>	-			125 Orang 2 Dokumen	1.137.900.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan</i>				1 Unit	503.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus</i>				27 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-2.1. Me ningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			<i>Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia</i>				5 Unit	84.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	SS-1.3. Me ningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Jumlah Cabor yang diikuti dan di selenggarakan pada kejuaraan olahraga</i>	-			8 Cabor	1.770.300.000,00			-	-	-	-	7.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			<i>Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>				200 Orang	636.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi</i>				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				27 Kegiatan	1.033.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	648.400.000,00			-	-	-	-	2.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														
			<i>Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi</i>				200 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			<i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>				3 Pelatda	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			<i>Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi</i>				2 Dokumen	238.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	4.000.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait</i>				2 Dokumen	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>6.518.089.040,00</b>							<b>6.732.000.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>6.518.089.040,00</b>							<b>6.732.000.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>6.518.089.040,00</b>						-	<b>6.732.000.000,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			98 Persen	5.573.839.040,00			-	-	-	-	5.314.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/ Bulan	5.476.339.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	-	-	-	-		5.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	87.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	146.450.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				45 Paket	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	26.450.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	547.800.000,00			-	-	-	-	755.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	71.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	36.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	20.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	130.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	165.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	70.000.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>							<b>8.388.505.206,00</b>							<b>6.900.314.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>8.388.505.206,00</b>							<b>6.900.314.000,00</b>		
	<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>7.813.505.206,00</b>							<b>4.800.314.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.696.030.474,00						-	0,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.525.910.474,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				34 Orang/ Bulan	4.498.910.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				130 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				746 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				25 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				80 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				500 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	245.120.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	40.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				88 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	-	-			-	<b>1.982.474.732,00</b>						-	<b>4.300.314.000,00</b>	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.692.474.732,00			-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-	-	2.650.314.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	219.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</i>				50 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		200.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi</i>				100 Layanan	454.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.114.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				6000 Eksemplar	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi														
			<i>Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi</i>				68 Nilai	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi</i>				70 Indeks	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			<i>Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi</i>				3 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	344.360.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	290.000.000,00			-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Lokus	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>				6 Perpustakaan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan</i>				4 Perpustakaan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya</i>				2 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	-	-			-	<b>135.000.000,00</b>						-	<b>500.000.000,00</b>	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	-	-			-	75.000.000,00			-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR</i>				10 Eksemplar	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan</i>				50 Entry	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			<i>Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan</i>				2 Naskah	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-2.1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>575.000.000,00</b>							<b>2.100.000.000,00</b>	
1.	<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	-	-			-	<b>575.000.000,00</b>						-	<b>2.100.000.000,00</b>	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	225.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi</i>				100 Arsip	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan</i>				2 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			<i>Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi</i>				50 Arsip	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		900.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN															
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN</i>				4 Pengguna	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>30.560.082.379,00</b>							<b>36.226.500.000,00</b>	
	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>30.560.082.379,00</b>							<b>36.226.500.000,00</b>		
	3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>30.560.082.379,00</b>							<b>36.226.500.000,00</b>		
1.	3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP</i>	-			100 Persen 3,5 Poin 80 Poin	9.662.572.379,00						-	9.661.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Presentase kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			100 Persen	263.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	264.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Perangkat Daerah		4.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan lingkup OPD</i>	-			100 Persen	8.134.572.379,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	7.062.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				72 Orang/Bulan	8.049.572.379,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		6.970.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Presentase pengelolaan administrasi barang milik daerah lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	32.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup OPD</i>	-			100 Persen	125.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				120 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Perangkat Daerah		120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	485.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	782.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				85 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	215.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	270.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	85.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	300.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah	-	225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	<i>Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) Produksi Garam Kawasan konservasi daerah yang operasional Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan</i>	-			1 Provinsi 483.49 Ton 20357.30 Ha 0.038 Persen	2.470.000.000,00						-	3.535.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi"</i>	-			100 Persen	2.200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	2.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				205.540,93 Ha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir														
			<i>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP</i>				3 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3.2.1. Meningkatkan Sistem Mitigasi Bencana	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia														
			<i>Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi</i>				1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.3. Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru</i>				5 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Persentase Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	-			100 Persen	70.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Pengelola Ruang Laut	-	235.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan</i>				3 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Pengelola Ruang Laut		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan</i>				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Pengelola Ruang :aut		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil"</i>	-			100 Persen	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>				5 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Kelompok	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Persentase Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat Diatas Angka Defisit Persentase Nilai Tukar Nelayan pertahun di Sulawesi Barat diatas angka Defisit Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</i>	-			108,15 Nilai 108,15 Nilai 2 Persen	13.307.500.000,00						-	16.420.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	<i>Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil" Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	-			100 Persen 100 Persen	13.020.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap	-	1.840.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				10 Unit	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				25 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i> <i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	-			100 Persen 100 Persen	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Kelompok Perikanan Tangkap	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>				100 Persentase	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Kelompok Perikanan Tangkap		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	<i>Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi"</i>	-			100 Persen 100 Persen	137.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap	-	14.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</i>				2 Pelabuhan Perikanan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>				2 Unit	62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		13.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				3 Layanan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Kelompok Perikanan Tangkap		450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT"</i>	-			100 Persen 100 Persen	25.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap	-	95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Tangkap		95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	25.000.000,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	-	-	85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	-		85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</i>	-			2 Persen	816.410.000,00						-	2.905.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</i>	-			100 Persen	70.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya	-	405.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	-			100 Persen	120.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya	-	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pembudidaya</i>				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>				2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	<i>Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat*</i>	-			100 Persen	626.410.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya	-	1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit	526.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Me ningkatkan Produktivita s dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Perikanan Budidaya		1.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<i>Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Desktruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan</i>	-			100 Persen	370.000.000,00						-	1.745.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	<i>Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil"</i>	-			100 Persen	320.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan	-	1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				5 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				5 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				10 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan	-	95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangannya provinsi</i>				5 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pelaku Kelautan dan Perikanan		95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b><i>Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Tingkat Konsumsi Ikan</i></b>	-			<b>3 Persen 70 Kg/Kapita/Tahun</b>	<b>3.933.600.000,00</b>						-	<b>1.960.000.000,00</b>	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen	120.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan	-	340.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar" Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar"</i>	-			100 Persen 100 Persen	100.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan	-	395.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen 100 Persen	3.713.600.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan	-	1.225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi</i>				30 Unit Usaha	3.363.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir</i>				1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Pengolah Perikanan		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>DINAS PARIWISATA</b>								<b>14.025.173.375,00</b>							<b>19.828.700.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>14.025.173.375,00</b>							<b>19.828.700.000,00</b>	
	<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						<b>14.025.173.375,00</b>							<b>19.828.700.000,00</b>	
1.	<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai SAKIP Lingkup SKPD</i>	-			<b>65 Poin</b>	<b>6.791.173.375,00</b>						-	<b>8.968.700.000,00</b>	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			25 Poin	243.343.507,00			-	-	-	-	679.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	159.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	7.980.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	6.384.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	6.384.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Pati'di	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	52.355.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	5.308.218.708,00			-	-	-	-	4.878.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/ Bulan	5.299.866.308,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.860.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				2 Dokumen	6.384.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2 Dokumen	638.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				2 Dokumen	691.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	638.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	53.521.280,00			-	-	-		121.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.010.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.859.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.544.240,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	8.453.480,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS PARIWISATA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1.250.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	79.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	6.809.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	26.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	491.568.000,00			-	-	-		923.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.300.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.533.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	7.980.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.596.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	5.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	638.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	26.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	266.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	159.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	340.333.600,00			-	-	-	-	819.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	79.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	10.533.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	145.224.000,00			-	-	-	-	182.400.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3 Laporan	30.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.900.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	3.724.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	36.176.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	35.644.000,00			-	-	-	-	538.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	14.364.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	7.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	7.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Jumlah Kamar Terjual</b>	-			<b>25 Persen</b>	<b>1.700.000.000,00</b>						-	<b>3.080.000.000,00</b>	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>	-			9 Laporan	120.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi														
			<i>Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				35 Orang	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>	-			7 Persen	1.580.000.000,00			-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		2.880.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Meningkatkan Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan</i>				50 Orang	180.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		230.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b><i>Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan</i></b>	-			<b>12 Persen</b>	<b>1.004.000.000,00</b>						-	<b>1.750.000.000,00</b>	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>	-			26 Laporan	1.004.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		1.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				6 Kegiatan	904.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b><i>Persentase Pelaku/ Kelompok Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kompetensinya</i></b>	-			25 Persen	1.060.000.000,00						-	2.030.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Terkait Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</i>	-			15 Laporan	910.000.000,00			-	-	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif</i>				4 Laporan	500.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar</i>				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			<i>Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik</i>				2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			7 Laporan	150.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-	-	430.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				15 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Disertifikasi</b>	-			<b>25 Persen</b>	<b>3.470.000.000,00</b>						-	<b>4.000.000.000,00</b>	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang Kompetensinya	-			220 Orang	3.114.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-	-	3.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				30 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>				300 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				200 Orang	958.000.000,00	Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Banggae Timur, Lembang Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tersertifikasi</i>	-			60 Orang	356.000.000,00			-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif															
			<i>Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif</i>				60 Orang	356.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
		<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN</b>							<b>56.318.744.449,00</b>							<b>51.080.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>34.984.576.933,00</b>							<b>31.190.000.000,00</b>		
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>34.984.576.933,00</b>							<b>31.190.000.000,00</b>		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP Lingkup DTPHP</i>	-			71 poin	3.511.403.456,00						-	4.330.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD</i>	-			71 poin 71 poin 71 poin	598.000.000,00			-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	745.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	146.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			65 INDEKS 65 PERSEN	573.000.000,00			-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	430.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				4 Unit	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				329 Paket	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DTPHP</i>	-			80 PERSEN	1.206.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		1.665.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	166.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			96,5 PERSEN	20.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	608.403.456,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	685.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	308.403.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		215.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			96,5 PERSEN	360.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	405.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		285.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.	<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>21.563.907.962,00</b>						-	<b>17.120.000.000,00</b>	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	467.954.247,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	520.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				6 Laporan	367.954.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>				6 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	18.770.953.715,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	14.450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				150 Sertifikat	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				2 laporan	14.226.193.715,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		13.750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				350000 Batang	4.044.760.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	1.650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	1.500.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		1.650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	75.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	-	-			-	750.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			<i>Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>				3500 Dosis	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.	<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	-	-			-	<b>3.605.000.000,00</b>						-	<b>2.340.000.000,00</b>	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	1.650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		1.650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	140.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM				1 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	2.625.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	2.500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				2 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		70.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik</i>				3 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-	-			-	90.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			<i>Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</i>				2 Sertifikat	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
4.	3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>729.265.515,00</b>						-	<b>1.700.000.000,00</b>	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	729.265.515,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				9750 Ha	615.932.142,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>				450 Ha	113.333.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
5.	3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>5.575.000.000,00</b>						-	<b>5.700.000.000,00</b>	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				40 Orang	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	5.000.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	5.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				6 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		1.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				50 Kelompok	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	-		4.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	175.000.000,00			-	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			<i>Jumlah korporasi petani yang didampingi</i>				4 Unit	175.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>21.334.167.516,00</b>							<b>19.890.000.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>21.334.167.516,00</b>							<b>19.890.000.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>21.334.167.516,00</b>						-	<b>19.890.000.000,00</b>	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.694.167.516,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	19.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				191 Orang/Bulan	20.694.167.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		19.200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			65 INDEKS 65 PERSEN	60.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			96,5 PERSEN	10.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		180.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			96,5 PERSEN	570.000.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-	-	390.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		65.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	-		325.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>						<b>29.508.577.611,00</b>							<b>41.175.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>29.508.577.611,00</b>							<b>41.175.000.000,00</b>	
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>29.508.577.611,00</b>							<b>41.175.000.000,00</b>	
1.	<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai SAKIP Lingkup OPD</i>	-			undefined Poin	<b>10.204.898.147,00</b>						-	<b>12.110.000.000,00</b>	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup Dinas Perkebunan Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan</i>	-			undefined Poin undefined Poin undefined Poin undefined Poin	270.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	670.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				16 Data	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Perkebunan Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Dinas Perkebunan	-			undefined Persen undefined Persen	9.136.898.147,00			-	-	Dinas Perkebunan	-	9.620.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	8.966.898.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		9.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		140.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		120.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		140.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Perkebunan</i>	-			undefined Persen	13.000.000,00			-	-	Dinas Perkebunan	-	90.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Perkebunan</i>	-			undefined Persen	45.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Perkebunan	-	160.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Perkebunan		20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					78 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					4 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Perkebunan	-			undefined Persen	220.000.000,00			-	-	-	-	920.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			undefined Persen	400.000.000,00			-	-	Dinas Perkebunan	-	400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	-	Dinas Perkebunan	-	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perkebunan		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b><i>Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian</i></b>	-			<b>undefined Persen</b>	<b>12.654.929.464,00</b>						-	<b>14.850.000.000,00</b>	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<i>Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian</i>	-			1 Laporan	130.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani	-	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan</i>				1 laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Wilayah Pelaksanaan Penyediaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Bibit Tanaman Perkebunan</i>	-			undefined Laporan	12.524.929.464,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani	-	14.350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				40 Sertifikat	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				1 laporan	11.259.929.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Tani		12.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek</i>				10000 Setek	15.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga Daala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			-				-	900.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga Daala	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	Kelompok Tani		1.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan</i>	-			undefined Persen	5.673.750.000,00						-	10.995.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Tercapainya Penataan Prasarana Perkebunan</i>	-			undefined Laporan	5.673.750.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani	-	10.995.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		670.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				2 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		1.450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>				556 Ha	3.968.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		6.725.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
			<i>Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				6 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b><i>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan</i></b>	-			undefined Persen	<b>330.000.000,00</b>						-	<b>1.620.000.000,00</b>	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<i>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan</i>	-			undefined Persen	330.000.000,00			-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani	-	1.620.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				2000 Ha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		670.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>				300 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>				300 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.1.1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui dukungan Sarana dan Prasarana	Kelompok Tani		450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan</b>	-			undefined Persen	65.000.000,00						-	600.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan</i>	-			undefined Persen	65.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-	-	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			<i>Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1.1.4. Penguatan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dalam Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b><i>Persentase Layanan Penyuluhan Perkebunan pada Kawasan Perkebunan</i></b>	-			undefined Persen	<b>580.000.000,00</b>						-	<b>1.000.000.000,00</b>	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	40.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				63 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	540.000.000,00			-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan	-	-	700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				6 Kelompok	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1.4.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan	-		600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		<b>DINAS KEHUTANAN</b>						<b>44.675.458.609,00</b>							<b>56.707.639.472,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>43.956.754.819,00</b>							<b>56.158.740.732,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>43.956.754.819,00</b>							<b>56.158.740.732,00</b>	
1.	<b>3.28.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>29.670.566.742,00</b>						-	<b>32.718.498.482,00</b>	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	34.893.440,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	86.497.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.182.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.111.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		66.497.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	29.008.958.900,00			-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	31.913.612.342,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	28.976.011.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		31.873.612.342,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	32.947.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	273.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	116.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		233.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.200.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	34.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	446.514.402,00			-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	430.388.240,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	64.850.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				11 Unit	11.664.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.388.240,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>12.154.511.328,00</b>						-	<b>19.002.963.687,00</b>	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	4.980.511.328,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-	-	9.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi</i>				5 Dokumen	4.980.511.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-		9.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	360.000.000,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-	-	396.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				12 Dokumen	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-		396.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	20.000.000,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-	-	500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>				8 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	3.400.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-	-	5.349.563.687,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				600 Ha	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		4.564.563.687,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				100 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan</i>				36 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			<i>Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi</i>				10 Ha	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			<i>Jumlah Gully Plug yang Terbangun</i>				3 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			<i>Jumlah Dam Penahan yang terbangun</i>				3 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		70.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	3.354.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-	-	3.707.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				4 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				36 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				4000 Ha	3.134.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.1. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-		3.447.400.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	40.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-	-	50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.04	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	-	-			-	<b>30.000.000,00</b>						-	<b>300.000.000,00</b>	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	30.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-	-	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				40 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>1.781.676.749,00</b>						-	<b>3.530.747.183,00</b>	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	1.781.676.749,00			-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-	-	3.530.747.183,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				17 Kelompok	1.611.676.749,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	-		2.980.747.183,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				3 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			<i>Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya</i>				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			<i>Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya</i>				15 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			<i>Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>				27500 Hektar	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	<b>3.28.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	-	-			-	<b>320.000.000,00</b>						-	<b>606.531.380,00</b>	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	320.000.000,00			-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		606.531.380,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				30 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS</i>				1 Lembaga	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.1.1. Peningkatan Tutupan Lahan	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			<i>Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS</i>				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	-		106.531.380,00	DINAS KEHUTANAN
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>718.703.790,00</b>							<b>548.898.740,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>718.703.790,00</b>							<b>548.898.740,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>718.703.790,00</b>						-	<b>548.898.740,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	48.000.000,00			-	-	-	-	53.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karema	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	103.639.040,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	65.898.740,00	DINAS KEHUTANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	290.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		320.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		320.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.064.750,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	40.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	207.064.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>8.967.471.638,00</b>							<b>14.287.449.001,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>8.967.471.638,00</b>							<b>14.287.449.001,00</b>		
	<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						<b>8.967.471.638,00</b>							<b>14.287.449.001,00</b>		
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD</i>	-			68 Poin 78 Poin 70 Persen 61 Persen	6.408.971.638,00						-	7.804.050.466,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD	-			15 Poin 20 Poin 25 Poin 80 Poin 20 Poin	194.480.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe rintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM	-	390.315.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.230.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerintah, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe rintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		21.515.520,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	31.130.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Dinas ESDM		34.950.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	16.830.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		37.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	63.030.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		26.850.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	9.030.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas ESDM		140.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	-			92 Persen 95 Persen	5.362.441.157,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	5.206.304.032,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	5.285.911.157,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		5.121.883.143,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	72.530.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		76.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		3.420.889,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	-			25 Persen	50.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Publik/Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Publik/Masyarakat		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			90 Persen	57.658.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	205.280.914,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				79 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	4.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.280.914,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	28.134.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			92 Persen	240.449.561,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat	-	632.150.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.468.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		2.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.481.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.968.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	8.022.568,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Masyarakat		3.150.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	17.979.633,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	153.299.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	25.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 Persen	40.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			90 Persen	96.822.920,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	62.000.000,00	Kab. Mamuju, Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		65.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	34.822.920,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		45.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			90 Persen	367.120.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	560.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	292.390.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	71.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	2.930.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	<i>Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi</i>	-			7 Persen	200.000.000,00						-	404.898.535,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT</i>	-			0 Persen	125.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penganggulangan Bencana Daerah	Publik/Masyarakat	-	304.898.535,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Publik/Masyarakat		154.898.535,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Publik/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Tingkat pengendalian kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada sektor pengambilan air tanah (Debit dan Muka Air Tanah)</i>	-			7 Persen	75.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Publik/Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Persentase Perusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan</i>	-			25 Persen	200.000.000,00						-	1.270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Pemanfaatan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap peraturan</i>	-			25 Persen	20.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan)</i>	-			25 Persen	80.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				20 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Tingkat Ketaatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat terhadap aspek (Administrasi, Finansial, Teknis, K3 dan Lingkungan)</i>	-			25 Persen	35.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/ Masyarakat	-	160.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/ Masyarakat		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/ Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Tingkat ketaatan harga patokan mineral bukan logam dan batuan</i>	-			10 Persen	35.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-			-	30.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Persentase Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Energi</i>	-			4,12 Persen	500.000.000,00						-	1.450.000.000,00	
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah Penggunaan Biogas</i>	-			0 Unit	35.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			<i>jumlah dokumen data potensi biomassa</i>				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan</i>	-			100 Rumah Tangga	465.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat	-	1.350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			<i>Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terrevitalisasi</i>				3 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Limbong Kab. Mamasa, Messawa, Malimbong Kab. Mamasa, Tanduk Kalua, Tamalantik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Bela Kab. Mamuju, Tommo, Leling Utara Kab. Mamasa, Mambi, Pamosean Kab. Mamasa, Sesenapadang, Malimbong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				50 unit	300.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b><i>Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik</i></b>	-			<b>98,32 Persen</b>	<b>1.658.500.000,00</b>						-	<b>3.358.500.000,00</b>	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	<i>Tingkat Ketaatan Badan Usaha pemilik IUPTL dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan memenuhi Kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan</i>	-			10 Persen	25.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>				10 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Tingkat Ketaatan Pemilik instalasi Pembangkit Listrik Untuk kepentingan Sendiri yang Memenuhi Kewajiban aspek perizinan, Lingkungan Hidup dan Keteknikan</i>	-			10 Persen	25.000.000,00			-	SS-1.2. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	-	-	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-1.2. Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	25.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</i>				6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima Bantuan</i>	-			0,15 Persen	1.583.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat	-	3.108.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				1 Dokumen	37.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				500 Keluarga	1.346.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Banggae, Rangas Kab. Majene, Pamboang, Bababulo Utara Kab. Majene, Malunda, Bambang Kab. Majene, Tubo Sendana, Tubo Poang Kab. Majene, Tubo Sendana, Tubo Kab. Mamuju,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		1.658.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Tapalang, Takandeang Kab. Mamuju, Tapalang, Taan Kab. Mamuju, Kalumpang, Karama Kab. Mamuju, Tommo, Tamejarra Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Botteng Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Saletto Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Labuang Rano Kab. Mamasa, Aralle, Uhailanu Kab. Mamasa, Aralle, Kalabe Kab. Mamasa, Mamasa, Bombong Lambe Kab. Mamasa, Mamasa, Rambusaratu Kab. Mamasa, Sumarorong, Sumarorong Kab. Mamasa, Messawa, Rippung Kab. Pasangkayu, Duripoku, Taranggi Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Tikke Kab. Pasangkayu, Lariang, Singgani Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Paraili Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Lara							
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-3.2. Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Publik/Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Publik/Masyarakat		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		<b>DINAS TRANSMIGRASI</b>							<b>9.354.591.949,00</b>							<b>20.064.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>9.299.591.949,00</b>							<b>19.436.000.000,00</b>		
	<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						<b>9.299.591.949,00</b>							<b>19.436.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi	-			68,43 Poin	7.192.912.589,00						-	8.661.000.000,00	
	3.32.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Transmigrasi	-			27,48 Poin	440.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi	-	1.149.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	136.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		290.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		45.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		42.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	36.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		46.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	36.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		44.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		62.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				7 Laporan	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		620.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Dinas Transmigrasi</i>	-			100 Persen	5.486.732.589,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Transmigrasi	-	4.928.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/Bulan	5.372.732.589,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Dinas Transmigrasi		4.800.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	57.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		64.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	57.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		64.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dinas Transmigrasi</i>	-			100 Persen	122.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Aparatur Dinas Transmigrasi	-	285.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	42.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Aparatur Dinas Transmigrasi		107.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Aparatur Dinas Transmigrasi		68.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	Aparatur Dinas Transmigrasi		110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Dinas Transmigrasi</i>	-			100 Persen	621.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi	-	1.217.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	82.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		124.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		86.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				7 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		78.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				35 Paket	62.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		104.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				25 Laporan	48.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		79.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				70 Laporan	280.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		670.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				5 Dokumen	48.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		76.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 Persen	45.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi	-	156.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	45.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		156.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	285.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi	-	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		286.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4.1.4. Manajemen Sumber Daya Aparatur	Dinas Transmigrasi		112.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				30 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Dinas Transmigrasi		102.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.380.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	426.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	148.380.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		180.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	44.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		246.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
2.	3.32.02	<b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b><i>Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis</i></b>	-			<b>94,15 Persen</b>	<b>440.000.000,00</b>						-	<b>1.425.000.000,00</b>	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<i>Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear</i>	-			47,50 Persen	440.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	SS-2.2. Me mpercepat Pengentas an Kemiskinan dan Ketimp angan	Kawasan Transmigrasi	-	1.425.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamakan dengan Daerah Lain</i>				3 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		950.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			<i>Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi</i>				1 Kawasan Transmigrasi	65.000.000,00	Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi														
			<i>Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>				2000 Hektar	100.000.000,00	Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			<i>Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>				3 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mambi, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
3.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya</i>	-			97 Persen	472.445.000,00						-	3.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	-			75 Kepala Keluarga	472.445.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi	-	3.350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Laporan	52.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		235.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		240.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)				50 Kepala Keluarga	46.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.1.6. Pengembangan Pertanian dan Kelautan Perikanan berbasis Kawasan Menuju Food Estate dan Shrimp Estate	Kawasan Transmigrasi		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Transmigran yang Ditempatkan</i>				50 Kepala Keluarga	35.000.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>				40 Kepala Keluarga	74.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Pollewani	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		775.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>				80 Orang	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		1.450.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi</i>				50 Kepala Keluarga	55.300.000,00	Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
4.	3.32.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b><i>Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri</i></b>	-			<b>66,67 Persen</b>	<b>1.194.234.360,00</b>						-	<b>6.000.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan	-			8 Unit	1.194.234.360,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi	-	6.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				105 Kepala Keluarga	265.000.000,00	Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa Kab. Mamasa, Mehalaan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		1.865.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				20 Satuan Permukiman	929.234.360,00	Kab. Majene, Malunda, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Ulumanda, Semua Kel/Desa Kab. Majene, Tammerodo Sendana, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	SS-2.2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Kawasan Transmigrasi		4.134.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	X	NON URUSAN						55.000.000,00							628.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						55.000.000,00							628.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Dinas Transmigrasi	-			68,43 Poin	55.000.000,00						-	628.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			90 Persen	55.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	628.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		560.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel															
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		68.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI	
		<b>SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>							<b>13.073.553.360,00</b>							<b>26.933.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>13.073.553.360,00</b>							<b>26.933.000.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>13.073.553.360,00</b>							<b>26.933.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemkesra Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemkesra Nilai SAKIP Lingkup Biro Pemkesra Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			100 Persen 75 Poin 78,7 Poin 99,40 Persen	883.013.360,00						-	2.566.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemkesra Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Pemkesra Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemkesra Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			23,5 Poin 10,5 Poin 18 Poin 7,00 Poin	101.343.840,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	457.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	41.999.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.986.840,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	11.158.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.734.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.546.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	17.598.480,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	15.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemkesra Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			100 Persen 99,40 Persen	2.197.536,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	957.536,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		6.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	1.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	212.874.800,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	35.889.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	64.460.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	41.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	71.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			100 Persen	348.167.669,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.057.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	85.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	21.240.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	51.655.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	178.896.569,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			100 Persen	58.759.515,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	58.759.515,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemkesra</i>	-			100 Persen	159.670.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	374.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	124.910.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				9 Unit	18.540.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	16.220.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>	-			100 Persen	1.606.090.000,00						-	4.212.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	<i>Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia</i>	-			5 Dokumen	568.861.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>				2 Dokumen	363.430.000,00	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>				1 Dokumen	131.211.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i>				1 Dokumen	74.220.000,00	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah</i>	-			3 Dokumen	803.049.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat	-	1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i>				2 Dokumen	471.979.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat		760.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				2 Laporan	230.750.000,00	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah</i>	-			3 Dokumen	234.180.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pihak Ketiga	-	1.182.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	100.340.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pihak Ketiga		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			<i>Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi</i>				1 Dokumen	54.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pihak Ketiga		372.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi</i>				2 Laporan	79.640.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pihak Ketiga		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	-			100 Persen	10.584.450.000,00						-	20.155.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<i>Adanya Dokumen Layanan Keagamaan</i>	-			5 Dokumen	5.288.780.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Lembaga dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>				835 Unit	2.398.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Lembaga dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				5 Lembaga	2.890.550.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Lembaga dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	<i>Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar</i>	-			3 Dokumen	148.620.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	65.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>				1 Dokumen	47.900.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>				1 Dokumen	35.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		435.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	<i>Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar</i>	-			3 Dokumen	5.147.050.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>				2 Dokumen	5.070.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i>				1 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i>				1 Dokumen	44.330.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		<b>SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM</b>							<b>1.920.203.360,00</b>							<b>2.329.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>1.920.203.360,00</b>							<b>2.329.000.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>1.920.203.360,00</b>							<b>2.329.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD</i>	-			85,21 Poin 91,33 Poin 68,62 Poin	875.203.360,00						-	1.094.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			22,30 Poin 12,75 Poin 11,28 Poin 24,80 Poin	145.898.464,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	169.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	33.505.880,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.302.840,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.412.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.414.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.495.664,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	86.242.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	3.525.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			100 Persen 100 Persen	52.479.084,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	3.247.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	4.494.312,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	4.082.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	33.104.460,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	3.258.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	4.292.188,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	4.500.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	59.590.812,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	34.590.812,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	379.395.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	28.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	8.570.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	42.825.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				90 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	10.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	123.340.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				11 Unit	83.440.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				13 Unit	19.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
2.	4.01.05	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b><i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum</i></b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>1.045.000.000,00</b>						-	<b>1.235.000.000,00</b>	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	<i>Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</i>	-			100 Persen	735.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	895.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				50 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				530 Dokumen	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya</i>				625 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				153 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	-			100 Persen	310.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum															
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				3 Kasus	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM															
			<i>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i>				4 Kasus	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							2.155.272.860,00							5.251.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.155.272.860,00							5.251.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.155.272.860,00							5.251.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	655.272.860,00							1.996.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	111.798.320,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	29.672.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	82.125.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	58.789.015,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	58.789.015,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.706.977,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	2.706.977,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.627.690,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	17.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	33.127.690,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	339.850.858,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	14.345.786,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	7.155.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	12.850.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	24.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.500.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>	-			100 Persen	1.000.000.000,00						-	2.645.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<i>Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			90 Persen	400.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>				5 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	150.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	450.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD</i>				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	4.01.08	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>610.000.000,00</b>	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	320.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>				5 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				10 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>				4 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		<b>SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							<b>2.754.137.360,00</b>							<b>3.435.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>2.754.137.360,00</b>							<b>3.435.000.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>2.754.137.360,00</b>							<b>3.435.000.000,00</b>		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD</i>	-			91,33 Poin	672.337.360,00						-	1.100.000.000,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	78.570.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	17.250.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	51.220.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.040.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				30 Paket	70.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	10.698.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				30 Paket	70.786.145,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	170.772.815,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.020.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	3.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	113.650.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	57.320.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	56.330.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<i>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</i>	-			79,75 Poin	2.081.800.000,00						-	2.335.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	846.800.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	915.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				2 Laporan	295.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	356.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	195.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	585.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				4 Laporan	170.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	245.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				4 Laporan	170.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	650.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	745.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i>				15 Orang	215.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				3 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>				3 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI								2.574.944.066,00							3.042.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.574.944.066,00							3.042.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.574.944.066,00							3.042.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD</i>	-			4,30 Poin 99,30 Poin 83 Poin 70 Poin	974.944.066,00							1.302.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			26 Poin 23 Poin 25 Poin 14 Poin	354.705.412,00							420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen Dokumen	93.347.352,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	182.905.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	78.452.880,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Organisasi</i>	-			100 Persen	65.815.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				23 Paket	33.815.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	32.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	421.461.149,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	596.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	63.750.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	7.535.225,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				300 Paket	36.218.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				80 Paket	7.951.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				60 Paket	72.974.180,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				70 Laporan	139.680.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	5.364.656,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	87.986.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.804.505,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	64.804.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	68.158.000,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	68.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<i>Indeks Kematangan Organisasi Rata-rata nilai pelaporan Kinerja PD pada Penilaian SAKIP Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik</i>	-			43 Nilai 10 Nilai '88,00 (Zona Hijau) Nilai	1.600.000.000,00						-	1.740.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada</i>	-			90 Persen	600.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	590.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang berlaku Persentase Perangkat Daerah yang telah mengisi Rencana Aksi RB sesuai aturan yang berlaku Persentase OPD yang telah menyusun Proses Bisnis sesuai aturan yang ada</i>	-			40 Persen 42 Persen 80 Persen	1.000.000.000,00			-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				8 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>				7 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Meningkatkan Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				35 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
		<b>SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM</b>						<b>115.999.907.663,00</b>							<b>124.181.672.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>115.999.907.663,00</b>							<b>124.181.672.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>115.999.907.663,00</b>							<b>124.181.672.000,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD</i>	-			4.5 Poin 100 Poin 82 Poin	115.999.907.663,00						-	124.181.672.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD</i>	-			17 Poin 27 Poin 13 Poin 25 Poin	863.779.714,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	889.672.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	314.295.663,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	42.025.287,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	48.371.598,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	21.273.616,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		25.462.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	26.855.921,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	27.171.579,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		30.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				8 Laporan	383.786.050,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Umum Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan Lingkup Biro Umum</i>	-			100 Persen 100 Persen	41.417.601.326,00			-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Biro Umum	-	42.184.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				3360 Orang/ Bulan	39.276.864.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatkan Sistem Pe merintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Biro Umum		40.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				75 Dokumen	217.593.803,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2450 Dokumen	1.281.639.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	427.555.468,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	36.333.345,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				5 Dokumen	125.066.872,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				16 Laporan	52.547.423,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Umum</i>	-			100 Persen	4.792.214.518,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	5.160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				30 Dokumen	508.216.372,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Dokumen	2.267.016.665,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Laporan	311.881.696,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	1.037.404.730,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	110.359.831,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	557.335.224,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	112.713.464,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	112.713.464,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Umum</i>	-			100 Persen	1.505.514.394,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	1.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	296.952.823,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	163.758.782,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				27 Dokumen	196.921.046,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				75 Dokumen	161.065.325,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	79.076.418,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	607.740.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Umum</i>	-			100 Persen	8.434.466.238,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	9.653.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	1.149.455.727,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				15 Paket	481.097.666,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	3.167.878.697,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		4.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	330.152.867,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	2.363.334.466,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	724.086.906,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	74.173.004,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	144.286.905,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	8.782.701.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	12.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	582.701.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				120 Unit	6.200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	6.426.540.879,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	6.770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	342.391.230,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	2.707.544.649,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.376.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	8.043.089.895,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	9.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	1.169.037.951,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				150 Unit	3.239.932.993,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				120 Unit	1.084.848.551,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	2.549.270.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			100 Persen	2.563.282.808,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	2.355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				24 Orang/Bulan	953.282.808,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				8 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				24 Orang/Bulan	1.550.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah</i>	-			100 Persen	18.879.077.008,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	19.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				5 Paket	5.718.329.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		5.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				5 Paket	4.900.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				10 Paket	8.260.747.924,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</i>	-			100 Persen	9.555.328.504,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	9.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			<i>Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan</i>				12 Dokumen	174.254.391,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				800 Laporan	9.008.754.031,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		9.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>				12 Laporan	372.320.082,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	<i>Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan</i>	-			100 Persen	4.623.597.915,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum	-	4.940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				12 Laporan	901.119.851,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				12 Laporan	2.683.259.853,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				750 Laporan	1.039.218.211,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Biro Umum		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM	
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>106.801.892.921,00</b>								<b>126.743.665.718,05</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>106.801.892.921,00</b>							<b>126.743.665.718,05</b>		
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>106.801.892.921,00</b>							<b>126.743.665.718,05</b>		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai Sakip Lingkup OPD Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD</i>	-			3,5 Poin 70,3 Poin 96 Persen 90 Persen 100 Persen	62.899.665.928,00						-	71.388.665.718,05		
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Internal Sekretariat DPRD Nilai Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD</i>	-			3.99 Poin 7.99 Poin 20.15 Poin 23.22 Poin	1.108.270.266,18			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	1.108.270.266,32	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	580.674.312,96	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		580.674.312,96	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	92.529.336,96	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		92.529.336,96	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	90.218.659,68	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		90.218.659,68	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	95.786.135,52	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		95.786.135,52	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	93.326.730,10	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		93.326.730,24	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	74.870.411,36	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		74.870.411,36	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	80.864.679,60	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		80.864.679,60	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran</i>	-			100 Persen	11.039.059.231,73			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	10.225.395.451,73	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				102 Orang/ Bulan	10.247.046.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		9.433.382.694,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				102 Dokumen	90.772.817,33	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		90.772.817,33	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	244.854.100,82	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		244.854.100,82	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	129.345.405,40	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		129.345.405,40	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	95.103.260,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		95.103.260,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	59.341.302,64	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		59.341.302,64	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	99.166.216,71	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		99.166.216,71	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				12 Dokumen	73.429.654,83	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		73.429.654,83	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	562.560.012,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				306 Paket	81.263.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	331.296.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	10.225.095.061,19			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	11.920.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	316.195.418,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	632.551.032,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6.493.408.575,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	199.420.643,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	52.166.853,23	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.7. Penguatan Akuntabilita s Kinerja	Sekretariat DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	274.749.435,96	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				204 Laporan	2.106.603.104,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	2.905.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	7.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				6 Unit	275.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	630.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	4.511.322.806,34			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	5.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	107.012.298,51	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.642.210.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.762.100.467,83	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	3.430.567.220,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD	-	4.650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	476.759.264,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				90 Unit	1.408.714.872,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	1.041.639.564,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	133.170.960,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	370.282.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sekretariat DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Tingkat Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	-			100 Persen	23.390.612.962,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD	-	24.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				45 Orang/ Bulan	22.444.846.447,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		23.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				225 Paket	607.978.907,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				45 Orang	337.787.608,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD</i>	-			100 Persen	5.727.178.368,56			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD	-	6.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>				45 Dokumen	1.439.329.387,20	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				45 Laporan	186.232.618,16	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				90 Laporan	774.377.173,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				5 Paket	3.327.239.190,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		3.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</i>	-			99,33 Persen	43.902.226.993,00						-	55.355.000.000,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Pelaksanaan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>	-			100 Persen	5.489.890.243,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	6.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	634.731.772,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>				4 Dokumen	3.243.745.583,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				4 Dokumen	203.999.480,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				4 Dokumen	926.918.996,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	174.980.692,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i>				250 Orang	305.513.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	-			100 Persen	4.804.765.140,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	4.920.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				2 Dokumen	103.673.340,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				2 Dokumen	96.335.140,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	1.461.436.620,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD</i>				1 Dokumen	1.574.127.280,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	1.569.192.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	-			100 Persen	3.845.073.432,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	3.965.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				2 Laporan	600.640.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				2 Laporan	641.018.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				2 Laporan	642.597.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				2 Laporan	726.927.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	61.573.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				2 Dokumen	273.140.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	899.176.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	-			100 Persen	6.117.944.484,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD	-	7.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	1.632.157.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				28 Orang	1.383.367.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				8 Orang	336.223.440,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				6 Dokumen	587.250.624,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				2 Dokumen	89.968.040,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.1.7. Penguatan Akuntabilita s Kinerja	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				6 Dokumen	2.088.977.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD</i>	-			100 Persen	16.327.560.126,76			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	23.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				225 Laporan	5.420.571.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	96.223.494,76	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				90 Dokumen	8.592.602.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>				10800 Orang	2.218.163.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	-			100 Persen	308.042.400,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD	-	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	203.065.640,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				4 Laporan	104.976.760,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	<i>Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan</i>	-			100 Persen	355.535.791,48			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat	-	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>				3 Dokumen	201.138.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>				2 Dokumen	154.397.791,48	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemda/DPRD/Masya rakat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi</i>	-			100 Persen	6.653.415.375,76			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD	-	8.120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				94 Dokumen	3.999.364.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				20 Laporan	51.468.450,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				2 Dokumen	332.373.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				60 Dokumen	2.105.189.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>				2 Dokumen	165.019.922,76	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH</b>								<b>17.635.223.646,00</b>							<b>1.820.000.000,00</b>	
<b>5</b>		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>16.645.196.744,00</b>							<b>1.820.000.000,00</b>	
	<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>						<b>15.465.196.744,00</b>							<b>1.820.000.000,00</b>	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Sakip Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD</i>	-			82 poin 99 poin 95 poin 90 poin	11.645.196.744,00						-	500.000.000,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Lingkup OPD Nilai Pengukuran Lingkup OPD Nilai Perencanaan Lingkup OPD Nilai Pelaporan Lingkup OPD</i>	-			19 poin 27,5 poin 28 poin 7,5 poin	169.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	119.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	31.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	-			100 Persen	10.286.293.060,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/ Bulan	10.275.852.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5.440.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			100 Persen	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				1 Unit	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				16 Orang	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	379.112.012,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	13.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				348 Laporan	365.208.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	192.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	502.901.672,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	207.901.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	198.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	40.890.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				61 Unit	40.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b><i>Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 60 Poin pada Komponen Penilaian SAKIP</i></b>	-			100 Persen	1.655.000.000,00							1.320.000.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.100.000.000,00			-	-	-		1.320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				2 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				2 Berita Acara	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi</i>				2 Berita Acara	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Presentase Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			100 Persen	365.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>				3 Kerja Sama	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				19 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Presentase hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dibidang Pembangunan Daerah</i>	-			- Persen	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi</i>				1 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b><i>Persentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i></b>	-			<b>100 Persen</b>	<b>2.165.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			100 Persen	885.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	39.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				2 Laporan	14.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	75.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	585.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-			100 Persen	710.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				8 Laporan	68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	138.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				8 Laporan	68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	83.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	<i>Presentase Konsistensi Program Perangkat Daerah antara RKPD dan APBD Lingkup Infrastruktur dan Wilayah</i>	-			100 Persen	570.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				2 Laporan	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	44.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				1 Dokumen	208.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	69.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	49.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>1.180.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	-	-			-	<b>1.180.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				2 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>990.026.902,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>990.026.902,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai Sakip Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD</i>	-			82 poin 99 poin 95 poin 90 poin	<b>990.026.902,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Lingkup OPD Nilai Pengukuran Lingkup OPD Nilai Perencanaan Lingkup OPD Nilai Pelaporan Lingkup OPD</i>	-			19 poin 27,5 poin 28 poin 7,5 poin	16.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	25.189.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.189.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	187.200.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	187.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD</i>	-			100 Persen	201.717.902,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	60.485.931,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				35 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	89.231.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	559.920.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				22 Unit	359.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>239.752.828.720,00</b>							<b>240.672.828.718,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>239.752.828.720,00</b>							<b>240.672.828.718,00</b>	
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>239.752.828.720,00</b>							<b>240.672.828.718,00</b>	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Raport SPBE Lingkup BPKPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BPKPD Nilai SAKIP Lingkup BPKPD Tingkat Capaian Anggaran Lingkup BPKPD</i>	-			4,6 Poin 70 Poin 68,5 Poin 90 Poin	42.948.417.789,00						-	43.318.417.787,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BPKPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BPKPD Nilai Evaluasi Internal Lingkup BPKPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BPKPD</i>	-			25,5 Poin 23 Poin 20,5 Poin 11,85 Poin	357.756.702,00			-	-	ASN BPKPD	-	427.756.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	171.312.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		181.312.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.436.115,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		16.436.113,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	5.402.276,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		15.402.276,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	5.927.733,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		15.927.733,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	5.927.732,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		15.927.732,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	3.769.402,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		13.769.402,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	158.980.824,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		168.980.824,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup BPKPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD	-			74 Persen 97 Persen	39.404.339.431,00			-	-	ASN BPKPD	-	39.564.339.431,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					168 Orang/ Bulan	38.988.552.369,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		39.088.552.369,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	128.349.706,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		138.349.706,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				7 Dokumen	198.734.475,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		208.734.475,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	89.656.958,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		99.656.958,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BPKPD</i>	-			100 Persen	754.652.671,00			-	-	ASN BPKPD	-	794.652.671,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	49.985.631,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		59.985.631,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	398.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		408.179.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				45 Laporan	156.488.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		166.488.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	332.473.636,00			-	-	ASN BPKPD	-	342.473.636,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				74 Unit	332.473.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		342.473.636,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	774.617.309,00			-	-	ASN BPKPD	-	794.617.309,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	51.811.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		61.811.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				72 Laporan	722.806.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		732.806.041,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	1.006.330.600,00			-	-	ASN BPKPD	-	1.046.330.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				29 Unit	450.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		460.196.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				52 Unit	109.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		119.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	236.474.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BPKPD		246.474.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	-			100 Persen	193.305.906.805,00						-	193.655.906.805,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Ketepatan Waktu Pentahapan Penyusunan APBD</i>	-			100 Persen (Tepat Waktu)	903.266.264,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar	-	1.033.266.264,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	42.069.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		52.069.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	26.895.872,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		36.895.872,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				42 Dokumen	7.157.108,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		17.157.108,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				42 Dokumen	4.062.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		14.062.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				42 Dokumen	3.669.008,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		13.669.008,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				42 Dokumen	3.624.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		13.624.080,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	203.489.208,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		213.489.208,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	138.159.704,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		148.159.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				1 Dokumen	57.542.772,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		67.542.772,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				2 Dokumen	49.197.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		59.197.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				2 Dokumen	37.840.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		47.840.628,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				2 Dokumen	5.673.300,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		15.673.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</i>				120 Orang	323.885.920,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		333.885.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Þy Persentase Tingk Kepatuhan Kabupaten terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi</i>	-			99 Persen	230.121.221,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat	-	290.121.221,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	51.713.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		61.713.932,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	80.827.624,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		90.827.624,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	71.020.069,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		81.020.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi</i>				12 Dokumen	5.179.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		15.179.884,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan</i>				1 Laporan	4.620.940,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		14.620.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				30 Orang	16.758.772,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat		26.758.772,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Serapan Anggaran Belanja APBD</i>	-			95 Persen	550.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar	-	660.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>				12 Laporan	8.588.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		18.588.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				152 Dokumen	20.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		30.108.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				12 Dokumen	17.070.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		27.070.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				4 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				4 Dokumen	37.989.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		47.989.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				12 Laporan	88.041.350,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		98.041.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>				4 Dokumen	23.995.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		33.995.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	14.208.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		24.208.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase OPD yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</i>	-			100 Persen	518.016.220,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar	-	558.016.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				516 Dokumen	139.239.751,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		149.239.751,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	109.635.821,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		119.635.821,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				2 Dokumen	108.498.296,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		118.498.296,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				4 Dokumen	160.642.352,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		170.642.352,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	-			98 Persen	190.770.303.100,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank	-	190.770.303.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	8.723.438.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		8.723.438.878,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				1 Laporan	17.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		17.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</i>				4 Laporan	155.046.864.222,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dan Lembaga Bukan Bank		155.046.864.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan SIPD</i>	-			95 Persen	334.200.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar	-	344.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi</i>				200 Orang	334.200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		344.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah</i>	-			100 Persen	390.000.000,00						-	520.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD</i>	-			55 Persen	390.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar	-	520.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	39.639.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		49.639.919,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	16.474.324,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		26.474.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				5 Dokumen	19.807.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		29.807.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	11.315.424,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		21.315.424,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	104.611.013,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		114.611.013,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	35.455.806,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		45.455.806,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	24.930.994,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		34.930.994,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	30.279.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		40.279.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	18.670.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		28.670.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				4 Dokumen	19.961.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		29.961.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				4 Laporan	32.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				20 Orang	24.854.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	OPD Pemprov Sulbar		34.854.120,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b><i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</i></b>	-			<b>96 Persen 11,66 Persen</b>	<b>3.108.504.126,00</b>						-	<b>3.178.504.126,00</b>	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Realisasi PAD</i>	-			100 Persen	3.108.504.126,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut	-	3.178.504.126,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				4 Laporan	250.800.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		260.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				12 Dokumen Ketetapan	66.306.497,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		76.306.497,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	1.915.977.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		1.925.977.820,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				12 Dokumen SSPD	495.957.406,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Me ningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		505.957.406,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti</i>				4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	92.427.988,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		102.427.988,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				4 Laporan	215.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Laporan	72.034.415,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Wajib Pajak dan Wajib Pungut		82.034.415,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>16.732.767.855,00</b>							<b>17.709.664.105,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>16.732.767.855,00</b>							<b>17.709.664.105,00</b>	
	<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>16.732.767.855,00</b>							<b>17.709.664.105,00</b>	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup BKD Nilai SAKIP Lingkup BKD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup BKD Nilai Rapor SPBE Lingkup BKD</i>	-			90 Persen 79,1 Poin 95 Persen 4,45 Poin	7.533.231.945,00						-	7.409.664.105,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup BKD Nilai Evaluasi Internal Lingkup BKD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup BKD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD</i>	-			21,2 Poin 22 Poin 9,7 Poin 26,2 Poin	60.240.874,00			-	-	-	-	60.240.874,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	27.004.467,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.004.467,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				7 Dokumen	26.559.307,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.559.307,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	6.677.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.677.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD</i>	-			95 Persen 95 Persen	6.546.192.292,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	6.546.192.292,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				53 Orang/ Bulan	6.526.624.038,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		6.526.624.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	19.568.254,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.568.254,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup BKD</i>	-			100 Persen	244.182.879,00			-	-	-	-	120.615.539,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9.652.560,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.652.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	88.797.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		88.797.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.598.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.598.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	14.567.679,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.567.679,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	123.567.340,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	125.400.000,00			-	-	-	-	125.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	36.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	68.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	483.457.500,00			-	-	-	-	483.457.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.872.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.872.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	478.585.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		478.585.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	73.758.400,00			-	-	-	-	73.758.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				31 Unit	63.758.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.758.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b><i>Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN Persentase Tata Kelola Manajemen ASN</i></b>	-			<b>5 Poin 20 Poin 80 Persen</b>	<b>9.199.535.910,00</b>						-	<b>10.300.000.000,00</b>	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase jumlah ASN yang diberhentikan dengan jumlah pegawai</i>	-			2.96 Persen	1.370.690.441,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	1.840.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				150 Dokumen	112.825.562,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				103 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				12 Dokumen	137.864.879,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase jabatan yang terisi</i>	-			90 Persen	500.000.000,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	745.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah</i>				400 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				620 Laporan	40.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				44 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN</i>	-			15.45 Persen	7.130.469.213,00			-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	7.365.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				101 Dokumen	40.407.531,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>				100 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>				26 Dokumen	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		7.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				300 Orang	40.061.682,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin</i>	-			17 Persen	198.376.256,00			-	SS-4.2. Me ningkatkan Profesionali tas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				190 Orang	28.376.256,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				12 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.2. Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan berfokus pada Kompetensi dan Kinerja	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						<b>9.630.845.186,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>9.043.538.002,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>9.043.538.002,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>5.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD</i>	-			<b>undefined Persen 99 Persen 73 Poin 75 Poin</b>	<b>6.540.538.002,00</b>							<b>0,00</b>	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD</i>	-			12 Poin 29 Poin 20 Poin 8 Poin	43.000.000,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				7 Data	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Berita Acara	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</i>	-			undefined Persen 99 Persen	5.841.538.002,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/Bulan	5.831.538.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				4 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	8.000.000,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	72.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				56 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen undefined undefined	301.000.000,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			undefined Persen	80.000.000,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				4 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	155.000.000,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				35 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				10 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<i>Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN Persentase Pelatihan yang terakreditasi nNilai Indeks Profesionalisme ASN Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	-			<b>12 Poin 100 Persen 57 Poin 4 Persen</b>	<b>2.503.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN</i>	-			12 Poin	1.628.280.000,00			-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				500 Orang	1.619.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Sumlah SDm Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Jumlah SDM Aparatur yang tersertifikasi</i>	-			40 Orang 50 Orang	874.720.000,00			-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SS-4.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing	ASN Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						587.307.184,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	-			100 Persen	587.307.184,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD	-			100 Persen	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	-			100 Persen undefined undefined	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	247.307.184,00			-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	247.307.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Barat		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		<b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI</b>						<b>7.626.581.163,00</b>							<b>8.389.239.278,00</b>	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.626.581.163,00							8.389.239.278,00	
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG						7.626.581.163,00							8.389.239.278,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	-			66,5 Poin	6.009.317.731,00						-	6.610.249.503,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD</i>	-			2 Poin 1 Poin 1 Poin	236.903.795,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	260.594.174,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	18.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		19.987.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	9.285.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		10.213.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.435.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		11.478.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.435.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		11.478.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.435.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Provinsi Sulawesi Barat		11.478.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	11.813.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		12.995.092,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	168.385.100,00			-	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	185.223.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	9.285.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		10.213.610,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		132.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	39.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		43.010.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	-			100 Poin	21.275.000,00			-	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	23.402.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Laporan	21.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		23.402.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	324.109.050,00			-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	356.519.955,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				4 Paket	110.227.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		121.250.250,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				13 Orang	213.881.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		235.269.705,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	754.048.663,00			-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	829.453.529,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				22 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		22.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				6 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		33.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				9 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		49.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				23 Dokumen	35.362.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		38.898.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				46 Paket	86.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		94.875.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	59.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		65.527.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	297.193.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		326.913.029,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	80.672.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		88.739.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	975.545.000,00			-	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.073.099.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		660.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	10.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		11.599.500,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		165.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		236.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.021.845.700,00			-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	1.124.030.270,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				100 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		220.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	194.025.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		213.428.270,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	527.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		580.602.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.106.282.500,00			-	-	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.216.910.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	338.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		372.020.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	438.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		481.822.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	17.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		18.975.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	86.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		94.875.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	226.562.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Provinsi Sulawesi Barat		249.218.750,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
2.	<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Capaian Pelayanan Penghubung</b>	-			<b>100 %</b>	<b>1.617.263.432,00</b>						-	<b>1.778.989.775,00</b>	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-			5 Laporan 6 Laporan 125 Laporan 6 Laporan	1.617.263.432,00			-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat	-	1.778.989.775,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5 Laporan	628.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		691.240.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				9 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		137.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>				6 Laporan	312.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		343.860.000,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				125 Laporan	551.263.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Provinsi Sulawesi Barat		606.389.775,00	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	
		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							<b>16.907.532.001,00</b>							<b>18.635.957.071,00</b>	
	<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>4.745.186.064,00</b>							<b>7.577.500.000,00</b>	
	<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							<b>4.745.186.064,00</b>							<b>7.577.500.000,00</b>	
1.	<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>80 Poin</b>	<b>902.635.000,00</b>						-	<b>1.327.500.000,00</b>	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD</i>	-			25 Poin 25 Poin 25 Poin 25 Poin	46.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	46.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	16.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				7 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			100 Persen 100 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				77 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	95.135.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	65.135.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	246.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	546.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	175.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	180.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	205.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	-			3 Level	2.700.000.000,00						-	4.550.000.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan</i>	-			349 Laporan	2.100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	3.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				84 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				84 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				84 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				84 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				6 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				6 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti</i>	-			13 Laporan	600.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	1.450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan</i>	-			2 Dokumen	842.551.064,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	1.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				42 Perangkat Daerah	192.551.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				12 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				42 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X	NON URUSAN						12.162.345.937,00							11.058.457.071,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.162.345.937,00							11.058.457.071,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Sakip lingkup OPD</i>	-			80 Poin	12.162.345.937,00						-	11.058.457.071,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD</i> <i>Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD</i> <i>Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD</i> <i>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD</i>	-			25 Poin 25 Poin 25 Poin	143.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-	-	68.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	-		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD</i>	-			100 Persen 100 Persen	11.869.345.937,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	10.560.457.071,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				77 Orang/Bulan	11.869.345.937,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		10.560.457.071,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	80.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 Persen	70.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat	-	80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	SS-4.1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel dan berbasis Digital	Inspektorat		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>11.522.647.804,00</b>							<b>16.195.094.084,00</b>	
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>11.442.647.804,00</b>							<b>16.115.094.084,00</b>	
	<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>11.442.647.804,00</b>							<b>16.115.094.084,00</b>	
1.	<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD</i>	-			<b>5 poin 100 persen</b>	<b>5.967.647.804,00</b>						-	<b>7.564.894.084,00</b>	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD</i>	-			20 poin 20 poin	175.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.055.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI FISIK	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		665.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD</i>	-			100 persen 100 persen	4.729.894.084,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	4.869.894.084,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/ Bulan	4.689.894.084,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		4.789.894.084,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD</i>	-			100 persen	125.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				78 Paket	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD</i>	-			100 persen	480.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	870.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1500 Paket	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5000 Paket	80.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	98.753.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	84.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 persen	275.000.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	355.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	-	-			-	1.875.000.000,00						-	2.550.000.000,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.875.000.000,00			-	SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum	-	-	2.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				80 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				71 Orang	1.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.3. Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum	-		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	-	-			-	1.425.000.000,00						-	1.850.000.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	1.425.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	1.850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Majene, Banggae, Banggae, Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Karossa, Karossa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				50 Orang	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				250 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	100.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	100.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	-	-			-	125.000.000,00						-	500.200.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	125.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	500.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				180 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.950.000.000,00						-	3.250.000.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	1.950.000.000,00			-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-	-	3.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				50 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		1.390.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				80 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		960.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>				12 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	SS-4.1. Me nguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pe merintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	NON URUSAN						80.000.000,00							80.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						80.000.000,00							80.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD</i>	-			5 poin 100 persen	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD</i>	-			20 poin 20 poin	80.000.000,00			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilita s Kinerja	-	-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4.1.7. Penguatan Akuntabilita s Kinerja	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>J U M L A H</b>								<b>1.842.437.605.828,00</b>							<b>2.129.194.111.288,32</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 diukur dengan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024, Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah yang sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat dan Tabel 7.2 tentang Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target	Target
			2023	2024	2025
1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Kapita/Tahun	39,24	46,31	40,5 - 40,56
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,25	5,1	5,8
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,49	10,25	7,51 - 8,01
4	Indeks Gini Rasio	Poin	0,351	0,348	0,345 - 0,349
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,98	2,76	1,1-1,8
6	Indeks Pembangunan Manusia	POIN	69,8	69,36	0,55
7	Indeks Pendidikan	Poin	0,6226	0,6671	0,6815
8	Indeks Kesehatan	Poin	0,7231	0,7407	0,7551
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	POIN	77,45	78,5	78,50
10	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	34,3	34,6	34,9
11	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	161 / Tinggi	158 / Tinggi	153 / Tinggi
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin / Kategori	66,86 / B	70,16 / BB	74,66 / BB
13	Nilai AKIP	Poin / Kategori	70,29 / BB	73,54 / BB	77,54 / BB

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target	Target
			2023	2024	2025
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	74,776	75,524	77
15	Indeks SPBE	Poin	2,35	2,55	3,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Poin	100	100	100

## **7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Indikator kinerja perangkat daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

**Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No.	Usuran/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci		Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>		<b>Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	13,44	13,64
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,18	8,32	8,44
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>				
		Angka Harapan Hidup	Tahun	66,01	66,45	66,85
		Prevalensi Stunting	Persen	26,97	24,3	22
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	100	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	Persen	100	100	100
		Nilai Akreditasi RSUD Provinsi	Nilai	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Nilai Kelas RSUD Provinsi	Nilai	C	B	B
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	1,4	1,5	1,7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
		Persentase Pemenuhan SPM terkait Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
		Persentase Pemenuhan SPM terkait Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
		Rasio Kemantapan Jalan	Persen	43,5	50,19	53,19

No.		Usuran/Bidang Usuran/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
		Persentase Rumah Layak Huni	Persen	61,03	63,01	65,05
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	99,34	100	100
		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	99,34	100	100
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
		Persentase Penyediaan Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	100
		Persentase Gangguan Umum yang Diselesaikan	Persen	100	100	100
		Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana	Poin	153,85	1,863	3,165
		Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	100	100	100
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Provinsi	Persen	80	90	100
		Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	90	90	100
		Persentase Penanganan	Persen	100	100	100
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	90	85	90
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Sosial</b>				
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	Persen	100	100	100
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	Persen	100	100	100
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	Persen	100	100	100

No.			Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	Persen	100	100	100
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Persen	100	100	100
			Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi	Persen	56,55	60	60
			Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	17,62	17,62	23,5
<b>2</b>			<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>				
			Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Poin	52	52,5	53
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	5,73	5,89	6,1
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persen	45	47	48
<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,55	67,2	68,2
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,79	92,5	93,5
			Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap Belanja Daerah	Persen	4,95	8,73	10,5
<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>				
			Persentase Cadangan Pangan Provinsi	Persen	4,93	22	28
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	50	55
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	92,69	86,3	90,2
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	74,7	86,3	90,2

No.		Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>				
		Persentase Luasan Lahan Bersertifikat	Persen	20,72	21,24	21,77
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>				
		Indeks Kualitas Udara	Poin	93,33	91,2	91,3
		Indeks Kualitas Air	Poin	58,82	56,1	56,2
		Indeks Kualitas Air Laut	Poin	83,88	83,63	83,64
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	74,95	79,13	91,3
		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	3,652	0,522	0,87
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
		Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun	Persen	2,58	2,56	2,52
		Age Specific Fertility Rate/ASFR (Jumlah Kelahiran per-1000 Wanita pada Kelompok Usia 15- 19 Tahun)	Persen	43,54	27	22
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>				
		Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	75,50	74,52	75,71
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				
		Tingkat Kematangan SPBE	Persen	47	51	56
		Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa	Persen	81	95,48	100

No.		Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	17	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
		Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	61	80	85
		Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persen	0,39	30	35
2	18	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>				
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	15,50	10	15
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	673	430	450
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Persen	88,10 (Sangat Baik)	90,00 (Sangat Baik)	90,00 (Sangat Baik)
2	19	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>				
		Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	51,00	54,83	55,33
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	0,4	0,44	0,48
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	13,33	20	20
2	20	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>				
		Tingkat Pengelolaan Data Sektoral	Persen	95,42	100	100
2	21	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>				
		<i>Cyber Security Maturity</i>	Poin	2,637	2,703	2,771
2	22	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>				
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	49,31	49,53	49,76
2	23	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>				
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	62,73	18	18,6
		Tingkat Kunjungan Masyarakat di Perpustakaan	Persen	64,86	80	100
2	24	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>				

No.		Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Pengawasan Kearsipan	Poin	65	70	75
		Tingkat Pengelolaan Kearsipan	Persen	60	80	90
<b>3</b>		<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>				
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>				
		Nilai Tukar Nelayan	Nilai	102,33	107,95	108,15
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	11,62	11,9	12,17
		Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	66,10	68	70
		Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan	Persen	33,33	0,038	0,038
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>				
		Persentase Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,24	0,26	0,27
		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	12	9	12
		Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	45	34	45
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Legalitas Usaha	Persen	35	25	30
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>				
		Nilai Tukar Petani Sektor Pertanian	Nilai	129,60	137,2	142,17
		Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	11,76	23,76	23,97
		Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha/Tahun	5,5	5,66	5,82
		Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	Ton/Ha/Tahun	5,53	5,71	5,9
		Produktivitas Tanaman Pangan (Kedelai)	Ton/Ha/Tahun	1,75	1,8	1,86
		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,4	21,86	22,32
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan</b>				

No.		Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,33	0,36	0,35
		Persentase Peningkatan PNPB Sektor Kehutanan	Persen	15	20	25
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	72,85	73,68	72,95
<b>3</b>	<b>29</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
		Rasio Elektrifikasi	Persen	99,83	98,21	98,32
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	96,45	96,92	98,46
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>				
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,91%	10,27	10,38
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non-Migas	Persen	27,85	28,71	30,77
		Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Persen	12,60	17	18,5
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>				
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	12,02	11,35	11,56
		Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	6,34	6,57	6,82
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>				
		Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persen	58,61	100	100
<b>4</b>		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				
		Tingkat Reformasi Hukum	Persen	70	80	90
		Tingkat Kualitas Kebijakan	Persen	70	80	90
		Indeks Kelembagaan	Poin	70	80	90
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	73,03	75,95	79,75

No.		Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2024	Target 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Kepuasan Layanan	Persen	100	100	100
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				
		Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	87,97	100	100
<b>5</b>		<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>				
		Tingkat Dukungan Pencapaian Nilai AKIP Provinsi	Persen	83,25	83,5	83,75
		Tingkat Konsistensi Program Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD	Persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Keuangan</b>				
		Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP
		Rasio Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,226	0,235	0,241
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>				
		Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	21,52	18	20
		Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	23,8	18	20
		Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	5	5	5
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				
		Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	10,45	11	12
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>Penghubung</b>				
		Tingkat Layanan Penghubung	Persen	100	100	100

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahap Ketiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumberdaya Manusia yang mengusung 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu 1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah, 2. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya, 3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, sehingga semua sektor dari prioritas pembangunan diarahkan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah Tahun 2025. Dalam pelaksanaan penyusunan RKPD 2025 mensinergikan seluruh pelaku pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademik.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengikuti prinsip *money follow priority programme* dan *programme follow result*, serta berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dokumen RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2025. Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 ini dapat tercapai sehingga mampu memberikan kebermanfaatn langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Untuk itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang sejahtera dan Malaqbi.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Barat mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Sulawesi Barat secara menyeluruh.

 **R. Gubernur Sulawesi Barat,**  
  
Bahtiar Baharuddin

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

**DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Calon Penerima	Alamat
1	BOS Satuan Pendidikan Menengah Atas Swasta	Prov. Sulawesi Barat
2	BOS Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Swasta	Prov. Sulawesi Barat
3	BOS Satuan Pendidikan Khusus Swasta	Prov. Sulawesi Barat
4	Dewan Pendidikan Prov. Sulawesi Barat	MAMUJU-SULWESI BARAT
5	Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara PAUD Prov. Sulawesi Barat	Kompleks Rumah Jabatan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abd. Pattana Endeng, Rangas-Mamuju
6	Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Barat	Jln. RE Marthadinata
7	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat	Jl. RE Martadinata
8	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat	JALAN CUMI-CUMI NO. 15 TAMBI
9	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Sulawesi Barat	Abd. Malik Pattana Endeng
10	Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sulawesi Barat	Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas.
11	PW. Muhammadiyah Prov. Sulawesi Barat	Jl. Soekarno Hatta NO. 81 Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
12	LPTQ Prov. Sulawesi Barat	Kompleks Masjid Baitul Anwar Kantor Gubernur Kec. Simboro Kab. Mamuju
13	Badan Amil Zakat Prov. Sulawesi Barat	Jl. Martadinata No. 1 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
14	Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Barat	Kompleks Masjid Baitul Anwar Kantor Gubernur Kec. Simboro Kab. Mamuju
15	PW. ICMI Prov. Sulawesi Barat	Jl. Ranggong Kel. Rimuku Kec. Rimuku Kab. Mamuju
16	Perwakilan BWI Prov. Sulawesi Barat	Kompleks Masjid Baitul Anwar Kantor Gubernur Kec. Simboro Kab. Mamuju
17	Badan Kerja Sama Gereja Mamuju Tengah	Jl. Poros Tobadak IV Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
18	HMI Cabang Manakarra	Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
19	Lembaga Pembinaan & Penguatan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD)	Jl. Bau Masepe Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
20	DPD Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatta	Jl. Husni Thamrin Lingk. Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
21	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia	Jl. Ngurah Rai Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
22	STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo	Jl. Gatot Subroto No. 01 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
23	PMII Cabang Mamuju	Jl. Andi Endeng Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
24	DPW. Wahdah Islamiyah Sulawesi Barat	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
25	PW. Nahdlatul Wathan Prov. Sulawesi Barat	Jl. Poros Wisata Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
26	Muallaf Centre Ibrahim Prov. Sulawesi Barat	BTN Masagena 4 Blok F 1 Lingk. Kalubibing Kel. Mamunya Kec. Mamuju Kab. Mamuju
27	LD. Darul As' Adiyah Prov. Sulawesi Barat	Depan Warung Cici Jl. RE. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
28	DPW. BKPRMI Prov. Sulawesi Barat	Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
29	Yayasan Basileia Sejahtera Mamasa	Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
30	Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Sinode	
31	DPD. BKPRMI Kab. Mamuju	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
32	DPW. Wahdah Islamiyah Sulawesi Barat	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
33	GBI Jemaat Mamuju	Jl. Pattimura No. 6 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
34	GBI. Jemaat Salubatu	Jl. Poros Mamuju - Kalumpang Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
35	GBP. Jemaat Pure Timur	Dusun Pure Timur Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
36	GKSB Jemaat Bukit Anugerah	Dusun Kalumpang Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
37	GKSB Jemaat Patudaan	Dusun Patudaan Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
38	GKSB Jemaat Pelita Bambu	Desa Batu Pannu Kec. Mamuju
39	GKSB Jemaat Periangen	Dusun Periangen Desa Kondobulo Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
40	GKSB Jemaat Rantepata	Desa Polio Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
41	GKSB Jemaat Sabamba	Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
42	GKSB. Jemaat Eben Haezer Pombalaan	Dusun Pombalaan Desa Hinua Kec. Bonehau Kab. Mamuju
43	GKSB. Jemaat Firdaus	Dusun Tamessasang Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju
44	GKSB. Jemaat Moria Takkesanga	Dusun Takkesanga Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
45	GKSB. Jemaat Sabamba	Dusun Sabamba Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
46	GKSB. Jemaat Tambing - tambing	Dusun Tambing2 Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju
47	GPdI Jemaat Alfa Omega	Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
48	GPdI Jemaat Bukit Sion	Dusun Tommo Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
49	GPdI Jemaat Efata Pure	Dusun Pure Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju
50	GPdI Jemaat Hebron	Dusun boda - boda Desa Hebron Kec. Mamuju Kab. Mamuju
51	GPdI. Jemaat Betania Ende - ende	Dusun Ende - ende Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
52	GPIT Jemaat Bahtera Saludango	Dusun Saludango Desa Pammulukang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
53	GPT. Jemaat Ende - Ende	Dusun Buttuada Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
54	GTM Jemaat Bajem Maranatha	Dusun Pokkang Utara Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
55	GTM Jemaat Bukit Kasih	Dusun Galung Dambu Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
56	GTM Jemaat Bukit Zaitun	Jl. Sultan Hasanuddin No. 09 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
57	GTM Jemaat Elim	Lingk. Le' beng Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
58	GTM Jemaat Manak Puang	Dusun Sisango Desa Sisango Kec. Papalang Kab. Mamuju
59	GTM Jemaat Salusituru	Dusun Salusituru Desa Leling Utara Kec. Tommo Kab. Mamuju
60	GTM Jemaat Sarunggu	Dusun Kayu lune Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
61	GTM Jemaat Talaya	Dusun Talaya Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
62	HIPMAKAR. Kalumpang Raya	Jl. Baharuddin Lopa BTN Binanga Blok G 9 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
63	IPM. Tapalang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
64	IPPM - Leling Raya	Jl. H. Baharuddin Lopa ( BTN Binanga ) Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
65	LD. Darul As' Adiyah	Depan Warung Cici Jl. RE. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
66	MA. Ainun Sahab	Lingk. Landi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
67	MA. Amaliyah GUPPI Mamuju	Jl. Ir. H. Djuanda No. 03 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
68	MA. Azzahrah Papalang	Jl. Poros Batupapan Kel. Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
69	MA. Darul Abrar Toabo	Dusun Toabo Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
70	MA. DDI Sumare	Dusun Sumare Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
71	Majelis Taklim Al - Chaeran	Lingk. Rangas Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
72	Majelis Taklim Aswajah Muslimat NU	Jl.Martadinata Lingk.RT.02 Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju
73	Majelis Taklim Baburrayan	BTN Graha Pelabuhan Permai Maspol Lingk. Simboro Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
74	Majelis Taklim Istiqamah	Lingk.Dayanginna Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
75	Majelis Taklim Nurul Muttahida	Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.Mamuju
76	Majelis Ta'lim Attaqwa Simbuang	Lingk Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
77	Majelis Ta'lim Miftahul Rahma	Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
78	MAS. DDI Sumare	Dusun Sumare Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
79	Masjdi Al - Qahhar	Lingk. Kampung Jati Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
80	Masjdi Nurul Akbar	Lingk. Kampung Baru Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
81	Masjid Al - A' raaf	BTN Bukit Safa Madani Lingk. Korongana Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab. Mamuju
82	Masjid Al - Abrar	Jl.Tamasapi Lingk. Papodede Kel. Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju
83	Masjid Al - Amin	Dusun Anggatang Poang Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
84	Masjid Al - Aqsa	Lingk. Tegar Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
85	Masjid Al - A'raf	Lingk. Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
86	Masjid Al - Falah	Lingk. Pure II Kel. Sinyonyoi Kec. Mamuju Kab. Mamuju
87	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Tamemongga Desa Tamemongga Kec. Tommo Kab. Mamuju
88	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Salubara' na Desa Salubara' na Kec. Pangale Kab. Mamuju
89	Masjid Al - Ikhlas	Lr. 8 Dusun Garuda Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
90	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Tamala Desa Lebani Kec. Tapalang Kab. Mamuju
91	Masjid Al - Muawanah	Lingk. Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
92	Masjid Al - Muhajirin Tajimane	Dusun Tajimane Desa Taan Kec. Tappalang Kab. Mamuju
93	Masjid Al - Muhajirin Tapparang	Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
94	Masjid Al - Muttaqin	Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
95	Masjid Al - Waarist Saka	Dusun Nipa-nipa Desa Lebani Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju
96	Masjid Al Abbas	Pulau Sabakkatang Desa Bala-balakang Kec. Kep.Bala-balakang Kab. Mamuju
97	Masjid Al -Asri	Lingk. Grahamadani Simboro Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
98	Masjid Al Furqan	Dusun Lomban Bulu Desa Leling Timur Kec. Tommo Kab. Mamuju
99	Masjid Al Hijrah	Dusun Barru Desa Tanete Pao Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
100	Masjid Al Madjid	Jl. Poros Tabailo Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
101	Masjid Al Mani	Dusun Topping Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
102	Masjid Al Mubarak	Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
103	Masjid Al Muhajirin	Lingk. Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
104	Masjid Al Muhajrin	Dusun Karampuang II Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
105	Masjid Al Munawwarah	Lingk. Galung Selatan Kel. Galung Selatan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
106	Masjid Al Quba	Jl. Yos Sudarso Lingk. Kasiwa Induk Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
107	Masjid Al-Ikhlas	Dusun Panggalo Desa Batu Pannu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
108	Masjid Al-Muhajirin	Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju
109	Masjid Al-Muhajirin	Peuweang Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
110	Masjid Al-Muttaqin	Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
111	Masjid An Nur Al Mukhtar	Dusun Tanere Barru Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
112	Masjid Ar - Rabiah	Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
113	Masjid Ar - Rahman	Lingk. Balatedong Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
114	Masjid Ar Rahim	Dusun Barang - Barang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
115	Masjid Ar Rahman	Dusun Salupalado Desa Pati' di Kec. Simboro Kab. Mamuju
116	Masjid Ar Rahman	Dusun Pati'di Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
117	Masjid Ar-Ridha	Desa Tammejarra Kec Tommo Kab. Mamuju
118	Masjid At Taqwa	Dusun Mollo Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
119	Masjid At Taqwa	Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
120	Masjid At Taqwa	Dusun Mollo Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
121	Masjid Babul Jannah	Dusun Rumbakan Desa Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
122	Masjid Babul Khoir	Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju
123	Masjid Baburrayyan	BTN Maspul Lingk Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
124	Masjid Babussalam	Jl. Pengayoman Kantor Rutan Mamuju Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
125	Masjid Babussalam	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
126	Masjid Babussalam	Dusun Tampomea Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju
127	Masjid Babussalam	Dusun Turadu Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
128	Masjid Babussalam	Dusun Dolangan II Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
129	Masjid Baitul Ikhsan	Jl. Husni Thamrin Lingk. Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
130	Masjid Baitul Maqdis	Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
131	Masjid Baitul Ukhuwah	Komp. BTN Graha Nusa 5 Lingk. Ghamasi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
132	Masjid Besar Nurul Yaqin	Lingk. Galung Kel. Galung Kec. Taपालang Kab. Mamuju
133	Masjid Darul Falah	Lingk. Lombang - lombang Utara Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
134	Masjid Darul Falah Tamao	Dusun Tamao Desa Tampalang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
135	Masjid Darul Syuhada	Dusun Batu Bira Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
136	Masjid Darussalam	Dusun Indoure Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
137	Masjid Darussalam	Lingk. Bukit Karema Indah Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
138	Masjid Djafar Al Ikhlas	Lingk. Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
139	Masjid Ilma Pongtiku	Kompleks Perumahan Pongtiku Residence Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
140	Masjid Jabal Nur	Dusun Ende Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
141	Masjid Jabal Nur	Jl. Hapati Hasan Lingk. Bukit Karema Indah Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
142	Masjid Jabal Nur	BTN Korongana Bukit Asri Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
143	Masjid Jabal Nur Puri Mutiara II	Lingk. Korongana Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
144	Masjid Lumika	Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
145	Masjid Majma'ul Falah	Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju
146	Masjid Marmatunnajah	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
147	Masjid Miftahul Jannah	Lingk. Ahuni Timur Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
148	Masjid Murni	Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
149	Masjid Nurul Amaliah	Dusun Salumaetang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Kab. Mamuju
150	Masjid Nurul Da' wah	Dusun Ahu Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
151	Masjid Nurul Fatwa	Dusun Bela Desa Bela Kec. Tapalang Kab. Mamuju
152	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Kasiwa Timur Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
153	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Salupangi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
154	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Taruminding Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
155	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Galung Lemo Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
156	Masjid Nurul Hikmah	Lingk. Danga Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
157	Masjid Nurul Hilal	Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
158	Masjid Nurul Iman	Dusun Salu manarang Desa Saludengen Kec. Tommo Kab. Mamuju
159	Masjid Nurul Iman	Jl. KS. Tubun No. 28 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
160	Masjid Nurul Iman	Lingk. Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
161	Masjid Nurul Inayah	Lingk. Kapandeang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
162	Masjid Nurul Islam Simbuang II	Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
163	Masjid Nurul Jannah	Dusun Labuang Rano Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
164	Masjid Nurul Mu' min	Dusun Tasiu Timur Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
165	Masjid Nurul Mu'min	Desa Kombiling Kec. Kalukku Kab. Mamuju
166	Masjid Nurul Muttaqien	Dusun Dungkait Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
167	Masjid Nurul Qalbi	Dusun Karaeng Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
168	Masjid Nurul Qamariah Kalubibing	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Lingk. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
169	Masjid Nurul Taqwa	Dusun rantedunia Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
170	Masjid Nurul Taqwa	Dusun Daman Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju
171	Masjid Nurul Wahab	Dusun Barang - barang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
172	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Galung Utara Kel. Galung Kec. Tappalang Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
173	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Lambang-lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
174	Masjid Nurut Taqwa	Lingk. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
175	Masjid Nuruttaubah Muslimat NU	Jl.Martadinata Lingk.RT.02 Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju
176	Masjid Raudhatul Muttaqin	Dusun Wonorjo Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju
177	Masjid Ridha Orobatu	Dusun Bone - bone Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju
178	Masjid Sayyida Darul Mu'minin	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
179	Masjid Sirajul Mu' minin	Lingk. Ahuni Pili Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
180	Masjid Taqwa	Dusun Batupapan Barat Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
181	Masjid Taqwallah	Dusun Karangsari Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju
182	MI Ainun Sahab Landi	Jl.H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
183	MI Miftahul Ulum Toabo	Lr.10 Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
184	MI. Al Ikhwan Toansang	Dusun Toansang Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
185	MI. Annur Ma' arif Bakengkeng	Dusun Bakengkeng Desa Belang - Belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
186	MI. Darul Ilimi Sampoang	Lingk. Ranga - ranga Selatan Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
187	MI. DDI Malauwa	Dusun Malauwa Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju
188	MIS. Nurul Imam Bunde	Jl.Teratai Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju
189	Mts Babul Jannah	Lingk. Katapi Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
190	MTs. Al Qamar	Lingk. Kassa Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
191	Mts. Al-Furqan Sese	Jl Pendidikan Sese Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
192	Mts. Amaliyah Guppi Mamuju	Jln.Ir H. Djuanda No.03 Kab. Mamuju
193	MTs. Darul Ilimi Sampoang	Lingk. Sampoang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
194	Mts. Muslimina Keang	Dusun Tahuppo Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
195	MTs. Nurul Falaq	Dusun Salukanan Desa Tammejarra Kec. Tommo Kab. Mamuju
196	MTs. Nurul Iman Bunde	Dusun Bunde Desa Bunde Kec. Sam Kab. Mamuju
197	Muallaf Centre Ibrahim	BTN Masagena 4 Blok F 1 Lingk. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
198	Mushallah Al - Achlak	Lingk. Ampallas Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
199	Mushollah Al - Ikhlas	Lingk. Galung Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
200	Ormas Muslimah Wahdah Wilayah Sulbar	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
201	PD. DDI Kab. Mamuju	Jl. Gatot Subroto Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
202	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Prov. Sulawesi Barat	Jl. Ngurah Rai Kompleks Pura Stana Dewata Mamuju
203	Perwakilan BWI Prof. Sulbar	Jl.H. A. M. Pattana Endeng Lt. 1 Masjid Baitul Anwar Kec. Simboro Kab. Mamuju
204	PMII Cabang Mamuju	Jl. Andi Endeng Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
205	Ponpes Ar Rahman	Dusun Kabuloang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
206	Ponpes At - Tanwir Muhammadiyah	Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema Kec. Karema Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
207	Ponpes At Tahiriyah Annahdhiyah	Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
208	Ponpes Darul Qur' an Wal Hadts NW	Jl. Poros Wisata Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
209	Ponpes Hasyim Asy' ari Tapalang	Dusun Serang Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
210	Ponpes Modern Darul Adab wal Ilmi	Dusun Tanete Barru Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
211	Ponpes Nurul Iman	Dusun Mariri Desa Tarailu Kec. Sam Kab. Mamuju
212	Ponpes Syahid Al - Hidayah	Desa Belang - belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
213	Ponpes Tahfidz Akhlakul Karimah	Jl. Musa Karim Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
214	Ponpes Tahfidz Al Huda	Jl. Andi Endeng No. 2 Pesona Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
215	Ponpes Tahfidz Ar - Rahman	Dusun Batupannu Kel. Mamunya Kec. Mamuju Kab. Mamuju
216	Ponpes. Hidayatullah Mamuju	Jl. Abd. Syakur No. 02 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
217	PPGTM. Jemaat Elim Lebbeng	Lingk. Lebbeng Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
218	Pura Ped	Dusun Tulung Agung Desa Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju
219	PW Muslimat NU Provinsi Sulawesi Barat	Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju
220	PW. Nahdlatul Wathan Prov. Sulawesi Barat	Jl. Poros Wisata Gentungan Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
221	RA. Babul Jannah	Lingk. Katapi Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
222	RA. Baburrahman	Lingk. Ranga - ranga Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
223	Remaja Masjid Al - Munawwarah	Lingk. Te'beng Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
224	Remaja Masjid Nurul Qubah	Dusun Tandiasa Desa Guliling Kec. Kalukku Kab. Mamuju
225	Remaja Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
226	Remaja Mesjid Al Waysi	Dusun Kayu Mate Desa Kalukku Barat Kec. Kec. Kalukku Kab. Mamuju
227	TK. Benih Cahaya Bangsa	Graha Nusa 2 Tahap 1 Blok F 23 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
228	TPA Al - Aqsha	Jl. Andi pettana Endang Komplek Legenda Lingk.Tegar Kel. Simboro.Kec Simboro Kab. Mamuju
229	TPA Al - Fatih Nur	Dusun Limbong Bassi Desa Salletto Kec. Simboro Kab Mamuju
230	TPA Al - Hafis	Lingk. Lombang- lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
231	TPA Al - Hidayah	Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Binanga Kab. Mamuju
232	TPA Al - Hidayah	Lingk. Talange Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
233	TPA Al - Hidayah	Dusun Taloba Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
234	TPA Al - Hidayah	Dusun Pambutungan Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju
235	TPA Al - Ikhlas	Lingk. Galung Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
236	TPA Al - Khairat	Jl. Puatta Karema No.29 Kab. Mamuju
237	TPA Al - Qadri	Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
238	TPA Al Munawwarah	Dusun Rumbia Apo Desa Pammulukang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
239	TPA Al-Fatih Nur	Dusun Limbong Bassi Desa Salletto Kec. Simboro Kab Mamuju
240	TPA Ar - Rahman	Lingk. Makkarama Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
241	TPA Ar - Rahman	Dusun Pala'da Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
242	TPA Ar Rahim	Lingk. Dayanginna Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju
243	TPA Arrahman	Lingk. Buluttakkang Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
244	TPA Babul Ilmi	Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
245	TPA Babul Jannah	Kompleks Pasar Baru Lingk. Salukarema Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
246	TPA Babul Suci	Lingk. Ranga-ranga Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Majene
247	TPA Jannatul Firdaus	Lingk. Ghamasi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
248	TPA Manakarra II Mamuju	Jl. Abdul Khalik Pua Tjabai Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
249	TPA Nurul Amin	Lingk. Rangas Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
250	TPA Nurul Hijrah	Dusun Lolonggauang Desa Labuangrano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
251	TPA Nurul Ilmi	Jl. Poros Sese Bia Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
252	TPA Nurul Muttahida	Lingk. Binanga Kel. Binanga Kec. Binanga Kab. Mamuju
253	TPA Nurul Yaqin	Dusun Kabe Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju
254	TPA Nurussalam	Dusun Limbeng Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
255	TPA UMMY	Jl. Muh Husni Tahmrin, Perum Residence No.13 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
256	TPA. Darul Mukhlisin	Dusun Beru - beru Desa Pasa' bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
257	BKMT. An Nisa	Dusun Waigamo Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
258	MA AL Chaeriyah	Dusun Leba - Leba Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
259	Madin Al - Hikmah	Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
260	Madin Takmilyah Al - Hikmah	Dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
261	Majelis Al - Istiqamah	Lingk. Tammaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
262	Majelis Taklim Al - Hikmah	Dusun Tubo Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
263	Majelis Taklim An Nur Samuane Sambaine	Kecamatan Banggae Kab. Majene
264	Majelis Taklim Binaan Penyuluh Agama Islam	Jl. Sultan Alauddin No.2 Somba Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
265	Majelis Taklim Naimatul Aini	Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
266	Majelis Ta'lim Al-Mujahidah	Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene
267	Majelis Taqlim Nur Annisa	Dusun Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
268	Majelis Taqlim Qurrata Ayyun	Dusun Tinggas Timur Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
269	Mas Ddi Taukong	Dusun Taukong Desa Tande allo Kec. Ulumanda Kab. Majene
270	Masjid A' la	Dusun Adolang Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
271	Masjid Al - Haysr	Lingk. Apoleang Utara Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
272	Masjid Al - Hidayah	Dusun Salutambung Barat Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
273	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Ba' balombi Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
274	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Kanei Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene
275	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Kampung Baru Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
276	Masjid Al - Ikhsan	Dusun Naulluyo Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene
277	Masjid Al - Istiqamah	Lingk. Tammaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
278	Masjid Al - Muallimin	Dusun Ba' basondong Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene
279	Masjid Al - Mubaraqah	Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
280	Masjid Al - Muhajirin	Lingk. Salewang Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene
281	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Labu Labuang Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
282	Masjid Al - Mujahidin	Dusun Leppangan Timur Desa Leppangan Kec. Sendana Kab. Majene
283	Masjid Al Akbar	Dusun Batutaku Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
284	Masjid Al -Asri	Dusun Camba -camba Desa Tallu Banua Kec Sendana Kab. Majene
285	Masjid Al Muhajirin	Dusun Paga Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
286	Masjid Al Qadri	Dusun Camba - camba Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
287	Masjid Al-Aqsa	Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene
288	Masjid Alauddin	Dusun Bo' di Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene
289	Masjid Al-Mu'min	Dusun Taraweki Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
290	Masjid An-Nuur	Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
291	Masjid Ansarullah	Dusun Sumakuyu Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
292	Masjid As Salam	Dusun Kampung Baru Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene
293	Masjid Babul Jannah	Dusun Tamajannang Desa Ulumanda Kec. Ulumanda Kab. Majene
294	Masjid Babul Jannah	Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
295	Masjid Baburrahmah	Lingk. Mandalle Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
296	Masjid Baburrahman	Dusun Sambabo Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene
297	Masjid Baburrahman	Dusun Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene
298	Masjid Baitul Hamdani	RW 003 Deteng- Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene
299	Masjid Baitul Izzah	Lingk. Camba Utara Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
300	Masjid Baitul Mahmudah	Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene
301	Masjid Baitul Maslahah	Lingk. Garo' go - Garo' go Selatan Selatan Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
302	Masjid Baitul Mukminin Mosso	Dusun Mosso Timur Desa Lombong Timur Kec. Malunda Kab. Majene
303	Masjid Darul Arafah	Dusun Parrasangan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
304	Masjid Darul Faizin	Lingk. Segeri Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene
305	Masjid Darul Falihin	Dusun Bunga Desa Buttu Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
306	Masjid Darul Hidayah	Dusun Banua Desa Paminggalan Kec. Sendana Kab. Majene
307	Masjid Darul Ma' ruf	Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene
308	Masjid Darul mu' minin	Dusun Tanete Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
309	Masjid Darussa'adah	Dusun Puttada Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene
310	Masjid Darussalam	Dusun Popenga Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene
311	Masjid Darussalam	Dusun Tappa Banua Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene
312	Masjid Fatuhrrahman	Dusun Bajoleng Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
313	Masjid Jabalul Istiqamah	Dusun Rawang Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
314	Masjid Jami Al - Amin	Dusun Lombang Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene
315	Masjid Jami Al - Furqan	Jl. Poros Majene - Mamuju Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
316	Masjid Jami Nurul Huda	Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
317	Masjid Jami' Nurul Yaqin	Dusun Luaor Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene
318	Masjid Jami Taqwa	Dusun Balombong Selatan Desa Balombong Kec. Pamboang Kab. Majene
319	Masjid Jami Ussisa Alattaqwa	Ratte Bila Desa Tallambalao Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
320	Masjid Khadijah	Dusun Taninni Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
321	Masjid Miftahush Shiddiq	Dusun Manyamba Tengah Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
322	Masjid Nurul Amin	Dusun Kayuangan Utara Desa Kayuangan Kec. Malunda Kab. Majene
323	Masjid Nurul Bayan	Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
324	Masjid Nurul Falah	Dusun Puttada Selatan Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene
325	Masjid Nurul Falah	Dusun Labu - labuang Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
326	Masjid Nurul Fitrah	Dusun Ratte Apas Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
327	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
328	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene
329	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Buttutala Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene
330	Masjid Nurul Hidayah	Lingk. Tammalupu Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene
331	Masjid Nurul Huda	Lingk. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene
332	Masjid Nurul Huda	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
333	Masjid Nurul Ihsan	Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
334	Masjid Nurul Imam	Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
335	Masjid Nurul Insan	Jl. Poros Majene Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
336	Masjid Nurul Islam	Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
337	Masjid Nurul Jama' ah	Dusun Kampong Totolisi Tengah Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
338	Masjid Nurul Jama'ah	Totolisi Tengah Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
339	Masjid Nurul Maghfirah	Dusun Waigamo Selatan Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
340	Masjid Nurul Mudzakirin	Jl Abu Salam Rusung-rusung Kec. Banggae Timur Kab. Majene
341	Masjid Nurul Mujahidin	Lingk. Binanga Kel.Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
342	Masjid Nurul Mujahidin	Dusun Pullobe Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene
343	Masjid Nurul Muttaqin	Lingk. Kalorang Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
344	Masjid Nurul Taufiq	Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene
345	Masjid Nurul Wahyu Labuang	Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
346	Masjid Raodhatussalihin	Lingk. Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene
347	Masjid Raudhatul Djabbar	Jl. Kemakmuran Lingk. Somba Timur Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
348	Masjid Raya Raudhatul Abidin	Jln. Mayjen Azis Bustam No.7 Kec. Banggae Kab. Majene
349	Masjid Sirajul Munir	Dusun Petudang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
350	Ml Guppi Saleppa	Jl.K.H. Zainal Abidin Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene
351	Ml. Al Fatah Siiyang	Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
352	Ml. DDI Lipu	Lingk. Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene
353	Ml. DDI Segeri	Lingk. Segeri Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene
354	Ml. Nurul Insan GUPPI Pesuloang	Dusun Pesuloang Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
355	Mis Al - Amanah Pangaleroang	Desa Tallang Balao Kec. Tammeroda Sendana Kab. Majene
356	Mis Ddi Lombona	Jln Poros Majene Mamuju Km 70 Lombona Kab. Majene
357	Mis LSMMI Paga	Jln Poros Majene Mamuju Km 94 Dusa Paga Desa Mekatta Selatan kec. Malunda Kab. Majene
358	MTs. DDI Majene	Jl. KH. Muh. Shaleh Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majeje
359	MTS. GUPPI Ulidang	Jl. Poros Majene - Mamuju Km. 51 Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
360	MTs. Totolisi	Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
361	Mts.Guppi Pesuloang	Jl. Poros Majene - Mamuju Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
362	Mushallah Asmaul Husnah	Komp. SMP N 3 Sendana Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
363	Mushallah Jabal Nur	Dusun Belalang Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene
364	Mushallah Jabal Taqwa	Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
365	Mushallah Nurul Mubin	Dusun Butungang Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene
366	Mushallah Raudha Darmi	Lingk. Galung Utara Kel. Galung Kec. Banggae Kab. Majene
367	Mushallah SMK Neg. 4 Majene	Dusun Bonde - bonde Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
368	Mushollah Al - Amin	Dusun Sumakuyu Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
369	Mushollah Jabal Taqwa	Ratte Lasse Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene
370	Mushollah Nurul Ilmi	Kompleks SMA No.1 Jl. Kemakmuran No. 20 Somba Kec. Sendana Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
371	Pondok Tahfidz Al - Qur'an Imam Syafii	Dusun Salu Lemo Desa Tandeallo Kec. Ulumanda Kab. Majene
372	Ponpes Al Mansuriyah	Dusun Malunda Desa Malunda Kec. Malunda Kab. Majene
373	Ponpes Darul Hikmah Poniang	Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
374	Ponpes Miftakhul Iلمي DDI Seppong	Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammerodo Kab. Majene
375	RA. Al Hikmah Tubo	Dusun Tubo Dalam Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
376	RA. Auliya Kayu Colo	Lingk. Kayu Colo Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene
377	RA. Purwanda Nurul Wahyu	Dusun Lasuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
378	Rumah Qur' an Ar - Raudah	Dusun Lembang Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
379	TPA Adzaariyaat	Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
380	TPA Al - Bayan	Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
381	TPA Al - Ghufran	Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene
382	TPA Al - Hidayah	Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
383	TPA Al - Hidayah	Desa Mekkatta Selatan Dusun Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene
384	TPA Al - Ikhlas	Lingk. Rangas Tamalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
385	TPA Al - Muhajirin	Dusun Tatibajo Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene
386	TPA Al -Asri	Dusun Camba -camba Desa Tallu Banua Kec Sendana Kab. Majene
387	TPA Al -Ikhlas	Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene
388	TPA Al Iqra	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
389	TPA Al-Iqra	Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene
390	TPA Al-Muttaqin	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
391	TPA Attaqwa	Dusun Pallang - pallang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
392	TPA Kalilamungan	Dusun Tarupa Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
393	TPA Muallimah	Dusun Poniang Utara Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
394	TPA Nurhidayah	Lingk. Rangas Pabesoang Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
395	TPA Nurul Hikma	Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
396	TPA Nurul Iman	Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
397	TPA Nurul Iqra	Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene
398	TPA Nurul Yaqin	Dusun Totolisi Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
399	TPA Salafiya	Dusun Poniang Utara Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene
400	TPA Ulil Maryam	Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene
401	TPA. Nadhifa	JL. Poros Majene - Mamuju Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene
402	MA As - Syam Lebani	Lingk. Lebani Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
403	MA. Al Balad Kamande	Jl. Poros Tubbi No. 3 Desa Pollewani Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
404	MA. Hajaratul Akbar	Jl. Poros Saraigian Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
405	MA. Pergis Campalagian	Jl. Ammana Majju No. 85 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
406	Majelis Taklim Khairunnisa	Dusun Kalummang Desa Kalummang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
407	Masjid Abadan	Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
408	Masjid Agung Syuhada	Jl. Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
409	Masjid Agussalim	Dusun Toledang Desa Pao - pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
410	Masjid Al - Amin	Dusun Kambe Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
411	Masjid Al - Anshar	Dusun Samma Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
412	Masjid Al - anshar Sayoang	Desa Sayoang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
413	Masjid Al - Anshor	Dusun Lamutte Kamase Desa Rangoan Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
414	Masjid Al - Aqlussalim	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
415	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Patto - patto Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
416	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Kelapa dua Desa Kelapa dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
417	Masjid Al - Ikhlas	Lingk. Juddasaf Kel. Palitakan Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
418	Masjid Al - Ikhlas	Dusun 2 Baba bussu Desa Bussu Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
419	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Alla Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
420	Masjid Al - Ikhlas	Jl. Bambu Dusun 1 Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
421	Masjid Al - Ittihad	Dusun Katumbangan Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
422	Masjid Al - Kausar	Dusun Leppan Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
423	Masjid Al - Khaerat	Dusun Lambe Kayu Desa Desa Bakka - bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
424	Masjid Al - Khalfi	Dusun II Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
425	Masjid Al - Mubarakah	Dusun Sarampu Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
426	Masjid Al - Muhajirin	Lingk. Pekkabata Kanang Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
427	Masjid Al - Muhajirin	Lingk. Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
428	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Beulo Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
429	Masjid Al - Munawwara	Dusun Tabassala Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
430	Masjid Al - Muttahir	Dusun Taloba Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
431	Masjid Al - Namira	Dusun Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
432	Masjid Al Huda	Dusun Poda - poda Desa Poda - poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
433	Masjid Al Ikhlas	Dusun Alla' Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
434	Masjid Al Ikhlas	Dusun Loa Desa Poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
435	Masjid Al Ikhlas	Dusun 3 Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
436	Masjid Al Ikhlas Al Madina	Dusun Rea Jaya Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polman Mandar
437	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sumberjo Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
438	Masjid Al Mujahidin Suppungan	Dusun suppungan Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
439	Masjid Al Namira	Lingk. Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
440	Masjid Al Nurul Taqwa	Dusun Kalimbua Desa Kalimbua Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
441	Masjid almubarakah	Perumahan Ampi Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman
442	Masjid An - Nur Batang Utta	Dusun Batang Utta Desa Palatta Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
443	Masjid ANNur	Dusun 4 Matalie Desa Nepo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
444	Masjid Ansharullah	Dusun Pusu Desa Pao-pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
445	Masjid Ansharullah	Dusun Petoosang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
446	Masjid Arrahim	Dusun Sepang Desa Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
447	Masjid Ar-rahim	Dusun Sepang Desa Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
448	Masjid As - Shofiyah	Lingk Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
449	Masjid As - Sulaeman	Dusun Malio Desa Sayoang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
450	Masjid As Shalihin	Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
451	Masjid Assa' adah	Lingk. Binuang 2 Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
452	Masjid Babul Ilmi	Kompleks SMP N 1 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
453	Masjid Babul Jannah	Dusun Palleroang Desa Salarri Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
454	Masjid Babul Jannah	Dusun Rappogading Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
455	Masjid Babul Jannah	Jl. Kapten Jumhana Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
456	Masjid Babul Jannah	Dusun Segerang Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
457	Masjid Babul Khairat	Dusun Pundali - dali Desa Poda - poda Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
458	Masjid Babul Rahman	Dusun Beuwas Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
459	Masjid Baburrahman	Dusun London Desa Peburru Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
460	Masjid Babussalam	Dusun Banu - banua Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
461	Masjid Baetul Mubarakah	Dusun Padang Sari Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
462	Masjid Baitul Mukarram Piteteang	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
463	Masjid Bilal Al Fatih	Dusun Batu Appang Desa Kurrak Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
464	Masjid Bukatul Al Mubaraka	Dusun Daala Desa Daala Timur Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar
465	Masjid Cahaya Islam	Dusun I Desa Samasundu Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
466	Masjid Darul Falah	Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
467	Masjid Darul Falaq	Dusun Pangalloang Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
468	Masjid Darul Khair	Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
469	Masjid Darul Muraqabah	Dusun Para Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
470	Masjid Dharul Huda	Dusun Ponorogo Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
471	Masjid H. Abd. Madjid	Dusun Layonga Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
472	Masjid Hajaratul Akbar	Dusun Tangan Baru Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
473	Masjid Hj. Muhsana Tahir	Dusun Pangalloang Desa Mosso Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
474	Masjid Ismu A'dzam	Dusun Sosso Lambe Desa Saragian Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
475	Masjid Jabal Nur	Dusun 2 Desa Pulliwa Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
476	Masjid Jabal Nur	Dusun Peburru Desa Peburru Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
477	Masjid Jabal Nur Lapadang	Dusun Pusu Desa Pao-pao Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
478	Masjid Jabal Nur Malimbu	Dusun Batusasi Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
479	Masjid Jabal Rahmah	Dusun Baro - baro Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
480	Masjid Jabal Rahmah	Lingk. Perumtel Kel. Madatte Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
481	Masjid Jami' Al - Amin	Dusun 1 Subik Desa Sabang Subik Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
482	Masjid Jami' Al Ghazali	Dusun Kamp. Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
483	Masjid Jami' Anni'mat Sosso	Dusun Sosso Desa Saragian Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
484	Masjid Jami Darussalam	Dusun Kalummang Desa Kalummang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
485	Masjid Jami Darussalam	Dusun Lembang - lembang Desa Lembang - lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
486	Masjid Jami Nurul Akbar Leteang	Dusun Baro - baro Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
487	Masjid Jami Nurul Amin	Dusun Jombang Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
488	Masjid Jami Nurul Amin	Kp. Kandemeng RT 02 RW 02 Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
489	Masjid Jami Nurul Hidayah	Dusun III Bina Rejo Desa Banato Rejo Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
490	Masjid Jami Nurul Huda	Dusun Rappang Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
491	Masjid Jami Raudhatul Dzakirin	Dusun I Lekopadis Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
492	Masjid Jami Raudhatul Muttaqin	Dusun Kekkes Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
493	Masjid Jami Taqwa	Dusun Garonggong Desa Besoangin Utara Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
494	Masjid Jannatu Adnin	Dusun Saleko Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
495	Masjid Juang	Dusun Parapa Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
496	Masjid Lailatul Qadar	Dusun Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
497	Masjid Miftahunnur	Dusun Mambu Barat Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
498	Masjid Miftakhul Khaer	Dusun Palece Desa Ogi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
499	Masjid Miftakhul Khair	Dusun I Dakka Desa Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
500	Masjid Mubaraqa	Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
501	Masjid Nurul Amilin	Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
502	Masjid Nurul Amin	Dusun Paahang Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
503	Masjid Nurul Amin	Dusun Pangesoran Desa Gattungan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
504	Masjid Nurul Amin Malise	Dusun Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
505	Masjid Nurul Asror	Lingk. Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
506	Masjid Nurul Furqan	Dusun Puspo Desa Peburru Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
507	Masjid Nurul Hidayat	Dusun Rappang Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
508	Masjid Nurul Huda	Dusun Galung Daala Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
509	Masjid Nurul Huda	Dusun Rura Desa gattungan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
510	Masjid Nurul Huda	Dusun Morro Desa Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
511	Masjid Nurul Huda	Dusun Manye - manye Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
512	Masjid Nurul Huda	Dusun Bakka - bakka Desa Bakka - bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
513	Masjid Nurul Huda	Dusun Bumiayu Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
514	Masjid Nurul Huda Ululilli	Dusun Pussendana Desa Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Manda
515	Masjid Nurul Ihsan	Dusun IV Mekar Rejo Desa Banato Rejo Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
516	Masjid Nurul Ihsan	Dusun Bodang - bodang Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
517	Masjid Nurul Ihsan	Dusun Betteng Desa Palece Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
518	Masjid Nurul Ihsan	Lingk. Pappang Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
519	Masjid Nurul Iman	Dusun Bonra II Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
520	Masjid Nurul Iman	Dusun Lembang Desa Tandassura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
521	Masjid Nurul Iman	Dusun Tabassala Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
522	Masjid Nurul Iman	Jl.Poros Lemo baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
523	Masjid Nurul Izzah	Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
524	Masjid Nurul Jawwad	Dusun Kandemeng Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
525	Masjid Nurul Taqwa	Dusun Belulu Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
526	Masjid Nurul Taqwa	Lingk. Matakali Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
527	Masjid Nurul Taubah	Dusun 1 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
528	Masjid Nurul Tauhid	Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
529	Masjid Nurul Tauhid	Dusun Pendukuan Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
530	Masjid Nurul Tijarah	Komp. Pasar Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
531	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Taramanu Desa Taramanu Tua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
532	Masjid Nurul Yaqin	Lingk. Tandakan Baru Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
533	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Kawelaan Desa Besoangin Utara Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
534	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Passubbe' Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
535	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Sidorejo Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
536	Masjid Nurul Yaqin	Dusun Batupanga Desa Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
537	Masjid Nurussalim	Jl. Kolong Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
538	Masjid Nurussalihin	Lingk. Mombi Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
539	Masjid Nurussalihin	Lingk. Darma Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
540	Masjid Nurussyuhada	Jl. Poros Tutar Mambu Timur Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
541	Masjid Nurut Taqwa	Dusun Bunu Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
542	Masjid Nurut Taqwa	Dusun Belulu Desa Buku Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
543	Masjid Nuruttaubah	Jl. Budi Utomo Komp. Kodim Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
544	Masjid Qalbun Salim Salujerre	Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
545	Masjid Raudatul Jannah	Jl. Bulubawang Dusun Rea Jaya Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
546	Masjid Raudhatul Ambasyiah	Dusun Laliko Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
547	Masjid Raudhatul Jannah	Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
548	Masjid Raudhatul Muttaqin	Dusun II Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
549	Masjid Raudhatussajidin	Dusun Tara Ujung Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
550	Masjid Ruhul Jama' atil Mu' min	Dusun Berampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
551	Masjid S. Abbas Ali	Dusun V Kappung Psr. Baru Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
552	Masjid Syuhada	Dusun Tulung Rejo Desa Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
553	Masjid Ta' mir Muhammadiyah	Lingk. Sidodadi Kel. Sidodadii Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
554	Masjid Tanwirul Hadi	Dusun Blitar Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
555	Masjid Taqwa	Dusun Lasambe Desa Galeso Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
556	Masjid Tawaakkal	Dusun Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar
557	Masjid Umar Bin Khatab	Dusun Passairang Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
558	Masjid Yathalattaf	Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
559	MI DDI Alu	Jl. Makam Ammana Pattowali Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
560	MI DDI Penatangan	Jl. Pendidikan No. 1 Dusun Penatangan Desa Patambanuan Kec. Bulo Kab. Poman
561	MI DDI Pulele	Kel. Darma Kel. Polewali Kab. Polewali Mandar
562	MI DDI Ringginan	Jl. Poros Matangga Desa Katimbang Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar
563	MI Ma'arif Sarampu	Jln. Masjid Al Ma'arif Sarampu Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
564	MI Pasar Baru	Jl. Poros Tinambung Limboro Desa Lekopaddis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
565	MI. Al Furqan Basseang	Jl. Poros Salupana Desa Duampanua Basseang Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
566	Ml. Al Irsyad Leteang	Dusun Leteang Desa Tenggeling Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
567	Ml. Al Irsyad Rondongan	Dusun Rondongan Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
568	Ml. Al Wasilah Ithing	Jl. Poros Matangnga Desa Ithing Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
569	Ml. DDI Kurrak	Jl. Poros Kalimbua Desa Kurrak Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
570	Ml. DDI Lemo Baru	Jl. Poros Lemo Baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
571	Ml. DDI Madatte	Lingk. Madatte Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
572	Ml. DDI No. 361 Ugi Baru	Jl. Pendidikan No. 07 Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
573	Ml. DDI No. 366 Bumi Ayu	Jl. Poros Kebun Sari Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
574	Ml. DDI No. 372 Lampa	Jl. Olahraga No. 04 Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
575	Ml. DDI Pulo Tangnga	Lingk. Pulo Tangnga Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
576	Ml. DDI Suruang	Jl. Poros Suruang Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
577	Ml. Hikmat Al Ihsan Kalimbua	Jl. Poros Tutar Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
578	Ml. Nursaleha Napo - napo	Dusun Napo - napo Desa Todang - todang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
579	Ml. Baiturrahim	Lingk. Gernas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
580	MIS DDI Panggalo	Jl. Kanne Onro Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
581	MTs. Al Balad Kamade	Jl. Poros Tubbi Kamande Desa Polewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
582	MTs. Al Fajrin Tangnga - tangnga	Jl. Poros Pulliwa Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
583	MTs. Al Irsyad Leteang	Kampung Leteang Desa Tenggeling Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
584	MTs. An Nur Baiturrahim	Lingk. Gernas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
585	Mts. Annur Baiturrahim Seppong	Lingk. Seppong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
586	MTs. Bukit Marwah	Hl. Daeng Parakai Desa Bunga - bunga Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
587	MTs. Darul Iman Wattaqwa Tibun	Jl. Poros Tibun Desa Besoangin Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
588	MTs. DDI Lebbukang	Desa Tandasura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
589	MTs. DDI Pariangan	Dusun Pariangan Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
590	MTs. DDI Penatangan	Jl. Pendidikan No. 1 Desa Penatangan Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar
591	MTs. DDI Polewali	Jl. Kemakmuran Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar
592	MTs. Khatibul Umam Kurma	Jl. Poros S. Mengga Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
593	MTs. Ma' arif Patu Limboro	Jl. Poros Saragian Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
594	Mts. Marhalim Campalagian	Jl. Poros Kampung Baru Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
595	MTs. Mas' udiyah Wonomulyo	Jl. Padi Unggul 2 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
596	MTs. Miftahul Jannah	Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
597	MTs. Nuhayah Pambusuang	Dusun Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar

No	Calon Penerima	Alamat
598	MTs. Yayasan Permai Tutalu	Jl. Poros Tinambung Alu Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar
599	Mushallah Al - Firdaus	Lingk. Pallis Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
600	Mushallah Al Fatih	Komp. DDI Dakka Desa Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
601	Mushallah Al Jabbar	Dusun Siratuang Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
602	Mushallah Muhlisina Lahuddin	Jl. Poros Kampung Baru Desa Padang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
603	Mushallah Nurul Hasni Ibrahim	Komp. DDI Kurrak Desa Kalimbia Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
604	Pondok Pesantren Al-Jariyah	Jl. Poros Majene Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
605	Ponpes Al Jariyah Matakali	Jl. Poros Majene Kel. Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
606	Ponpes Modern Darul Mahfudz	Jl. Maradia Tokape No. 101 Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
607	Ponpes Nahdlatul Ummah	Dusun Kanang Desa Batatangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
608	Ponpes Nahdlatul Ulum Sarampu	Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
609	Ponpes Salafiyah Al - Ihsan Kenje	Jl. Elang No. 10 Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
610	Ponpes Syekh Hasan Yaman	Jl. Syekh Hasan Yaman Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
611	RA Ar-Ridwan Panggalo	Jl. Poros Ongko Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
612	RA. Al - Waqiah Tutar	Jl. Poros Tubbi Desa Polewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
613	RA. HS. Muhdar Cabang Bonra	Dusun Bonra II Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
614	RA. HS. Muhdar Cabang Kurma	Jl. Poros Dusun Paredea Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
615	RA. HS. Muhdar Cabang Pasiang	Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
616	RA. Samasundu	Dusun Samasundu Desa Samasundu Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar
617	Remaja Masjid Nurun Na'im Karoke	Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
618	Stimik Hasan Sulur	Jl. Gatot Soebroto No. 1 Sidoali Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
619	TPA Al - Ikhlas	Dusun Tanatakko Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali
620	TPA Nurul Yaqin	Lingk. Pokko Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
621	TPA. Firdaus	Dusun Lapeo Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
622	Yayasan Al - Faruq Bulo	Dusun Lombangan Desa Sepporraki Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar
623	Gereja Kibaid Jemaat Aralle	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka' Kab. Mamasa
624	GK. ST. Karolus Borromeus	Dusun Salubeang Desa Banea Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
625	GK. ST. Michael Tabone	Jl. Poros Kel. Tabone Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
626	GK. ST. Santo Yohanes Makula'	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka' Kab. Mamasa
627	GK. ST. Yoseph Suami Maria	Dusun Ratte Desa Batanguru Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
628	GKSS Jemaat Imanuel Aralle	Dusun Kalabatu Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
629	GPdI Jemaat Air Hidup	Jl. Poros Lingk. Salulossa Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
630	GPdI Jemaat Aralle	Jl. Poros Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
631	GPdI Jemaat Elim Pekandungan	Lingk. Purroma' Utama Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
632	GPdI Jemaat Sumber Kasih	Dusun Limbong Lopi Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa
633	GPdI Jemaat Tabaya	Dusun Tabaya Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
634	GPdI Jemaat Victory	Dusun Litak Sakka' Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa
635	GPIT Jemaat Mentari Lakahang	Lingk. Purroma' Utama Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
636	GPIT. Jemaat Bukit Doa	Lingk. Salumata Kel. Lakahang Kec. Lakahang Kab. Mamasa
637	GPIT. Jemaat Bukit Sion Kabae	Dusun Kabae Desa Kabae Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
638	GPIT. Jemaat Ora Et Labora	Dusun Sumua' Desa Buntu Malangka' Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
639	GPIT. Jemaat Palliabu	Dusun Palliabu Desa Malatinro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
640	GPIT. Jemaat Sola Fide Sodangan	Dusun Sodangan Desa Buntu Malangka Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
641	GPIT. Jemaat Taora	Dusun Taora Desa Taora Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
642	GPIT. Jemaat Unung Karmel	Dusun Siso Desa Salurindu Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
643	GPT. Jemaat Lakahang	Jl. Poros Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
644	GTM Bukit Zaitun Limba	Dusun Kampung Baru Desa Limba Debata Kec. Bambang Kab. Mamasa
645	GTM Jemaat Bahtra Pongka Ka' da	Jl. Poros Dusun Ka' da Desa Orobuja Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
646	GTM Jemaat Bambang Buda	Dusun Buntu bulo Desa Bambang Buda Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
647	GTM Jemaat Betania	Dusun Bukit Indah Desa Minanga Kec. Bambang Kab. Mamasa
648	GTM Jemaat Bukit Kasih Buangin	Dusun Buangin Desa Buangin Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
649	GTM Jemaat Bukitt Zaitun	Dusun Lambanan Desa Tadisi Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
650	GTM Jemaat Cabang Bongabosa	Dusun Katihandusan Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
651	GTM Jemaat Ebenheiser Kahaleang	Dusun Lalampeu' Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka. Kab. Mamasa
652	GTM Jemaat Eden Minanga	Dusun Minanga Desa Kanan Kec. Tandukkalua ' Kab. Mamasa
653	GTM Jemaat Efrata Salusiampek	Dusun Salusiampek Desa Tampakkurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
654	GTM Jemaat Efrata Talambai	Dusun Talambai Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian Kab. Mamasa
655	GTM Jemaat Elim Talondo	Lingk. Tondok Bakarua Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
656	GTM Jemaat Galilea	Dusun Karang Kalua' Desa Bombong Lambe' Kec. Mamasa Kab. Mamasa
657	GTM Jemaat Galung - Galung	Dusun Galung - galung Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
658	GTM Jemaat Gloria Balo - balo	Dusun Balo - balo Desa Salutambun Timur Kec. Buntumalangka' Kab. Mamasa
659	GTM Jemaat Gunung Hermon	Jl. Poros Tawalian Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
660	GTM Jemaat Hosana Lakahang	Lingk. Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
661	GTM Jemaat Imanuel	Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
662	GTM Jemaat Imanuel Bakeng	Lingk. Bakeng Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
663	GTM Jemaat Imanuel Buangin	Dusun Buangin Desa Buangin Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
664	GTM Jemaat Imanuel Maroangin	Dusun Maroangin Desa Paladan Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
665	GTM Jemaat Kanan Roka' Dua	Dusun Kanan Roka' Dua Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
666	GTM Jemaat Maranatha	Dusun Sendana Desa Mehalaan Kec. Mamasa Kab. Mamasa
667	GTM Jemaat Masuppu	Dusun Masuppu Desa Masuppu Kec. Tabang Kab. Mamasa
668	GTM Jemaat Mawa'	Dusun Mawa' Desa Tabang Barat Kec. Tabang Kabang Kab. Mamasa
669	GTM Jemaat Mongkok	Dusun Mongkok Desa Aralle Timur Kec. Bumal Kab. Mamasa
670	GTM Jemaat Musafir Kadolang	Dusun Kadolang Desa Salutambun Barat Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
671	GTM Jemaat Musafir Puncak Indah	Jl. Poros Polewali Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa
672	GTM Jemaat Orabua	Dusun Orabua Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
673	GTM Jemaat Rantekamiri	Dusun Rantekamiri Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa
674	GTM Jemaat Salumayang	Dusun Salumayang Desa Salumakanan Barat Kec. Rantebulahan Timur
675	GTM Jemaat Sepang	Dusun Mesakada Desa Mesakada Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
676	GTM Jemaat Sion Betteng	Dusun Betteng Desa Mellangkena Padang Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
677	GTM Jemaat Sion Orabua	Dusun Orobua Desa Orobua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa
678	GTM Jemaat Sion Pangandaran	Dusun Parrantak Desa Pangandaran Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
679	GTM Jemaat Syalom Tampak Loppo	Dusun Tampak Loppo Desa Tampak Kurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
680	GTM Jemaat Talimbung	Dusun Talimbung Desa Talimbung Kec. Tandukkalua' Kab. Mamasa
681	GTM Jemaat Tokka	Dusun Tokka Desa Salutambun Kec. Pana Kab. Mamasa
682	GTM Klasis Tamalantik	Desa Kanan Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa
683	KTA - Gassing Salutambun	Dusun Salutambun Desa Salutambun Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
684	Majelis Taklim Al - Irsyad	Dusun Salualo Desa Salualo Kec. Mambi Kab. Mamasa
685	Majelis Taklim Al - Taqwa	Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
686	Mas Al Fauziah talippuki	Pepana Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa
687	Mas Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
688	Masjid Al - Ikhlas	UPT Rano Trans 25 Desa Mehalaan Barat Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
689	Masjid Al - Jabbar	Dusun Pebi Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa
690	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Salubiru Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
691	Masjid Al - Muhajirin	Dusun Padang - padang Desa Saludurian Kec. Mambi Kab. Mamasa
692	Masjid Al - Muhajirin At - Thahirin	Pasar Makau Desa Buntu buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa
693	Masjid Al - Muhsinin	Dusun Katakata Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
694	Masjid Al Muhajiirin	Lingk. Lombongan Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa
695	Masjid Al Muhajirin	Dusun Padang-padang Desa Saludurian Kec. Mambi Kab. Mamasa
696	Masjid An - Nur Salualo	Desa Salualo Kec. Mambi Kab. Mamasa
697	Masjid An Nur	Dusun Salusibino Desa Salu Alo Kec. Mambi Kab. Mamasa
698	Masjid At - Taqwa Mambi	Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
699	Masjid Attaubah	Dusun Ba' bapane Desa Panetean Kec. Aralle Kab. Mamasa
700	Masjid Besar Nurul Ihsan Mambi	Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
701	Masjid Jabal Nur	Lingk. Maerang 1 Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa
702	Masjid Nurul Al - Taqwa Messawa	Kel. Messawa Kec. Messawa Kab. Mamasa
703	Masjid Nurul Falah	Dusun Lembang Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
704	Masjid Nurul Hamalul	Dusun Saludurian Desa Katiluaan Timur Kec. Mambi Kab. Mamasa
705	Masjid Nurul Hidayah Makula	Dusun Sareppe Desa Aralle Timur Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa
706	Masjid Nurul Iman	Dusun Saluhussu Desa Kalakbe Kec. Aralle Kab. Mamasa
707	Masjid Nurul Yaqin	Jl. Pembangunan Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
708	Masjid Raya Nurul Ihsan	Lingk. Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
709	Masjid Taqwa	Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
710	Masjid Zayyidin An Nur Sibanawa	Desa Sibanawa Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
711	Mis Al - Ma' arif Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
712	Mis Palado	Dusun Palado Desa Indobanua Kec. Mambi Kab. Mamasa
713	Mis Sambaho	Tokoning Desa Pamoseang Kab. Mamasa
714	Mts DDI Tapalinna	Jln. Poros Mambi Aralle Desa Tapalinna Kec. Mambi Kab. Mamasa
715	MTSS Pamoseang Pangga	Desa Pamoseang Pangga Dusun SaluMasimbo Kec. Aralle Kab. Mamasa
716	Mushallah SMA Negeri 1 Mamasa	Komp. SMA N 1 Mamasa Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa
717	Mushallah Zayyidin An - Nur	Dusun To' barana Desa Rante Kamase Kec. Sumarorong Kab. Mamasa
718	Panti Asuhan Hudallinnas Indonesia	Jl. Poros Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
719	Ponpes Miftahul Risalah	Jln Poros Tatoa Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
720	Ponpes Miftahurrisalah Tatoa	Dusun Tatoa Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa
721	Ponpes Nurul Padilah Salumaka	Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
722	PPGTM Jemaat Bukit Damai Mongko'	Dusun Mongko' Desa Aralle Timur Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
723	PPGTM Jemaat Elim Salutambun	Dusun Ratte Desa Salutambun Kec. Buntumalangka Kab. Mamasa
724	PPGTM Jemaat Tarinding	Dusun Tarinding Desa Talopa' Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
725	RA Nurul Imam Soppeng	Dusun Soppeng Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
726	RA Perwanida Nurul Ikhsan	Kec. Mambi Kab. Mamasa
727	RA. Al Fauziah	Kel. Talipuki Kab. Mamasa
728	Rumah Adat Mappurondo	Dusun Salubalo Desa Salubalo Kec. Mehalaan Kab. Mamasa
729	Rumah Adat. Tongkonan Kondo	Dusun Tokka Desa Salutambun Kec. Pana Kab. Mamasa
730	SDS Uhaidao	Jln. Poros Uhaidao Dusun Kurasa Kec. Aralle Kab. Mamasa
731	SMKS Awara Aralle	Dusun Tapakok Desa Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
732	SMPS 001 Unggulan Indona Lembang	Dusun Galung Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa
733	SMPS Indona Lembang Pedou	Dusun Pedou Desa Salubanua Selatan Kec. Mambi Kab. Mamasa
734	SMPS Unggulan Tapalina	Jl. Poros Mamasa Mamuju Dusun Dambu Desa Tapalinna Kec. Mambi Kab. Mamasa
735	Tk. Alhijrah Salukero	Dusun Salukero Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa
736	TPA Al Furqan Kurasa	Dusun Kurasa Kec. Aralle Kab. Mamasa

No	Calon Penerima	Alamat
737	TPA Nurul Taqwa Tangngauma	Dusun Tangngauma Desa Uhai Lanu Kec. Aralle Kab Mamasa
738	TPA Sondong Layuk	Desa Sondong Layuk Kec. Mambi Kab. Mamasa
739	TPA Taqmirul Baitang	Desa Aralle Utara Kec. Aralle Kab. Mamasa
740	YPK - Paud Satria	Dusun Seppom Desa Salumokanan Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
741	YPK - GTM TK. Tunas Harapan	Dusun Tokkalaba Desa Salutambun Barat Kec. Buntu Makangka Kab. Mamasa
742	YPK - TK Kulambu Malilin	Dusun Salumayang Desa Salumokanan Barat Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa
743	GBI Star Karossa	Jl. Poros Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
744	GBT. Jemaat Tobadak IV	Dusun Batuparigi Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
745	GBT. Jemaat Tobadak V	Jl. Rambutan Desa Sulobaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
746	GBT. Jemaat Tobadak VII	Dusun Sidomukti Desa Saloadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
747	Gereja Kibaid Jemaat Tobadak II	Dusun Singayoka Kel. Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
748	GK.Jemaat Tasantung	Dusun Tasantung Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
749	GPdI. Jemaat Nanakan	Dusun Nanakan Desa Sertanamaju Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
750	Madrasah Ibtidaiyah	Dusun Muhajir Desa Tasokko Kec. Korossa Kab. Mamuju Tengah
751	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Hako Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
752	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Tasantung Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
753	Masjid Al - Khairat	Dusun Benggaulu Timur Desa Benggaulu Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
754	Masjid Al - Mukhlisin	Dusun Tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
755	Masjid Al - Munawwaroh	Jl. Poros Mamuju - Palu Desa Salupangkang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
756	Masjid Al Biruni	Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
757	Masjid Al Mukhlisin	Dusun Tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
758	Masjid An Nur	Dusun Buana Sakti Desa Polo Lereng Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
759	Masjid Babussalam	Dusun Mora Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
760	Masjid Jabal Nur Lotu	Dusun Lotu Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
761	Masjid Miftahul Hasanah	Dusun Kadaila desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
762	Masjid Nurul Haq	Dusun Transari Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
763	Masjid Nurul Huda Tallungallo	Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
764	Masjid Nurul Jihad	Dusun Mambi Desa Salule' bo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
765	Masjid Nurul Qalbi	Dusun Alla - alla Desa Babana Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
766	MPW. GBT Sulawesi Barat	Jl. Tobadak Raya Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
767	Mts Ar Razaq	Jln. Trans Sulawesi Dusun Salupangkan Tua Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
768	Mts Nurul Muttakin Topoyo	Dusun Topoyo Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
769	Mts. Al Chaeriyah Budong- Budong	Jln. Pue Ballung Patulana Kec. Budong - Budong Kab. Mamuju Tengah

No	Calon Penerima	Alamat
770	MTs. Nurul Ilmi Budong - budong	Dusun Karondang Desa Babana Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
771	PAC. GP. Ansor Karossa	Dusun Karossa Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
772	Pesantren DDI Al-Ma'arif Topoyo	Topoyo 2 Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
773	Pondok Pengajian Manakib Jawahirul Maani	Jl. Duku Dusun Nusa Rinjani Desa Sulobaja Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
774	Ponpes Lukmanul Hakim	Jl. Trans Sulawesi Desa Barakkang Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah
775	PW. GBT Sulawesi Barat	Jl. Tobadak Raya Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah
776	TPA Al - Ibrahim	Dusun Salupangkan II Desa Bambamanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
777	TPQ Al- Imam Ashim	Dusun Batu Karampuang Desa Tasokko Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
778	Gereja Bakal Jemaat Meolaan	Dusun Meolaan Desa Benggaulu Kec.. Dapurang Kab. Pasangkayu
779	Gereja Bala Keselamatan Korps Pinora'a	Dusun Watubete Desa Wulai Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
780	Gereja Bala Keselamatan Pos Luar Salupangi	Dusun Kumboli Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu
781	Gereja Bala Keselamatan Tapalili	Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
782	GK. Stasi Santa Maria	Dusun Baras IV Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
783	GKS. Maria Stasi Baras VI	Jl. Ahmad Kirang Baras IV Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
784	GMPU Jemaat Oikumene Sion PT. Letawa	Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
785	GMPU Jemaat Pasangkayu	Lingk. Martajaya Kel. Martajaya Kab. Pasangkayu
786	GPIB Pelita Baras	Dusun Motu Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu
787	GSJA Shalom Martajaya	Jl. Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
788	GTM Jemaat Funju	Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
789	MA. Nurul Jadid	Jl. Pendidikan No.10 Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
790	Masjid Abdullah Bin Ja'far	Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
791	Masjid Al – Hijrah	Dusun Kali Kuma Desa Sipakainga Kec Duripoku Kab Pasangkayu
792	Masjid Al - Ikhlas	Dusun Todang Jaya Desa Bambaira Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
793	Masjid Al - Ikhlas	Jln. RA. Kartini Pasangkayu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
794	Masjid Al - Istiqomah	Jl. Trans Sulawesi Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
795	Masjid Al - Kautsar	Dusun Palapi Desa Tempaure Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
796	Masjid Al – Muhajirin	Dusun Polewali Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
797	Masjid Al - Qubah	Dusun Jono Timur Desa Tikke Kec. Tikke Rayaa Kab. Pasangkayu
798	Masjid Al Ikhlas	Dusun Meolaan Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
799	Masjid Al Ikhwan	Dusun Benggaulu Tua Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
800	Masjid Al Muhajirin	Dusun Bukit Asri Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu
801	Masjid Al-Fatih	Jl. Trans Sulawesi Dusun Matua Jaya Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
802	Masjid Al-Hijrah	Dusun Tobajo Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
803	Masjid Al-Hijrah	Dusun Lione Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
804	Masjid Al-Iklas	Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
805	Masjid Al-Muhajirin	Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
806	Masjid Al-Muhajirin	Dusun Bukit Husada Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju
807	Masjid Al-Munawarah	Dusun Morobio Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
808	Masjid Al-Munawarah	Dusun Palipi Tenggo Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
809	Masjid An – Nur	Dusun Lopping Desa Tarangi Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
810	Masjid An - Nur SMA Neg. 2 Pasangkayu	Dusun Tanjung Babia Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
811	Masjid An' Nur	Dusun Peburo Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
812	Masjid An-Nur	Dusun Lopping Desa Tarangi Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
813	Masjid Ar - Rahaman	Dusun Burangge Jl. Trans Sulawesi Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu
814	Masjid Ar Rahman	Lingk. Kampung Tengah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
815	Masjid Ar-Rahman	Dusun Anjare Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
816	Masjid At - Taqwa	Desa Pedanda Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
817	Masjid At - taubah	Dusun Sempo Utara Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
818	Masjid Attauba	Dusun Duri Bohe Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
819	Masjid Babul Jannah	Dusun Tanjung Harapan Desa Bambakoro Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
820	Masjid Babul Jannah	Dusun Binoli Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu
821	Masjid Babul Khair	Dusun Siparappe Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
822	Masjid Babussalam	Dusun Panebunggu Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
823	Masjid Dakhlal Jannah	Dusun Bulu Tambaga desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
824	Masjid Darul Ummah	Dusun Tabalia Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
825	Masjid Darussalam	Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
826	Masjid Darussalam	Dusun Limua Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
827	Masjid Darussalam	Dusun Salu apu Desa Vakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
828	Masjid Istiqlal	Jl. Kijang BTN Pemda Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
829	Masjid Jabal Resky Matangtasi	Lingk. Bulu Maya Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
830	Masjid Muhammad Hasan Assyauli	Dusun Sendana Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
831	Masjid Nur Samsi	Dusun Sukamaju Desa Sipakainga Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
832	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Kalukumbeo Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
833	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
834	Masjid Nurul Huda	Dusun Pebondo Dua Desa Kalukunangka Kec. Bammbaira Kab. Pasangkayu
835	Masjid Nurul Ihsan	Desa Lilimori Kec. Bulu taba Kab. Pasangkayu

No	Calon Penerima	Alamat
836	Masjid Nurul Ilmi UPTD SMA 1 Tikke Raya	Dusun Salubalo Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
837	Masjid Nurul Jihad	Dusun Kusumanegara Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu
838	Masjid Nurul Khairaat	Dusun Panta batu Desa Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
839	Masjid Nurul Taqrim	Dusun Kasalai Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
840	Masjid Raudhatul Jannah	Dusun Batukasoro Desa Pangieng Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
841	Masjid Shiratul Jannah	Dusun Hikma Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
842	MI Ainun Sahab Marangngappa	Jl. Trans Sulawesi Dusun Marangngappa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
843	MI Darus Sholihin NW	Dusun Barubu Desa Lilimori Kec. Bulu Taba Kab. Pasangkayu
844	MI. Nurul Huda	Desa Bulu mario Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu
845	Mushallah Al Amin	Dusun Tarareko Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
846	Mushallah Al Khairat	Dusun Lambara Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu
847	Mushallah As - Syukur	Kantor Camat Desa Parabu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
848	Mushallah Yu'min Salunggabo	Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
849	Mushollah Babul Jannah	Dusun Ika Utama Desa Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu
850	Mushollah SDN Bulu Bonggu	Dusun Duri Bohe Desa Bulu Bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
851	Mushollah UPTD SMAN 1 Lariang	Jl. Pendidikan Desa Batu Matoru Kec. Lariang Kab. Pasangkayu
852	Musollah Al - Amin	Dusun Tarareko Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
853	Pondok Al Qur' an Al Jariyah	Jl. Gatot Subroto Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
854	Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Pasangkayu	Jl. Bukit Husada II Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
855	Pondok Pesantren As'adiyah Darussalam Belawa Rahmat	Dusun Belawa Rahmat Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
856	Pondok Pesantren Thoriqul Ulum	Desa Tirta Buana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
857	Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an Abu Huraerah	Dusun Peburo Desa Ako Kec. Pasngkayu Kab. Pasangkayu
858	Ponpes. Takhfidz Qur' an Al Madani	JL. Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasamgkayu
859	Pura Maha Gotra Sanak Sapta RSI	Dusun Lelejae Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
860	Pura Merajapati	Dusun Tri moro Desa Tirta Buana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
861	Pura Panti Pangeran Tangkas Kori Agung	Dusun Taharai Desa Balanti Kec Baras Kab Pasangkayu
862	Pura Pasek Dukuh	Dusun Lelejae Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
863	TPA Al Istiqomah	Dusun Limoa II Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu
864	TPA Babul Hasan	Dusun Ika Utama Desa Saptanajaya Kec.Duripoku Kab. Pasangkayu
865	Yayasan Alkhairat Baras	Jln. Bukit Vida Dusun Pantai Batu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu
866	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	-
867	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-
868	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	-
869	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-

No	Calon Penerima	Alamat
870	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-
871	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-
872	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-
873	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	-
874	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-
875	Partai Demokrat (DEMOKRAT)	-
876	Partai Amanat Nasional (PAN)	-
877	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	-

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

**DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Calon Penerima	Alamat
1	LKS Al-Jumrah	Jln. Poros Mambu Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec. Luyo
2	LKS Yayasan Mandar Indonesia	Jl. Kesadaran Kompleks Masjid Rabi Ibrahim Assayyid Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
3	LKS Marannu	Dusun Kambunong Desa Kambunong Kec. Karossa
4	LKS Korumta Care	Desa Mekkatta Kec. Malunda
5	LKS Qurrata A'yun	Jl. H. Abd. Syakur No.2
6	LKS Al-Hasanah	Jl. S. Hasan Yamani No.07
7	LKS Ar Rahmah Hidayatullah	Jl. Ahmad Yani Dusun Tanjung Babia
8	LKS Kasih Ibu	Jalan Poros Mamuju Kalukku KM 11
9	SLB Negeri Lutang	Jl. Sultan Hasanuddin, Kompleks Perumahan Lutang Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur
10	SLB ABCD Aisyiyah	Jl. KH. Muh. Saleh No.5 Kampung Baru Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur
11	SLB Malunda	Jl. Lemo Bambang Dusun Samalio Kec. Malunda
12	LKS Timbu Paraban	Kampung Tua Desa Malatiro Kec. Tabulahan
13	SLB DDI Baruga	Lingkungan Baruga Kel.Baruga Kec. Banggae Timur
14	LKS Yayasan Mandar Indonesia	Jl. Kesadaran No.23 Depan SDIT Al-Munawwarah Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
15	LKS TP PKK Sendana	Jl. Sultan Alauddin Somba Kel. Mosso Kec. Sendana
16	LKS Al-Jumrah	Jln. Poros Mambu Dusun Bonra Desa Mapilli Barat Kec. Luyo
17	Karang Taruna Desa Mamasa	Dusun Kariango Desa Mamasa kec. Mamasa
18	Karang Taruna Desa Taupe	Desa Taupe Kec. Mamasa
19	Karang Taruna Desa Tapango	Desa Tapango Kec. Tapango
20	Karang Taruna Desa Palatta	Desa Palatta Kec. Tapango
21	Karang Taruna Desa Benato Rejo	Desa Benato Rejo Kec. Tapango
22	Karang Taruna Desa Bussu	Desa Bussu Kec. Tapango
23	Karang Taruna Desa Jambumalea	Desa Jambumalea Kec. Tapango
24	Karang Taruna Mandiri	Dusun Katapang Desa Dakka Kec. Tapango
25	Karang Taruna Melati	Dusun 3 lakejo Desa Dakka Kec. Tapango
26	Karang Taruna Sejati	Lingkungan Pelitakan Kelurahan pelitakan Kec. Tapango
27	Karang Taruna Mawar	Lingkungan Batu Iaka Kelurahan pelitakan Kec. Tapango
28	Karang Taruna Desa Rappang	Desa Rappang kec. Tapango
29	Karang Taruna Desa Riso	Desa Riso Kec. Tapango
30	Karang Taruna Desa Kalimbua	Desa Kalimbua Kec. Tapango
31	Karang Taruna Desa Kurrak	Desa Kurrak Kec. Tapango
32	Karang Taruna Desa Tapango Barat	Desa Tapango Barat Kec. Tapango
33	Karang Taruna Kelurahan Banggae	Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae
34	Karang Taruna Kelurahan Lalampanua	Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang
35	Karang Taruna Mapiya	Lingkungan Timbo Kelurahan Pangali-ali
36	Karang Taruna Rusung	Lingkungan Rusung Kelurahan Pangali-ali

No	Calon Penerima	Alamat
37	Karang Taruna Pangalo	Lingkungan Pangalo Kelurahan Pangali-ali
38	Karang Taruna Palapa Nusantara	Desa Pontanakayang Kec. Budong-budong
39	Karang Taruna Krida Jaya	Desa Bambadaru Kec. Tobadak
40	Karang Taruna Tunas Muda	Desa Waeputeh Kec. Pangale
41	LKS Timbu Paraban	Kampung Tua Desa Malatiro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa
42	LKS Marannu	Dusun Kambunong Desa Kambunong Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
43	KUBE KEMUNING	Desa Pasabu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
44	KUBE SATONDOKTA	Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju
45	KUBE MELATI	Dusun Pasada Desa Botteng Utara Kec. Simboro Kab. Mamuju
46	KUBE USAHA RESKY	Dusun Ende Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju
47	KUBE MELATI	Ling. Kampung Baru Kel. Bebanga Kec. Mamuju
48	KUBE KIOS KEMBAR	Ling. Trans Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
49	KUBE FAUSAN ALIF	Desa Karangpuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
50	KUBE MEPAMARANNU	jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
51	KUBE BUKIT BULLUNG	Dusun Taan Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
52	KUBE KARAMA INDAH	Desa Karama Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah
53	KUBE MARASADUAPAI	Dusun Beringin Desa Bonda kec .papalang kab. mamuju
54	KUBE KIOS RESKY	desa takandeang kec. Tapalang kab. Mamuju
55	KUBE WARUNG EMPAT PUTRI	Desa lariang kec. Mamuju kab.mamuju
56	KUBE BATU SAMBUA	desa.tallang balao kec. Tameroddo sendana kab.majene
57	KUBE MERPATI	Kel. Binangan Kec. Mamuju Kab. Mamuju
58	KUBE CAHAYA HARAPAN	Dusun Air Panas Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
59	KUBE MATA UHAI	Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju
60	KUBE AMANDA	Dusun Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene
61	KUBE ANDIANG SIALUPPEI	Desa Rattedoda Kec. Tapalang Kab. Mamuju
62	KUBE USAHA MAJU	Desa Belang - Belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
63	KUBE USAHA MANDIRI	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
64	KUBE MATAHARI	Dusun Lollongngauang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
65	KUBE TAESO	Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
66	KUBE CAHAYA TAHAYA HAYA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
67	KUBE DELISA PUTRI	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
68	KUBE DUA PUTRI	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
69	KUBE KAMBING 88	Dusun Kadundung Desa Lara Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
70	KUBE SINAR SALUSENDANA	Dusun Salusendana Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
71	KUBE MESA LULUARE	Dusun Kuridi Kel. Galung Kec. Tapalang kab. Mamuju
72	KUBE FAUZAN MOTOR	Dusun Salusendana Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
73	KUBE MIKAYLA MOTOR	Dusun Saleppa Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene
74	KUBE SIOLA	Dusun Bababulo Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene
75	KUBE SINAR ABADI	Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polman

No	Calon Penerima	Alamat
76	KUBE SATU HATI	Dusun Lombang Desa Poda - Poda Kec. Tuta Kab. Polman
77	KUBE NUR BERKAH MULIA	Dusun Pussui Induk Kec. Luyo Kab. Polman
78	KUBE BUNGA RAYA	Desa Tenggeling Kec. Luyo Kab. Polman
79	KUBE SUTAR SALON	Dusun Palapi tenggo Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu
80	KUBE SAMURAI	Dusun Pangaleroang Desa Tallambalao Kec. Tammerodo Kab. Majene
81	KUBE LINDU JAYA	Dusun Hahangan Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
82	KUBE AL-ARSY	Dusun Puccadi Desa puccadi Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
83	KUBE MENJAHIT SEJAHTERA	Dusun Lambague Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
84	KUBE KIOS PUTERI	Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
85	KUBE WAROENG SAMA LARIS	Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
86	KUBE KIOS SEJAHTERA	Dusun Mapilli Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
87	KUBE KIOS SINAR FAJAR	Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
88	KUBE KIOS MALAQBI	Desa Bondra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar
89	KUBE SINAR KENJE	Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
90	KUBE SETIA MENJAHIT	Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
91	KUBE MESA KANNE	Desa Poda - poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
92	KUBE MESA PEOLO	Desa Poda - poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar
93	KUBE KIOS PURNAMA	Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
94	KUBE GUNUNG MANAMORI	Ling. Lombang desa Poda - Poda Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar
95	KUBE KIOS SEDERHANA	Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar
96	KUBE SINGARANG TASSIALUPPEI	Desa Tammangalle Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
97	KUBE WARUNG MAKAN AQINA	Kel. Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
98	KuUBE TO'DO BULAN	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
99	Kube Abadi	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
100	KUBE SIANGKARAN	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
101	KUBE SANGMANE	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
102	KUBE HARAPAN	Lemutan Desa Bakadisura Kec. Tabang Kab. Mamasa
103	KUBE MELATI	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
104	KUBE MAWAR	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
105	KUBE SINAR HARAPAN	Dusun Tanduk kalua Desa Tanduk kalua Kec. Tanduk kalua Kab. Mamasa
106	KUBE SIKAMASE	Dusun Ladi Kel. Tabang Kec. Tabang Kab. Mamasa
107	KIOS KEMBAR I	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
108	KUBE ANDRA MOTOR	Ling. Marurinding Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
109	KUBE GORENGAN NURFAIZ	Jln. H. Andi Dai Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
110	KUBE MALA'BI	Dusun Peuweang Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju
111	KUBE SIKASAJANGAN	Ling. Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
112	KUBE KEDAI QHO-NECK	Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
113	KUBE NEISYAH	Ling. Simbunag Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
114	KUBE MENTARI	Ling. Rangas Tammalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
115	KUBE KIOS MINI	Jln. Kelapa Ling. Kasiwa tengah Kel. Binanga Kec. Mamuju
116	KUBE LOUNDRY ZAKINAH RAHMA	Dusun malasigo Desa Belang - Belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
117	KUBE CAHAYA MANDIRI	Ling. Kasiwa Timur Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
118	KUBE PEMUDA BERKARYA	Ling. Padang Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
119	KUBE MAJU BERSAMA	Ling. Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
120	KUBE MAWAR	Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Papalang Kab. Mamuju
121	KUBE SISENGA	Dusun Rantedango Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
122	KUBE SIAMASEI	Desa Poniang Utara Kec. Sendana Kab. Majene
123	KUBE KELLI	Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
124	KUBE KARYA BERSAMA	Desa Toabo Kec. Papalang kab. Mamuju
125	KUBE KARYA BARU	Dusun Turadu Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
126	KUBE MANDIRI	Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju
127	KUBE SUKAMAJU	Desa Suka Maju Kec. Karossa kab. Mamuju Tengah
128	KUBE REMBULAN	Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
129	KUBE ZAHRA	Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
130	KUBE SEJAHTERA	Ling. Kasambang Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
131	KUBE SINAR LABUANG	Dusun Labuang Rano Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
132	KUBE JAJANAN ANAK MUDA BERKAH	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
133	KUBE MEPAMARIO	Dusun Kalimbia Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju
134	KUBE KIOS ILFA	Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
135	KUBE ANNARA	Ling. Padang Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
136	KUBE BATU MATAPPI	Dusun Air Panas Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
137	KUBE TABA	Ling. Rangas Pa'besoang Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Mamuju
138	KUBE SIMBUANG	Jln. Gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
139	KUBE SINAR UJUNG	Ling. Somba selatan Kel, Mosso Kec. Sendana Kab. Majene
140	KUBE RATNA	Desa Lalatedzong Kec. Sendana Kab. Majene
141	KUBE SIAMASEI	Ling. Camba Utara Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene
142	KUBE LORONG CENDRAWASIH	Ling. Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Kab. Majene
143	KUBE ERIK KONVEKSI	Dusun Apoang Desa Bukit Semang Kec. Sendana Kab. Majene
144	KUBE BERKAH	Ling. Rimuku Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
145	KUBE SIRANNUANG	Dusun Toansang Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
146	KUBE AZIMAH	Ling. Rangas Pa'besoang Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Mamuju
147	KUBE KARYA BERSAMA	Dusun Batulotong Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene
148	KUBE FARAH	Dusun Labuan Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
149	KUBE CAHAYA LABUAN	Dusun Labuan Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
150	KUBE USAHA BERSAMA	Dusun Lombong Desa Lombong Kec. Malunda Kab. Majene

No	Calon Penerima	Alamat
151	KUBE MEWANGI	Dusun Beru - Beru Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
152	KUBE FADHIL	Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polman
153	KUBE HIJAU HITAM	MAMUJU
154	KUBE MALAQBI	Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
155	KUBE MASANNAANG PA'BALU	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Polman
156	KUBE KAREMA SEJAHTERA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
157	KUBE HARAPAN BARU	Dusun Batupapan Desa Duampunua Kec. Anreapai Kab. Polman
158	KUBE KUDA LAUT	Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju
159	KUBE MARASA	Desa Papalang Kec. Papalan Kab. Mamuju
160	KUBE MANDIRI	Desa Papalang Kec. Papalan Kab. Mamuju
161	KUBE BERDAYA	Desa Papalang Kec. Papalan Kab. Mamuju
162	KUBE SINAR MULYA	Desa Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju
163	KUBE TARIPANG GOLLA MAMEA	Ling. Galung Selatang Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
164	KUBE JAYA ABADI	Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju
165	KUBE MAMMESA	Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene
166	KUBE TERATAI	Tg. Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
167	KUBE MAWAR	Tg. Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
168	KUBE BINTANG TIMUR	Tg. Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
169	KUBE BAROKAH	Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju
170	KUBE USAHA JAYA	Sepa Batu Kab. Polman
171	KUBE KIOS TINI	Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
172	KUBE TERANG	Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju
173	KUBE MEKAR SARI	Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
174	KUBEAMANAH 03	Ling. Lombang - Lombang Kel. Sinyoynoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
175	KUBE AL BAROKAH	Ling. Lombang - Lombang Kel. Sinyoynoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju
176	KUBE SINAR KALUBIBING	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
177	KUBE FAUZAN ALIF	Desa Karampuang Kec. Mamuju Kab. Mamuju
178	KUBE SIWALLIPARRI	Desa Lemo Susu Kec. Limboro Kab. Polman
179	Kube ANEKA KUE SURI	Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
180	KUBE CAHAYA BUTTU KUNIK	Panappo Desa Bela Kec. Tapalang Kab. Mamuju
181	KUBE MESA PATTUJU	Dusun Ulutaan Desa Taan Kec. Tapalang , Mamuju
182	KUBE HADIRA	Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
183	KUBE MEKAR SARI	Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
184	KUBE CAFE ZHILA	Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
185	KUBE FUTUBU	Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
186	KUBE SELSA DRINK	Ling. Galung Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
187	KUBE GALUNG MALA'BI	Ling. Galung Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
188	KUBE KALLAN BARU	Kec. Bonehau Kab. Mamuju
189	KUBE BANGKIT BERSAMA	Kec. Bonehau Kab. Mamuju
190	KUBE CEISYA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
191	KUBE ANUGRAH	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
192	KUBE AL FATIH	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
193	KUBE SUKSES BERSAMA	Kec. Bonehau Kab. Mamuju
194	KUBE LINDO MARIRI	Desa Puttada Kab. Majene
195	KUBE CHERY	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
196	KUBE FAHIRA	Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
197	KUBE MANDIRI	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
198	KUBE CITRA	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
199	KUBE KIKI	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
200	KUBE SALSABILA	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
201	KUBE BERKAH	Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
202	KUBE MECCA	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
203	KUBE CAHAYA	Kec. Tapalang Kab. Mamuju
204	KUBE HARAPAN	Desa Kadaila Kec. Karossa Kab. Mateng
205	KUBE SUMBER HARAPAN	Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng
206	KUBE NUSA INDAH	Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng
207	KUBE MANDIRI SANJANGO	Desa Sanjango Kec. Karossa Kab. Mateng
208	KUBE SEMOGA BERKAH	Lembah Hopo Kec. Karossa Kab. Mateng
209	KUBE MADANI	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
210	KUBE MAWAR TAMALA	Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
211	KUBE RESKI	Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
212	KUBE IKRAM BANUA	Ling. Banua Kel. Malunda Kec. Majene Kab. Mamuju
213	KUBE LAS PESISIR	Ling. Deteng-Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Mamuju
214	KUBE MESA KADA	Pati'di Kec. Simboro Kab. Mamuju
215	KUBE BUNDA PALEO	Ling. Paleo Kel. Pangali Ali Kec. Banggae Kab. Majene
216	KUBE CAHAYA	JL. Baharuddin Lopa Kab. Mamuju
217	KUBE USAHA MAKMUR	Toabo Kec. Papalang
218	KUBE TAZA MAKAMPA	Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
219	KUBE AJANGINNA CREATIF	Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
220	KUBE WARUNG INARA	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
221	KUBE KANDA GROUP	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
222	KUBE PUTRA MAROGANG	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
223	KUBE WARUNG NASRAH	Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
224	KUBE AISYAH TAILOR	Dusun Dolangan Desa Saletto Kec. Simboro
225	KUBE TASIBUNG GROUP	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
226	KUBE AZKIYA AMINAH	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
227	KUBE LETTO BARU	Dusun Bekengkeng Pantai Desa Belang Kec. Kalukku
228	KUBE SALULOLI LPG	Dusun Bakengkeng Desa Belang Belang
229	KUBE NILA CABAY	Dusun Tabala Desa Belang Kec. Kalukku
230	KUBE BILQIS	Kec. Mamuju Kab. Mamuju
231	KUBE ALTAF	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
232	KUBE TAKANDEANG INDAH	Takendeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju
233	KUBE SETIA	Dusun Lemo 2 Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman

No	Calon Penerima	Alamat
234	KUBE ULU BATUMEKKAJA	Dusun Masigi Desa Salutumbang Kec. Ulumanda Majene
235	KUBE SALMAS	Dusun Masigi Desa Salutumbang Kec. Ulumanda Majene
236	KUBE KIOS CITRA	Kec. Tapalang Kab. Mamuju
237	KUBE ISMA	Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
238	KUBE MAMMESA	Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
239	KUBE ABADI	Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
240	KUBE ENJEL MEUBEL	Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju
241	KUBE CAHAYA	SEPA BATU, POLMAN
242	KUBE CAMPAKA	Dusun Naukaluku Desa Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene
243	KUBE SINAR KALUBIBING	Dusun Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
244	KUBE CATERING KEMBAR	Tg. Batu Timur Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene
245	KUBE BERKAH BERSAMA	Ling. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
246	KUBE LELUHUR PUTIH	Ling. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene
247	KUBE CAHAYA LIMBENG	desa takandeang kec. Tapalang kab. Mamuju
248	KUBE MEKAR ABADI	Dusun Tanisi Desa Mekkata Selatan Kec. Malunda Kab. Majen
249	KUBE RUKMANA	Dusun Tahaya - haya Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
250	KUBE KOPI	Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju
251	KUBE BENGKEL LAS MATAUHAI	Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
252	KUBE KEJORA	Dusun Le'be Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
253	KUBE SAFA MOTOR	Dusun Pasa'bu Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
254	KUBE SIMBUANG BATU	Dusu Simbuang Batu Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa
255	KUBE TAMPAK TENDAN	Dusun Pena Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa
256	KUBE PASSOSOHONGAN	Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju
257	KUBE WAWAN MOTOR	Ling. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene
258	KUBE BENGKEL RESKI	Ling. Galung Kel, Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
259	KUBE SIPATUO	Dusun Parabaya Desa Onang Kab. Majene
260	KUBE BERKAH BERSAMA	Dusun Parabaya Desa Onang Kab. Majene
261	KUBE HARAPAN	Lemutan Desa Bakadisura Kec. Tabang Kab. Mamasa
262	KUBE PEMUDA DESA	Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman
263	KUBE FARLI AJJABAR	Desa Puttada Kec. Onang Kab. Polman
264	KUBE SINAR TERANG	Bonepaas Kec. Mamuju Kab. Mamuju
265	KUBE LULUARE	Patekeang Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
266	KUBE BENSIN Q-TA	Dusun Lekopadis Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar
267	KUBE ANUGRAH	Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene
268	KUBE SIPATUO	Kel Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
269	KUBE AKASIA	Sumberjo Kec, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar
270	KUBE BUNGA	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
271	KUBE KAMBOJA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
272	KUBE TULIP	Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju

No	Calon Penerima	Alamat
273	KUBE EDELWEIS	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
274	KUBE LAVENDER	Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
275	KUBE LIDAH MERTUA	Kec. Simboro Kab. Mamuju
276	KUBE TAHAYA HAYA	Kel Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
277	KUBE SINAR MAMBI	Desa Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
278	KUBE SUARI	Desa Saludurian Kec. Mambi Kab. Mamasa
279	KUBE USAHA MANDIRI	Tampa Padang Balkam Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
280	KUBE TOKO MERDEKA	Tampa Padang Balkam Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
281	KUBE JAPA MANYAMANG	Tampa Padang Balkam Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
282	KUBE CATERING SEDERHANA	Tampa Padang Balkam Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
283	KUBE PUPUK BERKAH	Tampa Padang Balkam Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
284	KUBE HARMA BEAUTY	Kec. Kalukku Kab, Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
285	KUBE BADEN BERKAH	Kec. Papalang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
286	KUBE PEDASI BERSATU	Kec. Sampaga Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
287	KUBE USAHA TAMBAK 2 PUTRA	Kec. Papalang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
288	KUBE USAHA KUE JENI	Kec. Papalang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
289	KUBE AISYA STORE	Dusun Manalisse Desa Tadui Kec. Mamuju
290	KUBE SIOLA	Dusun Batang Barana Desa Sondoang Kec. Kalukku
291	KUBE ALMAUCI	Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
292	KUBE IZATUN NISA	Dusun Tamakula Desa Tadui Kec, Mamuju
293	KUBE IZZA FOOD	Dusun Salutalawar Desa Tadui Kec. Mamuju
294	KUBE SIPAKAINGA	Dusun Garuda Desa Papalang Kec. Kalukku
295	KUBE AMBO DRINK	Link Ranga- Ranga Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
296	KUBE LUNDRA MAKMUR	Link Ranga- Ranga Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
297	KUBE USAHA AKBAR	Link Sampoang Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku
298	KUBE MAMUJU ETNIK MANAKARRA	Jl. Andi Depu Lorong Simponi Kec. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
299	KUBE MALAQBI BERSAMA	Kel. Karema Kec. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
300	KUBE DILA	Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
301	KUBE BATU MIANA	Lebani Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
302	KUBE FITRI AMBO	Lebani Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
303	KUBE AL IKHSAN	Lebani Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
304	KUBE AL IHKLAS	Lebani Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
305	KUBE BATU SIGUTTU	Pangasaan Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
306	KUBE TAESO	Labuang Rano Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
307	KUBE BURA MANGGA	Labuang Rano Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
308	KUBE ASNI	Papalang Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat
309	KUBE SABAR	Desa Dungkai Kec. Tapalang Barat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
310	KUBE AL KAUSAR	Desa Dungkai Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
311	KUBE SETIA	Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
312	KUBE SUKSES	Desa Pasa'bu Kec. Tapalang Barat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
313	KUBE BERKAH	Desa Orobatu Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
314	KUBE BERSATU	Desa Takandeang Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
315	KUBE SELAMANYA	Desa Tapalang Kec. Tapalang , Provinsi Sulawesi Barat
316	KUBE HIKMA	Kel Galung Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat
317	KUBE NAZI'AT	Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
318	KUBE AL IHKLAS	Kasambang Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat
319	KUBE AL IKHSAN	Kec. Tapalang Barat, Provinsi Sulawesi Barat
320	KUBE AL FATIH	Simboro Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
321	KUBE ANNISA	Simboro Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
322	KUBE MANDIRI	Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
323	KUBE ANUGERAH	Rangas Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
324	KUBE FALAQ	Sumare Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
325	KUBE SEJAHTRA	Sumare Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
326	KUBE AL MAIDA	Tapandulu, Provinsi Sulawesi Barat
327	KUBE ASY SYAHR	Botteng, Provinsi Sulawesi Barat
328	KUBE SUKAMAJU	Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah
329	KUBE AN NUR	Salletto, Provinsi Sulawesi Barat
330	KUBE AKBAR	Pati'di, Provinsi Sulawesi Barat
331	KUBE MALEO	Kelurahan Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
332	KUBE SAFIRAH NET	Desa Tampalang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju
333	KUBE SATU ALANG	Desa Kadaila Kec. Karossa Provinsi Sulawesi Barat
334	KUBE MAJU JAYA	Desa Karossa Kec. Karossa Provinsi Sulawesi Barat
335	KUBE ZAHRA	Desa Sanjango Kec. Karossa Provinsi Sulawesi Barat
336	KUBE MAJU BERSAMA	Desa Uhaimate Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
337	KUBE CAHAYA TAHUPPO	Desa Keang Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
338	KUBE KIAS ANDA	Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Provinsi Sulawesi Barat
339	KUBE KIOS BERKAH	Dusun Bakengkeng Pantai Desa Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat
340	KUBE KIOS BERKAH ADZAN	Dusun Manaimang Desa Kalukku Barat Provinsi Sulawesi Barat
341	KUBE KIOS MASAGENA	Dusun Manaimang Desa Kalukku Barat Provinsi Sulawesi Barat
342	KUBE KIOS HIKMA	Dusun Bakengkeng Desa Belang-Belang Provinsi Sulawesi Barat
343	KUBE BERKAH AL-AQSHA	Dusun Sappala Desa Keang Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
344	KUBE SAPPALA MANDIRI	Dusun Sappala Desa Keang Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
345	KUBE ANGKENE	Desa Bambu Kecamatan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
346	KUBE NESYA	Lingkungan Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Provinsi Sulawesi Barat
347	KUBE MUTIARA BESI	Lingkungan Talibu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju
348	KUBE BENIH JAGUNG	Lingkungan Talibu Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
349	KUBE KIOS HENDRA	Dusun Kapas Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
350	KUBE KIOS AFSAL	Dusun Tarawe Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
351	KUBE KIOS HALMINA	Dusun Tarawe Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
352	KUBE KIOS ASHAR	Ling. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
353	KUBE SIKAMASE	Ling. Tasiu Timur Kel. Kalukku Provinsi Sulawesi Barat
354	KUBE MESA KADA	Ling. Tasiu Timur Kel. Kalukku Kab. Mamuju
355	KUBE SIASAYANGNGI	Dusun Kapas Desa Bonda Kec. Papalang Provinsi Sulawesi Barat
356	KUBE AR-RAHIM	Ling. Danga Kelurahan Binanga Kec. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
357	KUBE TUNAS MUDA	Desa Botteng Utara Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
358	KUBE TAPAMBISA	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
359	KUBE SIAMASEI	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
360	KUBE BENGKEL MOTOR ABANG	Desa Sukadamai, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
361	KUBE BENGKEL MOTOR ADIN	Desa Sukadamai, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
362	KUBE BERKAH	Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
363	KUBE BENGKEL RAFAEL	Desa Hinua, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
364	KUBE TUNAS HARAPAN	Desa Salletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
365	KUBE FAMILI	Desa Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
366	KUBE PANJANG UMUR	Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
367	KUBE SIPATUO	Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
368	KUBE MARENDENG	Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
369	KUBE MESA INAHA	Desa Keang Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat
370	KUBE SIMBAR ALLO	Dusun Taparia Desa Tapalang Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat
371	KUBE HATI NURANI	Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Induk Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat
372	KUBE PARUNGDN	Kel. Rangas Kec. Simboro, Provinsi Sulawesi Barat
373	KUBE BERJAYA	Kasambang Utara Kel. Kasambang Kec. Tapalang, Provinsi Sulawesi Barat
374	KUBE REZKY BERKARYA	Lingk. Deteng - Deteng Kel. Totoli Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
375	KUBE SIWALIPARRI	Dusun Bututaku Udzung Desa Onang Kec. Tubo, Provinsi Sulawesi Barat
376	KUBE MAWAR MANDIRI	Desa Balombang, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat
377	KUBE SIPATUO	Kel. Sirindu Kec. Pamboang, Provinsi Sulawesi Barat
378	KUBE TOMASANNANG	Desa Balombang, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat
379	KUBE MAWAR	Dusun Balombang Selatan, Desa Balombang, Kec. Pamboang, Provinsi Sulawesi Barat
380	KUBE TOMASANNANG	Dusun Balombang Utara, Desa Balombang, Kec. Pamboang, Provinsi Sulawesi Barat
381	KUBE MAWAR	Dusun Lingk. Sasende Dhua desa/kel. Kel. Malunda Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
382	KUBE SIAMASEI	Desa/kel. Lamungan Batu Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
383	KUBE SEJAHTERA	Dusun Bonde-bonde Desa/kel. Bonde-bonde Kec. Tubo, Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
384	KUBE TIGA PUTRI	Dusun Sumakuyu Desa/kel. Onang Kec. Tubo Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
385	KUBE USAHA SEJAHTERA	Dusun Lingk. Pebusu Desa/kel. Lamungan Batu Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
386	KUBE USAHA BERSAMA	Desa Bonde bonde, Kecamatan Tubo, Kab. Majene, Provinsi Sulawesi Barat
387	KUBE TABA	Kel. Rangas Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
388	KUBE AZIMA	Kel. Rangas Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
389	KUBE MENTARI	Kel. Rangas Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
390	KUBE SIAMASEI	Kel. Baru Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
391	KUBE LORONG CENDRAWASIH	Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur, Provinsi Sulawesi Barat
392	KUBE RATNA	Desa Lalatedzong Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
393	KUBE SINAR UJUNG	Kel Mosso Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
394	KUBE SIPATUO	Kel. Baru Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
395	KUBE ALMAZIRA	Desa Bukit Samang Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
396	KUBE ALZAHRA	Desa Bukit Samang Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
397	KUBE TUNAS MUDA	Desa Lalatedzong Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
398	KUBE BIRIMBONDE	Desa Lalatedzong Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
399	KUBE ANI 37	Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
400	KUBE TASSIALUPPEI	Desa Tallu Banua Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
401	KUBE INSAN CITA	Kel. Mosso Kec. Sendana , Provinsi Sulawesi Barat
402	KUBE SEDERHANA MOTOR	Desa Leppangan Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
403	KUBE SEJAHTERA	Desa Leppangan Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
404	KUBE YASAF BAROKAH	Desa Leppangan Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
405	KUBE REMAJA MOTOR	Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
406	KUBE ADIVA	Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
407	KUBE PARAITA	Kel. Mosso Kec. Sendana , Provinsi Sulawesi Barat
408	KUBE ADIVA	Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
409	KUBE AZZAHRAH	Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
410	KUBE FATMAWATI	Kel. Baru Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
411	KUBE MUTIARA LAUT	Kel. Mosso Kec. Sendana , Provinsi Sulawesi Barat
412	KUBE SINAR LAUT	Kel. Mosso Kec. Sendana , Provinsi Sulawesi Barat
413	KUBE GAZOBO MANIA	Kel Banggae Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
414	KUBE SALU KATUON	Galung Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
415	KUBE MAHKOTA NAZWA	Desa Malunda Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
416	KUBE TASMANIA	Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
417	KUBE MISSULEKKA	Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
418	KUBE ASMATURUANG	Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
419	KUBE TIMBE	Kel. Mosso Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
420	KUBE BANNIS PARUA	Kel. Mosso Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
421	KUBE SALAMBAR KAIN	Kel.Banggae Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
422	KUBE PUTRA JAHIT	Kel.Banggae Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
423	KUBE KUBE MARENDENG	Kel. Pangali -Ali Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
424	KUBE MESA KADA	Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
425	KUBE SUDIRMAN KOMPUTER	Kec. Malunda, Provinsi Sulawesi Barat
426	KUBE SIOLA - OLA	Kec. Sendana, Provinsi Sulawesi Barat
427	KUBE SUMANTRI MANIA	Kel. Baru Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
428	KUBE SURYA TASMANIA	Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
429	KUBE TAMMANIA	Kel. Baru Kec. Banggae, Provinsi Sulawesi Barat
430	KUBE DOA IBU	Lingkungan tulu Kelurahan labuang kecamatan banggae timur, Provinsi Sulawesi Barat
431	KUBE SAMURAI	Dusun Pangaleroang Desa Tallambalao Kec. Banggae Timur, Provinsi Sulawesi Barat
432	KUBE SUMBER KARYA	Dusun Pandeng-pandeng Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Selatan, Provinsi Sulawesi Barat
433	KUBE LENA	Kel. Petoosang Kec. Alu Provinsi Sulawesi Barat
434	KUBE SEPPONG	Kel. Petoosang Kec. Alu Provinsi Sulawesi Barat
435	KUBE TENUN LEMBANG-LEMBANG	Desa Lembang-lembang, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
436	KUBE LENA LUYO	Desa Tasondeng Kec. Luyo Provinsi Sulawesi Barat
437	KUBE PALLIS RAYA	Desa Pallis, Provinsi Sulawesi Barat
438	KUBE LIMBONG JAYA	Desa Pao-Pao Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
439	KUBE LUTANG RESKI	Desa Alu Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
440	KUBE GATTUNGAN HARAPAN	Desa Gattungan Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
441	KUBE PALLIS TERNAK	Desa Pallis, Provinsi Sulawesi Barat
442	KUBE PETOOSANG TARRING	Kel. Petoosang Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
443	KUBE KIKI PERMATA	Desa Baru Kec. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
444	KUBE KIOS MARANNU	Dusun Sepa, Desa Palece, Provinsi Sulawesi Barat
445	KUBE BUNGA RANNU	Dusun Lapingan, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
446	KUBE TERNAK SUBUR	Dusun Lapingan, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
447	KUBE TERNAK MARASA	Dusun Lapingan, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
448	KUBE TOMALOLO	Dusun Lapingan, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
449	KUBE MESA ATE	Dusun Lapingan, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
450	KUBE TERNAK SIPAKKARIO	Dusun Sanja, Desa Sambaliwali Ke. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
451	KUBE AFHDAL	Desa Batulaya Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
452	KUBE BUKIT BERKAH	Desa Batulaya Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
453	KUBE KEDAI ALUNAN	Desa Banua Baru, Provinsi Sulawesi Barat
454	KUBE AL ITTIHAD	Dusun Gusung Desa Panyampa Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
455	KUBE USAHA FITRA MANDIRI	Dusun Gusung Desa Panyampa Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
456	KUBE SIASYANNI	Desa Saragian Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
457	KUBE SIPATUO	Desa Saragian Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
458	KUBE SURE SALAKA	Desa Saragian Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
459	KUBE MACOA RASA	Desa Saragian Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
460	KUBE SA'BE MANDAR	Desa Saragian Kec. Alu, Provinsi Sulawesi Barat
461	KUBE SARRI LINO	Bala Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
462	KUBE MUTIARA RATTE	Pambusuang Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
463	KUBE SITULUNG	Limboro , Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
464	KUBE TERATAI	Mombi Alu, Provinsi Sulawesi Barat
465	KUBE KERUPUK KURMA	Kurma Mapilli, Provinsi Sulawesi Barat
466	KUBE MEKAR	Galung Tuluk Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
467	KUBE SAMUSENGA'NA	Karama Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
468	KUBE BERKAH IBU	Lapeo Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
469	KUBE BERKAH MANDIRI	Kenje Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
470	KUBE SINAR KENJE	Kenje Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
471	KUBE SINAR PARABAYA	Lapeo Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
472	KUBE SINAR ONGKO	Ongko Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
473	KUBE SINAR HARAPAN	Sabangsubik Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
474	KUBE SIPATUO SUBIK	Sabang subik Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
475	KUBE MAJU JAYA	Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
476	KUBE KALAKI	Desa Bonde Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
477	KUBE BERSAMA	Desa Lagi-Lagi Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
478	KUBE REZKI CAKALANG	Pambusuang Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
479	KUBE COKELAT MARIRI	Pambusuang Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
480	KUBE CAKALANG	Sabang Subik Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
481	KUBE CAHAYA RUDAL	Pambusuang Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
482	KUBECAHAYA RUDAL	Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
483	KUBE BISMILLAH	Desa Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
484	KUBE BUTTU CIPING	Desa Batulaya, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
485	KUBE AMANAH 1	Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
486	KUBE AMANAH 2	Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
487	KUBE MAPIA	Desa Kalumammang, kec. Allu, Provinsi Sulawesi Barat
488	KUBE SAMUSENGANA	Desa Kalumammang, Kecamatan Allu, Provinsi Sulawesi Barat
489	KUBE SAMURAPPENA	Desa Kalumammang, kecamatan Allu, Provinsi Sulawesi Barat
490	KUBE ASSUKRAN	Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
491	KUBE BERSINAR	Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
492	KUBE MARANNU	Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
493	KUBE SIMBAR	Desa Napo, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
494	KUBE TIWA'BAR	Desa Napo, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
495	KUBE BERKAH	Desa Napo, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
496	KUBE SISENGA	Desa Napo, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
497	KUBE MAMMESA	Desa Karama Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
498	KUBE PAMMASE	Desa Lembang-lembang, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
499	KUBE MARIO	Desa Palece, Kec. Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
500	KUBE METAMORFOSIS	Dusun Pasa, Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
501	KUBE PARASALAMA	Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
502	KUBE MESA KANNEQ	Desa Panyampa, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
503	KUBE SIRANNUANG	Desa Panyampa, Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
504	KUBE BERKAH FAJAR	Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
505	KUBE SIPAKAINGA	Dusun Para, Desa sepa Batu, Kec. Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
506	KUBE BURA' LEMO	Desa Kenje, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
507	KUBE SISENGA	Dusun Paahang Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
508	KUBE SIASAYANGNGI	Desa Padang Timur, Kec. Campalgian, Provinsi Sulawesi Barat
509	KUBE SIBALI PARRI	Dusun Pahang, Desa Padang Timur, Provinsi Sulawesi Barat
510	KUBE BAROKA	Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
511	KUBE ALHIDAYA	Dusun Beru-beru, Desa Ongko, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
512	KUBE DAENG SILA	Desa lembang-lembang, Kec. limboro, Provinsi Sulawesi Barat
513	KUBE KELUARGA MANDIRI	Desa Peburru, Kec. Tubbi Taramanu, Provinsi Sulawesi Barat
514	KUBE SIPAKARAYA SANREKO	Dusun Sanreko, Desa Tenggelang, Provinsi Sulawesi Barat
515	KUBE SIRANNUANG	Desa Lamariang Kecamatan Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
516	KUBE BERKAH FAJAR	Desa Lamasariang, Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
517	KUBE ALLEWATTA	Kelurahan Balanipa Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
518	KUBE MALAYUR	Desa Napo, Kec. limboro, Provinsi Sulawesi Barat
519	KUBE MENUNGGU	Desa Napo, Kecamatan Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
520	KUBE USAHA BARU	Desa Napo, Kec. limboro, Provinsi Sulawesi Barat
521	KUBE LARAS BERKAH	Dusun 1 Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
522	KUBE AL HAQ	Dusun Bombong, Sema Sabang Subik, Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
523	KUBE ASI (ASAL SIBUK)	Desa Sabang Subik, Provinsi Sulawesi Barat
524	KUBE PEGANG BULAWAN	Dusun 2 Subik, Sabang Subik, Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
525	KUBE ARAS	Desa Sabang Subik, Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
526	KUBE MANURUNG	Desa Laliko, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
527	KUBE TUNAS HARAPAN	Desa Lembang-lembang, Kec. limboro, Provinsi Sulawesi Barat
528	KUBE MAWAR	Desa Palece Kec Limboro, Provinsi Sulawesi Barat
529	KUBE SIPATOANGAN	kelurahan batupanga' kec luyo polman, Provinsi Sulawesi Barat
530	KUBE MERIO-RIO	Desa Padang, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
531	KUBE PAMMASE	Kelurahan Batupanga, kec luyo polman, Provinsi Sulawesi Barat
532	KUBE SIDOREJO	Desa/Kel. Sidorejo Kec. Wonomulyo, Provinsi Sulawesi Barat
533	KUBE WANITA TANI	Desa/Kel. Kuajang Kec. Binuang, Provinsi Sulawesi Barat
534	KUBE WANITA TANI	Desa/Kel. Tonro Lima Kec. Matakali, Provinsi Sulawesi Barat
535	KUBE BERSINAR	Desa/Kel. Ihing Kec. Bulu, Provinsi Sulawesi Barat
536	KUBE WANITA TANI	Desa/Kel. Galesong Kec. Wonomulyo, Provinsi Sulawesi Barat
537	KUBE WANITA MANDIRI	Desa Dakka Kec. Tapango, Provinsi Sulawesi Barat

No	Calon Penerima	Alamat
538	KUBE KALONG BERSATU	Desa Bonato Rejo Kec. Tapango, Provinsi Sulawesi Barat
539	KUBE MAKMUR	Desa Tapango Barat Kec. Tapango, Provinsi Sulawesi Barat
540	KUBE SEJAHTERA	Desa Tapango Kec. Tapango, Provinsi Sulawesi Barat
541	KUBE DAUN PUSU	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
542	KUBE BERU BERU	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
543	KUBE MARANNU	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
544	KUBE SINAR GALUNG TULUK	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
545	KUBE MARANNU MUTIARA	Desa Sabang Subik Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
546	KUBE MILLENIAL NET	Desa Pambusuang Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
547	KUBE BERKAH SUBIK	Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Provinsi Sulawesi Barat
548	KUBE SIPATUO	Kelurahan Taramanu . Kec. Tutar, Provinsi Sulawesi Barat
549	KUBE GUNUNG MANAMORI	Desa Poda Poda Kec. Tutar, Provinsi Sulawesi Barat
550	KUBE BOCCO TALLU	Kelurahan Taramanu Kec. Tutar, Provinsi Sulawesi Barat
551	KUBE MPOWER	Kelurahan Tinambung, Provinsi Sulawesi Barat
552	KUBE BERKAH	Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
553	KUBE AL - MUNAWWIR	Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
554	KUBE TANDIPANNA	Desa Tangnga - Tangnga, Kec. Tinambung. Polman, Provinsi Sulawesi Barat
555	KUBE SISSURE	Desa Laliko, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
556	KUBE PARAITA	Desa Laliko, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
557	KUBE USAHA MANDIRI	Desa Kenje, Kec. Campalagian, Provinsi Sulawesi Barat
558	KUBE SYAHNUN	Desa Tenggelang, Kec. Luyo, Provinsi Sulawesi Barat
559	KUBE MAMMESA	Desa Tenggelang, Kec. Luyo, Polman, Provinsi Sulawesi Barat
560	KUBE MEOLAN	Desa Mehalaan Kec. Mehalaan, Provinsi Sulawesi Barat
561	KUBE LESTARI	Desa Mehalaan, Kec. Mehalaan, Provinsi Sulawesi Barat
562	KUBE RANTE KATOAN	Desa Osango Kec. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
563	KUBE SIKAMASE	Desa Pokkang, Kec. Kalukku, Provinsi Sulawesi Barat
564	KUBE HARAPAN BARU	Dusun Yudhamulia, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
565	KUBE SAHABAT BARU	Dusun Yudhamulia, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
566	KUBE GANDANG DEWATA	Dusun Yudhamulia, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
567	KUBE OLLI' TONDOK	Dusun Mesakada, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
568	KUBE SIKAMASE	Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
569	NURMALASARI	Jl. MUH. HUSNI THAMRIN, MAMUJU
570	SARMAN	PURI MUTIARA II KORONGANA, KEL. SIMBORO, MAMUJU
571	BAHARIAH	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
572	TENDRIANI	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
573	RAHMAWATI	PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
574	RAMLIAH	PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE

No	Calon Penerima	Alamat
575	HASRIANI	PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
576	NURUSIA	PASSARANGAN KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
577	SUHAENI	PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
578	HAJRAH	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
579	INDAR DEWI	LINGK. PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
580	MUH. SAIL	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
581	BUNGA ISAH	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
582	ANITA	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
583	NURHAYATI	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
584	PASA	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
585	NURJANNAH	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
586	IRNAWATI	LINGK. PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
587	SADRIANI	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
588	AHMAD YUSUF	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
589	RAENONG	DETENG DETENG
590	AMO	DETENG DETENG
591	MARIANI	RANGAS TIMUR
592	SAGITA	RANGAS TIMUR KEL. RANGAS
593	SAPIARA	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
594	HASAN	LINGK. DETENG-DETENG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
595	RIDAWATI	LINGK. PASSARANG KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE
596	REGITA CAHYANI	MAMUJU
597	DEVI SARI	MAMUJU
598	KHASMA	MAMUJU
599	YULDALIFA	PASANGKAYU
600	YULIANA	PASANGKAYU
601	YANTI	PASANGKAYU
602	JUMRA	MATENG
603	YUNIASARI AM	MAMUJU
604	NUR INDAH SARI	MAMUJU
605	PERAWATI	MAMUJU
606	INTAN	MAMUJU
607	IREN	MAMUJU
608	NIRWANA	MAMUJU
609	ASRAWATI	MAMUJU
610	CICI YANTI	MAMUJU
611	SRI NURJANNAH	MAMUJU
612	LOLA NUR SARLITA	KEL. LABUANG, KEC. BANGGAE TIMUR, MAJENE
613	WIWI WIDYASWARA	KEL. LABUANG, KEC. BANGGAE TIMUR, MAJENE
614	PADILA	MAJENE

No	Calon Penerima	Alamat
615	NUR HAERANI JN	MAMUJU
616	SYAHURIANI	MAMUJU
617	YASMIN	PASANGKAYU
618	VIVI ERVIANTY	MAMUJU
619	HUSNI YATI M. SALEH	KEL. LABUANG UTARA, KEC. BANGGAE TIMUR, MAJENE
620	YULIATI	KEL. LABUANG, KEC. BANGGAE TIMUR, MAJENE
621	IDAWATI	Desa Karossa Kec. Karossa Mateng
622	SURYANIDA	Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mateng
623	HASNA	Dusun Durikumba Desa Karossa Mateng
624	ARISA	Dusun Durikumba Desa Karossa Mateng
625	ANDI FEBRIANI	Dusun Durikumba Desa Karossa Mateng
626	MARLYN	BENGGALU KEC. KAROSSA MATENG
627	ST. RAMLAH	LINGKUNGAN SIRINDU KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
628	ST. JAENA	LINGKUNGAN SIRINDU KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
629	KURNIA	LINGKUNGAN SIRINDU KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
630	MUH. ASRAR	LINGKUNGAN UDZUNG KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
631	HERMAN	LINGKUNGAN SALEWANG KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
632	RATNAWATI	LINGKUNGAN SALEWANG KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
633	RAHMUNA	LINGKUNGAN SIRINDU KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
634	MASRUDDIN	LINGKUNGAN UDZUNG KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
635	MASDARIAH	LINGKUNGAN UDZUNG KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
636	SANTI	LINGKUNGAN AMBAWE KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
637	BASRI	LINGKUNGAN AMBAWE KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
638	ISMAIL	LINGKUNGAN AMBAWE KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
639	INDASARI	LINGKUNGAN PARAPPE KELURAHAN SIRINDU KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
640	ROSNAENI	LINGKUNGANDETENG-DETENG KEC. BANGGAE KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
641	SIAMI	LINGKUNGAN DETENG-DETENG KEC. BANGGAE KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
642	ASRIANI	LINGKUNGAN DETENG-DETENG KEC. BANGGAE KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
643	ASRIANI	LINGKUNGAN PASSARANG KEC. BANGGAE KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
644	DIAN NOVITASARI	LINGKUNGAN LABUANG UTARA KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
645	NASARUDDIN RAHMAN	DUSUN SAPPOLONGANG KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE PROV. SULAWESI BARAT
646	LISA INDRAWANA	JL.AMBO TJATJA,Kel Karema Kec Mamuju Kab. Mamuju
647	HIJRANA MAJID	JL.GATOT SUBROTO KEL.SIMBORO KEC SIMBORO KAB MAMUJU
648	SITTI JOHRAH NAWIR	DUSUN BATU PAPAN DESA BAMBU KEC MAMUJUKAB MAMUJU
649	Sitti Suhra	Tinambung Kab. Polman
650	Hasbi	Kec. Alu Kab. Polman
651	Sikin S	Desa Tangga tangga Kab. Polman
652	Patima	Pangali ali Kab Majene
653	AZWAR S	Jl. RE Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro
654	ABD. WAHID	Dsn Papalang, Kec. Papalang, Kel. Papalang Kab. Mamuju
655	NITA NOVITA THAMRIN	Jl. Mangga, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
656	AYYUB ALI	Jl. Diponegoro, Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju
657	Ali SULKADRI	Jl. Kasuari Ling. Tahaya haya, Kel. Karema. Kec. Mamuju
658	MUH. TAHIR	Jl. Kaka Tua, Ds, Padangpanga, Kel. Karema. Kec. Mamuju
659	NURJANNA	Ds. Pasiang. Kec. Matakali, Kab. Polman
660	TAHIR	Padang Baka, Kel. Rimuku Kab. Mamuju
661	DARMAN D	Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kec. Mamuju Kab. Mamuju
662	UDIN ABU BAKAR	Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
663	RABAISAH	Jl. Langsung Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
664	KAMRIAWATI K	Dusun Polohu Desa Babana Kec. Budong Budong Kab. Mateng
665	ANDY CIPUTRA	Kampung Baru Desa Bambulo Utara Kec.Pamboang Kab. Majene
666	HAMRIANA	Dusun Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju
667	FIRMAN. D	JL. RANGGONG
668	NASRUN	JL. WR MONGINSIDI NO 32 A
669	ERWIN AMRI	JL. EMMY SAELAN
670	ABDUL AZIS	JL. BAU MASSEPE
671	MUH ZAKI ALIF AKBAR	JL. JENDRAL SUDIRMAN
672	ARIF WARIS	TAKANDEANG KEC. TAPALANG KAB. MAMUJU
673	MUH IHLAS	TAKANDEANG KEC. TAPALANG KAB. MAMUJU
674	ANSAR TAMRING	JL PENGAYOMAN
675	MUH HUDURI	JL. EMMY SAELAN NO 162
676	WAHYU	DUSUN TAPANDULLU KEC. SIMBORO KAB. MAMUJU
677	HERLIAN SAPUTRA	KARAEYANG DESA KARAMPUANG KEC. MAMUJU KAB. MAMUJU
678	RAMLI	TAMPA PADANG UTARA KEC. KALUKKU KAB. MAMUJU
679	HARMIN	DUSUN BOTTENG KEC. SIMBORO KAB. MAMUJU
680	SARMAN	BAJAK DESA KARAMPUANG
681	HERMAWAN	TAKANDEANG KEC. TAPALANG KAB. MAMUJU

No	Calon Penerima	Alamat
682	SUHERMAN	JL RANGGONG NO 12
683	SYAMSUDDIN	JL PATTIMURA
684	HENDRAYANI	JL. IR H JUANDA NO 31
685	AMRAN. R	JL. IR H JUANDA
686	ADITYA WARMAN HERISAL	JL. IR H JUANDA
687	ERLANGGA PRASETYA ISMANTO	Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
688	ROSBAYA	Dusun Salubungo Desa Mekatta Kec. Malunda Kab. Mamuju
689	NURHABIBAH	Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju
690	ROSNIAH	Dusun Bawappu Desa Mekatta Kec. Malunda Kab. Mamuju
691	SUMARNI	Tandung Kec. Tinambung Kab. Polman
692	SUPIATI	Dayanginna Tengah Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju
693	MULUDDIN	Kasambang Utara Kec. Tapalang Kab. Mamuju
694	HALMA	Lingk. Sese Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju
695	RHASDIANA	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
696	Sartika	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
697	ASNAH	Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
698	SYAMSUL JUMADI	Desa Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa
699	BESSE RISNA DAMAYANTI	Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
700	HUSRIANI	Rangas Kec. Simboro Provinsi Sulawesi Barat
701	NURHAYATI	Ganno Desa Salletto Kec. Simboro Provinsi Sulawesi Barat
702	MARLINA	DUSUN MORA BARAT
703	FITRIANI	DUSUN MORA BARAT
704	MAS AD	DUSUN MORA BARAT
705	FINAWATI	DUSUN MORA BARAT
706	MUSIYAH	LARA III
707	HAMMALANG	KAROSSA
708	KALESSONG	KAROSSA
709	ROSMIDA	DUSUN MORA TENGAH
710	PETTONG M	KAROSSA
711	BODI MASAM	KAROSSA
712	RIA	KAYU CALLA
713	NUR SIA	LOTU
714	SERLI	DUSUN MORA BARAT
715	NURLAELA	DUSUN MORA BARAT
716	NURLINA	KADUNDUNG
717	NURHAWA	SAMPOANG
718	RAMLAN	SALUBARANA
719	NURHAYATI	SAMPOANG
720	A SARIBULAN	BULU BARU
721	MURNI	KADUNDUNG
722	SAHALIA	SAMPOANG
723	HADIJAH	BULU BARU

No	Calon Penerima	Alamat
724	JULA	SAMPOANG
725	SALMAWATI	SALUBARANA
726	TONGGU	SAMPOANG
727	LISNA	BULU BARU
728	MAULIA	KADUNDUNG
729	KALLI	BULU BARU
730	MINA	BULU BARU
731	NAJMIA	KADUNDUNG
732	TANOKKA	BULU BARU
733	DARA MANTASIA	KADUNDUNG
734	RAHMAH	BULU BARU
735	RATNA	BULU BARU
736	BANIA	BULU BARU
737	NAJMA	SAMPOANG
738	MURSAIDA	SAMPOANG
739	MURSAIDA	SAMPOANG
740	JURIAH FR	DUSUN SUMBER REJEKI POROS
741	RUT	DUSUN SUMBER MAKMUR JALAN DESA
742	ADOLVINA TIAKKA	DUSUN SUMBER MAKMUR
743	MADINI	DUSUN SUMBER REJEKI LORONG 4
744	MARTINA	DUSUN SUMBER MAKMUR LORONG 7 KIRI
745	SRI KUWATI	DUSUN SUMBER REJEKI LORONG 4
746	FANI RENS SANDOLA	DUSUN SUMBER MAKMUR LORONG 7 KANAN
747	JUMAIDAH	DUSUN SUMBER TANI LORONG 1 POROS
748	SUMINA	JLN KADAILA GUNUNG
749	SAODAH	DUSUN SUMBER REJEKI LORONG 4
750	AMINAH	DUSUN KADAILA
751	SITTI NAIMAH	DUSUN SUMBER MAKMUR POROS
752	YOHANA	DUSUN SUMBER MAKMUR LORONG 5 KANAN
753	AYU HIJRANA	DUSUN SUKADAMAI
754	INDO ATISA	SIPURENNUE
755	INDO EMMANG	DUSUN SIPURENNUE
756	MARLINA BORONG	DUSUN UKTISARI
757	KARTINA ANGGERIANI	DUSUN SUKADAMAI
758	SRI ASTUTI	DUSUN SUKADAMAI
759	IRWANA	HARAPAN MAJU
760	KADEK MASNING	LEMBAH
761	JAURA	HARAPAN MAJU
762	NABO'	HARAPAN MAJU
763	ELISDAYANTI	HARAPAN MAJU
764	MURNIATI	HARAPAN MAJU
765	ENI	DUSUN BULUPARANGGA
766	JASMIAH	DUSUN BERINGIN
767	SANAWIA	DUSUN BERINGIN

No	Calon Penerima	Alamat
768	E'EN CAHYANI	DUSUN BERINGIN
769	JUMRAWATI	DUSUN BERINGIN
770	INDO TANG	LARA
771	SULEHA	LARA
772	JUNAISA	DUSUN BULUPARANGGA
773	JAMALIA	DUSUN BULUPARANGGA
774	RAYANG	DUSUN BULUPARANGGA
775	HERNI	LARA
776	STMARYAM	DUSUN BERINGIN
777	RISNAWATI	KAMPUNG BARU
778	HASNA	DUSUN BUKU DESA SALUBIRO
779	MARDIANA AT	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
780	NUR LAELA	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
781	JOHANIS	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
782	ASLIA A	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
783	HASNA	DUSUN BUKU DESA SALUBIRO
784	WINDA	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
785	MARTA	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
786	HASMIA S	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
787	SITTI ISA	DUSUN BENDUNGAN, DESA SALUBIRO
788	JUMRIANI	DESA SANJANGO
789	NURSI AH	SANJANGO
790	KURNIA	DESA SANJANGO
791	HADIRA	DESA SANJANGO
792	SITTI	DESA SANJANGO
793	WAHIDA	DESA SANJANGO
794	SALMA WATI	SANGREGE TIMUR
795	INDO EMMANG	DUSUN SIPURENNUE
796	MARLINA BORONG	DUSUN MUKTISARI
797	KARTINA ANGGERIANI	DUSUN SUKADAMAI
798	SRI ASTUTI	DUSUN SUKADAMAI
799	IRWANA	HARAPAN MAJU
800	KADEK MASNING	LEMBAH
801	JAURA	HARAPAN MAJU
802	NABO'	HARAPAN MAJU
803	ELISDAYANTI	HARAPAN MAJU
804	MURNIATI	HARAPAN MAJU
805	ENI	DUSUN BULUPARANGGA
806	JASMIAH	DUSUN BERINGIN
807	SANAWIA	DUSUN BERINGIN
808	E'EN CAHYANI	DUSUN BERINGIN
809	JUMRAWATI	DUSUN BERINGIN
810	INDO TANG	LARA
811	SULEHA	LARA

No	Calon Penerima	Alamat
812	JUNAISA	DUSUN BULUPARANGGA
813	JAMALIA	DUSUN BULUPARANGGA
814	RAYANG	DUSUN BULUPARANGGA
815	HERNI	LARA
816	STMARYAM	DUSUN BERINGIN
817	RISNAWATI	KAMPUNG BARU
818	DARLIA	KAMBUNONG
819	ERNA	KAMBUNONG
820	NURJAN	KAMBUNONG
821	MARLIAN	KAMBUNONG
822	JUHARTI	DUSUN ANTALILI
823	UNDENG	PULO KAMBUNONG
824	YOHAR	SALUBIA
825	NARDA	SALUPANGKANG TUA
826	KARMA	KAMBUNONG
827	ST RAHMAN	KAMBUNONG
828	RATNA	ANTALILI
829	NURSI AH	KAMBUNONG
830	ASMIATI	KAMBUNONG
831	BADIA	KAMBUNONG
832	NUR ALAM	PULO KAMBUNONG
833	MARNIA	SALUBIA
834	NUJI	KAMBUNONG
835	ROSDIANA	KABARANG
836	KAMASIA	PULO KAMBUNONG
837	ASMIA	KAMBUNONG
838	USRIANI U	DUSUN ANTALILI
839	KARTINI	KAMBUNONG
840	MASTON	KAMBUNONG
841	BADARIA	SALUBIA
842	HARDIAN	KAMBUNONG
843	NUJIA	KAMBUNONG
844	NUR ALAN A	DUSUN ANTALILI
845	RUHAENI	KAMBUNONG
846	YUNASIA	KAMBUNONG
847	BALAIS A	KAMBUNONG
848	HUSAIMA	KAMBUNONG
849	ST AMINAH	KAMBUNONG
850	HERLINA	KAMBUNONG
851	SUHAENAH	ANTALILI
852	SIMAWATI	DUSUN ANTALILI
853	AR BIA	ANTALILI
854	RUSTI	PULO KAMBUNONG
855	DARMIA	KAMBUNONG

No	Calon Penerima	Alamat
856	DAHLIA	DUSUN ANTALILI
857	NURLIA	KAMBUNONG
858	ASMAWATI	SALUPANGKANG TUA
859	SITTI MAIMUNAH	SALUPANGKANG TUA
860	RATNA	KAMBUNONG
861	RUSNAH	SALUBIA
862	MARWAH	SALUPANGKANG TUA
863	DG SITTI	SALUPANGKANG TUA
864	HASNA	DUSUN BUKU DESA SALUBIRO
865	MARDIANA AT	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
866	NUR LAELA	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
867	JOHANIS	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
868	ASLIA A	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
869	HASNA	DUSUN BUKU DESA SALUBIRO
870	WINDA	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
871	MARTA	DUSUN PANGERANG, DESA SALUBIRO
872	HASMIA S	DUSUN SALUBIRO, DESA SALUBIRO
873	SITTI ISA	DUSUN BENDUNGAN, DESA SALUBIRO
874	JUMRIANI	DESA SANJANGO
875	NURSI AH	SANJANGO
876	KURNIA	DESA SANJANGO
877	HADIRA	DESA SANJANGO
878	SITTI	DESA SANJANGO
879	WAHIDA	DESA SANJANGO
880	SALMA WATI	SANGREGE TIMUR
881	SARNAENI	MAMBI
882	RATNA ANJALI	BABA SIKKI
883	JAURAH	LOMBONGAN
884	IDA	SALUBUA
885	IDA	KEPPE
886	SITTI AMA	DESA RANTEBULAHAN
887	LUDIA	RANTEBULAHAN
888	NURWIDAYASNI	TIKUAK
889	MARMIA	TIKUAK
890	MARABIA	SALUBANUA
891	SABIRIA	SALUBANUA
892	ICCA	DUSUN KAMPUNG BARU DESA TAPALINNA
893	MUT MAINNA	DUSUN DAMBU DESA TAPALINNA
894	HADINA	DUSUN KAMPUNG BARU DESA TAPALINNA
895	MAJI	DUSUN TAPALINNA DESA TAPALINNA
896	SOHRA	DUSUN TAKOMBA DESA TAPALINNA
897	NURLINA	SENDANA
898	SITTI ARAPA	LELEK
899	IRAWATI	SENDANA

No	Calon Penerima	Alamat
900	NURBANIA	SENDANA
901	HERMIATI	LEMO-LEMO
902	SALEHA	PAMOSEANG
903	JUMALISA	PAMOSEANG
904	HASNA	PAMOSEANG
905	RATIA	PAMOSEANG
906	TO NIK	PAMOSEANG
907	INDAH	SALUMAKA
908	NIMA	SALUMAKA
909	JANNAH	SALUMAKA
910	BANJIK	SALUMAKA
911	MARMIATI	SALUMAKA
912	CICCIK BARU	SALUMAKA
913	HASNUR	DESA SALUALO
914	MARLIA	DUSUN PAKRINDINGAN
915	RUKIA	DESA SALUALO
916	SUDARMI	DESA SALUALO
917	RUHAEMA	KAMPANG
918	HALIMAH	PALADO
919	JANARIA	PULLAO
920	ST HASDIJA	INDOBANUA
921	RUSLIAH	POPANGA
922	LUDIK	SALUDURIAN
923	ISA	SALUDURIAN
924	MIANG	SALUDURIAN
925	ST NURBAYA	SALUDURIAN
926	ASMA GUNA	LINGKUNGAN BULO
927	RUBIA	DUSUN PANGNGALAK
928	SUGIARTI	DUSUN PANGNGALAK
929	SARNIWATI	DUSUN BAKBAPANE
930	HANISA	DUSUN PEBI
931	SUMIATI	DUSUN PEBI
932	RAMASIA	DUSUN LINGKU
933	ARMA	DUSUN PEBI
934	NADIRA DEWI	DUSUN PEBI
935	MARDAYANI	DUSUN TANGGAUMA
936	SRIENDAYANI	DUSUN PEBI
937	DAHNIAR	DUSUN PEBI
938	SURI	DUSUN TANGAUMA
939	HARIA	DUSUN KASAMPOANG
940	SAPIA	DUSUN PEBI
941	ACCI	DUSUN TANGAUMA
942	JUMAK	DUSUN KASAMPOANG
943	ARMIWATI	DUSUN PEBI

No	Calon Penerima	Alamat
944	HARTATI	DUSUN KALINTARO
945	JASIA	DUSUN KATIMBANG
946	HANA	DUSUN LENGKE'
947	ROSMA	DUSUN LENGKE'
948	SURIANI	DUSUN LENGKE'
949	SUJIA	DUSUN KATIMBANG
950	A'BENG	DUSUN LENGKE'
951	DINA	DUSUN SALUKAIYANG 1
952	DARMIWATI	DUSU KATIMBANG
953	KANTELENG	DUSUN LENGKE'
954	RASIALANG	DUSUSN PAKBETTENGAN
955	MURNIATI	DUSUN PAKBETTENGAN
956	MARDIAH	DUSUN SALUKERO
957	RINI ASTUTI	DUSUN SALUKERO
958	ROSPINSI	DUSUN PALADAN
959	SARLOTA	DUSUN LELATIN
960	SARA	DUSUN LELATIN
961	YUNENGI	DUSUN LAMBU
962	BATIA	DUSUN SALUTAMMI
963	ANDIK SUCI	DUSUN SALUTAMMI
964	RATIKAH	DUSUN SALUTAMMI
965	AMMA	DUSUN RALLEANAK
966	BADARIA	DUSUN KONDO TOHAJA. 1
967	JUNAISAH	DUSUN PANDANG
968	ANASIAH	DUSUN PANAMPO
969	MURNIATI	DUSUN PAMOSEANG
970	HASIMUNA	DUSUN SALUMASIMBO
971	HINDI	DUSUN SALUHUSSU
972	RUMIA	DUSUN SALUHUSSU
973	SAHURIA	DUSUN SALU HUSSU
974	HASMIATI	DUSUN KALUNG
975	LIMBORAMA	DUSUN KAPAK
976	ASMA	DUSUN KALUNG
977	SUDAERI	DUSUN KAPAK
978	SABANUR	JLN. PENDIDIKAN PA'LENTA
979	ROSMIA	RANTE KOPPE
980	TASIK MENTODO	DAMA-DAMA
981	YULIANA SRISUSANTI	DAMA-DAMA
982	MARIANA DATU LANGI	DAMA-DAMA
983	SENI OKTOVIANI	JLN. RANTE KOPPE TATO
984	RUTH RARA ARRUAN LANGGA	TANETE KOLE
985	INE	RANTE BUDA
986	SARATU	RANTE BUDA
987	LEMPAN	PA'TO

No	Calon Penerima	Alamat
988	PATTANG	RANTE BUDA
989	LIMBONG LOLA	DUSUN BUNTIKASISI
990	LANGI PITU	DUSUN DUA OSANGO
991	FRANSINA D SARONG	DUSUN RANTEKATOAN
992	MERI ANDANI	DUSUN RANTEKATOAN
993	MARIA	DUSUN DUA OSANGO
994	EMA	OSANGO 2
995	YULIANA TANDILANTUN	DUSUN DUA OSANGO
996	LINA	SANGORA
997	DATU KAIYANG	DUSUN PEMBU
998	ARRUAN GOA	DUSUN PEMBU DESA LAMBANAN
999	HERNI	DUSUN PAKASSASAN
1000	SAMBO PAILLIN	DUSUN PENA
1001	SARAH	DESA LEMBANA SALULO DUSUN PONDING
1002	RICE	DESA LEMBANA SALULO DUSUN LOMBOK
1003	LANGI' MINANGA	DUSUN SALULO
1004	LIKU TASIK	DUSUN PA'LA
1005	KAMPIN	DUSUN PA'LA
1006	DATU MANGIN	PA'LA
1007	APRIANTI	DUSUN RANTE
1008	TASIK BULAWAN	DUSUN RANTE
1009	MARIAM	DUSUN NE'KE
1010	TASIK LEMPAN	DUSUN KALIMBUANG
1011	ARRUAN PITU	RANTE PONGKO
1012	LIMBONG BAMBA	TUSAN
1013	BANNE	RANTE PONGKO'
1014	DATU PASAU	DUSUN TONDOK BAKARU
1015	TASIK BULAWAN	RANTE PONGKO
1016	TITIN	TUSAN
1017	BARRANG	KENDENAN
1018	TASIK KARUA	TANETE
1019	ANTOMINA	TANETE
1020	DINA	TANETE
1021	DATU TOEN	TANETE
1022	LIMBONG BONGA	BALLA
1023	LENORA	PASSODOKAN
1024	DATU MANGGOA	RADELANGI
1025	DORKAS	BALLA
1026	PINDAN	BALLA
1027	SISKAWATI	LOKO
1028	DORCE	DUSUN KILOLIMA
1029	LOTONG	BARRA-BARRA
1030	DATU LEBOK	DUSUN BARRA-BARRA
1031	LIMBONG S	DUSUN BARRA-BARRA

No	Calon Penerima	Alamat
1032	RUTH	PAMUMBUN
1033	YOHANA	PAMUMBUN
1034	ANTOMINA	BUNTU TILLE
1035	LOTONG	BUNTU TILLE
1036	MARIANA	BAULUANDE
1037	MARIANA	BALUANDE
1038	OKTOVINA M	PAHANDANG
1039	LAIK RINDA	PURROMAK UTARA
1040	LILI WASTIMAS	KAKUNDUSAN
1041	LORI	BAULUANDE
1042	SEDINA	SIARRAK
1043	YULIANA	TALOPAK
1044	RICEK	BATU BIRA
1045	ELPINA	PANGARAKIAN
1046	MARIKKIK	MALATIRO
1047	MADA	PALEBOAN
1048	DARMAWATI	MALATIRO
1049	KALEK	DADEKO LAJUK
1050	TIANGKAK	PALEBOAN
1051	MIMMIN	MALATIRO
1052	RIMAK	MALATIRO
1053	YULIANA	REA
1054	POLOPINA	MALATIRO
1055	DORCE	TABULAHAN
1056	ANACE	TABULAHAN
1057	HERMINA	TABULAHAN
1058	ESTER KUMBANG	TABULAHAN
1059	HANA RT	PANAMPO
1060	RUT S EWA	PANAMPO
1061	ESTER PINCE	PANAMPO
1062	MINA S EWA	PANAMPO
1063	ELISABET	LAMBAK
1064	NONIA	SALUDINGKIT
1065	MESRAWATI	SALUDINGKIT
1066	KESNA	SALUMARANTE
1067	JULIANA	RATTANA
1068	HARNI MARLENI	KAYUMEA
1069	PENINA	KAYU MEA
1070	JATILAH	KAYU MEA
1071	RODE	SALUBAKKA T
1072	MAWAR	KKALOLINGAN
1073	ESTER	PANGANDARAN
1074	ANTOMINA	PARTIM
1075	KETERINA	PANGANDARAN

No	Calon Penerima	Alamat
1076	SARINA	TALUKUM
1077	CAYA	TALOPAK
1078	ELVI	TALOPAK SELATAN
1079	HERDA	PEUK
1080	HERMINA	PEUK
1081	HELE	TIMOHA
1082	MARNI	PEUK
1083	LOISA	KAMPUNG BARU
1084	BALANDINA	SALUNATA
1085	HELENA P	SALUNATA
1086	DAMARIS	PA'LAMBASAN
1087	SAMBO MALILLIN	DUSUN, TAMBUN
1088	MARTAH	TANETE
1089	MARIANA	TAMBUN
1090	LEVINA LOLA	TATOA 2
1091	MARINA	PA'LAMBASAN
1092	MITEN	TANDUNG
1093	ARRUAN MAMA	SALUTONDOK
1094	TASIKMINANGA	SALU LOTONG
1095	SALOMINA D	SALUKAIYANG
1096	MARTHA	SALU LOTONG
1097	BERNESI LANGI MASIRRIN	TANDUNG
1098	ARRUAN TIKU	TADAMBA
1099	LIMBONG BULAWAN	TADAMBA
1100	DATU ARRUAN	PA'LA
1101	MAROA	LOMBONAN
1102	DATU MATOGON	PA'LA
1103	SAHARIA	TADAMBA
1104	SARCE	RANTE KAMIRI
1105	DATU LIMBONG	BARRA'BARRA'
1106	LIKU	PANTU
1107	DALE	PANTU'
1108	TASIKBULA'	BARRA'-BARRA'
1109	NURNY	JLN HUSNI THAMRIN
1110	SUMARNI	JL.TAMASAPI
1111	MASDIANA	JL.PATTIMURAH
1112	RATNA	KL NELAYAN
1113	SUHARNI AS AD	JL. H. ANDI DAI
1114	SOHO	JL SULTAN HASANUDDIN
1115	NUR NINGSIH	JL. PACIRINAI
1116	RAMLA WATI	JL.H.ANDI DAI
1117	DARMI	KASIWA
1118	H BAYA	JL. PATTIMURAH
1119	HAMISA	JL.TAMASAPI

No	Calon Penerima	Alamat
1120	HJ NORMALA PARENTA	BINANGA
1121	RATNA WATI	BINANGA
1122	JURUMIA	BINANGA
1123	ROSLINA LAGENDA	BINANGA
1124	HALIJAH	JL H ANDI DAI
1125	HJ MARWAH	JL H ANDI DAI
1126	HJ SITTI NAJARAH	JL MACCIRINAI
1127	NUR HASNAH	JL KASIWAHTENGAH4
1128	HUSNIA	JL KELAPA
1129	DJUBAEDA	JL KASIWAHTENGAH4
1130	ERNI ASEH	KASIWATENGAH
1131	HAMALIA	JL. PATTIMURA
1132	MARMA	JL H ANDI DAI
1133	MAASIYAH	JL STADION
1134	SOPPENG	JL. STADION
1135	HJ BADARA S	JLN STADION
1136	HASNI JALANI	JLN TAMASAPI
1137	SANONG DG BOLLO	DANGA BARAT
1138	KA YUNA	JL H ANDI DAI
1139	KURNIATI	JL H ANDI DAI
1140	ISA	JL.TAMASAPI
1141	ROSNAWATI	JLN LORONG GANG POTLOT
1142	BIDAWATI	JL. PATTIMURAH
1143	NURMI	JL.KELAPA NO. 23
1144	RITA ERNA	JL HUSNI TAMRIN
1145	BASSE	JL.H.ANDI DAI
1146	RABIAH	JL. ANDI DAI
1147	IDA MAHADA KAMMA	JL. PATTIMURAH
1148	HALIMAH	LINGKUNGAN KADOLANG
1149	JASMINA	LINGK. SAMPAGA
1150	ANDI RATNA	LINGKUNGAN TALIBU
1151	MASNAWIAH	LINGKUNGAN TALIBU
1152	KASMAWATI	LINGKUNGAN KADOLANG
1153	DAHLIA	LINGKUNGAN KADOLANG
1154	ISA	LINGK. SAMPAGA
1155	WAHIDA M	KAMPUNG BARU
1156	ANIA	LINGKUNGAN KADOLANG
1157	JUHAERA	LINGLUNGAN TAMASAPI
1158	SATRIANI	KAMPUNG BARU
1159	ARLIANA	LINGKUNGAN TAMBIL
1160	JASMAH	JL.IR.H.JUANDA
1161	RADJINA	TAKAURANGAN
1162	INA MASSEBANGAN	LINGK. SAMPAGA
1163	FATIMAH DAMING	LINGKUNGAN TAPODEDE

No	Calon Penerima	Alamat
1164	NURBAETI	KAMPUNG BARU
1165	HABIAH	KAMPUNG BARU
1166	SYAMSIANUR	JL IR H JUANDA
1167	HARMA	KAMPUNG BARU
1168	ARFAH	JL DIPONEGORO
1169	DIANA	SALU KAREMA
1170	CICCI	PADANG PANGA 2
1171	MARAWIAH	JL KAKATUA
1172	ANDI TANAULANG	JL URIP SUMIHARJO
1173	SIMA	JL.SOEKAENO HATTA SALU KAREMA
1174	HJ SAENAB ALI	JL ABD SYAKUR
1175	HASNA	SALU KAREMA
1176	SANAWIAH	TAHAYA HAYA
1177	INDAR WATI	JL. DIPONEGORO
1178	BIAH	JLN KELAPA TUJUH
1179	SABIAH	JLN KELAPA TUJUH
1180	HAMIAH	PADANG BAKA
1181	KURUSIA	LINK PADANG BAKA
1182	IDANG	PADANG BAKA
1183	BAJANIA	PADANG BAKA
1184	MARLINA	BARAMBAJABU
1185	JUMAIYAH	JL POROS MAMUJU PALU
1186	SINIA	SALULAMPIO
1187	MINDU	SALULAMPIO
1188	VINASTI	BAO BATU
1189	JUSRIANI	SALUMPIO
1190	DARAISA	DUSUN BABANA PANTAI
1191	ROSMAWATI	DUSUN BABANA PANTAI
1192	HATIAH	BAO BATU
1193	MISBA WATI	BUA DAO
1194	JUNIA	TUMUKI
1195	BAHARIA	TUMUKI
1196	ROSMIANI AMIR	BARAMBAJABU
1197	ROSDIANA	SALULAMPIO
1198	MURNIANI	BONE BONE
1199	ANIS	SALULAMPIO
1200	JUMINA	BAO BATU
1201	DARAISA	SALULAMPIO
1202	DEWI PASANDE SILANG	BARAMBAJABU
1203	SOHRAH	BARAMBAJABU
1204	MIDA	BARAMBAJABU
1205	SITTI MIANG	BARAMBAJABU
1206	JUMAIYA	TARUMINDING
1207	MA'ANING	BATUPAPAN

No	Calon Penerima	Alamat
1208	JUHAENI	BATUPAPAN
1209	NUR LAILA	SALULAMPIO
1210	MULIATI	SALULAMPIO
1211	JUMAATI	BONE BONE
1212	NURSIA	DUSUN BUADAO
1213	ASMA WATI	SALULAPIO
1214	NINANG	DUSUN BUADAO
1215	NASRIANI	BAO BATU
1216	SALMANI	BATUPAPAN
1217	RUBIA	BARAMBAJABU
1218	NURSIA	BATUPAPAN
1219	ALİYAH	BONE BONE
1220	JUHASI	BONE BONE
1221	HUDRA	DUSUN UJUNG BULO WISATA
1222	TOCIDA	DUSUN NANGKA
1223	HIJRAH	KARAMPUANG
1224	ROSMAH	DUSUN KARAMPUANG 1
1225	DEHA	BATU BIRA
1226	JUDAENI	DUSUN KARAMPUANG 1
1227	BALAI SA	UJUNG BULO WISATA
1228	MARDAWIA	DUSUN BAJAK
1229	ELLA	DUSUN BAJAK
1230	NORMA	DUSUN BAJAK
1231	RAMLIA	DUSUN SEPANG
1232	JUNURIA	DUSUN KARAMPUANG1
1233	BAHARIA	DUSUN KARAMPUANG1
1234	UHA	DUSUN KARAMPUANG1
1235	TOKURRA	KARAMPUANG
1236	NURLINA B	KARAMPUANG 11
1237	NURHAPSAH	SALUTALAWAR
1238	ULIA	BAMBU
1239	HASANIA	DUSUN BAMBU
1240	NAHADA	LALAWANG
1241	JASMIRA	SALUTALAWAR
1242	JASMAH	DUSUN MANALISSE
1243	SITI MARIAM	PANGONDOANG
1244	SITTI ISA	BAMBU
1245	HAISA	SALUTALAWAR
1246	ITTI	DUSUN MANALISSE
1247	SITTI JUDA	LALAWANG
1248	MARAENI	PANGONDOANG
1249	JUHANIA	DUSUN BAMBU
1250	BAONTAN	LALAWANG
1251	ONDE	SALUTALAWAR

No	Calon Penerima	Alamat
1252	PUJIATI	DESA BATU PANNU DUSUN BATU PANNU
1253	HAJRA	DESA BATU PANNU DUSUN BATU PANNU
1254	HABIBI	DUSUN BATUPANNU
1255	FIRDAWATI	DESA BATU PANNU DUSUN PANUNTUNGAN
1256	HASNAWIAH	DUSUN BATUPANNU
1257	HALIPA	LINGKUNGAN GALUNG
1258	NAHASIA	LINGKUNGAN GALUNG UTARA KEC TAPALANG
1259	JAMATIA	LINGKUNGAN GALUNG
1260	BIA	LINGKUNGAN GALUNG TIMUR
1261	DARAENI	LINGKUNGAN GALUNG TIMUR
1262	DEWI	LINGKUNGAN GALUNG TIMUR
1263	HUSNAH	LINGKUNGAN GALUNG TIMUR
1264	BERENA	LINGKUNGAN PETAKEANG
1265	BARIAH	KASAMBANG
1266	SAHAWIAH	KASAMBANG
1267	NURHIDAYAH	KARANAMU
1268	BAHIRAH	TE'BENG
1269	NAJAMIANG	KARANAMU
1270	SUNNIAH	KASAMBANG
1271	RAHMA	KASAMBANG
1272	HAMIDA	LINGKUNGAN DAYANGINNA
1273	ST ISA	LINGKUNGAN DAYANGINNA TENGAH
1274	NURLINA	LINGKUNGAN DAYANGINNA UTARA
1275	RATNAH	LINGKUNGAN DAYANGINNA SELATAN
1276	TASLIN	LINGKUNGAN DAYANGINNA
1277	NAENI	LINGKUNGAN DAYANGINNA UTARA
1278	SUNARTI	DUSUN BONE BONE
1279	JURUMIAH	DUSUN TAMPOMEA
1280	RANGKANG	DUSUN TAMPOUHAI
1281	SIANA	DUSUN BULOMALALA
1282	SANTI	DUSUN BONE BONE
1283	MARIAMA	DUSUN TAMPOMEA
1284	HUSNAH E	DUSUN OROBATU
1285	TIMA	DUSUN SALUBIRU
1286	HASNA	DUSUN LIMBENG
1287	SYAMSIAH	TALIBA
1288	ST ISA	DUSUN LIMBENG
1289	ST NUR	DUSUN TAKANDEANG
1290	HASNAWIYAH	DUSUN TAKANDEANG
1291	JAEDAH JOHAN	DUSUN LIMBENG
1292	MURNIATI	DUSUN LANDA
1293	SUHAERAH	DUSUN LAWASAN
1294	AMEDIA	DUSUN TAJIMANE
1295	RISNA	PEMPIOANG BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
1296	KAROBING	LENANG
1297	RAMALIA	LENANG
1298	JASMIA	PEMPIOANG
1299	MUNA	DUSUN TAPARIA
1300	MALIA	PEMPIOANG
1301	ANDI	DUSUN ANUSU
1302	MIA	DUSUN RANTEDODA
1303	NAHRIA	SIMBUANG
1304	HUSNAWATI	PAMOMBONG MANDIRI
1305	SANATI	SIMBUANG
1306	ROSTINA	SIMBUANG
1307	RABAIA	SIMBUANG II
1308	TABANDENG	SIMBUANG DUA
1309	JANARIA	SIMBUANG DUA
1310	HADAENI	TAMBAYAKO
1311	AMALIAH T	DESA SALUPANGI
1312	NURMIATI	JL MARTADINATA
1313	MARNA	PAMOMBONG MANDIRI
1314	HASLIAH	SALUPANGI
1315	ASLINDA	JL NELAYAN
1316	RABIAH	TAMBAYAKO
1317	JAMIA	SESE UTARA
1318	TAHALLE	SESE SELATAN
1319	TAISA	SESE SELATAN
1320	TAGANIA	ALLA ALLA
1321	HARAFIAH	RANGAS
1322	RASDIANA	RANGAS
1323	SALMA	LANDI
1324	SURIANI P	DUSUN TALUDU
1325	ANDILA	.RATTE
1326	MARIAMA	DUSUN BOTTENG
1327	KARTINI	KURASALLIMBO
1328	ITTANG	DESA SALLETTO
1329	ISAH	GANNO 1
1330	MASITA	DUSUN TADAGANG
1331	MURNI	DUSUN TANJUNG BATU SELATAN
1332	SUMIATI P	DUSUN BATU LAPPAL UTARA
1333	ASMA	TANDE-TANDE
1334	DESE	DUSUN POPANGA
1335	TEHING	ADI ADI
1336	ICCI TANDE	DUSUN POPANGA
1337	OKKA HENENG	DUSUN ONIANG
1338	SANABIA	ADI ADI
1339	EMBANG RADDA	ONIANG

No	Calon Penerima	Alamat
1340	HADA	ONIANG
1341	HAJARA	DUSUNBABALALAMG
1342	SUHAERA	TAPANDULLU SELATAN
1343	RIJAENI	TAPANDULLUU
1344	NURMIAH	TAPANDULLU DUSUN KAMPUNG BARU
1345	BECCE	MOLLO
1346	SUMIATI	MOLO
1347	SURIANI	MOLLO
1348	ICCI MALI	SALUAREI
1349	SALFIAH	TAMPA PANGALE
1350	RAJIA M	MOLLO
1351	JALISA	MOLLO
1352	NUR ATI	MOLLO
1353	JUMARIAH	DUSUN NGALO
1354	JUNALIA	DUSUN GALUNG
1355	HUSNA	DUSUN DUNGKAIT
1356	ASLIA	PANSEANGAN
1357	JINARA	DUSUN GALUNG
1358	NURDIA	DUSUN GALUNG
1359	ST HANNAPI	PANSEANGAN
1360	ITTI DAHU	DESA LEBANI DUSUH UHAI MANYANG
1361	HASNA	DESA LEBANI DUSUN NIPA-NIPA
1362	SUNU	DESA LEBANI DUSUN NIPA-NIPA
1363	JANA	DESA LEBANI DUSUN SALU-SALU
1364	PA USIA	DESA LEBANI DUSUN MEPAANG
1365	MARNI	DESA LEBANI DUSUN LEBANI SELATAN
1366	RAHMANIA	DESA LEBANI DUSUN NIPA-NIPA
1367	JASARIAH	DESA LEBANI DUSUN LEBANI UTARA
1368	HADERIAH	DESA LEBANI DUSUN LEBANI UTARA
1369	NURHAYATI	DESA LEBANI DUSUN NIPA-NIPA SELATAN
1370	LIA	DUSUN SALU PINDANG
1371	HARAMIAH	DUSUN TAPANGKANG
1372	PARIDA	DUSUN LOLLONG GAUWWANG
1373	SA'NA	DUSUN SALU PINDANG
1374	NURMAWATI	DUSUN SALUPINDANG
1375	ST LEMO	DUSUN LE'BE
1376	ELENG	DUSUN LE'BE
1377	NURSIA	PASA'BU
1378	SITTI ISA	PASABU
1379	WULAN	
1380	STTOHAR	
1381	HAPSAH	
1382	HARTATI	PASABU
1383	HARISA	DUSUN TANETE BARRU

No	Calon Penerima	Alamat
1384	MARYAM	DUSUN KALAHA
1385	JERNI	DUSUN TANETE BULO
1386	HALIJA	DUSUN TANETE BARRU
1387	JUNUSIA	DUSUN TANETE KALAHA
1388	SITTI MANIAH	DESA PANGASAAN DUSUN TABATIN
1389	BATIA	DESA PANGASAAN DUSUN TABATIN
1390	BURA	DESA PANGASAAN DUSUN MAMBIE
1391	SANAPIA	DESA PANGASAAN DUSUN MAMBIE
1392	DINI SARDIANI	DUSUN TABAILO
1393	LILIANAH	DUSUN AHU BARAT
1394	KULLING	DUSUN AHU TIMUR
1395	JAMALIAH	DUSUN SALU SENDANA TIMUR
1396	NAPA	DUSUN SALUBIRU
1397	ARDIANAH	DUSUN AHU TIMUR
1398	SARLINA	DUSUN TABAILO
1399	JADIA	DUSUN TABAILO
1400	FIANI	SALUNGGADUE
1401	I BENGNGA	SALOBULU
1402	SAHDAINI	JL ANDI DEPU
1403	RATNA	JL MUH HATTA
1404	ECCE JALAWALI	JL MUH HATTA
1405	RATNA	SALOBULU
1406	SUTARNI	SALUNGGADUE
1407	HARMIA	SALUNGGADUE
1408	HARIALANG	TANJUNG BABIA
1409	NURSI AH	JL IGUSTI NGURAH RAI
1410	NURANA	JL MUH HATTA
1411	SERNI SALMUDDIN	JL GAGAK
1412	NURSANI	SALOBULU
1413	TAHANG	JL.SALUNGGADUE
1414	JUFRIAH	LINGKUNGAN TANJUNGBABIA KELURAHAN PASANGKAYU KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULA
1415	RUSMAWATI	JL. TA JUNG BABIA
1416	WANINA	JL. DIPONEGORO
1417	SURYANI	JL.TANJUNG BABIA
1418	IRMA	JL.RUSA
1419	SITTI ARA	SALOBULU
1420	SOHORA	SALUNGGADUE
1421	PUJI ASTUTI	JL ASOKA
1422	ROSNAMA	JL KEDONDONG
1423	NURMA	JL.TUNA LINGKUNGAN TINAPU
1424	KULIATI	JL. MANGGA
1425	TASNIATI	JL.KOMPLEKS PASAR BARU
1426	SITI AYA	JL. MANGGIS

No	Calon Penerima	Alamat
1427	BESSE ANNI	LINGKUNGAN MEKAR INDAH
1428	INE	PAKAVA DUSUN WATUIKE
1429	SAINA	PAKAVA - DUSUN WAISUBA
1430	SRIDEWI	DUSUN PUTIH MATA
1431	HUSNIA	DUSUN BAMBA APU
1432	SITTI AMANG	DUSUN BAMBA APU
1433	SUYANI	DUSUN BAMBA APU
1434	NURHAIDA	DUSUN LALA
1435	JENI	DUSUN LALA
1436	DIJA	KUMU
1437	DELMIN	PAKAVA - DUSUN WAESUBA
1438	NATI	KUMU
1439	JULIANI	DUSUN MANDAR DUA
1440	GUNA	DUSUN PUTI MATA
1441	SURYA CACO	DUSUN LALA
1442	HJ MARIKANG	DUSUN PUTIH MATA
1443	SADIA	PAKAVA - DUSUN WAESUBA
1444	MARIYAM	DUSUN LALA
1445	KATARINA KOLO	DUSUN LALA
1446	KASMA	DUSUN PUTI MATA
1447	SUME	PAKAVA DUSUN SIWATA
1448	YODA	DUSUN BAMBA APU
1449	MARLIA	DUSUN MARAMBEAU
1450	LAENA	DUSUN SULU DESA KARYA BERSAMA KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
1451	HUSNA	DUSUN MARAMBEAU
1452	RAHAMA	DUSUN MARAMBEAU
1453	RADIA	JALAN TRANS SULAWESI, DUSUN BERKAH, DESA KARYA BERSAMA
1454	NIA	BULU LANGA
1455	SADIAN	MESSULU
1456	IMANNONG	TARANJA
1457	JOHA	BULU LANGA
1458	BESSE IRMA	PEBURO
1459	HJ SALAMA	SALOAYA
1460	HJ CUNDUNG	BULU LANGA
1461	NURHAYATI	BULU LANGA
1462	ISA	BUKIT HUSADA
1463	SITTI HADIJA	BUKIT HUSADA
1464	SAPRAIA	TOBENGO
1465	HASNI	MOROBIO
1466	SUTRIANI B	BULU LANGA
1467	NURU	BAMBAMONE
1468	NI WAYAN KANTIM	BATURITI

No	Calon Penerima	Alamat
1469	PILA	SALU RAYA
1470	MIA	SALU RAYA
1471	DANA	BAMBAMONE
1472	ISYA	PETUNGGU
1473	TINI	PETUNGGU
1474	NI WAYAN MURTINI	DSN BAMBARABA
1475	AGUASTINA SANTI	BAMBAMONE
1476	NURANI	LINGKUNGAN PANTAIBATU
1477	NURLIA	LINGKUNGAN PANTAIBATU
1478	IRMA YUNITA	ULULOKA
1479	SUNARTI	DUSUN TAIPA
1480	IRAWATI	LINGK SAMONU
1481	TIMA	
1482	SANTI	LINGKUNGAN PANTAIBATU
1483	SARIDA	WAETUMBUR
1484	RINDA	WAETUMBUR
1485	SUDARNI	SIDOMAJU
1486	SUWINARTI S	DUSUN SUNGAI TOO
1487	NASRAH	SIDOMAJU
1488	SITTI QOMARIAH	DUSUN SUNGAI TOO
1489	HESNI Y	AGRI SELATAN
1490	SARTINI	DUSUN MAHAMAKMUR
1491	HASMAWATI	DUSUN BULILI PABRIK
1492	HERDA	DAMPELA
1493	IRMA	DUSUN MAHA MAKMUR
1494	LUDIA SAMPE	DUSN LEMBAH MAKMUR
1495	YULIANTI TO'BA	KARABI
1496	RANNU	KEM RAMBUTAN
1497	NURDIANA	DUSUN MAHAMAKMUR
1498	FITRI	DAMPELA KEM RAMBUTAN
1499	SURYANA	DUSUN MAHA MAKMUR
1500	SUNINGSIH	DUSUN PALASARI
1501	ERNIWATI	AGRIBARAS
1502	TUTI BARLIA	AGRI BARAS
1503	IDARNA	DUSUN BUKIT ASRI
1504	MASNAH	DUSUN NGATIBUA
1505	HUMRA	DUSUN MASIMBU
1506	MASNIA	DUSUN BANTAYANG
1507	HARIATI	DUSUN SANGGE
1508	RABANIA	DUSUN LAKAMBE
1509	RISNAWATI	DUSUN SANGGE
1510	SITTI ROHANI	SANGGE
1511	FATMA	DUSUN MASIMBU
1512	HIJRAWATI	DUSUN MASIMBU

No	Calon Penerima	Alamat
1513	HIKMA	DUSUN MASIMBU
1514	MELLUNG	DUSUN TOWONI II
1515	SIA	DUSUN WAITUO
1516	SABARIA	DUSUN KAREO
1517	NIRFAN	DUSUN LAMBARA
1518	EMA FIRIANI	DUSUN WAITUO
1519	HADIRAH MAHADI	DUSUN SALUKALI
1520	PEKE	DUSUN KAPOHU
1521	MANSURIA	DUSUN SALUKAILI
1522	TENRI SANA	SALUKAILI
1523	AJALIA	DUSUN LAMBARA
1524	HASWIRA	DUSUN KAPOHU
1525	SALBIAH	SALUKAILI
1526	NURLINA	DUSUN WAETUO
1527	RAHMA	DUSUN WAETUO
1528	HADIRAH MAHADI	SALUKAILI
1529	SALMAWATI S	DUSUN LESTARI RT 001
1530	ASRIANI RAHIN	DESA KENANGAN
1531	MAYA SITI AROFAH	BAJAWALI
1532	HASRIANTI	DESA SINGGANI
1533	SITTI HAISAH	DESA SINGGANI
1534	INOMI	DESA SINGGANI
1535	HAJARIA	DESA SINGGANI
1536	SITTI NURSANANG	DESA SINGGANI
1537	SUMIATI	DESA SINGGANI
1538	RUSNANG	BULU VIDU
1539	MARWATI	DUSUN BULU TAO
1540	MURIANA	BULU VIDU
1541	NURLINAWATI	BULU VIDU
1542	RAHMIA	BULU VIDU
1543	JUMRA	GODANG
1544	SAHARA	DESA BATUMATORU DUSUN LARIANG
1545	DHALIA	DUSUN TANJUNG HARAPAN
1546	ASMA	DUSUN RODO
1547	HADIJA	DESA BAMBAKORO DUSUN SALUPONTU
1548	SALMIA	DUSUN TANJUNG HARAPAN
1549	DARMAWATI	DUSUN TANJUNG HARAPAN
1550	HERLINA	DUSUN SALUPONTU
1551	HJPUANG JUMURA	SALUREBONG
1552	ERNAWATI	LINGK SEDERHANA
1553	SHERLY WIJAYA	MATAKALI
1554	HERNAH	LINGK SEDERHANA
1555	JAMAATI	KAMP. TANGNGA
1556	MASDIANA	LINGK SEDERHANA

No	Calon Penerima	Alamat
1557	PATMAWATI	SALUREBONG
1558	HADARA	LINGK. KAMP. TANGNGA
1559	ISALANNA	KAMP. TANGNGA
1560	NURJANNAH	MATAKALI
1561	HERLINA HAFID	MATAKALI
1562	SURIANTI INDRASWARI	SEPPONG
1563	NURHAYATI	LINGK Sederhana
1564	ROHANI BR	LINGK. KAMP. TANGNGA
1565	MASTURA	LINGK. SALUREBONG
1566	TIJA	SALUREBONG
1567	WAHDANIA	MATAKALI
1568	KARIJAH	SEPPONG
1569	NURHAYATI	LING Sederhana
1570	SINAR	MATAKALI
1571	SANATIA	KAPPUNG TANGNGA
1572	TAMULIA ALI	LINGK. SALUREBONG
1573	SYAMSIAH AP	LINGK. SALUREBONG
1574	HANISU	JL. POROS MAJENE
1575	SUNARSE	SEPPONG
1576	MARYAM	LINGK Sederhana
1577	SITTI RANNA	LINGK. KAPPUNG TANGNGA
1578	RATINA	SEPPONG
1579	RAWI	LINGK KAMP TANGNGA
1580	SITTI ASIA	LINGK. SALUREBONG
1581	FATIMAH	LINGK Sederhana
1582	MANI	LINGK. SALUREBONG
1583	SURATEN	SEPPONG
1584	MASNI	SEDERHANA
1585	ZUBAEDAH	MATAKALI
1586	MASDIANA	KAPPUNG TANGNGA
1587	NUR ALAM	LINGK. KAMP. TANGNGA
1588	HERNAWATI	SALUREBONG
1589	SUMINEM	SEPPONG
1590	BU'DA	MATAKALI
1591	SOHORA	SALUREBONG
1592	FITRIANINGSI	SEPPONG
1593	ST WAHIDAH A	MATAKLI
1594	MUNTI	LINGK. KP. TANGNGA
1595	JAMAITTANG	KAPPUNG TANGNGA
1596	HARTATI	KAMPUNG TANGNGA
1597	HARUMI	SALUREBONG
1598	SUMARNI	SEPPONG
1599	SUHARNI MANSUR	SEPPONG
1600	RANNI	BULUBAWANG

No	Calon Penerima	Alamat
1601	SUKU	SAPPOANG
1602	NAWIA	SAPPOANG
1603	FITRIANI	SAPPOANG
1604	RABAIA	BULUBAWANG
1605	NURMIATI	REA BARAT
1606	TASMAH	REA BARAT
1607	SUMIATI	REA JAYA
1608	SUBAEDAH	SAPPOANG
1609	HADIJAH	REA BARAT
1610	NURBIA	BULU BAWANG
1611	SIANGKA	REA BARAT
1612	STSAENAB	REA BARAT
1613	MARYAM	REA JAYA
1614	MARLIANI	SAPPOANG
1615	NURHAISA	BULUBAWANG
1616	CICCI	SAPPOANG
1617	NURLIAH	REA JAYA
1618	DIA	REA BARAT
1619	MASKURATI	REA JAYA
1620	MARIAMA	REA JAYA
1621	HAJRANI	REA BARAT
1622	HAPSAH	SAPPOANG
1623	NURBAYA	REA JAYA
1624	SATRIANI	REA JAYA
1625	SONETTANG	SAPPOANG
1626	TIMANG	SAPPOANG
1627	SANAN	REA BARAT
1628	SIANGKA	REABARAT
1629	SALASIA	REABARAT
1630	JUNAIRA	REA BARAT
1631	GAMALO	REA JAYA
1632	ST HA'DARA	REA JAYA
1633	ST MARWAH	SAPPOANG
1634	LISMAWATI	SAPPOANG
1635	SITTI NUR	REA JAYA
1636	IJULA	SAPPOANG
1637	ERMINENSIH	DUSUN BULU BAWANG
1638	AMMAS	REA BARAT
1639	ST ISA	REA JAYA
1640	NAGAULANG	SAPPOANG
1641	MASTURA	BULUBAWANG
1642	FADLIANA	SAPPOANG
1643	SANTALIA	SAPPOANG
1644	SURIANI	REA BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
1645	YANGKA	BULUBAWANG
1646	SURI	REA JAYA
1647	HJ RANNU	REA JAYA
1648	HERLINA	SAPPOANG
1649	SITTI MADIA	BULU BAWANG
1650	MARYAM	REA JAYA
1651	SAKINAH	REA JAYA
1652	SANANG	DUSUN BULUBAWANG
1653	RAHMAWATI	SAPPOANG BTN AL IKHLAS
1654	UWAHIDA	SAPPOANG
1655	WERO	SAPPOANG
1656	NUHURA	JL.BULU BAWANG
1657	JALIA	BULU BAWANG
1658	DARMAWATI	REA JAYA
1659	DEWI SYINTA	REA JAYA
1660	INDAR ARMAN	SAPPOANG
1661	SULE	REA BARAT
1662	ST ANNA	REABARAT
1663	SUBURA	REA JAYA
1664	HAPIA	REA BARAT
1665	SUMIATI	SAPPOANG
1666	GARIA	REA BARAT
1667	SITTI	REA JAYA
1668	ABBASIA	SAPPOANG
1669	BAHIRA	SAPPOANG
1670	HATIJA	REA JAYA
1671	ROSI	REA JAYA
1672	HASRAWATI NOOR	REA JAYA
1673	NURHAEDHA	SAPPOANG
1674	SA'ADIAH	SAPPOANG
1675	BONDENG	REA BARAT
1676	KURSI	REA BARAT
1677	DANDU	REA BARAT
1678	SIHA	RT 002/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1679	SITTI NUR	KATUMBANGAN
1680	KUTANA	NENEBECE
1681	DARMI	KATUMBANGAN
1682	SAMINA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1683	HASANAN	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1684	SALASIA	KATUMBANGAN
1685	FITRIANI	NENEBECE

No	Calon Penerima	Alamat
1686	ST RUSDA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1687	ST AMINAH B	NENEBECE
1688	ROSMIANA	NENEBECE
1689	HASMIATI	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1690	HELDALINA MURHABI	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1691	BACCI	NENEBECE
1692	JUMURIAH	NENEBECE
1693	SUHUDA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1694	HASNI	KATUMBANGAN
1695	NURLIA	NENEBECE
1696	PARIDA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1697	ST AMINA	KATUMBANGAN
1698	KOLANG	KATUMBANGAN
1699	HASNAWATI	KATUMBANGAN
1700	ENDENG	NENEBECE
1701	RUGAIYAH	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1702	JUNIRAH	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1703	HASIAHB	NENEBECE
1704	NAHARA	NENEBECE
1705	ST AMINA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1706	HATIA	RT 002/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1707	TABIU	RT 002/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1708	DARMA	RT 002/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1709	NASRA	NENEBECE
1710	NADIRA	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1711	SITTI OLAH	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1712	KOLANG	KATUMBANGAN
1713	SUBAEDAH M SAID	RT 001/ DUSUN LEMOGAMBA,DESA BARUMBUNG, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT
1714	NASIA	NENEBECE

No	Calon Penerima	Alamat
1715	PIDA	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1716	SITTI	BUNGA-BUNGA
1717	FATIMA SYAM	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1718	JALIA	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1719	RUHANIA	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1720	HANAPIA	BUNGA BUNGA
1721	SITTI	BUNGA-BUNGA
1722	SUPRIHATIN	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1723	RAMLAH	BUNGA-BUNGA
1724	SABIAH	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1725	IDAWATI	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1726	SATRIANI	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1727	SAPI	BUNGABUNGA
1728	NURSAN	BUNGA BUNGA
1729	GOMMO	BUNGA-BUNGA
1730	RASDIANA	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1731	ROSDIANA	BUNGA-BUNGA
1732	MASTANIA	BUNGA-BUNGA
1733	KARTINI	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1734	HAMIDA	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1735	HANAPIA	DUSUN3 BUNGA BUNGA
1736	NURANI	DSN3 BUNGA2
1737	MOTTONG	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1738	DARMIWATI	BUNGA BUNGA
1739	SALMA WATI	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1740	SITTI BARIA	DUSUN 3BUNGA BUNGA
1741	SUBAEDAH	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1742	ROSMINI	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1743	JAMINA	BUNGA-BUNGA
1744	JAWARIA	DUSUN3 BUNGA2
1745	KALIA	DSN3 BUNGA BUNGA
1746	SAENAB	DUSUN 3 BUNGA BUNGA
1747	SITTI	BUNGA-BUNGA
1748	ST AMANA	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1749	NURHIDAYAH	DUSUN2 BUNGABUNGA
1750	HJ BUNGA EJA	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1751	DARSIANI	DUSUN 2 BUNGABUNGA
1752	ISA	TIMBO-TIMBO
1753	ROSMA	SALABOSE
1754	RAHMATIA	PANGGALO
1755	JAMIATI	PANGGALO
1756	MARAANI	TIMBO-TIMBO
1757	CAANNA	PALEO TOBANDA
1758	NURMIATI	PA'LEO

No	Calon Penerima	Alamat
1759	MURNIATI	TANANGAN
1760	SAADIAH	LINGKUNGAN CILALLANG
1761	ST AMAN	PA'LEO
1762	HASMIRAH	PANGGALO
1763	IRMAWATI	PANGGALO
1764	SITTI ADA	PALEO TOBANDA
1765	SAPI	TANANGAN BARAT
1766	KANI	PANGGALO
1767	NARFAH	PA'LEO
1768	MIRA	LINGKUNGAN CILALLANG
1769	RIALANG	TIMBO-TIMBO
1770	HALIMAH	TIMBO-TIMBO
1771	ST MARIA	RUSUNG
1772	NASMAWATI	SALABOSE
1773	SALMA	LINGK.CILALLANG
1774	GADIS	LINGK.CILALLANG
1775	RADIJA	TIMBO-TIMBO
1776	ST AMINAH	TANANGAN BARAT
1777	ANDRIANI SAHABUDDIN	PALEO TOBANDA
1778	JANNATI	RUSUNG
1779	RINA ARIANTI	PANGGALO
1780	SARTI	CILALLANH
1781	SITTI	PA'LEO
1782	JUNAEDA	TANANGAN BARAT
1783	ROSDIANA	RUSUNG
1784	SURDAENI	TANANGAN BARAT
1785	HADRAH	LINGK CILALLANG
1786	IKA ARURAYA	TIMBO-TIMBO
1787	DIANA	PALEO TOBANDA
1788	JURUMIAH	PA'LEO
1789	BASTIA	TIMBO TIMBO
1790	ARMIATI	PALEO TOBANDA
1791	SANAWIAH	PALEO TOBANDA
1792	JAMILA	PALEO TOBANDA
1793	SADIRA	TANANGAN
1794	SADIANA	RUSUNG
1795	MULIATI	LINGK.CILALLANG
1796	ANRIUGA	PANGGALO
1797	SYAMSIA	TIMBO-TIMBO
1798	FITRIAH	TANANGAN
1799	DAHLIA	RUSUNG
1800	JABARIAH	SALABOSE
1801	NURJANNAH	PANGGALO
1802	NURTIKA	LINGK.CILALLANG

No	Calon Penerima	Alamat
1803	ST AMAN	TIMBO-TIMBO
1804	SANIA B	PALEO TOBANDA
1805	HASNA	PANGGALO
1806	JUMIATI	PANGGALO
1807	NAPISAH	LINGK.CILALLANG
1808	NURLIAH	TIMBO-TIMBO
1809	NURHAENI	PALEO TOBANDA
1810	NURMIAH	PA'LEO
1811	NAHDA	PALOE TABANDA
1812	SUMURIAH	PALEO TOBANDA
1813	SUWATI	SALABOSE
1814	SARMIANI	PALEO TOBANDA
1815	MARNIATI	TANANGAN BARAT
1816	RAHMAH	PANGGALO
1817	HAPSAH	PANGGALO
1818	CUMIA	LINGK.CILALLANG
1819	SARIAYA	TIMBO-TIMBO
1820	IRMA	RUSUNG
1821	WAHYUNI	LINGKUNGAN CILALLANG
1822	BEDA	CILALLANG
1823	PATIAMAN	CILALLANG
1824	BUNGA ROSI	CILALLANG
1825	NURIATI	PALEO TOBANDA
1826	SUNA	PALEO TOBANDA
1827	HAMISA	RUSUNG
1828	KASMINAH	SALABOSE
1829	HARDIA	PANGGALO
1830	ROSMAWATI	TIMBO-TIMBO
1831	HASNI	TIMBO-TIMBO
1832	SUDIATI	TANANGAN BARAT
1833	HADASURA	CILALLANG
1834	RUSDIA	PALEO TOBANDA
1835	SALAMIA	PA'LEO
1836	MAJA	PANGGALO
1837	NURHAYATI	PANGGALO
1838	HIDAYA	TIMBO-TIMBO
1839	HELMI	PALEO TOBANDA
1840	BADANI HAJI	RUSUNG
1841	JASMI	LINGKUNGAN CILALLANG
1842	HAPSA	CILALLANG
1843	ST RIA	PA'LEO
1844	ST SAMRAH SUNAR	SALABOSE
1845	NURBIAH	LINGKUNGAN CILALLANG
1846	ST NURBAYAH	TIMBO-TIMBO

No	Calon Penerima	Alamat
1847	JALI	PALOE TOBANDA
1848	NAJAMIAH	LINGKUNGAN PANGALI-ALI
1849	ST AMAN	RUSUNG
1850	DARNA SARI	TANANGAN BARAT
1851	IRAWATI	LINGKUNGAN CILALLANG
1852	ST RAHMAH	SALABOSE
1853	NURJANI	SALABOSE
1854	NURHAYATI	SALABOSE
1855	SAHARI	GALUNG PAARA SELATAN
1856	KAMENAL	DUSUN KONJA
1857	MASNI	GALUNG PAARA SELATAN
1858	NADIA	DUSUN KONJA
1859	SALEHATI	PAMBO'BORANG
1860	BEDARIA	GALUNG PAARA SELATAN
1861	SIPAAMI	GALUNG PAARA SELATAN
1862	BUNGASIAH	PAMBO'BORANG
1863	MUNARIA	PAMBO'BORANG
1864	BEREAMI	DUSUN KONJA SELATAN
1865	SUMIATI	DUSUN KONJA SELATAN
1866	NURJANNAH	GALUNG PAARA SELATAN
1867	ROHANI	DUSUN KONJA
1868	MURNI	GALUNG PAARA SELATAN
1869	SAPPEAMI	GALUNG PAARA SELATAN
1870	WIDA	PAMBO'BORANG
1871	JAHARIA	DUSUN KONJA
1872	HARMIATI	PAMBO'BORANG
1873	RAWAISA	DUSUN KONJA SELATAN
1874	HUSNA	GALUNG PAARAH
1875	MADON	PAMBO'BORANG
1876	MAKI	PAMBO'BORANG
1877	KAMARIAH	GALUNG PAARAH
1878	ST ALANG	GALUNG PAARA SELATAN
1879	SAHA	DUSUN KONJA
1880	SUHAERA	GALUNG PAARA SELATAN
1881	RAHABIA M M	DUSUN KONJA
1882	BIDON	DUSUN KONJA
1883	MURSYIDAH	DUSUN KONJA
1884	SANAWIAH	DUSUN KONJA SELATAN
1885	ISAH	GALUNG PAARA SELATAN
1886	NURLINA	DUSUN KONJA
1887	TA'DATIA	GALUNG PAARA SELATAN
1888	SARIMUNA	DUSUN KONJA
1889	JUHANIAH	PAMBO'BORANG
1890	ST AMANG	PAMBO'BORANG

No	Calon Penerima	Alamat
1891	YAME	GALUNG PAARA SELATAN
1892	BAISA	GALUNG PAARA SELATAN
1893	RAHMATIA	GALUNG PAARAH
1894	ROSDIANA	DUSUN KONJA
1895	BAYANI	DUSUN KONJA
1896	NURMI	DUSUN KONJA
1897	HASMINAH	DUSUN KONJA
1898	MOMINA	PAMBO'BORANG
1899	HASMIA	GALUNG PAARA SELATAN
1900	HABIBA	DUSUN KONJA
1901	SITI NURA	DUSUN KONJA
1902	BAHARIA	DUSUN KONJA
1903	NURMI	DUSUN KONJA
1904	INA	DUSUN KONJA
1905	SANIA	TOTOLISI TENGAH
1906	RUSDIA	TOTOLISI TENGAH
1907	SIADA	TOTOLISI UTARA
1908	SINAN	TOTOLISI UTARA
1909	RAHMATIA	TOTOLISI
1910	HANAFIA	TOTOLISI TENGAH
1911	UMMI	TOTOLISI UTARA
1912	SITTI AMINA	TOTOLISI UTARA
1913	KAMARIA	TOTOLISI
1914	BAERUTI	TOTOLISI TENGAH
1915	NURMIATI	TOTOLISI TENGAH
1916	HAFSA	TOTOLISI TENGAH
1917	ROSMIATI	TOTOLISI
1918	RAHMANIA	TOTOLISI TENGAH
1919	NURMIAH	TOTOLISI
1920	NURMIAH	TOTOLISI
1921	DARNA	TOTOLISI
1922	SIDRA	TOTOLISI TENGAH
1923	SINA	TOTOLISI UTARA
1924	JERNI	PUTTADA SENDANA
1925	BAHRA	PUTTADA SENDANA
1926	HAUWA	PUTTADA SENDANA
1927	SARIAMAN	PUTTADA SELATAN
1928	SAMIRAH	DUSUN PUTTADA UTARA
1929	ATI	DUSUN PUTTADA
1930	LIPA	PUTTADA SENDANA
1931	SAERA	PUTTADA SENDANA
1932	MASNAH	PUTTADA SENDANA
1933	HASANA	PUTTADA SELATAN
1934	JUBUNG	PUTTADA SELATAN

No	Calon Penerima	Alamat
1935	JUENI	PUTTADA SELATAN
1936	SUBAEDA	DUSUN PUTTADA UTARA
1937	DURIAMIN	PUTTADA SELATAN
1938	HANASIA	PUTTADA SELATAN
1939	HADIYA	PUTTADA SELATAN
1940	SADA	PUTTADA SENDANA
1941	SAIRA	PUTTAOA SELATAN
1942	FATMAWATI	LINGK SASENDE
1943	NURSAM	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1944	KASMIATI	LINGKUNGAN SASENDE
1945	HAMISA	LOTTANG
1946	DJULIPA	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1947	ANDI IDA MALAWATI	LINGK MALUNDA
1948	SALBIA	LINGKUNGA SASENDE DHUA
1949	JASMIA	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1950	NURAENI	LINGKUNGAN PUCCAOWA
1951	HALAMIA	LINGK SASENDE
1952	ST AMINAH	LINGK SASENDE
1953	SUHRA	LINGK SASENDE
1954	NURMIA	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1955	ARNIANTI	LINGK SASENDE
1956	MASTURA	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1957	CICCI	BANUA
1958	SARI BULAN	GALUNG
1959	SURUMIA	LINGKUNGAN KAREWACA
1960	NURAENI	LOTTANG
1961	SALMA	LINGKUNGAN PUCCAOWA
1962	NURMI	BANUA
1963	SUBAEDAH	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1964	HASRIANI	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1965	JUHARIAH	LINGK MALUNDA
1966	NURLINAH	LOTTANG
1967	SAMSI	BANUA
1968	NUR ALAM	LINGK SASENDE
1969	JIPRIANI	LINGKUNGAN SASENDE DHUA
1970	NAISA	LINGKUNGAN KAREWACA
1971	MASARIA	DUSUN LEMO-LEMO
1972	HADIJA	DUSUN LEMO-LEMO
1973	JUMAATI	DUSUN SALUBANGA
1974	NURU	DUSUN SALUBANGA
1975	IJA	DUSUN SALUBANGA
1976	ST HAPIAH	BATUSITUTTU
1977	WATI	DUSUN SEPPONG
1978	MADARIA	DUSUN LEMO-LEMO

No	Calon Penerima	Alamat
1979	NANNI	DUSUN MAKOLA
1980	HASIAH	DUSUN LEMO-LEMO
1981	RANI	DUSUN MAKOLA
1982	HAYANA	BATUSITUTTU
1983	TAHANA	DUSUN KALO'BANG
1984	MASDALIAH	DUSUN LEMO-LEMO
1985	DASIA	DUSUN KALO'BANG
1986	HALIMINA	BATUSITUTTU
1987	ICCI BUBA	DUSUN SALUBANGA
1988	SANA	DUSUN SEPPONG
1989	BAHRA	DUSUN LEMO-LEMO
1990	MARDAWIAH	DUSUN MAKOLA
1991	KAMBOLANG	BATUSITUTTU
1992	LATTANG	DUSUN MAKOLA
1993	HASRIATI	DUSUN KALAU SU
1994	JATIA	DUSUN MAKOLA
1995	HARTINA	DUSUN SEPPONG
1996	HADISA	BATUSITUTTU
1997	HALIAH	DUSUN MAKOLA
1998	ANTI	DUSUN BA, BALOMBI
1999	DAHLIA	POPENGA
2000	JAHARIA	PEBARUGAAN
2001	JANISA	POLLAU
2002	HAJA	TANETE
2003	FITRIANI	UREKANG
2004	SUNARTI	POPENGA
2005	SITTI RIMI	UREKANG
2006	RUKIAH	DUSUN
2007	SAHARIA	POPENGA
2008	MASARIAH	POPENGA
2009	CIKAL PUTRI ANGGI SANTI	BATANG NATO
2010	NAJARIA	UREKANG
2011	JUBARIA	POPENGA
2012	ST HANING	UREKANG
2013	MAYA SARTIKA	UREKANG
2014	BIA	DUSUN BA, BALOMBI
2015	HAJA	BATANG NATO
2016	RABIAH	UREKANG
2017	NAPISA	POPENGA
2018	ANI	UREKANG
2019	ARDAWIAH	UREKANG
2020	NUR NITA	POPENGA
2021	TASAMMENG	POPENGA
2022	ARBIA	UREKANG

No	Calon Penerima	Alamat
2023	HADANIA	UREKANG
2024	FATMAWATI	BATANG NATO
2025	HANIA	DUSUN BA,BALOMBI
2026	MARDIANA	DUSUN BA,BALOMBI
2027	MEGAWATI	UREKANG
2028	JASIA	POPENGA
2029	NAIMINA	UREKANG
2030	JAMINA	UREKANG
2031	SANTI	DUSUN SULAI
2032	KASMAWATI	DUSUN SULAI SELATAN
2033	HADANI	KASAMBI
2034	IRAWATI	DUSUN KASAMBI
2035	BOMBI	DUSUN PARRIHUANG
2036	ST BARU	DUSUN SULAI
2037	RASNAWATI	DUSUN SULAI
2038	ANDIAMELIA	DUSUN PARRIHUANG
2039	ODI	DUSUN KASAMBI
2040	NURISSA	DUSUN KASAMBI
2041	SUHURIA	SULAI UTARA
2042	MISA	SULAI UTARA
2043	RAHMADINA	DUSUN BATU LOTONG
2044	TANARIA	BATU LOTONG
2045	SITTIJA	BATUTAKU
2046	MASNAH	BATUTAKU UDZUN
2047	NAJAMIA	SUMAKUYU
2048	KARNIATI	SUMAKUYU
2049	NAJA	LABUANG PARABAYA
2050	NURJAMIAH	DUSUN BATUMETTO'DO
2051	SATIMANI	BATUMETTODD
2052	RUHANIA	PANGOPPO
2053	NURHAYATI	PANGOPPO
2054	DELMI	BATUMETTODD
2055	SULEHA	BATUMETTODD
2056	MURNI	PANGOPPO
2057	NURA	SUMAKUYU
2058	SUHAENI	BATUTAKU UDZUN
2059	JUSRIA	PANGOPPO
2060	MARDA	BATUTAKU
2061	HERNAWATI	SUMAKUYU
2062	HADIJA	BATTALLOPI
2063	BAHARIA	PANGOPPO
2064	SAWIAH	BATUTAKU
2065	LISNAWATI	BATTALLOPI
2066	BAJIA	BATUTAKU UDZUN

No	Calon Penerima	Alamat
2067	JASLIA	BATUTAKU
2068	SABANIA	SUMAKUYU
2069	HASNA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2070	RUDI F	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2071	RASDIAH ARAS	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2072	HUSNIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2073	HERNIANTI AMIR	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2074	MUSYRIFA SAHRA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2075	NURMIATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2076	SUMARNI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2077	DARMAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2078	DARMAYANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2079	NUKMAN BAHARUDDIN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2080	ANTI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2081	JAHARIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2082	ANIANTI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2083	ST. HASBIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2084	ERNINDA HASAN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2085	M. SALEH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2086	IRASANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2087	HANA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2088	IRMAYANTI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2089	DIAH SETIAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2090	RIANDI AFANDI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2091	MUNAWARAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2092	NURHIDAYA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2093	ZAENAL RUSLAN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2094	NURALIYAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2095	MUKSIN. S	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2096	HAMDAN NUR	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2097	ENDANG HERLINA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2098	RAHMI ARIFIN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2099	MUSTARI.L	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2100	HERAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2101	DAHRI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2102	RISMA ANNGAR KUSUMA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2103	MARIAMA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2104	NURMI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2105	NURHAYATI ARAS	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2106	SAMSUADI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2107	SURIANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2108	RESKI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2109	SURIANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2110	FATMAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2111	ERNAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2112	FITRIANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2113	MARDIANA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2114	ROSNi HANDAYANI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2115	KIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2116	MASTURA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2117	FATIMAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2118	NUR ARIDA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2119	MASNAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2120	NURDIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2121	WAHYUNI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2122	HAWADIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2123	SURIATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2124	ASMA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2125	ROSDIANA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2126	SITTI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2127	MASNAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2128	NURDIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2129	WAHYUNI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2130	HAWADIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2131	SURIATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2132	ASMA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2133	ROSDIANA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2134	SITTI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2135	DAMOTIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2136	INA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2137	SARIATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2138	BUSMAN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2139	NURDIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2140	WAHYUDI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2141	SAMSUL	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2142	NURBAETI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2143	ABD. RAHMAN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2144	ABDUL LATIF	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2145	NURSIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2146	MISNAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2147	RAHMA EKAWATI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2148	HALMIA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2149	SAPIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2150	HERLINA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2151	NURMA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2152	RISMA FARHANA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2153	SARIBANONG	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2154	HADIJAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2155	ST. HALAWIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2156	BAHAR SYAM	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2157	HARLINA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2158	RUHAYA	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2159	HAERIAH	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2160	MUHAMMAD AMIN	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2161	RANDI AFANDI	KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2162	WIWI SRI WULANDARI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2163	HIKMA FAJRIANI SANI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2164	SAMIA	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2165	SUMARNI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2166	WULANDARI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2167	UMIRA	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2168	NAWIRA AHMAD	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2169	MAS'UD	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2170	WAHYU HARDINI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2171	HERIANI, HZ	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2172	RITA DAMRI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2173	IDA NURSANTI	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2174	KARLINA	DESA SUGIWARAS KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2175	HIKMAWATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2176	ST. NURHAYATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2177	PIA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2178	AMELIA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2179	BAENA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2180	SALMAWATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2181	INTAN	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2182	ROSDIANA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2183	HERNI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2184	SRI HIDAYATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2185	ASNA. S	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2186	MUTMAINNA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2187	HUSBANIAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2188	AMALIAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2189	JUMRIAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2190	DARMAWATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2191	ST. RUBAEDA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2192	MAHARANI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2193	SITTI ISA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2194	SUKRIANI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2195	MURNI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2196	DARMAWATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2197	M. NASIR	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2198	MUSTARI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2199	ERNAWATI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2200	HASIA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2201	NURBAYA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2202	HUSNIYANTI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2203	HAMRIANI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2204	RIDWAN NASIR	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2205	BERLIAN NASIR	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2206	MUHAMMAD	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2207	MUHAMMAD ALI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2208	JAMALUDDIN	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2209	MUSRAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2210	SARTIKA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2211	S. AGILAL AZUZ	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2212	MUSDALIFAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2213	SYARIFAH NURAENI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2214	FITRIANI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2215	MUHAMMAD AZHAR	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2216	SAPPE	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2217	SUMARNI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2218	MASNI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2219	MASTURI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2220	HUSNAH	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2221	HASNI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2222	HASMIA	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2223	NURDIN	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2224	SAMARUDDIN	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2225	ST. ONANG	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2226	BUNGA ROSI	DESA BANUA BARU KEC . WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2227	MESRAN	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2228	WAGINO	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2229	WIDIAWATI	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2230	TENI WIJAYAMTI	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2231	MARYAM	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2232	ARI SETIAWAN	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2233	MARYAM	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2234	ARIANA	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2235	ERNAWATI	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2236	MULIATI	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2237	ELLY ANWAR	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2238	MARWAH	DESA SUMBERJO KEC.WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2239	ARIPUDDIN	BAKKA-BAKKA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2240	ABDULLAH	BAKKA-BAKKA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2241	NAHMAD	BAKKA-BAKKA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2242	NURZHRANI	BAKKA-BAKKA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2243	ARHAM	BAKKA-BAKKA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2244	DWYNINGRUM IRAWAN MADUARA	BUMI AYU KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2245	ALIMUDDIN	MAPILLI KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2246	ABD. SALAM	DUSUN BONRA KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2247	RATNAWATI	DUSUN II UGI BARU KEC. WONOMULYO PROVINSI SULAWESI BARAT
2248	FATMAWATI	DESA TONRO LIMA KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2249	SATRIANA	DESA TONRO LIMA KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2250	RASDAWATI	DESA TONRO LIMA KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2251	ARIFUDDIN	DESA TONRO LIMA KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2252	MUHAMMAD ZULKIPLI HAMID	KEL. MADATTE KEC. POLEWALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2253	NORMA	KEL. WATTANG KEC. POLEWALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2254	RAHMA	KEL. WATTANG KEC. POLEWALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2255	IRMA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2256	JUSNI	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2257	LINANG	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2258	MINA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Calon Penerima	Alamat
2259	MUH. ILHAM	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2260	MUSTAJAB	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2261	ABD. HASYIM. H	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2262	NURHANA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2263	SITTI AISYAH	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2264	NURHAYATI	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2265	RAHMANIA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2266	RAISA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2267	NURMIA	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2268	RUMINAH	BARUMBUNG KEC. MATAKALI PROVINSI SULAWESI BARAT
2269	DEBORA BOSE	Desa Bubun Batu Kec. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
2270	LEVINA LOLA	Desa Tawalian Kec. Tawalian Provinsi Sulawesi Barat
2271	KAIDAH	Desa Bubun Batu Kec. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
2272	DIRMAWANTO	Desa Minanga Kec. Bambang Provinsi Sulawesi Barat
2273	HARIYONO	Desa Minanga Kec. Bambang Provinsi Sulawesi Barat

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**